



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GEMERLAMO COMA

PERATURAN DAERAH PROV. SULSEL
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018 - 2023



(PERUBAHAN)

RPJMD

2018-2023



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini serta sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan . . .

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan;
 - g. BAB VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - h. BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - i. BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - j. BAB X Penutup.

(4) Isi . . .

- (4) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahun 2021 yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

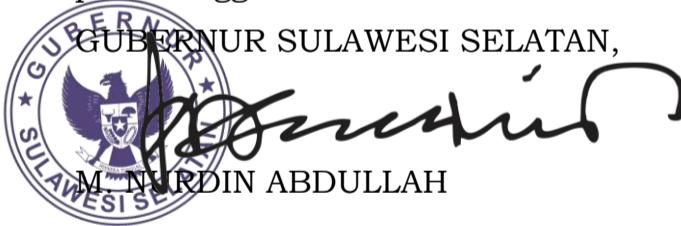
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 8 Februari 2021



Diundangkan di Makassar

pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (1-34/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHU 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah “*Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter*”. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, mencakup:

1. Penyesuaian . . .

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Program Prioritas dan kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 314

Daftar Isi

| | |
|--|--------------|
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-3 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I-6 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I-9 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | I-10 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN | II-1 |
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... | II-1 |
| 2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan..... | II-1 |
| 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah | II-7 |
| 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana | II-11 |
| 2.1.4 Kondisi Demografi..... | II-15 |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-18 |
| 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II-18 |
| 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi | II-18 |
| 2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan | II-25 |
| 2.2.1.3 PDRB Perkapita..... | II-28 |
| 2.2.1.4 Rasio Gini | II-31 |
| 2.2.1.5 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | II-31 |
| 2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial | II-32 |
| 2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka..... | II-32 |
| 2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia..... | II-33 |
| 2.2.2.3 Indeks Pendidikan | II-35 |
| 2.2.2.4 Indeks Kesehatan | II-37 |
| 2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | II-39 |
| 2.2.2.6 Indeks Reformasi Birokrasi..... | II-41 |
| 2.2.2.7 Nilai SAKIP..... | II-41 |
| 2.2.2.8 Indeks Pelayanan Publik..... | II-42 |
| 2.2.2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | II-43 |
| 2.2.2.10 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) . | II-43 |
| 2.3. Aspek Pelayanan Umum..... | II-45 |
| 2.3.1 Pelayanan Dasar | II-45 |
| 2.3.1.1 Pendidikan..... | II-45 |
| 2.3.1.2 Kesehatan..... | II-54 |
| 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II-75 |
| 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | II-82 |
| 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | II-86 |
| 2.3.1.6 Sosial | II-89 |
| 2.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar | II-94 |
| 2.3.2.1 Tenaga Kerja..... | II-94 |
| 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... | II-103 |
| 2.3.2.3 Pangan | II-107 |
| 2.3.2.4 Lingkungan Hidup..... | II-109 |
| 2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil..... | II-111 |
| 2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-114 |
| 2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. | II-117 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|---|---|---------------|
| 2.3.2.8 | Perhubungan | II-126 |
| 2.3.2.9 | Komunikasi dan Infromatika..... | II-131 |
| 2.3.2.10 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..... | II-132 |
| 2.3.2.11 | Penanaman Modal dan Investasi | II-135 |
| 2.3.2.12 | Kepemudaan dan Olahraga | II-137 |
| 2.3.2.13 | Statistik | II-140 |
| 2.3.3 | Layanan Urusan Pilihan | II-141 |
| 2.3.3.1 | Pariwisata | II-141 |
| 2.3.3.2 | Pertanian | II-146 |
| 2.3.3.3 | Kehutanan..... | II-155 |
| 2.3.3.4 | Energi dan Sumber Daya Mineral | II-161 |
| 2.3.3.5 | Perdagangan..... | II-165 |
| 2.3.3.6 | Perindustrian | II-167 |
| 2.3.3.7 | Kelautan dan Perikanan..... | II-169 |
| 2.3.4 | Penunjang Urusan | II-182 |
| 2.3.4.1 | Perencanaan Pembangunan | II-182 |
| 2.3.4.2 | Keuangan..... | II-185 |
| 2.3.4.3 | Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan | II-189 |
| 2.3.4.4 | Penelitian dan Pengembangan | II-193 |
| 2.3.4.5 | Pengawasan | II-194 |
| 2.3.4.6 | Sekretariat Dewan | II-196 |
| 2.4. | Aspek Daya Saing | II-196 |
| 2.4.1 | Indeks Layanan Infrastruktur..... | II-196 |
| 2.4.2 | Produktivitas Total Daerah..... | II-198 |
| 2.5. | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 -2019 | II-199 |
| 2.6. | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) | II-230 |
| 2.7. | Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 | II-232 |
| BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-1 | |
| 3.1. | Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-2 |
| 3.1.1 | Kinerja Pelaksanaan APBD | III-2 |
| 3.1.1.1 | Pendapatan Daerah | III-2 |
| 3.1.1.2 | Belanja Daerah | III-18 |
| 3.1.1.3 | Pembentukan Daerah | III-20 |
| 3.1.2 | Neraca Daerah | III-22 |
| 3.1.2.1 | Aset | III-24 |
| 3.1.2.2 | Kewajiban | III-24 |
| 3.1.2.3 | Ekuitas Dana..... | III-25 |
| 3.1.2.4 | Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) | III-25 |
| 3.2. | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-27 |
| 3.2.1 | Proporsi Penggunaan Anggaran | III-29 |
| 3.2.2 | Analisis Pembentukan | III-29 |
| 3.3. | Kerangka Pendanaan | III-30 |
| 3.3.1. | Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal | III-31 |
| 3.3.2. | Proyeksi Pendapatan dan Belanja | III-33 |
| 3.3.3. | Perhitungan Kerangka Pendanaan..... | III-40 |
| 3.4. | Dampak Pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020 | III-42 |
| 3.5. | Pembentukan Pembangunan Daerah Non Pemerintah..... | III-43 |
| 3.6. | Proyeksi Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi Selatan | III-51 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|--|--------------|
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH | IV-1 |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah | IV-1 |
| 4.1.1 Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | IV-2 |
| 4.1.2 Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan | IV-2 |
| 4.1.3 Masih Tingginya Tingkat Pengangguran | IV-3 |
| 4.1.4 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi..... | IV-3 |
| 4.1.5 Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat .. | IV-4 |
| 4.1.6 Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal | IV-5 |
| 4.1.7 Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah | IV-5 |
| 4.1.8 Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkela | |
| jutan | IV-6 |
| 4.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) | IV-13 |
| 4.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar | IV-13 |
| 4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | IV-14 |
| 4.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan..... | IV-18 |
| 4.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan | IV-22 |
| 4.3 Isu Strategis | IV-23 |
| 4.3.1 Isu Strategis Global | IV-24 |
| 4.3.1.1 Pandemi Covid-19 | IV-24 |
| 4.3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkela | |
| jutan/Sustainable Development Goals (SDG's) | IV-24 |
| 4.3.1.3 Perubahan Iklim | IV-25 |
| 4.3.1.4 Transformasi Digital..... | IV-26 |
| 4.3.2 Isu Strategis Nasional | IV-28 |
| 4.3.2.1 Standar Pelayanan Minimal | IV-28 |
| 4.3.2.2 Isu Strategis Daerah..... | IV-29 |
| 4.3.2.3 Bonus Demografi..... | IV-29 |
| BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN | V-1 |
| 5.1 Visi..... | V-1 |
| 5.2 Misi..... | V-2 |
| 5.3 Tujuan dan Sasaran..... | V-4 |
| BAB VI ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI SELATAN | VI-1 |
| 6.1 Arahan Nasional Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan | VI-1 |
| 6.1.1 Kawasan Pembangunan Makassar | VI-7 |
| 6.1.2 Kawasan Pembangunan Bulukumba | VI-12 |
| 6.1.3 Kawasan Pembangunan Watampone..... | VI-14 |
| 6.1.4 Kawasan Pembangunan Parepare | VI-16 |
| 6.1.5 Kawasan Pembangunan Palopo | VI-18 |
| 6.2 Kerangka Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan | VI-19 |
| 6.2.1 Kawasan Pembangunan Makassar | VI-23 |
| 6.2.2 Kawasan Pembangunan Bulukumba | VI-25 |
| 6.2.3 Kawasan Pembangunan Watampone..... | VI-28 |
| 6.2.4 Kawasan Pembangunan Parepare | VI-29 |
| 6.2.5 Kawasan Pembangunan Palopo | VI-32 |
| BAB VII STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... | VII-1 |
| 7.1 Strategi | VII-1 |
| 7.2 Arah Kebijakan | VII-14 |
| 7.3 Program Pembangunan Daerah | VII-23 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|---|---------------|
| BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | VIII-1 |
| 8.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan | VIII-1 |
| 8.2 Program Perangkat Daerah | VIII-4 |
| BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | IX-1 |
| 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah | IX-1 |
| 9.1.1 Indikator Kinerja Makro | IX-1 |
| 9.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) | IX-1 |
| 9.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) | IX-4 |
| 9.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) | IX-66 |
| 9.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) | IX-69 |
| BAB X PENUTUP | X-1 |
| 10.1 Pedoman Transisi | X-1 |
| 10.2 Kaidah Pelaksanaan | X-1 |

Daftar Tabel

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel I.1 | Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 | I-7 |
| Tabel I.2 | Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan | I-8 |
| Tabel II.1 | Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 | II-2 |
| Tabel II.2 | Kondisi Kemiringan Lereng di Provinsi Sulawesi Selatan | II-3 |
| Tabel II.3 | Kondisi Ketinggian Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan | II-4 |
| Tabel II.4 | Peta Penggunaan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan | II-6 |
| Tabel II.5 | Luas Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 | II-11 |
| Tabel II.6 | Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 | II-13 |
| Tabel II.7 | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2019 | II-16 |
| Tabel II.8 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, Tahun 2019 | II-16 |
| Tabel II.9 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019 | II-17 |
| Tabel II.10 | Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 | II-19 |
| Tabel II.11 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 | II-19 |
| Tabel II.12 | Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 | II-20 |
| Tabel II.13 | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 | II-21 |
| Tabel II.14 | Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-22 |
| Tabel II.15 | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019 | II-23 |
| Tabel II.16 | Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-24 |
| Tabel II.17 | Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-25 |
| Tabel II.18 | Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-26 |
| Tabel II.19 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-26 |
| Tabel II.20 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-27 |
| Tabel II.21 | Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2015-2019 | II-28 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|-------------|---|-------|
| Tabel II.22 | Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-29 |
| Tabel II.23 | Perbandingan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019..... | II-30 |
| Tabel II.24 | Perbandingan Rasio Gini Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019 | II-31 |
| Tabel II.25 | Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-32 |
| Tabel II.26 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019 | II-32 |
| Tabel II.27 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-33 |
| Tabel II.28 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019 | II-34 |
| Tabel II.29 | Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-36 |
| Tabel II.30 | Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019..... | II-36 |
| Tabel II.31 | Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019..... | II-37 |
| Tabel II.32 | Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019..... | II-38 |
| Tabel II.33 | Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, Tahun 2019 | II-40 |
| Tabel II.34 | Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 | II-41 |
| Tabel II.35 | Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), TAHUN 2018-2019..... | II-42 |
| Tabel II.36 | Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-42 |
| Tabel II.37 | Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019 | II-43 |
| Tabel II.38 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-43 |
| Tabel II.39 | Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Tahun 2015-2019 | II-44 |
| Tabel II.40 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi pada Wilayah Regional Sulawesi dan Nasional Tahun 2015 – 2019..... | II-45 |
| Tabel II.41 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019..... | II-46 |
| Tabel II.42 | Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 | II-47 |
| Tabel II.43 | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-47 |
| Tabel II.44 | Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-48 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel II.45 | Angka Putus Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-49 |
| Table II.46 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-49 |
| Tabel II.47 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-49 |
| Tabel II.48 | Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019..... | II-50 |
| Tabel II.49 | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-51 |
| Tabel II.50 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 -64 Tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-51 |
| Tabel II.51 | Perkembangan Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas pendidikan SMA/ SMK di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019..... | II-52 |
| Tabel II.52 | Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Sisabilitas Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019..... | II-52 |
| Tabel II.53 | Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019..... | II-53 |
| Tabel II.54 | Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019 | II-53 |
| Tabel II.55 | Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019 | II-53 |
| Tabel II.56 | Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-54 |
| Tabel II.57 | Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-54 |
| Tabel II.58 | Angka Kematian Neonatal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-55 |
| Tabel II.59 | Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-55 |
| Tabel II.60 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-56 |
| Tabel II.61 | Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-56 |
| Tabel II.62 | Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk Jumlah dan rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019..... | II-57 |
| Tabel II.63 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-58 |
| Tabel II.64 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-59 |
| Tabel II.65 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-59 |
| Tabel II.66 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-60 |
| Tabel II.67 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-60 |
| Tabel II.68 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-62 |
| Tabel II.69 | Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-62 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|-------------|---|-------|
| Tabel II.70 | Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-63 |
| Tabel II.71 | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-63 |
| Tabel II.72 | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-64 |
| Tabel II.73 | Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-64 |
| Tabel II.74 | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-65 |
| Tabel II.75 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-65 |
| Tabel II.76 | Angka Kejadian Malaria Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-66 |
| Tabel II.77 | Pendertia Malaria yang Diobati dengan ACT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-67 |
| Tabel II.78 | Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 ... | II-67 |
| Tabel II.79 | Prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-68 |
| Tabel II.80 | Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-69 |
| Tabel II.81 | Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-69 |
| Tabel II.82 | Cakupan Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-70 |
| Tabel II.83 | Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-70 |
| Tabel II.84 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-71 |
| Tabel II.85 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-71 |
| Tabel II.86 | Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-72 |
| Tabel II.87 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-73 |
| Tabel II.88 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-73 |
| Tabel II.89 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-73 |
| Tabel II.90 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS) di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-74 |
| Tabel II.91 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-74 |
| Tabel II.92 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-75 |
| Tabel II.93 | Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-76 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|--------------|--|-------|
| Tabel II.94 | Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 ... | II-76 |
| Tabel II.95 | Sempadan Jalan dipakai pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-77 |
| Tabel II.96 | Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-77 |
| Tabel II.97 | Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019..... | II-78 |
| Tabel II.98 | Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-79 |
| Tabel II.99 | Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan | II-79 |
| Tabel II.100 | Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-80 |
| Tabel II.101 | Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019..... | II-80 |
| Tabel II.102 | Rasio Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-81 |
| Tabel II.103 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-82 |
| Tabel II.104 | Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-83 |
| Tabel II.105 | Lingkungan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-83 |
| Tabel II.106 | Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-84 |
| Tabel II.107 | Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020 | II-84 |
| Tabel II.108 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-87 |
| Tabel II.109 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan(K3) Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-88 |
| Tabel II.110 | Persentase Penegakan PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-89 |
| Tabel II.111 | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-89 |
| Tabel II.112 | Persentase PMKS yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-90 |
| Tabel II.113 | Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-91 |
| Tabel II.114 | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-91 |
| Tabel II.115 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-92 |
| Tabel II.116 | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-93 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|--|--------|
| Tabel II.117 Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-94 |
| Tabel II.118 Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-95 |
| Tabel II.119 Rasio penduduk yang bekerja Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-95 |
| Tabel II.120 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-96 |
| Tabel II.121 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-96 |
| Tabel II.122 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-97 |
| Tabel II.123 Keselamatan dan Perlindungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-98 |
| Tabel II.124 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-98 |
| Tabel II.125 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-99 |
| Tabel II.126 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-99 |
| Tabel II.127 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-100 |
| Tabel II.128 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-100 |
| Tabel II.129 Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-101 |
| Tabel II.130 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-101 |
| Tabel II.131 Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-102 |
| Tabel II.132 Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-102 |
| Tabel II.133 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-103 |
| Tabel II.134 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-104 |
| Tabel II.135 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-104 |
| Tabel II.136 Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-104 |
| Tabel II.137 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-105 |
| Tabel II.138 Cakupan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.... | II-105 |
| Tabel II.139 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-106 |
| Tabel II.140 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/ SMP/SMA/Perguruan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-106 |
| Tabel II.141 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun | II-107 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|---|--------|
| Tabel II.142 Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan dan Pembinaan Kemanana Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-107 |
| Tabel II.143 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-108 |
| Tabel II.144 Sebaran Kerawanan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 | II-108 |
| Tabel II.145 Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-110 |
| Tabel II.146 Sampah Perkotaan yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-111 |
| Tabel II.147 Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-111 |
| Tabel II.148 Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-112 |
| Tabel II.149 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-112 |
| Tabel II.150 Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-113 |
| Tabel II.151 Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-114 |
| Tabel II.152 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-114 |
| Tabel II.153 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-115 |
| Tabel II.154 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-116 |
| Tabel II.155 Persentase LPM Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-116 |
| Tabel II.156 Persentase PKK Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-117 |
| Tabel II.157 Jumlah Posyandu Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-117 |
| Tabel II.158 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-118 |
| Tabel II.159 Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-119 |
| Tabel II.160 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-119 |
| Tabel II.161 Ratio Akseptor KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-120 |
| Tabel II.162 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-120 |
| Tabel II.163 Cakupan PUS Unmet Need Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-121 |
| Tabel II.164 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-121 |
| Tabel II.165 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-122 |
| Tabel II.166 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-122 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|--|--------|
| Tabel II.167 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-123 |
| Tabel II.168 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-123 |
| Tabel II.169 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-124 |
| Tabel II.170 Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber KB Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-124 |
| Tabel II.171 Rasio PPKBD per Desa/Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-125 |
| Tabel II.172 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-125 |
| Tabel II.173 Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-126 |
| Tabel II.174 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-126 |
| Tabel II.175 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-127 |
| Tabel II.176 Rasio Ijin Trayek Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019... | II-127 |
| Tabel II.177 Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-128 |
| Tabel II.178 Hirarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017 | II-128 |
| Tabel II.179 Jumlah Halte BRT Kawasan Perkotaan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-131 |
| Tabel II.180 Jumlah Barang Terangkut Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-131 |
| Tabel II.181 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-132 |
| Tabel II.182 Persentase Koperasi Aktif Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019 | II-133 |
| Tabel II.183 Data Jumlah Koperasi per Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019 | II-133 |
| Tabel II.184 Presentase Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-134 |
| Tabel II.185 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-135 |
| Tabel II.186 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PDMDN/PMA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-136 |
| Tabel II.187 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-136 |
| Tabel II.188 Nilai Realisasi PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-137 |
| Tabel II.189 Jumlah Prestasi Olahraga dan Atlet Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-139 |
| Tabel II.190 Data dan Statistik yang Terintegritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-140 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|---|--------|
| Tabel II.191 Ketersediaan Buku Kabupaten dalam Angka Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-141 |
| Tabel II.192 Buku PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-141 |
| Tabel II.193 Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-142 |
| Tabel II.194 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-143 |
| Tabel II.195 Lama Kunjungan Wisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-144 |
| Tabel II.196 Potensi Destinasi Wisata di kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun tahun 2019 | II-144 |
| Tabel II.197 PAD Sektor Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-146 |
| Tabel II.198 Perkembangan Lahan Pertanian Pangan di Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-147 |
| Tabel II.199 Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Tanaman Pangan Terhadap PDRB dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-148 |
| Tabel II.200 Luas Lahan Sawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019..... | II-149 |
| Tabel II.201 Luas Lahan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-150 |
| Tabel II.202 Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-151 |
| Tabel II.203 Produktivitas Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-152 |
| Tabel II.204 Populasi Sapi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-152 |
| Tabel II.205 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-154 |
| Tabel II.206 Produksi Kakao Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-155 |
| Tabel II.207 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-156 |
| Tabel II.208 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-157 |
| Tabel II.209 Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-158 |
| Tabel II.210 Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan..... | II-160 |
| Tabel II.211 Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Rasio Ketersediaan Daya Listrik Persentase Pertambangan Tanpa Izin dan Luas Wilayah Pemataan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-161 |
| Tabel II.212 Rasio Ketersedian Daya Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-162 |
| Tabel II.213 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-163 |
| Tabel II.214 Rasio Desa Berlistrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-163 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|---|--------|
| Tabel II.215 Ekspor Bersih Perdagangan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-166 |
| Tabel II.216 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha Informal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-167 |
| Tabel II.217 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-167 |
| Tabel II.218 Pertumbuhan Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-168 |
| Tabel II.219 Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-168 |
| Tabel II.220 Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-169 |
| Tabel II.221 Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-171 |
| Tabel II.222 Konsumsi Ikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019. | II-172 |
| Tabel II.223 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-173 |
| Tabel II.224 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-174 |
| Tabel II.225 Proporsi Tangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-176 |
| Tabel II.226 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-177 |
| Tabel II.227 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-178 |
| Tabel II.228 Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-180 |
| Tabel II.229 Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-181 |
| Tabel II.230 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-182 |
| Tabel II.231 Ketersediaan Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019..... | II-182 |
| Tabel II.232 Ketersediaan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019..... | II-183 |
| Tabel II.233 Ketersediaan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019 | II-183 |
| Tabel II.234 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019 | II-184 |
| Tabel II.235 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-185 |
| Tabel II.236 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020..... | II-186 |
| Tabel II.237 Persentase SILPA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.. | II-186 |
| Tabel II.238 Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-187 |
| Tabel II.239 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-187 |
| Tabel II.240 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-188 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|--|--------|
| Tabel II.241 Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019... | II-188 |
| Tabel II.242 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019..... | II-189 |
| Tabel II.243 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-189 |
| Tabel II.244 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019..... | II-189 |
| Tabel II.245 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-190 |
| Tabel II.246 Jumlah Jabatan Admininstrasi Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-191 |
| Tabel II.247 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-192 |
| Tabel II.248 Pengalihan PNS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 | II-192 |
| Tabel II.249 Persentase implementasi rencana kelitbangam Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019..... | II-193 |
| Tabel II.250 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangam Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019..... | II-193 |
| Tabel II.251 Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019 | II-194 |
| Tabel II.252 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019 | II-194 |
| Tabel II.253 Persentase Tindak Lanjut Temuan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-195 |
| Tabel II.254 Persentase Pelanggaran Pegawai Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-195 |
| Tabel II.255 Jumlah Temuan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015- 2019 | II-196 |
| Tabel II.256 Integrasi Program DPRD dalam Pelaksanaan Tupoksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019..... | II-196 |
| Tabel II.257 Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2019 | II-197 |
| Tabel II.258 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-197 |
| Tabel II.259 Produktifitas Total Daerah Tahun 2016-2019..... | II-198 |
| Tabel II.260 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-198 |
| Tabel II.261 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan..... | II-200 |
| Tabel II.262 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-230 |
| Tabel II.263 Capaian Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019..... | II-234 |
| Tabel III.1 Rata - Rata Pertumbuhan Realiasai Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019..... | III-4 |
| Tabel III.2 Rata - Rata Pertumbuhan Realiasai Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019..... | III-19 |
| Tabel III.3 Rata - Rata Pertumbuhan Realiasai Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019..... | III-21 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|--------------|--|--------|
| Tabel III.4 | Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019..... | III-22 |
| Tabel III.5 | Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 (Dalam Jutaan) | III-25 |
| Tabel III.6 | Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 (Dalam Jutaan) | III-26 |
| Tabel III.7 | Rasio Kas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 (Dalam Jutaan) | III-26 |
| Tabel III.8 | Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2017-2019 | III-27 |
| Tabel III.9 | Rasio Total Kewajiban dengan Aset Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 (Dalam Jutaan) | III-27 |
| Tabel III.10 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019 (Dalam Jutaan) .. | III-29 |
| Tabel III.11 | Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019 (Dalam Jutaan) | III-29 |
| Tabel III.12 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019..... | III-30 |
| Tabel III.13 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019..... | III-30 |
| Tabel III.14 | Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023..... | III-32 |
| Tabel III.15 | Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 (Dalam Jutaan)..... | III-32 |
| Tabel III.16 | Kondisi dan Proyeksi Anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 | III-35 |
| Tabel III.17 | Kondisi dan Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023..... | III-37 |
| Tabel III.18 | Kondisi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023..... | III-39 |
| Tabel III.19 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | III-41 |
| Tabel III.20 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023 | III-42 |
| Tabel III.21 | Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2020-2024..... | III-51 |
| Tabel IV.1 | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | IV-7 |
| Tabel V.1 | Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023..... | V-1 |
| Tabel V.2 | Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023..... | V-2 |
| Tabel V.3 | Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023..... | V-3 |
| Tabel V.4 | Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023..... | V-4 |
| Tabel V.5 | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan | V-6 |
| Tabel V.6 | Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan..... | V-8 |
| Tabel VI.1 | Arahan Struktur dan Pola Ruang Nasional di Sulawesi Selatan.... | VI-2 |
| Tabel VI.2 | Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Sulawesi Selatan..... | VI-5 |
| Tabel VI.3 | Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Makassar | VI-8 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|--------------|---|---------|
| Tabel VI.4 | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 di Kawasan Pembangunan Makassar | VI-11 |
| Tabel VI.5 | Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Bulukumba | VI-13 |
| Tabel VI.6 | Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Watampone | VI-14 |
| Tabel VI.7 | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 di Kawasan Pembangunan Watampone | VI-16 |
| Tabel VI.8 | Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Parepare | VI-16 |
| Tabel VI.9 | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 di Kawasan Pembangunan Parepare | VI-18 |
| Tabel VI.10 | Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Palopo | VI-18 |
| Tabel VI.11 | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 di Kawasan Pembangunan Palopo..... | VI-19 |
| Tabel VI.12 | Arahan Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan | VI-20 |
| Tabel VI.13 | Sasaran Pembangunan Menurut Kawasan di Sulawesi Selatan, Tahun 2023 | VI-22 |
| Tabel VI.14 | Rencana Kebutuhan Investasi Tahun 2023 | VI-23 |
| Tabel VI.15 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Makassar dan Sekitarnya, Tahun 2019-2023..... | VI-24 |
| Tabel VI.16 | Kebutuhan Investasi Kawasan Makassar Tahun 2019-2023..... | VI-25 |
| Tabel VI.17 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Bulukumba dsk, Tahun 2019-2023 | VI-26 |
| Tabel VI.18 | Kebutuhan Investasi Kawasan Bulukumba dsk, Tahun 2019-2023 | VI-27 |
| Tabel VI.19 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Watampone dsk, Tahun 2019-2023..... | VI-28 |
| Tabel VI.20 | Kebutuhan Investasi Kawasan Watampone dsk, Tahun 2019-2023 | VI-29 |
| Tabel VI.21 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Parepare dsk, Tahun 2019-2023..... | VI-30 |
| Tabel VI.22 | Kebutuhan Investasi Kawasan Parepare dsk, Tahun 2019-2023 | VI-31 |
| Tabel VI.23 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Palopo dsk, Tahun 2019-2023..... | VI-33 |
| Tabel VI.24 | Kebutuhan Investasi Kawasan Palopo dsk, Tahun 2019-2023.... | VI-34 |
| Tabel VII.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan..... | VII-13 |
| Tabel VII.2 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2020 (RPJMD Pokok)..... | VII-16 |
| Tabel VII.3 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (RPJMD Perubahan)..... | VII-19 |
| Tabel VII.4 | Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023..... | VII-24 |
| Tabel VII.5 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023 | VII-27 |
| Tabel VIII.1 | Realisasi Tahun 2019-2020 dan Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2023 Provinsi Sulawesi Selatan..... | VIII-2 |
| Tabel VIII.2 | Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Program RPJMD Tahun 2019-2020..... | VIII-5 |
| Tabel VIII.3 | Indikasi Rencana Program yang Di Sertai Kenutuhan Pendanaan Tahun 2021-2023 Provinsi Sulawesi Selatan | VIII-54 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel IX.1 | Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2020-2023 Provinsi Sulawesi Selatan..... | IX-1 |
| Tabel IX.2 | Target Indikator Kinerja Utama 2019-2020 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023..... | IX-2 |
| Tabel IX.3 | Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Sesuai RPJMD Pokok Prov. SulSel Tahun 2018-2023)..... | IX-4 |
| Tabel IX.4 | Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)..... | IX-17 |
| Tabel IX.5 | Target Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2023 (Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020) | IX-48 |
| Tabel IX.6 | Penetapan Target Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 (Permendagri No.100 Tahun 2018) | IX-66 |
| Tabel IX.7 | Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2023..... | IX-70 |

Daftar Gambar

| | | |
|--------------|--|--------|
| Gambar I.1 | Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan | I - 7 |
| Gambar II.1 | Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan | II-1 |
| Gambar II.2 | Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan..... | II-3 |
| Gambar II.3 | Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan..... | II-4 |
| Gambar II.4 | Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan..... | II-5 |
| Gambar II.5 | Peta Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan | II-7 |
| Gambar II.6 | Peta Potensi Komoditi Unggulan Sulawesi Selatan | II-9 |
| Gambar II.7 | Gambar Aplikasi e-planning..... | II-184 |
| Gambar III.1 | Tata Cara Penerbitan Obligasi..... | III-46 |
| Gambar III.2 | Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan..... | III-51 |
| Gambar VI.1 | Peta Arahan Pengembangan Wilayah Sulawesi | VI-6 |
| Gambar VI.2 | Lokasi Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Sulawesi Selatan..... | VI-7 |
| Gambar VI.3 | Arahan Pengembangan Kawasan Pembangunan Makassar..... | VI-24 |
| Gambar VI.4 | Arahan Pengembangan Kawasan Bulukumba..... | VI-26 |
| Gambar VI.5 | Arahan Pengembangan Kawasan Watampone..... | VI-28 |
| Gambar VI.6 | Arahan Pengembangan Kawasan Parepare..... | VI-30 |
| Gambar VI.7 | Arahan Pengembangan Kawasan Pembangunan Palopo | VI-32 |
| Gambar VII.1 | Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020 | VII-15 |

Daftar Grafik

| | | |
|---------------|---|--------|
| Grafik II.1. | Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 | II-19 |
| Grafik II.2. | Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi, Tahun 2019 | II-21 |
| Grafik II.3. | Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 | II-26 |
| Grafik II.4. | Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2019 | II-28 |
| Grafik II.5. | Perbandingan Perubahan PDRB/PDB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2019..... | II-30 |
| Grafik II.6. | Perubahan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019..... | II-31 |
| Grafik II.7. | Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-33 |
| Grafik II.8. | Perbandingan Perubahan IPM Sulawesi Selatan, Nasional dengan Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019 | II-35 |
| Grafik II.9. | Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019..... | II-38 |
| Grafik II.10. | Perbandingan Perubahan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019..... | II-39 |
| Grafik II.11. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019 | II-39 |
| Grafik II.12. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019 | II-40 |
| Grafik II.13. | Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak di Sulawesi Selatan berdasarkan Kategorinya Tahun 2017-2019..... | II-41 |
| Grafik II.14. | Capaian Penurunan Emisi Provinsi Sulawesi Selatan Yahun 2015-2019..... | II-45 |
| Grafik II.15. | Pencapaian UCI Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019..... | II-61 |
| Grafik II.16. | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi..... | II-77 |
| Grafik II.17. | Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelaanjutan..... | II-78 |
| Grafik II.18. | Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar, Tahun 2015-2019..... | II-80 |
| Grafik II.19. | Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi, Tahun 2015-2019..... | II-81 |
| Grafik II.20. | Rasio Jaringan Irigasi, Tahun 2015-2019 | II-82 |
| Grafik II.21. | Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi Tahun 2020..... | II-103 |
| Grafik II.22. | Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019..... | II-109 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|---|--------|
| Grafik II.23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dan Kepemilikan Komputer Pribadi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019 | II-132 |
| Grafik II.24. Persentase Pembinaan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-137 |
| Grafik II.25. Cakupan Pembinaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-138 |
| Grafik II.26. Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019..... | II-159 |
| Grafik II.27. Persentase Perubahan Luas Areal Kawasan Hutan Sesuai Peruntukan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020..... | II-161 |
| Grafik II.28. Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-170 |
| Grafik II.29. Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-172 |
| Grafik II.30. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-174 |
| Grafik II.31. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-175 |
| Grafik II.32. Proporsi Tangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-176 |
| Grafik II.33. Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 | II-177 |
| Grafik II.34. Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..... | II-179 |
| Grafik III.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019..... | III-5 |
| Grafik III.2. Postur Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019..... | III-5 |
| Grafik III.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2019 | III-6 |
| Grafik III.4. Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019 | III-7 |
| Grafik III.5. Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019..... | III-7 |
| Grafik III.6. Postur Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019 | III-8 |
| Grafik III.7. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 | III-8 |
| Grafik III.8. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 | III-9 |
| Grafik III.9. Perkembangan Unit Kendaraan Bermotor Yang Terbayar Pada Layanan Unggulan Samsat se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019..... | III-9 |
| Grafik III.10 Perkembangan Unit Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 | III-9 |
| Grafik III.11 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019..... | III-10 |
| Grafik III.12 Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019..... | III-12 |
| Grafik III.13 Realisasi Pajak Air Permukaan se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 | III-12 |
| Grafik III.14 Realisasi Pajak Rokok Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019..... | III-13 |
| Grafik III.15 Realisasi Retribusi Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 | III-14 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|---|--------|
| Grafik III.16 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019. | III-14 |
| Grafik III.17 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | III-15 |
| Grafik III.18 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil / bagi hasil bukan pajak Tahun 2017-2019..... | III-15 |
| Grafik III.19 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2017-2019 .. | III-16 |
| Grafik III.20 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017-2019. | III-16 |
| Grafik III.21 Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2017-2019 | III-17 |
| Grafik III.22 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019..... | III-17 |
| Grafik III.23 Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019 | III-20 |
| Grafik III.24 Realisasi Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017-2019 | III-22 |

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : a). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c). terjadi perubahan yang mendasar, dan perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya perubahan yang mendasar terkait perubahan RPJMD, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahun periode kepemimpinan bapak **Prof. Dr. Ir H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr** sebagai **Gubernur Sulawesi Selatan** dan **Andi Sudirman Sulaiman, ST** sebagai **Wakil Gubernur Sulawesi Selatan** yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.

Urgensi perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 didasarkan adanya perubahan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, terjadinya Bencana Non-Alam yaitu Pandemi Covid-19 yang memberi imbas negatif pada beberapa aspek kehidupan, meliputi: *Pertama*, aspek kesehatan, dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. *Kedua*, aspek ekonomi, perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan mengalami perlambatan khususnya pada sektor transportasi, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran. *Ketiga*, aspek sosial, berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Keempat, aspek keuangan, menurunnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan perubahan struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain adanya perubahan peraturan perundangan dan pandemi covid 19, perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dipengaruhi juga dengan capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I pada tahun 2020 adalah sebesar 3,07 persen sementara pada triwulan II-2020 terkoreksi pada -3,87 persen, tentunya sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok Tahun 2020 sebesar 7,4-7,8 persen. Pertumbuhan yang minus tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan terutama pada sektor ketenagakerjaan dan perdagangan.

Selanjutnya inflasi Sulawesi Selatan pada Juli Tahun 2020 sebesar 1,80 persen, capaian tersebut masih berada pada kisaran yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2020. Daya beli yang masih terbatas akibat COVID-19 membuat tekanan permintaan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun inflasi cenderung terkendali namun pengaruh COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Terkait kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada Februari 2020 sebesar 6,07 persen, mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2019 yang besarnya 5,42 persen, kondisi tersebut tentunya meleset dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok Tahun 2020 sebesar 4,97persen. Meningkatnya tingkat pengangguran tersebut tidak terlepas dari rendahnya penyerapan tenaga kerja yang ada serta tingginya pangsa pekerja informal di Sulawesi Selatan sebesar 60% dari total pekerja (Sumber BI).

Peningkatan penduduk miskin pada triwulan II Tahun 2020 sebesar 8,72 persen, naik sebesar 0,16 poin dari September 2019 yang sebesar 8,56. Peningkatan kemiskinan tersebut diakibatkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang berdampak pada pembatasan pada aktivitas perekonomian seperti penutupan aktifitas perdagangan dan public, dan memengaruhi pendapatan penduduk.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 juga telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil evaluasi capaian SDGs tahun 2019, jumlah Indikator yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah 235 Indikator Kewenangan Provinsi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 196 Indikator TPB / SDGs. Berdasarkan persentase capaian SDGs pada tahun 2019 pada 17 tujuan SDGs, sebanyak 55 persen telah tercapai, 7 persen akan dicapai, tidak tercapai 14 persen dan sebanyak 24% capaian kosong.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan tahap ke empat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ke empat. Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2018 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
37. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan RPJPD, RPJMD termasuk Perubahan RPJMD, dan RKPD.

Keterkaitan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan dan anggaran lainnya secara vertikal mencakup yaitu penyusunan Perubahan RPJMD ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Keterkaitan secara horizontal mencakup yaitu Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 iniberpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 kemudian dijabarkan kedalam perubahan RENSTRA-PD dan perubahan RKPD dan sebagai acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS, RENJA-PD dan dijadikan dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Selain itu menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota.

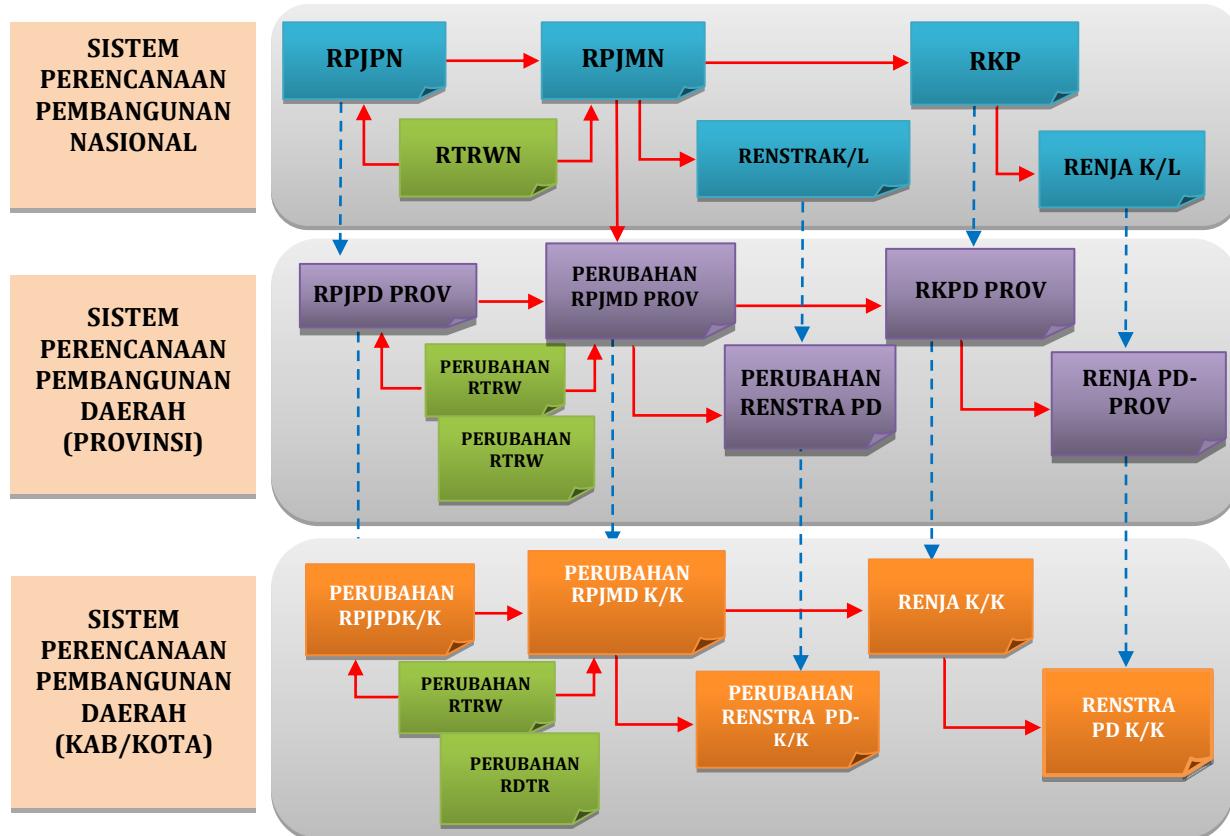
Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 termasuk perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan peraturan daerah sedang kandokumen

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, KUA-PPAS dengan Nota Kesepakatan dan dokumen APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar I.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan**



**Tabel I.1
Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

| Visi Misi. RPJMN 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” | Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter |
|---|--|
| MISI | MISI |
| 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia | 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter |
| 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing | 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif |
| 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan | 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel |
| 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan |
| 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa | 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | |
|---|--|
| Visi Misi. RPJMN 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” | Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter |
| MISI | MISI |
| 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan | |
| 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga | |
| 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya | |
| 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan | |

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan juga memperhatikan dokumen RPJMD provinsi lain yang secara administrasi berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain: Provinsi Sulawesi Barat (RPJMD Tahun 2017-2022), Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Tahun 2016-2021), dan Provinsi Sulawesi Barat (RPJMD Tahun 2018-2023). Sinergitas antara dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan RPJMD lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah antar daerah khususnya keterpaduan pembangunan wilayah lingkup Pulau Sulawesi.

Tabel I.2
Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | Provinsi | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|-----|--------------------------|---------------|--|--|
| 1. | Provinsi Sulawesi Barat | 2017-2022 | Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis melalui konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan dan peningkatan konektivitas yang menghubungkan daerah terpencil; | Peningkatan dan penguatan konektivitas, khususnya pada daerah terpencil yang menghubungkan Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja dan Pinrang sejalan dengan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan pada daerah terpencil; 2. Pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal feri |
| 2. | Provinsi Sulawesi Tengah | 2016-2021 | Prioritas Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang melalui pemerataan pembangunan | Peningkatan dan penguatan konektivitas, khususnya pada daerah terpencil yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara, dan Luwu Timur |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Provinsi | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|-----|----------------------------|---------------|---|--|
| | | | infrastruktur wilayah; | sejalan dengan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu: 1. Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan pada daerah terpencil; 2. Pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal feri. |
| | | | 2. Pemantapan iklim investasi melalui pengembangan kawasan industry dan pembangunan wilayah berbasis kawasan strategis dan transmigrasi; | Pengembangan kawasan industri dan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah terkait dengan kebijakan hilirirasi komoditas Sulawesi Selatan melalui pengembangan komoditas pertanian dan pertambangan |
| 3. | Provinsi Sulawesi Tenggara | 2018-2023 | 3. Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritime serta pariwisata melalui pengembangan agribisnis dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan serta pengelolaan pariwisata. | Pengembangan pariwisata di Sulawesi Tengah diharapkan dapat mendukung kebijakan pengembangan destinasi wisata unggulan khususnya peruntukan pariwisata bahari dan peruntukan ekowisata |
| | | | Pembangunan yang dititik beratkan pada pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur wilayah; | Peningkatan dan penguatan konektivitas, khususnya pada daerah terpencil yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur sejalan dengan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu: 1. Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan pada daerah terpencil; 2. Pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal feri. |

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
6. Menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
7. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.
8. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah; menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah; menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; menguraikan tentang visi dan misi kepada para terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir periode RPJMD ini.

Bab VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan; menyajikan arah kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat evaluasi kewilayahan, analisis kewilayahan dan kebijakan pengembangan wilayah yang merupakan acuan perumusan program prioritas nasional dan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar pada kabupaten/kota dalam jangka menengah.

Bab VII Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah; merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VIII Kerangka Pendanaan PembangunanDan Program Perangkat Daerah; memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab X Penutup; menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah pelaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan

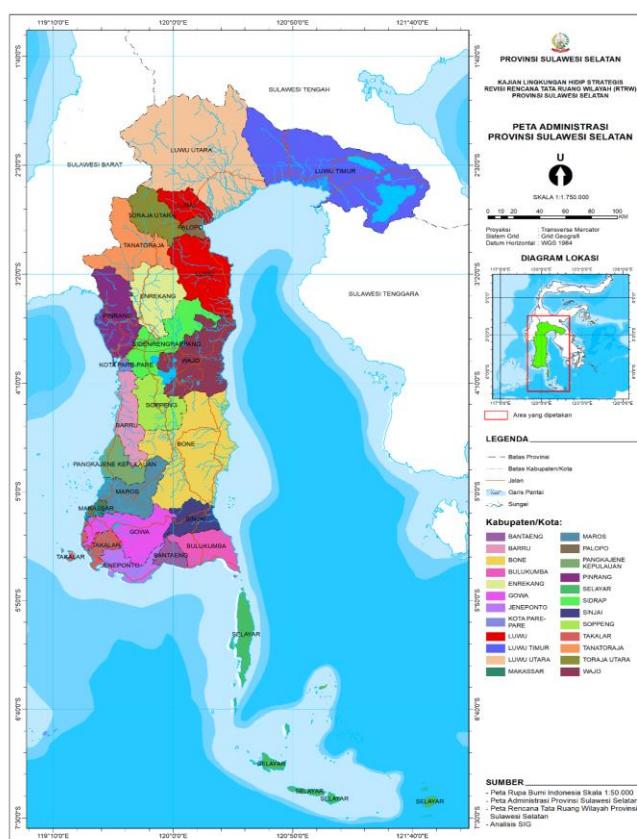
Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung Pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi Sulawesi Selatan secara administratif terdiri dari 21 kabupaten, dan 3 kota serta terdiri dari 307 kecamatan 2.255 desa dan 792 kelurahan.

Secara geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara $0^{\circ}12'$ Lintang Selatan - 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'$ Bujur Timur – $122^{\circ}36'$ Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar

Posisi geografis tersebut secara tidak langsung menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub-distribusi barang dan jasa dari timur ke barat Indonesia, merupakan wilayah perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Jalur ini menjadi salah satu jalur pelayaran internasional dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Gambar II.1
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW
Provinsi Sulawesi Selatan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam rangka persetujuan konsultasi perpetaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang menetapkan luasan wilayah Sulawesi Selatan seluas 4.554.367 Ha. Selengkapnya dicermati pada tabel berikut.

**Tabel II.1.
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| | | Ha | % |
| 1 | Kep. Selayar | 118.240 | 2,60 |
| 2 | Bulukumba | 117.426 | 2,58 |
| 3 | Bantaeng | 39.659 | 0,87 |
| 4 | Jeneponto | 80.117 | 1,76 |
| 5 | Takalar | 55.880 | 1,23 |
| 6 | Gowa | 180.435 | 3,97 |
| 7 | Sinjai | 86.558 | 1,90 |
| 8 | Maros | 144.287 | 3,18 |
| 9 | Pangkep | 89.008 | 1,96 |
| 10 | Barru | 120.386 | 2,65 |
| 11 | Bone | 457.975 | 10,08 |
| 12 | Soppeng | 137.280 | 3,02 |
| 13 | Wajo | 263.488 | 5,80 |
| 14 | Sidrap | 176.320 | 3,88 |
| 15 | Pinrang | 188.237 | 4,14 |
| 16 | Enrekang | 184.749 | 4,07 |
| 17 | Luwu | 305.143 | 6,71 |
| 18 | Tana Toraja | 209.187 | 4,60 |
| 19 | Luwu Utara | 740.246 | 16,29 |
| 20 | Luwu Timur | 680.589 | 14,98 |
| 21 | Toraja Utara | 116.885 | 2,57 |
| 22 | Makassar | 17.437 | 0,38 |
| 23 | Pare Pare | 9.777 | 0,22 |
| 24 | Palopo | 25.059 | 0,55 |
| Sulawesi Selatan | | 4.554.367 | 100 |

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan luasan sebesar 740.246 Ha atau sebesar 16,29 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan luasan sebesar 9.777 Ha atau 0,22 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat ketimpangan luas wilayah antar kabupaten dan kota, dimana 3 kabupaten terluas setara dengan 18 kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah terkecil.

Keseluruhan luasan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan kabupaten/kota tersebut memiliki topografi yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Kondisi topografi Sulawesi Selatan dibagi berdasarkan kondisi kemiringan lahan atau kondisi kelerengan dan kondisi ketinggian lahan.

Berdasarkan kondisi kelerengan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 6 (enam) kelas kelerengan yang didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0 – 2 persen dan 15 – 30 persen dengan luas wilayah mencapai 56,32 persen. Sedangkan kelas kelerengan dengan luas wilayah terkecil adalah lahan dengan kemiringan lereng

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

30 -40 persen dan kemiringan lereng di atas 40 persen dengan luasan sebesar 12,3 persen dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

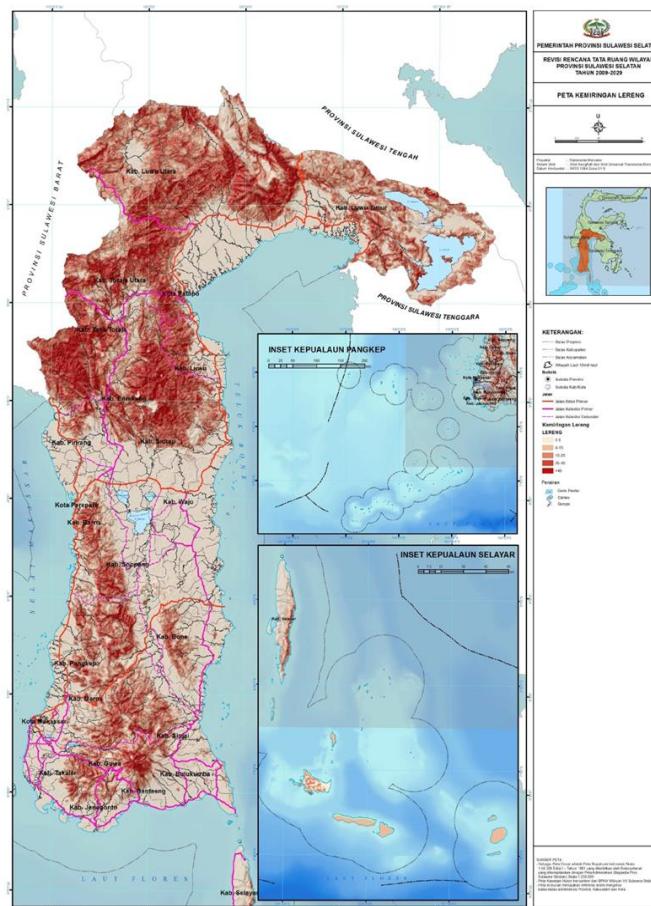
**Tabel II.2.
Kondisi Kemiringan Lereng di Provinsi Sulawesi Selatan**

| No. | Kemiringan Lereng (%) | Luas Wilayah | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| | | Ha | % |
| 1 | 0 – 2% | 1.330.065 | 29,27 |
| 2 | 2 – 5% | 406.193 | 8,94 |
| 3 | 5 – 15% | 1.019.916 | 22,44 |
| 4 | 15 – 30% | 1.229.224 | 27,05 |
| 5 | 30 -40% | 264.084 | 5,81 |
| 6 | > 40% | 294.885 | 6,49 |
| Sulawesi Selatan | | 4.554.367 | 100 |

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan

Distribusi kemiringan lereng wilayah Sulawesi Selatan ini menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan potensial untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya. Secara umum distribusi kemiringan lereng terlihat pada gambar berikut.

**Gambar II.2
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Dokumen Fakta dan Analisis Revisi RTRWP
Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl dan 300 – 500 mdpl dengan luasan mencapai 59,37 persen. Wilayah dengan ketinggian lahan diatas 2000 mdpl hanya mencapai 3,34 persen dari total luas wilayah Sulawesi Selatan, selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

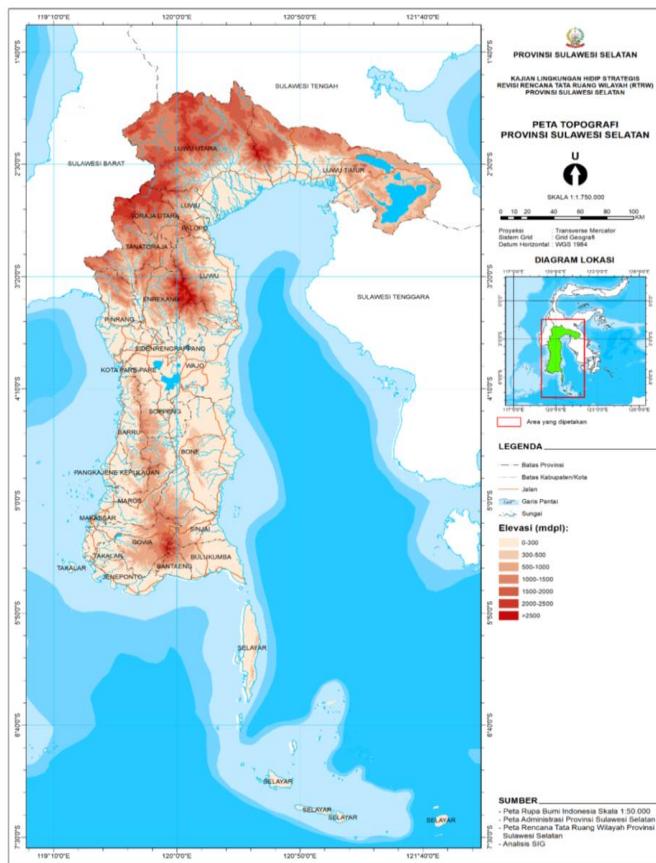
Tabel II.3.
Kondisi Ketinggian Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | Ketinggian Lahan (mdpl) | Luas Wilayah | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| | | Ha | % |
| 1 | 0 -300 | 2.176.517 | 47,89 |
| 2 | 300 - 500 | 521.674 | 11,48 |
| 3 | 500 - 1000 | 759.588 | 16,71 |
| 4 | 1000 -1500 | 574.748 | 12,65 |
| 5 | 1500 - 2000 | 355.551 | 7,82 |
| 6 | 2000 - 2500 | 135.689 | 2,99 |
| 7 | > 2500 | 20.600 | 0,45 |
| Sulawesi Selatan | | 4.554.367 | 100 |

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan

Sebaran distribusi ketinggian lahan menggambarkan potensi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan berbagai komoditas berbasis sumberdaya alam. Sebaran elevasi/ketinggian wilayah Sulawesi Selatan selengkapnya pada gambar berikut.

Gambar II.3
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan

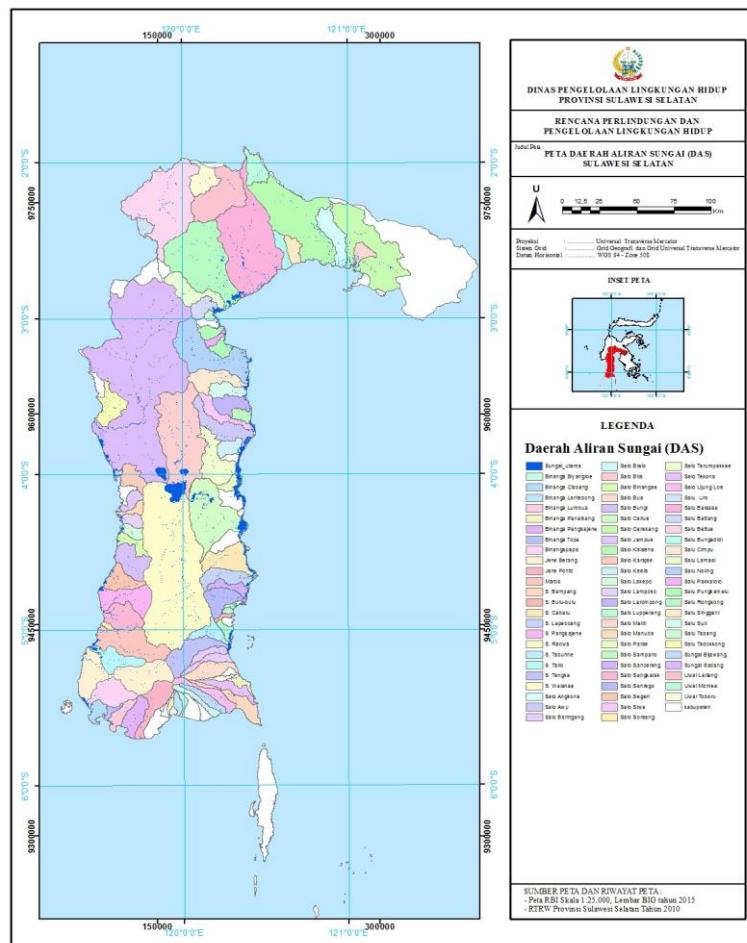


Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 73 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 24 Kabupaten/kota, diantara DAS tersebut terdapat 2 DAS prioritas dari 15 DAS prioritas nasional yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang. DAS Saddang merupakan DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar 649.320 Ha yang melintasi 11 wilayah Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Parepare, selengkapnya pada gambar berikut.

Gambar II.4

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan



Sumber : Rancangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel, Tahun 2019.

Pada aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu:

- Tipe Iklim A, tipe iklim ini dinotasikan sebagai iklim sangat basah dengan curah hujan rata-rata pada iklim tipe A adalah 3500 – 4000 mm/tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Enrekang.
 - Tipe iklim B, tipe iklim ini dinyatakan sebagai iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/tahun. Wilayah yang memiliki karakteristik iklim basah antara lain, yaitu: Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng.
 - Tipe iklim C, tipe ini merupakan tipe iklim agak basah, dengan dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam iklim C terdiri dari Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Maros, Makassar, Jeneponto, Sinjai, Gowa, Toraja Utara, Parepare, dan Kepulauan Selayar.
 - Tipe iklim D, tipe iklim ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Soppeng, Sinjai, Maros, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkajene Kepulauan, dan Gowa. Tipe iklim E, tipe iklim ini merupakan iklim kering yang memiliki curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/tahun.
 - Tipe iklim E terdapat di Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Maros dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan. Membahas klasifikasi penggunaan/penutupan lahan tidak terlepas dari makna tentang lahan sebagai sumber daya alam. Sebaran penggunaan lahan Provinsi Sulawesi Selatan ditampilkan pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel II.4.
Peta Penggunaan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan**

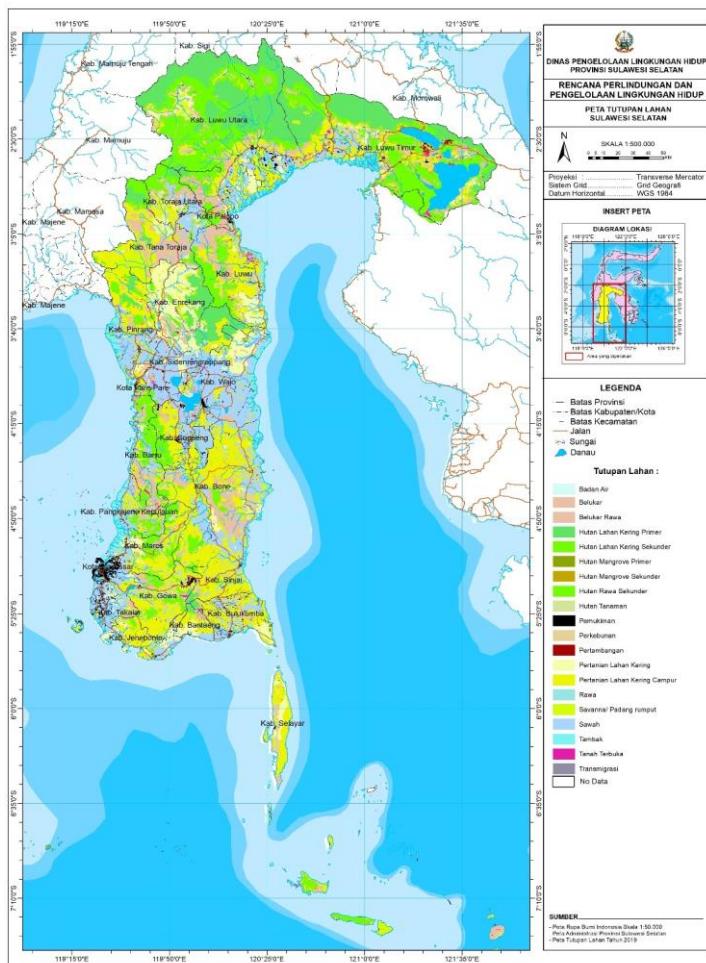
| Tutupan Lahan | Percentase (%) | Luas (Ha) |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Badan Air | 2,51 | 114.611,00 |
| Belukar | 9,43 | 430.710,29 |
| Belukar Rawa | 0,26 | 11.852,47 |
| Hutan Lahan Kering Primer | 12,07 | 551.507,79 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 17,63 | 805.595,18 |
| Hutan Mangrove Primer | 0,05 | 2.323,83 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 0,28 | 12.995,46 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0,00 | 39,42 |
| Hutan Tanaman | 0,27 | 12.112,95 |
| Tanah Terbuka | 0,68 | 30.854,86 |
| Pemukiman | 2,09 | 95.475,76 |
| Perkebunan | 1,08 | 49.458,78 |
| Pertambangan | 0,08 | 3.877,21 |
| Pertanian Lahan Kering | 8,11 | 370.599,38 |
| Pertanian Lahan Kering Campur | 24,25 | 1.107.917,42 |
| Rawa | 0,01 | 294,11 |
| Savana/ Padang rumput | 1,87 | 85.370,92 |
| Sawah | 16,42 | 750.123,07 |
| Tambak | 2,83 | 129.090,20 |
| Transmigrasi | 0,05 | 2.200,27 |
| No Data | 0,05 | 2.134,56 |
| Sulawesi Selatan | 100,00 | 4.569.144,94 |

Sumber: KLHS RPJMD Perubahan, 2020.

Penggunaan lahan didominasi oleh pertanian lahan kering bercampur seluas 1.107.917,42 Ha, disusul hutan lahan kering sekunder seluas 805.595,18 Ha, sawah seluas 750.123,07 Ha, hutan lahan kering primer seluas 551.507,79 Ha, dan belukar seluas 430.710,29 Ha.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Baja et al. (2011), perubahan penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup besar terjadi untuk 2 dekade yang lalu adalah dari semak dan kebun rnenjadi persawahan, dan hanya sebahagian kecil untuk permukiman dan industri. Namun, akhir-akhir ini perubahan penggunaan lahan kebun dan semak termasuk persawahan telah banyak terjadi, dan umumnya menjadi kawasan perkotaan, khususnya permukiman dan industri. Berdasarkan penelitian tersebut dinamika tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendorong (driving faktor), diantaranya (i) faktor aktor, (ii) faktor fisik, (iii) faktor ekonorni, (iv) faktor social budaya, dan (V) faktor institusional dan kebijakan.

Gambar II.5
Peta Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan



2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mewujudkan ruang Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Potensi pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada RTRWP Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan melalui pengembangan kawasan budidaya diantaranya meliputi kawasan perikanan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pertambangan.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.

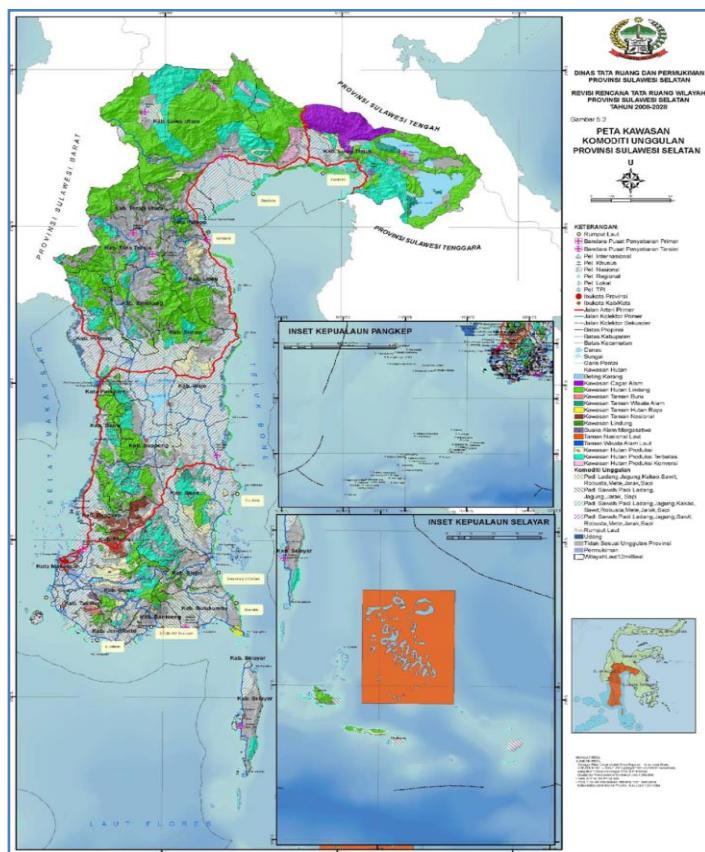
Pengembangan komoditas pertanian hortikultura diarahkan, sebagai berikut:

- bawang merah di Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan Takalar;
- tanaman cabai di Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;
- tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;
- perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;
- perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;
- perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Luwu, dan Bulukumba;
- komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;
- komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontibutor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam revisi RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 582.924 hektar yang proporsi luasan terbesarnya adalah Kabupaten Wajo sebesar 17,80 persen dengan luasan 103.748 hektar, Kabupaten Bone sebesar 14,71 persen dengan luasan 85.737 hektar, dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 9,18 persen dengan luasan sebesar 53.488 hektar.

Gambar II.6
Peta Potensi Komoditi Unggulan Sulawesi Selatan



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemanitiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumberdaya Alam yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemanitiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri di kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar.

Selain itu RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan pula kawasan industri khusus yang mengolah bahan baku komoditas pertambangan di sentra komoditas pertambangan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Maros, Luwu Timur dan Bantaeng. Serta menetapkan beberapa sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan pada sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komoditas lokal. Di samping itu, kebijakan pembangunan nasional juga mengarahkan transformasi ekonomi Sulawesi Selatan diantaranya melalui peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Demikian pula Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun RZWP3K Sulawesi Selatan juga mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan di Sulawesi Selatan.

RZWP3K mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan pasir laut di Kabupaten Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Luwu Utara. Sementara untuk pengembangan Blok Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, dan Kabupaten Luwu. Pada perspektif RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan wilayah usaha pertambangan, meliputi batubara, mineral logam dan mineral radioaktif. Wilayah usaha pertambangan batubara di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Maros, Pangkajene Kepulauan, Sidenreng Rappang, Sinjai dan Kabupaten Soppeng, wilayah usaha pertambangan mineral logam di seluruh wilayah Kabupaten/kota kecuali kota Makassar dan kota Parepare, dan wilayah usaha pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Kota Parepare.

4. Kawasan Pariwisata

Potensi pariwisata Sulawesi Selatan meliputi pengembangan potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Potensi wisata alam meliputi pariwisata bahari dan ekowisata. Pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Takabonerate dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang; pariwisata alam berbasis ekowisata di Taman Wisata Alam (TWA) Danau Matano – Mahalona dan TWA Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur, TWA Malino di Kabupaten Gowa, TWA Cani Sirenreng di Kabupaten Bone, TWA Lejja di Kabupaten Soppeng, Taman Nasional Bantimurung – Bulusarang di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Taman Buru Ko'mara di Kabupaten Takalar dan Taman Buru Bangkala di Kabupaten Jeneponto, TWA Danau Tempe - Sidenreng di Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang, TWA Laut Kepulauan Spermonde di Kota Makassar, TWA Kebun Raya Enrekang; TWA Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, TWA Sungai Saddang di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, Taman Rutan Rakyat (Tahura) Abdul Latief di Kabupaten Sinjai, dan Tahura Nanggala di kota Palopo.

Pengembangan wisata budaya berbasis heritage tourism dan wisata sejarah di kawasan Toraja di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, kawasan pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu di Kota Makassar, kawasan permukiman Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, kawasan wisata pelabuhan perahu tradisional Paotere di kota Makassar, dan kawasan industri perahu tradisional Phinisi di Kabupaten Bulukumba, Taman Wisata Sejarah Fort Rotterdam dan Situs Benteng Tallo di kota Makassar, Makam Syech Yusuf di kota Makassar, Masjid Tua Katangka di Kabupaten Gowa, dan Masjid Jami Tua Palopo di Kota Palopo.

Sedangkan pengembangan wisata buatan diarahkan di kawasan perkotaan antara lain berupa meeting-incentive-convention exhibition (MICE), wisata kebugaran, wisata kesehatan dan wisata olah raga. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan Makassar dan sekitarnya, Bulukumba dan sekitarnya, Parepare dan sekitarnya, Watampone dan sekitarnya dan Palopo dan sekitarnya,

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengembang fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi, Pusat Kegiatan Nasional yang terdiri dari Kabupaten/Kota Takalar, Gowa, Maros dan Makassar dan Pusat Kegiatan Wilayah mencakup Kabupaten/Kota Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Bone, Parepare dan Palopo. Sedangkan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah risiko bencana yang dapat terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; banjir, banjir bandang, longsor, tsunami, cuaca ekstrim, gempa, kebakaran dan kekeringan. Daerah rawan gempa berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Daerah rawan tsunami meliputi daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar.

Berdasarkan data BNPB pada tahun 2019, jumlah kejadian bencana di Sulawesi Selatan sebanyak 357 jumlah kejadian, yang didominasi oleh bencana banjir sebanyak 108 jumlah kejadian, bencana kekeringan sebanyak 51 kali jumlah bencana, bencana kebakaran sebanyak 32 jumlah kejadian, dan bencana longsor sebanyak 32 kali jumlah kejadian. Bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan kerugian yaitu jumlah korban jiwa yang terdampak dan mengungsi sebanyak 225.801 orang dan sebanyak 64.266 rumah yang terendam, serta kerusakan 780 unit fasilitas kesehatan, sosial dan pendidikan. Luas wilayah terdampak bencana di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.5.
Luas Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2019**

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Wilayah Terdampak Bencana dengan Klasifikasi Tinggi (Ha) | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|----------------|---------|---------|---------------|-------|------------|-------------|
| | | Banjir | Banjir Bandang | Longsor | Tsunami | Cuaca Ekstrim | Gempa | Kebaka-ran | Kekeri-ngan |
| 1 | Kep. Selayar | 1.937 | | 6.612 | 65.112 | 14.391 | 1.880 | 26.448 | 2.057 |
| 2 | Bulukumba | 5.539 | 1.675 | 4.053 | 4.295 | 60.448 | | 674 | 19.680 |
| 3 | Bantaeng | 549 | 269 | 3.051 | 1.084 | 22.856 | | 2.181 | 13.786 |
| 4 | Jeneponto | 8.761 | 1.717 | 5.434 | 4.771 | 46.429 | | 3.050 | 33.353 |
| 5 | Takalar | 19.091 | 1.454 | 1.350 | 3.946 | 28.508 | | 4.107 | 1.282 |
| 6 | Gowa | 17.939 | 1.235 | 33.911 | 342 | 62.797 | | 11.128 | 46.347 |
| 7 | Sinjai | 1.162 | 741 | 11.260 | 164 | 34.434 | | 1.070 | 4.736 |
| 8 | Maros | 19.070 | 22.050 | 22.050 | 83 | 39.946 | | 6.014 | 34.254 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Wilayah Terdampak Bencana dengan Klasifikasi Tinggi (Ha) | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Banjir | Banjir Bandang | Longsor | Tsunami | Cuaca Ekstrim | Gempa | Kebakaran | Kekeringan | |
| 9 | Pangkep | 16.178 | 589 | 11.160 | 2.823 | 27.533 | 1.315 | 7.163 | 10816 | |
| 10 | Barru | 5.749 | 2.311 | 35.224 | 564 | 21.886 | 2 | 24.872 | 251 | |
| 11 | Bone | 45.101 | 3.100 | 39.907 | 9 | 14.878 | 20.413 | 50.473 | 4.059 | |
| 12 | Soppeng | 12.963 | 3.604 | 32.501 | | 45.879 | 20.621 | 5.480 | | |
| 13 | Wajo | 44.623 | 974 | 2.881 | | 74.069 | 49.912 | 10.539 | 3.656 | |
| 14 | Sidrap | 38.636 | 1.756 | 34.550 | | 41.563 | 44.635 | 11.762 | 5.381 | |
| 15 | Pinrang | 39.745 | 1.552 | 39.947 | 142 | 46.848 | 78.424 | 17.316 | | |
| 16 | Enrekang | 1.110 | 1.963 | 74.790 | | 32.446 | 401 | 28.397 | 846 | |
| 17 | Luwu | 14.648 | 2.180 | 72.363 | | | | 22.319 | 51 | |
| 18 | Tana Toraja | | 605 | 47.906 | | 2.990 | | 29.867 | 1.560 | |
| 19 | Luwu Utara | 40.017 | | 22 | | 48.214 | | | | |
| 20 | Luwu Timur | 33.133 | 6.906 | 169.748 | | 48.214 | 126.465 | 30.406 | 62.840 | |
| 21 | Toraja Utara | 72 | 1.130 | 48.348 | | 24.618 | | 6.464 | 106 | |
| 22 | Makassar | 7.921 | | | 729 | 179 | | | 9 | |
| 23 | Parepare | 398 | 178 | 2.323 | 63 | 4.981 | 27 | 1.693 | | |
| 24 | Palopo | 1.534 | 672 | 12.123 | | 7.059 | 19 | 4 | | |
| JUMLAH | | 375.876 | 56.661 | 711.514 | 84.127 | 751.166 | 344.114 | 301.427 | 245.070 | |

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Bencana yang paling berdampak pada wilayah Sulawesi Selatan adalah cuaca ekstrim dan tanah longsor selain bencana banjir dan gempa. Data kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data.

Kecenderungan peningkatan kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu tahun 2015 – 2019 yaitu :

1. Bencana banjir yang diklasifikasikan ke dalam bencana Hydrometeorologi ini cukup berdampak besar bagi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 dengan angka kejadian 15 kejadian, pada tahun 2016 dengan angka kejadian 34 kejadian, pada tahun 2017 dengan angka kejadian 59 kejadian, pada tahun 2018 dengan angka kejadian 38 kejadian, frekuensi tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan angka 107 kejadian yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Bencana banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dibeberapa bagian wilayah Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan luapan volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu.
2. Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak. Bencana gelombang pasang ini terjadi di beberapa wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah kejadiannya beragam, pada tahun 2015, gelombang pasang ini terjadi di Kabupaten Selayar. Pada tahun 2017 juga terjadi di Kabupaten Barru. Pada Tahun 2018 terdapat 2 kejadian yaitu di Kabupaten Takalar dan Barru. Pada Tahun 2019 juga terdapat 2 kejadian yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Takalar. Jika terjadi pembiaran maka abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan menggenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain pasir ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir pantai.
3. Bencana longsor bisa diakibatkan oleh banyak hal. Umumnya disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor pemicu. Apalagi di musim hujan, ada saja kekhawatiran masyarakat akan bencana banjir dan tanah longsor. Pada Tahun 2015 Bencana Longsor terjadi 7 Kejadian, Pada Tahun 2016 Bencana Longsor terjadi 17 Kejadian, Pada Tahun 2017 Bencana Longsor terjadi 18 Kejadian, Pada Tahun 2018 Bencana Longsor terjadi 37 Kejadian, selanjutnya pada Tahun 2019

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Bencana Longsor terjadi 42 Kejadian. Selama 5 tahun bencana longsor ini mengalami peningkatan melihat jumlah kejadian yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

4. Bencana kekeringan disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kekurangan sumber air pun dapat menjadi penyebab bencana ini. Pada tahun 2018 kejadian kekeringan ini terjadi di Kabupaten Barru dan puncaknya pada tahun 2019 naik drastis menjadi 51 Kejadian.
5. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung) memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 36 kejadian. Pada tahun 2016 sebanyak 30 kejadian, Pada tahun 2017 sebanyak 102 kejadian, Pada tahun 2018 sebanyak 66 kejadian, Pada tahun 2019 sebanyak 130 kejadian. Insiden di atas menunjukkan ancaman yang dipicu oleh fenomena hidrometeorologi bergerak ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. BMKG pun telah memberikan peringatan dini ke sejumlah wilayah dengan status 'Waspada' hingga 'Siaga.'
6. Bencana gempa di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Pad tahun 2018, bencana gempa bumi terjadi di Kabupaten Wajo. Sementara Pada tahun 2019 terjadi di kabupaten Enrekang dan Luwu Timur.
7. Bencana kebakaran hutan cenderung meningkat, dengan frekuensi tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan jumlah 32 Kejadian.

Dalam upaya memaksimalkan penanganan korban bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan, diperlukan mitigasi bencana yang mencakup tiga tahapan yaitu; sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana. Mitigasi sebelum bencana berupa kesiapsiagaan bencana, sedangkan saat bencana berupa evakuasi dan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Terkait dengan upaya penanganan pasca bencana telah dipetakan lokasi potensi relokasi pasca bencana untuk penanganan lebih lanjut, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II.6.
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2019**

| No. | Kabupaten/-Kota | Risiko Bencana | Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana |
|-----|-----------------|----------------|--|
| 1 | Kota Makassar | Banjir | Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Tsunami | |
| 2 | Kota Parepare | Cuaca Ekstrim | Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel. Lakessi, Kel. Kampung Baru, Kel. Watang Soreang, Kel. Ujung Bulu, Kel. Tiro Sompe, Kel. Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan Kel. Ujung Sabbang. |
| | | Longsor | |
| | | Kebakaran | |
| 3 | Kota Palopo | Banjir | Kelurahan Maroangin, Kec. Telluwanua; Kel. Rampoang, Kec. Bara; Kel. Songka, Kec. Wara Selatan |
| | | Longsor | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| 4 | Barru | Longsor | Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Neko |
| | | Banjir | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kebakaran | |
| 5 | Soppeng | Cuaca Ekstrim | Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwato; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincung di Kecamatan Marioriawa; |
| | | Gempa | |
| | | Banjir | |
| | | Longsor | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No. | Kabupaten/-Kota | Risiko Bencana | Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana |
|-----|-----------------|----------------|--|
| 6 | Wajo | Banjir | Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoating, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Gempa | |
| 7 | Sidrap | Banjir | Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Gempa | |
| 8 | Enrekang | Longsor | Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Banjir | |
| | | Kebakaran | |
| 9 | Pinrang | Longsor | Kawasan Waetuoeh, Kec. Lanrisang |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Banjir | |
| | | Gempa | |
| 10 | Toraja Utara | Longsor | Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kebakaran | |
| 11 | Tana Toraja | Longsor | Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kebakaran | |
| 12 | Luwu | Longsor | Kaw. Lindajang, Bone Lemo, Rante Balla, Beuma, Ilanbatu dan Bosso |
| | | Banjir | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kebakaran | |
| 13 | Luwu Utara | Banjir | Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta; |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| 14 | Luwu Timur | Kekeringan | Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula |
| | | Banjir | |
| | | Longsor | |
| | | Gempa Bumi | |
| 15 | Gowa | Longsor | Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao |
| | | Banjir | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kekeringan | |
| 16 | Takalar | Tsunami | Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang |
| | | Banjir | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Banjir | |
| 17 | Bantaeng | Longsor | Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa |
| | | Banjir | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kekeringan | |
| 18 | Bulukumba | Banjir | Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kekeringan | |
| 19 | Sinjai | Longsor | Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Seatan |
| | | Banjir | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kekeringan | |
| 20 | Bone | Banjir | Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/-Kota | Risiko Bencana | Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana |
|-----|-----------------|----------------------------|--|
| | | Cuaca Ekstrim Kebakaran | Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge |
| 21 | Maros | Longsor | Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa |
| | | Banjir | |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kekeringan | |
| 22 | Pangkep | Banjir | Kaw. Balang Lombo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kekeringan | |
| 23 | Jeneponto | Banjir | Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kaw. Bontotangnga, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba |
| | | Cuaca Ekstrim | |
| | | Kekeringan | |
| 24 | Selayar | Longsor | Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki |
| | | Banjir | |
| | | Tsunami | |
| | | Kebakaran | |

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Gambaran potensi kawasan relokasi bencana di 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, yang ditujukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya suatu wilayah yang terdampak bencana.

Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan data kebutuhan pasca bencana yang akurat dan terkoneksi melalui aplikasi/sistem data terpadu antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota harus segera diadakan agar sinergitas data penaggulangan bencana dapat diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2008 tentang Penanggulangan bencana yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkordinasi, terpadu dan menyeluruh.

2.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2015-2019 sebesar 0,76 persen. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan hingga tahun 2019 mencapai 8.851.240 jiwa. Terdapat empat kabupaten/kota yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Palopo dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,80 persen disusul Kabupaten Luwu Timur dengan laju pertumbuhan sebesar 1,69 persen, Kabupaten Gowa sebesar 1,35 persen. Sedangkan Kota Makassar dengan jumlah penduduk terbesar hanya menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk keempat terbesar, yakni 1,04 persen. Sebaliknya laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang terkecil dicapai oleh Kabupaten Soppeng dengan laju pertumbuhan penduduk hanya 0,10 persen pada periode yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.7.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2019

| No. | Kabupaten/-Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | | | Laju Pert. Penduduk per Tahun (%) |
|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Selayar | 130.199 | 130.605 | 133.003 | 134.426 | 135.624 | 0,81 |
| 2 | Bulukumba | 410,485 | 410,485 | 415,713 | 418,332 | 420,603 | 0,49 |
| 3 | Bantaeng | 183,386 | 184,517 | 185,581 | 186,694 | 187,626 | 0,46 |
| 4 | Jeneponto | 355,599 | 357,807 | 359,787 | 361,910 | 363,792 | 0,46 |
| 5 | Takalar | 286,906 | 289,978 | 292,983 | 296,059 | 298,688 | 0,81 |
| 6 | Gowa | 722,702 | 735,493 | 748,200 | 761,294 | 772,684 | 1,35 |
| 7 | Sinjai | 238,099 | 239,689 | 241,208 | 242,776 | 244,125 | 0,50 |
| 8 | Maros | 339,300 | 342,890 | 346,383 | 349,985 | 353,121 | 0,80 |
| 9 | Pangkep | 323,597 | 326,700 | 329,791 | 332,924 | 335,514 | 0,73 |
| 10 | Barru | 171,217 | 171,906 | 172,767 | 173,544 | 174,323 | 0,36 |
| 11 | Bone | 742,912 | 746,973 | 751,026 | 755,082 | 758,589 | 0,42 |
| 12 | Soppeng | 226,116 | 226,305 | 26,466 | 226,647 | 226,991 | 0,10 |
| 13 | Wajo | 393,218 | 394,495 | 395,583 | 396,770 | 397,814 | 0,23 |
| 14 | Sidrap | 289,787 | 292,985 | 296,125 | 299,353 | 301,972 | 0,83 |
| 15 | Pinrang | 366,789 | 369,595 | 372,230 | 374,985 | 377,119 | 0,56 |
| 16 | Enrekang | 199,998 | 201,614 | 203,320 | 205,008 | 206,387 | 0,63 |
| 17 | Luwu | 350,218 | 353,277 | 356,305 | 359,405 | 362,027 | 0,67 |
| 18 | Tana Toraja | 228,984 | 230,195 | 231,519 | 232,792 | 234,002 | 0,43 |
| 19 | Luwu Utara | 302,687 | 305,372 | 308,001 | 310,681 | 312,883 | 0,66 |
| 20 | Luwu Timur | 275,595 | 281,822 | 287,874 | 294,207 | 299,673 | 1,69 |
| 21 | Toraja Utara | 225,516 | 226,959 | 228,414 | 229,876 | 231,214 | 0,50 |
| 22 | Makassar | 1.449,401 | 1,469,601 | 1,489,011 | 1,509,262 | 1,526,677 | 1,04 |
| 23 | Pare Pare | 138,699 | 140,423 | 142,097 | 143,831 | 145,178 | 0,92 |
| 24 | Palopo | 168,894 | 172,916 | 176,907 | 181,047 | 184,614 | 1,80 |
| Sulawesi Selatan | | 8.520.304 | 8.606.375 | 8.690.294 | 8.776.888 | 8.851.240 | 0,76 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin hingga tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan dengan rasio keseluruhan 0,96. Untuk kelompok umur tertentu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan rasio diatas 1,0 yakni pada range umur 0 – 24 tahun. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, Tahun 2019

| No. | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin L/P |
|-----|---------------|---------------|-----------|---------|-------------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1 | 0 - 4 | 420,691 | 404,024 | 824,715 | 1,04 |
| 2 | 5 - 9 | 423,310 | 407,118 | 830,428 | 1,04 |
| 3 | 10 - 14 | 409,791 | 392,082 | 801,873 | 1,05 |
| 4 | 15 - 19 | 405,550 | 388,070 | 793,620 | 1,05 |
| 5 | 20 - 24 | 398,854 | 389,880 | 788,734 | 1,02 |
| 6 | 25 - 29 | 345,624 | 356,975 | 702,617 | 0,97 |
| 7 | 30 - 34 | 306,753 | 330,160 | 636,913 | 0,93 |
| 8 | 35 - 39 | 289,129 | 322,228 | 611,357 | 0,90 |
| 9 | 40 - 44 | 282,734 | 309,984 | 592,718 | 0,91 |
| 10 | 45 - 49 | 266,342 | 289,913 | 556,255 | 0,92 |
| 11 | 50 - 54 | 226,790 | 252,188 | 478,978 | 0,90 |
| 12 | 55 - 59 | 178,011 | 205,061 | 383,072 | 0,87 |
| 13 | 60 - 64 | 137,048 | 159,195 | 296,243 | 0,86 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin L/P |
|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 14 | 65+ | 99.534 | 119.401 | 218.935 | 0,83 |
| Sulawesi Selatan | | 4.326.409 | 4.524.831 | 8.851.240 | 0,96 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Populasi tertinggi terdapat pada kelompok umur 5 – 9 tahun sebanyak 9,38 persen, dan populasi terkecil terdapat pada kelompok umur diatas 65 tahun sebanyak 2,47 persen dari total 8.851.240 jiwa penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2019.

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018 dan 2019, Kota Makassar menempati peringkat pertama terbesar dengan sebaran jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 1.508,326 Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 1.526,677 Jiwa, sementara jumlah penduduk terkecil pada tahun 2018 dan 2019, berada pada Kabupaten Selayar dengan jumlah penduduk sebesar 134,062 Jiwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 135,624 Jiwa.

Jika dibandingkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki, yaitu pada tahun 2018 jumlah penduduk perempuan sebesar 4.489,625 Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 4.524,831 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2018 sebesar 4.287,262 Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 4.326,409 Jiwa.

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kab/kota pada tahun 2018 sebesar 95,49 menunjukkan bahwa terdapat 95 penduduk laki-laki per 100 perempuan, selanjutnya tahun 2019 sebesar 95,60 menunjukkan bahwa terdapat 95 penduduk laki-laki per 100 perempuan. Perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018 dan tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat 5 Kabupaten yang rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan melebihi 100 yaitu, Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Luwu Timur. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.9.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2019

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk dan Rasio | | | |
|-----|--------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total Jumlah Penduduk | Rasio Jenis Kelamin |
| 1 | Selayar | 65.424 | 70.200 | 135.624 | 93,20 |
| 2 | Bulukumba | 198.701 | 221.902 | 420.603 | 89,54 |
| 3 | Bantaeng | 90.38 | 97.246 | 187.626 | 92,94 |
| 4 | Jeneponto | 175.607 | 188.185 | 363.792 | 93,32 |
| 5 | Takalar | 143.674 | 155.014 | 298.688 | 92,68 |
| 6 | Gowa | 380.488 | 392.196 | 772.684 | 97,01 |
| 7 | Sinjai | 118.202 | 125.923 | 244.125 | 93,87 |
| 8 | Maros | 172.793 | 180.328 | 353.121 | 95,82 |
| 9 | Pangkep | 162.618 | 172.896 | 335.514 | 94,06 |
| 10 | Barru | 83.878 | 90.445 | 174.323 | 92,74 |
| 11 | Bone | 363.03 | 395.559 | 758.589 | 91,78 |
| 12 | Soppeng | 106.927 | 120.064 | 226.991 | 89,06 |
| 13 | Wajo | 190.693 | 207.121 | 397.814 | 92,07 |
| 14 | Sidrap | 148.201 | 153.771 | 301.972 | 96,38 |
| 15 | Pinrang | 183.129 | 193.99 | 377.119 | 94,40 |
| 16 | Enrekang | 103.627 | 102.76 | 206.387 | 100,84 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk dan Rasio | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total Jumlah Penduduk | Rasio Jenis Kelamin |
| 17 | Luwu | 177.382 | 184.645 | 362.027 | 96,07 |
| 18 | Tana Toraja | 118.102 | 115.9 | 234.002 | 101,90 |
| 19 | Luwu Utara | 156.878 | 156.005 | 312.883 | 100,56 |
| 20 | Luwu Timur | 154.006 | 145.667 | 299.673 | 105,72 |
| 21 | Toraja Utara | 115.712 | 115.502 | 231.214 | 100,18 |
| 22 | Makassar | 755.968 | 770.709 | 1.526.677 | 98,09 |
| 23 | Pare Pare | 71.406 | 73.772 | 145.178 | 96,79 |
| 24 | Palopo | 89.583 | 95.031 | 184.614 | 94,27 |
| Sulawesi Selatan | | 4.326.409 | 4.524.831 | 8.851.240 | 95,60 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

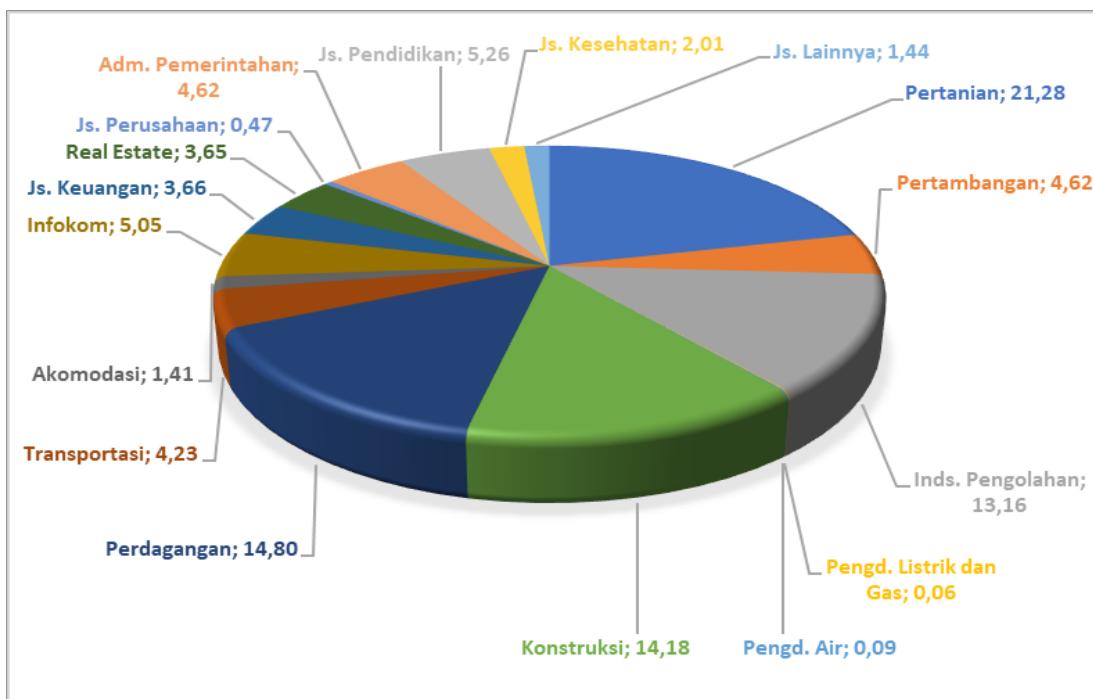
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2019 tumbuh sebesar 6,92 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,99 persen, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,53 persen serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,98 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,39 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 1,31 persen; Konstruksi sebesar 1,09 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,75 persen serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,79 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,28 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,80 persen); Konstruksi (14,18 persen) serta Industri Pengolahan (13,16 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,42 persen. Adapun struktur ekonomi secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Grafik II.1.
Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas rata-rata Nasional meskipun mengalami perlambatan. Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada tahun 2019 hanya mencapai 5,02 persen, lebih rendah dari capaian Sulawesi Selatan yaitu 6,92 persen sebagaimana di gambarkan pada tabel berikut.

**Tabel II.10.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Selatan | % | 7,19 | 7,42 | 7,21 | 7,06 | 6,92 |
| Nasional | % | 4,88 | 5,03 | 5,07 | 5,17 | 5,02 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Untuk tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tertinggi di 24 kabupaten/kota adalah Kabupaten Bantaeng dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,75 persen, dan Kota Makassar sebesar 8,79 persen. Sedangkan kabupaten yang pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah Kabupaten Luwu Timur yang bertumbuh hanya 1,17 persen, disusul Kabupaten Maros yang bertumbuh 1,24 persen.

**Tabel II.11.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| No. | Kab/Kota | Tahun | | | | |
|-----|--------------|-------|------|------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kep. Selayar | 8,83 | 7,35 | 7,61 | 8,75 | 7,66 |
| 2 | Bulukumba | 5,62 | 6,77 | 6,89 | 5,05 | 5,49 |
| 3 | Bantaeng | 6,64 | 7,39 | 7,31 | 8,13 | 10,75 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No. | Kab/Kota | Tahun | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 | Jeneponto | 6,54 | 8,32 | 8,25 | 6,29 | 5,47 |
| 5 | Takalar | 8,42 | 9,61 | 7,37 | 6,66 | 6,87 |
| 6 | Gowa | 6,79 | 7,57 | 7,21 | 7,14 | 7,46 |
| 7 | Sinjai | 7,55 | 7,09 | 7,23 | 7,44 | 6,12 |
| 8 | Maros | 8,44 | 9,50 | 6,81 | 6,19 | 1,24 |
| 9 | Pangkep | 7,63 | 8,31 | 6,60 | 4,76 | 6,41 |
| 10 | Barru | 6,32 | 6,01 | 6,48 | 7,11 | 7,41 |
| 11 | Bone | 8,30 | 9,01 | 8,41 | 8,91 | 7,01 |
| 12 | Soppeng | 5,11 | 8,11 | 8,29 | 8,11 | 7,69 |
| 13 | Wajo | 7,06 | 4,96 | 5,21 | 1,08 | 4,06 |
| 14 | Sidrap | 8,03 | 8,77 | 7,09 | 5,02 | 4,65 |
| 15 | Pinrang | 8,24 | 7,44 | 7,84 | 6,91 | 6,53 |
| 16 | Enrekang | 6,91 | 7,63 | 6,84 | 3,26 | 5,43 |
| 17 | Luwu | 7,26 | 7,88 | 6,79 | 6,86 | 6,26 |
| 18 | Tana Toraja | 6,85 | 7,29 | 7,47 | 7,89 | 7,22 |
| 19 | Luwu Utara | 6,67 | 7,49 | 7,60 | 8,39 | 7,11 |
| 20 | Luwu Timur | 6,42 | 1,58 | 3,07 | 3,39 | 1,17 |
| 21 | Toraja Utara | 7,76 | 8,01 | 8,22 | 8,07 | 7,56 |
| 22 | Makassar | 7,55 | 8,03 | 8,20 | 8,42 | 8,79 |
| 23 | Parepare | 6,30 | 6,87 | 6,97 | 5,58 | 6,65 |
| 24 | Palopo | 6,47 | 6,95 | 7,17 | 7,52 | 6,75 |
| Sulawesi Selatan | | 7,19 | 7,42 | 7,21 | 7,06 | 6,92 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Secara regional, pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Sulawesi selama lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Empat tahun terakhir mengalami perlambatan dengan capaian terendah pada tahun 2019 yaitu 6,92 persen. Meskipun demikian, dalam skala nasional angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai 2019 selalu berada diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara dalam lingkup Regional Sulawesi, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di lima provinsi lainnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di urutan kedua setelah Sulawesi Tengah yang bertumbuh sebesar 7,15 persen.

**Tabel II.12.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan
Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019**

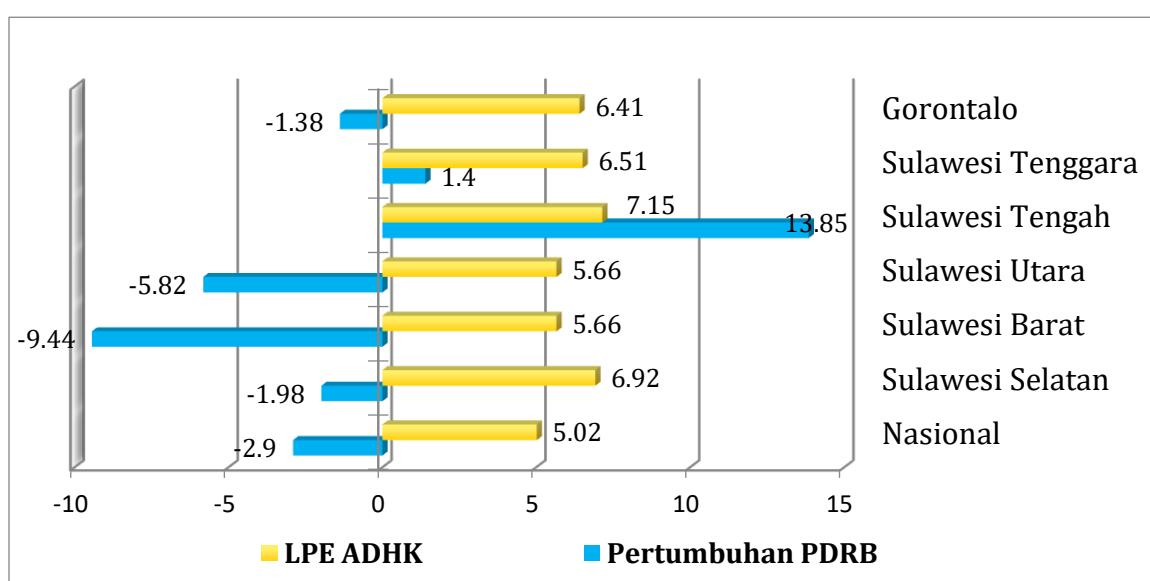
| Nama Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nasional | % | 4,88 | 5,03 | 5,07 | 5,17 | 5,02 |
| Sulawesi Selatan | % | 7,19 | 7,42 | 7,21 | 7,06 | 6,92 |
| Sulawesi Utara | % | 6,12 | 6,16 | 6,31 | 6,01 | 5,66 |
| Sulawesi Tengah | % | 15,50 | 9,94 | 7,10 | 6,28 | 7,15 |
| Sulawesi Tenggara | % | 6,88 | 6,51 | 6,76 | 6,42 | 6,51 |
| Gorontalo | % | 6,22 | 6,52 | 6,73 | 6,50 | 6,41 |
| Sulawesi Barat | % | 7,31 | 6,01 | 6,39 | 6,25 | 5,66 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya dua provinsi yang pertumbuhannya terakselerasi pada tahun 2019, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang terakselerasi signifikan merupakan *base effect* dari pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun sebelumnya akibat bencana gempa Palu 2018. Sementara, di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonomi pada 2019 utamanya didukung oleh investasi Tiongkok pada nikel yang mendorong kinerja industri pengolahan melalui hilirasi nikel dan turut meningkatkan ekspor luar negeri. Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 5 dari 6 provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan perlunya mencari dan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pulau Sulawesi. Seperti pada grafik berikut.

**Grafik II.2.
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan,
Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi, Tahun 2019**



Sumber: BPS Tahun 2020, Diolah

Berdasarkan PDRB sektor lapangan usaha di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada sektor lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta sektor lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 10,99 persen dan 10,53 persen. Berbagai data pendukung menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap produk informasi dan komunikasi meningkat cukup tinggi di tahun 2019. Selain itu jumlah tenaga kerja yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta Jasa Perusahaan juga tumbuh signifikan. Sedangkan sektor lapangan usaha yang masih memerlukan perhatian adalah sektor pegadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya bertumbuh sebesar 1,73 persen dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,74 persen.

**Tabel II.13.
Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| | Sektor Lapangan Usaha | Pertumbuhan PDRB | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,87 | 7,86 | 5,56 | 5,27 | 2,80 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 7,42 | 1,22 | 3,80 | 1,11 | 2,68 |
| C | Industri Pengolahan | 6,77 | 8,23 | 5,03 | 0,94 | 9,91 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | -1,38 | 11,52 | 6,10 | 7,26 | 6,21 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| Sektor Lapangan Usaha | | Pertumbuhan PDRB | | | | |
|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,34 | 5,44 | 7,89 | 5,49 | 1,73 |
| F | Konstruksi | 8,32 | 7,02 | 8,74 | 8,55 | 8,92 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda | 7,89 | 9,57 | 10,42 | 11,57 | 9,15 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6,82 | 7,75 | 8,37 | 10,32 | 1,74 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5,81 | 8,47 | 11,94 | 12,71 | 6,16 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7,92 | 8,13 | 10,52 | 11,99 | 10,99 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,41 | 13,63 | 4,39 | 4,67 | 4,01 |
| L | Real Estat | 7,39 | 6,37 | 4,48 | 4,63 | 5,42 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 5,87 | 7,88 | 8,44 | 10,02 | 10,53 |
| O | Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 7,88 | -0,22 | 5,20 | 9,96 | 9,98 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,25 | 6,86 | 9,72 | 9,77 | 6,93 |
| Q | Jasa Kesehatandan Kegiatan Sosial | 9,31 | 8,45 | 8,80 | 8,59 | 8,05 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 8,99 | 9,81 | 9,58 | 13,13 | 9,73 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | | 7,19 | 7,42 | 7,23 | 7,06 | 6,92 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Sementara nilai PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2019 berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan di 17 sektor lapangan usaha meskipun secara total mengalami perlambatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar 330,61 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai nilai 309,20 triliun rupiah. Adapun nilai PDRB (ADHK) menurut lapangan usaha yang terbesar berada pada sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 66,66 trilyun rupiah, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 51,44 trilyun rupiah, dan selanjutnya adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 44,83 trilyun rupiah. Sedangkan nilai PDRB ADHK tahun 2019 yang terendah dan masih perlu didorong adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,37 trilyun rupiah, serta pengadaan listrik dan gas hanya sebesar 0,31 trilyun rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.14.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Lapangan Usaha | Nilai PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah) | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 53,96 | 58,44 | 61,60 | 64,84 | 66,66 |
| Pertambangan dan Galian | 15,87 | 15,96 | 16,60 | 16,79 | 17,24 |
| Industri Pengolahan | 35,51 | 38,45 | 40,41 | 40,79 | 44,83 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Lapangan Usaha | Nilai PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah) | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 |
| Konstruksi | 29,97 | 31,99 | 34,87 | 37,85 | 41,23 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 34,92 | 38,36 | 42,25 | 47,13 | 51,44 |
| Transportasi dan Pergudangan | 9,19 | 9,86 | 10,68 | 11,78 | 11,98 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,37 | 3,66 | 4,09 | 4,61 | 4,90 |
| Informasi dan Komunikasi | 15,71 | 16,99 | 18,78 | 21,03 | 23,34 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 8,66 | 9,84 | 10,28 | 10,75 | 11,19 |
| Real Estate | 9,20 | 9,78 | 10,22 | 10,70 | 11,28 |
| Jasa Perusahaan | 1,06 | 1,14 | 1,24 | 1,36 | 1,51 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 11,38 | 11,22 | 11,93 | 13,11 | 14,42 |
| Jasa Pendidikan | 13,38 | 14,3 | 15,69 | 17,22 | 18,41 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,85 | 5,25 | 5,72 | 6,21 | 6,71 |
| Jasa Lainnya | 3,21 | 3,25 | 3,86 | 4,37 | 4,79 |
| Total PDRB | 250,73 | 269,07 | 288,81 | 309,20 | 330,61 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Seperti halnya nilai PDRB atas dasar harga konstan, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) juga meningkat pada Tahun 2019 mencapai 504,76 trilyun rupiah dibandingkan tahun 2018 hanya mencapai nilai 456,61 trilyun rupiah. Peningkatan tersebut di sumbangkan oleh sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 107,42 trilyun rupiah, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 74,70 Trilyun rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.15.

**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Lapangan Usaha | Nilai PDRB-Adhb (Trilyun Rupiah) | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 78,78 | 88,34 | 96,11 | 103,96 | 107,42 |
| Pertambangan dan Galian | 21,52 | 19,56 | 20,41 | 22,17 | 23,30 |
| Industri Pengolahan | 47,25 | 53,02 | 57,45 | 59,45 | 66,43 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,32 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,37 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,48 |
| Konstruksi | 42,18 | 47,62 | 53,56 | 62,57 | 71,56 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 43,79 | 50,06 | 59,98 | 66,44 | 74,70 |
| Transportasi dan Pergudangan | 14,25 | 16,17 | 17,51 | 19,76 | 21,35 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,55 | 4,99 | 5,71 | 6,53 | 7,11 |
| Informasi dan Komunikasi | 15,72 | 17,57 | 19,93 | 22,78 | 25,49 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 12,26 | 14,36 | 15,80 | 17,28 | 18,50 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| Lapangan Usaha | Nilai PDRB-Adhb (Trilyun Rupiah) | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Real Estate | 13,59 | 14,88 | 15,87 | 17,14 | 18,41 |
| Jasa Perusahaan | 1,48 | 1,65 | 1,85 | 2,11 | 2,37 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 16,29 | 16,84 | 18,19 | 20,65 | 23,33 |
| Jasa Pendidikan | 17,30 | 19,13 | 21,76 | 24,43 | 26,54 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,52 | 7,33 | 8,19 | 9,19 | 10,16 |
| Jasa Lainnya | 4,37 | 4,96 | 5,57 | 6,51 | 7,29 |
| Total Nilai PDRB | 340,39 | 377,11 | 415,64 | 461,72 | 504,48 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Dari segi kontribusi PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan di Sulawesi Selatan didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,16 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,56 persen dan Industri Pengolahan sebesar 13,56 persen. Dari 17 sektor lapangan usaha, dapat di gambarkan bahwa kontribusi PDRB menurut lapangan usaha utama berdasarkan harga konstan, hanya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mengalami peningkatan kontribusi setiap tahunnya.

Tabel II.16.

**Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Lapangan Usaha | Kontribusi PDRB Adhk (%) | | | | |
|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 21,52 | 21,72 | 21,33 | 20,97 | 20,16 |
| Pertambangan dan Galian | 6,33 | 5,94 | 5,75 | 5,43 | 5,21 |
| Industri Pengolahan | 14,16 | 14,29 | 13,99 | 13,19 | 13,56 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Konstruksi | 11,95 | 11,89 | 12,07 | 12,24 | 12,47 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 13,93 | 14,26 | 14,63 | 15,24 | 15,56 |
| Transportasi dan Pergudangan | 3,67 | 3,66 | 3,70 | 3,81 | 3,62 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,34 | 1,36 | 1,42 | 1,49 | 1,48 |
| Informasi dan Komunikasi | 6,27 | 6,31 | 6,50 | 6,80 | 7,06 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,45 | 3,66 | 3,56 | 3,48 | 3,38 |
| Real Estate | 3,67 | 3,63 | 3,54 | 3,46 | 3,41 |
| Jasa Perusahaan | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,46 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 4,54 | 4,17 | 4,13 | 4,24 | 4,36 |
| Jasa Pendidikan | 5,34 | 5,31 | 5,43 | 5,57 | 5,57 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,93 | 1,95 | 1,98 | 2,01 | 2,03 |
| Jasa Lainnya | 1,28 | 1,21 | 1,34 | 1,41 | 1,45 |
| Total Kontribusi PDRB (adhk) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku menunjukkan bahwa, terdapat tiga sektor lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,28 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,80 persen dan konstruksi sebesar 14,18 persen. Berdasarkan data kontribusi PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan bahwa pada lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan penurunan besaran kontribusi dalam lima tahun terakhir.

Tabel II.17.

**Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Lapangan Usaha | Kontribusi Pdrb Adhb (%) | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 23,14 | 23,43 | 23,13 | 22,77 | 21,28 |
| Pertambangan dan Galian | 6,32 | 5,19 | 4,91 | 4,86 | 4,62 |
| Industri Pengolahan | 13,88 | 14,06 | 13,82 | 13,02 | 13,16 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Konstruksi | 12,39 | 12,63 | 12,89 | 13,70 | 14,18 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12,86 | 13,28 | 14,43 | 14,55 | 14,80 |
| Transportasi dan Pergudangan | 4,19 | 4,29 | 4,21 | 4,33 | 4,23 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,34 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,41 |
| Informasi dan Komunikasi | 4,62 | 4,66 | 4,80 | 4,99 | 5,05 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,60 | 3,81 | 3,80 | 3,78 | 3,67 |
| Real Estate | 3,99 | 3,95 | 3,82 | 3,75 | 3,65 |
| Jasa Perusahaan | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 4,79 | 4,47 | 4,38 | 4,52 | 4,62 |
| Jasa Pendidikan | 5,08 | 5,07 | 5,24 | 5,35 | 5,26 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,92 | 1,94 | 1,97 | 1,36 | 2,01 |
| Jasa Lainnya | 1,28 | 1,32 | 4,37 | 0,96 | 1,44 |
| Total Kontribusi PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

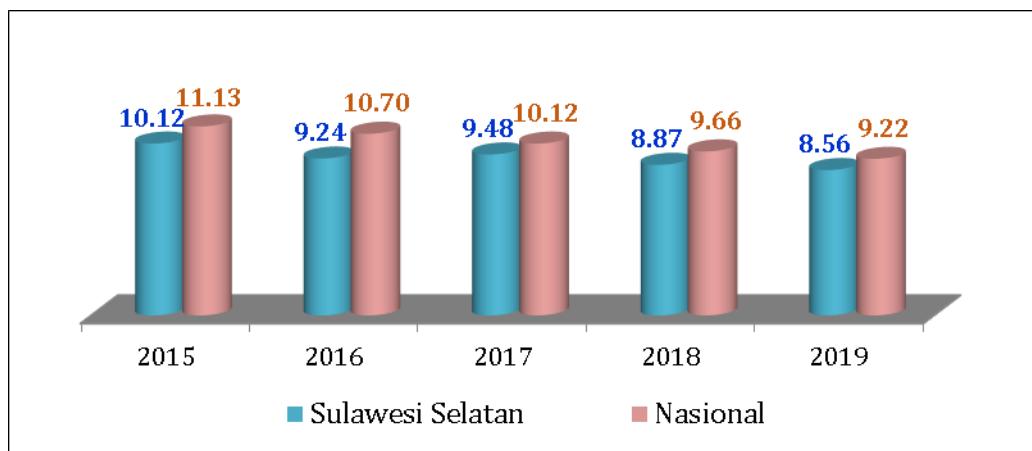
2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Sulawesi selatan selama tahun 2015-2019 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan yaitu 8,56 persen, sedangkan tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,22 persen. Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 8,78 persen pada tahun 2019 telah tercapai (melampaui). Selengkapnya pada tabel berikut.Selengkapnya pada grafik berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Grafik II.3.

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan dengan Nasional menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan Nasional lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi, maka kinerja penurunan kemiskinan Sulawesi Selatan berada di bawah provinsi Sulawesi Utara. Kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan masih perlu lebih dioptimalkan Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi selatan dan Nasional selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.18.
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019**

| Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan | | | | | | |
| Sulawesi Selatan | % | 89,88 | 90,76 | 90,52 | 91,13 | 91,44 |
| Nasional | % | 88,87 | 89,30 | 89,88 | 90,34 | 90,78 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah pada tahun 2019 dengan angka tertinggi berada pada wilayah perdesaan yaitu sebesar 597,19 ribu jiwa atau 11,90 persen, sedangkan jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan hanya sebesar 162,39 ribu jiwa atau 4,22 persen.

**Tabel II.19.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019**

| Penduduk Miskin Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan | | | | | | |
| Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan | Ribu Jiwa | 157,18 | 150,6 | 166,5 | 168,7 | 162,39 |
| Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan | Ribu Jiwa | 707,34 | 646,21 | 659,47 | 610,94 | 597,19 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Penduduk Miskin Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Penduduk Miskin Kota + Desa | Ribu Jiwa | 864,51 | 796,81 | 825,97 | 779,64 | 759,58 |
| Persentase Penduduk Miskin Perkotaan | % | 4,93 | 4,47 | 4,76 | 4,48 | 4,22 |
| Persentase Penduduk Miskin Perdesaan | % | 13,22 | 12,3 | 12,65 | 12,15 | 11,90 |
| Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa | % | 10,12 | 9,24 | 9,48 | 8,87 | 8,56 |
| Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Nasional | | | | | | |
| Jumlah Penduduk Miskin Nasional | Juta Jiwa | 28.513,57 | 27.764,32 | 26.582,99 | 25.674,58 | 24.785,87 |
| Persentase Penduduk Miskin Nasional | % | 11,13 | 10,70 | 10,12 | 9,66 | 9,22 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Garis kemiskinan di Sulawesi Selatan selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan inflasi. Garis kemiskinan wilayah perdesaan selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 6,66 persen, sementara garis kemiskinan perkotaan rata mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 6,79 persen. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Nasional, garis kemiskinan perkotaan dan garis kemiskinan perdesaan di Sulawesi Selatan masih lebih rendah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.20.

Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019

| Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan | | | | | | |
| Perkotaan | Rupiah/ Kapita/Bulan | 274.140 | 286.669 | 303.834 | 327.725 | 354.770 |
| Perdesaan | Rupiah/ Kapita/Bulan | 254.524 | 267.428 | 287.788 | 306.250 | 331.064 |
| Perkotaan + Perdesaan | Rupiah/ Kapita/Bulan | 261.854 | 275.361 | 294.358 | 315.738 | 341.555 |
| Garis Kemiskinan Nasional | | | | | | |
| Perkotaan | Rupiah/ Kapita/Bulan | 356.378 | 372.114 | 400.995 | 425.770 | 442.063 |
| Perdesaan | Rupiah/ Kapita/Bulan | 333.034 | 350.420 | 370.910 | 392.154 | 404.398 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

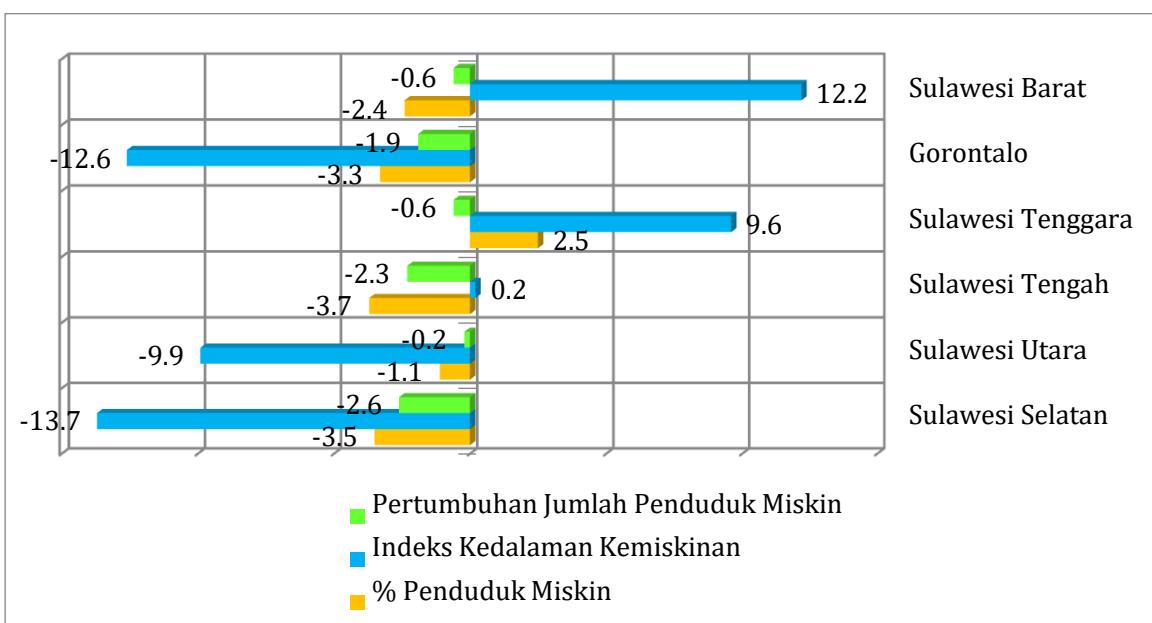
Jika dibandingkan persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019 menunjukkan bahwa, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi berada di Sulawesi Barat sementara Sulawesi Selatan menunjukkan nilai indeks kedalaman kemiskinan yang terendah dibanding 5 provinsi lainnya. Persentase pertumbuhan penduduk miskin juga menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

terendah dibanding provinsi lainnya diwilayah Sulawesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik untuk wilayah Pulau Sulawesi, selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II.4.

Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita tercatat sebesar 39,95 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 57,03 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Walaupun terjadi kenaikan, namun nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional yaitu 59,07 juta rupiah, serta belum mencapai target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yaitu sebesar 57,64 juta rupiah. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.21.
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK)
Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| PDRB/PDB Perkapita (ADHB) | | | | | | |
| Sulawesi Selatan | Juta Rp | 39,95 | 43,82 | 47,82 | 52,64 | 57,03 |
| Nasional | Juta Rp | 45,12 | 47,94 | 51,89 | 55,99 | 59,07 |
| PDRB/PDB Perkapita (ADHK) | | | | | | |
| Sulawesi Selatan | Juta Rp | 29,44 | 31,30 | 33,23 | 35,25 | 37,35 |
| Nasional | Juta Rp | 35,16 | 36,47 | 37,85 | 39,34 | 40,84 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

PDRB perkapita (ADHB) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Walaupun demikian, dari 24 kabupaten/kota terdapat satu kabupaten yang PDRB perkapita mengalami penurunan nilai di tahun 2016 sampai 2018 dibanding nilai yang dicapai pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Luwu Timur. Namun nilai tersebut telah meningkat menjadi 70,07 juta rupiah di tahun 2019 dari 69,73 juta rupiah pada tahun 2015.

Adapun kabupaten/kota yang PDRB perkapitanya tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah Kota Makassar sebesar 116,87 juta rupiah, menyusul Kabupaten Pangkep dengan PDRB perkapita sebesar 77,46 juta rupiah dan Kabupaten Luwu Timur sebesar 77,07 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita terendah diantara kabupaten lainnya, adalah Kabupaten Gowa yang hanya mencapai 27,10 juta rupiah dan Kabupaten Jeneponto 27,74 Juta rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.22.

**Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| No | Kab. / Kota | PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp) | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kep. Selayar | 31,86 | 35,46 | 39,27 | 43,62 | 47,50 |
| 2 | Bulukumba | 23,31 | 26,06 | 29,03 | 31,55 | 33,80 |
| 3 | Bantaeng | 30,42 | 34,13 | 37,41 | 41,63 | 46,80 |
| 4 | Jeneponto | 19,69 | 21,94 | 23,94 | 26,03 | 27,74 |
| 5 | Takalar | 23,78 | 26,73 | 29,21 | 31,51 | 34,01 |
| 6 | Gowa | 19,03 | 21,04 | 22,98 | 25,07 | 27,10 |
| 7 | Sinjai | 31,57 | 34,61 | 37,89 | 41,88 | 44,90 |
| 8 | Maros | 45,94 | 52,09 | 56,12 | 60,92 | 64,33 |
| 9 | Pangkep | 56,94 | 62,92 | 67,60 | 71,98 | 77,46 |
| 10 | Barru | 28,87 | 31,75 | 34,51 | 38,09 | 41,71 |
| 11 | Bone | 31,36 | 35,15 | 39,04 | 43,87 | 47,50 |
| 12 | Soppeng | 30,27 | 34,89 | 39,19 | 44,12 | 48,18 |
| 13 | Wajo | 38,45 | 41,94 | 45,08 | 47,15 | 49,87 |
| 14 | Sidrap | 32,12 | 36,66 | 40,24 | 43,25 | 46,01 |
| 15 | Pinrang | 35,83 | 39,78 | 43,95 | 48,29 | 52,05 |
| 16 | Enrekang | 26,20 | 29,22 | 31,28 | 32,81 | 35,36 |
| 17 | Luwu | 29,59 | 33,55 | 36,56 | 40,20 | 43,25 |
| 18 | Tana Toraja | 21,43 | 23,72 | 26,15 | 29,31 | 31,96 |
| 19 | Luwu Utara | 28,73 | 32,02 | 35,02 | 38,65 | 41,70 |
| 20 | Luwu Timur | 69,73 | 61,72 | 63,71 | 69,41 | 70,07 |
| 21 | Toraja Utara | 26,10 | 29,91 | 33,80 | 37,84 | 41,50 |
| 22 | Makassar | 78,94 | 87,13 | 95,67 | 106,23 | 116,87 |
| 23 | Parepare | 36,50 | 39,35 | 42,88 | 45,94 | 49,80 |
| 24 | Palopo | 31,68 | 34,04 | 36,83 | 40,32 | 43,02 |
| SULAWESI SELATAN | | 39,95 | 43,82 | 47,82 | 52,64 | 57,03 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Berdasarkan skala regional, pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sulawesi Selatan merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi dari Tahun 2017 sampai tahun 2019, dan selalu berada diatas PDB per kapita Nasional. Meski demikian, pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sulawesi Selatan mengalami tren penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan tahun 2015–2019 sebesar 0,97 persen. Faktor kedua adalah pertumbuhan PDRB atau

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2019 Sulawesi Selatan mencapai 6,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa skala pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibandingkan skala pertumbuhan penduduknya, sehingga pertumbuhan PDRB per kapita Sulawesi Selatan lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB-nya.

Tabel II.23.

Perbandingan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

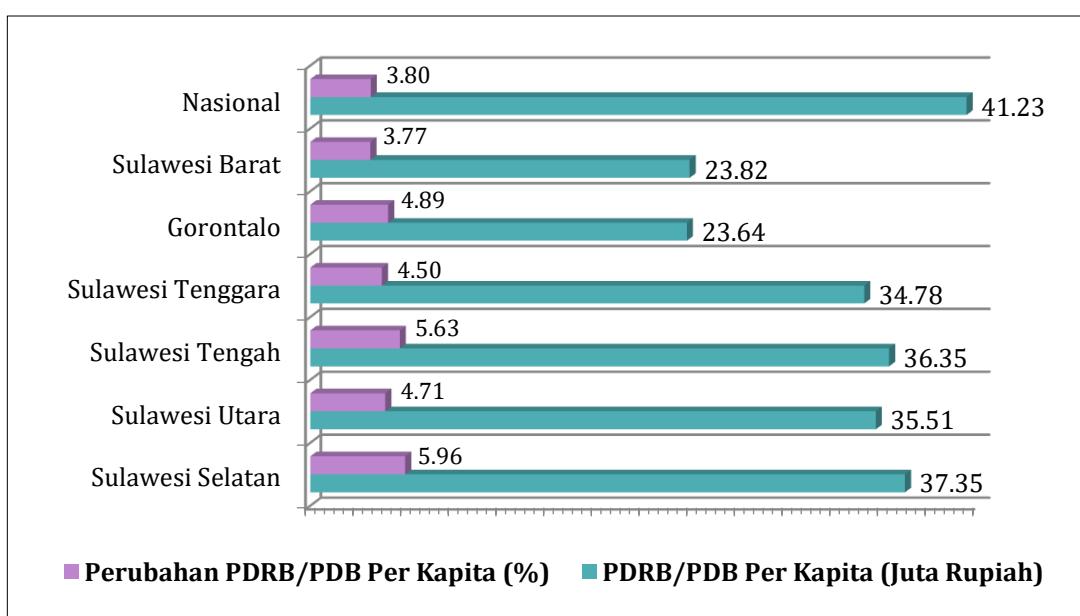
| WILAYAH (Nasional dan Provinsi) | PDRB/PDB Perkapita adhk (Rp.) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Perkapita 2018 – 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| NASIONAL | 35.162 | 36.469 | 37.851 | 39.339 | 40.844 | 3.82 |
| Sulawesi Selatan | 29.436 | 31.303 | 33.234 | 35.249 | 37.351 | 6.13 |
| Sulawesi Utara | 29.196 | 30.68 | 32.297 | 33.915 | 35.512 | 5.02 |
| Sulawesi Tengah | 28.779 | 31.151 | 32.86 | 34.411 | 86.347 | 42.34 |
| Sulawesi Tenggara | 29.203 | 30.476 | 31.894 | 33.286 | 34.783 | 4.47 |
| Gorontalo | 19.474 | 40.427 | 21.478 | 22.54 | 23.642 | 17.64 |
| Sulawesi Barat | 20.251 | 21.068 | 22.001 | 22.951 | 23.817 | 4.14 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se-Sulawesi, Tahun 2015-2019 (diolah)

Nilai PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan dalam Periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan 6,12 persen pertahun. PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 senilai Rp. 29.436,00 ribu meningkat menjadi Rp. 37.351,00 ribu pada tahun 2019. Dalam skala Nasional, selama lima tahun terakhir PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah PDRB/PDB perkapita riil Nasional, dimana PDRB/PDB per kapita riil nasional sebesar Rp. 35.162,00 ribu di tahun 2015 menjadi Rp. 40.844,00 ribu di tahun 2019, dengan rata-rata hampir 38 juta pertahun. Sementara di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan nilai PDRB per kapita riil terbesar yaitu Rp. 86.347,00 ribu. Seperti pada grafik berikut.

Grafik II.5.

Perbandingan Perubahan PDRB/PDB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi, Tahun 2015-2020

2.2.1.4. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisien gini mendekati satu. Semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Rasio gini Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 untuk periode September tercatat sebesar 0,390 yang masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 0,380. Nilai ini juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,385. Namun bila dibandingkan dengan Rasio Gini di Pulau Sulawesi, maka Rasio Gini Sulawesi Selatan tahun 2019 masih lebih baik dari Provinsi Provinsi Gorontalo sebesar 0,420. Rasio Gini Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional dari tahun ke tahun capaiannya berfluktuasi. Selengkapnya pada tabel berikut.

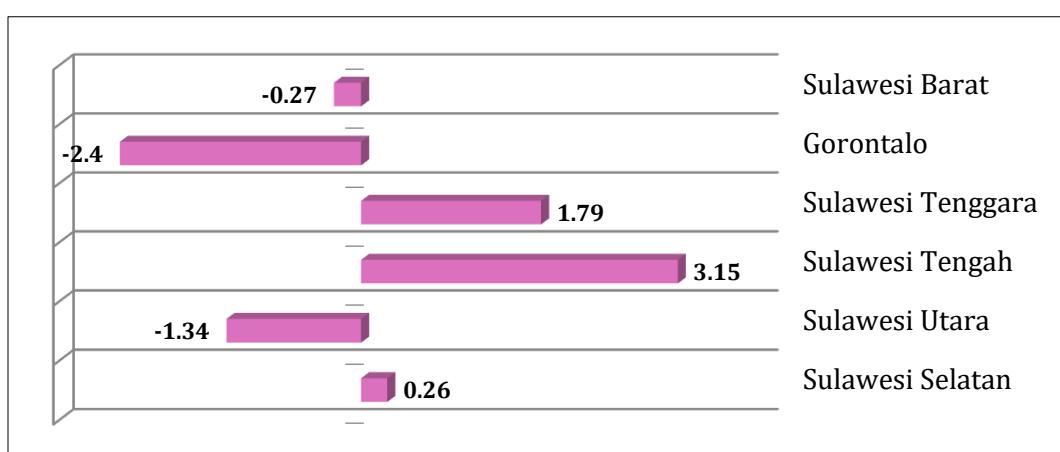
**Tabel II.24.
Perbandingan Rasio Gini Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan
Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Gini Rasio Periode September | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Selatan | 0,424 | 0,400 | 0,429 | 0,390 | 0,390 |
| Sulawesi Utara | 0,366 | 0,379 | 0,394 | 0,380 | 0,370 |
| Sulawesi Tengah | 0,374 | 0,347 | 0,345 | 0,330 | 0,320 |
| Sulawesi Tenggara | 0,381 | 0,388 | 0,404 | 0,390 | 0,390 |
| Gorontalo | 0,401 | 0,410 | 0,405 | 0,410 | 0,420 |
| Sulawesi Barat | 0,363 | 0,371 | 0,339 | 0,370 | 0,370 |
| Nasional | 0,408 | 0,394 | 0,391 | 0,384 | 0,380 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Memperhatikan capaian Gini Rasio Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2019, maka diperoleh gambaran bahwa terjadi berbaikan ditahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,01 poin, demikian pula dengan Provinsi Sulwesi Tenggara, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan ketimpangan sebesar 0,06 poin. Selengkapnya pada grafik berikut.

**Grafik II.6.
Perubahan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lainnya
di Pulau Sulawesi, Tahun 2019**



Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Tahun 2020

2.2.1.5 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks Ketimpangan Williamson berdasarkan data pada tabel berikut menunjukkan nilai ketimpangan yang berfluktuasi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah/daerah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding wilayah/daerah lain meskipun pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Indeks Ketimpangan Williamson pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,639 dari tahun 2018 dengan nilai indeks 0,622, atau mengalami penurunan nilai indeks sebesar 2,73 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut belum mencapai target dalam RPJMD yang ditargetkan sebesar 0,580. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.25.
Indeks Ketimpangan Williamson
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Tahun | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indeks Ketimpangan Williamson | 0,616 | 0,603 | 0,610 | 0,622 | 0,639 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 sebesar 4,97 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 200.304 orang. Pada Agustus 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan sebesar 4,62 persen, mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2018 yang besarnya 4,94persen. Capaian ini menunjukkan bahwa target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam RPJMD yang sebesar 5,17 persen telah tercapai atau melampaui target, seperti pada tabel berikut.

Tabel II.26.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

| Wilayah | Satuan | TPT Periode Agustus | | | | |
|-------------------|--------|---------------------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nasional | % | 6,18 | 5,61 | 5,50 | 5,30 | 5,23 |
| Sulawesi Utara | % | 9,03 | 6,18 | 7,18 | 6,61 | 6,01 |
| Sulawesi Tengah | % | 4,10 | 3,29 | 3,81 | 3,37 | 3,11 |
| Sulawesi Tenggara | % | 5,55 | 2,72 | 3,30 | 3,19 | 3,52 |
| Gorontalo | % | 4,65 | 2,76 | 4,28 | 3,70 | 3,76 |
| Sulawesi Barat | % | 3,35 | 3,33 | 3,21 | 3,01 | 2,98 |
| Sulawesi Selatan | % | 5,95 | 4,80 | 5,61 | 4,94 | 4,62 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020

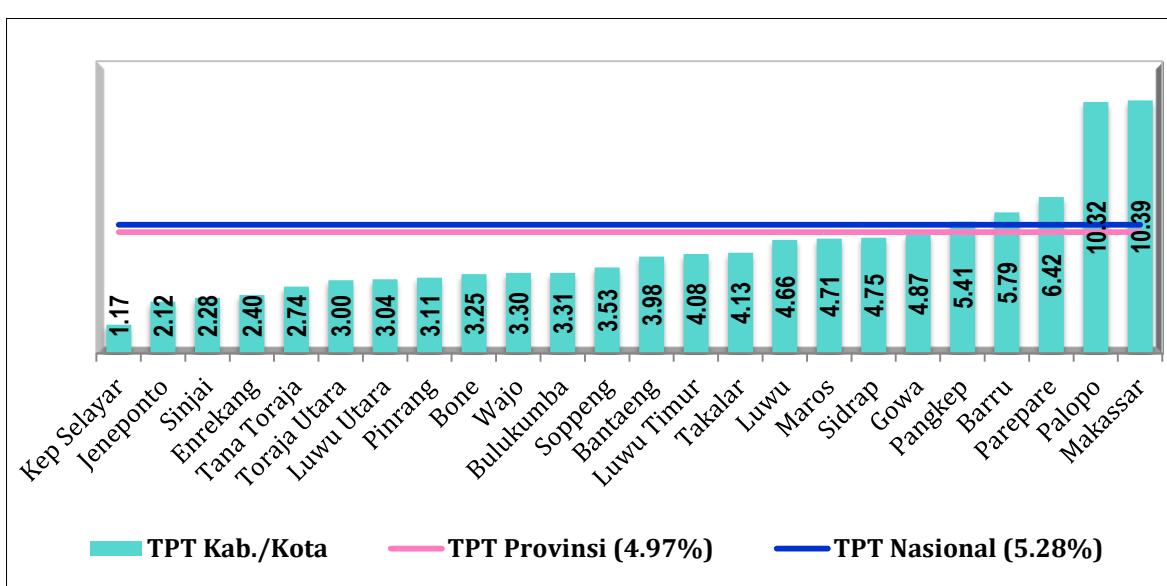
Pada skala regional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi se Sulawesi tahun 2019 dapat digambarkan bahwa dari 6 (enam) provinsi di Pulau Sulawesi, terdapat 4 (empat) provinsi yang Tingkat Pengangguran Terbukanya mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu Provinsi Sulawesi Utara dari 6,61 persen turun menjadi 6,01 persen, disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

4,94 persen turun menjadi 4,62 persen, kemudian Provinsi Sulawesi Tengah dari 3,37 persen turun menjadi 3,11 persen, serta Sulawesi Barat dari 3,01 menjadi 2,98. Sedangkan 2 (dua) provinsi lainnya yaitu Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan Tingkat Pengangguran Terbukanya dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sementara Provinsi yang Tingkat Pengangguran Terbukanya berada diatas rata-rata Nasional adalah Sulawesi Utara.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dapat digambarkan bahwa dari 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang angka Tingkat Pengangguran Terbukanya berada diatas rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu Kota Makassar dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 10,39 persen, disusul Kota Palopo dengan TPT 10,32 persen, dan Kota Parepare 6,42 persen, kemudian Kabupaten Barru 5,97 persen dan Kabupaten Pangkep 5,41 persen. Sementara 19 kabupaten lainnya masih memiliki angka Tingkat Pengangguran Terbuka dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Seperti pada grafik berikut.

Grafik II.7.
**Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan cenderung mengalami kemajuan, dimana pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan sebesar 69,15 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 71,66 lebih rendah daripada Indeks Pembangunan Manusia Nasional yang mencapai 71,92.

Memperhatikan capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2019, walaupun capaiannya masih di bawah Indeks Pembangunan Manusia Nasional, akan tetapi peningkatannya sebanyak 0,76 poin lebih besar daripada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Nasional hanya sebesar 0,53 poin dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yaitu sebesar 71,58. Apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan regional wilayah Pulau Sulawesi, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi lain di Pulau Sulawesi kecuali provinsi Sulawesi Utara sebesar 72,99.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.27.
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan,
Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019**

| Provinsi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Selatan | 69,15 | 69,76 | 70,34 | 70,90 | 71,66 |
| Sulawesi Utara | 70,39 | 71,05 | 71,66 | 72,20 | 72,99 |
| Sulawesi Tengah | 66,76 | 67,47 | 68,11 | 68,88 | 69,50 |
| Sulawesi Tenggara | 68,75 | 69,31 | 69,86 | 70,61 | 71,20 |
| Gorontalo | 65,86 | 66,29 | 67,01 | 67,71 | 68,49 |
| Sulawesi Barat | 62,96 | 63,60 | 64,30 | 65,10 | 65,73 |
| Nasional | 69,55 | 70,18 | 70,81 | 71,39 | 71,92 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menggambarkan bahwa Kota Makassar memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi yaitu sebesar 82,25 dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto yang hanya sebesar 64,00. Secara lengkap dapat diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel II.28.
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| No. | Kab/Kota | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | |
|-----|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kep. Selayar | 64,32 | 64,95 | 65,39 | 66,04 | 66,91 |
| 2 | Bulukumba | 65,58 | 66,46 | 67,08 | 67,70 | 68,28 |
| 3 | Bantaeng | 66,20 | 66,59 | 67,27 | 67,76 | 68,30 |
| 4 | Jeneponto | 61,61 | 61,81 | 62,67 | 63,33 | 64,00 |
| 5 | Takalar | 64,07 | 64,96 | 65,48 | 66,07 | 66,94 |
| 6 | Gowa | 66,87 | 67,70 | 68,33 | 68,87 | 69,66 |
| 7 | Sinjai | 64,48 | 65,36 | 65,80 | 66,24 | 67,05 |
| 8 | Maros | 67,13 | 67,76 | 68,42 | 68,94 | 69,50 |
| 9 | Pangkep | 66,65 | 66,86 | 67,25 | 67,71 | 68,29 |
| 10 | Barru | 68,64 | 69,07 | 69,56 | 70,05 | 70,60 |
| 11 | Bone | 63,11 | 63,86 | 64,16 | 65,04 | 65,67 |
| 12 | Soppeng | 65,33 | 65,95 | 66,67 | 67,60 | 68,26 |
| 13 | Wajo | 66,90 | 67,52 | 68,18 | 68,57 | 69,05 |
| 14 | Sidrap | 69,00 | 69,39 | 69,84 | 70,60 | 71,05 |
| 15 | Pinrang | 69,24 | 69,42 | 69,90 | 70,62 | 71,12 |
| 16 | Enrekang | 70,03 | 70,79 | 71,44 | 72,25 | 72,66 |
| 17 | Luwu | 68,11 | 68,71 | 69,02 | 69,60 | 70,39 |
| 18 | Tana Toraja | 65,75 | 66,25 | 66,82 | 67,66 | 68,25 |
| 19 | Luwu Utara | 67,44 | 67,81 | 68,35 | 68,79 | 69,46 |

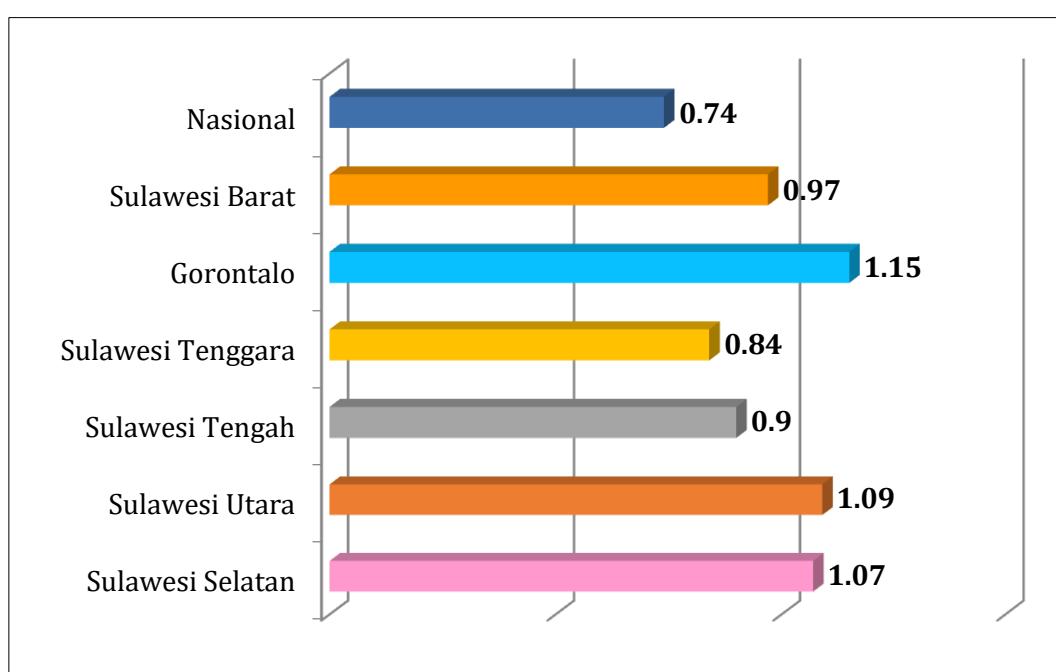
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kab/Kota | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 20 | Luwu Timur | 70,43 | 70,95 | 71,46 | 72,16 | 72,80 |
| 21 | Toraja Utara | 66,76 | 67,49 | 67,90 | 68,49 | 69,23 |
| 22 | Makassar | 80,53 | 80,53 | 81,13 | 81,73 | 82,25 |
| 23 | Pare-Pare | 76,48 | 76,48 | 76,68 | 77,19 | 77,62 |
| 24 | Palopo | 76,45 | 76,45 | 76,71 | 77,30 | 77,98 |
| Sulawesi Selatan | | 67,92 | 68,49 | 69,15 | 70,34 | 71,66 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Secara regional di Pulau Sulawesi, perubahan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan berada pada peringkat ketiga (1,07 persen) setelah Provinsi Gorontalo (1,15 persen) dan Provinsi Sulawesi Utara (1,09 persen). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Sulawesi Selatan terhadap hasil pembangunan. Selengkapnya pada grafik berikut.

**Grafik II.8.
Perbandingan Perubahan IPM Sulawesi Selatan, Nasional dengan
Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019**



Sumber: BPS Provinsi Tahun 2015-2020

2.2.2.3 Indeks Pendidikan

Dalam penghitungan indeks Pendidikan sebagai dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan ratarata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2013-2019, tren Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,15 persen. Sedangkan tren rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang signifikan pada periode yang sama. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 2,99 persen. Perkembangan indeks Pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.29.
Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angka Harapan Lama Sekolah | 12,99 | 13,16 | 13,28 | 13,34 | 13,36 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | 7,64 | 7,75 | 7,95 | 8,02 | 8,26 |
| Indeks Pendidikan | 61,55 | 62,39 | 63,39 | 63,79 | 64,64 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (olahan) Tahun 2020

Dari tabel di atas, meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Selatan telah mencapai 13,36 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan rata-rata tumbuh 1,97 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Selatan yang lebih baik. Hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Adapun perkembangan dimensi pendidikan Kabupaten/kota pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Harapan Lama Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan 2019 tumbuh sebesar 0,15 persen dari 13,34 menjadi 13,36 pada tahun 2019. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.30.
Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten/kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

| Kabupaten/ Kota | Harapan Lama Sekolah (HLS) | | | Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) | | |
|--------------------|----------------------------|-------|-----------|---------------------------------|------|-----------|
| | 2018 | 2019 | Pert. (%) | 2018 | 2019 | Pert. (%) |
| Selayar | 12,46 | 12,48 | 0,16 | 7,40 | 7,63 | 3,11 |
| Bulukumba | 12,79 | 12,91 | 0,94 | 7,34 | 7,43 | 1,23 |
| Bantaeng | 12,01 | 12,03 | 0,17 | 6,47 | 6,48 | 0,15 |
| Jeneponto | 11,95 | 11,97 | 0,17 | 6,21 | 6,48 | 4,35 |
| Takalar | 12,22 | 12,25 | 0,25 | 6,91 | 7,18 | 3,91 |
| Gowa | 13,29 | 13,48 | 1,43 | 7,75 | 7,97 | 2,84 |
| Sinjai | 12,85 | 12,87 | 0,16 | 7,29 | 7,48 | 2,61 |
| Maros | 12,99 | 13,02 | 0,23 | 7,43 | 7,46 | 0,40 |
| Pangkajene Kep. | 12,41 | 12,51 | 0,81 | 7,49 | 7,60 | 1,47 |
| Barru | 13,56 | 13,57 | 0,07 | 7,86 | 7,96 | 1,27 |
| Bone | 12,67 | 12,80 | 1,03 | 6,97 | 6,98 | 0,14 |
| Soppeng | 12,57 | 12,73 | 1,27 | 7,63 | 7,74 | 1,44 |
| Wajo | 13,11 | 13,13 | 0,15 | 6,79 | 6,80 | 0,15 |
| Sidenreng Rappang | 12,91 | 12,93 | 0,15 | 7,79 | 7,83 | 0,51 |
| Pinrang | 13,20 | 13,22 | 0,15 | 7,84 | 7,85 | 0,13 |
| Enrekang | 13,68 | 13,69 | 0,07 | 8,68 | 8,89 | 2,42 |
| Luwu | 13,30 | 13,32 | 0,15 | 7,97 | 8,15 | 2,26 |
| Tana Toraja | 13,50 | 13,58 | 0,59 | 7,94 | 8,02 | 1,01 |
| Luwu Utara | 12,39 | 12,42 | 0,24 | 7,53 | 7,78 | 3,32 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kabupaten/ Kota | Harapan Lama Sekolah (HLS) | | | Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | Pert. (%) | 2018 | 2019 | Pert. (%) |
| Luwu Timur | 12,81 | 12,82 | 0,08 | 8,45 | 8,54 | 1,07 |
| Toraja Utara | 13,35 | 13,37 | 0,15 | 7,76 | 7,92 | 2,06 |
| Makassar | 15,55 | 15,56 | 0,06 | 11,09 | 11,20 | 0,99 |
| Pare Pare | 14,47 | 14,49 | 0,14 | 10,29 | 10,30 | 0,10 |
| Palopo | 15,06 | 15,07 | 0,07 | 10,51 | 10,75 | 2,28 |
| Sulawesi Selatan | 13,34 | 13,36 | 0,15 | 8,02 | 8,26 | 2,99 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (olahan) Tahun 2020.

Dari tabel di atas terdapat tiga belas kabupaten/kota yang pertumbuhan HLS nya lebih tinggi dibanding pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa sebesar 1,43 persen, Kabupaten Soppeng sebesar 1,27 persen, Kabupaten Bone sebesar 1,03 persen, Kabupaten Bulukumba sebesar 0,94, Kabupaten Pangkep sebesar 0,81 persen, Kabupaten Tana Toraja sebesar 0,59 persen, Kabupaten Takalar sebesar 0,25 persen, Kabupaten Luwu Utara sebesar 0,24 persen, Kabupaten Maros sebesar 0,23 persen, Kabupaten Bantaeng sebesar 0,17 persen, Kabupaten Jeneponto sebesar 0,17 persen, Kabupaten Selayar sebesar 0,16 persen, dan Kabupaten Sinjai sebesar 0,16 persen.

Terdapat delapan kabupaten/kota yang mempunyai capaian HLS lebih tinggi dari HLS Sulawesi Selatan pada tahun 2019. HLS tertinggi dicapai oleh Kota Makassar sebesar 15,56 tahun, disusul oleh Kota Palopo sebesar 15,07 tahun, Kota Parepare sebesar 14,49 tahun, Kabupaten Enrekang sebesar 13,69 tahun, Kabupaten Tana Toraja sebesar 13,58 tahun, Kabupaten Barru sebesar 13,57 tahun, Kabupaten Gowa sebesar 13,48 persen dan Kabupaten Toraja Utara sebesar 13,37 tahun.

Capaian RLS paling tinggi pada tahun 2019 adalah Kota Makassar sebesar 11,20 tahun. Dua kota lainnya yang mencapai angka RLS di atas 10 yaitu Kota Palopo (10,51) dan Kota Parepare (10,29). Artinya tiga kota ini rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah sampai dengan SMA kelas X. RLS terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Jeneponto dimana capaian RLS mencapai 6,48. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto sampai dengan kelas VI SD.

2.2.2.4 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digambarkan melalui angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara umum kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan meningkat berdasarkan rata-rata angka harapan hidup yang semakin panjang. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.31.

Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 69,8 | 69,82 | 69,84 | 70,08 | 70,43 |
| Indeks Kesehatan | Nilai | 76,62 | 76,65 | 76,65 | 76,65 | 76,65 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2019 (data diolah)

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Angka Harapan Hidup di Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Selatan mencapai 69,80 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,43 tahun dengan indeks Kesehatan 76,65. Hal ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 77,03 belum tercapai. sebagaimana tabel dibawah.

Tabel II.32.

**Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2015-2019**

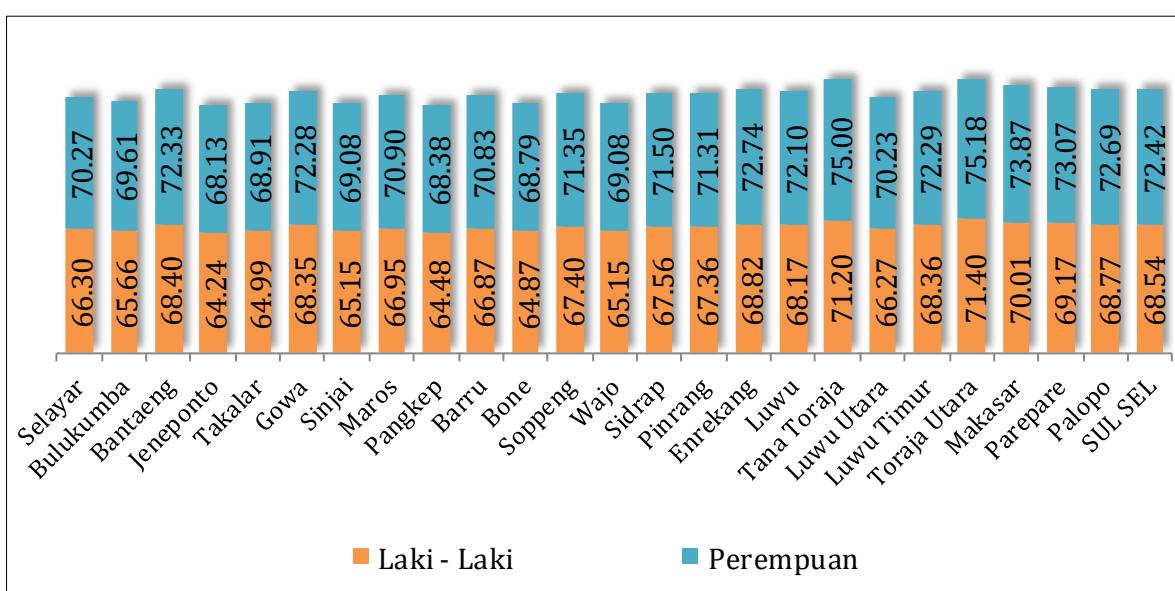
| Wilayah | Satuan | Angka Harapan Hidup | | | | |
|------------------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nasional | Tahun | 70,86 | 70,95 | 71,11 | 71,23 | 71,39 |
| Sulawesi Selatan | Tahun | 69,80 | 69,82 | 69,84 | 70,08 | 70,43 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Angka Harapan Hidup di kabupaten/kota menurut jenis kelamin pada tahun 2019, secara umum menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup tertinggi berada pada jenis kelamin perempuan dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Jika di lihat data tersaji, dimana Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja memiliki Angka Harapan Hidup pada jenis kelamin perempuan lebih tinggi dari laki-laki dibanding kabupaten/kota lainnya se Sulawesi Selatan. Adapun Angka Harapan Hidup di Kabupaten Toraja Utara mencapai 75,18 tahun dan di Kabupaten Tana Toraja mencapai 75,00 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup pada jenis kelamin laki-laki juga demikian berada di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yaitu 71,40 tahun dan 71,20 tahun. Capaian Angka Harapan Hidup tertinggi menurut jenis kelamin perempuan maupun laki-laki tersebut sudah berada diatas rata-rata capaian Provinsi. Sedangkan Angka Harapan Hidup terendah menurut jenis kelamin perempuan maupun laki-laki terdapat di Kabupaten Jeneponto, yaitu perempuan mencapai 68,13 tahun dan laki-laki mencapai 64,24 tahun dan berada dibawah capaian Provinsi.

Grafik II.9.

**Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Grafik II.10.

Perbandingan Perubahan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



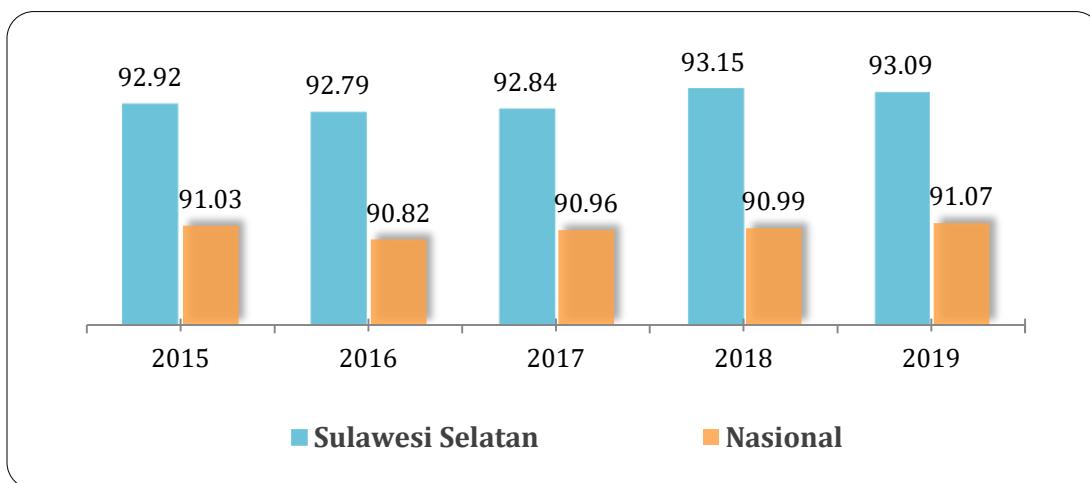
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 indeks pembangunan gender mencapai 93,15 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 93,09. Walaupun mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Nasional, maka Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Selatan masih diatas angka Nasional. Meskipun demikian capaian tersebut masih dibawah dari target RPJMD sebesar 93,18. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II.11.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019



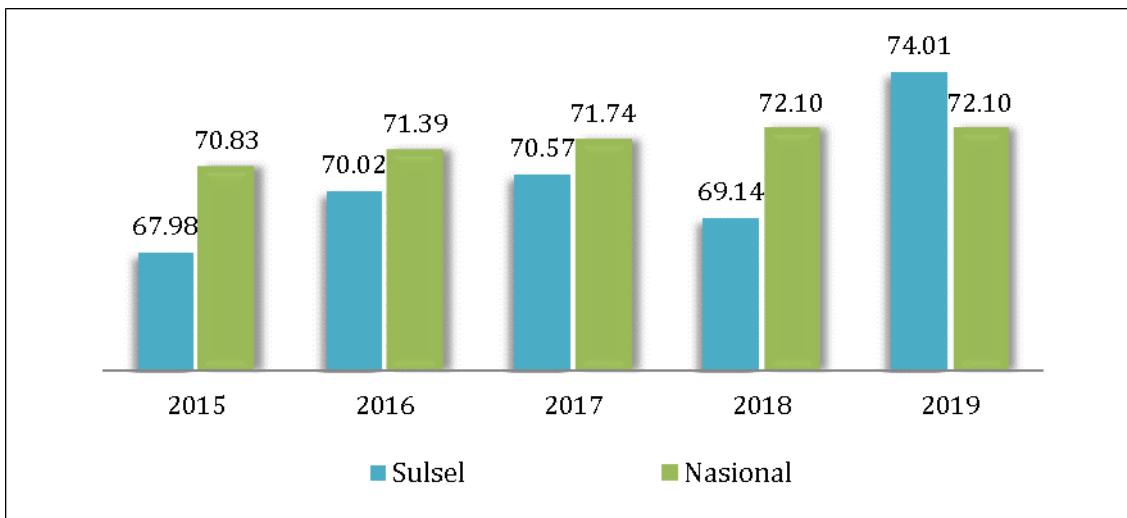
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Berdasarkan indikator komposit pembentuk dari Indeks Pembangunan Gender, ternyata Angka Harapan Hidup laki-laki jauh lebih rendah dibandingkan perempuan. Demikian juga di tingkat nasional. kondisi ini terjadi baik pada tahun 2015 maupun tahun 2019. Untuk melihat peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi, maka dapat diketahui dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Selatan selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 Indeks Pemberdayaan Gender mencapai angka 67,98 atau lebih rendah dari Indeks Pemberdayaan Gender Nasional yang mencapai angka 70,83. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan, tetapi masih dibawah angka Indeks Pemberdayaan Gender Nasional. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan bahkan lebih tinggi dari nasional yaitu 74,01, sedangkan Nasional hanya 72,10. Seperti pada grafik berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Grafik II.12.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Berdasarkan upaya yang dilakukan dalam mendorong pengarusutamaan gender dan kabupaten/kota layak anak, Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2019, Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai level Mentor terkait implementasi pengarusutamaan gender. Pencapaian ini tidak terlepas juga dari pencapaian kabupaten/kota, dimana pada tahun 2019 jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai penghargaan atas implementasi pangarusutamaan gender sebanyak 14 kabupaten/kota dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel II.33.
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, Tahun 2019

| No | Kabupaten/Kota | Kategori APE |
|----|----------------|--------------|
| 1 | Sidrap | Utama |
| 2 | Luwu Timur | Utama |
| 3 | Sinjai | Utama |
| 4 | Makassar | Madya |
| 5 | Maros | Madya |
| 6 | Bone | Madya |
| 7 | Bulukumba | Madya |
| 8 | Bantaeng | Madya |
| 9 | Soppeng | Madya |
| 10 | Wajo | Madya |
| 11 | Parepare | Madya |
| 12 | Luwu | Madya |
| 13 | Pangkep | Pratama |
| 14 | Luwu Utara | Pratama |

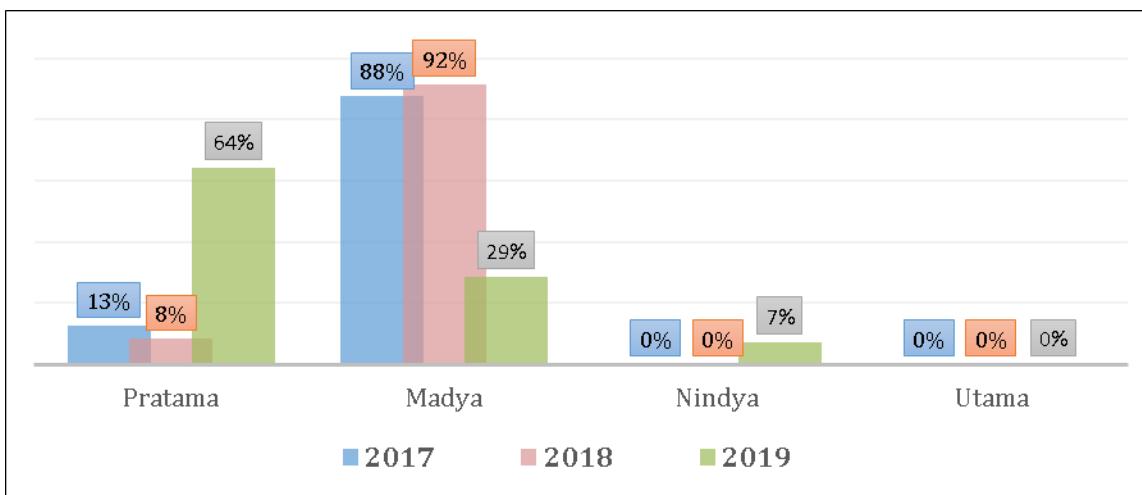
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

Pencapaian Kabupaten/Kota Layak anak di Sulawesi Selatan juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2019, Kota Makassar telah berhasil masuk pada kategori Nindya, dimana 2 tahun sebelumnya kabupaten/kota di Sulawesi Selatan paling tinggi hanya mencapai level Madya. Adapun data pencapaian KLA di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Grafik II.13.

Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak di Sulawesi Selatan berdasarkan Kategorinya Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

2.2.2.6. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan telah berjalan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi Sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

| Indikator | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | |
|------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Sulawesi Selatan | CC | CC | CC | CC | B |

Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan reformasi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014 – 2017 berada pada kategori CC yang menunjukkan bahwa secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. Pada tahun 2018 meningkat berada pada kategori B yang menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

2.2.2.7. Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui penilaian terhadap Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Adapun capaian kinerja Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.35.
Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP),
Tahun 2018-2019

| Komponen Yang dinilai | Bobot | Nilai | | Capaian Kinerja | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 21,23 | 21,74 | 70,77 | 72,47 |
| Pengukuran Kinerja | 25 | 12,27 | 13,22 | 49,08 | 52,88 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 11,72 | 11,25 | 78,13 | 75,00 |
| Evaluasi Kinerjsa | 10 | 7,24 | 6,6 | 72,40 | 66,00 |
| Capaian Kinerja | 20 | 11,82 | 12,25 | 59,10 | 61,25 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 64,28 | 65,06 | 64,28 | 65,06 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B | B | B | B |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai SAKIP mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang mencapai nilai 65,06 dari nilai 64,28 pada tahun 2018. Adapun komponen yang capaian kinerja tertinggi adalah pelaporan kinerja, sedangkan yang terendah adalah pengukuran kinerja. Nilai SAKIP tahun 2019 berada pada kategori B yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal meskipun belum optimal. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD nilai B, maka target pada tahun 2019 telah tercapai.

2.2.2.8. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Penilaian terhadap kualitas pelayanan publik diukur melalui indeks pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan yaitu berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik yang dinilai pada 10 (sepuluh) unsur pelayanan. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pelayanan publik pada 9 (sembilan) unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh nilai sebesar 80,92 pada tahun 2019 yang termasuk dalam kategori B. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD dengan nilai D, maka target pada tahun 2019 telah tercapai bahkan melampai menjadi nilai B. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.36.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Tahun | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 44,58 | 44,626 | 44,63 | 51,55 | 80,92 |

Sumber: PPID Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Selain menggunakan IKM, mengukur tingkat kepuasan juga dengan menggunakan indeks pelayanan publik sebagai mana yang di atur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun capaian kinerja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mana pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.37.
Indeks Pelayanan Publik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

| Indikator | Indeks Pelayanan Publik | |
|------------------|-------------------------|-------|
| | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Selatan | 3,49 (B-) | 4 (B) |

Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 yang hanya bernilai B- (Kategori: Baik dengan cacatan) menjadi B (Kategori: baik) pada tahun 2019.

2.2.2.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan sangat dipengaruhi dari Pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan anggaran yang memadai, sumberdaya manusia yang cukup dan terampil serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik.

Target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 73,33 belum dapat dicapai secara optimal. Kurangnya pendanaan untuk merealisasikan jumlah target dan kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama kurang optimalnya pencapaian target nilai indeks kualitas lingkungan hidup. Nilai capaian IKLH dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.38.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Peningkatan Indeks Kualitas Air | Angka | 56,29 | 75,44 | 54,29 | 56,15 | 54,93 |
| Peningkatan Indeks Kualitas Udara | Angka | 76,80 | 85,80 | 88,66 | 88,67 | 88,69 |
| Peningkatan Indeks Tutupan Lahan | Angka | 50,85 | 55,43 | 54,81 | 60,41 | 61,14 |
| IKLH | | 67,01 | 70,54 | 73,24 | 65,37 | 67,54 |

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020

2.2.2.10. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Profil emisi Gas Rumah di Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 menunjukkan bahwa prediksi emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2030 adalah 63.597.394 ton CO₂eq. Dari total emisi GRK tersebut, distribusi emisi GRK terbesar adalah pada bidang energi yang menyumbang 60% emisi gas rumah kaca diikuti dengan bidang penggunaan lahan dengan emisi 26%, bidang pertanian dengan emisi 11% dan terakhir adalah bidang limbah dengan emisi 1,2% dari total emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Emisi GRK di Sulawesi Selatan di bidang energi utamanya berasal dari sub bidang transportasi. Tingginya tingkat emisi GRK bidang transportasi disebabkan karena prediksi penggunaan kendaraan bermotor yang memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menyebabkan berbagai permasalahan transportasi.

Berdasarkan hasil perhitungan Business as Usual (BaU) baseline untuk masing-masing bidang, maka target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi selatan adalah 5,6% di tahun 2030. Mitigasi penurunan emisi GRK diharapkan dapat disumbang oleh bidang penggunaan lahan (kehutanan) yang menyumbang penurunan emisi GRK sebesar (4,39%), bidang energi (0,74%), bidang limbah (0,32%) dan bidang pertanian (0,14%). Rendahnya target penurunan emisi pada bidang energi dibandingkan emisi yang ditimbulkan disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK pada sektor energi membutuhkan biaya yang lebih tinggi per satuan ton penurunan emisi GRK bila dibandingkan dengan biaya penurunan emisi GRK di bidang lainnya.

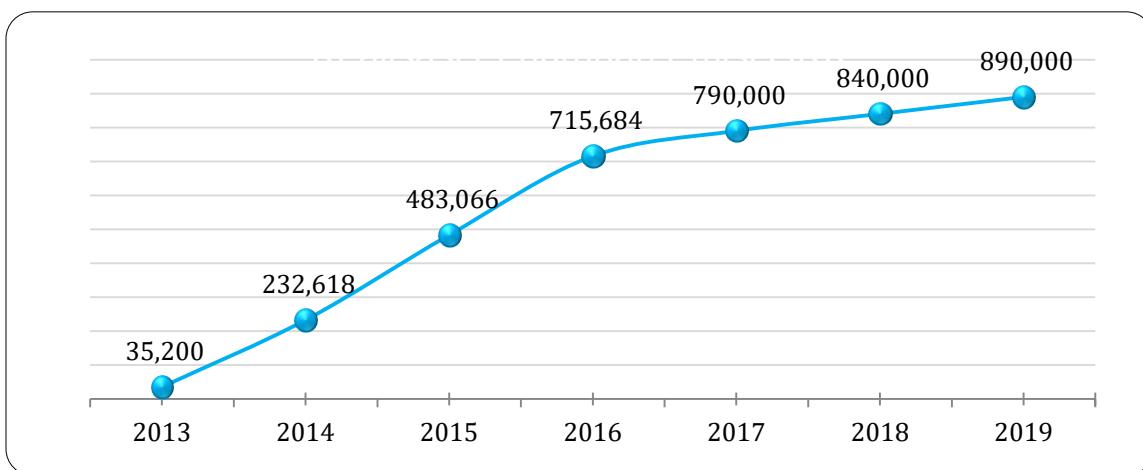
Hingga tahun 2019 capaian penurunan emisi GRK adalah 0,89 juta ton CO2Eq. Pencapaian penurunan emisi GRK dilaksanakan dengan program/kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di masing-masing OPD dengan capaian terbesar adalah dari bidang penggunaan lahan dengan kegiatan utama rehabilitasi hutan dan lahan termasuk didalamnya rehabilitasi kawasan pesisir dan penanaman tanaman perkebunan, bidang pertanian dengan kegiatan utama penggunaan pupuk organik serta pengembangan biogas, bidang energi dengan kegiatan utama pengembangan energi baru terbarukan dan sub bidang transportasi dengan kegiatan manajemen pengelolaan lalu lintas/transportasi dan bidang limbah dengan kegiatan utama pengelolaan sampah. Selain itu dalam menunjang aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan mengikuti program kampung iklim sejak tahun 2013 dan mendapatkan tropi Proklim Lestari (1 lokasi), Proklim Utama (18 lokasi) dan sertifikat Proklim Utama (45 lokasi). Selama dua tahun berturut-turut (2018-2019) Prov. Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk lebih jelasnya, capaian penurunan emisi GRK dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel II.39.
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Realisasi Penurunan Emisi GRK | (Ton CO2 Equivalen) | 483,000 | 716,000 | 790,000 | 840,000 | 890,000 |

Sumber : Pokja PPRK Prov. Sulsel, 2020

Grafik II.14.
Capaian Penurunan Emisi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019



Sumber : Pokja PPRK Prov. Sulsel, 2020.

2.3 Aspek Layanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah adalah perbandingan jumlah siswa SMA sederajat berapapun usianya dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16 hingga 18 tahun. Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Tahun 2018 Target (APK) Sekolah Menengah yaitu 80,50% dan realisasi adalah 81,74% yang berarti bahwa capaian sebesar 101,21%. Sedangkan Tahun 2019 Target APK 88,12% dan realisasi 86,09% yang berarti capaian sebesar 97,70%, Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena kenaikan target yang cukup tinggi di tahun 2019. Pada tahun 2019 (APK) Siswa Sekolah Menengah belum mencapai target, hal ini dapat disebabkan antara lain karena kondisi layanan pendidikan antar wilayah belum berimbang, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap usia sekolah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.40.

**Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi pada Wilayah Regional Sulawesi dan Nasional
Tahun 2015 - 2019**

| Wilayah | Satuan | Angka Partisipasi Kasar | | | | |
|-------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nasional | % | 78,02 | 80,89 | 82,84 | 80,68 | 83,98 |
| Sulawesi Utara | % | 86,30 | 86,32 | 91,73 | 82,25 | 86,60 |
| Sulawesi Tengah | % | 82,87 | 83,45 | 84,85 | 83,53 | 87,35 |
| Sulawesi Tenggara | % | 81,39 | 81,81 | 80,01 | 84,83 | 86,81 |
| Gorontalo | % | 86,89 | 88,67 | 80,89 | 84,25 | 88,64 |
| Sulawesi Barat | % | 84,94 | 83,49 | 80,34 | 84,48 | 84,10 |
| Sulawesi Selatan | % | 78,03 | 83,66 | 83,14 | 81,74 | 86,09 |

Sumber : BPS berbagai seri

Angka Partisipasi kasar (APK) tertinggi dari 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 tecapat pada Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangka Jene Kepulaan dan Kota Makassar dengan nilai diatas 100%, yang berarti bahwa jumlah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

siswa sekolah menengah dan sederajat diwilayah tersebut melampaui jumlah anak usia 16 – 18 Tahun, adapun data AKP pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selengkapnya pada table berikut.

Tabel II.41.
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019**

| No. | Kabupaten/Kota | Angka Partisipasi Kasar (APK) | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | Kepulauan Selayar | 86.45 | 90.52 |
| 2 | Bulukumba | 80.02 | 80.46 |
| 3 | Bantaeng | 72.80 | 74.06 |
| 4 | Jeneponto | 69.15 | 72.48 |
| 5 | Takalar | 97.92 | 101.01 |
| 6 | Gowa | 79.97 | 83.15 |
| 7 | Sinjai | 76.19 | 76.69 |
| 8 | Bone | 64.84 | 67.12 |
| 9 | Maros | 77.24 | 74.48 |
| 10 | Pangkajene Kepulauan | 93.15 | 100.20 |
| 11 | Baru | 72.09 | 70.90 |
| 12 | Soppeng | 89.49 | 91.13 |
| 13 | Wajo | 61.40 | 62.52 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 80.80 | 82.66 |
| 15 | Pinrang | 83.65 | 84.26 |
| 16 | Enrekang | 92.92 | 96.34 |
| 17 | Luwu | 87.97 | 72.86 |
| 18 | Tana Toraja | 84.06 | 88.50 |
| 19 | Luwu Utara | 82.22 | 88.48 |
| 20 | Luwu Timur | 77.46 | 66.99 |
| 21 | Toraja Utara | 63.81 | 67.55 |
| 22 | Makassar | 96.09 | 101.90 |
| 23 | Pare-Pare | 82.11 | 81.57 |
| 24 | Palopo | 91.56 | 88.67 |
| Sulawesi Selatan | | 81,74 | 86,09 |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah untuk tahun 2018 yaitu 64,25 persen dan realisasi 60,03 persen atau dengan capaian 93,43 persen. Untuk tahun 2019 target APM 63,00 persen dan realisasi sebesar 60,14 persen atau dengan capaian sebesar 95,46 persen. Jika dibandingkan dengan APM Nasional maka APM Sulawesi Selatan masih dibawah nilai APM Nasional. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.42.
**Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019**

| Jenjang Pendidikan | Satuan | Angka Partisipasi Murni (APM) | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Selatan | | | | | | |
| Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Tahun pada Jenjang SMA/SMK/MA | Orang | 270.335 | 260.974 | 257.122 | 537.684 | 537.698 |
| Jumlah Anak Usia 16 - 18 Tahun | Orang | 432.813 | 424.831 | 411.330 | 381.153 | 361.485 |
| Jumlah Anak Usia 16 - 18 Tahun yang tidak bersekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA | Orang | 162.478 | 163.857 | 154.208 | 119.776 | 80.162 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C | % | 59.47 | 59.62 | 59.86 | 60.03 | 60.14 |
| Nasional | | | | | | |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C | % | 59.71 | 59.95 | 60.37 | 60.67 | 60.84 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 (APM) Sekolah menengah sudah memenuhi target. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan capaian APM jenjang pendidikan menengah di Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas sekolah semakin terjangkau akibat diberlakukannya sistem zonasi yang mengurangi jarak dan waktu tempuh ke sekolah. Selain itu beberapa faktor yang mendorong pencapaian target ini antara lain Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar.

Tabel II.43.
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kep. Selayar | 61,80 | 65,65 | 67,59 | 69,75 | 70,51 |
| 2 | Bulukumba | 59,48 | 62,07 | 63,15 | 64,18 | 66,76 |
| 3 | Bantaeng | 67,41 | 64,24 | 63,53 | 64,10 | 61,37 |
| 4 | Jeneponto | 49,86 | 52,76 | 51,39 | 65,79 | 59,54 |
| 5 | Takalar | 61,07 | 60,53 | 62,07 | 69,47 | 83,37 |
| 6 | Gowa | 77,09 | 57,02 | 58,90 | 71,74 | 69,70 |
| 7 | Sinjai | 68,97 | 70,80 | 72,08 | 62,46 | 64,56 |
| 8 | Bone | 54,38 | 55,48 | 56,59 | 64,31 | 56,00 |
| 9 | Maros | 57,28 | 57,00 | 59,78 | 68,87 | 61,88 |
| 10 | Pangkajene Kep. | 57,83 | 52,95 | 54,48 | 81,44 | 83,62 |
| 11 | Baru | 65,98 | 69,77 | 69,18 | 64,70 | 58,15 |
| 12 | Soppeng | 66,03 | 70,88 | 71,41 | 68,57 | 73,75 |
| 13 | Wajo | 44,91 | 43,97 | 45,11 | 68,57 | 50,19 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 14 | Sidrap | 61,70 | 62,65 | 62,73 | 61,64 | 69,84 |
| 15 | Pinrang | 64,17 | 65,67 | 65,63 | 63,69 | 67,91 |
| 16 | Enrekang | 72,46 | 79,02 | 80,56 | 67,86 | 73,66 |
| 17 | Luwu | 60,48 | 59,63 | 58,93 | 77,13 | 56,43 |
| 18 | Tana Toraja | 81,11 | 79,54 | 76,50 | 73,76 | 66,19 |
| 19 | Luwu Utara | 73,53 | 67,32 | 67,03 | 67,03 | 71,82 |
| 20 | Luwu Timur | 71,88 | 70,91 | 71,41 | 73,55 | 53,58 |
| 21 | Toraja Utara | 70,96 | 68,72 | 69,21 | 72,52 | 65,99 |
| 22 | Makassar | 62,82 | 59,39 | 63,35 | 85,22 | 83,41 |
| 23 | Pare-Pare | 80,20 | 75,20 | 71,00 | 77,81 | 68,53 |
| 24 | Palopo | 80,98 | 74,41 | 71,94 | 73,58 | 72,03 |
| Sulawesi Selatan | | 59,47 | 59,62 | 59,86 | 60,03 | 60,14 |

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

c. Angka Partisipasi Sekolah

Target angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018 yaitu 64,25 persen dan realisasi 70,18 persen atau dengan capaian 109 persen. Untuk Tahun 2019 Target APS yaitu 82,07 persen dan realisasi 70,85 persen atau dengan capaian 86,33 persen. Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 karena pada tahun 2019 ada peningkatan target yang cukup signifikan yaitu dari 64,25 persen ke 82,07 persen, Adapun faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap usia masuk sekolah. Meskipun demikian angka partisipasi sekolah (APS) meningkat sebesar 0,67 poin. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.44.
Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Kelompok Umur | Satuan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Selatan | | | | | | |
| Penduduk Usia 16-18 Tahun | % | 69,66 | 70,09 | 70,60 | 70,18 | 70,85 |
| Nasional | | | | | | |
| Penduduk Usia 16-18 Tahun | % | 70,61 | 70,83 | 71,42 | 71,99 | 72,36 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

d. Angka Putus Sekolah

Target angka putus sekolah tahun 2018 yaitu 1,00 persen dan realisasi 1,00 persen atau capaian sebesar 100 persen. Untuk tahun 2019 target angka putus sekolah yaitu 0,98 persen dan realisasi 0,71 persen atau dengan capaian 72,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah pada Tahun 2019 masih perlu mendapat perhatian. Salah satu dengan mendorong penerapan peraturan wajib belajar 12 Tahun. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.45.
Angka Putus Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Jenjang Pendidikan | Satuan | Angka Putus Sekolah | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Murid | Orang | 260.842 | 361.064 | 364.603 | 407.175 | 425.338 |
| Jumlah siswa putus sekolah | Orang | 4.762 | 1.384 | 1.298 | 4.074 | 3.033 |
| Angka Putus Sekolah | % | 1,83 | 0,38 | 0,36 | 1,00 | 0,71 |

Sumber : Statistik Data Kemdikbud, Tahun 2020

e. Angka Kelulusan (AL)

Target Angka kelulusan tahun 2018 yaitu 99,6 persen dan realisasi 99,97 persen atau capaian sebesar 100,30 persen. Untuk tahun 2019 target sebesar 99,98 persen dan realisasi 99,99 persen atau dengan capaian sebesar 100,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 angka kelulusan sudah memenuhi target, salah satu faktor yang mendorong tercapainya target ini adalah adanya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan anak. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.46.
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Jenjang Pendidikan | Satuan | Angka Kelulusan (AL) | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| SMA/SMK/MA | % | 96,65 | 100 | 99,95 | 99,97 | 99,99 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

f. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2015-2019, bahkan cenderung menurun pada tahun 2019 yang menyebabkan tidak tercapainya target angka melanjutkan SMP ke SMA sebesar 97,20 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa SMP yang tamat namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian target angka melanjutkan di Sulawesi Selatan adalah kemiskinan yang menyebabkan masih terdapat beberapa siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang harus membantu perekonomian keluarganya serta keterisolasi beberapa daerah yang menghambat aksesibilitas siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.47.
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Jenjang Pendidikan | Satuan | Angka Melanjutkan (AM) | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 87,46 | 94,13 | 94,65 | 98,15 | 97,20 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Adapun angka melanjutkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terihat pada tabel berikut.

**Tabel II.48.
Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019**

| No. | Kabupaten/Kota | Angka Melanjutkan (AM) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | Kepulauan Selayar | 97,06 | 95,56 |
| 2 | Bulukumba | 97,87 | 92,76 |
| 3 | Bantaeng | 97,15 | 112,57 |
| 4 | Jeneponto | 96,33 | 98,65 |
| 5 | Takalar | 97,91 | 107,53 |
| 6 | Gowa | 97,53 | 90,39 |
| 7 | Sinjai | 97,59 | 99,18 |
| 8 | Bone | 98,56 | 93,11 |
| 9 | Maros | 98,03 | 92,94 |
| 10 | Pangkajene Kepulauan | 97,57 | 94,69 |
| 11 | Baru | 98,39 | 95,11 |
| 12 | Soppeng | 97,26 | 98,33 |
| 13 | Wajo | 97,58 | 88,40 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 98,50 | 89,42 |
| 15 | Pinrang | 97,33 | 93,96 |
| 16 | Enrekang | 98,36 | 98,04 |
| 17 | Luwu | 98,95 | 91,11 |
| 18 | Tana Toraja | 98,84 | 100,60 |
| 19 | Luwu Utara | 96,26 | 90,35 |
| 20 | Luwu Timur | 98,09 | 92,73 |
| 21 | Toraja Utara | 97,81 | 96,28 |
| 22 | Makassar | 98,68 | 103,80 |
| 23 | Pare-Pare | 99,02 | 120,56 |
| 24 | Palopo | 99,16 | 124,43 |
| Sulawesi Selatan | | 98,15 | 97,20 |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Target Angka Melanjutkan untuk Tahun 2018 yaitu 98 persen dengan realisasi 98,15 persen atau dengan capaian sebesar 100,15 persen. Target untuk tahun 2019 sebesar 98,38 persen dengan realisasi 97,20 persen atau dengan capaian 98,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Angka Melanjutkan (AM) belum memenuhi target, salah satu hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target ini adalah masih kurangnya daya tampung pada tingkat SMA/SMK/MA.

g. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio Guru terhadap siswa Pendidikan Menengah pada tahun 2018 1 : 14, sedangkan rasio guru terhadap siswa tahun 2019 yaitu 1 : 15. Pada dasarnya rasio ideal untuk 1 kelas yaitu 1 : 36. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemerataan penempatan guru. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.49.
**Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Murid SMA/MA/SMK | Orang | 260.842 | 266.407 | 279.292 | 425.338 | 433.443 |
| Jumlah Guru SMA/MA/SMK | Orang | 22.566 | 18.963 | 22.700 | 29.976 | 29.310 |
| Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah | ratio | 1 : 12 | 1 : 14 | 1 : 12 | 1 : 14 | 1 : 15 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

h. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 -64 Tahun

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk disuatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.50.
**Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 -64 Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angka Melek Huruf | % | 91,29 | 91,52 | 91,65 | 94,61 | 95,12 |

Sumber : SIPD .kemendagri.go.id

i. Sekolah Pendidikan SMA/SMK Kondisi Bangunan Baik

Sampai dengan tahun 2017 jumlah bangunan gedung sekolah SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 997 unit, Pada tahun 2018 jumlah bangunan gedung sekolah SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat menjadi 1017 Sekolah, dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 1012 unit, Sementara itu, bangunan gedung sekolah SMA/ SMK di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017-2019 yang memiliki kondisi baik mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2017, persentase bangunan sekolah SMA dan SMK kondisi baik sebesar 50,11%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 35,66% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 44,75%, Menurunnya persentase kondisi bangunan gedung SMA/SMK di Provinsi Selawesi Selatan selama Tahun 2017-2019 diakibatkan oleh laju kerusakan bangunan sekolah tidak sebanding dengan laju perbaikan bangunan sekolah, Selanjutnya perkembangan jumlah dan kondisi bangunan gedung Sekolah pendidikan SMA/ SMK di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017-2019 disajikan pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.51.

Perkembangan Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas pendidikan SMA/ SMK di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

| No. | Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | SMA | Baik (%) | 45,43 | 30,01 | 39,71 |
| | | Rusak Ringan/Sedang (%) | 51,14 | 63,26 | 55,33 |
| | | Rusak Berat/Total (%) | 3,43 | 6,73 | 4,96 |
| | | Jumlah Bangunan Gedung (Unit) | 569 | 582 | 581 |
| 2 | SMK | Baik (%) | 56,34 | 43,17 | 51,44 |
| | | Rusak Ringan/Sedang (%) | 40,96 | 53,75 | 46,6 |
| | | Rusak Berat/Total (%) | 2,7 | 3,08 | 1,96 |
| | | Jumlah Bangunan Gedung | 428 | 435 | 431 |
| 3 | SMA dan SMK | Baik (%) | 50,11 | 35,66 | 44,75 |
| | | Rusak Ringan/Sedang (%) | 46,77 | 59,18 | 51,58 |
| | | Rusak Berat/Total (%) | 3,12 | 5,16 | 3,67 |
| | | Jumlah Bangunan Gedung (Unit) | 997 | 1017 | 1012 |

Sumber : Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Berbagai Seri

j. Pendidikan Khusus Penyandang Disabilitas

Jumlah sekolah khusus bagi penyandang Disabilitas sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut untuk proporsi pada jenjang SMPLB masih sangat kurang, sedangkan bila dibandingkan usia sekolah pada tingkat tersebut belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Data jumlah sekolah khusus bagi penyandang disabilitas selengkapnya pada table berikut.

**Tabel II.52.
Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Sisabilitas
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019**

| No | Jenis Sekolah | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | SDLB | Unit | 2 | 1 | 1 |
| 2 | SMPLB | Unit | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SMLB | Unit | 77 | 79 | 82 |
| Total SLB | | Unit | 79 | 81 | 83 |

Sumber : Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Berbagai Seri

Siswa Penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan SDLB merupakan jumlah siswa terbanyak sepanjang tahun 2017 – 2019, namun semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah siswa menunjukkan data yang semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua siswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagian besar hanya sampai pada jenjang SDLB. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mendorong motivasi bersekolah bagi penyandang disabilitas dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai. Data psiswa penyandang disabilitas berdasarkan jenjang pendidikannya selengkapnya pada table berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.53.
**Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019**

| No | Jenis Sekolah | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SDLB | Orang | 3.240 | 3.102 | 2.970 |
| 2 | SMPLB | Orang | 1.000 | 1.037 | 1.014 |
| 3 | SMLB | Orang | 480 | 620 | 684 |
| Total Siswa | | Orang | 4.720 | 4.759 | 4.668 |

Sumber : Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Berbagai Seri

Jumlah siswa penyandang disabilitas berdasarkan kelompok umur di Provinsi Sulawesi Selatan di sepanjang tahun 2017 – 2019 dominasi oleh siswa dengan usia 7 – 12 Tahun, hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah untuk usia tersebut masih sangat dibutuhkan, mengingat bahwa data menunjukkan jumlah sekolah SDLB hanya sebanyak 2 pada tahun 2017 dan berkurang menjadi 1 pada tahun 2019. Data selengkapnya terkait jumlah siswa bedasarkan usia terlihat pada table berikut.

Tabel II.54.
**Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019**

| No. | Kelompok Umur | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | <7 Tahun | Orang | 102 | 99 | 102 |
| 2 | 7-12 Tahun | Orang | 1.818 | 1.820 | 1.816 |
| 3 | 13 - 15 Tahun | Orang | 1.136 | 1.056 | 954 |
| 4 | 16 - 18 Tahun | Orang | 824 | 885 | 913 |
| 5 | > 18 Tahun | Orang | 840 | 899 | 883 |
| Total | | Orang | 4.720 | 4.759 | 4.668 |

Berdasarkan jenis ketunaan, jumlah siswa terbanyak berdasarkan data tahun 2017-2019 adalah siswa tuna grahita dan tuna rungu, peningkatan jumlah siswa tuna grahita dari tahun 2018 ke tahun 2019 sangat signifikan, olehnya itu sarana prasarana khusus bagi penyandang tuna grahita dan tuna rungu dalam pelaksanaan pendidikan siswa disabilitas perlu menjadi perhatian. Data selengkapnya pada table berikut.

Tabel II.55.
**Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019**

| No. | Jenis Ketunaan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|----------------|--------|-------|------|-------|
| 1 | Tuna Netra | Orang | 265 | 53 | 213 |
| 2 | Tuna Rungu | Orang | 1.066 | 419 | 1.038 |
| 3 | Tuna Grahita | Orang | 1.978 | 107 | 2.099 |
| 4 | Tuna Daksa | Orang | 286 | 4 | 289 |
| 5 | Autisme | Orang | 818 | - | 28 |
| 6 | Tuna Ganda | Orang | 307 | 31 | 1.001 |

Sumber : Statistik Sekolah Luar Biasa Berbagai Seri

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

2.3.1.2. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Sepanjang tahun 2015-2019, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai 2019cenderung mengalami penurunan, Hal ini dikarenakan adanya beberapa perbaikan, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu semasa hamil serta penanganan dan pemantauan bayi baru lahir secara adekuat, dengan adanya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyebab terbanyak kematian dimasa neonatal, yaitu BBLR dan Asfiksia, sementara pada masa bayi penyebab kematiannya adalah Pneumonia dan Diare, hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.56.
Angka Kematian Bayi (AKB)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Kematian Bayi | Kasus | 1.167 | 1.183 | 1.059 | 1.037 | 919 |
| Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup | Angka | 2,21 | 7,94 | 7,05 | 5,76 | 5,69 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Angka Kematian Balita

Sepanjang tahun 2015-2019, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai 2019cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum adekuat. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.57.
Angka Kematian Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Kematian Balita | Kasus | 1.265 | 1.303 | 1.151 | 1.124 | 991 |
| Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | Angka | 2,8 | 8,2 | 7,67 | 6,26 | 6,20 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Angka Kematian Neonatal

Sepanjang tahun 2015-2019, angka kematian neonatalper 1000 kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai 2019cenderung mengalami penurunan, Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendekripsi dan tatalaksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.58.
Angka Kematian Neonatal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Kematian Neonatal | Kasus | 936 | 887 | 818 | 799 | 714 |
| Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup | Angka | 6,12 | 5,64 | 5,44 | 6,21 | 5,86 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Data kematian ibu selama tahun 2015 - 2019 cenderung berfluktuasi, kematian ibu di tahun 2015 sebesar 149 kasus sedangkan pada tahun 2016 kematian ibu meningkat menjadi 156 kasus dan pada tahun 2017 kasus kematian ibu turun menjadi 115 kasus, pada tahun 2018 meningkat lagi sebanyak 139 kasus kematian dan pada tahun 2019 terdapat sebanyak 144 kasus kematian. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa kabupaten untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal masih belum optimal, distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata ditingkat puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan *Antenatal Care (ANC)* sesuai standar pada semua kabupaten/kota sehingga deteksi resiko terlambat diketahui. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.59.
Angka Kematian Ibu (AKI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas | Orang | 149 | 156 | 115 | 139 | 144 |
| Jumlah Kelahiran Hidup | Orang | 149,929 | 148,216 | 150,220 | 150,624 | 152,680 |
| Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | Angka (per 100.000 KH) | 99 | 105 | 77 | 92 | 94 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Selain itu sistem rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar ke fasilitas rujukan belum seluruhnya berjalan optimal. Kebijakan Sistem Rujukan yang belum efektif untuk kasus-kasus darurat sehingga terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Hal tersebut tentunya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas sehingga terlambat mendapatkan pelayanan. Belum lagi mobilitas penduduk yang berpindah-pindah sehingga status kesehatannya sulit terpantau dan ada ibu yang pulang dari perantauan pada saat akan bersalin sehingga status sebelumnya tidak terpantau. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingkat pengetahuan ibu dan keluarga yang masih kurang terkait kesehatan ibu sehingga terlambat mengenal tanda bahaya dan terlambat mengambil keputusan untuk mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya mendorong lahirnya regulasi terkait pelayanan standar minimal untuk pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP dan penerapan Kebijakan Sistem Rujukan yang lebih efektif. Dari sisi peningkatan SDM, dilakukan pelatihan penangangan kegawatdaruratan maternal dan neonatal bagi tenaga puskesmas dan rumah sakit.

Untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarganya maka dilakukan Pelaksanaan kelas ibu dan Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Dalam mengatasi kondisi wilayah geografis yang sulit terjangkau maka pemerintah menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran yang ditempatkan di Dekat Fasilitas Kesehatan untuk Ibu Hamil yang jauh dari Fasyankes. Khusus masalah keterbatasan biaya, pemerintah juga telah mengatasinya dengan menyediakan Dana Jampersal untuk ibu bersalin dan bayi baru lahir.

5. Rasio Posyandu per satuan balita

Selama tahun 2015-2019 rasio posyandu per satuan balita, cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari minat masyarakat untuk menjadi kader posyandu semakin berkurang akibat kesibukan masyarakat yang semakin beragam. Disamping itu berkurangnya posyandu juga dipicu oleh minimnya kepercayaan orang tua akibat layanan posyandu yang sangat terbatas. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.60.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Posyandu | Unit | 9,592 | 9,710 | 9,745 | 10,936 | 9,974 |
| Jumlah balita | Jiwa | 755,276 | 787,510 | 862,920 | 854,375 | 834,644 |
| Rasio Posyandu per satuan balita | Per 1000 balita | 12.70 | 12.33 | 11.29 | 12.80 | 11.95 |

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, 2020

6. Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan penduduk

Rasio ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya ketersediaan anggaran dan integrasi program yang belum optimal. Selain itu, ketersediaan infrastruktur ini merupakan kewenangan penuh masing-masing kabupaten/kota. Angka rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II.61.
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 8.520.304 | 8.606.375 | 9.522.503 | 9.426.885 | 9.426.885 |
| Jumlah Puskesmas | Unit | 448 | 448 | 451 | 459 | 460 |
| Jumlah Puskesmas Pembantu | Unit | 1.227 | 1.211 | 1.303 | 1.276 | 1.321 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu (Pustu) | Unit | 1.675 | 1.659 | 1.754 | 1.735 | 1.781 |
| Rasio Puskesmas dan Pustu | Per 1000 Penduduk | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, diolah

Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan Penduduk di kabupaten/kota yang tertinggi pada tahun 2019 ditunjukkan oleh Kabupaten Selayar dan terendah adalah Kota Makassar. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk dimana sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar memiliki jumlah penduduk terbanyak dari 23 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Meskipun demikian beberapa upaya yang terus dilakukan diantaranya mendorong ketersediaan dana di tingkat Puskesmas, pemerataan pelayanan kesehatan pada masing-masing Kabupaten/Kota, kebijakan pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota yang lebih responsive terhadap ketersediaan fasilitas yang aksesibel bagi semua lapisan masyarakat. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.62.
Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk
Jumlah dan rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019**

| No. | Kab./Kota | Fasilitas Pelayanan Dasar | | | Jumlah Penduduk | Rasio Puskesmas dan Pustu Per 1000 Penduduk |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Puskesmas | Pustu | Jumlah | | |
| 1 | Kep. Selayar | 14 | 65 | 79 | 138.420 | 0,57 |
| 2 | Bulukumba | 20 | 60 | 80 | 437.209 | 0,18 |
| 3 | Bantaeng | 13 | 69 | 82 | 200.457 | 0,41 |
| 4 | Jeneponto | 19 | 55 | 74 | 412.570 | 0,18 |
| 5 | Takalar | 15 | 55 | 70 | 290.450 | 0,24 |
| 6 | Gowa | 26 | 123 | 149 | 755.235 | 0,20 |
| 7 | Sinjai | 16 | 62 | 78 | 259.385 | 0,30 |
| 8 | Maros | 14 | 26 | 40 | 383.921 | 0,10 |
| 9 | Pangkep | 23 | 64 | 87 | 362.364 | 0,24 |
| 10 | Barru | 12 | 34 | 46 | 180.509 | 0,25 |
| 11 | Bone | 38 | 75 | 113 | 869.301 | 0,13 |
| 12 | Soppeng | 17 | 44 | 61 | 236.156 | 0,26 |
| 13 | Wajo | 23 | 55 | 78 | 372.512 | 0,21 |
| 14 | Sidrap | 14 | 48 | 62 | 316.951 | 0,20 |
| 15 | Pinrang | 17 | 36 | 53 | 401.858 | 0,13 |
| 16 | Enrekang | 14 | 67 | 81 | 236.312 | 0,34 |
| 17 | Luwu | 22 | 99 | 121 | 378.987 | 0,32 |
| 18 | Tana Toraja | 21 | 31 | 52 | 285.687 | 0,18 |
| 19 | Luwu Utara | 14 | 61 | 75 | 368.801 | 0,20 |
| 20 | Luwu Timur | 17 | 77 | 94 | 299.975 | 0,31 |
| 21 | Toraja Utara | 26 | 24 | 50 | 245.490 | 0,20 |
| 22 | Makassar | 46 | 33 | 79 | 1.659.777 | 0,05 |
| 23 | Parepare | 7 | 21 | 28 | 147.322 | 0,19 |
| 24 | Palopo | 12 | 37 | 49 | 187.236 | 0,26 |
| Sulawesi Selatan | | 460 | 1321 | 1781 | 9426885 | 0,19 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2019

7. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Bila memperhatikan perkembangan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) di Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2019, maka peningkatan jumlah FKRTL terjadi pada kelompok RS Swasta dan RS Pemerintah Provinsi/- Kabupaten/Kota. Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Januari 2014, telah memicu pertumbuhan Rumah Sakit khususnya di sektor Swasta. Adapun bertambahnya jumlah RS Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disebabkan oleh kebijakan daerah untuk membangun rumah sakit baru untuk mendukung rujukan ke rumah sakit yang ada saat ini.

Tahun 2017-2019, Rumah Sakit Kelas D Pratama telah dibangun di tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pinrang, Selayar, Pangkep dan satu diantaranya yakni di Kabupaten Pinrang telah ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Kelas D. Adapun rasio jumlah Rumah Sakit per 1000 penduduk meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Rumah Sakit. Hal ini juga dipengaruhi oleh angka pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.63.
**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 8.520.304 | 8.606.375 | 9.522.503 | 9.426.885 | 9.426.885 |
| Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal) | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah | Unit | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI | Unit | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Jumlah Rumah Sakit Pemprov dan Pemkab/Kota | Unit | 32 | 34 | 32 | 35 | 39 |
| Jumlah Rumah Sakit Swasta | Unit | 46 | 45 | 51 | 57 | 59 |
| Jumlah Seluruh Rumah Sakit | Unit | 93 | 93 | 98 | 104 | 110 |
| Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | Angka per 1000 Penduduk | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,011 | 0,012 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

8. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per satuan penduduk di Sulawesi Selatan selama tahun 2017-2019 telah mengalami peningkatan, namun nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 0,18 dokter per 1000 penduduk. Hal ini disebabkan pendataan Dokter sudah mulai dilakukan secara online, data ketenagaan untuk Dokter sudah diupdate dan saat itu pula banyak Dokter yang ikut Pendidikan Dokter Spesialis. Dokter Umum yang ikut Pendidikan Dokter Spesialis sementara namanya tidak dimasukkan saat perhitungan rasio karena mereka tidak sedang memberikan pelayanan pada pasien. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019, jumlah Dokter kembali meningkat menjadi 0,16 dokter 1000 penduduk dan 0,17 dokter per 1.000 penduduk karena adanya penempatan Dokter melalui Program Nusantara Sehat berbasis Tim dan berbasis Individu serta adanya upaya Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga Dokter di masing-masing kabupaten/kota. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.64.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Dokter Umum | Orang | 1.413 | 1.356 | 1.341 | 1.537 | 1.629 |
| Jumlah Penduduk | Orang | 8.520.304 | 8.606.375 | 9.522.503 | 9.426.885 | 9.426.885 |
| Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | Angka per 1000 penduduk | 0,166 | 0,158 | 0,141 | 0,163 | 0,173 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

8. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, memperlihatkan kecenderungan yang tidak tetap jumlahnya. Pada tahun 2015, rasio tenaga medis 47,99/100.000 penduduk, kemudian tahun 2016 dan tahun 2017 turun menjadi 41,61 dan 37,70 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 pendataan tenaga medis sudah mulai dilakukan secara online sehingga tenaga medis di unit fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya tercover. Tahun 2018 rasio ini meningkat menjadi 42,72/100.000 penduduk, hal ini disebabkan karena adanya penempatan Dokter melalui Program Nusantara Sehat berbasis Tim dan berbasis Individu, pemanfaatan Dokter Spesialis melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah serta adanya upaya Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga dokter di masing-masing Kabupaten/Kota. Tahun 2019 rasio ini kembali menurun menjadi 41,11/100.000 penduduk, disebabkan karena kurangnya partisipasi beberapa rumah sakit swasta dalam penginputan SDMK secara online. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.65.
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Tenaga Medis | Orang | 4.089 | 3.581 | 3.590 | 4.028 | 3.875 |
| Jumlah Penduduk | Orang | 8.520.304 | 8.606.375 | 9.522.503 | 9.426.885 | 9.426.885 |
| Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk | Angka per 1000 penduduk | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,43 | 0,41 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

9. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2015 sebesar 94,02 persen, tahun 2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menurun menjadi 92,90 persen, tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kembali meningkat menjadi 94,05 persen, kemudian tahun 2018 persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 91,99 persen dan pada tahun 2019 menurun menjadi 91,91 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.66.
**Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 94,02 | 92,90 | 94,05 | 91,99 | 90,97 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi, secara umum disebabkan oleh masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, karena persalinan yang dilakukan di rumah dikarenakan kondisi geografis jauh dari fasilitas kesehatan yaitu di daerah kepulauan dan pegunungan, serta sasaran estimasi yang menjadi denominator capaian yang berbeda agak jauh dibanding dengan sasaran riil. Untuk meningkatkan cakupan di atas, pemerintah telah melakukan beberapa upaya diantaranya penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran yang berada di dekat fasilitas Kesehatan dan penyediaan dukungan dana Jaminan persalinan untuk Persalinan di fasilitas.

10. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan UCI (*Universal Child Immunization*) yaitu suatu kondisi dimana minimal 80 persen bayi yang berada dalam suatu desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selengkapnya pada tabel berikut.

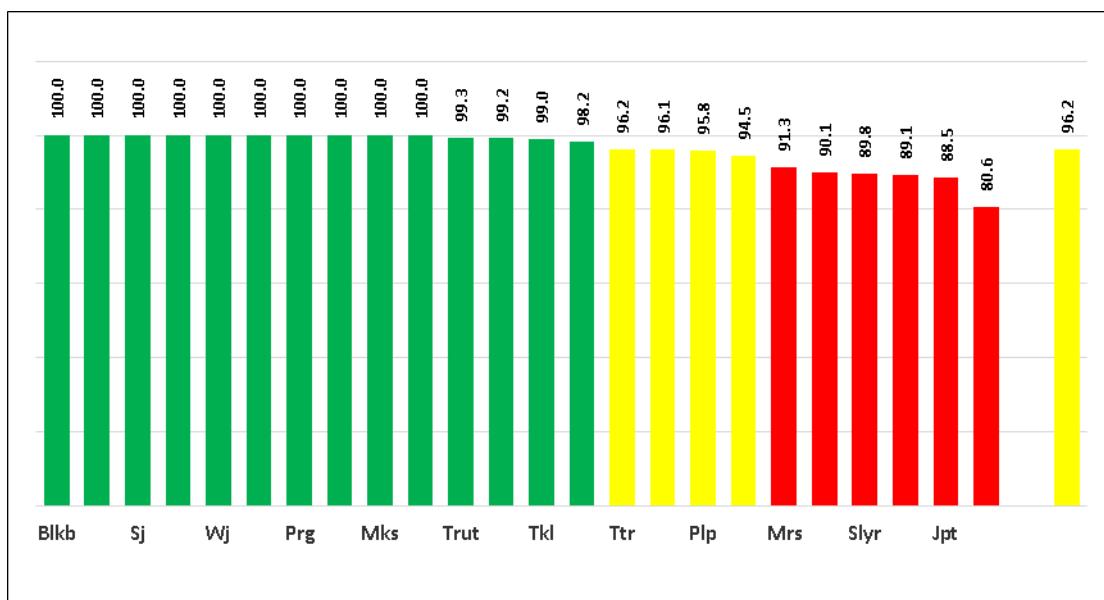
Tabel II.67.
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Desa/Kelurahan UCI | Desa/Kel | 2.884 | 2.855 | 2.933 | 2.884 | 2.923 |
| Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan | Desa/Kel | 3.027 | 3.029 | 3.041 | 3.027 | 3.040 |
| Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 95,28 | 94,26 | 96,45 | 95,27 | 96,15 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Pencapaian UCI Desa di Provinsi Sul-Sel Tahun 2019 adalah 2.923 desa dari 3.040 desa (96,15 persen). Perincian Pencapaian UCI Desa per Kab/Kota pada grafik berikut ini.

Grafik II.15.
Pencapaian UCI Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Dari grafik di atas, terlihat bahwa cakupan pemberian imunisasi untuk beberapa kabupaten / kota terjadi penurunan sehingga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain terdapat wilayah yang sulit dijangkau dan keterbatasan alat transportasi terutama di daerah pulau, serta adanya kelompok-kelompok yang melakukan penolakan terhadap imunisasi dari sisi unsur halal dan haram serta issu kejadian ikutan pasca imunisasi.

Dalam mengatasi kondisi di atas, berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi secara intens kepada kelompok – kelompok tertentu yang melakukan penolakan terhadap imunisasi. Selain itu memaksimalkan koordinasi melalui lokakarya mini di tingkat puskesmas/kecamatan untuk membahas upaya peningkatan cakupan imunisasi.

Untuk meningkatkan cakupan imunisasi di semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, kedepannya dilakukan pertemuan khusus membahas tentang penentuan data sasaran dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat kab/kota. Pada daerah sulit, khususnya yang belum mencapai target agar dilaksanakan sweeping sasaran, serta melakukan Supervisi (OJT) oleh Petugas kab/kota dan provinsi terutama pada puskesmas dan kabupaten yang bermasalah atau petugas baru.

11. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2015 sampai 2019, cenderung mengalami peningkatan, dan cakupannya pun mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi di 24 kab/kota sehingga kasus-kasus yg terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi by name by addres Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik (saat ini hasil coverage pencatatan mencapai >85 % balita di Sulsel), selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.68.
**Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Balita | 184 | 156 | 138 | 369 | 446 |
| Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | Balita | 184 | 156 | 138 | 369 | 446 |
| Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Trend cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 3 tahun (2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2017 sebanyak 46 persen, tahun 2018 sebanyak 49 persen dan tahun 2019 sebanyak 61 persen. Semakin meningkatnya penemuan kasus TBC disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM (Dokter Praktek M) dan penguatan surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus atau *mopping up*. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.69.
**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun | Jiwa/orang | 8,191 | 7,139 | 7,890 | 9,314 | 11,401 |
| Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama | Jiwa/Orang | 17,518 | 17,518 | 26,919 | 26,086 | 27,196 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 48 | 44 | 46 | 49 | 61 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Tren penemuan semakin meningkat, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan angka cakupan penemuan kasus TBC diatas 90 persen. Beberapa hal yang masih menjadi masalah yaitu data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta masih ada yang belum masuk dalam sistem pelaporan program TBC. Selain itu beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat sesuai standar ISTC, serta Petugas TB di faskes tidak melakukan surveilans secara aktif dimasyarakat karena kondisi geografis yang masuk dalam remote area. Oleh karen itu masih perlu ditingkatkan peran kader kesehatan dalam melakukan penyisiran kasus di masyarakat.

Meskipun demikian, pada dasarnya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Sulawesi Selatan yaitu adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01-Menkes-660-2020 tentang Kewajiban Fasyankes dalam melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Tuberkulosis, telah terbentuknya Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TB Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa RS sudah melakukan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

integrasi pelaporan TB kedalam SIMRS dan SITB, serta adanya komunitas Aisyiyah yang melibatkan kadernya dalam investigasi kontak kasus indeks TB.

13. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi Kasus TBC untuk semua tipe menunjukkan peningkatan dari tahun 2015-2019. Peningkatan Prevalensi Kasus TBC semakin meningkat dengan adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak terlaporkan. Pada tahun 2019 penyisiran kasus TB di Rumah Sakit dan Klinik telah dilakukan di 24 kabupaten kota. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.70.
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Kasus Penderita TBC | Orang | 13.043 | 13.029 | 16.966 | 18.193 | 18.961 |
| Jumlah penduduk | Ribu Orang | 8.520,3 | 8.606,4 | 8.690,3 | 8.771,9 | 8.851,2 |
| Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) | Per 100.000 penduduk | 156 | 156 | 195 | 207 | 214 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Evaluasi data kesembuhan dinilai secara kohor selama 1 tahun sehingga data pengobatan pasien tahun 2019 belum dapat dianalisis. Target kesembuhan tahun 2015 telah tercapai sesuai indikator nasional yaitu 85 persen. Tahun 2016 sesuai kebijakan NTP (*National Tuberculosis Program*) target yang harus dicapai sebesar 90 persen. Berdasarkan laporan data kesembuhan antara tahun 2016-2018 menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya adalah *turn over* SDM TBC yang tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak terlayani dengan baik. Beberapa kasus pindah ke daerah lain dengan tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang dijalani. Selain itu beberapa kasus terlaporkan *lost to follow up* dengan beberapa penyebab yaitu efek samping obat, kejemuhan karena pengobatan yang lama, ekonomi, kurangnya dukungan keluarga. Hal lainnya adalah tidak optimalnya peran PMO (Pengawas Minum Obat) dalam mendampingi pasien selama masa pengobatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.71.
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS | % | 86 | 87 | 86 | 87 | NA |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

14. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Angka kematian pada Penderita TBC pada tahun 2015-2016 relatif sama, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 7 dan 8 per 100.000 penduduk. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.72.
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Kematian Karena Tuberkulosis | Jiwa | 513 | 572 | 626 | 706 | na |
| Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) | Per 100.000 penduduk | 6 | 6 | 7 | 8 | na |

Sumber : SITT Dinkes Prov. Sulsel

Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila ditemukan gejala awal TBC.
- Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.
- Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi.
- Penyebab utama kematian bukan karena penyakit TBC tapi adanya penyakit komorbid (penyakit penyerta) lainnya.

15. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi penemuan kasus TBC mulai meningkat selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 sebanyak 46 persen, 2018 sebanyak 49 persen dan 2019 sebanyak 61 persen. Semakin meningkatnya penemuan kasus TBC disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM (Dokter Praktek Mandiri) dan penguatan surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus atau *mopping up*. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.73.
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam program DOTS | % | 48 | 44 | 46 | 49 | 61 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Adapun beberapa hal yang menjadi masalah belum mencapai target 70 persen adalah:

- Belum adanya kewajiban pelaporan dari RS dan Fasilitas Kesehatan Swasta lainnya dalam penemuan kasus TBC (*mandatory notification*).
- Masih terdapat beberapa rumah sakit yang tidak memiliki SIMRS yang mengakomodir kebutuhan data TBC.
- Jejaring internal dan eksternal antara fasilitas kesehatan belum berjalan dengan baik dibeberapa Rumah Sakit.
- Upaya skrining terduga TBC belum dilaksanakan pada kelompok populasi berisiko tinggi seperti daerah kumuh dan miskin, Lapas, dan lain-lain.
- Masih terdapat petugas TB yang belum terlatih karena adanya *turn over* pegawai terlatih yang tidak dibarengi dengan pergantian pegawai yang juga terlatih.

16. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Evaluasi data kesembuhan dinilai secara kohor selama 1 tahun sehingga data pengobatan pasien tahun 2019 belum dapat dianalisis. Target kesembuhan tahun 2015 telah tercapai sesuai indikator nasional yaitu 85%. Tahun 2016 sesuai kebijakan NTP (*National Tuberculosis Program*) target yang harus dicapai sebesar 90 persen. Berdasarkan laporan data kesembuhan antara tahun 2016-2018 menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya adalah:

- Turn over SDM TBC yang tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak terlayani dengan baik.
- Beberapa kasus pindah ke daerah lain dengan tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang dijalani.
- Beberapa kasus terlaporkan *lost to follow up* dengan beberapa penyebab yaitu efek samping obat, kejemuhan karena pengobatan yang lama, ekonomi, kurangnya dukungan keluarga.
- Tidak optimalnya peran PMO (Pengawas Minum Obat) dalam mendampingi pasien selama masa pengobatan.

Tabel II.74.

Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS | % | 86 | 87 | 86 | 87 | na |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Provinsi Sulawesi Selatan Angka Kesakitan Penyakit DBD tahun 2017 sebesar 1.755 kasus dengan Insiden Rate (IR) 19/100.000 penduduk dan CFR sebesar 0,64 dengan 11 kematian. Tahun 2018 sebanyak 2.122 penderita dengan Incident Rate (IR) 24/100.000 penduduk, dengan jumlah kematian sebanyak 19 orang, dengan angka Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,90, sedangkan untuk tahun 2019 jumlah kasus DBD sebesar 3.515 dengan IR 40/100.000 penduduk, CFR sebesar 0,63 dengan kematian sebanyak 22 orang. Jumlah penderita tersebar di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.75.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun | Jiwa | 1.755 | 7.587 | 1.755 | 2.122 | 3.515 |
| Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama | Jiwa | 1.755 | 7.587 | 1.755 | 2.122 | 3.515 |
| Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Indikator program Arbovirosis adalah persentase kabupaten/kota yang mencapai Incidence Rate (IR) DBD kurang atau sama dengan 49/100.000 Penduduk. Target untuk tahun 2017 sebesar 64 persen, target 2018 sebesar 66 persen dan 2019 sebesar 68 persen. Presentase Kabupaten/kota yang mencapai IR dibawah 49/100.000 penduduk di Provinsi Sulawesi pada tahun 2017 sebesar 87,5 persen, tahun 2018 sebesar 91,6 persen dan tahun 2019 sebesar 66,6 persen. Sementara Case Fatality Rate (CFR) atau angka kematian di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 33 persen dan tahun 2019 sebesar 25 persen.

18. Angka Kejadian Malaria

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria.

Tabel II.76.
Angka Kejadian Malaria
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angka Kejadian Malaria | Per 1000 Penduduk | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,10 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai faktor yang menghambat diantaranya masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, minimnya anggaran pencegahan dan pengendalian malaria di tingkat Kab/Kota, serta tidak adanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria di Kab/Kota.

19. Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT

Berdasarkan tabel di bawah terlihat sebanyak 808 kasus positif malaria pada tahun 2019 yang berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan, kasus tersebut merupakan kasus impor. Hal yang perlu dilakukan terkait kasus impor adalah meningkatkan sistem kewaspadaan dini dengan surveilans migrasi. Data selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.77.
**Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Positif Malaria | Kasus | 953 | 1.073 | 1.237 | 1.285 | 808 |
| Pengobatan ACT | Penderita | 864 | 1.032 | 1.156 | 1.237 | 711 |
| Persentase Penderita Malaria yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat (ACT) | % | 90,66 | 96,18 | 93,45 | 96,26 | 88,00 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Cakupan pengobatan malaria dengan ACT (sesuai standar) mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan beberapa penderita malaria yang ditemukan tidak dilakukan terapi dikarenakan ada yang tidak mau, ada yang belum sempat menerima terapi sudah kembali ke tempatnya masing-masing dan ada juga yang menerima terapi selain ACT. Selain itu, masih adanya *Stock out* ACT di beberapa FKT, keterlambatan laporan logistik terkait Obat Anti Malaria, serta masih adanya fasilitas kesehatan yang menggunakan obat selain obat anti malaria sesuai standar.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa ada beberapa kabupaten/kota dengan cakupan pengobatan yang sangat rendah <90 persen, diantaranya adalah Kabupaten/Kota Makassar (72,54 persen), Luwu (86,54 persen), Luwu Timur (84,21 persen), Maros (87,30 persen), Soppeng (80 persen), Toraja Utara (83,33 persen) dan yang terendah adalah Tana Toraja (9,52 persen). Untuk Kota Makassar dan Kabupaten Maros karena penderita banyak yang berasal dari TNI dan POLRI, mereka hanya memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan tetapi untuk pengobatan mereka kembali ke Klinik Pasukannya masing – masing. Untuk Luwu, Luwu Timur serta Tana Toraja pasien tidak menerima pengobatan disebabkan ketersediaan obat khususnya Primaquine minim sehingga jika pasien hanya mendapatkan ACT, maka dianggap tidak mendapatkan pengobatan standar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.78.
**Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| No. | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | Rata-Rata % | |
|-----|--------------------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|----------------|--|
| | | 2018 | | | 2019 | | | | |
| | | Positif | ACT | % | Positif | ACT | % | | |
| 1 | Kep. Selayar | 30 | 29 | 96,67 | 7 | 7 | 100 | 98.33 | |
| 2 | Bulukumba | 45 | 45 | 100 | 19 | 19 | 100 | 100.00 | |
| 3 | Bantaeng | 24 | 24 | 100 | 14 | 14 | 100 | 100.00 | |
| 4 | Jeneponto | 60 | 60 | 100 | 68 | 68 | 100 | 100.00 | |
| 5 | Takalar | 31 | 30 | 96,77 | 10 | 10 | 100 | 98.39 | |
| 6 | Gowa | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 7 | Sinjai | 34 | 34 | 100 | 12 | 12 | 100 | 100.00 | |
| 8 | Bone | 83 | 82 | 98,79 | 42 | 41 | 97.62 | 98.21 | |
| 9 | Maros | 141 | 129 | 91,48 | 63 | 55 | 87,30 | 89.40 | |
| 10 | Pangkep | 36 | 36 | 100 | 29 | 29 | 100 | 100.00 | |
| 11 | Barru | 15 | 15 | 100 | 21 | 17 | 80,95 | 90.48 | |
| 12 | Soppeng | 16 | 14 | 87,5 | 5 | 4 | 80 | 83.75 | |
| 13 | Wajo | 32 | 31 | 96,87 | 32 | 30 | 93,75 | 95.31 | |
| 14 | Sidrap | 18 | 18 | 100 | 8 | 8 | 100 | 100.00 | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No. | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | Rata-Rata % | |
|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|--|
| | | 2018 | | | 2019 | | | | |
| | | Positif | ACT | % | Positif | ACT | % | | |
| 15 | Pinrang | 60 | 60 | 100 | 81 | 80 | 98,76 | 99.38 | |
| 16 | Enrekang | 54 | 54 | 100 | 29 | 28 | 96.55 | 98.28 | |
| 17 | Luwu | 59 | 59 | 100 | 52 | 45 | 86,53 | 93.27 | |
| 18 | Tana Toraja | 29 | 29 | 100 | 21 | 2 | 9,52 | 54.76 | |
| 19 | Luwu Utara | 34 | 34 | 100 | 40 | 37 | 92,5 | 96.25 | |
| 20 | Luwu Timur | 72 | 75 | 104,17 | 19 | 16 | 84,21 | 94.19 | |
| 21 | Toraja Utara | 172 | 172 | 100 | 6 | 5 | 83,33 | 91.67 | |
| 22 | Makassar | 191 | 167 | 87,43 | 157 | 117 | 74,52 | 80.98 | |
| 23 | Pare-Pare | 24 | 23 | 95,83 | 13 | 13 | 100 | 97.92 | |
| 24 | Palopo | 18 | 10 | 55,55 | 60 | 54 | 90 | 72.78 | |
| Sulawesi Selatan | | 1.285 | 1.237 | 96,26 | 808 | 711 | 88,00 | 92.13 | |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyediakan buku tatalaksana kasus bagi tenaga medis dan melakukan advokasi kepada tenaga medis yang terkait dalam penanganan kasus malaria. Selain itu juga telah tersedia Buffer Stock Obat Anti Malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tersediannya Buku Pedoman Tatalaksana Kasus Malaria yang telah didistribusikan ke kab/kota, sertaadanya KMK Nomor HK.01.07/MENKES/556/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria.

20. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV masih dibawah target indikator 0,5 persen,sesuai dengan tingkat epidemiologi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah epidemiologi terkonsentrasi artinya kasus HIV yang ada tinggi tapi berada di populasi-populasi tertentu, belum sampai ke masyarakat umum.Kendala yang dihadapi diantaranya belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan penemuan kasus HIV dan sistem pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi sistem Informasi HIV AIDS belum digunakan maksimal karena terkendala sarana komputer dan jaringan wifi. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.79.
Prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi per 100.000 | % | 0,056 | 0,28 | 0,33 | 0,013 | 0,019 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

21. Proporsi Jumlah Penduduk Memiliki Pengetahuan Komprehensif

Persentase Pengetahuan Komprehensif pada Penduduk Usia 15-24 tahun tentang HIV dan AIDS mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dicapai karena telah dilakukan sosialisasi HIV di Sekolah oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Namun demikian, Survey tidak dilakukan setiap tahun karena belum semua kab/kota memiliki pendanaan APBD untuk melakukan survey, yang sumber pendanaannya masih bergantung pada APBD Provinsi. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.80.

Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------------------|-------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif | % | 73,4 | 83,4 | Tidak Ada Survey | 87,60 | Tidak Ada Survey |

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

22. Cakupan Kunjungan Bayi

Berdasarkan data capaian dari tahun 2015 sampai 2019, cakupan kunjungan bayi di Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan estimasi sasaran yang berbeda antara pusat dan daerah sehingga mempengaruhi cakupan kunjungan bayi. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi adalah belum optimalnya tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan Balita, kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita masih rendah, serta dokumentasi hasil pelayanan kesehatan bayi dan balita yang belum optimal. Untuk itu diperlukan kesepakatan tentang estimasi sasaran yang sama dan terstandar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.81.

**Cakupan Kunjungan Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Kunjungan Bayi | % | 98,11 | 98,08 | 98,54 | 96,04 | 89,96 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Dalam mengatasi kondisi di atas, beberapa upaya telah dilakukan diantaranya peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita , khususnya perawatan bayi sehat/SDIDTK untuk mendeteksi kelainan pertumbuhan dan perkembangan sejak dini. Selain itu juga dilakukan peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan/pola asuh anak dengan mengoptimalkan pemanfaatan Buku KIA melalui Kelas Ibu (Kelas Ibu Balita), mengoptimalkan dokumentasi report and recording pelayanan kesehatan bayi dan balita melalui optimalisasi kohort bayi dan balita sebagai satu-satunya sumber data pelayanan kesehatan bayi dan balita, serta peningkatan kepedulian petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan balita.

23.Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas dari tahun ke tahun meningkat hal ini disebabkan jumlah ketersediaan puskesmas setiap tahunnya bertambah. Di setiap Kecamatan yang ada di Sulawesi Selatan terdapat Puskesmas bahkan ada kecamatan memiliki lebih dari satu Puskesmas. Berdasarkan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014, puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Selain itu juga harus didukung pula oleh adanya aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.82.
Cakupan Puskesmas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Puskesmas | Unit | 448 | 448 | 451 | 458 | 459 |
| Jumlah Kecamatan | Kec. | 306 | 306 | 307 | 310 | 310 |
| Cakupan Puskesmas | % | 146,4 | 146,4 | 146,9 | 147,7 | 148,1 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

24. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan Puskesmas Pembantu dari tahun 2018 - 2019 meningkat hal ini disebabkan ketersediaan Puskesmas Pembantu bertambah. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Adanya Pustu di Desa/ Kelurahan meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Tabel II.83.
Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) | % | 54,82 | 54,06 | 56,56 | 42,2 | 43,6 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

25. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Berdasarkan data di bawah, cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas antar Kabupaten/kota yang variasinya cukup besar selain adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (*missed opportunity*). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.84.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 91,72 | 89,25 | 91,13 | 89,32 | 87,96 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) diantaranya belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan, kondisi tempat tinggal ibu hamil dan keluarga yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan (wilayah kepulauan dan pegunungan, serta adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai masa persalinannya

Meskipun demikian, beberapa faktor yang mendukung peningkatan cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Sulawesi Selatan diantaranya adanya regulasi terkait pelayanan Standal Minimal untuk Pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP, kunjungan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, adanya keterlibatan dan perhatian tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan secara teratur, memperkuat Komunikasi, Infomasi dan Edukasi kepada Kader dan Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di Desa dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, serta berjalannya Pemantauan Wilayah Setempat Program Kesehatan Ibu dan Anak

26. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Berdasarkan data di bawah, terlihat bahwa capaian pelayanan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Bahkan cakupan tertinggi ternyata terjadi di tahun 2015. Kondisi ini disebabkan oleh salah satunya faktor medik secara langsung yaitu distribusi SDM Kesehatan yang Kompeten untuk penanganan Komplikasi neonatus belum merata, serta menyangkut sarana dan prasarana yang belum adekuat dalam menangani bayi baru lahir bermasalah. Selain itu masalah kesehatan bayi baru lahir tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil, dimana salah satu aspek yang mempengaruhinya adalah tingkat pengetahuan Ibu dan keluarga untuk penanganan bayi baru yang masih kurang. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.85.
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani | % | 88,74 | 60,66 | 60,28 | 58,32 | 62,87 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Dalam meningkatkan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani di Sulawesi Selatan, sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya diantaranya

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

pemenuhan SDM Kesehatan dan Disrtibusi yang merata untuk penanganan kasus ke gawat daruratan neonatal yang kompeten, pemenuhan sarana dan prasarasa untuk pertolongan kasus kasus ke gawat daruratan Neonatal di fasilitas kesehatan baik pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat rujukan, serta peningkatan pemanfaatan Buku KIA dan optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil untuk peningkatan pegetahuan ibu dan keluarga terkait perawatan bayi baru lahir.

27. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Berdasarkan data capaian pelayanan anak balita dari tahun 2015 sampai 2019, terlihat bahwa peningkatannya tidak signifikan bahkan cenderung turun. Hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan posyandu yang sifatnya monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Selain itu keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu yang masih kurang maksimal, belum optimalnya tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan Balita, kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita masih rendah, dan dokumentasi hasil pelayanan kesehatan bayi dan Balita belum optimal. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.86.
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Pelayanan Anak Balita | % | 76,51 | 69,09 | 71,74 | 71,64 | 69,71 |

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Meskipun demikian, pada dasarnya telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan tersebut melalui peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita, khususnya perawatan bayi sehat/SDIDTK untuk mendeteksi kelainan pertumbuhan dan perkembangan sejak dini. Upaya lainnya adalah peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan/pola asuh anak dengan mengoptimalkan pemanfaatan Buku KIA melalui Kelas Ibu (Kelas Ibu Balita), mengoptimalkan dokumentasi report and reporting pelayanan kesehatan bayi dan balita melalui optimalisasi kohort bayi dan balita sebagai satu-satunya sumber data pelayanan kesehatan bayi dan balita, serta peningkatan kepedulian petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan balita.

28. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan Keluarga Miskin

Data pemberian makanan Pendamping ASI untuk khusus untuk keluarga miskin, tidak tersedia disebabkan dalam juknis MP-ASI yg dikeluarkan oleh kemenkes, Prioritas pemberian MP-ASI adalah diperuntukkan bagi baduta kategori kurus (BB/TB) <-2 SD sehingga tanpa memandang status kemiskinan semua balita kategori kurus mendapatkan MP-ASI. Begitu pula untuk keluarga miskin bila balitanya memiliki status gizi baik maka tidak diberikan MP-ASI. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.87.
**Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 0 | 100 | 100 | 91 | 83,43 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

29. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Dukungan dan keterlibatan lintas sektor dan lintas program terkait pelaksanaan penjaringan kesehatan siswa SD yang masih kurang sehingga mempengaruhi capaian. Demikian pula dengan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah anak yang akan dijaring serta ketidakjelasan tupoksi pelaksana penjaringan kesehatan anak sekolah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.88.
**Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat | % | 82,58 | 65,76 | 83,19 | 85,93 | 79,29 |

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

30. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu.Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.89.
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Primer dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan pada Rumah Sakit Tingkat Pertama maupun Regional, yang mekanisme pembiayaan dikelola oleh BPJS. Pelayanan Dasar yang diberikan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung, antara lain pelayanan gawat darurat, konsultasi dan pemeriksaan dokter umum dan gigi, pemberian obat, pemeriksaan Laboratorium sederhana, Pelayanan KIA, pelayanan rawat inap pada Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Keliling. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sejak tahun 2013 hingga sekarang telah mencapai kondisi 100%.

31. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS)

Pelayanan IGD Level 1 adalah standar minimal untuk pelayanan gawat darurat bagi Rumah Sakit Kelas D. Hingga tahun 2019, jumlah Rumah Sakit Kelas D dan Kelas D Pratama sebanyak 18 RS. Apabila mengacu pada PMK Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009, maka rumah sakit tersebut telah memenuhi standar minimal sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan rumah sakit telah mencapai 100 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.90.

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS) di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Faktor pendukung terpenuhinya cakupan tersebut adalah dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana RS. Pelaksanaan akreditasi oleh KARS juga mendukung bagi upaya RS dalam memenuhi standar pelayanan di IGD masing-masing. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan SDM khususnya yang tersertifikasi kegawatdaruratan (ATCLS/BTCLS).

32. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Adapun cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi di bawah 24 jam di Provinsi Sulawesi Selatan, sudah mencapai 100 persen dalam lima (5) tahun berturut-turut. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.91.

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan yang menjadikan panjang jalan kewenangan provinsi meningkat dari 1.500,15 km menjadi 2.009,35 km. Perubahan Keputusan Gubernur terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2018. Walaupun pada kenyataannya, jumlah panjang jalan kondisi mantap meningkat secara signifikan. pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan dimana kondisi jalan baik tahun 2015 adalah 42.11persen meningkat pada tahun 2016 sebesar 42.22 persen, pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan 2.60 persen, hal ini disebabkan karena bertambahnya ruas jalan kewenangan provinsi menjadi 2.009,35%, namun pada tahun 2019 jalan dengan kondisi baik telah mengalami peningkatan sebesar 1,63% atau Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2019 sebesar 33,85 persen. Selengkapnya pada table berikut.

Tabel II.92.

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kewenangan Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Panjang Jalan Kondisi baik | Km | 483,21 | 633,36 | 516,26 | 639,32 | 672,13 |
| Panjang jalan kondisi sedang | Km | 519,92 | 294,70 | 437,39 | 545,03 | 564,03 |
| Panjang jalan Keseluruhan | Km | 1.147,51 | 1.500,15 | 1.500,15 | 2.009,35 | 2.009,35 |
| Mantap | Km | 1.003,13 | 928,06 | 953,65 | 1.184,23 | 1.236,16 |
| Mantap | % | 87,14 | 61,86 | 63,57 | 58,94 | 61,52 |
| Tidak Mantap | Km | 144,38 | 572,09 | 546,5 | 825,12 | 773,19 |
| Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 42,11 | 42,22 | 34,41 | 31,82 | 33,85 |

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan jalan dilakukan untuk menunjang akses/pergerakan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan perhitungan panjang jalan didasarkan pada SK Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2016 dan 2018 saat dilakukan perubahan SK penetapan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga 2019 panjang jalan mengalami peningkatan setiap tahun dari 1.147,51 Km menjadi 2.015,23 Km rasio Panjang jalan saat ini adalah 0.00344.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.93.
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|--|------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Panjang Jalan Nasional | Km | 1.745,92 | 1.745,92 | 1.745,92 | 1.745,93 | 1.745,92 |
| 2. | Panjang jalan Provinsi | Km | 1.147,51 | 1.500,15 | 1.500,15 | 2.009,35 | 2.015,23 |
| 3. | Panjang jalan Kab/Kota | Km | 25.379,58 | 25.379,58 | 25.379,58 | 26.772,63 | 26.708,39 |
| 4. | Total Panjang Jalan | Km | 28.273,01 | 28.625,65 | 28.625,65 | 30.347,01 | 30.469,54 |
| 5. | Jumlah penduduk | Jiwa | 8.520.304 | 8.606.375 | 8.690.294 | 8.771.970 | 8.851.240 |
| Rasio panjang jalan dengan Jumlah penduduk | | Km/juml penddk | 0,00332 | 0,00333 | 0,00329 | 0,00345 | 0,00344 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

3. Persentase Jalan Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Ketersediaan trotoar dan drainase jalan merupakan bagian dari ruang milik jalan (rumija) serta menjadi penunjang kelengkapan jalan menuju standar. Pada pelaksanaan pembangunan jalan provinsi, prioritas yang dilaksanakan adalah pembangunan badan jalan, bahu jalan serta fasilitas keselamatan lainnya. Sedangkan pembangunan trotoar dan drainase diprioritaskan pada pembangunan jalan di kawasan perkotaan. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, pembangunan diarahkan pada pembukaan akses terisolir di pelosok, sehingga pembangunan trotoar dan drainase tidak meningkat signifikan. Pendataan terkait kondisi dilapangan pada drainase dan trotoar eksisting sangat diperlukan untuk meperoleh data terkait.

Tabel II.94.
Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase | Km | 963,9 | 1.125 | 1.155,12 | 1.547,20 | 1.607,48 |
| 2. | Panjang jalan keseluruhan | Km | 1.147,51 | 1.500,15 | 1.500,15 | 2.009,35 | 2.009,35 |
| 3. | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | % | 84 | 75 | 77 | 77 | 80 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

4. Persentase Sempadan Jalan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Survey dan perhitungan pemanfaatan sempadan jalan yang digunakan pedagang kaki lima atau bangunan liar tidak dilakukan. Akan tetapi pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemanfaatan badan jalan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu pengaturan serta penataan kembali prasarana jalan yang ada sehingga kita perlu menetapkan suatu peraturan mengenai Garis Sempadan Jalan yang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan.Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.95.
**Sempadan Jalan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Panjang jalan yang sempadannya dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | Km | 107,29 | 152,72 | 147,76 | 202,14 | 202,14 |
| Panjang jalan provinsi | Km | 1.147,51 | 1.500,15 | 1.500,15 | 2.009,35 | 2.009,35 |
| Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar | % | 9,35 | 10,18 | 9,85 | 10,11 | 10,11 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

5. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

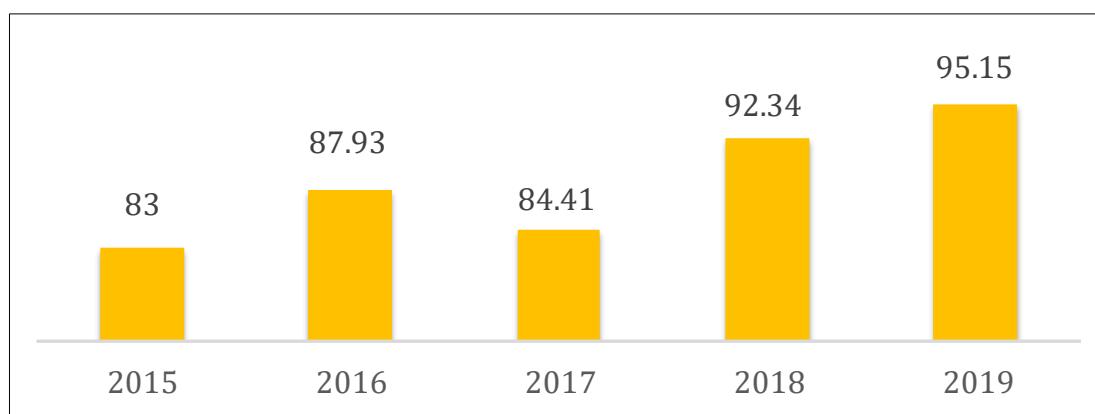
Rumah tangga bersanitasi didefinisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki/ mengakses toilet, dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma, agama, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Angka rumah tinggal bersanitasi diperoleh dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana pada terdapat peningkatan sebesar 12.15 persen dalam 5 tahun terakhir, Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 95.15 persen. Faktor yang mempengaruhi Perilaku masyarakat yang belum memperhatikan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.96.
**Rumah Tinggal Bersanitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi | Unit | 1.651.626 | 1.767.440 | 1.713.087 | 1.891.538 | 2.000.877 |
| Jumlah Rumah Tangga | Unit | 1.990.008 | 2.009.996 | 2.029.478 | 2.048.450 | 2.102.977 |
| Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | % | 83,00 | 87,93 | 84,41 | 92,34 | 95,15 |

Sumber: Bappelitbangda, 2020

Grafik II.16.
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi



Sumber: Bappelitbangda, 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

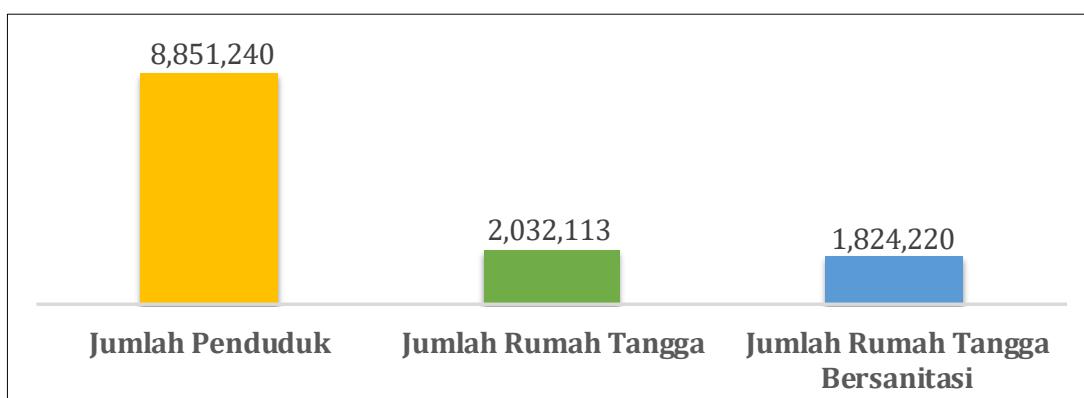
Rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak dikatakan tercapai ketika rumah tangga tersebut telah mengakses toilet dengan komponen sesuai standar, yaitu; Bangunan atas berupa kloset leher angsa, tangka septik kedap air (perkotaan) dan berupa lubang tanah/ gorong-gorong (pedesaan), dan penggunaan toilet dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. Akses rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, akan tetapi capaian tersebut perlu ditingkatkan sebagai komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Tabel II.97.
Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan
Berkelanjutan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019**

| No. | Kab/Kota | Jumlah Penduduk | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi | Percentase (%) |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Kep. Selayar | 135.624 | 34.076 | 33.711 | 95,93 |
| 2 | Bulukumba | 420.603 | 101.841 | 60.096 | 55,01 |
| 3 | Bantaeng | 187.626 | 46.100 | 26.143 | 56,71 |
| 4 | Jeneponto | 363.792 | 82.306 | 73.754 | 89,61 |
| 5 | Takalar | 298.688 | 68.981 | 67.650 | 98,07 |
| 6 | Gowa | 772.684 | 177.629 | 172.904 | 97,34 |
| 7 | Sinjai | 244.125 | 54.371 | 33.601 | 61,8 |
| 8 | Bone | 758.589 | 171.239 | 155.999 | 91,1 |
| 9 | Maros | 353.121 | 78.646 | 77.190 | 98,15 |
| 10 | Pangkep | 335.514 | 75.059 | 68.736 | 95,61 |
| 11 | Barru | 174.323 | 41.407 | 39.589 | 91,1 |
| 12 | Soppeng | 226.991 | 57.033 | 37.306 | 65,41 |
| 13 | Wajo | 397.814 | 95.399 | 90.934 | 95,32 |
| 14 | Sidrap | 301.972 | 71.220 | 69.411 | 97,46 |
| 15 | Pinrang | 377.119 | 87.702 | 87.158 | 99,38 |
| 16 | Enrekang | 206.387 | 46.172 | 44.755 | 96,93 |
| 17 | Luwu | 362.027 | 78.702 | 72.327 | 91,9 |
| 18 | Tana Toraja | 234.002 | 53.425 | 40.672 | 76,13 |
| 19 | Luwu Utara | 312.883 | 73.275 | 70.644 | 96,41 |
| 20 | Luwu Timur | 299.673 | 69.369 | 61.967 | 89,33 |
| 21 | Toraja Utara | 231.214 | 50.046 | 39.581 | 79,09 |
| 22 | Makassar | 1.526.677 | 345.402 | 328.719 | 95,17 |
| 23 | Parepare | 145.178 | 32.406 | 31.988 | 98,71 |
| 24 | Palopo | 184.614 | 40.309 | 39.386 | 97,71 |
| Sulawesi Selatan | | 8.851.240 | 2.032.113 | 1.824.220 | 89,77 |

Sumber : Bappelitbangda, 2020

**Grafik II.17.
Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan
Berkelanjutan**



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Akses sanitasi layak merupakan indikator kepemilikan jamban beserta tangki septik yang layak. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah keterpenuhan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang capaiannya meningkat dari 82,94 persen pada tahun 2015 menjadi 85,30 persen pada tahun 2019 yang diindikasikan dengan persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 92,34 persen dan yang telah dilengkapi dengan tangki septik yang layak sebesar 78,25 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.98.
Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan
Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan | % | 82,94 | 83,40 | 84,41 | 84,41 | 85,30 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, tahun 2020

Namun capaian keterpenuhan akses terhadap layanan sanitasi layak di Sulawesi Selatan masih membutuhkan dukungan ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan beserta layanannya. Hal ini terlihat dari 24 kab/kota di Sulawesi Selatan, terdapat 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum memiliki IPLT, dan dari 14 kabupaten/kota yang telah memiliki IPLT hanya ada 7 IPLT yang berfungsi.

**Tabel II.99.
Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019**

| No. | Kabupaten/ Kota | BAB Sembarang (%) | Akses Jamban (%) | Septic Tank Layak (%) | Cakupan Layanan Truk Ninja (%) | Kondisi IPLT |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Kep. Selayar | 21,76 | 78,24 | 56,64 | 21,60 | Belum Tersedia |
| 2 | Bulukumba | 7,51 | 92,49 | 83,71 | 83,71 | Rusak |
| 3 | Bantaeng | 8,66 | 91,34 | 91,13 | 87,87 | Tidak Berfungsi |
| 4 | Jeneponto | 15,59 | 84,41 | 71,18 | 71,18 | Belum Tersedia |
| 5 | Takalar | 7,71 | 92,29 | 59,26 | 40,74 | Tidak Berfungsi |
| 6 | Gowa | 5,67 | 94,33 | 81,94 | 81,94 | Belum Tersedia |
| 7 | Sinjai | 10,63 | 89,37 | 70,13 | 70,13 | Berfungsi |
| 8 | Bone | 7,67 | 92,33 | 83,98 | 76,31 | Rusak |
| 9 | Maros | 16,75 | 83,25 | 92,28 | 75,53 | Tidak Berfungsi |
| 10 | Pangkep | 20,17 | 79,83 | 89,81 | 69,64 | Belum Tersedia |
| 11 | Barru | 6,80 | 93,20 | 76,89 | 76,31 | Berfungsi |
| 12 | Soppeng | 3,35 | 96,55 | 60,03 | 36,52 | Belum Tersedia |
| 13 | Wajo | 1,74 | 98,26 | 93,68 | 91,94 | Tidak Berfungsi |
| 14 | Sidrap | 3,02 | 96,98 | 90,32 | 87,30 | Tidak Berfungsi |
| 15 | Pinrang | 3,32 | 96,68 | 58,4 | 55,08 | Berfungsi |
| 16 | Enrekang | 8,96 | 91,04 | 98,53 | 89,57 | Belum Tersedia |
| 17 | Luwu | 16,97 | 83,03 | 77,55 | 60,58 | Belum Tersedia |
| 18 | Tana Toraja | 3,95 | 96,05 | 66,16 | 62,21 | Berfungsi |
| 19 | Luwu Utara | 11,21 | 88,79 | 89,64 | 78,43 | Belum Tersedia |
| 20 | Luwu Timur | 9,89 | 90,11 | 66,84 | 56,95 | Belum Tersedia |
| 21 | Toraja Utara | 2,99 | 97,01 | 65,86 | 31,15 | Belum Tersedia |
| 22 | Makassar | 2,78 | 97,22 | 63,87 | 33,35 | Berfungsi |
| 23 | Pare-Pare | 0 | 100 | 87,18 | 87,18 | Berfungsi |
| 24 | Palopo | 7,81 | 92,12 | 99,99 | 92,18 | Berfungsi |
| Sulawesi Selatan | | 7,66 | 92,34 | 78,25 | 64,40 | |

Sumber: Data Olahan AMPL, STBM, dan Dokumen SSK, BAPPELITBANGDA tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

6. Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Penggunaan sempadan sungai sebagai tempat tinggal (bangunan liar) di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten/Kota masih banyak. Peningkatan tersebut disebabkan karena masih kurangnya pengawasan pengendalian dan pemanfaatan ruang sempadan sungai dari pemerintah daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sempadan sungai melalui penerbitan undang-undang tentang sempadan sungai.

**Tabel II.100.
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar | % | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

**Grafik II.18.
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar, Tahun 2015-2019**



7. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Peningkatan capaian luas irigasi kondisi baik seiring dengan peningkatan kondisi saluran induk dan saluran sekunder pada Daerah irigasi Kewenangan Provinsi. Saluran induk kondisi baik sepanjang 140.239 meter atau sebesar 72 persen dan saluran sekunder kondisi baik sepanjang 162.892 meter atau 67 persen. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik cukup tinggi di tahun 2015 mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 62.89 persen di mana luas irigasi kewenangan provinsi sebesar 58.858 Ha saat ini luas irigasi provinsi dalam keadaan kondisi baik 42.674 Ha.

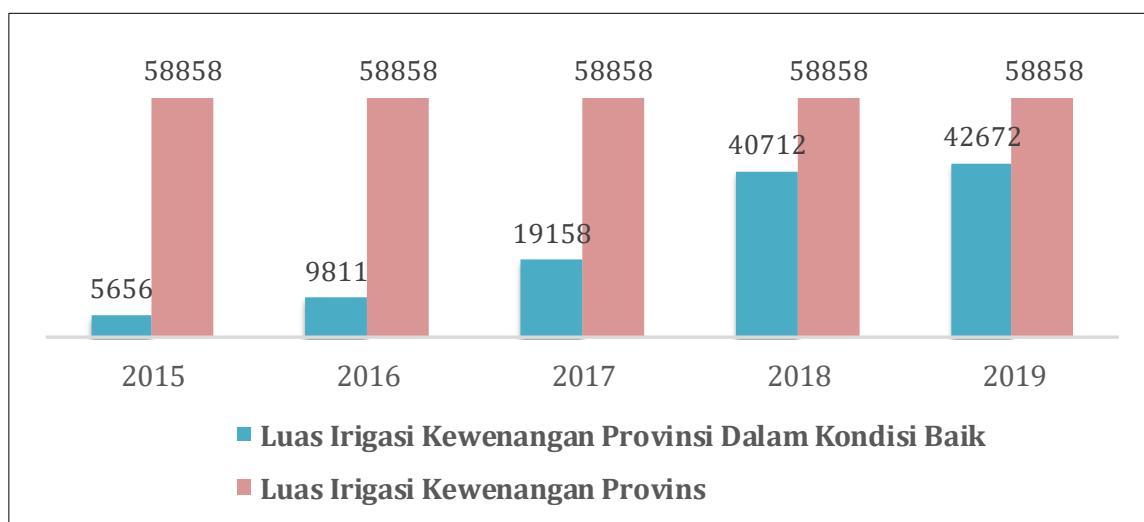
**Tabel II.101.
Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Luas Irigasi Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Baik | Ha | 5.656 | 9.811 | 19.158 | 40.712 | 42.672 |
| Luas Irigasi Kewenangan Provinsi | Ha | 58.858 | 58.858 | 58.858 | 58.858 | 58.858 |
| Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik | % | 9,61 | 16,67 | 32,55 | 69.167 | 72.5 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Grafik II.19.
Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi, Tahun 2015-2019



8. Rasio Jaringan Irigasi

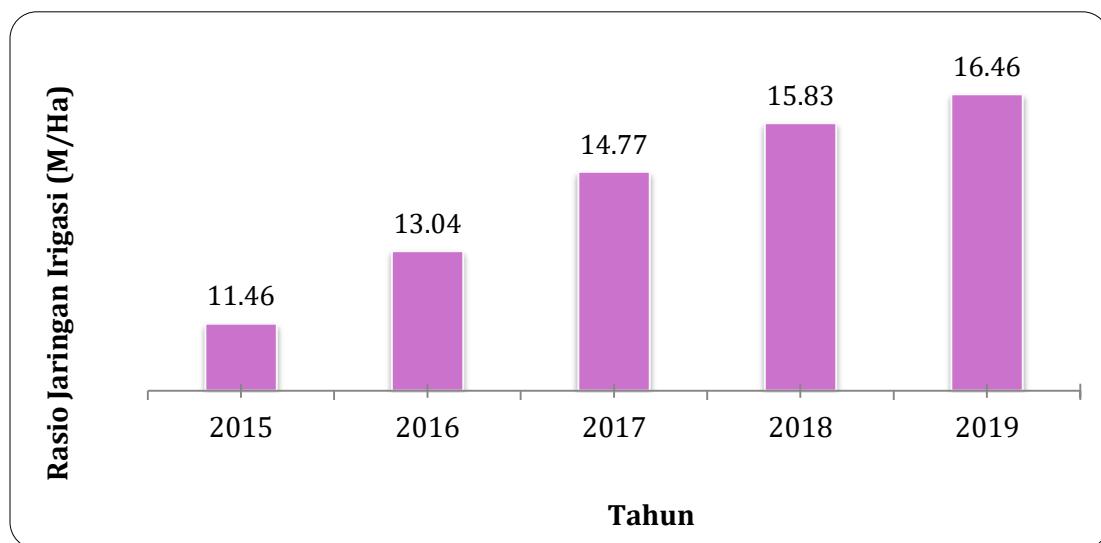
Rasio jaringan Irigasi diperoleh dari Panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian dimana Panjang saluran irigasi ataupun luas lahan hanya sedikit bertambah tiap tahunnya. luas lahan budidaya pertanian kecuali ditahun 2015 dan tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0.27 persen luas lahan budidaya pertanian saat ini meningkat sebesar 253.343 Ha. Faktor yang mempengaruhi masih banyaknya jaringan irigasi rusak karena Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga saluran irigasi pada saat pemanfaatannya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.102.
Rasio Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| No. | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Panjang Jaringan Irigasi | m | 7.196.037 | 8.465.227 | 9.551.227 | 10.154.227 | 10.775.727 |
| 2. | Jaringan Irigasi Primer | m | 1.457.964 | 1.669.964 | 1.729.964 | 1.829.964 | 1.830.665 |
| 3. | Jaringan Irigasi Sekunder | m | 2.615.286 | 2.931.286 | 3.057.286 | 3.257.286 | 3.338.085 |
| 4. | Jaringan Irigasi Tersier | m | 3.122.787 | 3.863.977 | 4.763.977 | 5.606.977 | 5.606.977 |
| 5. | Luas Lahan Budidaya Pertanian | Ha | 628.148 | 649.190 | 646.611 | 641.457 | 654.818 |
| Rasio Jaringan Irigasi | | M/Ha | 11,46 | 13,04 | 14,77 | 15,83 | 16,46 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Grafik II.20.
Rasio Jaringan Irigasi, Tahun 2015-2019



9. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan yang cukup signifikan pada angka tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan definisi akses air minum sesuai dengan indikator RPJMN dan indikator SDGs. Dari data tersebut terlihat bahwa 3,84% penduduk atau sebesar 340.390 jiwa masih mengakses air untuk kebutuhan minum langsung dari sungai, danau, sumur dan atau mata air terbuka lainnya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.103.
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Penduduk berakses air minum | Jiwa | 7.443.530 | 7.517.263 | 7.593.263 | 7.668.636 | 8.523.946 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 8.520.304 | 8.606.375 | 8.690.294 | 8.776.888 | 8.864.337 |
| Persentase Penduduk Berakses air minum | % | 87,36 | 87,35 | 87,38 | 87,37 | 96,16 |

Sumber: Bappelitbangda, 2020

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa : Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatanbangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) Kriteria rumah layak huni , yaitu : ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Rasio rumah layak huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Tahun 2019 besaran rasio rumah layak huni di Sulawesi Selatan sebesar 0,200 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 0,195 pada tahun 2018. Pencapaian rasio rumah layak huni menunjukkan bahwa target rasio rumah layak huni melampaui target dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,196. Kenaikan pencapaian rasio rumah layak huni didukung tingginya investasi pembangunan rumah bersubsidi di

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Kawasan strategis nasional (KSN) Mamminasata yang merupakan penyangga Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari permintaan pengembang terkait izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan rumah layak huni. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.104.
Rasio Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Rumah Layak Huni | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 | 0,200 |

Sumber: * Data sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel diolah Tahun 2020

2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengamanatkan penanganan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan melalui program penataan permukiman dengan melakukan pembinaan penanganan kawasan kumuh kabupaten/kota. Pada tahun 2019 ditargetkan penataan kawasan kumuh sebesar 49 persen pada kawasan kumuh yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yaitu kawasan kumuh yang luasannya 10 Ha sampai dengan 15 Ha. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.105.
Lingkungan Permukiman Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | % | 0,056 | 0,055 | 0,047 | 0,049 | 0,048 |

Sumber: * Data sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel diolah Tahun 2020

3. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Penanganan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan dilakukan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota yang berdasarkan SK Bupati/Walikota pada tahun 2014/2015 sebagai dasar penanganan kumuh untuk lima tahun kedepan seluas 2.680 ha. Berdasarkan data dan luasan tersebut dapat tertangani sampai tahun 2019 seluas 1.657 atau 61,82 ha.

Pada tahun 2020 di adakan pemutahiran data Kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati dan Walikota yang seluas 4.073 ha dengan kata lain terjadi penambahan luasan kumuh secara signifikan. Hal ini di sebabkan oleh semakin meluasnya wilayah pendataan yang sebelumnya hanya di wilayah perkotaan menjadi pendataan seluruh kecamatan baik perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan luasan data 2.680,84 pada tahun 2016 tertangani luasan Kawasan sebesar 208,33 ha atau 7,76 % dan pada akhir tahun 2019 tertangani 1.415 ha atau 52,70 % dan pada tahun 2020 triwulan ketiga terdata luas Kawasan kumuh yang tertangani seluas 1.687 ha dan bila di presentasekan dengan luasan kumuh terbaru adalah 40,9 %.

Peningkatan luasan kawasan kumuh yang sangat besar mengakibatkan rendahnya kinerja penanganan kawasan kumuh, sehingga target penanganan kawasan kumuh sebesar 52,25 pada tahun 2020 tidak tercapai.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Penanganan lingkungan permukiman kumuh di Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menetapkan aspek dan kriteria kekumuhan. Berdasarkan pendataan kawasan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, pada tahun 2019 terdapat 4.073,92 Hektar kawasan kumuh di Sulawesi Selatan atau sebesar 0,009 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan dan disusul oleh Keputusan Kepala Daerah pada tahun 2020 yang menetapkan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi dengan luas sebesar 1.183 Ha. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.106.
Percentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Luas Permukiman Kumuh Tertangani | Ha | 208,33 | 374,33 | 538,76 | 1.412,98 | 1.657,83 |
| Luas Permukiman Kumuh | ha | 2.680,84 | 2.680,84 | 2.680,84 | 2.680,84 | 4.073,92 |
| Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani | % | 7,76 | 13,96 | 20,16 | 52,70 | 40,69 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, diolah Tahun 2020

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.073 Ha (Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga) tersebar di 24 (Dua Puluh Empat) Kabupaten/Kota dengan 727 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh) lokasi. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi Kewenangan Provinsi meliputi di 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota, 49 (Empat Puluh Sembilan) Kecamatan, 90 (Sembilan Puluh) Kelurahan dan 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Kawasan dengan luas total sebesar 1.183 (Seribu Seratus Delapan Puluh Tiga) Ha sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.107.
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kewenangan
Provinsi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020**

| KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | KAWASAN | LUAS (Ha) |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| I. Kabupaten Bantaeng No.SK 050/365/VI/2019 | 1 Bantaeng | Letta / Pallantikang | Sungai Celendu 2 | 15,2 |
| | 2 Bantaeng | Karatuang | Karatuang | 15,1 |
| | 3 Bissappu | B.Sunggu, B.Lebang, B.Manai | Pesisir I | 15,5 |
| II. Kabupaten Bone No.SK 509/2018 | | | | 67,61 |
| | 1 T.Riattang Timur | Toro / Lonrae | Toro / Lonrae | 14,79 |
| | 2 T.Riattang Timur | Panyula | Panyula | 13,16 |
| | 3 T.Riattang | Biru | Biru | 12,05 |
| | 4 T.R.Barat | Macanang | Macanang | 15,34 |
| III. Kabupaten Bulukumba No. | 5 T.R.Barat | Majang | Majang | 12,27 |
| | 1 Bontobahari | Darubiah | Kasuso | 10,84 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | KAWASAN | LUAS (Ha) |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| SK Kpts.188-45-481 | | | | |
| IV. Kabupaten Enrekang No.SK 376/KEP/VI/2014 | 1 Enrekang | Juppandang | Juppandang | 15,62 |
| | | | | 213,78 |
| | 1 Somba Opu | Katangka | Katangka | 10,9 |
| | 2 Somba Opu | Katangka | Lakiyung | 10,23 |
| | 3 Somba Opu | Pandang-Pandang | Mangasa | 10,57 |
| | 4 Somba Opu | Kalegowa | Tamalate | 10,8 |
| | 5 Somba Opu | Sungguminasa | Sungguminasa | 10,02 |
| | 6 Somba Opu | Batangkaluku | Karetappa | 10,89 |
| | 7 Somba Opu | Batangkaluku | Batangkaluku | 10,58 |
| | 8 Somba Opu | Bonto-Bontoa | Bonto-Bontoa | 10,92 |
| | 9 Somba Opu | Tompobalang | Cambayya | 10,11 |
| | 10 Somba Opu | Samata | Borongraukang | 10,12 |
| | 11 Somba Opu | Romangpolong | Romangpolong | 10,25 |
| | 12 Somba Opu | Paccinonggang | Paccinonggang | 10,55 |
| | 13 Somba Opu | Tombolo | Tombolo | 10,45 |
| | 14 Somba Opu | Tombolo | Pa'bangngian | 10,09 |
| | 15 Somba Opu | Mawang | Biringbalang | 10,18 |
| | 16 Somba Opu | Tamarunang | Paggentungan | 12,11 |
| | 17 Somba Opu | Tamarunang | Beroanging | 10,13 |
| | 18 Pallangga | Pallangga | Bontorea | 12,13 |
| | 19 Pallangga | Jenetallasa | Tombolo | 10,58 |
| | 20 Pallangga | Mangalli | Allatappampang | 12,17 |
| | | | | 86,2 |
| VI. Kabupaten Jeneponto No.SK 299.1 Tahun 2016 | 1 Binamu | Sidenre | Sidenre | 12,9 |
| | 2 Bangkala | Benteng | Allu | 13,7 |
| | 3 Bangkala | Jenetallasa | Jenetallasa | 14,2 |
| | 4 Rumbia | Bontomanai | Bontomanai | 12,6 |
| | 5 Batang | Togotogo | Ulugalung | 10,5 |
| | 6 Batang | Bungeng | Paranga | 11,7 |
| | 7 Tarowang | Bonto Ujung | Ujung Timur | 10,6 |
| | | | | 146,18 |
| VII. Kabupaten Kepulauan Selayar No. SK 641/XII/Tahun 2018 | 1 Pasimarannu | Bone | Bonea | 10,83 |
| | 2 Bontomanai | Kaburu | Kaburu | 10,46 |
| | 3 Bontoharu | Kahu-Kahu | Kahu-Kahu | 12,17 |
| | 4 Bontoharu | Bontotanga | Bontotanga | 13,6 |
| | 5 Pasilambena | Karumpa | Karumpa Barat | 10,94 |
| | 6 Pasimasunggu | Labuang Pamajang | Labuang Pamajang | 14,02 |
| | 7 Bontosikuyu | Palassi | Palassi | 10,1 |
| | 8 Bontosikuyu | Bahuluang | Bahuluang | 12,4 |
| | 9 Takabonerate | Tambuna | Tambuna | 12,13 |
| | 10 Takabonerate | Batang Dan Kayuadi | Batang Dan Kayuadi | 13,84 |
| | 11 Pasilambena | Lembang Malene | Lembang | 15,15 |
| | 12 Pasilambena | Kalaotoa | Kalaotoa | 10,54 |
| VIII. Kabupaten Luwu No.SK 371/VIII/2014 | | | | 10,43 |
| | 1 Belopa | Senga Selatan | Ta'dale 02 | 10,43 |
| IX. Kabupaten Luwu Timur No. SK Tahun 2020 | | | | 33,57 |
| | 1 Nuha | Nikkel | Nikkel | 10,88 |
| | 2 Lumbewe | Burau | Burau | 9,86 |
| | 3 Tomoni | Tomoni | Tomoni | 12,83 |
| X. Kabupaten Luwu Utara No. SK 188.4.45/465/VII / 2017 | | | | 70,7 |
| | 1 Tanalili | Rampoang | Rampoang | 10 |
| | 2 Sabbang | Buntu Terpedo | Pantonangan | 10 |
| | 3 Sabbang | Buntu Terpedo | Padang Sarre | 10 |
| | 4 Sukamaju | Mojokerto | Pasar Spontan | 15 |
| | 5 Bonebone | Batang Tongka | Marobo | 15,7 |
| | 6 Bonebone | Pongko | Pongko | 10 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | KAWASAN | LUAS (Ha) |
|---|------------------|---|----------------|-----------------|
| XI. Kabupaten Maros No.SK 866/KPTS/0.50.13/II/2019 | | | | 34,93 |
| | 1 Maros Baru | Baji Pamai | Baju Bodoa | 10,09 |
| | 2 Lau | Allepolea | Balitjas | 10,72 |
| | 3 Turikale | Boribellaya | Boribellaya | 14,12 |
| XII. Kabupaten Pinrang No.SK 050/306/ 2019 | | | | 53,4 |
| | 1 Paleteang | Laleng Bata | Ammasangang | 15,06 |
| | 2 Paleteang | Paongan | Seroja | 10,5 |
| | 3 Paleteang | Benteng Sawito | Leranglerang | 14,8 |
| | 4 Paleteang | Macinnae | Ongkoe | 13,04 |
| XIII. Kabupaten Sidenreng Rappang No.SK 150/I/ 2019 | | | | 36,27 |
| | 1 Maritengngae | Sereang | Sereang | 10,3 |
| | 2 Maritengngae | Kanie | Kanie | 14 |
| | 3 Maritengngae | Takalasi | Takalasi | 11,97 |
| XIV. Kabupaten Sinjai No.SK 587 Tahun 2019 | | | | 24,66 |
| | 1 Sinjai Utara | Lappa | Lappa 01 | 14,46 |
| | 2 Sinjai Utara | Tongke-Tongke | Babana | 10,2 |
| XV. Kabupaten Soppeng No.SK 664/X/2019 | | | | 37,99 |
| | 1 Lilirilau | Cabbengnge | Cabbengnge | 12,42 |
| | 2 Lilirilau | Macanre | Macanre | 11,04 |
| | 3 Marioriawa | Kaca | Kaca | 14,53 |
| XVI. Kabupaten Takalar No.SK 338 Tahun 2019 | | | | 25,16 |
| | 1 Pattallassang | Pallantikan / Pattallassang / Pappa | Pattallassang | 15,12 |
| | 2 Mangarabombang | Mangadu | Tamalate | 10,04 |
| XVII. Kabupaten Toraja Utara No. SK 334/X/2018 | | | | 37,98 |
| | 1 Tallunglipu | Rante Paku | Rante Paku | 12,27 |
| | 2 Tallunglipu | Tompo Tallunglipu | Tompo | 13,87 |
| | 3 Rantepao | Pasale | Pasale | 11,84 |
| XVIII. Kabupaten Wajo No.SK 675 Tahun 2019 | | | | 59,72 |
| | 1 Tempe | Salomenraleng | Bakke Alau | 12,19 |
| | 2 Tempe | Maddukelleng | Ammesangngeng | 11,03 |
| | 3 Tempe | Maddukelleng | Paccefang | 13,26 |
| | 4 Tempe | Sitampae | Bola Malimpung | 12,38 |
| | 5 Tempe | Atakkae | Tadampalie 01 | 10,86 |
| XIX. Kota Makassar No. SK 826/654.2/ Tahun 2018 | | | | 77,92 |
| | 1 Tamalate | Balang Baru | Balang Baru | 16,31 |
| | 2 Panakkukang | Tello Baru | Tello Baru | 10,88 |
| | 3 Tallo | Tallo | Agampaccaya | 15 |
| | 4 Tallo | Lakkang | Lakkang | 11,57 |
| | 5 Ujung Tanah | Barrang Lombo | Barrang Lombo | 12,49 |
| XX. Kota Palopo No. SK 311/VII/2019 | 6 Tamalanrea | Kapasa | Kapasa | 11,67 |
| | | | | 95,03 |
| | 1 Wara | Pajalesang | Pajalesang | 13,38 |
| | 2 Wara | Lagaligo | Lagaligo | 13,48 |
| | 3 Wara | Boting | Boting | 14,31 |
| | 4 Wara Timur | Malatunrung | Malatunrung | 12,18 |
| | 5 Bara | Buntu Datu | Buntu Datu | 15,86 |
| | 6 Bara | To'bulung | To'bulung | 11,66 |
| | 7 Mungkajang | Mungkajang | Mungkajang | 14,16 |
| Total : 20 | 49 | 90 | 97 | 1.183,79 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, diolah Tahun 2020

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan tencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara sedangkan Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/ atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2019 bahwa jumlah aparat linmas di Kabupaten/Kota sebanyak 42.134 Orang, data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2019 sebanyak 8.851.240 jiwa. Nilai Indikator tersebut menunjukkan bahwa realiasi capaian kinerja sebesar 47,60 (45,90 per 10.000 penduduk) lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel II.108.
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat | % | 32,84 | 34,04 | 34,53 | 34,94 | 42,13 |

sumber : sipd.kemendagri.go.id

Target yang ditetapkan sebesar 40.270 orang di tahun 2019, sementara capaian sebesar 42.134 orang, dengan persentase capaian kinerja sebesar 104 % atau *telah melampaui target*, capaian indikator ini mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (rekruitmen dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja) pasca penetapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota/Kabupaten Target indikator ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa jumlah linmas dalam 1 RT (Rukun Tetangga) adalah 1 orang. Rasio capaian dari indikator pada tahun 2015 sebesar 32,84 dimana jumlah linmas 32.418 dari jumlah penduduk 8.520.838, tahun 2016 rasio capaian dari indikator sebesar 34,04 dimana jumlah linmas 34.886 dari jumlah penduduk 8.606.375, tahun 2017 rasio capaian dari indikator sebesar 34,54 dimana jumlah linmas 38.033 dari jumlah penduduk 8.690.294 dan tahun 2018 rasio capaian dari indikator sebesar 34,94, jumlah aparat Linmas di kabupaten/kota sebanyak 42.134 Orang.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

1. Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3)

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin. Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah dan Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten/Kota tahun 2019 sebanyak 617 kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 617 kasus pelanggaran atau 100%. Capaiannya lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 92 persen, sehingga persentase capaian sebesar 108 persen (melampaui target). Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.109.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) | % | 91 | 92 | 93 | 94 | 100 |

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di kabupaten/kota, Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pengaduan pelanggaran K3 yang masuk. Rasio capaian dari indikator ini pada tahun 2015 sebesar 91% dari jumlah pelanggaran sebanyak 478 kasus dan terselesaikan 435 kasus, tahun 2016 rasio capaian dari indikator sebesar 92% dari jumlah pelanggaran sebanyak 572 kasus dan terselesaikan 527 kasus, tahun 2017 rasio capaian dari indikator sebesar 93 persen dari jumlah pelanggaran sebanyak 1234 kasus dan terselesaikan 1148 kasus, tahun 2018 rasio capaian dari indikator sebesar 94 persen, tahun 2019 sebanyak 617 Kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 617 kasus pelanggaran atau 100 persen dengan asumsi kategori peringatan atas pelanggaran yang diindahkan, dengan catatan 113 kasus dengan peringatan dan pada tahun 2015-2019 diatas 100 persen.

Persentase rasio penyelesaian Palanggaran K3 terhadap total pelanggaran. Berdasarkan rekapitulasi data dari kabupaten/kota dan Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) diKabupaten/Kota yaitu :

- Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sisi kuantitas di daerah sangat terbatas.
- Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

Solusi yang yang dilakukan untuk mengatasi permasalah tersebut yaitu :

- Mengusulkan kepada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas pada Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri agar dapat dilaksanakan meningkatkan jumlah peserta Diklat PPNS di daerah.
- Peningkatan/ pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

2. Penegakan PERDA

Tingkat persentase Penegakan PERDA di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami Peningkatan. Dari tabel dibawah menunjukkan tingkat persentasi penegakan PERDA di tahun 2015 hanya mencapai 35 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2019 menjadi 89 persen. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja di Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah sudah cukup optimal, namun masih perlu ditingkatkan agar peraturan daerah yang berlaku di taati dan dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.110.
Percentase Penegakan PERDA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Penegakan PERDA | % | 35 | 55 | 75 | 80 | 89 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.1.6. Sosial

1. Percentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan sasaran utama pelayanan sosial. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2019 Jumlah PMKS tang diberikan bantuan sebanyak 287.692 jiwa lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 355.136 jiwa pada tahun 2018. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 462.125 jiwa. Secara persentase pada tahun 2019, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 57,11 persen lebih rendah 12,37 persen dari tahun 2018 yaitu 70,48 persen. Selengkapnya pada _ecto berikut.

**Tabel II.111.
Percentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan | Jiwa | 57.362 | 77.376 | 101.154 | 355.136 | 287.692 |
| Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan | jiwa | 320.720 | 321.765 | 376.071 | 503.847 | 462.125 |
| Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | % | 17,88 | 24,04 | 26,90 | 70,48 | 57,11 |

Sumber : data dinas sosial provinsi Sulawesi selatan, tahun 2019

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Ada beberapa penghambat dalam pelayanan rehabilitasi sektor PMKS yaitu belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum optimalnya persiapan sektor fakir miskin perkotaan dan pedesaan sebelum memperoleh layanan, belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial serta Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

2. Persentase PMKS yang Tertangani

Dari banyaknya PMKS yang dibantu maka laporan yang masuk juga jumlah PMKS yang telah selesai ditangani. Jumlah PMKS yang selesai ditangani dibandingkan jumlah PMKS keseluruhan memiliki persentase peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019 walaupun ada penurunan PMKS yang tertangani pada tahun 2019 dari tahun 2018. Demi meningkatkan pemecahan masalah sosial di Sulawesi Selatan, Penanganan PMKS sudah menerapkan keterpaduan berbagai Perangkat Daerah dalam menyelesaikan masalah sosial yang muncul. Hal tersebut tentunya menekankan pada sisi koordinasi berbagai lintas sektor juga termasuk dari masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan penanganan masalah sosial. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.112.
Persentase PMKS yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah PMKS yang tertangani | Jiwa | 104.542 | 216.431 | 204.428 | 357.424 | 288.535 |
| Jumlah PMKS | jiwa | 376.071 | 456.381 | 584.240 | 503.847 | 462.125 |
| Persentase PMKS yang tertangani | % | 27,8 | 47,42 | 35,00 | 70,48 | 57,02 |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi selatan, tahun 2019

Walaupun sudah menerapkan keterpaduan, tetapi ternyata masih pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor masih perlu dimaksimalkan lagi. Terlebih lagi belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya. Ini tentunya menjadi tantangan semua pihak agar layanan-layanan masyarakat pada masing-masing perangkat daerah bisa bersinergi maksimal karena penanganan masalah sosial tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja.

3. Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sebagai pelaksana standar pelayanan minimal, urusan sosial provinsi menitikberatkan juga pada penanganan dalam panti. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 6 (enam) panti yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Table berikut akan menampilkan persentase panti sosial dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.113.

**Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2019

Dalam periode 2015-2019 penyedian sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dipenuhi untuk setiap panti. Kendati demikian, sarana dan prasarana panti pelayanan sosial serta sumber daya manusia penyelenggaranya masih terus ditingkatkan.

4. Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan intervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, menejemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalian sumber dana. Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, seperti yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.114.

**Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social | WKBSM | 200 | 250 | 350 | 570 | 570 |
| Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social | WKBSM | 361 | 383 | 773 | 570 | 570 |
| Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social | % | 55,40 | 65,27 | 45,27 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2019

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola WKSMB dan kebermanfaatan WKSMB bagi masyarakat sehingga tertarik dan ikut bergabung dalam kegiatan WKSMB. Manfaat secara berkelanjutkan adalah tersalurannya program pemerintah melalui bantuan sosial. Akan tetapi WKSMB ini sudah tidak adanya dukungan Angaran dari kementerian sosial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial.

5. Penanganan Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial

Dinas sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga melaksanakan penanganan sosial korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan bencana merupakan bagian dari standar pelayanan minimum (SPM) yang telah diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir tergambar pada tabel berikut.

**Tabel II.115.
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun | Jiwa | 31.908 | 31.998 | 30.925 | 915 | 4.036 |
| Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun | jiwa | 45.422 | 45.611 | 37.645 | 68.596 | 20.085 |
| Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun | % | 70,25 | 75,09 | 82,15 | 1,33 | 20,01 |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2019

Pada pengukuran capaian kinerja indikator Persentase korban Bencana yang menerima bantuan sosial sudah sangat maksimal dengan adanya bantuan distribusi Logistik dari Kementerian sosial yang sangat mendukung penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat. Akan tetapi masih belum ada pengadaan bantuan logistic yang siapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat.

6. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, banyak kejadian-kejadian bencana yang terjadi. Puncak-puncak kejadian bencana ketika terjadi bencana alam gempa di Palu yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang dievakuasi kembali atau transit di Sulawesi Selatan. Selain itu terjadi konflik bencana sosial di Kabupaten Wamena yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang dievakuasi kembali atau transit di Sulawesi Selatan. Persentase korban bencana yang dievakuasi di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir tergambar pada tabel berikut.

**Tabel II.116.
Persentase Korban bencana yang dievakuasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | Jiwa | 8.622 | 6.832 | 6.198 | 32.933 | 46.127 |
| Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | jiwa | 9.084 | 8.522 | 7.529 | 32.933 | 46.127 |
| Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | % | 75,09 | 80,16 | 82,32 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015, Pada pengukuran capaian kinerja indicator Persentase korban Bencana yang dievakuasi sudah sangat maksimal dengan adanya sarana dan prasarana dari Kementerian sosial yang sangat mendukung penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat. Akan tetapi masih diperlukan peningkatan sarana prasarana dikabupaten/kota guna memaksimalkan pelayanan penanganan bencana kepada masyarakat.

7. Penanganan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Pelayanan kepada penyandang cacat dan lanjut usia juga merupakan standar pelayanan minimal. Pelayanan kepada lanjut usia sudah lama dilakukan di dinas sosial provinsi Sulawesi selatan terutama di dalam Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu Parepare. Penanganan lanjut usia di dinas sosial melihat perbedaan adanya yang masih potensial dan tidak potensial. Untuk penanganan penyandang disabilitas masih dilakukan terpadu dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdaftar secara administrasi. Persentase penyandang cacat yang menerima jaminan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir tergambar pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

**Tabel II.117.
Persentase Penyandang cacat dan Lanjut Usia menerima jaminan sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun | Jiwa | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 915 | 4.036 |
| Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun | Jiwa | 17.668 | 18.124 | 17.668 | 68.596 | 20.085 |
| Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 6,42 | 6,26 | 6,42 | 1,33 | 2,101 |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2019

Berdasarkan tabel pada tahun 2015 memperlihatkan masih minimnya unit pelaksana teknis daerah untuk pelayanan danrehabilitasi lanjut usia serta tidak adanya panti rehabilitasi milik provinsi untuk pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat fisik dan mental. Walaupun demikian peran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan penyandang cacat dan lanjut usia dalam pemberian jaminan sosial masih tinggi.

2.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebanyak 6.407.285 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.030.400 orang, naik 42.371 orang dibanding Agustus 2018. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja 3.830.096 orang dan pengangguran 200.304 orang. Dibandingkan Agustus 2018, jumlah penduduk bekerja bertambah 55.172 orang, sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 12.801 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2019 sebesar 62,90 persen. Indikator ini lebih rendah 0,11 persen poin dibanding TPAK Agustus 2018. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang menurun. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.118.
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angkatan Kerja | Orang | 3.706.128 | 3.881.003 | 3.812.358 | 3.988.029 | 4.030.400 |
| Bekerja | Orang | 3.485.492 | 3.694.712 | 3.598.663 | 3.774.924 | 3.830.096 |
| Pengangguran | Orang | 220.636 | 186.291 | 213.695 | 213.105 | 200.304 |
| Bukan Angkatan Kerja | Orang | 2.375.747 | 2.349.137 | 2.439.019 | 2.340.550 | 2.376.885 |
| Penduduk Usia Kerja | Orang | 6.081.875 | 6.124.063 | 6.251.377 | 6.328.579 | 6.407.285 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 60,94 | 62,92 | 60,98 | 63,02 | 62,90 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

2. Rasio Penduduk yang Bekerja

Besaran penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 94,05 persen, pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 95,20 persen, namun pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 94,39 persen, dan pada tahun 2018 naik menjadi sebesar 94,65 persen, pada tahun 2019 naik lagi menjadi sebesar 95,03 persen, Presentase penduduk yang bekerja terhadap total angkatan kerja sangat diharapkan untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka, namun tak kalah pentingnya kualitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Tabel II.119.
**Rasio penduduk yang bekerja
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah penduduk yang bekerja | Orang | 3.485.492 | 3.694.712 | 3.598.663 | 3.774.924 | 3.830.096 |
| Jumlah angkatan kerja | Orang | 3.706.128 | 3.881.003 | 3.812.358 | 3.988.029 | 4.030.400 |
| Rasio penduduk yang bekerja | % | 94,05 | 95,19 | 94,39 | 94,65 | 95,03 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

3. Angka SengketaPengusaha-Pekerja per tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 sebesar 1,89 persen dengan jumlah perusahaan sebesar 12.487 perusahaan, pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,07 persen menjadi sebesar 1,96 persen, dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 0,27 persen, pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar 0,73 persen, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,22 persen dengan jumlah perusahaan sebesar 12.487 perusahaan.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.120.
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja | Kasus | 236 | 245 | 279 | 436 | 261 |
| Jumlah Perusahaan | Perusahaan | 12.487 | 12.487 | 12.487 | 14828 | 15157 |
| Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 1,89 | 1,96 | 2,23 | 2,94 | 1,72 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

Ada beberapa hal yang menyebabkan sengketa pengusaha dan pekerja meningkat antara lain adalah meningkatnya wawasan pekerja dan buruh dan era transparansi sementara sebagian perusahaan masih belum melaksanakan secara maksimal aturan yang berlaku, disamping itu kendala SDM yang kita miliki dalam mengawasi dan melakukan pembinaan masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya ini dibuktikan dengan data pengawas maupun mediator kurang lebih 50 sd 60 orang yang mau melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap 12.487 perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut untuk Internal Dinas adalah berupaya untuk menambah jumlah mediator dan pengawas setiap tahunnya dan tenaga teknis diupayakan untuk ditingkatkan pengetahuannya melalui bimbingan teknis dan ketrampilan. Sementara untuk eksternal pengusaha dan pekerja secara terus menerus dilakukan pembinaan baik pelatihan maupun bimbingan teknis agar pengusaha maupun pekerja memahami posisi dan kewajiban masing-masing sehingga pada gilirannya keduanya bisa saling memahami dan bersinergi dalam membangun kebersamaan dalam mengurus perusahaan yang pada akhirnya bisa mengurangi bahkan mempersempit ruang perselisihan. Perlu upaya pemerintah untuk dapat memfasilitasi sengketa antara pemilik perusahaan dan karyawan.

4. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama berfluktuatif, tahun 2015 kasus yang terselesaikan sebesar 87,66 persen, kemudian tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 100 persen dan tahun 2018 menurun kembali menjadi sebesar 61.70 persen, dan tahun 2019 menurun lagi menjadi sebesar 33,33 persen. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.121.
**Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 87,66 | 100 | 100 | 61.70 | 33.33 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

5. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 sebesar 61,67 persen, mengalami penurunan sebesar 16,01 persen pada tahun 2016 menjadi 45,59 persen, dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 5,61 persen menjadi 51,20 persen, namun pada tahun 2018 turun menjadi sebesar 3,18 persen dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,22 persen menjadi 4,36 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.122.
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan | % | 61,67 | 45,59 | 51,20 | 3,19 | 4,36 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

Fluktuasi terhadap besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sangat dipengaruhi ketersediaan data dari kabupaten/kota yang diolah secara online, dimana ada beberapa kabupaten yang sama sekali tidak mengirim data karena penghentian anggaran operasional dari kementerian ketenagakerjaan. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggaran dari kementerian pada beberapa kabupaten kota yang tidak mendapat anggaran, dan juga memaksimalkan fungsi dari fungsional pengantar kerja.

6. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap jumlah perusahaan. Keselamatan dan perlindungan K3 dari tahun 2015-2019 rata rata mencapai realisasi sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa hampir semua perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan sudah menerapkan SMK3. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) dari tahun ketahun tingkat kepatuhan terhadap norma K3 mengalami kemajuan yang menggembirakan. Dalam Pasal 5 ayat (2) PP tersebut, bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya wajib menerapkan SMK3. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 15.157 Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dari jumlah perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sejumlah 15.157 Perusahaan.

Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah kualitas SDM maupun kuantitas Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan yang ada Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah kurang lebih 55 orang. Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan keseleman dan kesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran sejumlah perusahaan telah menerapkan keselamatan dan kesejahteraan kerja bagi para pekerjanya. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.123.
Keselamatan dan Perlindungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Keselamatan dan Perlindungan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

7. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuasi. Dimana pada tahun 2015 sebesar 71,15 persen, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 73,56 persen dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan masing masing menjadi sebesar 71,23 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 64,51 persen dan pada tahun 2019 sebesar 63,55 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.124.
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek | % | 71,16 | 73,56 | 71,23 | 64,51 | 63,55 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

Ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya kepesertaan jamsostek salah satunya adalah sebagian perusahaan masih bersifat sentralistik artinya pekerjanya di Makassar tapi terdaftar BPJS ketenagakerjaannya di Jakarta dan tidak terlaporkan di Makassar. Kemudian ada peserta yang keluar masuk BPJS ketenagakerjaan terutama pekerja kontrak atau pekerja di sektor konstruksi.

8. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2015 – 2019 berfluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 25,19 persen, naik menjadi 28,83 persen pada tahun 2016, turun sebesar 3,35 persen menjadi 25,48 persen, dan pada tahun 2018 naik sebesar 9,86 persen menjadi sebesar 35,34 persen dan pada tahun 2019 naik cukup tinggi sebesar 17,55 persen menjadi sebesar 52,89 persen. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan jumlah besaran pemeriksaan di perusahaan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 8.016 perusahaan dari total jumlah perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 adalah sebanyak 15.157 perusahaan. Memperhatikan perkembangan jumlah perusahaan yang melapor sejak pelaksanaan sistem pemerintahan otonomi daerah, dimana pertumbuhannya hampir tidak bergerak. Demikian pula pertumbuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan ada juga tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung berkurang karena usia pensiun. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.125.
**Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 25,19 | 28,83 | 25,48 | 35,34 | 52,89 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

9. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2015 – 2019 berfluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 4,35 persen, pada tahun 2016 samai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan masing masing menjadi sebesar 4,50 persen pada tahun 2016, dan 5,00 persen pada tahun 2017 serta 6,92 persen pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 turun lagi sebesar 1,54 persen menjadi sebesar 5,38 persen. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan jumlah besaran pengujian peralatan di perusahaan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 684 perusahaan dari total jumlah peralatan yang telah terdaftar sebanyak 12.725 peralatan. Peningkatan besaran pengujian peralatan di perusahaan perlu terus ditingkatkan agar dapat meminimalkan kecelakaan kerja. Setiap peralatan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan kerja atau dibutuhkan sertifikasi untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja dalam setiap operasinya. Di Indonesia setiap peralatan kerja harus disertifikasi sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Sebagaimana yang telah diketahui dan dijalankan sampai saat ini, sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan lokasi dimana peralatan kerja tersebut akan dioperasikan. Seperti di pabrik-pabrik produksi dan perkebunan untuk sertifikasinya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun didalam melaksanakan pemeriksaan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih memiliki kendala dari segi kuantitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan masih sangat terbatas hanya berjumlah kurang lebih 60 orang, disamping itu kualitas SDM nya juga masih sangat terbatas terutama terkait tenaga ahli. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.126.
**Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | % | 4,35 | 4,50 | 5,00 | 6.92 | 5.38 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

10. Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 100 persen, pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 80,49 persen, dan pada tahun

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

2018 naik lagi menjadi sebesar 100%, namun pada tahun 2019 menurun sebanyak 30% dibandingkan pada tahun 2018 menjadi sebesar 70,00 persen. Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.127.
Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|-------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 100 | 100 | 80,49 | 100 | 70 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

11. Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 100 persen, pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 66,67 persen, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi sebesar 100%, namun pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar 98,75 persen, Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.128.
Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|-------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | % | 100 | 100 | 66,67 | 100 | 98,75 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

12. Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

Besaran penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 94,05 persen, pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 95,20 persen, namun pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 94,39 persen, dan pada tahun 2018 naik menjadi sebesar 94,65 persen, pada tahun 2019 naik lagi menjadi sebesar 95,03 persen, Presentase penduduk yang bekerja terhadap total angkatan kerja sangat diharapkan untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka, namun tak kalah pentingnya kualitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan agar mapu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.129.
**Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | % | 94,05 | 95,2 | 94,39 | 94.65 | 95.03 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas

Rasio Kesempatan Kerja adalah merupakan prosentase Penduduk Yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja. Persentase penduduk yang bekerja terhadap total jumlah penduduk usia kerja cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio kesempatan kerja sebesar 57,31 persen, pada tahun 2016 meningkat sebesar 2,59 persen menjadi sebesar 59,90 persen, dan mengalami penurunan sebesar 2,33 persen menjadi 57,57 persen pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,08 persen menjadi 59,65 persen, dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi sebesar 59,78 persen. Kenaikan Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun secara absolut jumlah penduduk yang bekerja menurun pada 5 lapangan pekerjaan dibandingkan Agustus 2018 terutama Pertanian (berkurang 49.093 orang), Perdagangan (berkurang 20.666 orang), Jasa Keuangan dan Asurasi (berkurang 5.110 orang), Konstruksi (berkurang 3.894 orang) dan Real Estat (berkurang 321 orang). Sedangkan 12 kategori lapangan pekerjaan lainnya mengalami kenaikan diantaranya Administrasi Pemerintahan (bertambah 30.899 orang), Jasa Pendidikan (bertambah 22.795 orang), Transportasi dan Pergudangan (bertambah 19.137 orang). Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.130.
**Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun keatas | % | 57,31 | 59,90 | 57,57 | 59.65 | 59.78 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

14. Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas

Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas terhadap total angkatan kerja kurun waktu 2015-2019 pada umumnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 41,52 persen, pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 40,41 persen, namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan masing -masing menjadi sebesar 41,98 pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar 43,312 persen dan pada tahun 2019 sebesar 45,81 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.131.
**Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas | % | 41,52 | 40,41 | 41,98 | 43,32 | 45,81 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

15. Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga

Persentase Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap total penduduk yang bekerja selama kurun waktu 2015-2019 pada umumnya mengalami berfluatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 36,86 persen, pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 35,65 persen, namun pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 37,26 persen, pada tahun 2018 turun lagi menjadi sebesar 36,53 persen, dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi sebesar 36,86 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.132.
**Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja | % | 36,86 | 35,65 | 37,26 | 36,53 | 36,86 |

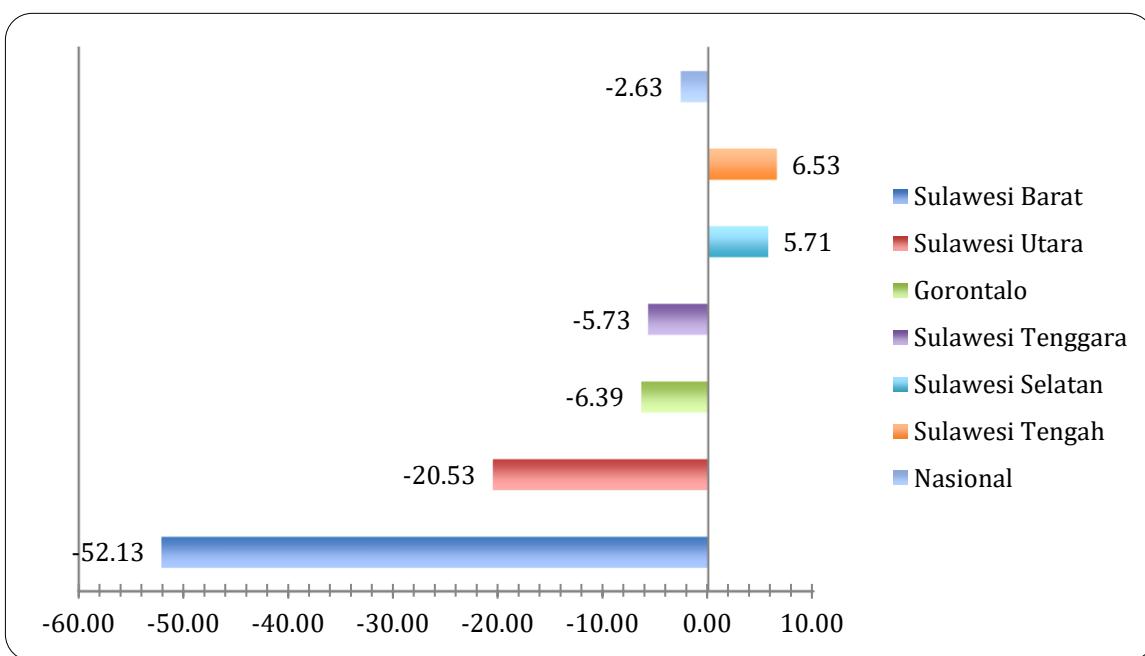
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

16. Jumlah Penganggur

Jumlah penganggur di Sulawesi Selatan berdasarkan angka terbanyak jumlahnya di regional Pulau Sulawesi, namun hal ini diakibatkan oleh besarnya jumlah penduduk Sulawesi Selatan dibanding provinsi lain di pulau Sulawesi yaitu 8.851.240. jika dibandingkan secara persentase dengan jumlah angkatan kerja maka besarannya 4,97 persen terbesar kedua setelah Sulawesi Utara. Memperhatikan tren pertambahan jumlah penganggur di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan khususnya terkait kesesuaian antara pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan kerja.

Memperhatikan perubahan pertumbuhan jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan, maka diperoleh gambaran bahwa upaya penanganan jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan belum menunjukkan keberhasilan yang diindikasikan dengan perubahan pertumbuhan jumlah penganggur tahun 2019 sebesar 5,71 persen. Capaian ini jauh di bawah nasional dan 4 (empat) provinsi lainnya di Pulau Sulawesi yang berhasil menurunkan jumlah pengangguran di daerahnya masing-masing. Untuk itu perlu dilakukan adanya kebijakan dan upaya yang tepat guna mengatasi angka pengangguran di Sulawesi Selatan, terlebih lagi dengan adanya dampak pandemi Covid-19 yang akan mempengaruhi bertambahnya jumlah pengangguran. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II.21.
**Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Jumlah Pengangguran
Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi
Tahun 2020**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020 (data diolah)

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Selama tahun 2015 sampai tahun 2019, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (eksekutif) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 48,41 persen dan tahun 2019 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 53,10 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.133.
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan | % | 48,41 | 48,91 | 49,66 | 51,25 | 53,10 |

Sumber: BKD Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

2. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) periode pemilu, yaitu periode 2009-2014, periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Sulawesi Selatan cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 2009-2014 sebanyak 19 persen, kemudian pada periode 2015-2018 ditargetkan sebanyak 21 persen namun sampai dengan pemilihan dan pengambilan sumpah anggota dewan terealisasi sebanyak 17 persen, kemudian pada periode 2019-2024 jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 19 persen dari target 22 persen. Meskipun belum mencapai target pemerintah Daerah dan kuota 30 persen, namun pencapaian perempuan dalam bidang politik di Sulawesi Selatan sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.134.
**Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD | % | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 17,86 | 25,88 |

Sumber: Data diolah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel, tahun 2019

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu tahun 2015 sebesar 67 persen meningkat menjadi 71 persen pada tahun 2018, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka secara luas. Dan pada tahun 2019 Partisipasi perempuan dilembaga swasta mengalami penurunan menjadi 69 persen yang salah satu faktor yang berpengaruh adalah adanya efisiensi dilingkup perusahaan yang merupakan dampak dari ekonomi global/pasar bebas. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.135.
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta | % | 67 | 69 | 71 | 71 | 69 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

4. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak memiliki tenaga kerja dibawah umur yang umumnya bekerja di sector informal, yang rentan akan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, seks bebas dan narkoba. Dari jumlah tenaga informal dan formal, pekerja anak mengalami peningkatan yg cukup signikan dari tahun-tahun dan pada tahun 2019 mencapai 0,09 persen atau jika dirata-ratakan pekerja anak dibawah umur cenderung meningkat 0,10 persen pertahun, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.136.
**Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Usia | % | 0,15 | 0,18 | 0,40 | 0,05 | 0,09 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan peningkatannya berfluktuasi yaitu pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 47,47 persen menjadi 43,76 persen atau turun kurang lebih 7,8 persen

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

dari tahun sebelumnya, atau dengan kata lain partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2017 sebanyak 43,76 persen saja dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja. Tahun 2018 sampai dengan 2019 persentase partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sampai pada tahun 2019 sebanyak 50,32 persen atau naik kurang lebih 12,88 persen dari dua tahun sebelumnya.

**Tabel II.137.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 44,31 | 47,47 | 43,76 | 50,23 | 50,32 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Layanan Terpadu

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan amanat tersebut dengan capaian sebesar 100 persen sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan terus berkomitmen untuk memenuhinya.

Selain layanan kesehatan dan rehabiliasi sosial, perempuan dan anak korban kekerasan juga berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum berupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan penegakan hukum di provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 100 persen, melalui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat mulai dari proses penyidikan pada unit perlindungan anak dan perempuan di Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Kota Besar sampai dengan putusan pengadilan yang didampingi oleh petugas dari Pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.138.
Cakupan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | % | 58 | 57 | 54 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

7. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kinerjanya pada tahun 2019 baru mencapai 30 persen

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

dikarenakan kondisi keluarga dan kesiapan korban kekerasan perempuan dan anak yang mempengaruhi kinerja pemulangan korban kekerasan. Demikian halnya dengan layanan reintegrasi sosial, yang merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dengan memberikan berbagai layanan untuk mempersiapkan perempuan dan anak korban kekerasan melalui pemberian layanan terapi oleh konselor, dan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien sampai kondisi korban siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban. Persentase layanan reintegrasi sosial yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Sulsel sampai tahun 2019 sebanyak 21 persen ke wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke luar Provinsi Sulawesi Selatan antara lain ke Jakarta, Timika, dan Ambon. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.139.
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | % | 27 | 32 | 22 | 27 | 21 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2019

8. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi

Rasio APM perempuan dan laki laki pada berbagai jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.140.
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD/MI/Sederajat | % | 101,55 | 100,83 | 100,09 | 100,25 | 101,32 |
| Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/Sederajat | % | 106,58 | 105,19 | 104,15 | 102,64 | 100,79 |
| Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat | % | 102,96 | 102,04 | 110,66 | 108,97 | 106,11 |
| Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi | % | 110,02 | 110,00 | 103,1 | 103,3 | 105,2 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

9. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada berbagai jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.141.

**Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24
Tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun | % | 100,57 | 100,49 | 100,15 | 100,28 | 100,6 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

2.3.2.3. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Persentase ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 Ketersedian beras Sulawesi Selatan Sebesar 354 persen meningkat menjadi 388,24 persen pada tahun 2018 namun, mengalami penurunan menjadi 363,76 persen pada tahun 2019. Ketersedian jagung Sulawesi Selatan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2015 ketersedian jagung sebesar 24,33 persen dan menjadi 47,88 persen di tahun 2019. Capaian ketersedian beras dan jagung sangat berbeda dengan ketersedian kedelai yang mana hanya bertumbuh 1,4 persen dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.142.

**Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Komoditas | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ketersediaan Beras | % | 352 | 373,6 | 384 | 388,24 | 363,76 |
| Ketersediaan Jagung | % | 24,33 | 34,02 | 38,89 | 44,33 | 47,88 |
| Ketersediaan Kedelai | % | 23,56 | 23,71 | 20,88 | 22,55 | 24,96 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel, tahun 2020

2. Ketersediaan Energi, Protein Perkapita, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Kondisi Ketersedian energi dan protein perkapita provinsi sulawesi selatan pada tahun 2015 masing-masing sebesar 5.544 kkal/kapita/hari dan 154 gram/kapita/hari dan menurun masing-masing menjadi 3879 kkal/kapita/hari dan 112,67 gram/kapita/hari pada tahun 2019. Sedangkan untuk Persentase pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan tahun 2015 sebesar 77,27 persen dan mencapai 100 persen pada tahun 2017, sampai tahun 2019. Seperti pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.143.
**Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ketersediaan Energi Perkapita | kkal/kapita/hari | 5.544 | 5.862 | 3.906 | 3.572 | 3.879 |
| Ketersediaan Protein Perkapita | kkal/kapita/hari | 154,52 | 168,34 | 125,41 | 103,75 | 112,67 |
| Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 77,27 | 85,13 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel, tahun 2020

3. Sebaran Kerawanan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status ketahanan pangan di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan bahwa terdapat 93 desa/kelurahan atau sebesar 3,05 persen yang terindikasi Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan, 272 desa/kelurahan atau sebesar 8,91 persen yang terindikasi Rentan, 392 desa/kelurahan atau sebesar 12,82 persen yang terindikasi Agak Rentan dan 2.297 atau 75,21 persen tahan terhadap kerawanan pangan. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.144.
**Sebaran Kerawanan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan/ Lembang | Jumlah Desa | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Sangat Rentan | Rentan | Agak Rentan | Tahan Pangan |
| 1 | Kep. Selayar | 11 | 88 | 6 | 9 | 7 | 66 |
| 2 | Bulukumba | 10 | 136 | 3 | 1 | 19 | 113 |
| 3 | Bantaeng | 8 | 67 | 2 | 9 | 14 | 42 |
| 4 | Jeneponto | 11 | 113 | 4 | 18 | 36 | 55 |
| 5 | Takalar | 9 | 100 | 2 | 7 | 15 | 76 |
| 6 | Gowa | 18 | 167 | 1 | 16 | 25 | 125 |
| 7 | Sinjai | 9 | 80 | 1 | 3 | 6 | 70 |
| 8 | Bone | 27 | 372 | 6 | 18 | 36 | 312 |
| 9 | Maros | 14 | 103 | 3 | 10 | 11 | 79 |
| 10 | Pangkep | 13 | 103 | 3 | 8 | 25 | 67 |
| 11 | Barru | 7 | 55 | 0 | 5 | 14 | 36 |
| 12 | Soppeng | 8 | 70 | 2 | 4 | 5 | 59 |
| 13 | Wajo | 14 | 190 | 2 | 24 | 15 | 149 |
| 14 | Sidrap | 11 | 106 | 3 | 7 | 7 | 89 |
| 15 | Pinrang | 12 | 108 | 18 | 33 | 33 | 24 |
| 16 | Enrekang | 12 | 129 | 0 | 19 | 16 | 94 |
| 17 | Luwu | 22 | 227 | 6 | 31 | 24 | 166 |
| 18 | Tana Toraja | 19 | 159 | 3 | 17 | 26 | 113 |
| 19 | Luwu Utara | 12 | 179 | 10 | 8 | 13 | 148 |
| 20 | Luwu Timur | 11 | 128 | 4 | 5 | 8 | 111 |
| 21 | Toraja Utara | 21 | 151 | 4 | 8 | 25 | 114 |
| 22 | Makassar | 15 | 153 | 6 | 5 | 6 | 136 |
| 23 | Pare-Pare | 9 | 22 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 24 | Palopo | 9 | 48 | 3 | 4 | 6 | 35 |
| Sulawesi Selatan | | 307 | 3.054 | 93 | 272 | 392 | 2.297 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel, tahun 2020

2.3.2.4. Lingkungan Hidup

Dari pencapaian tahun 2015 sampai tahun 2019 data jumlah ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pasang surut di akabiatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

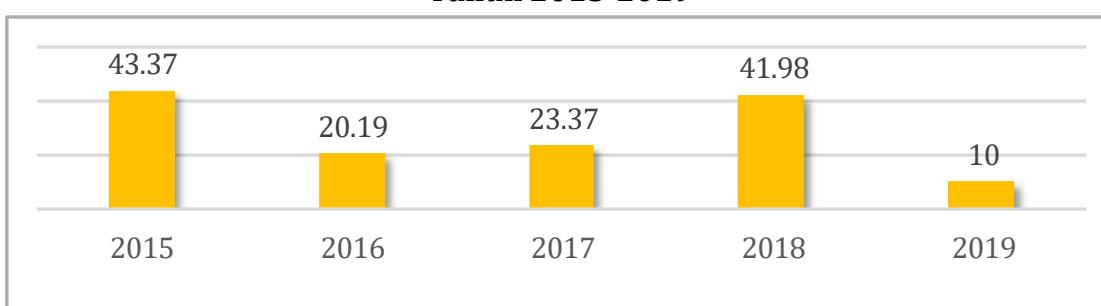
1. Belum adanya konsistensi terhadap penegakan hukum,terutama dalam hal menindaklanjuti hasil pengawasan dari kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Belum adanya langkah konkret, mengenai kejelasan peran, tugas dan fungsi instansi lingkungan hidup daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perusahaan pemegang izin lingkungan tidak memiliki SDM yang kompeten dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pengalokasian dana untuk pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan/atau izin PPLH relatif kecil (tidak relevan antara jumlah perusahaan yang menjadi target pengawasan dengan jumlah dana yang diberikan).

Pada tahun 2018 sebanyak 61 pemrakarsa usaha yang dibina dan diawasi tingkat ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana sebnayak perusahaan dibina dan diawasi secara pasif melalui evaluasi laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemrakarsa secara periodik sedangkan sebanyak 25 pemrakarsa usaha yang dibina dan diawasi dengan turun langsung ke lokasi kegiatan dan diperoleh Presentase ketaatan 41,98% sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 57 pemrakarsa usaha yang dibina dan diawasi tingkat ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana sebanyak 35 perusahaan dibina dan diawasi secara pasif melalui evaluasi laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemrakarsa secara priodik sedangkan sebanyak 22 pemrakarsa usaha yang dibina dan diawasi dengan turun langsung ke lokasi kegiatan dan diperoleh persentase ketaatan sebesar 10 persen.

Menindaklanjut hasil capaian yang menurun serta untuk mendorong peningkatan pencapaian presentase ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu Perlu adanya Ketersediaan SDM pejabat Fungsional pengawasan lingkungan hidup (PPLH) .

Capaian presentase ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih dibawah target RENSTRA Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target pada tahun 2018 sebesar 70 persen dan diperoleh capaian kinerja sebesar 41,98 persen dan target 2019 sebesar 75persen dan diperoleh Sebesar 10 persen.Selengkapnya pada grafik berikut.

**Grafik II.22.
Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Izin Lingkungan,
Izin PPLH dan PUU LH di Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2015-2019**



Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

1. Jumlah Limbah B3 yang Dikelola

Limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat dengan B3, diartikan sebagai sisa atau limbah yang dihasilkan dari proses produksi dengan kandungan bahan berbahaya dan beracun karena memiliki jumlah dan konsentrasi *toxicity, reactivity, flammability* dan *corrosivity* yang mampu mencemari dan merusak lingkungan, serta membahayakan kesehatan manusia. Karena keberadaannya yang mengancam ekosistem di sekitarnya, limbah B3 harus ditangani dengan tepat agar tidak merusak dan membahayakan. Pada tahun 2019 DPLH Provinsi Sulawesi Selatan Sudah memiliki dokumen Analisis Lokasi Penimbunan dan Penyusun Dokumen Perencanaan Lokasi Alternatif Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tentunya akan menjadi acuan penempatan/penimbunan limbah B3 untuk bagian Indonesia Timur.

Adapun Faktor Penghambat kinerja pengelolaan limbah b3 adalah,Limbah B3 relatif besar tetapi tidak tersedia pengolahan incinerator,Lokasi Penimbunan LB3 belum ada sehingga masih diangkut ke Pulau Jawa,Sejumlah Mesin Incenerator Rumah Sakit tidak memiliki izin,Masih kurangnya komitmen Institusi dalam melaporkan neraca LB3 secara rutin Realisasi pengelolaan Limbah B3 pada tahun 2018 sebesar 4.365.759 dan tahun 2019 sebesar 2.885.319 ton. Realisasi tersebut lebih besar dibandingkan target RPJMD dimana tahun 2018 sebesar 500.000 Ton dan tahun 2019 sebesar 1.500.000 ton. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.145.
Jumlah Limbah B3 yang Dikelola
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Limbah B3 yang dikelola | Ton | 611.898 | 677.869 | 667.900 | 4.365.759 | 5.373.629 |

Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020

2. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Pada Kondisi Khusus di Provinsi

Sampah selalu menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah. Begitubanyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul. Bau tidak sedap, lalat beterbang, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata, Ini terjadi akibat Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya dan Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah ini adalah masalah yang umumnya terjadi pada kab/kota yang berada disulawesi selatan. Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dalam hal pengurangan sampah dan penanganan sampah sangat dibutuhkan. Khususnya kab/kota yang dilihat dari hasil capaian yang telah mendekati target RPJMD pada tahun 2018 capaian kinerja sekitar 66,91 persen dan tahun 2019 sebesar 73,33 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.146.
Sampah Perkotaan yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani | % | 71,67 | 74,5 | 75,41 | 66,91 | 73,33 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Prov. Sulse, tahun 2019 * Data sementara, diolah BAPPELITBANGDA, Tahun 2020

Sistem pengelolaan persampahan terutama untuk daerah perkotaan, harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan dengan pola hidup sertabudaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanganulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secaraluas. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya dan disertai juga kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah selama 5 tahun terakhir tersajikan pada tabel berikut.

Tabel II.147.
Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA | Ton | 1.095 | 1.460 | 4.015 | 1.361 | 1,380 |
| Total volume sampah | Ton | 77.748 | 78.533 | 79.297 | 60,33 | 61,538 |
| Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | % | 1,41 | 1,86 | 5,06 | 18 | 20 |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tahun 2019

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah senantiasa memberi dukungan dalam bentuk pengalokasian DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el, juga

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

semakin mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusinya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang ber KTP dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin. Untuk tahun 2018, jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang ber KTPdi Sulawesi Selatan mencapai 5.852.672 jiwa dari total penduduk Sulawesi Selatan usia 17 tahun ke atas atau telah kawin sebanyak 6.680.487 jiwa sedangkan pada tahun 2019 mencapai 6.062.519 jiwa dari total penduduk Sulawesi Selatan usia 17 tahun ke atas atau telah kawin sebanyak 6.422.849 jiwa. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.148.
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,87 | 0,94 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir.

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Untuk tahun 2018, jumlah bayi berakte kelahiran di Sulawesi Selatan mencapai 162.586 jiwa dari jumlah bayi di Sulawesi Selatan sebanyak 184.892 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2019 jumlah bayi berakte kelahiran di Sulawesi Selatan mencapai 180.720 jiwa dari jumlah bayi di Sulawesi Selatan sebanyak 195.900 jiwa.

**Tabel II.149.
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Bayi Berakte Kelahiran | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 0,92 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020.

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pri dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK).

Rasio pasangan berakte nikah merupakan jumlah pasangan nikah berakte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Untuk tahun 2018, jumlah pasangan nikah berakte nikah di Sulawesi Selatan mencapai 610.571 jiwa dari total keseluruhan pasangan nikah di Sulawesi Selatan sebanyak 4.219.905 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pasangan nikah berakte nikah di Sulawesi Selatan mencapai 1.058.113 jiwa dari total keseluruhan pasangan nikah di Sulawesi Selatan sebanyak 4.135.399 jiwa, selengkapnya pada table berikut.

**Tabel II.150.
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Pasangan Berakte Nikah | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,29 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

4. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akte kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir. Selain itu, masih banyak akta kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional dan belum terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Rasio kepemilikan akte kelahiran merupakan jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Untuk tahun 2018, jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang memiliki akte kelahiran sebanyak 3.590.968 jiwa dari total jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 9.426.885 jiwa.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang memiliki akte kelahiran sebanyak 3.963.981 jiwa dari total jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 9.145.143 jiwa.

**Tabel II.151.
Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,38 | 0,43 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Indikator ini belum terdapat di Tahun 2015-2016 di karenakan masih berdasar pada Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang (Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah), kemudian setelah berganti ke Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang (Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), DPMD Provinsi belum menetapkan indikator ini sebagai IKK dikarenakan kondisi anggaran yang tidak memungkinkan untuk mengakomodir indikator ini serta perubahan kedua atas Renstra DPMD Provinsi Tahun 2013-2018 telah ditetapkan sehingga tidak memungkinkan menambahkan kegiatan yang dapat menunjang indikator ini. Kemudian pada Renstra DPMD Tahun 2018-2024 indikator ini belum di masukan sebagai IKK DPMD Provinsi di karenakan pada UU No.23 Tahun 2014 Tentang (Pemerintah Daerah) yaitu membatasi kewenangan DPMD skala Provinsi pada Sub Urusan Penataan Desa hanya pada desa adat dan sebagai mana di ketahui di Provinsi Sulawesi Selatan belum terbentuk Desa Adat kemudian pada Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa kewenangan Provinsi sama sekali tidak ada sehingga tidak memungkinkan melakukan pembinaan secara langsung untuk mencapai indikator ini. Oleh karena itu DPMD Provinsi tidak menjadikan indikator ini sebagai IKK sehingga tidak ada target yang di tetapkan akan tetapi DPMD Provinsi tetap memantau perkembangan indikator ini.

**Tabel II.152.
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|-------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | % | N/A | N/A | 31,47 | 4,08 | 17,38 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Target RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2020 dan Tahun 2021 hanya bertambah 1 kelompok binaan permasing-masing LPM pertahun di karenakan cakupan LPM yang cukup besar sehingga tidak dapat diakomodir secara keseluruhan untuk dilakukan pembinaan dalam peningkatan kelompok binaan. Peningkatan kelompok binaan LPM pada skala Provinsi belum maksimal dilakukan di karena keterbatasan anggaran sebagaimana di katahui bahwa setiap desa memiliki LPM yang sampai saat ini berjumlah 2.255 desa, belum lagi LPM ditingkat kelurahan yang secara keseluruhan berjumlah 3.038 LPM, pada tingkat pemerintah Kabupaten intervensi DPMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan pembinaan LPM dalam peningkatan kelompok binaannya mengalami permasalahan yang sama berupa keterbatasan anggaran belum lagi banyaknya program prioritas dari Kementerian Desa yang harus dilaksanakan. Dari identifikasi yang dilakukan DPMD Provinsi Sulawesi Selatan kebanyakan LPM yang berada di desa tidak aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya sehingga kelompok binaan LPM masih sangat sedikit. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.153.

**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah LPM | Lembaga | 3.037 | 3.037 | 3.038 | 3.038 | 3.038 |
| Jumlah Klp Binaan LPM | Klp | 51.650 | 56.431 | 60.866 | 3.038 | 3.038 |
| Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | Klp | 17 | 19 | 20 | 1 | 1 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Dengan peran aktif DPMD Provinsi dan Tim Penggerak PKK Provinsi dalam pembinaan Tim Penggerak PKK yang berada di desa sehingga peningkatan jumlah kelompok binaan PKK dapat meningkat, dengan terjun langsung kekabupaten dan desa DPMD Provinsi dan Tim Penggerak PKK Provinsi melakukan pembinaan pada pokja-pokja yang ada di PKK. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 DPMD Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan bertambahnya rata-rata 1 kelompok binaan PKK dari 43 rata-rata kelompok binaan di Tahun 2019 menjadi rata-rata 44 kelompok binaan PKK di Tahun 2020 dan 45 rata-rata kelompok binaan PKK di Tahun 2021 dengan mempertahankan pola pembinaan yang ada ditahun 2019 serta tetap meningkatkan inovasi didalamnya. Seperti pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.154.
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah PKK | Klp | 7.531 | 3.328 | 3.632 | 3.344 | 3.344 |
| Jumlah Kelompok Binaan | Klp | 146.835 | 123.487 | 142.517 | 142.517 | 142.517 |
| Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | Klp | 19 | 37 | 39 | 43 | 43 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

4. Persentase LPM Berprestasi

Pada Tahun 2019 DPMD Provinsi belum mencapai target RPMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Peningkatan LPM berprestasi belum maksimal di lakukan dikarenakan cakupan luas yang mana pada data DPMD Provinsi terdapat 3.038 LPM yang berada di desa dan kelurahan belum lagi dukungan anggaran sangat terbatas sehingga pembinaan LPM menjadi LPM berprestasi masih sangat minim dilakukan baik itu pada skala provinsi maupun tingkat kabupaten. Pada Tahun 2020 dan tahun 2021 DPMD Provinsi menargetkan 25.31% dan 25.82% untuk persentase LPM berprestasi dengan jalan meningkatkan kembali kerjasama dengan kabupaten sampai dengan tingkat kementerian dalam hal melakukan pembinaan LPM yang diharapkan nantinya akan berprestasi. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.155.
Persentase LPM Berprestasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah LPM | Lembaga | 3.037 | 3.037 | 3.038 | 3.038 | 3.038 |
| Jumlah LPM Berprestasi | Lembaga | 37 | 736 | 739 | 739 | 739 |
| Persentase LPM Berprestasi | % | 1,22 | 24,24 | 24,33 | 24,33 | 24,33 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

5. Persentase PKK Aktif

Dari pencapaian persentase PKK Aktif ini menggambarkan hampir secara keseluruhan PKK yang ada di Sulawesi Selatan dikategorikan aktif dengan dukungan peran aktif DPMD Provinsidan Tim Penggerak PKK Provinsi dengan terjun langsung kedaerah sehingga PKK yang berada didaerah secara aktif melakukan fungsinya dan dengan adanya dukungan dana desa dalam mensupport pendanaan kegiatan PKK yang ada didesa. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 DPMD Provinsi Sulawesi Selatan akan mempertahankan hasil kinerja yang ada ditahun 2019 dengan tetap berperan aktif terjun langsung kekabupaten serta mengembangkan inovasi-inovasi yang baru. Seperti pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.156.
Persentase PKK Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah PKK | Klp | 7.531 | 3.328 | 3.632 | 3.344 | 3.344 |
| Jumlah PKK Aktif | Klp | 7.536 | 3.251 | 3.549 | 3.344 | 3.344 |
| Persentase PKK aktif | % | 97,68 | 97,69 | 97,71 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

6. Jumlah Posyandu Aktif

Peran kader posyandu di pemberdayaan masyarakat di bentuk oleh kombinasi motivasi internal dan eksternal. Dalam proses terdapat hambatan sumberdaya, potensi, pengalaman serta pengembangan kemampuan. Keikutsertaan menjadi kader posyandu di latar belakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa jiwa sosial tinggi untuk membantu orang lain, faktor eksternal yaitu membantu program pemerintah untuk membentuk kader posyandu dan mempunyai pelayanan langsung kemasyarakatan dan keluarga yang mudah di jangkau (dekat). Kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan derajat pemberdayaan masyarakat. Dari pencapaian persentase Posyandu Aktif ini menggambarkan hampir secara keseluruhan bergotong royong dalam membangun dan membina kader posyandu yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ini di kategorikan aktif dengan dukungan peran aktif DPMD Provinsi dan seluruh kader posyandu yang berada di desa.

Tabel II.157.
Jumlah Posyandu Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Posyandu Aktif | Unit | 9.589 | 9.725 | 10.936 | 10.976 | 10.976 |
| Persentase Posyandu Aktif | % | 99,28 | 99,49 | 99,53 | 99,89 | 99,89 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1) Kelahiran. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. 2) Kematian. Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wilayah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah perperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratur, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. 3) Migrasi. Penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk.

Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan, yang cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.158.
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 1,16 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,05 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Selatan

2. Total Fertility Rate (TFR)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi.

Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik utnuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR di Sulawesi Selatan. Total fertility rate (TFR) Sulawesi Selatan tersajikan pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.159.
Total Fertility Rate (TFR)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,28 | 2,35 | 2,21 | 2,44 | 2,4 |

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

3. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak per keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anak dalam keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pemenuhan hak dasar anak akan lebih maksimal, demikian juga kualitas pengasuhan kedua orangtuanya diasumsikan akan jauh lebih baik.

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, rata-rata jumlah anak per keluarga di Sulawesi Selatan pada kisaran angka 3. Diharapkan untuk tahun berikutnya angka ini tetap atau cenderung menurun, sehingga secara umum akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas generasi.

Tabel II.160.
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | Anak/ Keluarga | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

4. Ratio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB di Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2015 hingga 2019 menunjukkan angka yg fluktuatif, namun cenderung menurun. Hal ini akan berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan. Meskipun jika dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan mengalami penurunan, namun dengan memperhatikan data capaian rasio akseptor KB yang cenderung menurun pada kurun waktu yang sama, memberikan gambaran bahwa pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan yang cenderung menurun banyak dikontribusi oleh kematian dan migrasi. Oleh karenanya itu, kesertaan pasangan usia subur menjadi akseptor KB masih harus menjadi prioritas, agar berkontribusi positif terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia umumnya. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.161.
Ratio Akseptor KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ratio Akseptor KB | % | 66,87 | 67,42 | 66,30 | 62,91 | 63,05 |

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern.

Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Sulawesi Selatan semakin meningkat dari tahun 2015 ke 2019. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan promosi keluarga berencana, meskipun CPR ini belum memberikan gambaran pemakaian kontrasepsi modern, karena CPR ini mengukur pemakaian metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern.

Tabel II.162.
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 | % | 66,87 | 67,42 | 66,34 | 66,5 | 71,74 |

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

6. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet need adalah semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

Cakupan unmet need KB merupakan persentase yang diperoleh dari PUS yang ingin punya anak ditunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan atau memakai alat kontrasepsi, yang dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dan dikalikan 100%.7 Angka unmet need yang menurun menjadi indikator sasaran strategis pada program KB. Cakupan unmet need Sulawesi Selatan yang menurun atau semakin kecil pada kurun waktu 2015 hingga 2019, memiliki arti nilai yang semakin baik, karena menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, persentase unmet need KB dimasa datang bisa semakin turun persentasenya. Olehnya itu, upaya penurunan unmet need di Sulawesi Selatan harus menjadi prioritas untuk keberhasilan pelayanan KB dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan unmet need terdiri dari tiga faktor, antara lain: a) Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak, pendapatan, dan pengetahuan, b) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan, serta c) Faktor reinforcing, yaitu

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Kinerja PLKB. Beberapa faktor yang sifatnya positif untuk menurunkan unmet need KB di Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel II.163.
Cakupan PUS *Unmet Need*
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 15,13 | 13,98 | 14,14 | 13,9 | 13,7 |

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

7. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun peningkatan penggunaan MKJP di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan sangat lambat, begitupun di Sulawesi Selatan.

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan. MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki maupun perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender, utamanya dalam meningkatkan kesertaan MKJP laki-laki di Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.164.
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 19,40 | 14,23 | 14,6 | 15,3 | 24,26 |

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

8. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Pentingnya kualitas pelayanan dalam pemberian pelayanan keluarga berencana (KB) atau kesehatan reproduksi (KR) melalui pola pendekatan "kesehatan reproduktif" yang lebih komprehensif yang menekankan pada pelayanan keluarga berencana yang berkualitas yang berorientasi pada klien sehingga membuat klien mampu membuat pilihan sesuai informasi yang didapat.

Kualitas pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung lama (lestari). Salah satu elemen kualitas pelayanan keluarga berencana adalah informasi yang diberikan kepada klien dan mekanisme follow-up dan kontak kembali.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi, sehingga untuk kedepannya masih diperlukan upaya strategis yang lebih menekankan pada kualitas pelayanan terhadap klien, serta memperbanyak promosi edukatif konseling kontrasepsi yang memperhatikan kearifan local.

Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.165.
Persentase Tingkat Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi | % | 8,16 | 13,83 | 14,9 | 14,2 | 17,32 |

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat focus pada pengasuhan balitanya.

Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 persentase anggota BKB yang ber KB cederung menurun. Hal ini menunjukkan masih perlu upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kesertaan ber KB para anggota BKB di Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.166.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 89,97 | 88,27 | 85,78 | 85,93 | 84,91 |

Sumber : Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) BKKBN

10. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok.

Persentase anggota Bina Keluarga Remaja yg ber KB di pada kurun waktu 2015 hingga 2019 tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: intensitas sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terutama untuk daerah yang sulit dijangkau, dan motivasi dari keluarga BKR kurang karena masalah kesibukan mencari nafkah dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Olehnya itu, masih perlu dilakukan upaya peningkatan kesertaan berKB bagi anggota BKR dengan melakukan sosialisasi yang kontinyu oleh PLKB kepada seluruh keluarga BKR di Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.167.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 75,41 | 74,96 | 74,74 | 72,3 | NA |

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

11. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB. Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 kesertaan ber KB keluarga yang mempunyai lansia yang tergabung dalam kelompok BKL mengalami peningkatan, dan diharapkan angka ini semakin meningkat di tahun mendatang. Sosialisasi dan edukasi kepada pasangan usia subur yang tergabung dalam kelompok BKL masih harus dioptimalkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.168.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 39 | 43 | 44 | 50,3 | NA |

Sumber : BKKBN Perwakilan dan DP3A Dalsuk KB Provinsi Sulawesi Selatan

12. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS berperan sebagai wadah yang memberikan informasi bagi keluarga dalam hal: 1. Merawat kehamilan dan mempersiapkan kelahiran, 2. Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, 3. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), 4. Membangun komunikasi yg baik dan efektif bagi orang tua dengan anak, 5. Mempersiapkan keluarga memasuki kehidupan lansia dan merawat lansia agar tetap produktif, 6. Masalah kesehatan reproduksi, 7. Konsultasi kewirausahaan, dan 8. Memberikan rujukan terhadap permasalahan keluarga.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 keberadaan PPKS di setiap kecamatan di wilayah Sulawesi Selatan baru berkisar 55 persen, Artinya masih banyak kecamatan yang belum menyediakan wadah layanan PPKS. Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.169.
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 55 | 54 | 55 | NA | NA |

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

13.Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

Percentase PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendiriting, diantaranya reward pemerintah bagi penyuluhan dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri. Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi: pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelopok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi.

**Tabel II.170.
Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri | % | 13 | 15 | 15 | NA | NA |

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

14.Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Seiring dengan diterapkannya paradigma pelayanan publik di bidang KB yang bersifat desentralistik, maka perlu dan penting untuk dikaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja PPKBD.

Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 jumlah PPKBD di Sulawesi Selatan telah mencapai lebih dari 100 persen, Artinya secara kuantitatif telah mencukupi. Namun jumlah yang cukup ini musti diimbangi dengan memperhatikan beberapa faktor

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

pendorong keberhasilan PPKBD dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesertaan ber KB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja PPKBD diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentif bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.171.
Rasio PPKBD per Desa/Kelurahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan | % | 101,86 | 102,26 | 100,46 | 100,10 | 100,30 |

Sumber : Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) BKKBN

15. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Ketersediaan layanan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai standarisasi pelayanan, akan berdampak pada peningkatan kesertaan KB aktif, karena masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan berkualitas. Pada kurun waktu 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan jumlah faskes yang cukup signifikan. Untuk ke depannya diharapkan seluruh faskes dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga meningkatkan minat PUS untuk ber KB. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.172.
Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan | % | 22,60 | 49,79 | 64,60 | 72,86 | 74,39 |

Sumber : Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) BKKBN

16. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pembinaan keluarga dalam melaksanakan fungsi pengasuhan dan tumbuh kembang anak dilakukan melalui aktifitas kelompok Bina Keluarga Balita. Nilai cakupan pembinaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 baru mencapai 71 persen, dan pada tahun 2018 serta 2019 tidak diperoleh data yg dapat menjelaskan kemajuan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

capaiannya. Meskipun demikian, dari data yang tersedia dapat terbaca kebutuhan pembinaan keluarga masih harus ditingkatkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.173.
Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | % | 70 | 70 | 71 | NA | NA |

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

17. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui anggaran pembangunan belanja daerah semakin meningkat seiring dengan peningkatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah yang menunjukkan persentase pada tahun 2015 sebesar 0,03 persen meningkat menjadi 1,50 persen pada tahun 2019 dari total anggaran. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.174.
Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |

Sumber : Badan Pengelola Keungan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.2.8. Perhubungan

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum terjadi kenaikan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 12,16 % atau 1,440 Juta penumpang. Jika dihitung pertahunnya persentase kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 7,19 %, tahun 2016 – 2017 sebesar 5,03 %, tahun 2017-2018 sebesar 6 % dan terjadi penurunan tahun 2018-2019 sebesar 6 %. Dengan Rata-rata pertumbuhan arus penumpang adalah 12 % atau 1,440 Juta penumpang dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada periode tahun 2015-2016 serta terjadi penurunan pertumbuhan pada tahun 2018-2019. Tren peningkatan ini dapat diartikan bahwa masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadikan angkutan umum sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.175.
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | Juta Orang | 11,833 | 12,684 | 13,323 | 14,117 | 13,273 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Adapun dengan fluktuasi kenaikan penumpang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi masyarakat serta meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi. Pengembangan transportasi umum masih berbasis di perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah. Peningkatan jumlah penumpang merupakan arus urbanisasi rata-rata dari desa ke perkotaan sebanyak 800.000 orang per-tahunnya.

2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek secara umum mengalami penurunan dari 0,42 di tahun 2015 menjadi 0,40 di tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan 0,19 % pada tahun 2017, walaupun telah terjadi kenaikan secara signifikan pada tahun 2018 sebanyak 0,44% trend kenaikan ini berlanjut sampai tahun 2019 sebanyak 1,06 %. Jika melihat kecenderungan kenaikan penumpang yang naik, penurunan ini dapat disebabkan oleh maraknya angkutan umum yang berplat hitam serta berbasis aplikasi yang tidak melakukan legalisasi terhadap status kendaraannya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.176.
**Rasio Ijin Trayek
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 8,520,304 | 8,606,375 | 8,690,294 | 8,772,000 | 8,851,200 |
| Rasio ijin trayek | % | 0,42 | 0,40 | 0,21 | 0,44 | 1,06 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bis

Perubahan angka yang menunjukkan tren positif ini merupakan dampak dariterjadinya kenaikan jumlah penumpang dan semakin membaiknya kondisi ekonomimasyarakat. Direncanakan akan dibangun terminal multi moda untuk menghubungkan semua moda transportasi. Terminal multi moda untuk menghubungkan semua modatransportasi. Terminal multi moda yang akan dibangun adalah terminal multi modabagian utara di Bandara Hasanuddin dan terminal multi moda bagian selatan diPelabuhan Boddia Takalar.Selengkapnya pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.177.
Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Jenis Prasarana Transportasi | Satuan | Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pelabuhan Udara | Unit | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Pelabuhan Laut | Unit | 89 | 91 | 109 | 38 | 38 |
| Terminal Penumpang | Unit | 51 | 51 | 61 | 26 | 26 |
| Jumlah | Unit | 151 | 153 | 181 | 75 | 75 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Penetapan hierarki pelabuhan di Sulawesi Selatan didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 yang menetapkan hierarki pelabuhan yaitu pelabuhan - pelabuhan pengumpulan regional yang merupakan kewenangan provinsi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.178.
Hierarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017

| No. | Kab/Kota | Pelabuhan | Hirarki Pelabuhan | Kewenangan |
|------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Bantaeng | Bantaeng/Bonthain | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 2 | Barru | Garongkong | Pengumpul | Pusat |
| 3 | Barru | Awerange | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 4 | Bone | Bajoe | Pengumpul | Pusat |
| 5 | Bone | Pattirobajo | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 6 | Bulukumba | Bulukumba/ Lappe'e | Pengumpul | Pusat |
| 7 | Bulukumba | Maccini Baji | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 8 | Jeneponto | Jeneponto/Bunging | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 9 | Luwu | Belopa | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 10 | Luwu Timur | Malili | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 11 | Luwu Timur | Lampia | Pengumpul | Pusat |
| 12 | Luwu Utara | Munte | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 13 | Makassar | Makassar | Utama | Pusat |
| 14 | Palopo | Palopo/Tg. Ringgit | Pengumpul | Pusat |
| 15 | Pangkep | Biringkasi | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 16 | Pangkep | P. Kalukalukuang | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 17 | Pangkep | P. Sabutung | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 18 | Pangkep | P. Sailus | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 19 | Pangkep | P. Sapuka | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 20 | Pare-Pare | Pare – Pare | Pengumpul | Pusat |
| 21 | Pinrang | Marabombang | Pengumpulan Lokal | PR |
| 22 | Kep. Selayar | Jampea | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 23 | Kep. Selayar | Selayar/Benteng/-Rauf Rahman | Pengumpul | Pusat |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kab/Kota | Pelabuhan | Hirarki Pelabuhan | Kewenangan |
|-----|--------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 24 | Kep. Selayar | Galesong/Takalar | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 25 | Kep. Selayar | P. Bonerate | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 26 | Kep. Selayar | Kalaotoa | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 27 | Kep. Selayar | Kayuadi | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 28 | Kep. Selayar | P. Jinato | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 29 | Kep. Selayar | Ujung Jampea | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 30 | Kep. Selayar | Pamatata | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 31 | Sinjai | Sinjai / Larea-rea | Pengumpul | Pusat |
| 32 | Wajo | Siwa / Bangsalaee | Pengumpulan Regional | Provinsi |
| 33 | Barru | Lamuru Kung | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 34 | Barru | Pancana / Pute Angin | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 35 | Bone | Waetuo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 36 | Bone | Centrana | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 37 | Bone | Lapangko / Salameko | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 38 | Bone | Barebbo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 39 | Bone | Uloe | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 40 | Bone | Tuju-Tuju | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 41 | Bulukumba | Butung / Kasuso | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 42 | Bulukumba | Bira / Tanah Beru | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 43 | Bulukumba | Kajang | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 44 | Jeneponto | Tarowang | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 45 | Luwu | BawaSalo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 46 | Luwu | Bona Pute | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 47 | Luwu | Larompong | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 48 | Luwu Timur | Wotu | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 49 | Luwu Utara | Labuange | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 50 | Luwu Utara | Cappasalo/Malangke | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 51 | Makassar | Kayu Bangkao | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 52 | Makassar | Pulau Barrang Caddi | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 53 | Makassar | Pulau Barrang Lompoo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 54 | Makassar | Pulau Bonetambung | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 55 | Makassar | Pulau Kodingareng | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 56 | Makassar | Pulau Lae-Lae | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 57 | Makassar | Pulau Langkai | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 58 | Makassar | Pulau Samalona | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 59 | Pangkep | P. Badi | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 60 | Pangkep | P. BalangLombo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 61 | Pangkep | P. Balo-BaloangLombo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 62 | Pangkep | P. Dewakang Lombo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 63 | Pangkep | P. Doang-DoanganLombo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 64 | Pangkep | P. Gondong Bali | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 65 | Pangkep | P. Kapoposang Bali | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 66 | Pangkep | P. Karangrang | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 67 | Pangkep | P. Kulambing | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 68 | Pangkep | P. Langkoitang | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 69 | Pangkep | P. Matalaang | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 70 | Pangkep | P. Pammantauang | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |
| 71 | Pangkep | P. Salemo | Pengumpulan Lokal | Kab./Kota |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No. | Kab/Kota | Pelabuhan | Hirarki Pelabuhan | Kewenangan |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------|------------|
| 72 | Pangkep | P. Karumpa | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 73 | Pangkep | Kalatoa | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 74 | Pinrang | Langga | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 75 | Pinrang | Ujung Lero | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 76 | Kep. Selayar | Appatana | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 77 | Kep. Selayar | Bangkala | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 78 | Kep. Selayar | P. Batang Mata | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 79 | Kep. Selayar | P. Bembe/ Tanamlala | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 80 | Kep. Selayar | P. Biropa | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 81 | Kep. Selayar | P. Bona Lohe | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 82 | Kep. Selayar | P. Kalao | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 83 | Kep. Selayar | P. Komba- Komba | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 84 | Kep. Selayar | P. Lambego | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 85 | Kep. Selayar | P. Padang | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 86 | Kep. Selayar | P. Samatellu | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 87 | Kep. Selayar | P. Tarupa | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 88 | Kep. Selayar | P. Tambolongan | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 89 | Kep. Selayar | P. Madu | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 90 | Kep. Selayar | P. Rajuni | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 91 | Kep. Selayar | Pasitallu | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 92 | Sinjai | Cappa Ujung Sinjai | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 93 | Sinjai | P. BurungLohe | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 94 | Sinjai | Patubukan | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 95 | Sinjai | P. Kambuno | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 96 | Takalar | P. Tanakeke/ Satanga | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 97 | Takalar | Salomakko | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 98 | Wajo | Doping | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 99 | Wajo | Jalang/Cendrane | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| 100 | Wajo | Danggae | Pengumpan Lokal | Kab./Kota |
| Daftar Dermaga Sungai dan Danau | | | | |
| 101 | Dermaga Danau Soroako | Operasi | Pengumpan | Kab./Kota |
| 102 | Dermaga Danau Nuha | Operasi | Pengumpan | Kab./Kota |
| 103 | Dermaga Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti | Konstruksi | Pengumpan | Kab./Kota |
| 104 | Dermaga Danau Towuti | Rencana | Pengumpan | Kab./Kota |
| 105 | Dermaga Danau Matano | Operasi | Pengumpan | Kab./Kota |
| 106 | Dermaga Danau Mahalona | Rencana | Pengumpan | Kab./Kota |
| 107 | Dermaga Sungai Sadang | Operasi | Pengumpan | Kab./Kota |
| 108 | Dermaga Danau Sidenreng | Rencana | Pengumpan | Kab./Kota |
| 109 | Dermaga Danau Tempe | Rencana | Pengumpan | Kab./Kota |

Sumber : Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN 2017 dan Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN 2017

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Jumlah halte yang terbangun hingga tahun 2019 sebanyak 145 unit yang tersebar pada 8 koridor yang telah ditentukan sesuai tabel. Namun pada kenyataannya hanya ada 49 halte yang masih beroperasi ini disebabkan karena tidak adanya armada BRT yang melewati rute penempatan halte tersebut. Pasalnya, pihak Perum Damri saat ini hanya mengoperasikan BRT pada jalur atau koridor terbatas. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.179.
Jumlah Halte BRT Kawasan Perkotaan Mamminasata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Koridor/ Tahun | Satuan | Jumlah Halte Koridor BRT | | | | | Jumlah |
|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 2 | Unit | 6 | - | 12 | 12 | 12 | 42 |
| 3 | Unit | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 70 |
| 4 | Unit | 17 | 2 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| 5 | Unit | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 7 | Unit | - | 38 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 8 | Unit | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| PLUS | Unit | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Jumlah | Unit | 36 | 65 | 44 | 44 | 44 | 145 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2019

Jumlah barang terangkut angkutan umum telah terjadi kenaikan jumlah barang terangkut angkutan umum dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 10,38 % atau 4,53 Juta Barang terangkut. Jika dihitung pertahunnya persentase kenaikan dari tahun 2016 – 2017 sebesar 27,13 %, tahun 2017-2018 sebesar 71,27 % dan terjadi penurunan tahun 2018-2019 sebesar 49,3 %. Dengan Rata-rata pertumbuhan arus barang adalah 10 % atau 39,6 Juta Ton tingkat pertumbuhan tertinggi pada periode tahun 2017-2018 serta terjadi penurunan pertumbuhan pada tahun 2018-2019. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.180.
Jumlah Barang Terangkut Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Jenis Angkutan | Satuan | Jumlah Barang Terangkut Angkutan Umum | | | | |
|-------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Bus | Ton | 121.080 | 121.425 | 121.785 | 122.145 | 122.413 |
| Pesawat Udara | Ton | 154.276 | 179.629 | 212.667 | 192.316 | 142.153 |
| Kapal Laut | Ton | Tidak Ada Data | 43.429.242 | 55.262.663 | 94.910.143 | 48.005.254 |
| Jumlah | Ton | 275.356 | 43.730.296 | 55.597.115 | 95.224.604 | 48.269.820 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

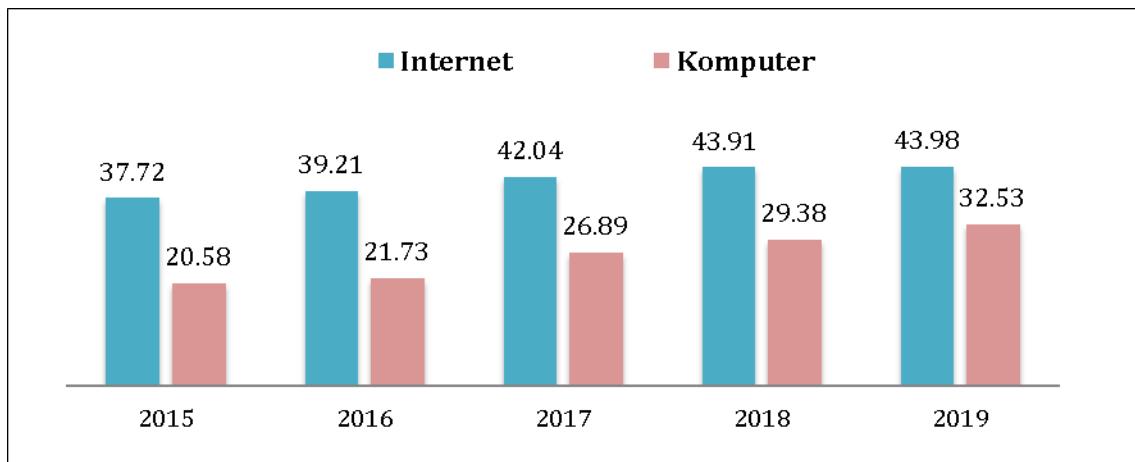
2.3.2.9. Komunikasi dan Informatika

Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan tiap tahun dikarenakan penggunaan akses internet pada rumah tangga, dan banyaknya daerah yang terpencar tercoverage sehingga akses internet wilayahnya lebih meluas dan tingginya jual beli

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

secara online yang bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Seperti pada grafik berikut.

Grafik II.23.
**Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dan
Kepemilikan Komputer Pribadi
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 masih rendah karena harga computer belum sepenuhnya terjangkau secara ekonomi namun sedikit mengalami peningkatan karena adanya kebutuhan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan didalam rumah tangga dan adanya tuntutan penggunaan komputer dalam proses belajar mengajar. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.181.
**Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon | % | 56,21 | 58,50 | 60,30 | 63,85 | 65,07 |

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2020

2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Perekonomian rakyat yang ditandai oleh indikasi pertumbuhan koperasi, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memberdayakan koperasi relatif optimal. Pada Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditunjukkan dengan jumlah koperasi yang berdaya (aktif) semakin banyak, yaitu sebesar 65,3% di tahun 2019 yang mana dari tahun tahun sebelumnya terus bertambah, tahun 2016 jumlah Koperasi Aktif sebesar 58,64%, kemudian menjadi 59,28% di tahun 2017, pada tahun 2018 nilai peningkatan Koperasi Aktif menjadi 70,43%, Peningkatan ini penting untuk dipertahankan mengingat koperasi dan sektor ekonomi mikro lainnya menjadi "soko guru" perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan pembinaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM juga di arahkan untuk memperkuat, meningkatkan kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Berikut data persentase koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II.182.
Persentase Koperasi Aktif
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Koperasi | Unit | 8.685 | 8.841 | 8.845 | 8.453 | 8.261 |
| Jumlah Koperasi Aktif | Unit | 5.427 | 5.185 | 5.226 | 5.565 | 5.395 |
| Persentase Koperasi Aktif | % | 62,48 | 58,64 | 59,08 | 65,83 | 65,31 |

Sumber : Data Primer Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Upaya – upaya pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan koperasi terus dilakukan, Dalam lima tahun ke depan yaitu 2018-2023, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM dimana pada tataran makro, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran meso mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar dan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mikro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran. Selengkapnya data jumlah koperasi per kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tabel berikut.

**Tabel II.183.
Data Jumlah Koperasi per Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
Tahun 2015 - 2019**

| No. Kab/Kota | | Jumlah Koperasi | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif |
| 1 | Selayar | 141 | 47 | 143 | 49 | 147 | 44 | 130 | 26 | 243 | 44 |
| 2 | Bulukumba | 222 | 80 | 222 | 80 | 229 | 79 | 199 | 86 | 196 | 77 |
| 3 | Bantaeng | 123 | 96 | 126 | 95 | 131 | 94 | 139 | 47 | 140 | 45 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

| No. | Kab/Kota | Jumlah Koperasi | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif | Aktif | Tidak Aktif |
| 4 | Jeneponto | 121 | 110 | 121 | 111 | 154 | 90 | 154 | 90 | 157 | 64 |
| 5 | Takalar | 234 | 116 | 243 | 113 | 249 | 109 | 316 | 42 | 246 | 73 |
| 6 | Gowa | 424 | 117 | 453 | 117 | 455 | 115 | 462 | 115 | 456 | 87 |
| 7 | Sinjai | 110 | 25 | 115 | 25 | 114 | 26 | 111 | 19 | 87 | 45 |
| 8 | Maros | 229 | 118 | 236 | 117 | 237 | 116 | 353 | 5 | 243 | 104 |
| 9 | Pangkep | 253 | 69 | 262 | 67 | 264 | 66 | 267 | 46 | 245 | 46 |
| 10 | Barru | 96 | 22 | 97 | 22 | 97 | 22 | 104 | 5 | 62 | 39 |
| 11 | Bone | 183 | 754 | 184 | 754 | 184 | 754 | 466 | 21 | 153 | 227 |
| 12 | Soppeng | 192 | 7 | 181 | 22 | 182 | 21 | 163 | 45 | 416 | 119 |
| 13 | Wajo | 270 | 182 | 281 | 181 | 282 | 160 | 430 | 1 | 285 | 159 |
| 14 | Sidrap | 178 | 182 | 178 | 182 | 184 | 182 | 185 | 183 | 194 | 220 |
| 15 | Pinrang | 249 | 97 | 259 | 96 | 270 | 96 | 370 | 3 | 275 | 96 |
| 16 | Enrekang | 83 | 101 | 85 | 104 | 88 | 117 | 89 | 116 | 63 | 146 |
| 17 | Luwu | 206 | 216 | 187 | 237 | 187 | 237 | 133 | 250 | 207 | 216 |
| 18 | Tana Toraja | 100 | 62 | 118 | 45 | 116 | 42 | 149 | 24 | 116 | 57 |
| 19 | Luwu Utara | 149 | 84 | 173 | 85 | 154 | 105 | 178 | 70 | 151 | 109 |
| 20 | Luwu Timur | 185 | 77 | 159 | 113 | 144 | 92 | 117 | 121 | 122 | 116 |
| 21 | Toraja Utara | 53 | 63 | 70 | 60 | 70 | 60 | 65 | 65 | 72 | 57 |
| 22 | Makassar | 1.163 | 364 | 808 | 720 | 808 | 720 | 720 | 792 | 796 | 318 |
| 23 | Pare – Pare | 111 | 96 | 123 | 92 | 123 | 92 | 140 | 75 | 123 | 97 |
| 24 | Palopo | 192 | 90 | 204 | 82 | 200 | 86 | 200 | 86 | 75 | 215 |
| 25 | Provinsi | 160 | 83 | 157 | 87 | 157 | 94 | 109 | 69 | 231 | 68 |
| Jumlah | | 5.427 | 3.258 | 5.185 | 3.656 | 5.226 | 3.619 | 5.767 | 2.422 | 5.395 | 2.866 |
| Total Koperasi | | 8.685 | | 8.841 | | 8.845 | | 8.189 | | 8.261 | |

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap Kesempatan Kerja

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah , ketahanan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini ditopang oleh aktifitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ketika Perekonomian Indonesia diterpa Krisis, pandemi Covid – 19 yang belum bisa diatas dengan baik, mengakibatkan melemahnya perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti beraktifitas, namun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut, Sektor usaha mikro kecil menengah mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari Krisis ekonomi. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.184.
Presentase Usaha Mikro dan Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019**

| Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,52 |
| Jumlah UMKM | Unit | 916.232 | 919.660 | 922.802 | 923.302 | 944.279 |

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 916.232 Unit dimana sekitar 86% adalah Usaha Mikro, pada Triwulan ke III terjadi

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Perlambatan pertumbuhan perekonomian Sulsel terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor dan sektor primer. Pada triwulan IV 2015 dan keseluruhan 2015, ekspor tercatat tumbuh negatif -28,49 persen (yoy) dan -12,04 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi di triwulan dan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan terjadi baik secara volume maupun nilai ekspor, terutama ekspor barang pertanian dan pertambangan, namun disisi lain Laju inflasi Sulsel pada tahun 2015 relatif terkendali dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 4±1 persen. Inflasi Sulsel di akhir 2015 tercatat 4,48 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan III 2015 yang tercatat 8,36 persen (yoy), namun masih lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 3,35 persen (yoy). Secara umum, penurunan inflasi terjadi akibat terkendalinya harga semua kelompok komoditas, meskipun tekanan terhadap harga kelompok bahan makanan masih cukup tinggi. Stabilitas sistem keuangan regional tercermin pada tingginya tingkat investasi pada tatanan UMKM yang terlihat dari tingkat Penyaluran kredit ke sektor UMKM juga terus tumbuh, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tetap terjaga di atas 30 persen.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh perannya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi. Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi UMKM, maka pengembangan UMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro harus lebih mendapat perhatian. Peningkatan kapasitas usaha mikro diharapkan dapat: meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, Memperkuat basis produksi dalam negeri dan partisipasi di pasar ekspor.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah penopang perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi, disamping karakteristik dengan vitality yang baik, mampu bertahan pada masa – masa krisis ekonomi, UMKM juga sangat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan UMKM berpotensi untuk menggunakan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dan pengalamannya, mampu meratakan kondisi perekonomian masyarakat.

2.3.2.11. Penanaman Modal dan Investasi

a. Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah realisasi investor berskala nasional (proyek) dari tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, lonjakan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2019 yakni mencapai 1548 proyek, peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh semakin kondusifnya iklim penanaman modal di Sulawesi Selatan dan juga adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS).

Tabel II.185.
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PDMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Proyek | 192 | 281 | 326 | 911 | 1.548 |

Sumber : DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk urusan Penanaman Modal tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.186.
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Triliun rupiah | 12,10 | 8,30 | 11,48 | 11,55 | 10,21 |

Sumber : DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan

Jumlah realisasi investasi dari tahun 2015 hingga 2019 menampakkan kecendrungan yang fluktuatif, capaian realisasi investasi yang diraih pada tahun 2015 merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir, sempat turun cukup drastis pada tahun 2016 namun kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dan 2018, hal ini disebabkan karena iklim investasi yang semakin membaik pada beberapa tahun terakhir.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah realisasi daya serap tenaga kerja dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami penurunan, pada tahun 2015 adalah sebesar 55 orang/proyek dan terus mengalami penurunan pada kurun waktu 4 tahun terakhir menjadi hanya 8 orang/proyek pada tahun 2019, hal ini disebabkan oleh investasi yang masuk pada kurun waktu lima tahun terakhir mayoritas dari sektor industri yang tidak menggunakan tenaga kerja yang banyak dalam hal ini industri yang masuk kebanyakan yang menggunakan sistem otomasi/mesin, dan juga jumlah proyek-proyek terealisasi cukup banyak namun bernilai investasi yang kecil. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.187.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | Orang/-proyek | 55 | 29 | 16 | 18 | 8 |

Sumber : DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Jumlah realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2015 hingga 2019 juga mengalami fluktuasi yang sangat besar, pada tahun 2015 sempat mengalami kenaikan sebesar 86% dari tahun sebelumnya kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2016 dan tahun 2017, namun capaian positif realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat kembali diraih pada tahun 2018 dan tahun 2019, hal ini disebabkan karena semakin membaiknya iklim penanaman modal melalui pemberian kemudahan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.188.
Nilai Realisasi PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|----------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Realisasi PMDN Tahun Evaluasi | Triliun rupiah | 9,21 | 3,33 | 1,97 | 3,27 | 5,67 |
| Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi (2014 - 2018) | Triliun rupiah | 4,95 | 9,21 | 3,33 | 1,97 | 3,27 |
| Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN | Persen | 86 | -64 | -41 | 66 | 73 |
| Kenaikan/Penurunan nilai Realisasi PMDN | Milyar Rupiah | 4.260 | -5.880 | -1.360 | 1.300 | 2.400 |

Sumber : DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan

2.3.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Wira Usaha Muda

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkenbangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, namun keberadaan dan kiprah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga 2019 berfluktuasi, namun menunjukkan adanya trend peningkatan organisasi pemuda yang aktif. Akan tetapi minat pemuda sebagai wirausaha selama dua tahun terakhir cenderung menurun, sehingga dibutuhkan upaya optimalisasi peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam mengembangkan potensinya sebagai wirausaha muda. Seperti pada tabel berikut.

Grafik II.24.
Percentase Pembinaan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Analisis data capaian Indikator Kinerja Kunci pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa persentase pemuda yang aktif dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami trend peningkatan sebesar 2,36 %. Peningkatan ini didorong oleh adanya forum-forum pemuda yang berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan, peningkatan organisasi pemuda aktif juga didukung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan. Tingkat capaian pada tahun 2017 mengalami trend penurunan sebesar 0,18 %, penurunan ini disebabkan karena kelembagaan yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga belum terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Jika ditinjau dari

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

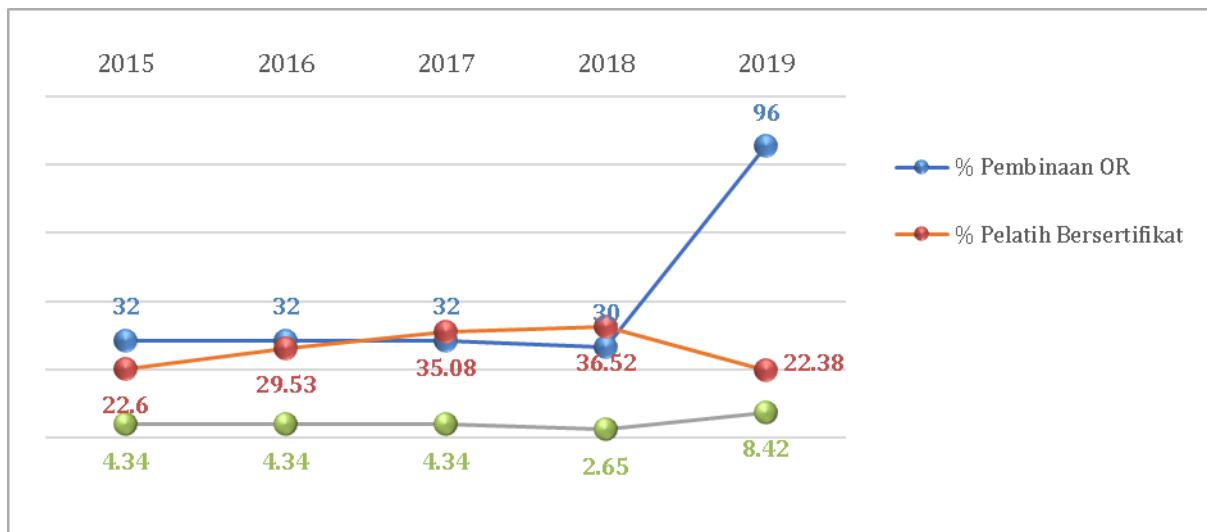
capaian Indikator Kinerja Kunci, angka capaian indikator melampaui sebesar 0,40 % dari target 9,06 % pada RPJMD.

Indikator wirausaha muda pada grafik di atas mengalami situasi yang fluktuatif dari tahun 2015 s.d 2019 dengan jumlah pembinaan paling tinggi pada tahun 2017 sebanyak 25.74%. pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami trend penurunan sebesar 7,61 %, penurunan tingkat capaian ini disebabkan karena minat masyarakat usia pemudasebagai wirausahamuda cenderung menurun karena pengaruh ekonomi global sehingga dibutuhkan upaya optimalisasi peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam mengembangkan potensinya sebagai wirausaha muda. Dalam rangka pengembangan minatpemuda dalam bidang kewirausahaan maka perlu dilakukan pendampingan terhadap wirausaha muda secara berkelanjutan mulai dari fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi kaum pemuda yang masih pemula yang disertai dengan bantuan modal usaha kewirausahaan bagi yang sudah memiliki usaha. Jika ditinjau dari target capaian Indikator Kinerja Kunci, angka capaian indikator melampaui sebesar 4,07 % dari target 14,06 % pada RPJMD.

2. Persentase Pembinaan Olah Raga, Cakupan Pelatih Bersertifikasi, Cakupan Pembinaan Atlet Muda dan Prestasi Olah Raga

Pembinaan olahraga yang menjadi tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan difokuskan pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) sebanyak 16 cabang olahraga, yang kemudian menurun menjadi 14 cabang olahraga pada tahun 2019. Pengurangan cabang olahraga binaan disebabkan kurang maksimalnya prestasi sejak tiga tahun terakhir. Gambaran pembinaan keolahragaan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa keberadaan pelatih yang bersertifikat berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga yang diikuti dengan upaya peningkatan pembinaan sehingga prestasi olahraga di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya trend peningkatan. Seperti pada grafik berikut.

**Grafik II.25.
Cakupan Pembinaan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



Sumber :Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Analisis data capaian Indikator Kinerja Kunci pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa persentase Pembinaan Olahraga dari tahun 2015 sampai 2017 stagnan pada angka 32 persen, pada tahun 2018 mengalami trend penurunan sebesar 2 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan adanya cabang olahraga binaan kurang berprestasi pada even nasional. Pembinaan olahraga difokuskan pada program PPLP dan SKO Sulawesi selatan. Tingkat capaian dari tahun 2019 mengalami

trend peningkatan yang signifikan, hal ini disebakan adanya sinergi dalam pembinaan olahraga yang dilakukan antara pemerintah dan pengurus cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka pengembangan dan pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan dengan pencapaian pada peningkatan prestasi olahraga.

Indikator kinerja persentase pelatih olahraga bersertifikasi dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami trend peningkatan sebesar 13,93 persen, pada tahun 2019 menagalami penurunan sebanyak 288 orang. Kecenderungan penurunan jumlah pelatih bersertifikat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan anggaran yang difokuskan keikutsertaan pada even-even nasional serta persyaratan lisensi sertifikasi yang tidak dapat dipenuhi dan pelaporan kabupaten/kota yang *under-reported*. Keterbatasan tersebut mempengaruhi kuantitas dan kualitas pelatih yang bersertifikasi. Jika ditinjau dari target capaian indikator kinerja kunci, angka capaian indikator kurang sebesar 1,08 persen dari target 17,36 persen pada RPJMD pada tahun 2019.

Pembinaan atlet muda difokuskan pada program Pusat Pembinaan dan latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sulawesi Selatan. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator persentase pembinaan atlet muda dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami trend peningkatan sebesar 6,32 persen. Peningkatan capaian target indikator ini disebabkan minat atlet muda pada cabang olahraga sepak bola meningkat. Jika ditinjau dari target capaian indikator kinerja kunci, angka capaian indikator melampaui sebesar 4,07 persen dari target 14,06 persen pada RPJMD pada tahun 2019. Pembinaan atlet muda masih berpusat pada provinsi yaitu pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) serta belum terbentuknya pembinaan atlet prestasi di daerah (PPLPD) di kab/kota.

3. Jumlah Atlet Berprestasi (Prestasi Olahraga dan Atlet Berprestasi).

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu pembinaan olahraga seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikancanah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.189.
Jumlah Prestasi Olahraga dan Atlet Berprestasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Prestasi Olahraga | Medali | 17 | 14 | 16 | 81 | 317 |
| Jumlah Atlet Berprestasi | Atlet | 46 | 76 | 81 | 81 | 246 |

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat capaian atlet berprestasi dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami trend peningkatan sebesar 71 persen, capaian Indikator Kinerja Kunci atlet berprestasi yang menunjukkan trend meningkat dipengaruhi oleh kedisiplinan, intensitas latihan dan uji coba atlet yang terlaksana dengan baik. Tingkat capaian pada tahun 2019 meningkat signifikan sebesar 106 persen disebabkan karena binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya pada atlet PPLP dan SKO tetapi juga membina atlet pada program Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah (PPOD). Jika ditinjau dari target capaian Indikator Kinerja Kunci, angka capaian indikator atlet berprestasi melampaui 1 orang dari target 245 orang pada RPJMD.

Indikator kinerja kunci prestasi olahraga pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian dari tahun 2015 sampai 2017 menagalami trend peningkatan sebesar 15,67 %. Capaian dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan signifikan sebesar 199 %, peningkatan capaian target pada tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan dipengaruhi oleh kegiatan Pra PON menjadi bagian dari tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Penganggaran pelaksanaan Pra PON dikelola oleh Dispora sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan olahraga prestasi berbasis kinerja dan langsung kepada kelompok sasaran yaitu Pengurus cabor, Pelatih dan atlet. Adapun yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator pembinaan olahraga adalah masih kurangnya peralatan olahraga yang akan digunakan oleh atlet dalam berlatih untuk persiapan megikuti even-event di tingkat nasional antara lain pada even pelaksanaan PON, POPNAS, POPWIL dan Kejurnas sehingga dapat mempengaruhi perolehan medali yang telah di targetkan dalam setiap even. Jika ditinjau dari target capaian Indikator Kinerja Kunci, angka capaian indikator prestasi olahraga melampaui 72 medali dari target 245 medali pada target RPJMD.

2.3.2.13. Statistik

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas

Hal ini didukung oleh Dinas Komunikasi Informatika Stsatistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan sistem data yang memenuhi standar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan. Dinas Komunikasi Informatika Stsatistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wali data yang yang berfungsi sebagai pusat data. Seluruh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota menjadi produsen data wajib memberikan data kepada Diskominfo sebagai wali data. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.190.
Data dan Statistik yang Terintegritas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi | Jumlah | Ada (24) |

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik 2019

Pemprov Sulsel saat ini telah mengembangkan aplikasi yang disebut One Data berbasis digital yang terintegrasi dengan aplikasi SIPD, SIMDASI dan aplikasi data yang lain sehingga sistem ini akan digunakan menuju sistem satu data yang mendorong kinerja optimal khususnya penyajian data statistik sektoral. Hal ini

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

nantinya digunakan untuk berbagai kepentingan terutama percepatan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Buku "Provinsi Dalam Angka"

Indikator ini tercapai karena buku Provinsi Dalam angka merupakan publikasi yang cukup penting karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Provinsi Dalam Angka berisi sekitar 80 persen dari Perangkat Daerah ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ketersediaan data tergantung dari Perangkat Daerah tersebut hingga masing-masing daerah memiliki keberagaman data sesuai potensi wilayahnya. Ketersediaan buku Provinsi Dalam Angka, seperti pada tabel berikut.

Tabel II.191.
Ketersediaan Buku Provinsi Dalam Angka
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Buku "Provinsi Dalam Angka" | Ada/ tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik 2019

Permasalahan yang sering dialami oleh petugas pada saat pengumpulan hingga penyusunan data untuk publikasi Provinsi Dalam Angka, pejabat atau penanggung jawab yang menangani data di Perangkat Daerah tersebut berganti-ganti hingga menyebabkan data kurang lengkap bahkan tidak tersedia sama sekali dikarenakan petugas sebelumnya tidak memberikan data untuk diarsipkan setelah pindah antar Perangkat Daerah atau dimutasi.

3. Buku PDRB

Hal ini tercapai karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota menjadikan Buku PDRB untuk keperluan perencanaan, evaluasi dan penetuan kebijakan pembangunan daerah. Buku PDRB memegang peranan penting karena perannya sebagai salah satu indicator utama dalam perekonomian. Dengan data pada buku PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk. Ketersediaan buku PDRB, seperti pada tabel berikut.

Tabel II.192.
Buku PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-----------|----------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Buku PDRB | Ada/ tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik 2020

2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

1. Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)

Pariwisata merupakan investasi yang sangat menjanjikan. Hal ini karena investasi yang dilakukan untuk pengembangan wisata biasanya hanya sekali dan dilanjutkan dengan pengelolaan dan peralatan, sedangkan penggunaan atas pemanfaatan bisa berulang-ulang. Hal ini akan lebih maksimal jika didukung oleh

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

obyek yang menarik, kemudahan akses dan promosi yang baik. Potensi dasar yang ada di sektor pariwisata Indonesia sangat besar pengaruhnya terhadap sumber devisa negara. Kunjungan Wisatawan Nusantara atau biasa disebut Wisatawan Domestik adalah wisatawan dalam negeri, bukan wisatawan yang datang dari negara lain. Untuk tahun 2019, dinas kebudayaan dan kepariwisataan mentargetkan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 7.500.000 kunjungan dengan realisasi sebanyak 8.681.275 kunjungan atau 115 persen dari yang ditargetkan. Adapun untuk rata-rata pengeluaran sebesar Rp.750.000,- per hari dengan total belanja wisatawan nusantara per tahunnya mencapai 35,18 Triliun. Seperti pada Tabel berikut.

Tabel II.193.

**Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target Kunjungan | Kunjungan | 5.500.000 | 5.750.000 | 6.000.000 | 6.250.000 | 7.500.000 |
| Realisasi Kunjungan | Kunjungan | 7.128.826 | 8.426.528 | 8.367.748 | 8.393.024 | 8.681.275 |
| Rata-Rata Pengeluaran/Hari | Rupiah | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Belanja/Tahun | Trilyun Rupiah | 26,73 | 31,60 | 31,38 | 31,48 | 35,18 |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Tahun 2019

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2015 dimana tingkat pencapaian atas kunjungan mencapai 7.128.826 kunjungan atau 129% dari yang ditargetkan dan mengalami peningkatan di tahun 2016 dengan jumlah kunjungan sebanyak 8.426.528 kunjungan atau meningkat 18,20% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 58.780 kunjungan atau (-0,70) dari tahun 2016, sehingga realisasi kunjungan wisatawan nusantara di tahun 2017 sebesar 8.367.748 kunjungan. Untuk tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 10.167.715 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Namun untuk 2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan sebesar (-14%) dari tahun 2018, sehingga jumlah kunjungan wisatawan nusantara di tahun 2019 sebanyak 8.681.275 kunjungan.

Disisi lain rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara per hari tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2015 – 2019. Sedangkan untuk belanja kunjungan wisatawan nusantara per tahunnya mengalami peningkatan yang pesat di akhir tahunnya, dimana pada Tahun 2016 sebesar Rp. 26.73,- trilyun dan meningkat sebesar 31,61% di tahun 2019 dengan total belanja sebesar Rp. 35.18,- Trilyun.

Pencapaian target kunjungan wisatawan nusantara setiap tahunnya tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di wilayahnya yang bertujuan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung atau berlibur di Sulawesi Selatan walaupun tidak dapat dipungkiri juga terdapat penurunannya jumlah kunjungan, namun penurunan jumlah wisatawan ini didasari atas pesatnya destinasi-destinasi lain, baik destinasi di dalam dan luar negeri yang tumbuh sebagai pesaing destinasi wisata Sulawesi Selatan.

2. Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)

Sulawesi Selatan merupakan salah satu tujuan wisatawan mancanegara, hal ini dibuktikan dengan angka kunjungan Wisatawan Mancanegara yang setiap tahun mengalami peningkatan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan rata-rata berasal dari Malaysia,

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Singapura, Korea Selatan, China, Jerman, Prancis, Belanda dan Amerika Serikat. Untuk tahun 2019, Dinas kebudayaan dan kepariwisataan merealisasikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 174.817 kunjungan atau mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar (-9,97 persen) pada tahun 2018. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.194.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | Kunjungan | 191.773 | 236.491 | 255.747 | 263.293 | 174.817 |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel, Tahun 2019

Secara umum rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di Sulawesi Selatan meningkat secara fluktuatif. Peningkatan ini dapat dilihat dari pertumbuhan per tahun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari 2015 – 2017, dimana terjadi peningkatan sebesar 23,32% di tahun 2016 dan 8,14% di tahun 2017. Hal ini disebabkan dibukanya berbagai penerbangan langsung (*direct flight*) dari luar negeri langsung ke Sulawesi Selatan (Bandara Sultan Hasanuddin). Selain itu, terjalannya kerjasama bidang pariwisata menjadi salah satu faktor pendorong tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi selatan.

Sedangkan pencapaian peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (-24 persen) dari tahun sebelumnya atau sebanyak 194.178 kunjungan wisatawan. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 juga mengalami penurunan sebesar (-9,97 persen) dari tahun sebelumnya atau hanya sebanyak 174.817 kunjungan wisatawan. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan dalam 2 tahun terakhir ini disebabkan belum maksimalnya pelaksanaan promosi yang memanfaatkan media informasi, media cetak dan elektronik yang berbasis teknologi serta pemanfaatan event yang berskala besar, untuk menarik perhatian pangsa pasar potensial seperti (Rusia, China, dan Korea).

3. Lama kunjungan Wisata

Secara umum lama tinggal wisatawan pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Khusus untuk Sulawesi Selatan, ikon pariwisata budaya telah mulai menggeliat berkat dukungan stake holder pariwisata dan perhatian serius Pemerintah baik Pusat dan Daerah untuk kembali menghidupkan atraksi-attraksi wisata potensial di destinasi Toraja. Dukungan event pariwisata internasional seperti Toraja International Festival yang menghadirkan para pekerja seni dari berbagai negara yang berkolaborasi menggelar pertunjukan seni etnografi, telah menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan mancanegara untuk berkunjung kembali ke Toraja.

Sinkronisasi promosi dan event pariwisata telah mampu meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan. Pemanfaatan promosi *In Flight Magazine*, yang mengiklankan semua event pariwisata daerah di Sulawesi Selatan turut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Destinasi baru yang *diendorse* oleh komunitas seperti

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

komunitas fotografi dan provider telekomunikasi di dunia maya turut berperan membuka pangsa pasar baru bagi para traveler independen dari luar negeri, pergeseran paradigma berwisata dengan pola konvensional yang memanfaatkan moda pergerakan transportasi berubah menjadi pemanfaatan gadget dan aplikasi serta internet dalam menentukan minat traveling wisatawan mancanegara. Selain itu terbukanya akses pasar baru sebagai akibat kebijakan bebas visa juga memberikan ekses positif terhadap pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.195.
Lama Kunjungan Wisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lama kunjungan Wisata | Hari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Lama Kunjungan Wisata yang ditargetkan sebanyak 5 hari. Sedangkan pada Tahun 2018 realisasi lama kunjungan wisata sebanyak 5 hari atau target telah terpenuhi 100%. Pada Tahun 2019 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni target telah tercapai sebesar 100% atau lama kunjungan wisata sebanyak 5 hari.

4. Potensi Pariwisata

Sulawesi Selatan memiliki potensi sebagai titik mula berwisata terutama bagi wisatawan MICE dan business. Makassar adalah Ibu kota provinsi sulsel yang keberadaannya sudah mendunia. Benteng Rotterdam dan Benteng Somba Opu, menjadi saksi Makassar-Gowa adalah bandar internasional untuk komoditas rempah dunia sejak abad-16. Wisata bahari menjadi andalan, namun keelokan pegunungan Sulawesi Selatan juga tak bisa diabaikan, perlu terus dipromosikan dan diperhatikan sehingga bisa mendatangkan pendapatan yang besar bagi daerah. Destinasi Wisata yang telah mendunia dan memiliki potensi dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.196.
Potensi Destinasi Wisata di kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun tahun 2019**

| No. | Kabupaten/Kota | Nama Destinasi Wisata |
|-----|----------------|---|
| 1 | Makassar | a. Benteng Rotterdam |
| | | b. Benteng Sumba Opu |
| | | c. Taman Wisata Perairan Pulau Kapoposang |
| 2. | Selayar | a. Taman laut Takabonerate |
| 3. | Maros | a. Taman Nasional Bantimurung |
| | | b. TWA Kebun Raya Pucak |
| 4. | Gowa | a. TWA Malino |
| 5. | Bulukumba | a. Pantai Tanjung Bira |
| | | b. Pusat Kerajinan Perahu Phinisi (Tana beru) |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/Kota | Nama Destinasi Wisata |
|-----|----------------|--------------------------------|
| 6. | Tanah Toraja | a. Wisata Kete Kesu |
| 7. | Toraja Utara | a. Wisata Londa |
| | | b. Wisata Musium ne' Gandeng |
| | | c. Negeri diatas Awas (Lolai) |
| 8. | Luwu Timur | a. TWA Danau Matano - Mahalona |
| | | b. TWA Danau Towuti |
| 9. | Bone | a. TWA Cani Sidenreng |
| 10. | Soppeng | a. TWA Lejja |
| 11. | Takalar | a. Taman Buru Komara |
| 12. | Jeneponto | a. Taman Buru Bangkala |
| 13. | Wajo - Sidrap | a. TWA Danau tempe |

Sumber : <https://sulselprov.go.id>

Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 10 potensi pilihan untuk pengembangan wisata halal di Indonesia, dari potensi wisata halal ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan sekitar 15 – 30 % dari sektor perhotelan dan restoran, selain itu wisata halal diharapkan dapat menggairahkan sektor perhotelan dan restoran untuk menghadirkan hotel syariah dan restorannya yang dijamin kehalalannya dan ramah muslim. Apabila kedua hal tersebut saling mendukung tentunya akan menguatkan sektor pariwisata di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan keindahan alam, wisata budaya dan kulinernya.

Perkembangan wisata halal di Sulawesi Selatan merupakan tantangan yang perlu didukung dengan regulasi yang harus dihadapi bersama, baik pemerintah, pelaku industry perhotelan/restoran dan masyarakat setempat. Sektor industri perhotelan/restoran masih kurang yang berbasis syariah dengan fasilitas ruang ibadah yang terpisah secara gender, serta kurangnya pemahaman standarisasi halal beserta hukumnya.

Dalam kurun waktu 2019 – 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan sosialisasi wisata halal yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait standarisasi halal serta tata cara/proses sertifikasi hotel dan restoran yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Capaian terkait dengan wisata halal tahun 2020 telah terdapat 5 (lima) hotel yang memiliki dapur bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu 1. Hotel Claro Makassar; 2. Hotel Almadera Makassar; 3. Hotel Aston Makassar; 4. Hotel Pesona Makassar; dan 5. Hotel Dalton Makassar, selain itu terdapat 3 (tiga) hotel yang saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi halal, yaitu 1. Hotel Four Point Makassar; 3. Hotel Swiss Bell Makassar; dan 3. Hotel Grand Asia Makassar.

5. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah sangat erat kaitannya terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang dibelanjakan di daerah tujuan wisata

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

Kegiatan pariwisata sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun masyarakat. PAD sektor Pariwisata yang dimaksud adalah jumlah Aset yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan, adapun asset tersebut antara lain (1) Gedung MULO; (2) Gedung Kesenian Society de Harmonie; (3) Kawasan Monumen Mandala; (4) Kawasan Benteng Somba Opu; dan (5) Museum Provinsi La Galigo. Untuk tahun 2019, jumlah PAD sektor Pariwisata dapat dicapai sebesar Rp.401.800.000,-. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.197.
PAD Sektor Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Tahun (Rupiah) | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| PAD Sektor Pariwisata | 491.991.725 | 383.640.000 | 451.750.000 | 375.900.000 | 401.800.000 |

Sumber :Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel, Tahun 2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami capaian yang berfluktuasi. Jumlah PAD Sektor Pariwisata pada Tahun 2015 sebanyak Rp.491.991.725,- sedangkan di tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar (-22%) dari tahun 2015, sehingga Realisasi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016 sebesar Rp.383.640.000,-, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17,75% atau Rp.68.110.000,- sehingga Realisasi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2017 sebesar Rp.451.750.000,-. untuk tahun 2018 Realisasi PAD Sektor Pariwisata sebesar Rp.375.900.000,- atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (-16,79%) dan meningkat lagi sebesar 6,89% di tahun 2019 dengan pencapaian sebesar Rp.401.800.000,-.

Pencapaian PAD sektor Pariwisata ini tidak lepas dari pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Promosi destinasi wisata dan pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan, namun banyaknya pesaing serta kurang memadainya sarana dan prasarana pada asset di sektor pariwisata menjadi penyebab utama menurunnya jumlah PAD Sektor Pariwisata.

2.3.3.2 Pertanian

2.3.3.2.1 Pertanian Tanaman Pangan

1. Perkembangan Lahan Pertanian Pangan Kab/Kota di Sulawesi Selatan

Perkembangan lahan baku sawah tahun 2015-2019 di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami fluktuasi. Hal ini karena di kabupaten/kota terjadi alih fungsi lahan sawah ke non pertanian seperti pembangunan infrastruktur, perumahan dan pusat-pusat bisnis. Namun disisi lain masih diimbangi dengan program percetakan sawah baru dari pemerintah dan cetak sawah swadaya dari masyarakat. Sejak tahun 2015 – 2019 pemerintah telah melaksanakan cetak sawah baru seluas 19.045 ha di 15 Kabupaten di Sulawesi Selatan.Seperti pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Tabel II.198.
Perkembangan Lahan Pertanian Pangan di Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019**

| No | Kabupaten/ Kota | Luas Sawah (Ha) | | | | | Perkembangan Rata-Rata Pertahun | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ha | (%/Thn) |
| 1 | Selayar | 3,572 | 3,825 | 3,825 | 1,507 | 1,809 | -1,990 | -8.37 |
| 2 | Bulukumba | 22,828 | 22,912 | 22,954 | 22,232 | 24,844 | 57 | 2.29 |
| 3 | Bantaeng | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 10,339 | 6,585 | 1,571 | -1.06 |
| 4 | Jeneponto | 16,853 | 17,303 | 17,666 | 27,709 | 25,996 | 10,428 | 13.86 |
| 5 | Takalar | 16,779 | 16,619 | 16,876 | 18,424 | 17,182 | 1,335 | 0.76 |
| 6 | Gowa | 34,238 | 34,219 | 34,223 | 37,272 | 32,903 | 1,942 | -0.71 |
| 7 | Sinjai | 15,863 | 15,949 | 16,136 | 16,082 | 16,322 | 279 | 0.72 |
| 8 | Maros | 25,997 | 26,122 | 25,952 | 25,978 | 26,205 | 38 | 0.2 |
| 9 | Pangkep | 16,732 | 16,732 | 16,732 | 16,770 | 16,819 | 50 | 0.13 |
| 10 | Baru | 14,818 | 14,818 | 14,666 | 15,939 | 15,703 | 1,062 | 1.54 |
| 11 | Bone | 110,760 | 113,076 | 112,968 | 115,248 | 117,842 | 5,136 | 1.57 |
| 12 | Soppeng | 28,341 | 28,744 | 29,082 | 27,211 | 28,355 | -844 | 0.09 |
| 13 | Wajo | 96,634 | 99,720 | 100,354 | 98,897 | 101,326 | 2,870 | 1.21 |
| 14 | Sidrap | 48,603 | 48,076 | 48,512 | 46,970 | 48,831 | -1,168 | 0.15 |
| 15 | Pinrang | 53,584 | 54,615 | 55,111 | 46,141 | 48,811 | -6,776 | -1.91 |
| 16 | Enrekang | 10,861 | 10,831 | 11,178 | 9,562 | 8,454 | -1,576 | -5.78 |
| 17 | Luwu | 38,430 | 38,930 | 33,234 | 29,577 | 30,655 | -8,583 | -5.17 |
| 18 | Tana Toraja | 10,761 | 10,761 | 10,761 | 14,043 | 14,392 | 3,369 | 8.25 |
| 19 | Luwu Utara | 27,709 | 27,542 | 27,654 | 21,671 | 27,874 | -4,487 | 1.7 |
| 20 | Luwu Timur | 26,170 | 26,487 | 26,737 | 17,931 | 23,394 | -6,873 | -0.08 |
| 21 | Toraja Utara | 15,378 | 15,342 | 15,342 | 16,423 | 16,047 | 951 | 1.13 |
| 22 | Makassar | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,174 | 2,035 | -497 | -5.98 |
| 23 | Pare Pare | 834 | 834 | 834 | 937 | 865 | 85 | 1.18 |
| 24 | Palopo | 2,690 | 2,689 | 2,685 | 1,837 | 1,570 | -920 | -11.58 |
| Sulawesi Selatan | | 648,900 | 656,610 | 653,946 | 641,457 | 654,818 | -4,103 | 0.24 |

Kewenangan publikasi lahan sawah dari BPS berakhir sampai dengan tahun 2017. Sejak 2018, luas baku lahan sawah diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) melalui keputusan menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2: 399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 oktober 2018 tentang luas baku sawah nasional. Berdasarkan data pada table di atas, maka luas baku lahan sawah tahun 2015 - 2017 diterbitkan oleh BPS, sedangkan 2018 - 2019 diterbitkan oleh kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional (Kemeterian ATR-BPN). Berdasarkan data Luas Baku sawah 2015 - 2019, terlihat bahwa rata-rata setiap tahunnya menurun seluas 4.103 Ha atau sekitar 0,24 %. Kondisi penurunan lahan sawah tersebut juga akan mempengaruhi produksi penurunan komoditas strategis padi pada khususnya, dan produksi tanaman pangan pada umumnya sebagai media tanam.

Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan perkembangan Lahan Baku Sawah maka beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat diidentifikasi antara lain untuk faktor pendorong karena adanya regulasi yang dibuat yang terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain Undang-Undang,

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan kemudian adanya program cetak sawah baru yang merupakan program pemerintah untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan ke non pertanian, termasuk cetak sawah swadaya yang dilakukan oleh masyarakat selanjutnya pemanfaatan Lahan Rawa untuk ditingkatkan menjadi lahan pertanian pangan serta adanya program pemerintah untuk meningkatkan Intensitas Pertanian (IP), baik dari segi penyediaan dan perbaikan irigasi, sistem pompanisasi dan sebagainya kemudian yang menjadi faktor penghambat dikarenakan adanya alih fungsi lahan sawah ke non pertanian seperti infrastruktur, perumahan, dan pusat-pusat bisnis kemudian faktor Iklim dan cuaca (banjir atau kekeringan) yang sering mengganggu pertanaman sehingga target produksi tidak tercapai.

2. Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Tanaman Pangan Terhadap PDRB dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Sektor Pertanian di Sulawesi Selatan merupakan komponen PDRB yang memberi kontribusi yang terbesar sehingga di dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional, sektor pertanian selalu mendapat perhatian utama dalam pengalokasian anggaran. seperti pada tabel berikut.

Tabel II.199.

Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Tanaman Pangan Terhadap PDRB dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020) | % | 23,14 | 23,43 | 23,13 | 22,52 | 21,28 |
| Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020) | % | 3,30 | 3,94 | 4,07 | 3,90 | 3,40 |
| Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB (Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020) | % | 7,65 | 7,83 | 7,55 | 7,12 | 6,28 |
| Kontribusi sektor pertanian (hortikultura) terhadap PDRB (Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020) | % | 1,30 | 1,31 | 1,24 | 1,12 | 1,12 |
| Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020) | % | 52,41 | 50,72 | 50,93 | 50,03 | 50,21 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulsel, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Tanaman Pangan Terhadap PDRB dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Provinsi Sulawesi Selatan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berfluktuasi hal tersebut disebabkan beberapa faktor

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

mempengaruhi yakni faktor iklim (banjir dan kekeringan) serta serangan OPT sering menggagalkan tanam dan panen sehingga produksi tidak sesuai dengan target, baik untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kondisi ini tentu akan menurunkan share sektor pertanian terhadap PDRB dan selanjutnya disebabkan karena tidak tersedianya sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung proses produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan kendala tersebut diatas upaya pemerintah provinsi melalui Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk melaksanakan bantuan pemerintah berupa sarana produksi pertanian serta adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan dibidang pertanian akan menstimulasi peningkatan produksi pertanian dan penggunaan mekanisasi pertanian secara massif menghasilkan efisiensi dan efektivitas usaha tani yang mendorong peningkatan kontribusi pertanian.

3. Lahan Pertanian

Luas Lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya lahan sawah menunjukkan angka yang fluktuatif, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan perumbuhan sebesar 2.08% dari tahun 2018, meskipun pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional yang mencapai 5,05%. Persentase luas lahan sawah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap luas lahan sawah nasional dari tahun 2015 hingga 2019 rata-rata sebesar 8,28%, nilai ini cukup besar dibanding 29 Provinsi lainnya di Indonesia, dimana Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lahan sawah terluas setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga dari sisi pertanian Provinsi Sulawesi Selatan masih diharapkan menjadi lumbung pangan khususnya pada wilayah luar Pulau Jawa. Data terkait perbandingan luas lahan sawah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.200.
Luas Lahan Sawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2015-2019**

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Luas Lahan Sawah Sulawesi Selatan | Ha | 628.148 | 649.190 | 646.611 | 641.457 | 654.818 |
| 2. | Luas Lahan Sawah Nasional | Ha | 8.092.907 | 8.187.734 | 8.164.045 | 7.105.145 | 7.463.948 |
| 3. | Persentase Luas Lahan Sawah Sulawesi Selatan Terhadap Luas Lahan Sawah Nasional | % | 7,76 | 7,93 | 7,92 | 9,03 | 8,77 |

Sumber : Statistik Data Lahan 2015 – 2019, Kementerian Pertanian RI, 2020

Luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019, luas lahan pertanian terbesar tercatat pada tahun 2016 seluas 1.245.551 Ha selanjutnya mengalami penurunan ditahun 2017 dan 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 1.241.353 Ha pada tahun 2019. Peningkatan luas lahan pertanian ini belum diikuti dengan peningkatan produksi padi, data menunjukkan bahwa produksi gabah kering giling pada tahun 2018 adalah 5.952.616,45 ton mengalami penurunan sebesar 15,09% pada tahun 2019 menjadi 5.054.166,96, hal ini disebabkan gagal panen yang terjadi akibat bencana banjir pada

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

tahun 2019 pada beberapa kabupaten yang menjadi penyumbang produksi pertanian seperti Bone, Sidrap, Soppeng dan Wajo.

Data luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas lahan sawah, lahan tegal/kebun dan lahan ladang/huma. Penggunaan lahan pertanian terbesar adalah untuk lahan sawah yang rata-rata sebesar 51,58% dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang peningkatan luas lahan sawah untuk pertanian masih cukup besar jika diikuti dengan penyediaan infrastruktur pengairan berupa irigasi yang dapat berfungsi baik untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang produksi pertanian. Data luas lahan pertanian Provinsi Sulawesi selatan tahun 2015 hingga 2019 selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.201.
Luas Lahan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019**

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Luas Lahan Sawah | Ha | 628.148 | 649.190 | 646.611 | 641.457 | 654.818 |
| | a. Luas Lahan Sawah beririgasi | Ha | 383.507 | 390.768 | 388.756 | 280.409 | - |
| | b. Luas Lahan Sawah Tidak Beririgasi | Ha | 244.641 | 258.422 | 257.855 | 361.048 | - |
| 2. | Luas Lahan Tegal/Kebun | Ha | 526.681 | 501.918 | 481.352 | 501.507 | 496.641 |
| 3. | Luas Lahan Ladang/Huma | Ha | 106.717 | 107.759 | 117.588 | 93.221 | 89.894 |
| Total Luas Lahan Pertanian | | Ha | 1.261.546 | 1.258.867 | 1.245.551 | 1.236.185 | 1.241.353 |

Sumber : Statistik Data Lahan 2015 – 2019, kementerian Pertanian RI, 2020

2.3.3.2.2 Peternakan

Kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 1,08 persen menjadi 1,18 persen di tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,83 persen pertahun. Angka ini menunjukkan prestasi besar, mengindikasikan bahwa subsektor peternakan tumbuh lebih cepat dari subsektor ataupun sektor lain, bahkan lebih cepat dari pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. PDRB subsector peternakan diperoleh dari nilai produksi kegiatan pemotongan ternak, pengeluaran (penjualan antar daerah) dan selisih populasi ternak baik pada ternak besar (sapi dan kerbau) maupun unggas (ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras dan itik), serta produksi telur dan susu. Dalam rangka meningkatkan peran PDRB subsektor peternakan telah dilakukan upaya peningkatan produksi peternakan, melalui peningkatan kelahiran ternak, peningkatan pemotongan dan pengeluaran ternak hidup baik sebagai bibit maupun sebagai ternak potong serta upaya melalui peningkatan populasi ternak. Pertumbuhan PDRB juga diperoleh dari peningkatan produksi telur dan susu yang merupakan produk primer dari usaha ternak selain daging yang tergambarkan melalui pemotongan. Upaya lain adalah pembinaan kelembagaan kelompok, penguatan kapasitas dan keterampilan serta permodalan. Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.202.
Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kontribusi Sektor Peternakan thd PDRB | % | 1,18 | 1,11 | 1,10 | 1,16 | 1,18 |
| 2 | Kontirbusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB | % | 31 | 30 | 33 | 31 | 32 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2019

Mengacu pada hal diatas, maka pertumbuhan kontribusi PDRB subsektor peternakan adalah pertumbuhan nyata populasi ternak sapi dan ayam ras pedaging, serta peningkatan pemotongan ayam ras pedaging dalam setahun terakhir. Potensi pertumbuhan PDRB cukup besar mengingat pertumbuhan kebutuhan akan protein hewani yang makin besar, namun demikian sulitnya melakukan upaya pertumbuhan populasi ternak sapi sebagai sumber utama nilai PDRB subsector peternakan. Hal ini berkaitan dengan kesulitan pendanaan kegiatan program peningkatan kelahiran dan program pengendalian penyakit ternak sapi. Tantangan lain pada program peningkatan produksi daging dan telur dari komoditas ternak unggas, menghadapi tantangan pada harga dan pasokan daging ayam dan telur yang tidak stabil.

1. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Sumbangan kelompok peternak terhadap PDRB sub sektor peternakan Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari kelompok peternak yang umumnya merupakan peternak non komersial, antara lain pada ternak besar untuk jenis sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda, sedangkan untuk kelompok ternak kecil antara lain kambing dan babi, untuk ternak unggas yakni ayam buras dan itik. Besaran sumbangan kelompok tani terhadap PDRB subsektor peternakan dihitung dari persen peternak yang tergabung dalam kelompok peternak pada komoditi diatas.

Perkembangan peran kelompok tani dalam kontribusi terhadap PDRB cenderung stagnan pada kisaran 32 persen, disebabkan oleh perkembangan peran sektor komersial usaha peternakan pada komoditi ayam ras pedaging dan petelur yang pesat. Peluang peningkatan peran kelompok tani subseor peternakan terhadap PDRB Sulsel dapat dilakukan melalui upaya peningkatan peran kelompok tani, terutama pada komoditi ternak sapi potong dan ayam buras. Potensi pengembangan kelompok tani sangat besar, harus diakui bahwa terjadi penurunan kegiatan pembinaan kelompok tani dalam 2 tahun terakhir sebagai dampak penurunan anggaran bidang peternakan dan kesehatan hewan. Sebagian peternak yang tergabung dalam kelompok umumnya adalah peternakan rakyat, sangat membutuhkan penguatan modal, keterampilan dan kelembagaan. Penguatan kelembagaan kelompok dalam rangka pembinaan permodalan dan keterampilan dapat dilakukan melalui model korporasi kelompok.

Berdasar hal diatas di temukan bahwa faktor pendukung perkembangan sumbangan kelompok tani peternakan terhadap PDRB adalah tergabungnya lebih 80 persen peternak sapi dalam kelompok tani dan menghasilkan pertumbuhan populasi sebesar 4,5persen dalam setahun terakhir. Faktor penghambat pertumbuhan peran kelompok tani adalah belum tergabungnya sektor usaha komersial dalam kelompok tani. Sektor usaha komersial itu antara lain pada komiditi ayam ras petelur dan ayam ras pedaging yang memberi kontribusi cukup besar pada PDRB sektor peternakan. Seperti pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.203.
Produktivitas Hasil Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Hasil Peternakan | Satuan | Produktivitas Hasil Peternakan | | | | | % |
|------------------|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Daging | Kg | 121,141 | 119,811 | 126,958 | 136,712 | 150,454 | 5,65 |
| Telur | Kg | 133,600 | 143,847 | 151,100 | 170,766 | 171,985 | 6,61 |
| Susu | Kg | 2,727 | 2,752 | 3,173 | 1,888 | 1,918 | -5,66 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2019

Produktivitas ternak dapat diukur dengan kelahiran, pemotongan dan pengeluaran (ekspor), serta produksi daging untuk ternak potong, produksi susu untuk ternak perah dan produksi telur untuk unggas. Produksi daging berasal dari pemotongan ternak sapi, kerbau, ternak kecil dan unggas. Sedangkan produksi telur dari ternak ayam petelur dan itik, serta produksi susu dari sapi perah. Selama 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan produksi daging sebesar 5,65 persen, telur sebesar 6,61 persen, dan susu mengalami penurunan selama tahun 2015-2019. Penimkatan pertumbuhan produksi daging dan telur didukung oleh peningkatan populasi dan peningkatan produksitifitas dari perbaikan system produksi di tingkat petani. Penurunan produksi susu terjadi di tahun 2019 di sebabkan karena sebagian populasi sapi perah di kabupaten Enrekang sdh afkir atau sdh tdk berproduksi. Pembinaan yang konsisten dalam 5 tahun kedepan diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan produksi daging dan telur yang besar, dan melalukan pembinaan produksi susu untuk mengembalikan kejayaan produksi susu kabupaten enrekang. .

Peningkatan produksi ternak dalam 5 tahun terakhir sebesar 5,65 untuk daging, 6,61 untuk telur dan produksi susu menurun 5,65 persen. Peningkatan produksi daging dan telur ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5 persen untuk tahun 2018-2023. Target produksi daging 2019 dalam renstra Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 149.800 ton dicapai 150.454 ton atau terjadi surplus 1.600 ton. Berdasarkan struktur sumber daging, produksi daging sapi mengalami penurunan sebagai dampak dari impor dan tingginya biaya produksi pada tingkat peternak, sementara produksi daging unggas mampu mensubstitusi kebutuhan yang terus meningkat. Produksi daging didukung oleh pemotongan ternak sapi, kerbau dan unggas (ayam pedaging, ayam buras dan ayam petelur serta itik). Data populasi sapi tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.204.
Populasi Sapi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2015-2019

| No | Kabupaten/ Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Selayar | 16,756 | 18,070 | 18,894 | 18,760 | 21,823 |
| 2 | Bulukumba | 68,344 | 70,662 | 73,177 | 75,993 | 76,434 |
| 3 | Bantaeng | 26,027 | 27,782 | 28,809 | 24,870 | 16,654 |
| 4 | Jeneponto | 29,925 | 30,955 | 32,246 | 25,989 | 27,159 |
| 5 | Takalar | 36,374 | 36,025 | 32,336 | 44,345 | 33,744 |
| 6 | Gowa | 111,345 | 107,538 | 109,577 | 106,726 | 114,723 |
| 7 | Sinjai | 97,638 | 101,734 | 105,718 | 85,446 | 114,141 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Kabupaten/ Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 | Bone | 362,819 | 395,308 | 419,819 | 422,059 | 423,770 |
| 9 | Maros | 76,381 | 80,540 | 83,902 | 73,520 | 75,085 |
| 10 | Pangkep | 49,585 | 53,377 | 53,816 | 41,053 | 43,239 |
| 11 | Barru | 68,805 | 70,850 | 71,857 | 62,706 | 61,563 |
| 12 | Soppeng | 41,327 | 46,441 | 49,120 | 33,153 | 34,019 |
| 13 | Wajo | 100,913 | 111,968 | 116,518 | 91,989 | 125,050 |
| 14 | Sidrap | 54,950 | 60,433 | 64,604 | 36,063 | 38,627 |
| 15 | Pinrang | 24,913 | 25,794 | 26,593 | 28,114 | 28,697 |
| 16 | Enrekang | 46,304 | 47,589 | 48,645 | 54,460 | 43,695 |
| 17 | Tana Toraja | 6,714 | 6,961 | 7,006 | 8,066 | 7,179 |
| 18 | Palopo | 3,096 | 3,415 | 3,619 | 3,238 | 3,089 |
| 19 | Luwu | 17,886 | 18,870 | 18,065 | 19,721 | 16,912 |
| 20 | Luwu Utara | 26,456 | 27,963 | 29,361 | 27,652 | 33,292 |
| 21 | Luwu Timur | 14,010 | 15,021 | 15,546 | 17,198 | 22,148 |
| 22 | Makassar | 3,334 | 3,409 | 3,483 | 3,881 | 3,252 |
| 23 | Pare-Pare | 5,090 | 5,538 | 5,814 | 5,014 | 5,410 |
| 24 | Toraja Utara | 450 | 422 | 493 | 178 | 185 |
| Sulawesi Selatan | | 1,289,442 | 1,289,442 | 1,366,665 | 1,419,018 | 1,310,194 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2019

Jumlah pemotongan ternak sapi tahun 2019 terbanyak adalah kota Makassar dengan jumlah 20.603 (RPH) dan 802 (DRPH) sedangkan untuk pemotongan kerbau terbanyak berada pada Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah 4.006, dan jumlah pemotongan kuda terbanyak di kabupaten Jeneponto sebesar 4.118 ekor di RPH dan 412 ekor di luar RPH. Sementara produksi daging unggas tergambar dari pemotongan ayam buras, ayam ras pedaging, ayam petelur dan itik. Sebaran data kabupaten menunjukkan adanya perubahan pemotongan ternak unggas antar kabupaten. Produksi telur mengalami stagnasi selama 2 tahun terakhir, yakni 170.767 ton tahun 2018 ke 171.985 ton tahun 2020. Rendahnya pertumbuhan produksi telur dalam 2 tahun terakhir ini merupakan sebagai imbas dari pertumbuhan pasar domestik yang lambat, dimana pasar utama adalah kota Makassar. Imbas dari turunnya permintaan menyebabkan harga telur turun dibawah biaya produksi, mendorong afkir cepat induk secara besar-besaran.

Populasi ternak sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 1.369.890 ekor mengalami peningkatan dari 1.310.140 tahun 2018. Peningkatan ini menghasilkan pertumbuhan populasi sebesar 4,56 persen, merupakan sumbangan dari peningkatan di Kabupaten Sinjai, Wajo, Luwu Utara dan Luwu Timur. Pada dasarnya setiap tahun terjadi pertumbuhan populasi pada kisaran 5 persen, namun terjadi penurunan populasi sebagai dampak koreksi Survey Antar Sensus terhadap populasi sapi tahun 2018 dari 1.419.018 menjadi 1.310.194 tahun 2018. Keberhasilan pembangunan peternakan pada sector sapi potong mengalami keberhasilan dengan keberhasilan bertumbuh kembali pada tahun 2019. Diharapkan dengan Program Upsus Siwab yang bertujuan mengoptimalkan kelahiran 1 kelahiran pertahun, akan dapat menopang pertumbuhan populasi sapi tahun 2020, dan tahun-tahun berikutnya. Populasi sapi perah juga menurun, menyebabkan penurunan produksi

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

susu dibanding tahun sebelumnya terutama penurunan populasi sapi perah di Kabupaten Enrekang.

2.3.3.2.3 Perkebunan

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami penurunan pada tahun 2019 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi PDRB atas harga yang berlaku hanya mampu mencapai sebesar 3,88 persen, bila dibandingkan pada tahun 2018 dan tahun 2017 dimana pada sektor ini mampu mencapai sebesar 4,26 persen, bahkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dapat mencapai sebesar sebesar 4,45 persen. Adapun yang mempengaruhi terjadinya penuruan capaian disebabkan karena adanya alih fungsi lahan dan komoditi dari komoditas perkebunan ke komoditas lain diluar perkebunan. Selain itu adanya serangan hama dan anomali iklim yang terjadi, sehingga berpengaruh pula pada peningkatan produksi kakao. Untuk kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 mencapai 89,78 persen, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan capaian 90,48 persen, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 90,18 persen, selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar capaian diatas 2 (dua) tahun sebelumnya sebesar 90,90 persen, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan dan hanya mencapai 87,71 persen, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.205.
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB | % | 4,55 | 4,45 | 4,26 | 4,26 | 3,88 |
| Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB | % | 89,78 | 90,48 | 90,18 | 90,90 | 87,71 |

Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB dan kontribusi produksi kelompok tani perkebunan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terlihat persentasenya menurun pada kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB di tahun 2015 4,55 persen menurun hingga 0,67 persen di tahun 2019 sedangkan kontribusi produksi kelompok perkebunan terhadap PDRB terjadi angka fluktuasi di tahun 2015 89,78 meningkat di tahun 2016 kemudian menurun hingga ditahun 2019 hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi yakni meningkatnya alih fungsi lahan, belum optimalnya laboratorium pelayanan uji standar dan mutu bidang pertanian dan bidang perkebunan dan faktor Iklim (banjir dan kekeringan) serta serangan OPT sering menggagalkan tanam dan panen sehingga produksi tidak sesuai dengan target, baik untuk tanaman perkebunan. Kondisi ini tentu akan menurunkan share sektor pertanian terhadap PDRB dan selanjutnya disebabkan karena tidak tersedianya sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung proses produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan kendala tersebut diatas upaya pemerintah provinsi melalui Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk melaksanakan bantuan pemerintah berupa sarana produksi pertanian serta adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan dibidang pertanian akan menstimulasi peningkatan produksi pertanian dan penggunaan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

mekanisasi pertanian secara massif menghasilkan efisiensi dan efektivitas usaha tani yang mendorong peningkatan kontribusi pertanian.

Ssebagian besar kabupaten terjadi trend penurunan produksi kakao hanya 2 kabupaten yang meningkat produksi kakao sejak tahun 2015 – 2019 yakni kabupaten Luwu Utara dan Pangkep, penyebab turunnya produksi kakao dipengaruhi oleh nilai dan produksi komoditi perkebunan dimana menurunnya didasari pada volume produksi yang akibat tanaman yang sudah tua dan rusak sehingga upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan kegiatan peremajaan tanaman,rehabilitasi tanaman pengendalian serangan hama dan penyakit serta mengantispasi akibat anomali iklim. Produksi Kakao per kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.206.
Produksi Kakao Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Produksi Kakao (Ton) | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kep. Selayar | 158 | 165 | 159 | 1,66 | 1,65 |
| 2 | Bulukumba | 4,985 | 5,802 | 4,596 | 4.552 | 4.313 |
| 3 | Bantaeng | 2,849 | 3,047 | 3,088 | 2.896 | 2.880 |
| 4 | Jeneponto | 50 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | Takalar | 26 | 26 | 10 | 8 | 6 |
| 6 | Gowa | 1,342 | 1,458 | 1,350 | 1.472 | 1.541 |
| 7 | Sinjai | 1,646 | 2,495 | 3,023 | 2.479 | 270 |
| 8 | Bone | 17,474 | 18,079 | 12,234 | 10.692 | 8.606 |
| 9 | Maros | 351 | 586 | 586 | 582 | 596 |
| 10 | Pangkep | 51 | 55 | 58 | 58 | 62 |
| 11 | Barru | 485 | 751 | 263 | 265 | 273 |
| 12 | Soppeng | 12,345 | 12,361 | 9,807 | 7.310 | 4.625 |
| 13 | Wajo | 11,290 | 11,180 | 10,904 | 10.700 | 10.500 |
| 14 | Sidrap | 7,133 | 7,527 | 7,607 | 5.891 | 4.948 |
| 15 | Pinrang | 10,935 | 12,281 | 11,067 | 10.556 | 11.067 |
| 16 | Enrekang | 7,019 | 5,000 | 3,289 | 3.289 | 2.124 |
| 17 | Luwu | 27,000 | 28,989 | 24,262 | 24.640 | 23.701 |
| 18 | Tana Toraja | 1,364 | 1,392 | 966 | 1.348 | 1.304 |
| 19 | Luwu Utara | 22,296 | 27,391 | 26,275 | 26.406 | 28.103 |
| 20 | Luwu Timur | 11,908 | 12,250 | 12,862 | 9.975 | 6.055 |
| 21 | Toraja Utara | 812 | 812 | 822 | 813 | 406 |
| 22 | Makassar | - | - | - | - | - |
| 23 | Pare-Pare | - | - | - | - | - |
| 24 | Palopo | - | 1,240 | 828 | 821 | 1.297 |
| Sulawesi Selatan | | 141,519 | 152,921 | 134,089 | 124.952 | 112.874 |

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.3.3.3 Kehutanan

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang penetapan lahan kritis nasional, luas lahan kritis di provinsi Sulawesi Selatan dengan kategori sangat kritis

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

adalah seluas 293.952 Ha dan lahan kritis dengan kategori kritis seluas 155.568 Ha. Penurunan laju kerusakan hutan dan lahan di Sulawesi Selatan selama periode 2015 – 2019 melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 478.430,23 Ha tahun 2015 menjadi 442.738,75 Ha di tahun 2019. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dilakukan bukan hanya menggunakan APBD tapi banyak pula mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan pihak swasta (Dana *Corporate Social Responsibility*). Koordinasi dan sinergi yang baik antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan menjadi faktor yang memberikan dampak positif terhadap capaian peningkatan nilai indeks rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Untuk saat ini penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Sulawesi Selatan saat ini dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai 37,30 persen pada tahun 2019 mencapai 27,61persen atau penurunan lahan kritis dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 9,69 persen. Rata-rata penurunan lahan kritis per tahun mencapai 1,94 persen. Kondisi lahan kritis mencapai 478.430,23 Ha dan pada tahun 2019 mencapai 442.738,75 Ha. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 91.342,06 Ha dengan rata-rata rehabilitasi hutan dan lahan pertahun mencapai 18.268,41 Ha, dimana tahun 2015 dilakukan penanaman seluas 31.917,69 Ha. Tahun 2016 seluas 27.069,93 Ha, tahun 2017 seluas 12.085.98 Ha, tahun 2018 seluas 385,47 Ha dan tahun 2019 seluas 20.508 Ha.

**Tabel II.207.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi | Ha | 178.458,32 | 205.527,32 | 217.613,30 | 101.744,88 | 122.254,06 |
| Luas Total Hutan dan Lahan Kritis | Ha | 478.430,23 | 457.985,01 | 448.856,47 | 439.937,89 | 442.738,75 |
| Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | % | 37,30 | 44,87 | 48,48 | 23,13 | 27,61 |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui keterlibatan multipihak mulai dari Kementerian LHK, Provinsi, Kabupaten, BUMN/BUMS, dan mitra kehutanan. Bentuk keterlibatannya berupa penanaman pada hutan dan lahan kritis serta fasilitasi bibit tanaman hutan ke masyarakat. Namun pada tahun 2017 fasilitasi bibit ini mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah daerah kabupaten, serta adanya penghematan anggaran pada beberapa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana APBN sehingga berdampak pada pengurangan jumlah bibit tanaman hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Kehutanan sejak terbentuk, karena merupakan indikator utama dari Dinas Kehutanan. Sejak tahun 2015 proporsi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengalami pasang surut kegiatan yang disebabkan oleh peralihan kewenangan pengelolaan kawasan hutan dari Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Propinsi setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mulai dari 37,30 persen di tahun 2015 terus meningkat menjadi 44,87persen

di tahun 2016 dan puncaknya menjadi 48,48 persen pada tahun 2017 yang kemudian mengalami penurunan menjadi 23,13 persen di tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 27,61persen pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena peralihan kewenangan pengelolaan kawasan hutan dimana pada masa transisi ditahun 2017 – 2018 kewenangan tersebut terjadi proses pengalihan Prasarana, Pembiayaan, Personil dan Dokumen (P3D) sehingga pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan bidang Kehutanan dihentikan sementara hingga selesainya proses P3D tersebut. Selain itu pada tahun 2019 kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya kegiatan penanaman terkendala oleh lambatnya musim penghujan tiba dan tidak merata di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu pada pertengahan bulan Desember 2019, mengakibatkan kegiatan penanaman sempat tertunda hingga musim penghujan tiba.

2. Kerusakan Kawasan Hutan

Sejak tahun 2015 hingga 2017 kerusakan kawasan hutan berada pada kisaran dibawah 1 persen. Hal ini menunjukkan kinerja perlindungan hutan yang baik. Namun demikian kerusakan hutan masih terjadi setiap tahun disebabkan oleh musim kemarau yang mengakibatkan hutan menjadi rentan terhadap kebakaran. Kejadian kebakaran hutan masih kerap terjadi di setiap tahun. Penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia yang membuka lahan dengan cara membakar. Sedangkan untuk perambahan hutan/tenurial kawasan hutan dengan cara menebang dan mengambil pohon. Kedua kegiatan tersebut menyebabkan bertambahnya angka luas lahan kritis dalam kawasan hutan. Luas kerusakan kawasan hutan selama kurun waktu 2015 – 2017 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 327,85 ha atau sebesar 0,01203 persen tahun 2015 menurun menjadi 25,18 ha atau sebesar 0,0092 persen pada tahun 2017. Namun terlihat terjadi peningkatan setelah dimasukkannya indikator luas areal perambahan/tenurial kawasan hutan dan luas lahan kritis dalam kawasan hutan menjadi 14,49 persen di tahun 2018 dan 17,43 persen pada tahun 2019. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya perubahan luas kawasan hutan Propinsi Sulawesi Selatan dari 2.725.796 Ha Luas Kawasan Hutan Seluruhnya (Daratan dan Perairan) menjadi 2.145.031 Ha Luas Kawasan Hutan (Daratan) sesuai SK. 434/Menhut-II/2009 dimana telah dikeluarkan Luas Kawasan Perairan yang bukan merupakan kewenangan Propinsi dan setelah berlakunya SK. 362/MenLHK/Setjen/PLA.O/5/ 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan menjadi 2.078.486 Ha Luas Kawasan Hutan (Daratan). Data kerusakan kawasan tersajikan di tabel berikut.

**Tabel II.208.
Kerusakan Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Luas Kerusakan Kawasan Hutan | Ha | 327,85 | 49,00 | 25,18 | 310.783,90 | 362.264,23 |
| Luas Kawasan Hutan | Ha | 2.725.796 | 2.725.796 | 2.725,796 | 2.145.031 | 2.078.486 |
| Kerusakan Kawasan Hutan | % | 0,01203 | 0,00180 | 0,0092 | 14,49 | 17,43 |

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Dari tabel terlihat bahwa kerusakan Kawasan hutan pada tahun 2015 mencapai 0,01203 persen dan pada tahun 2019 mencapai 17,43 persen atau rata-rata penurunan per tahun sebesar 9,28 persen kejadian kebakaran hutan pada tahun 2015 mencapai seluas 327,85 ha, tahun 2016 seluas 49 ha, pada tahun 2017 seluas

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

25,18 ha, tahun 2018 seluas 310.783,90 Ha dan pada tahun 2019 mencapai 362.264,23 Ha. Kerusakan kawasan hutan selama ini dihitung dengan menggunakan indikator degradasi hutan akibat kebakaran hutan. Tingginya angka kerusakan hutan di tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi setelah angka luas lahan kritis dalam kawasan hutan dan angka perambahan hutan/tenurial kawasan hutan ditambahkan pada indikator kerusakan kawasan hutan selain indikator kejadian kebakaran dalam kawasan hutan yang selama ini dijadikan acuan dalam menilai kerusakan kawasan hutan. Selain itu juga oleh perubahan luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan setelah berlakunya SK.362/MenLHK/Setjen/PLA.O/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan. Upaya pengendalian kebakaran hutan masih terus dilakukan diantaranya pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api), pemadaman api pada lokasi kebakaran hutan, koordinasi dengan manggala agni (brigade kebakaran hutan UPT KLHK). Perilaku masyarakat dalam membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar lahan atau membuang puntung rokok pada saat memasuki hutan kerap memicu kejadian kebakaran hutan.

Pelaksanaan pengawasan perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan terkendala dengan masih kurangnya tenaga polisi kehutanan biaya operasional yang besar, tidak adanya tenaga PPNS serta minimnya sarana transportasi yang digunakan untuk menjangkau lokasi pengawasan dan kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian kejadian kebakaran hutan masih dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan koordinasi antara pihak Dinas Kehutanan dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam serta bantuan masyarakat setempat. Upaya penurunan laju luas kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Selatan terus dilakukan hingga saat ini dengan terus melakukan sinergi antara pemerintah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pelibatan masyarakat utamanya yang bermukim disekitar hutan mengingat hutan merupakan salah satu sumberdaya pembangunan Sulawesi Selatan.

3. Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 rasio luas Kawasan lindungan terhadap total luas Kawasan hutan sebesar 76,45 persen. Rasio ini merupakan luas kawasan hutan lindung dan kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) seluas 2.083.950 Ha. Kawasan hutan ini merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan tersebut berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Kemenhut-II/2009. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan dihitung dengan membagi luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.209.

**Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

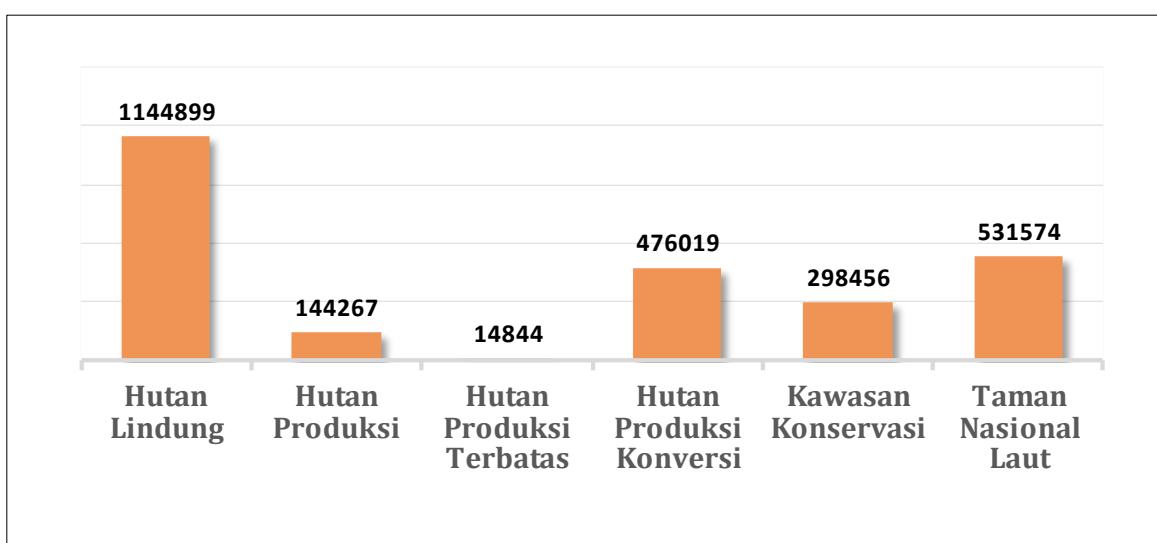
| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Luas Kawasan Lindung | Ha | 2.083.950 | 2.083.950 | 2.083.950 | 2.083.950 | 1.974.929 |
| Total Luas Kawasan Hutan | Ha | 2.725.796 | 2.725.796 | 2.725.796 | 2.725.796 | 2.610.060 |
| Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keaneka- ragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | Luas Kawasan Lindung : Luas Kawasan Hutan | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 75,67 |

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Kawasan hutan di Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.145.031 ha (daratan) dan 580.765 ha (perairan) dengan luas total 2.725.796 ha atau 59,56 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.576.453 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan lindung seluas 1.232.683 ha, hutan produksi terbatas seluas 494.846 ha, hutan produksi seluas 124.024 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.976 ha, hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam seluas 851.267 ha. Pada tahun 2019 terjadi perubahan rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan menjadi sebesar 75,67% berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 91.337 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha. Dengan demikian luas kawasan hutan menjadi 2.610.060 Ha terdiri dari luas kawasan hutan lindung seluas 1.144.899 Ha, luas hutan produksi seluas 144.267 Ha, luas hutan produksi terbatas seluas 476.019 Ha, luas hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.844 Ha, luas kawasan konservasi seluas 830.030 Ha. Karena luas kawasan hutan dan luas kawasan lindung ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan, maka rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan adalah tetap selama keputusan penetapan kawasan hutan tidak berubah. Namun demikian pada kenyataannya masih terdapat banyak lokasi kawasan yang masih mendapat klaim kepemilikan oleh masyarakat sehingga terjadi konflik kepemilikan kawasan hutan. Tergambar pada grafik berikut.

Grafik II.26.
Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019



Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2019 (Data Diolah)

4. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan

Peruntukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2018 adalah berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Kemenhut-II/2009, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.145.031 ha (daratan) dan 580.765 ha (perairan) dengan luas total 2.725.796 ha atau 59,56 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.576.453 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan lindung seluas 1.232.683 ha, hutan produksi terbatas seluas 494.846 ha, hutan produksi seluas 124.024 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.976 ha, hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam seluas 851.267 ha. Namun pada

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

tahun 2019 bersamaan dengan review RTRW Provinsi Sulawesi Selatan terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 91.337 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha. Dengan demikian luas kawasan hutan menjadi 2.610.060 Ha terdiri dari luas kawasan hutan lindung seluas 1.144.899 Ha, luas hutan produksi seluas 144.267 Ha, luas hutan produksi terbatas seluas 476.019 Ha, luas hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.844 Ha, luas kawasan konservasi seluas 830.030 Ha. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II.210.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

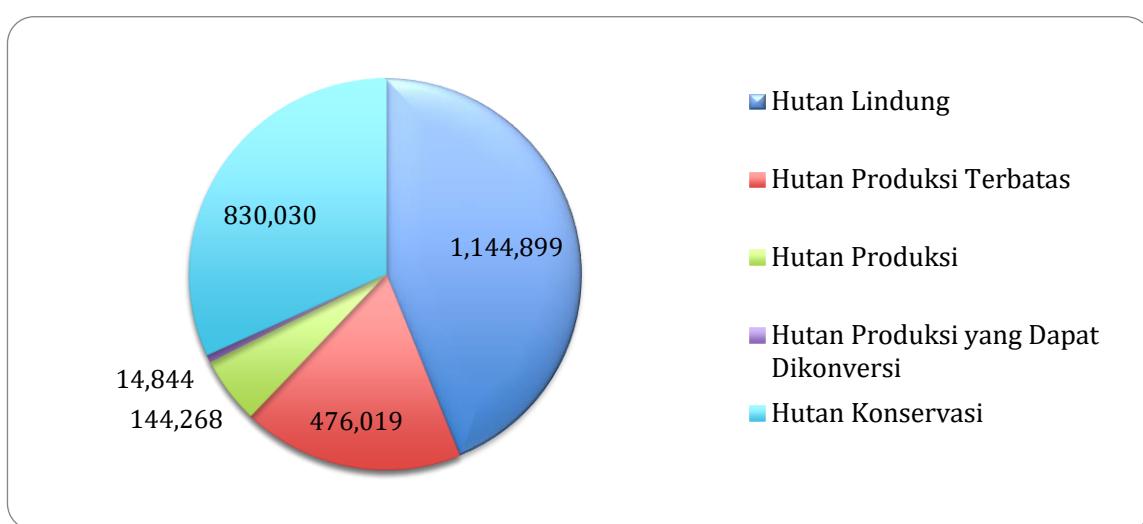
| Peruntukan Kawasan Hutan | Luas Berdasarkan SK. No. 434 Tahun 2009 (Ha) | Luas Berdasarkan SK Nomor 362 Tahun 2019 (Ha) | Bertambah/Berkurang (Ha) | Luas Kawasan Hutan 2019 (%) |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Hutan Lindung | 1,232,683 | 1,144,899 | 87.784 | 43,86 |
| Hutan Produksi Terbatas | 494,846 | 476,019 | 18.827 | 18,24 |
| Hutan Produksi | 124,024 | 144,268 | 20.244 | 5,53 |
| Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi | 22,976 | 14,844 | 8.132 | 0,57 |
| Hutan Konservasi | 851,267 | 830,030 | 21.237 | 31,8 |
| Total | 2,725,796 | 2,610,060 | 115.736 | 100 |

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Dari tabel terlihat perubahan peruntukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan dari total luas 2.725.796 Ha berdasarkan SK. 434/Menhut-II/2009 berubah menjadi 2.610.060 Ha berdasarkan SK. 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 atau berkurang 115.736 Ha dengan rincian Kawasan Hutan Lindung dari sebelumnya 1.232.683 Ha menjadi 1.144.899 Ha (43,86 persen) atau berkurang sebanyak 87.784 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas dari sebelumnya 494.846 Ha menjadi 476.019 Ha (18,24 persen) atau berkurang sebanyak 18.827 Ha, Kawasan Hutan Produksi dari sebelumnya 124.024 Ha menjadi 144.268 Ha (5,53 persen) atau berkurang 20.244 Ha, Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dari sebelumnya 22.976 Ha menjadi 14.844 Ha (0,57 persen) atau berkurang sebanyak 8.132 Ha serta Kawasan Hutan Konservasi dari sebelumnya 851.267 Ha menjadi 830.030 Ha (31,8 persen) atau berkurang 21.237 Ha.

Khusus untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi ini saat ini bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi tetapi telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Grafik II.27.
**Persentase Perubahan Luas Areal Kawasan Hutan Sesuai Peruntukan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020**



Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2020

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Pertambangan Tanpa Izin, Rasio Ketersediaan Daya Listrik dan Luas Wilayah Pemataan

Persentase Rumah Tangga pengguna listrik adalah perbandingan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Pada Tahun 2019, Persentase Rumah Tangga pengguna listrik mencapai 97,80 persen, dimana persentase tersebut mencakup wilayah perkotaan sebesar 100 persen dan wilayah pedesaan sebesar 96,06 persen. Realisasi tersebut melampaui dari target sebesar 88,75 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh penambahan total jumlah unit pembangkit sebanyak 248 unit dengan kapasitas total 59.790 kW dan pembangkit dari swasta atau sewa sebanyak 13 unit dengan kapasitas total 67.000 kW. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun 2018 dimana pada tahun tersebut, Persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 95,53 persen mencakup wilayah perkotaan sebesar 100 persen dan Wilayah pedesaan sebesar 92,12 persen. Realisasi tersebut melampaui dari target sebesar 95.25 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh penambahan total jumlah unit pembangkit sebanyak 359 Unit dengan kapasitas total 49.979 kW dan Pembangkit dari swasta atau sewa sebanyak 122 unit dengan kapasitas 92.000 kW.

Tabel II.211.

**Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Persentase Pertambangan Tanpa Izin dan Luas Wilayah Pemataan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Jenis | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase rumah tangga pengguna listrik | % | 88,30 | 90,78 | 93,19 | 95,53 | 97,80 |
| Rasio ketersediaan daya listrik | % | 95 | 82 | 104 | 97 | 98 |
| Persentase pertambangan tanpa ijin | % | 35,69 | 40,01 | 14,22 | 11,33 | 15,57 |
| Luas Wilayah Pemataan | Ha | 15.672 | 9.244 | 6.500 | 4.558 | 9.200 |

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

Rumah Tangga Pengguna Listrik di Sulawesi Selatan selama 5 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah Rumah Tangga

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

tiap tahun. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik tahun 2015 sebanyak 1.749.462 dari 1.981.311 jumlah seluruh rumah tangga meningkat di tahun 2016 sebanyak 1.824.270 dari 2.009.612 jumlah seluruh rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik sebanyak 1.899.462 dari 2.038.355 jumlah seluruh rumah tangga. dilanjutkan di tahun 2018, Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik sebanyak 1.975.014 dari 2.067.487 jumlah seluruh rumah tangga. sehingga masih ada rumah tangga belum terlistrik sebanyak 92.472 Unit. Pada Tahun 2019 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik sebanyak 2.050.904 dari 2.097.074 jumlah seluruh rumah tangga. sehingga masih ada rumah tangga belum teraliri listrik sebanyak 46.171 Unit.

Peningkatan jumlah rumah tangga pengguna listrik berbanding lurus dengan jumlah seluruh rumah tangga, semakin bertambah jumlah rumah tangga maka akan berdampak pada semakin banyak pula kebutuhan akan listrik. Disisi lain terdapat daerah terpencil, kepulauan dan tidak terjangkau oleh jaringan PLN sehingga teknologi Pemanfaatan Aliran Air dan Pemanfaatan Panas Bumi dapat dimanfaatkan melalui pengembangan energi baru terbarukan.

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio Ketersediaan daya listrik merupakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dimana pada tahun 2019 sebesar 98 persen jauh melampaui dari target sebesar 88,75 persen. Hal tersebut disebabkan Daya listrik terpasang Sulawesi selatan pada tahun tersebut sebesar 7.020 GWh dengan jumlah kebutuhan 7.148 GWh. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun 2018 dimana pada tahun tersebut daya listrik terpasang sebesar 6.155 GWh dengan jumlah kebutuhan 6.361 GWh atau capaian sebesar 97 persen. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan seluruh sistem kelistrikan dapat tersambung pada akhir 2019. Rasio ketersediaan listrik tersajikan pada tabel berikut.

Tabel II.212.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Ketersediaan Daya Listrik | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Daya terpasang Provinsi Sulsel (GWh) | GWh | 4,189 | 4,064 | 5,878 | 6,155 | 7,020 |
| Total Kebutuhan Sulsel (GWh) | GWh | 4,397 | 4,986 | 5,635 | 6,361 | 7,148 |
| Rasio ketersediaan Daya Listrik Sulsel | % | 95% | 82% | 104% | 97% | 98% |

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

Saat ini, PLN baru saja berhasil menyambung sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Penyambungan sistem kelistrikan ini dapat meningkatkan keandalan dan efisiensi listrik. Dengan demikian, surplus daya sebesar 400 mega watt (MW) di Sulawesi Selatan, kini dapat terpasok ke Sistem Sulawesi Tenggara dan sistem kelistrikan di Sultra semakin andal dengan pasokan tambahan dari Sulsel, begitu pun sebaliknya. Interkoneksi dua wilayah di Sulawesi ini seiring dengan rampungnya 1.265 menara jaringan transmisi, dan enam gardu induk, yang membentang dari Wotu, Malili, Lasusua, Kolaka, Unaaha hingga Kendari.

Peningkatan Kapasitas Pembangkit selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat seiring dengan kebutuhan akan listrik semakin meningkat pula. Tahun 2015, Jumlah Kebutuhan Listrik SulSel 4.397 GWh sementara Daya Terpasang sebesar 4.189 GWh. Namun di Tahun 2016, mengalami penurunan capaian Ketersediaan daya listrik sebesar 82 %, terjadi penurunan sebesar 13 % dari tahun 2015, hal tersebut

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

terjadi karena Daya terpasang yang ada di Prov. SulSel mengalami penurunan daya menjadi 4.064 GWh sementara kebutuhan akan listrik semakin meningkat sebesar 4.986 GWh. Selanjutnya di tahun 2017, terjadi surplus daya listrik sebesar 104 %, dimana jumlah daya terpasang sebesar 5.878 GWh dan Jumlah kebutuhan Energi listrik sebesar 5.635 GWh.

Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.

3. Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan. Kegiatan PETI dilaksanakan di 23 Kab/Kota, data tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang semakin menurun luasannya, seperti yang tersajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.213.
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertambangan tanpa izin (PETI) yang ditertibkan | Ha | 95,02 | 95,01 | 83,11 | 59,50 | 41 |

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

4. Rasio Desa Berlistrik

Rasio Desa Berlistrik merupakan perbandingan antara jumlah desa berlistrik dibandingkan dengan jumlah desa secara keseluruhan. Sasaran dari indikator tersebut Masyarakat desa atau daerah yang mempunyai tingkat ratio rendah; Daerah yang belum menikmati jaringan tenaga listrik dan daerah yang mempunyai sumber daya alam untuk dikembangkan menjadi pembangkit tenaga listrik alternatif; Menciptakan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan pendapatan finansial bagi masyarakat desa. Tabel berikut menunjukkan jumlah desa berlistrik di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II.214.
Rasio Desa Berlistrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Desa Berlistrik | Desa | 2.727 | 2.777 | 2.804 | 2.903 | 2.985 |
| Jumlah Desa | Desa | 3.023 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| Rasio Desa Berlistrik | Desa Berlistrik : Jumlah Desa | 90,20 | 91,65 | 92,51 | 95,8 | 98,51 |

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Untuk Tahun 2015, rasio desa berlistrik sebesar 90,20 persen dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebesar 2.727 desa dari 3.023 desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2015 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Leppangeng, Kec. Pituriase, Kab.Sidrap 1 Unit dan PLTS Tersebar di Kab. Luwu Timur 88 Unit dan Kab. Pangkep 32 Unit.

Untuk Tahun 2016, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 91,65% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.777 Desa dari 3.030 Jumlah desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2016 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Ulusalu, Kec.Latimojong, Kab.Luwu 1 Unit kapasitas 30 Kw, di Desa Lembang, Kec. Suppirang, Kab. Pinrang 1 Unit kapasitas 70 Kw, di Desa Taloto, Kec. Seko Kab Luwu Utara 1 Unit kapasitas 40 Kw. Untuk pembangunan PLTS Tersebar dilakukan di Kab. Pinrang sebanyak 52 Unit dan di Kab. Bone sebanyak 100 Unit. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di Pulau Balang Caddi, Kel. Mattiro Bintang, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep dan di Pulau Manara Indah, Desa Mana Indah, Kec. Bontomatene, Kab. Selayar.

Untuk Tahun 2017, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 92,51% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.804 Desa dari 3.031 Jumlah desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2017 adalah Pembangunan PLTMH 10 Unit yang dilaksanakan di (1) Desa Sali-Sali, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, (2) Desa Kanna Kec. Bassesangtempe, Kab. Luwu, (3) Desa Suppirang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (4) Desa Mesakda, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (5) Desa Balepe, Kec. Malimbong Balepe, Kab. Tana Toraja (6) Desa Makkodo, Kec. Simbuang, Kab. Tana Toraja, (7) Desa Ilanbatu Uru Kec. Walenreng Barat, Kab. Luwu (8) Desa Kaladi Darussalam, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu (9) Desa Kanandede Kec. Rangong, Kab. Luwu Utara (10) Desa Beroppa, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di (1) Pulau Sabangko, Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep, (2) Pulau Pasi Kec. Bontoharu ab. Kep Selayar, (3) Pulau Kanalo II Desa Persatuan, Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai.

Rasio desa berlistrik pada tahun 2018 terealisasi sebesar 95,8% dari target sebesar 97% sehingga capaiannya adalah sebesar 99,91% hal tersebut dipengaruhi oleh kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil yang di kembangkan dengan konsep pemanfaatan energi setempat, khususnya energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan kegiatan yang bersifat produktif belum merata di semua lokasi pedesaan di Sulawesi selatan. Penempatan lokasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil tahun 2018 dilaksanakan di (1) Dusun Silei Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, (2) Desa Dampan, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, (3) Desa Kanna Utara, Kecamatan Bassesangtempe, Kabupaten Luwu, (4) Desa Mapetajang, Kecamatan Bassesangtempe, Kabupaten Luwu, (5) Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, (6) Desa Kalaha, Kec. Seko, Kabupaten Luwu Utara, (7) Desa Komba, Kec. Rongkong, Kabupaten Luwu Utara

Untuk Tahun 2019, Rasio Desa berlistrik sebesar 98,51 melampaui dari target sebesar 97 % hal tersebut dipengaruhi oleh pengembangan jaringan listrik PLN yang sudah dapat menjangkau sebagian besar wilayah desa terpencil dan terisolasi. Dari jumlah desa yang ada sebanyak 3.030, masih terdapat 45 Desa yang belum menikmati listrik dan akan dituntaskan untuk sampai pada tahun 2023.

2.3.3.5 Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Realisasi Ekspor Sulawesi Selatan terbagi 3 sektor yaitu : Sektor Pertanian (Nilai ekspor hasil Pertanian Sulawesi Selatan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar US\$ 268.107.922,05 dengan volume sebesar 146.272,71 ton, sedangkan pada bulan Januari sampai Desember 2018, nilai ekspor hasil pertanian sebesar US\$ 260.728.136,34 dengan volume ekspor sebesar 135.564,92 ton. Hal mana terjadi peningkatan nilai ekspor produk pertanian sebesar US\$ 7.379.785,71 atau meningkat 2,83 persen yang diikuti peningkatan volume ekspor sebesar 10.707,79 ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,90 persen. Meningkatnya nilai ekspor sektor pertanian disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor komoditi Biji Kopi sebesar US\$ 2.950.386,69 atau meningkat 29,60 persen, Merica meningkat sebesar US\$ 5.259.027,77 atau meningkat 59,56 persen dan Udang Segar meningkat sebesar US\$ 11.010.253,28 atau meningkat 32,06 persen dimana ketiga komoditi tersebut memberi kontribusi sebesar 26persen terhadap total nilai ekspor produk pertanian.

Komoditi lain yang mengalami peningkatan nilai ekspor adalah Akar Tunjuk langit, batok kelapa, buah manggis, cabe, cangkang kepala sawit, gambir, kacang hijau, kayu manis, Mete Gelondongan, Pisang Kepo, cumi-cumi, ikan laut segar, ikian terbang, kepala udang, kepiting hidup, Kepiting kulit lunak, Kulit ikan, Kulit kerang, kulit udang, lumut laut, sirip ikan hiu, telur ikan terbang, tulang cumi-sumi, getah pinus dan Rumput Siong. Adapun komoditi sektor pertanian yang mengalami penurunan nilai ekspor adalah Gurita yang mengalami penurunan nilai ekspor sebesar US\$ 8.269.221,85 atau menurun 41,30 persen , Rumput laut mengalami penurunan nilai ekspor sebesar US\$ 4.532.715,45 atau menurun sebesar 4,02 persen dan Cengkeh mengalami penurunan nilai ekspor sebesar US\$ 3.136.219,22 atau menurun sebesar 59,58 persen); **Sektor Industri** (nilai ekspor hasil industri Sulawesi Selatan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar US\$ 328.800.561,62 dengan volume sebesar 943.365,46 ton sedangkan bulan Januari sampai dengan Desember 2018, nilai ekspor hasil industri sebesar US\$ 264.016.697,32 dengan volume ekspor sebesar 371.553,32 ton. Hal mana terjadi peningkatan nilai ekspor produk industri sebesar US\$ 64.783.863,3 atau mengalami peningkatan sebesar 24,54 persen, yang diikuti peningkatan volume ekspor sebesar 571.812,14 ton atau meningkat sebesar 153,90 persen.

Meningkatnya nilai ekspor sektor industri disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditi seperti: Rumput laut karagenan meningkat sebesar US\$ 27.305.401,83 atau meningkat 73,91 persen, Ikan Olahan meningkat sebesar US\$ 9.672.536,64 atau meningkat 60,27 persen, Dedak Gandum meningkat sebesar US\$ 1.714.240,81 atau meningkat 9,66 persen dan kakao liquor meningkat sebesar US\$ 4.486.484,13 atau meningkat 16,89 persen. Adapun komoditi sektor industri yang mengalami penurunan nilai ekspor adalah Daging Kepiting menurun sebesar 2.306.438,654 persen atau menurun sebesar 18,48 persen, Kakao Butter menurun sebesar 832.488,6 persen atau menurun sebesar 4,29 persen, Karet menurun sebesar 310,507 persen atau menurun sebesar 17,96 persen dan Marmer menurun sebesar 282.633.81 persen atau menurun sebesar 14,86 persen; **Sektor Tambang** (nilai ekspor komoditi tambang berupa nikel dengan negara tujuan Jepang, China dan India. pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar US\$ 866.244.566,27 dengan volume sebesar 121.910,71 ton. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018 nilai ekspor komoditi nikel sebesar US\$ 828.845.592,92 dengan volume sebesar 80.565,70 ton. Hal mana terjadi peningkatan dari segi nilai sebesar US\$ 37.398.973,35 atau mengalami peningkatan sebesar 4,51 persen yang diikuti peningkatan dari segi volume sebesar 41.345,01 ton atau meningkat sebesar

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

51.32 persen. Nilai ekspor bersih perdagangan di Sulawesi Selatan dalam kurun 5 tahun terakhir, tersajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.215.
Ekspor Bersih Perdagangan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Tahun (US\$) | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ekspor Bersih Perdagangan | 1.359.698.014 | 1.071.936.906 | 1.101.321.267 | 1.353.590.426 | 1.463.153.048 |

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Ekspor Bersih Perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuatif cenderung meningkat. Nilai ekspor bersih tahun 2015 sebesar 1.359.698.014 US\$ menurun menjadi 1.071.936.906 US\$ pada tahun 2016, lalu meningkat menjadi 1.101.321.267 US\$ pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar 1.353.590.426 US\$ dan kembali meningkat menjadi 1.463.153.048 US\$ pada tahun 2019. Jika melihat angka capaian tahun 2018 dibandingkan target RPJMD sebesar 1.174.833.183 US\$ maka sudah melebihi target sebesar 115,21% demikian juga target tahun 2019 sebesar 1.257.498.000 US\$ sudah melampaui target sebesar 116,35 persen.

Tercapainya target (bahkan melampaui) disebabkan beberapa hal yaitu adanya kegiatan direct call langsung ke negara tujuan ekspor ; proses pengurusan SKA yang awalnya berlokasi di Dinas Perdagangan yang notabene jauh dari pelabuhan, namun kini berlokasi dekat dengan Pelabuhan Makassar, sehingga sangat memudahkan para eksportir ; berkembangnya infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer ; makin banyaknya/ beragamnya komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor ; meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (learning organization).

Walaupun pencapaian kinerja sudah sangat memuaskan, tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi faktor menghambat, baik internal (terbatasnya sumber data yang komprehensif dan realtime, hanya terbatas pada sumber data yang diolah sesuai dengan dokumen yang di terbitkan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri, salah satunya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), sehingga penyajian data ekspor secara komprehensif belum dapat direalisasikan. Data ekspor yang tidak menggunakan SKA belum bisa didapatkan secara real time ; keserasian dan sinergitas program antar perangkat pelaksana belum optimal, sehingga pembinaan belum sepenuhnya terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina ; belum berfungsinya secara optimal sistem informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industri, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah) maupun faktor penghambat eksternal (sinergitas perencanaan lintas sektor belum optimal sehingga program kerja untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis dan hambatan-hambatan dari sektor hulu hingga ke hilir belum optimal dan komprehensif ; sinergitas antara program pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum terjalin dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan kurang efisien yang selanjutnya juga berdampak pada pencapaian sasaran yang kurang efektif ; ekspor Sulawesi Selatan masih didominasi oleh komoditi primer (hasil tambang dan pertanian) yang masih tergantung pada kondisi alam dan belum didukung oleh sektor produksi secara optimal ; beberapa produk ekspor Sulawesi

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Selatan masih melalui Pelabuhan/Bandar Udara Surabaya dan Jakarta sehingga tidak efisien waktu dan biaya (*direct call dan direct flight* belum maksimal).

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2015 mencapai 0,92 persen lalu meningkat menjadi 0,94 persen pada tahun 2016, selanjutnya terjadi penurunan menjadi 0,74 persen pada tahun 2017, hasil yang sama dicapai pada tahun 2018 sebesar 0,74 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,89 persen. Jika melihat angka capaian tahun 2018 dibandingkan target RPJMD sebesar 0,74 persen maka sudah mencapai target demikian juga dengan capaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan target sebesar 0,89 persen sudah tercapai. Meskipun target yang direncanakan sudah tercapai, masih ada faktor penghambat sehingga pencapaian target belum maksimal antara lain sumber daya aparatur pengawas masih sangat terbatas, banyaknya produk yang perlu diawasi yang belum berstandar nasional indonesia (SNI), penetapan prosedur pengawasan untuk berbagai jenis produk masih perlu di sempurnakan, masih perlu ditingkatkan kepada pelaku industri, perdagangan untuk mencantumkan label informasi kualitas produknya, pada produk tertentu yang membutuhkan akses laboratorium masih sangat terbatas dan masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan lembaga perlindungan konsumen. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Provinsi Sulawesi Selatan tersajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.216.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | % | 0,92 | 0,94 | 0,74 | 0,74 | 0,89 |

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.3.6 Perindustrian

1. Cakupan bina kelompok pengrajin

Jumlah kelompok pengrajin industri dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah wirausaha (pengrajin) baru industri. Dengan munculnya wirausaha (pengrajin) industri baru kemudian mereka membentuk kelompok pengrajin. Namun yang menjadi kendala adalah pertumbuhan nilai ini tidak serta merta didukung oleh ketersediaan dan terjangkaunya harga bahan baku/ bahan bantu produksi dan ketersediaan peralatan produksi yang harganya juga semakin mahal. Cakupan bina kelompok pengrajin di Provinsi Sulawesi Selatan tersajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.217.
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan bina kelompok pengrajin | Kelompok | 978 | 1.065 | 1.121 | 1.156 | 1.189 |

Sumber : Dinas Perindustrian Prov. Sulsel, Tahun 2019

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

2. Pertumbuhan Industri Pengolahan

Pemerintah Sulawesi Selatan terus menggenjot perkembangan industri pengolahan, khususnya pada sektor pertanian dan kelautan yang merupakan komoditi unggulan daerah, namun masih memerlukan upaya lebih agar kinerja dapat meningkat yang pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 14,55 persen yang menurun dari 14,06 persen pada tahun 2018. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.218.
Pertumbuhan Industri Pengolahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase pertumbuhan industri pengolahan | % | 13,69 | 13,92 | 14,51 | 14,06 | 14,55 |

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

3. Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM

Jumlah perkembangan industri pengolahan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat dimana didominasi oleh pertumbuhan industri kecil dan menengah. Namun pada tahun 2018 industri menengah dan besar banyak yang tutup dan bangkrut diakibatkan permasalahan internal ataupun ekternal perusahaan (manajerial, pegawai dan lain sebagainya), permasalahan pengolahan limbah dan bahan berbahaya dan tidak sanggup bersaing dengan industri menengah dan besar lainnya. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.219.
Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Perkembangan Industri Pengolahan | % | 13,69 | 13,92 | 14,51 | 14,06 | 14,55 |
| Industri Besar | Unit | 338 | 341 | 348 | 73 | 76 |
| Industri Kecil | Unit | 12.166 | 12.370 | 12.894 | 13.247 | 13.708 |
| Industri Menengah | Unit | 670 | 681 | 710 | 202 | 215 |
| Usaha Mikro Kecil Menengah | Unit | 37.967 | 38.917 | 40.561 | Bukan lagi menjadi kewenangan industri. Ini dipindahkan ke dinas koperasi | Bukan lagi menjadi kewenangan industri. Ini dipindahkan ke dinas koperasi |

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.3.3.7 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Tahun 2019 produksi perikanan Sulawesi Selatan mencapai 4,061,326.7ton dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar 3,662,761.4 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 398,565 ton. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan budidaya sebesar 90,2 persen dan perikanan tangkap sebesar 9,8 persen. sehingga berdasarkan data BPS kontribusi PDRB Perikanan tahun 2019 berkontribusi sebesar 8,42 persen dengan nilai PDRB Perikanan berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 24.752,86 Miliar. Selengkapnya pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel II.220.
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Produksi Ikan | Ton | 3.786.837 | 3.941.649 | 4.262.554 | 3.935.493,0 | 4.061.326,7 |
| Target Daerah | Ton | 3.349.135 | 3.517.299 | 4.145.761 | 4.906.672,7 | 4.920.204 |
| Produksi Perikanan | % | 113,1 | 112,1 | 102,8 | 80,2 | 82,5 |

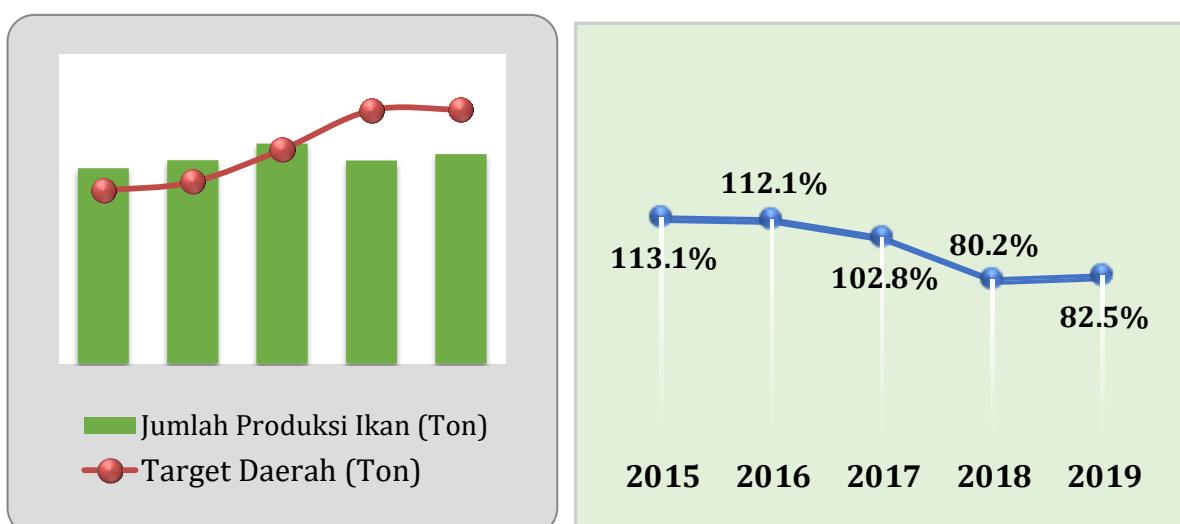
Sumber: sipd.kemendagri.go.id

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif, dimana produksi perikanan pada tahun 2015 sebesar 3.786.837,2 ton meningkat sebesar 3.941.648,8 ton pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.262.553,5 ton, pada tahun 2018 produksi mengalami penurunan sebesar 3,935,493. ton atau turun 7,67 % namun pada tahun 2019 produksi mengalami peningkatan menjadi 4,061,326.7 ton atau naik 3,2 %. Jika ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Persentase produksi perikanan telah melampaui target tahun 2019 sebesar 20,32%. Penurunan realisasi capaian pada tahun 2018 dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada perikanan budidaya akibat pergeseran pemanfaatan lahan budidaya dan pengaruh iklim yang ekstrim (musim kemarau yang cukup panjang) dan belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dimana rata-rata nelayan terkendala pada biaya laut, pencatatan data produksi di pelabuhan dan juga pengaruh iklim.

Perkembangan produksi perikanan dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami trend positif dengan laju pertumbuhan produksi sebesar 8 persen, sedangkan pada tahun 2015 hingga 2018 produksi perikanan mengalami laju pertumbuhan sebesar 4 persen. Jika dibandingkan dengan target RPJMD produksi perikanan sebesar 7.145.295,69 maka realisasi kinerja produksi perikanan baru mencapai 56,83 persen dari target RPJMD. Selengkapnya pada grafik berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

**Grafik II.28.
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Sulawesi Selatan dapat dikatakan cukup tinggi sehingga merupakan produsen perikanan terbesar di Indonesia. Produksi Perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 1,9 persen. Produksi Perikanan pada tahun 2015 hanya sebesar 3.786.837,2 ton meningkat sebesar 4.061.326,7 ton pada tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen dan perikanan tangkap sebesar 6,6 persen. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang Windu dan Udang lainnya, Bandeng, Tuna Tongkol Cakalang dan komoditas ikan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan di kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan maka didukung beberapa program pembangunan pada tahun 2019 yaitu Hilirisasi Perikanan (program prioritas) dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan dengan fokus pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lainnya melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), melakukan penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan. Data produksi perikanan menurut kabupaten/kota tersajikan di tabel berikut.

**Tabel II.221.
Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Luwu | 701,287,4 | 567,687,6 | 651,727,6 | 628,756,1 | 635,285,1 |
| 2 | Luwu Utara | 191,124,3 | 194,811,9 | 201,870,5 | 208,871,4 | 219,078,1 |
| 3 | Wajo | 310,960,1 | 425,112,8 | 522,264,3 | 522,305,3 | 538,019,5 |
| 4 | Bone | 278,341,4 | 317,208,6 | 367,622,7 | 403,644,0 | 425,510,6 |
| 5 | Sinjai | 59,580,5 | 67,682,1 | 79,108,8 | 74,682,4 | 84,255,6 |
| 6 | Bulukumba | 217,342,6 | 216,018,7 | 229,296,7 | 240,921,4 | 235,999,4 |
| 7 | Selayar | 24,885,0 | 24,557,9 | 20,608,6 | 22,085,5 | 28,837,7 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 8 | Bantaeng | 90,743.3 | 88,324.7 | 89,390.7 | 90,082.1 | 91,228.5 |
| 9 | Jeneponto | 157,670.7 | 169,399.6 | 170,361.6 | 216,065.3 | 188,205.3 |
| 10 | Takalar | 967,664.9 | 1,052,824.4 | 1,015,879.9 | 554,114.1 | 488,282.0 |
| 11 | Makassar | 14,196.4 | 14,276.8 | 14,739.2 | 14,885.9 | 21,391.1 |
| 12 | Maros | 28,197.0 | 28,354.1 | 29,791.6 | 48,637.0 | 44,756.1 |
| 13 | Pangkep | 209,811.9 | 232,758.9 | 316,480.4 | 353,130.2 | 491,225.7 |
| 14 | Barru | 22,963.1 | 23,285.8 | 24,148.1 | 25,100.1 | 25,648.9 |
| 15 | Parepare | 4,364.6 | 4,598.6 | 4,665.0 | 4,680.9 | 4,766.6 |
| 16 | Pinrang | 49,010.3 | 53,392.3 | 58,511.4 | 64,795.2 | 66,763.0 |
| 17 | Gowa | 1,295.7 | 1,397.4 | 1,924.9 | 2,033.1 | 2,043.5 |
| 18 | Luwu Timur | 316,648.6 | 325,446.7 | 317,732.4 | 319,713.6 | 325,273.2 |
| 19 | Palopo | 131,098.0 | 122,043.4 | 133,394.9 | 130,608.4 | 133,479.5 |
| 20 | Soppeng | 2,271.9 | 4,618.5 | 4,844.4 | 2,600.8 | 3,120.9 |
| 21 | Sidrap | 2,961.5 | 3,027.8 | 3,999.8 | 3,064.0 | 3,268.6 |
| 22 | Enrekang | 790.2 | 874.2 | 1,078.1 | 1,537.4 | 1,625.8 |
| 23 | Toraja | 247.6 | 433.6 | 434.0 | 490.1 | 573.5 |
| 24 | Toraja Utara | 3,380.2 | 3,512.4 | 2,677.9 | 2,689.0 | 2,688.7 |
| Sulawesi Selatan | | 3,786,837.2 | 3.941.648,8 | 4,262,553.5 | 3,935,493.2 | 4,061,326.7 |

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019.

Dari 24 kabupaten/Kota yang merupakan daerah produsen ikan di Sulawesi Selatan terdapat 5 **Kabupaten penyumbang terbesar** produksi ikan Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep dengan sumber produksi dari hasil budidaya dan hasil tangkapan. Adapun komoditas unggulan yaitu rumput laut, udang, bandeng dan tuna. Kenaikan produksi rumput laut selama 5 tahun di Sulawesi Selatan sebesar 1,1 %. Pada tahun 2019 kabupaten penghasil rumput laut di Sulwesi Selatan antara lain Kabupaten Luwu sebesar 604.420,8 ton, Kabupaten Wajo sebesar 476.055 ton, kabupaten pangkep 427.208 ton, dan Kabupaten Takalar sebesar 466.014,1 ton. Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar 2,6 %. Pada tahun 2019 Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Pinrang sebesar 11.239,1 Ton, Kabupaten Bone sebesar 5.103,4 ton, Kabupaten Barru sebesar 4.211,4 ton, Kabupaten Pangkep sebesar 3.922 ton, Kabupaten Luwu sebesar 3.691,7 ton, kabupaten Maros sebesar 3.381,2 ton, Kabupaten Bulukumba sebesar 3.337,5 ton. Selain itu, Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sektor perikanan budidaya, dimana kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 10,2%. Pada tahun 2019 Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Bone sebesar 78.199,0 Ton, Kabupaten Wajo sebesar 22.144,1,0 ton, Kabupaten Pinrang sebesar 20.236,0 Ton, kabupaten Pangkep sebesar 14.541,0 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 11.710,0 Ton.

Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (effort) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaaan sarana dan prasarana penunjang pengkapan ikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan serta peningkatan mutu hasil tangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi nilai yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna,

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 3,4 persen.

2. Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Hal ini dimungkinkan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang cukup tinggi dalam konsumsi ikan. Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir.

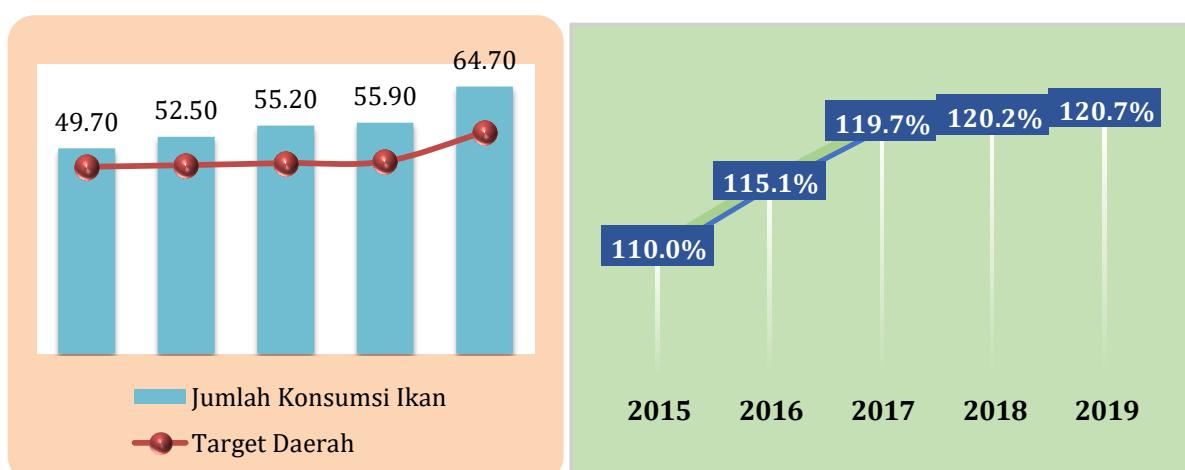
Tabel II.222.
Konsumsi Ikan
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Konsumsi Ikan | Kg | 49,7 | 52,5 | 55,2 | 55,9 | 64,7 |
| Target Daerah | Kg | 45,2 | 45,6 | 46,1 | 46,5 | 57,02 |
| Konsumsi Ikan | % | 110,0 | 115,1 | 119,7 | 120,2 | 120,71 |

Sumber: Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dalam periode 2015-2019 telah terjadi peningkatan konsumsi ikan dengan capaian rata-rata 4,5% pertahun, dimana pada tahun 2014 sebesar 46,8 kg/kap, meningkat menjadi 49,7 kg/kap pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 52,5 kg/kap pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 55,2 kg/kap, tahun 2018 kembali meningkat mencapai 55,9 kg/kap dan di tahun 2019 konsumsi ikan di Sulawesi Selatan mencapai 64,7 kg/kap. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2018 telah mencapai 50,69 kg/kap (Data Susenas) dan KKP menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2019 sebesar 54,49 kg/kap . Terkait dengan target capaian RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 , maka pada tahun 2019 sudah mencapai 100,62 % dari target 64,30 %.

Grafik II.29.
Konsumsi Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Dari grafik diatas memperlihatkan peningkatan konsumsi ikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan persentase capaian peningkatan dari 110 % menjadi

120,7% dengan adanya peningkatan sebesar 10,7 % maka menandakan perubahan pola konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap sumber pangan ikan. Pencapaian konsumsi ikan ini tidak terlepas dari pelaksanaan program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan melalui kegiatan berupa keikutsertaan pada pameran produk perikanan, penyebarluasan informasi melalui promosi dan pameran, lomba masak serba ikan, dan pengembangan sarana dan prasarana hasil perikanan kemudian Penanganan Mutu di pelabuhan perikanan Wilayah 1 dan Wilayah 2, Perlindungan dan fasilitasi akses usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan Verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasaran.

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibandingkan jumlah kelompok nelayan di daerah. Selama 5 tahun terakhir sekitar 465 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

**Tabel II.223.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun | Klp | 89 | 193 | 78 | 50 | 55 |
| Jumlah Kelompok Nelayan | Klp | 295 | 303 | 308 | 311 | 314 |
| Cakupan Bina Kelompok Nelayan | % | 30,17 | 63.7 | 25.32 | 16.08 | 17.52 |

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tahun 2015 kelompok yang mendapatkan bantuan sebanyak 89 kelompok, tahun 2016 yaitu sebanyak 193 kelompok. Kemudian di tahun 2017 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 78 kelompok, tahun 2108 sebanyak 50 kelompok dan tahun 2019 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 55 Kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. Tidak tercapainya target indikator disebabkan karena adanya pembagian urusan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang termuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dibawah kapal 5 GT adalah kewenangan kabupaten/Kota sehingga tahun 2017 – 2019 pembinaan nelayan fokus pada usaha nelayan skala menengah keatas (nelayan yang memiliki kapal 5 – 30 GT).

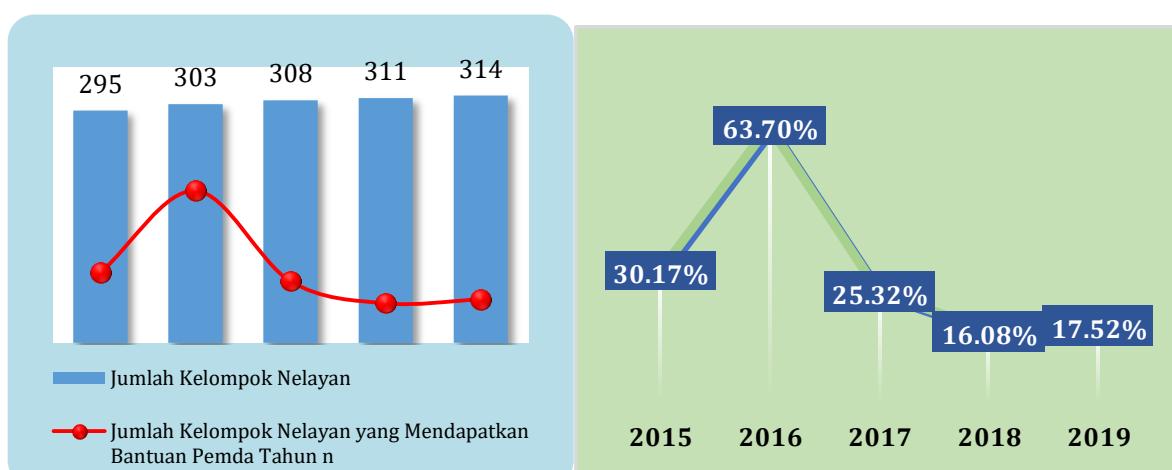
Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam pembinaan kelompok nelayan. Untuk keberhasilan indikator ini maka didukung oleh program Hilirisasi Perikanan dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Peningkatan Kapasitas Nelayan, Koordinasi pengelolaan perikanan tangkap, Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan.

Terjadi peningkatan bantuan pada tahun 2015 – 2016 dimana saat itu bantuan dapat diberikan pada nelayan skala kecil maupun skala menengah ke atas dan telah terjadi penurunan bantuan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,44%. Hal ini memperlihatkan adanya upaya pemerintah provinsi melalui Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan agar dapat memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 44,18 % maka indikator cakupan bina kelompok nelayan telah mencapai 60,83 % sehingga diharapkan target akhir RPJMD akan tercapai. Tergambarkan pada grafik berikut.

Grafik II.30.
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.224.
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

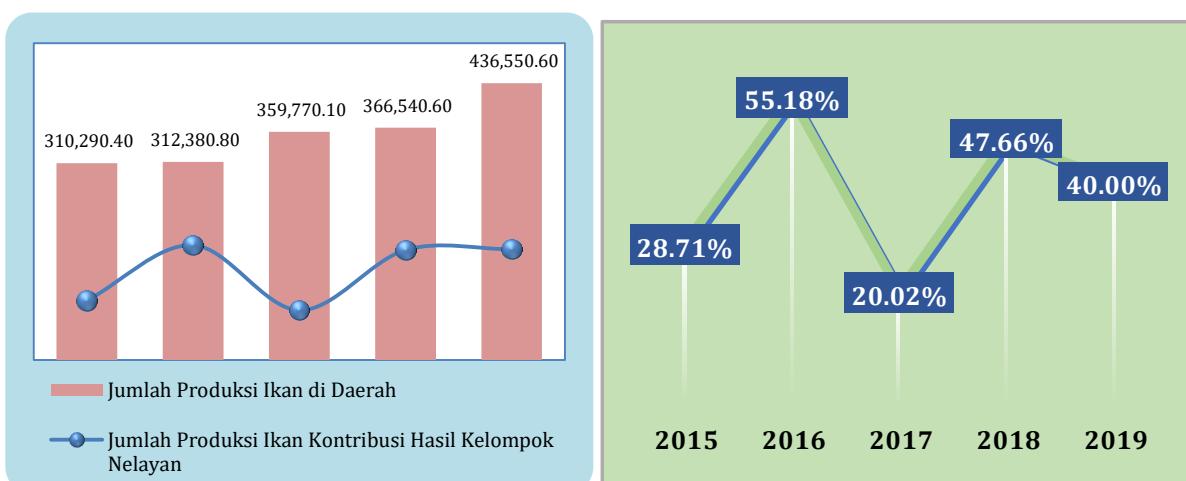
| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan | Ton | 93.614 | 181.055,91 | 78.393,90 | 173.412,00 | 174.620,24 |
| Jumlah Produksi Ikan di Daerah | Ton | 310.290,4 | 312.380,8 | 359.770,1 | 366.540,6 | 436.550,6 |
| Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | % | 28,71 | 55,18 | 20,02 | 47,66 | 40 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dimana produksi ikan kontribusi kelompok nelayan pada tahun 2015 sebesar 93.614 ton, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 181.055.91 ton, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 78.393,90 ton kemudian pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 173.412,00 ton, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 174.620,24 ton. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II.31.
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



Berdasarkan data grafik diatas memperlihatkan kontribusi produksi nelayan berfluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019, peningkatan kontribusi produksi yang cukup besar terjadi di tahun 2016 sebesar 55,18 persen hal ini sesuai dengan indikator cakupan bina nelayan dimana tahun 2016 puncak bantuan pemerintah yang diterima oleh nelayan. Kemudian terjadi perlambatan pertumbuhan produksi kontribusi nelayan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2017 sebesar 20,02 persen dan melanjut tumbuh sampai tahun 2019 sebesar 40 persen. Oleh karena itu perlu diupayakan pembinaan kepada kelompok nelayan secara optimal dengan melakukan koordinasi dengan Penyuluhan perikanan kemudian pendataan produksi kelompok nelayan dilakukan secara efektif dan berkala. Indikator ini didukung oleh program Hilirisasi Perikanan (program prioritas) dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Nelayan, Koordinasi pengelolaan perikanan tangkap dan tata kelola pelabuhan perikanan, Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan. Terkait dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 83.258,94 ton, maka telah dicapai 209,73 % atau telah melampaui target RPJMD.

5. Proporsi Tangkap Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman

Dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

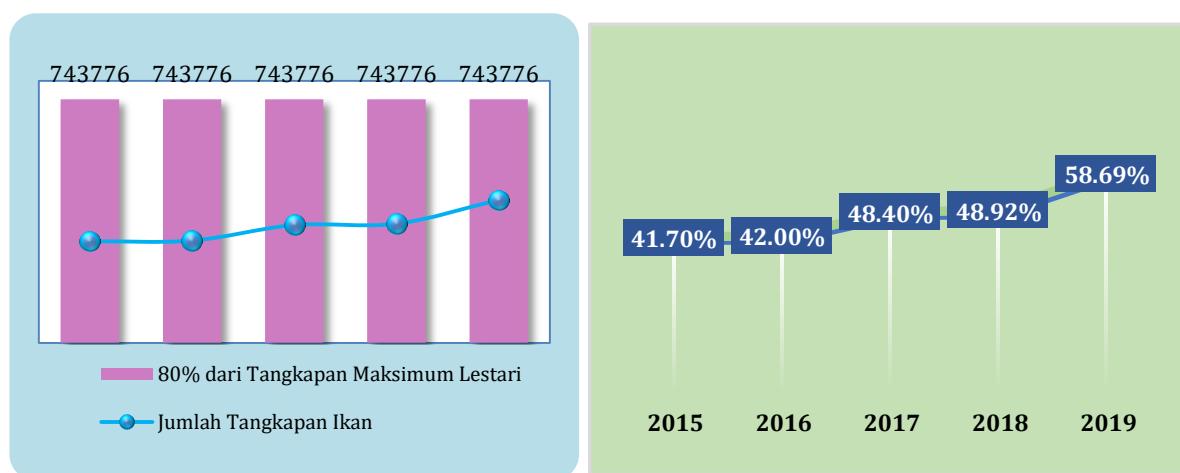
**Tabel II.225.
Proporsi Tangkapan Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Tangkapan Ikan | Ton | 310.290,4 | 312.380,8 | 359.770,1 | 363.853,0 | 436.550,6 |
| 80 persen dari Tangkapan Maksimum Lestari | Ton | 743.776 | 743.776 | 743.776 | 743.776,0 | 743.776,0 |
| Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 41,7 | 42,0 | 48,4 | 48,92 | 58,69 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015, jumlah tangkapan ikan sebesar 310.290,4 ton mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 312.380,8 ton. Kemudian di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 359.770,1 ton, tahun 2018 sebesar 262.853 ton dan mengalami peningkatan sampai tahun 2019 mencapai sebesar 436.550,6 ton. Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk propinsi sebesar 743,8 ribu ton per tahun. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan masih < 100 persen.

**Grafik II.32.
Proporsi Tangkapan Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



Dari grafik diatas menunjukkan proporsi tangkapan ikan sebesar 41,7% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2019 mencapai 58,69%. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan atau tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan. Indikator ini didukung program Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan, dan Pengawasan Terpadu SDKP. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka telah dicapai 97,26 % sehingga diharapkan target RPJMD dapat tercapai.

6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 674.119,88 Ha, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2018-2023 luas kawasan akan ditargetkan seluas 1.038.859,36 Ha dengan penambahan sebesar 97.648,48 Ha. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.226.

**Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

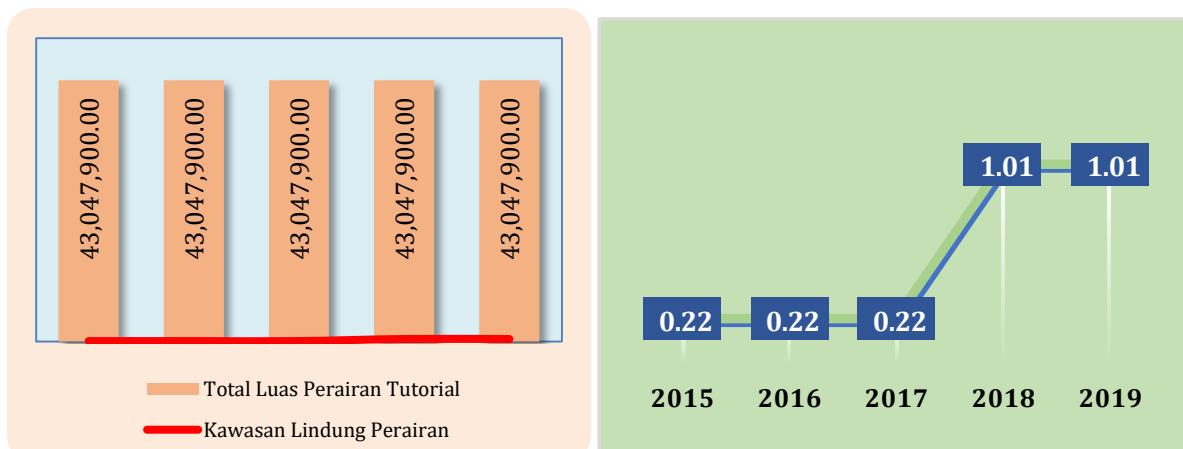
| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kawasan Lindung Perairan | Ha | 92.557,1 | 95.241,0 | 95.752,1 | 433.551,94 | 433.574,94 |
| Total Luas Perairan Tutorial | Km ² | 43.047.900 | 43.047.900 | 43.047.900 | 43.047.900 | 43.047.900 |
| Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial | Kawasan Lindung Perairan : Total Luas Perairan Tutorial | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1,01 | 1,01 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel pada tahun 2015 kawasan konservasi yang dikelola bertambah sebesar 92.557,0 Ha kemudian tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah bertambah 95.241,1 Ha atau seluas 769.360,98 dan tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi bertambah sebesar 95.752,1 Ha sehingga luas kawasan konservasi mencapai 769.871,98, kemudian pada tahun 2018 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 433.551,94 Ha atau mencapai 353,3 % dari target 122.728 Ha dan tahun 2019 meningkat menjadi 433.574,94 Ha.

Grafik II.33.

**Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

Dari grafik menunjukkan rasio kawasan lindung perairan terhadap total luar perairan teritorial pada tahun 2015 sebesar 0,22 terjadi perluasan kawasan lindung pada tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan rasio kasawan lindung sebesar 1,01. Sehingga luas kawasan mencapai pencapaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan meningkat drastis dengan adanya penetapan teluk Bone sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan hal ini sebagai respon akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi dimana masing-masing kabupaten/kota mengelola sendiri kawasan konservasi perairan daerah diwilayahnya, yang kemudian diserahkan ke Provinsi sebagaimana diatur pada UU 23 tahun 2014. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ekosistem dan habitat laut. Indikator ini didukung oleh Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Prov. Sulsel, Penyusunan Regulasi Pengelolaan kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut,pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan. Jika dibandungkan dengan target akhir akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 0,34 maka telah dicapai 297,06 persen atau telah melampaui target akhir RPJMD.

7. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.

Tabel II.227.
Nilai Tukar Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

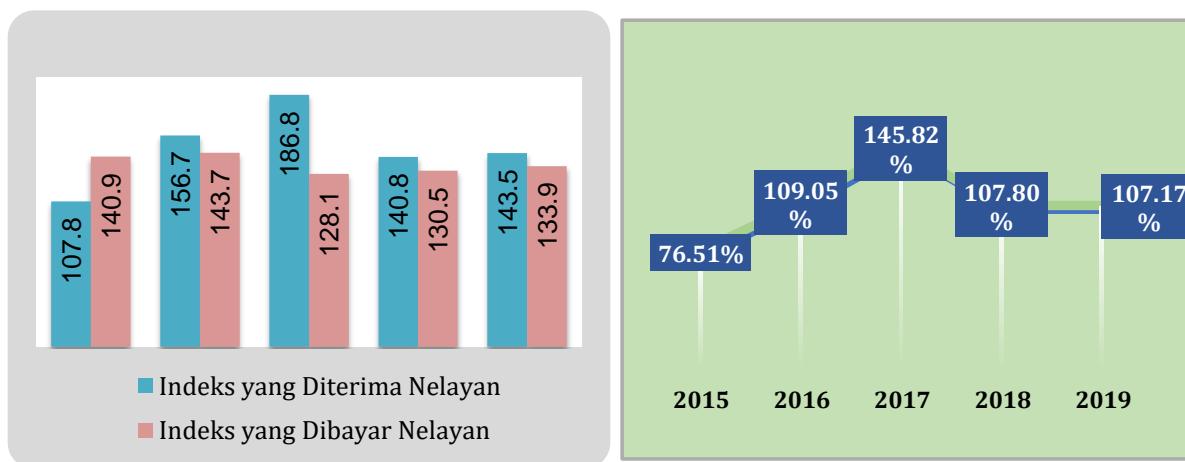
| Indikator | Tahun | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indeks yang Diterima Nelayan | 107,80 | 156,70 | 186,80 | 140,8 | 143,5 |
| Indeks yang Dibayar Nelayan | 140,90 | 143,70 | 128,10 | 130,5 | 133,9 |
| Nilai Tukar Nelayan | 76,51 | 109,05 | 145,82 | 107,8 | 107,17 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas nilai tukar nelayan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung mengalami fluktuasi peningkatan hal ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima nelayan cukup besar daripada indeks harga yang dibayar nelayan. Adapun indeks tersebut sangat dipengaruhi pola konsumsi nelayan terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan BBM untuk operasional melaut. Selama tahun 2015-2017 rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya telah mengalami laju pertumbuhan untuk nelayan telah mencapai 22,8% pertahun

sedangkan pembudidaya 13,3% pertahun. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, indeks NTN tahun 2015 telah dibagi menjadi dua yaitu Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya dengan dasar perhitungan NTN masih menggunakan tahun dasar 2012. Nilai Tukar Nelayan tahun 2015 sebesar 76,51 kemudian pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 109,5, hingga tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan telah meningkat mencapai 145,82, kemudian tahun 2018 mencapai 107,8 dan tahun 2019 mencapai indeks 107,17. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 108,22 maka telah dicapai 99,4% dari target sehingga diharapkan target akhir RPJMD dapat tercapai.

**Grafik II.34.
Nilai Tukar Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



Dari grafik memperlihatkan pencapaian indeks NTN tahun 2015 sampai tahun 2017 dipengaruhi oleh tingkat produktivitas nelayan dan harga pasar yang stabil, kemudian tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan akibat cuaca ekstrim dan tingginya biaya operasional melaut. Indeks NTN digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Kesejahteraan tersebut dapat meningkat jika aksesibilitas nelayan dapat terpenuhi dan lancar dalam memenuhi kebutuhannya sehingga pemerintah provinsi menyediakan sarana dan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang didukung oleh Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dengan fokus cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan.

8. Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota

Produksi rumput laut Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif, dimana produksi rumput laut pada tahun 2015 sebesar 3.289.907,6 ton meningkat sebesar 3.409.048,2 ton pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 3.662.970,5 ton, pada tahun 2018 produksi mengalami penurunan menjadi 3.317.525,1 ton atau turun 7,67 % namun pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya rumput laut mengalami peningkatan menjadi 3.406.924,6 ton atau naik 2,7 %. Jika ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), angka capaian indikator belum mencapai target RPJMD untuk rumput laut sebesar 3.634.634,3 ton.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Realisasi capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa Kabupaten khususnya Kabupaten Takalar disebabkan adanya perubahan kondisi lahan sehingga diperlukan upaya diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

**Tabel II.228.
Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Produksi Rumput Laut | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Luwu | 677,151.7 | 540,583.0 | 622,251.11 | 598,037.33 | 604,420.76 |
| 2 | Luwu Utara | 179,432.2 | 183,780.4 | 190,254.65 | 196,988.64 | 206,618.48 |
| 3 | Wajo | 276,468.0 | 389,626.0 | 462,479.00 | 462,474.73 | 476,055.25 |
| 4 | Bone | 201,853.2 | 215,601.9 | 247,178.00 | 275,627.00 | 291,686.60 |
| 5 | Sinjai | 19,200.0 | 30,200.0 | 40,208.10 | 40,775.81 | 47,733.99 |
| 6 | Bulukumba | 158,880.0 | 159,099.9 | 168,716.50 | 178,848.40 | 177,351.10 |
| 7 | Selayar | 284.9 | 170.2 | 333.94 | 365.50 | 395.74 |
| 8 | Bantaeng | 85,348.8 | 82,628.0 | 83,454.45 | 84,076.79 | 84,805.21 |
| 9 | Jeneponto | 138,080.7 | 149,885.1 | 150,509.69 | 193,517.76 | 165,036.22 |
| 10 | Takalar | 950,390.0 | 1,034,305.0 | 996,550.00 | 538,680.37 | 466,014.05 |
| 11 | Makassar | 187.0 | - | - | - | - |
| 12 | Maros | 71.0 | 117.9 | 124.90 | 13,240.80 | 12,475.00 |
| 13 | Pangkep | 185,322.0 | 208,502.0 | 280,976.00 | 314,201.30 | 445,608.00 |
| 14 | Barru | 788.0 | 891.6 | 936.20 | 959.00 | 1,114.00 |
| 15 | Pare-Pare | 27.6 | - | - | - | - |
| 16 | Pinrang | 7,104.3 | 9,398.3 | 11,055.90 | 15,448.80 | 16,266.30 |
| 17 | Gowa | - | - | - | - | - |
| 18 | Luwu Timur | 293,159.0 | 299,968.0 | 294,406.00 | 294,897.00 | 299,067.50 |
| 19 | Palopo | 116,159.2 | 104,290.9 | 113,536.04 | 109,385.91 | 112,276.43 |
| 20 | Sidrap | - | - | - | - | - |
| 21 | Enrekang | - | - | - | - | - |
| 22 | Soppeng | - | - | - | - | - |
| 23 | Tana Toraja | - | - | - | - | - |
| 24 | Toraja Utara | - | - | - | - | - |
| Sulawesi Selatan | | 3,289,907.6 | 3,409,048.2 | 3,662,970.5 | 3,317,525.1 | 3,406,924.6 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

9. Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota

Produksi udang di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2015 – 2018 mengalami peningkatan namun mengalami penurunan di tahun 2019. Produksi udang pada tahun 2015 sebesar 40.346,8 ton meningkat sebesar 41.685,9 ton pada tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat menjadi 45.341,9 ton, pada tahun 2018 produksi menjadi 46.524 ton kemudian turun 4,3 % namun pada tahun 2019 produksi perikanan udang menjadi 44.520,5. Jika ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), angka capaian indikator belum mencapai target RPJMD sebesar 61.687,07 ton

Realisasi capaian produksi udang pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lahan dalam mendukung produktivitas. Oleh karenanya dilaksanakan kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada petani untuk menerapkan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), melakukan penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

**Tabel II.229.
Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Produksi Udang | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Luwu | 3,585.9 | 3,812.7 | 3,847.49 | 3,882.28 | 3,691.67 |
| 2 | Luwu Utara | 1,367.8 | 1,317.4 | 1,331.16 | 1,298.09 | 1,429.96 |
| 3 | Wajo | 2,086.8 | 1,849.1 | 1,956.10 | 1,502.46 | 1,446.60 |
| 4 | Bone | 4,189.4 | 3,840.5 | 4,885.90 | 4,900.10 | 5,103.36 |
| 5 | Sinjai | 117.7 | 169.4 | 160.20 | 177.63 | 172.65 |
| 6 | Bulukumba | 2,951.5 | 3,287.9 | 3,990.30 | 5,302.70 | 3,337.50 |
| 7 | Selayar | 261.3 | 189.0 | 74.38 | 75.33 | 68.19 |
| 8 | Bantaeng | 32.5 | 38.3 | 34.82 | 39.91 | 56.90 |
| 9 | Jeneponto | 610.8 | 586.7 | 684.15 | 1,206.34 | 1,654.30 |
| 10 | Takalar | 4,538.7 | 4,805.0 | 4,516.00 | 1,908.43 | 1,007.70 |
| 11 | Makassar | 248.1 | 302.9 | 300.28 | 331.08 | 366.98 |
| 12 | Maros | 3,485.2 | 2,911.5 | 3,122.60 | 3,484.10 | 3,381.20 |
| 13 | Pangkep | 2,546.0 | 2,850.0 | 3,463.00 | 3,851.00 | 3,922.00 |
| 14 | Baru | 3,209.4 | 3,430.8 | 3,810.48 | 4,188.36 | 4,211.38 |
| 15 | Pare-Pare | 16.9 | 10.2 | 15.69 | 13.11 | 17.20 |
| 16 | Pinrang | 7,479.5 | 7,467.2 | 9,935.69 | 11,100.00 | 11,239.10 |
| 17 | Gowa | 51.4 | 67.2 | 67.50 | 71.60 | 76.70 |
| 18 | Luwu Timur | 3,397.9 | 4,510.4 | 2,897.00 | 2,951.00 | 3,091.50 |
| 19 | Palopo | 170.0 | 239.7 | 249.17 | 240.52 | 245.59 |
| 20 | Sidrap | - | - | - | - | - |
| 21 | Enrekang | - | - | - | - | - |
| 22 | Soppeng | - | - | - | - | - |
| 23 | Tana Toraja | - | - | - | - | - |
| 24 | Toraja Utara | - | - | - | - | - |
| Sulawesi Selatan | | 40,346.8 | 41,685.9 | 45,341.9 | 46,524.0 | 44,520.5 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

10. Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,5%, dimana produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 sebesar 3.476.546,8 ton meningkat sebesar 3.629.268 ton pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 3.902.783,4 ton, pada tahun 2018 produksi mengalami penurunan menjadi 3.568.952,6 ton atau turun 8,6% namun pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan menjadi 3.406.924,6 ton atau naik 2,7%. Jika ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), angka capaian indikator belum mencapai target RPJMD sebesar 3.933.426,1 ton atau hanya mencapai 93,12%. Realisasi capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada komoditas perikanan budidaya rumput laut sebagaimana dijelaskan point 8.

Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,62%, dimana produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 sebesar 310.290,4 ton meningkat sebesar 312.380,8 ton pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

menjadi 359.770,1 ton, dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 366.540,7 ton dan pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan menjadi 398.565,2 ton atau naik 8,7%. Jika ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), angka capaian indikator telah mencapai target RPJMD sebesar 315.632,1 ton atau telah melebihi target 126,3%. Dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap dilaksanakan kegiatan penyediaan sarana prasarana peningkatan kapasitas nelayan dengan target kinerja penyediaan kapal, alat tangkap dan alat bantu tangkap. Selain itu dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pelabuhan perikanan untuk mendorong fungsi pendaratan ikan.

Tabel II.230.

Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Realisasi | | | | |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total Volume Produksi Perikanan | Ton | 3,786,837.20 | 3,941,648.80 | 4,262,553.50 | 3,935,493.23 | 4,061,326.64 |
| Volume produksi perikanan tangkap | Ton | 310,290.4 | 312,380.8 | 359,770.1 | 366,540.7 | 398,565.2 |
| Volume produksi perikanan budidaya | Ton | 3,476,546.8 | 3,629,268.0 | 3,902,783.4 | 3,568,952.6 | 3,662,761.4 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

2.3.4 Penunjang Urusan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah tersedia dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

**Tabel II.231.
Ketersediaan Dokumen RPJPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah tersedia. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan juga Peraturan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

**Tabel II.232.
Ketersediaan Dokumen RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada | Ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

Dengan berbedanya tahun perencanaan di pusat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinamika pembangunan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi terhadap penyusunan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah, namun dengan meningkatkan sistem yang berbasis pada teknologi informasi seperti e-*planning* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II.233.
Ketersediaan Dokumen RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/ Lembaga terkait penyusunan dokumen perencanaan dan juga kebijakan perencanaan pada tingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) sehingga memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah, serta dengan adanya perbedaan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dinilai cukup mempengaruhi pencapaian target ini. Namun dengan adanya teknologi informasi yang dikembangkan sehingga dapat penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan yang tersedia dapat konsisten, koheren, transparan, efektif dan efisien. Adapun gambar tampilan e-planning Provinsi Sulawesi Selatan, seperti pada gambar berikut.

Gambar II.7
Gambar Aplikasi e-planning



3. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dapat dijaga, kecuali pada tahun 2017 , seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.234.
**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|-------|------|-------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD | 100 | 100 | 93,74 | 100 | 100 |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Pada Tahun 2017 Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 93,74 dengan penjelasan dari total 472 program yang terdapat di RPJMD yang terakomodir hanya 438 program di RKPD, hal itu disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan nasional. Adapun pada tahun 2018, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua RPJMD terdapat 423 program dan berdasarkan RKPD Tahun 2018 sebanyak 422 program, sedangkan pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 terdapat 431 program dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 terdapat 431 program. Hal tersebut juga dapat dilihat pada <https://e-planning.sulseprov.go.id>. Dalam pencapaian target RPJMD ini ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah dengan terdapatnya regulasi yang saling tumpang tindih antar Kementerian/ Lembaga dimana secara teknis sulit untuk diimplementasikan. Namun dengan menambahkan peran eplanning dan dengan telah terintegrasinya sistem perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan daerah maka program-program daerah dapat dikoordinasikan dengan lebih maksimal.

2.3.4.2. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal dimana telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan serta sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahap penyusunan dan penetapan laporan keuangan Sehingga dapat di lihat dari data yang ada Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan hingga Tahun 2019 mendapat Predikat WTP dalam tahap penyusunan dan Penetapan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.235.
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini BPK RI | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Pesentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan sampai pada tahun 2017 hal ini disebabkan karena dampak penyerahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas kepada Pemerintah Provinsi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disamping itu Gaji guru SMA/SMK dialokasikan pada DAU Pemerintah Provinsi mulai tahun anggaran 2017 yang mengakibatkan persentase Dana Transfer terhadap total Pendapatan Daerah kembali naik sehingga persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 40,62 persen. Namun demikian Persentase PAD

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 42,00 persen, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJM sebesar 43,22 %. Selengkapnya pada table berikut.

Tabel II.236.
**Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase PAD Terhadap Pendapatan | % | 53,56 | 48,16 | 40,62 | 42,67 | 42,00 |

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

3. Persentase SILPA

Berdasarkan data yang ada, SiLPA APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2015 mencapai 2,89% dan semakin menurun di 4 tahun terakhir yakni tercatat 1.78% pada tahun 2016 hingga 0.58% di tahun 2019. Dari trend tersebut menunjukkan bahwa SiLPA APBD Provinsi Sulawesi Selatan sangat baik karena dibawah dari angka 2% yang telah ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan alokasi belanja daerah yang semakin efektif dan juga kemampuan meningkatkan pendapatan daerah yang semakin membaik, sehingga proporsi jumlah siswa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang digunakan dalam menutupi defisit anggaran tahun berjalan semakin sedikit.

Tabel II.237.
**Persentase SILPA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase SILPA | % | 2,89 | 1,78 | 1,78 | 1,99 | 0,58 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

4. Persentase belanja pendidikan (20%) dan Kesehatan (10%)

Belanja Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari data yang ada, yakni pada tahun 2015 yang mencapai angka 24,34% meningkat terus tiap tahunnya hingga mencapai 42,19% pada tahun 2019. Dalam penyusunan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peningkatan yang signifikan terhadap Dana BOS yang menjadi bagian dari perhitungan belanja fungsi pendidikan ini.

Belanja Kesehatan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari tahun 2015 sebesar 13.42%, Tahun 2016 sebesar 11,59, menurun hingga menjadi 10.84% di tahun 2017 sampai dengan angka 10,53% di Tahun 2018, kemudian meningkat lagi di tahun 2019 sebesar 12.70%. meskipun begitu tetap berada di atas angka minimal nasional yang dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Yang Berlaku, Dimana Setiap OPD telah Berkomitmen untuk bekerja dan menyusun serta menetapkan alokasi anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.238.
**Persentase Belanja Pendidikan dan kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 24,34 | 28,82 | 42,53 | 35,60 | 42,19 |
| Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 11,97 | 10,30 | 10,03 | 8,54 | 9,01 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

5. Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, proporsi belanja tidak langsung masih lebih dominan dibanding belanja langsung mulai dari 60,54% pada tahun 2015, pada tahun 2016 menjadi 63,64%, pada tahun 2017 sebesar 65,64%, pada tahun 2018 menjadi 69,38%, dan pada tahun 2019 sebesar 70,71%. Selama periode tersebut, komponen belanja tidak langsung yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada alokasi belanja pegawai khususnya terkait kebijakan pemberian tunjangan kinerja ASN, belanja hibah dan belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang sekitar 90% lebih mendominasi pada komponen BTL ini. Sedangkan alokasi untuk belanja langsung cenderung mengalami penurunan selama periode 2015-2019, dimana salah satu faktornya adalah pembatasan pemberian honorarium kegiatan. Namun, yang perlu juga dicermati ulang adalah mengenai penetapan indikator ini yang sudah tidak relevan lagi digunakan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengganti PP Nomor 58 Tahun 2005, yang tidak lagi menggunakan kategori belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam struktur belanja daerah, tapi mengklasifikasi belanja daerah berdasarkan komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel II.239.
**Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Belanja Langsung | % | 39,46 | 36,36 | 34,36 | 25,75 | 28,96 |
| Belanja Tidak Langsung | % | 60,54 | 63,64 | 65,64 | 74,25 | 71,04 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

6. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bagi hasil Kabupaten/kota dan desa dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan secara fluktuatif dikarenakan adanya kebijakan pusat yang berubah-ubah terhadap Pemerintah Daerah (Provinsi). Dari angka 19,17% di tahun 2015 mengalami kenaikan hingga tahun 2016 hingga sebesar 19,52%, namun mengalami penurunan pada tahun 2017- 2018 hingga sebesar 13,93%, kemudian naik lagi di tahun 2019 sebesar

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

17,49% dan di tahun 2020 ini, kembali turun di angka 14,41%, bahkan di akhir tahun bisa lebih rendah lagi, jika kondisi perekonomian tidak kunjung membaik dengan adanya wabah virus korona yang terjadi di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, dimana hampir sebagian besar dana APBN dan APBD dialihkan untuk mempercepat penanggulangan wabah tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, mengikuti dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah tiap tahunnya.

**Tabel II.240.
Bagi Hasil Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Bagi hasil Kabupaten/kota | % | 19,17 | 19,52 | 16,86 | 13,93 | 17,49 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

7. Penetapan APBD

Dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam regulasi terbaru yakni PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian 5 tahun terakhir, terlihat bahwa dalam penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai dengan 2020, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni rata-rata ditetapkan di bulan Desember tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan adanya Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Provinsi, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu yakni sebelum sebelum tanggal 31 Desember, Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang. Dan di tahun 2021 mendatang juga diharapkan komitmen ini tetap terjaga.

**Tabel II.241.
Penetapan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------|-------------------------|--|---|---|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Penetapan APBD | Nomor Perda dan Tanggal | Perda No. 8 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014 | Perda No. 13 Tahun 2015, Tanggal 31 Desember 2015 | Perda No. 11 Tahun 2016, Tanggal 30 Desember 2016 | Perda No. 9 Tahun 2017, Tanggal 28 Desember 2017 | Perda No. 6 Tahun 2018, Tanggal 28 Desember 2018 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

2.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Tabel II.242.

**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam Belajar | 15 JP/Tahun |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Diharapkan ada kenaikan pagu anggaran untuk pengembangan kompetensi sesuai pemendagri no. 34 tahun 2018 yaitu sebesar 0,34 % dari belanja daerah akan meningkatkan besaran indikator kinerja daerah jika direalisasikan.

Tabel II.243.

**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 4,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir masih rendahnya capaian persentase keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan, hal ini disebabkan karena belum adanya penekanan pengikukutsertaan Pendidikan dan Pelatihan 15 JP / Tahun bagi setiap ASN, ketersediaan anggaran yang terbatas dan bahkan semakin rendah pada setiap tahunnya salah satu indikator anggaran SDM belum merupakan skala prioritas, selain itu pelaksanaan Pergub 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan diklat satu pintu belum dipatuhi oleh setiap OPD lingkup Pemprov sehingga data ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemprov tidak dapat diketahui oleh BPSPDM.

Tabel II.244.

**Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan
Struktural Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Provinsi dan Kab./ Kota | % | 4.3 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Indeks biaya untuk setiap diklat kepemimpinan sangat besar, guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi pembina diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 713/K.1/PDP.09/2018 tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan PIM Tingkat Administrator dan Pelatihan PIM Tingkat Pengawas.

Dengan demikian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Prov. Sul Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan, selanjutnya, capaian kinerja pelayanan Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, dapat juga dilihat berdasarkan indikator-indikator kinerja pada masing-masing program dimana berdasarkan indikator capaian program, kinerja pembangunan dan pelayanan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan periode tahun 2019 yang ditunjukkan dalam bentuk berbagai kegiatan Pelatihan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019, baik kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sahmaupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas/badan daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas JPT madya, dan JPT pratama, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah meliputi:

- Kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan,
dan kepemimpinan manajemen
- Pengembangan kerja sama dengan instansi lain
- Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Tabel II.245.

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 64 | 64 | 60 | 60 | 59 |

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Pada tabel di atas terlihat tidak ada peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemprov Sulsel periode tahun 2015 s/d 2016 yakni berjumlah 64 jabatan sebagaimana amanat PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan serta tipologi perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah (12 biro dan 1 sekda), sekretariat DPRD, badan/dinas (45 SKPD), rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah (6 RS). Sedangkan pada tahun 2017 mengalami perubahan sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 60 jabatan terdiri atas sekretariat daerah (9 biro dan 1 sekda), badan/dinas (44 OPD), RSUD dan RSKD (6 RS). Sedangkan di Tahun 2019 kembali mengalami perubahan menjadi sejumlah 59 jabatan dengan meleburnya RSKD menjadi UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas :

1. Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III.
2. Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV.
3. Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

**Tabel II.246.
Jumlah Jabatan Admininstrasi Pada Instansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Jabatan Admininstrasi pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 7.793 | 7.587 | 8.877 | 8.787 | 8.536 |

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Pada tabel di atas tampak penurunan terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2017 disebabkan banyaknya jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sedangkan di waktu yang bersamaan terjadi moratorium penerimaan CPNS sesuai kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan pada tahun 2017 peningkatan terlihat lebih signifikan sebagai implikasi diterapkannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu adanya pengalihan urusan dari kabupaten/kota ke provinsi yang kemudian menambah jumlah jabatan pengawas yang terdiri atas UPT dinas yang membidangi Pendidikan, Kehutanan, dan Ketenagakerjaan. Adapun dari tahun 2017 s/d 2019 terjadi penurunan disebabkan pula oleh jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pindah masuk Pemprov Sulsel maupun yang bersumber dari penerimaan CPNS lingkup Pemprov Sulsel.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

4. Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

1. Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama
2. Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel II.247.

**Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 2.424 | 2.400 | 17.485 | 16.670 | 16.243 |

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah pemangku jabatan fungsional yang setiap tahunnya mengalami tren penurunan yang disebabkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan dengan jumlah pegawai yang beralih (diangkat) ke dalam jabatan fungsional. Sedangkan pengecualian terjadi pada tahun 2017 dimana terlihat peningkatan yang sangat signifikan sebagai implikasi dari diterapkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni adanya pengalihan urusan dari kab/kota ke provinsi. Selanjutnya juga diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke Kementerian dan Provinsi. Pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari kab/kota ke provinsi. PNS tersebut diantaranya memiliki tugas sebagai Pengawas tenaga kerja, Guru SMA dan SMK, Penyuluhan Kehutanan, Polisi Kehutanan. Tabel berikut daftar pengalihan PNS ke Provinsi.

**Tabel II.248.
Pengalihan PNS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020**

| Instansi Pusat | Urusan | Jabatan yang dialihkan | Instansi | |
|---------------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | Asal | Tujuan |
| Kementerian Ketenagakerjaan | Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan | Pengawas Tenaga Kerja | Kab/kota | Provinsi |
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Bidang Pendidikan menengah | Guru SMA/SMK | Kab/kota | Provinsi |
| Kementerian Kehutanan | Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan | Penyuluhan Kehutanan dan Polisi Kehutanan | Kab/kota | Provinsi |
| Kementerian Perhubungan | BIdang pengelolaan terminal penumpang tipe A dan B | Pengelola Terminal Penumpang Tipe B | Kab/kota | Provinsi |
| Kementerian Dalam Negeri | Urusan pemerintahan umum | Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum | Kab/kota | Provinsi |

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbang

Jumlah kelitbang yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dapat diimplementasikan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.249.
Persentase implementasi rencana kelitbang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase implementasi rencana kelitbang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

Hal tersebut didukung oleh para pemangku kepentingan utama dalam penelitian dan pengembangan di Provinsi Sulawesi Selatan sangat kaya dan beragam. Walaupun mensinergikan sumber daya kelitbang yang kaya tidaklah mudah, akan tetapi dikarenakan ini tetap menjadi kebutuhan bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan maka semua hal tersebut dapat terimplementasikan dengan baik.

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang

Persentase Pemanfaatan hasil kelitbang rentang tahun 2015-2019 memiliki kecenderungan mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,26%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.250.
Persentase pemanfaatan hasil kelitbang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019**

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase pemanfaatan hasil kelitbang | 53 | 56 | 24 | 42 | 46 |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

Dengan melihat tabel diatas, Selama dua tahun terakhir (tahun 2018 – 2019), persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan selalu mengalami kenaikan yang cukup pesat setelah mengalami penurunan drastis pada tahun 2017 sebesar 24%. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa hasil penelitian dan pengembangan pada tahun 2018 – 2019 semakin banyak dimanfaatkan dapat diimplementasian oleh stakeholder, artinya hasil penelitian cukup banyak yang bisa diterapkan dalam segi kehidupan masyarakat.

3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya peningkatan daya saing. Maka beberapa perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Adapun persentase inovasi Perangkat Daerah yang penerapannya difasilitasi, dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.251.
Penerapan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 29 | 20 | 49 | 50 | 50 |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai target ini yaitu belum diimplementasikannya sistem data Inovasi daerah yang telah dibuat, sehingga belum dapat menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Namun demikian, Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi rentang tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2019 telah memfasilitasi separuh dari perangkat daerah yang ada.

4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Pada tahun 2018, penjabaran kebijakan inovasi yang diterapkan di 6 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Sinjai dengan inovasi di gula aren, Kabupaten Jeneponto dengan inovasi di garam, Kabupaten Toraja dan Enrekang dengan inovasi kopi, Kota Palopo dengan inovasi di rumput laut dan Kabupaten Sidrap dengan inovasi di ayam buras.

Pada tahun 2019, penjabatan kebijakan inovasi yang diterapkan di 12 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur dengan inovasi Sagu, Kabupaten Bantaeng dengan inovasi di ikan nila, Kabupaten Gowa dengan inovasi pada bidang agrowisata.

Tabel II.252.
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | 12 | 13 | 22 | 25 | 50 |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

Meskipun telah terbentuk Sistem Inovasi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan namun belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemangku kepentingan utama. Selain itu belum tumbuh kesadaran pentingnya inovasi pada para pengambil kebijakan yang berbasis bukti dari hasil penelitian. Namun dengan dukungan Kepala Daerah yang mengedepankan inovasi dalam tata Kelola pemerintahan dan pelayan publik maka persentase Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 25% dan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya.

2.3.4.5. Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

pegawai pengelola keuangan. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 presentase tindak lanjut temuan capaian kinerja mencapai 67,91% dan meningkat pada tahun 2019 yaitu 74,43%. Angka peningkatan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain adanya respon dan koordinasi aktif dari perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dan peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan laporan keuangan dan asset.

**Tabel II.253.
Percentase Tindak Lanjut Temuan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Tindak Lanjut Temuan | % | 78,18 | 74,09 | 67,91 | 71,72 | 74,43 |

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Selanjutnya terkait dengan indikator persentase tindak lanjut temuan ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan capaian indikator dari tahun 2015 sampai dengan 2019 pelanggaran pegawai yang ada mengalami fluktuasi. Hal ini tergantung dari adanya laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan *indisipliner* yang diadukan oleh kepala perangkat daerah supaya dilakukan pemeriksanaan khusus kepada yang bersangkutan. Diharapkan ke depan dampak dari sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin dapat lebih meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS sehingga pengaduan atau laporan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dapat lebih diturunkan. Capaian Indikator ini, mengandung makna, Capaian yang semakin jauh dari target, menandakan bahwa Jumlah Pelanggaran Pegawai semakin Berkurang. Berikut perkembangan Persentase Persentase Pelanggaran Pegawai dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel II.254.
Percentase Pelanggaran Pegawai
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Pelanggaran Pegawai | % | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 0,13 | 0,04 |

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Jumlah Temuan BPK

Perkembangan jumlah temuan oleh BPK dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yang dilakukan ditahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masing-masing perangkat daerah lebih aktif berkoordinasi dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah temuan dari tahun sebelumnya karena masa transisi pemerintahan yang baru yang berdampak adanya perubahan struktur kelembagaan dibeberapa perangkat daerah sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi secara intens.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

Tabel II.255.
Jumlah Temuan BPK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah temuan BPK | Temuan | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 |

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan sampai saat ini telah menunjukkan adanya sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD dan terintegrasi program kerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II.256.
Integrasi Program DPRD dalam Pelaksanaan Tupoksi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan penganggaran dalam dokumen perencanaan | ada/tidak ada | Ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : sipd.kemdagri.go.id

2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Indeks Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan pelabuhan, terminal, elektrifikasi, irigasi, layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.257.
Indeks Layanan Infrastruktur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2019

| Indikator | Satuan | Tahun | |
|---|--------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 |
| 25 % Kemantapan Jalan | angka | 14,74 | 15,38 |
| 25% Kecamatan Terhubung Jalan Provinsi Kondisi Dalam Baik | angka | 16,28 | 17,58 |
| 20% Ketersediaan Pelabuhan Pengumpulan Regional | angka | 20,00 | 20,00 |
| 20% Rasio Eletrifikasi Desa | angka | 19,20 | 19,80 |
| 20% Rasio Jaringan Irigasi | angka | 15,83 | 3,29 |
| Indeks Layanan Infrastruktur | angka | 73,38 | 76,05 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari lima komponen komposit, ketersediaan pelabuhan pengumpulan regional yang memiliki capaian kinerja tertinggi dan capaian kinerja terendah dicapai oleh rasio jaringan irigasi.

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasi perwujudan posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terindukusinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan yang menjadikan panjang jalan kewenangan provinsi meningkat dari 1.500,15 km menjadi 2.009,35 km. Perubahan Keputusan Gubernur terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2018. Walaupun pada kenyataannya, jumlah panjang jalan kondisi mantap meningkat secara signifikan. pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan dimana kondisi jalan baik pada tahun 2015 adalah 42,11 persen dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 42,22 persen. Tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan, hingga tahun 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 39,84 persen.

Tabel II.258.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Panjang Jalan Kondisi baik | Km | 483,21 | 633,36 | 516,26 | 639,32 | 672,13 |
| Panjang jalan Keseluruhan | Km | 1.147,51 | 1.500,15 | 1.500,15 | 2.009,35 | 2.009,35 |
| Mantap | Km | 1.003,13 | 928,06 | 953,65 | 1.184,44 | 1.236,15 |
| Mantap | % | 87,14 | 61,86 | 63,57 | 58,94 | 61,52 |
| Tidak Mantap | Km | 144,38 | 572,09 | 546,5 | 824,91 | 773,2 |
| Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Bondisi Baik | % | 42,11 | 42,22 | 34,41 | 35,85 | 39,84 |

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202**

2.4.2 Produktifitas Total Daerah

Perkembangan produktifitas total daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Target Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) tahun 2019 sebesar 78.777.309 dengan Realisasi sebesar 82.027.871 dengan tingkat capaian sebesar 104,13 persen, Pencapaian ini dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan, Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing, Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor. Adapun capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.259.
Produktifitas Total Daerah Tahun 2016-2019**

| Indikator | Tahun | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angkatan Kerja | 3,881,003 | 3,812,358 | 3,988,029 | 4,030,400 |
| Produktifitas Total Daerah | 69,415,383.97 | 75,757,358.34 | 77,532,636.41 | 82,027,871.33 |

Sumber: BPS, diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel 2020

Angka partisipasi angkatan kerja yang merupakan perbandingan angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan berfluktuasi rentang tahun 2015 sampai dengan 2019. Besaran angka partisipasi angkatan kerja Sulawesi Selatan tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018, walaupun terdapat peningkatan jumlah orang yang bekerja jika dibandingkan dengan jumlah orang yang bekerja pada tahun 2018. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan angka partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih besar yaitu 1,23 persen dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja yang hanya sebesar 1,05 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.260.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Angkatan Kerja | Orang | 3.706.128 | 3.881.003 | 3.812.358 | 3.988.029 | 4.030.400 |
| Bekerja | Orang | 3.485.492 | 3.694.712 | 3.598.663 | 3.774.924 | 3.830.096 |
| Pengangguran | Orang | 220.636 | 186.291 | 213.695 | 213.105 | 200.304 |
| Bukan Angkatan Kerja | Orang | 2.375.747 | 2.349.137 | 2.439.019 | 2.340.550 | 2.376.885 |
| Penduduk Usia Kerja | Orang | 6.081.875 | 6.124.063 | 6.251.377 | 6.328.579 | 6.407.285 |
| Angka Partisipasi Angkatan Kerja | % | 60,94 | 62,92 | 60,98 | 63,01 | 62,9 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

2.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 -2019

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 -2019 diukur melalui indikator kinerja menunjukkan bahwa dari 286 indikator yang diukur, terdapat 123 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2019, 64 indikator yang sesuai target 2019 dan 99 indikator yang belum mencapai target 2019.

Pada aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi terdapat 6 Indikator yang diukur. Sebagian besar (5 indikator) belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2019, dan hanya indicator tingkat kemiskinan yang telah melampaui target. Sehingga permasalahan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masih akan menjadi titik berat pembangunan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2021-2023.

Pada aspek kesejahteraan sosial ekonomi terdapat 11 Indikator yang diukur. Terdapat 4 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan, 4 indikator yang sesuai target dan 3 indikator yang belum mencapai target. Ketiga indikator yang belum mencapai target adalah Indeks Pendidikan, Angka Harapan lama Sekolah, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Disamping pengukuran kinerja dari kedua aspek tersebut di atas yang menggambarkan kinerja impact Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, pengukuran capaian aspek pelayanan umum yang menggambarkan kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Sulawesi selatan tahun 2015-2019 dengan berbagai indicator dan capaiannya sebagaimana disajikan dalam Tabel II. 262.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel II.261.
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan**

| NO. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) | | | | |
|-------|--|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 1 | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 | Tingkat Kemiskinan | % | 10.12 | 9.24 | 9.48 | 8.87 | 8.56 | 8.78 | melampaui | | | | |
| 1 1 2 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 7,19 | 7,42 | 7,21 | 7,06 | 6.92 | 7.2-7.6 | belum tercapai | | | | |
| 1 1 3 | PDRB Perkapita (ADHB) | Juta Rp | 39.95 | 43.82 | 47.21 | 52.64 | 57.03 | 57.64 | belum tercapai | | | | |
| 1 1 4 | Rasio Gini (periode Sepetember) | Angka | 0.424 | 0.400 | 0.429 | 0.390 | 0.390 | 0.385 | belum tercapai | | | | |
| 1 1 5 | Laju Inflasi | % | 3.35 | 3.02 | 3.61 | 3.13 | 2.35 | 3.5-1.0 | belum tercapai | | | | |
| 1 1 6 | Indeks Wiliamson | Indeks | 0.616 | 0.603 | 0.61 | 0.622 | 0.639 | <.58 | belum tercapai | | | | |
| 1 2 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 69.15 | 69.76 | 70.34 | 70.9 | 71.66 | 71.58 | melampaui | | | | |
| 1 2 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5.95 | 4.8 | 5.61 | 4.94 | 4.62 | 5.2 | melampaui | | | | |
| 1 2 3 | Indeks Pendidikan | Angka | 61.55 | 62.39 | 63.39 | 63.79 | 64.64 | 65.19 | belum tercapai | | | | |
| 1 2 4 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7.65 | 7.77 | 7.97 | 8.04 | 8.26 | 8.16 | melampaui | | | | |
| 1 2 5 | Angka Harapan lama Sekolah | Tahun | 13 | 13.16 | 13.29 | 13.36 | 13.36 | 13.68 | belum tercapai | | | | |
| 1 2 6 | Indeks Kesehatan | Angka | 69.8 | 69.82 | 69.84 | 70.08 | 70.43 | 70.07 | melampaui | | | | |
| 1 2 7 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 92.92 | 92.79 | 92.84 | 93.15 | 93.09 | 93.18 | belum tercapai | | | | |
| 1 2 8 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 67.98 | 70.02 | 70.57 | 69.14 | 74.01 | 74.01 | sesuai | | | | |
| 1 2 9 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | CC | CC | CC | B | B | B | Sesuai | | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| NO. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) | |
|-----|--|--------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 1 | Nilai Sakip | Angka | NA | NA | NA | 64.28 (B) | 65.06 (B) | B | sesuai | |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | Angka | NA | NA | NA | 3.49 (B-) | 4 (B) | B | sesuai | |
| 2 | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| 2 | PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | Pendidikan | | | | | | | | | |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK | % | 78.03 | 83.66 | 83.14 | 81.74 | 86.09 | 88.12 | belum tercapai | |
| 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | % | 59.47 | 59.62 | 59.86 | 60.03 | 60.14 | 63,50 | belum tercapai | |
| 2 | Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun | % | 69.66 | 70.09 | 70.6 | 70.81 | 70.85 | 82.88 | belum tercapai | |
| 2 | Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | % | 1.83 | 0.38 | 0.36 | 1 | 0.71 | 0.98 | melampaui | |
| 2 | Angka kelulusan (AL) | % | 96.65 | 100 | 99.95 | 99.97 | 99.99 | 99.98 | melampaui | |
| 2 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 87.46 | 94.13 | 94.65 | 98.15 | 97.2 | 97 | melampaui | |
| 2 | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah | Angka | 1:12 | 1:14 | 1:12 | 1:14 | 1:15 | 1:15 | sesuai | |
| 2 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun | % | 91.29 | 91.52 | 91.65 | 94.61 | 95.12 | 94.17 | melampaui | |
| 2 | Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | % | 79.59 | 98.99 | 91.8 | 98.6 | 98.2 | 97.82 | melampaui | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|---|------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-----------------------------|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 2 2 | Kesehatan | | | | | | | | |
| 2 2 2 1 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu | orang | 1167 | 1183 | 1059 | 1037 | 919 | <1057 | melampaui |
| 2 2 2 2 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita) | orang | 1265 | 1303 | 1151 | 1124 | 991 | <1149 | melampaui |
| 2 2 2 3 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal) | orang | 936 | 887 | 818 | 799 | 714 | <816 | melampaui |
| 2 2 2 4 | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | Angka (per 1000 KH) | 2.21 | 7.94 | 7.05 | 5.76 | 5.69 | - | melampaui |
| 2 2 2 5 | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup | Angka (per 1000 KH) | 2.8 | 8.2 | 7.67 | 6.26 | 6.2 | - | melampaui |
| 2 2 2 6 | Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup | Angka (per 1000 KH) | 6.12 | 5.64 | 5.44 | 6.21 | 5.86 | - | melampaui |
| 2 2 2 7 | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | Angka (per 100.000 KH) | 99 | 105 | 77 | 92 | 94 | <114 | melampaui |
| 2 2 2 8 | Rasio Posyundu peratuan Balita | Angka per 1000 balita | 12.7 | 12.33 | 11.29 | 12.8 | 11.95 | 13.73 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai<br (=")<br/" (<)="" sesuai=""/>melampaui (>) |
|------------|---|-------------|-------------|---|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| NO. | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | Angka per 1000 Penduduk | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | sesuai |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | Angka per 1.000 Penduduk | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 11 | Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk | Angka per 1.000 Penduduk | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | melampaui |
| 2 | 2 | 2 | 12 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | % | 79.21 | 76.48 | 81.84 | 80.7 | 82 | 82 | sesuai |
| 2 | 2 | 2 | 13 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 94.02 | 92.9 | 94.05 | 91.99 | 90.97 | 96 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 14 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 95.28 | 94.26 | 96.45 | 95.27 | 96.15 | 96.5 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 15 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 2 | 2 | 16 | Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak | % | 98.4 | 101 | 102 | 103.8 | 98.5 | 95 | melampaui |
| 2 | 2 | 2 | 17 | Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk | Per 100.000 Penduduk | 1.6 | 1.6 | 1.96 | 3.02 | 2.32 | 2 | melampaui |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 2 | 2 | 18 | Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani | % | 10.01 | 18.24 | 19.04 | 16.47 | 18.78 | 20 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 19 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | % | 48 | 44 | 46 | 49 | 61 | 100 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 20 | Tingkat Prevalensi Tuberkolosis | Per 100.000 Penduduk | 156 | 156 | 197 | 208 | 214 | 202 | melampaui |
| 2 | 2 | 2 | 21 | Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis | Per 100.000 Penduduk | 6 | 6 | 7 | 8 | NA | 3 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 22 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 48 | 44 | 46 | 49 | 61 | 65 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 23 | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS | % | 86 | 87 | 86 | 87 | NA | 90 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 2 | 24 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 2 | 2 | 25 | Penderita Diare yang ditangani | Orang | 238,085 | 192,681 | 169,972 | 167,946 | 145,457 | 194.9 | melampaui |
| 2 | 2 | 2 | 26 | Angka Kejadian Malaria | Per 1000 penduduk | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | < 1 | melampaui |
| 2 | 2 | 2 | 27 | Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi | % | 0.056 | 0.28 | 0.33 | 0.013 | 0.019 | < 0.5 | melampaui |
| 2 | 2 | 2 | 28 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 2 2 29 | Cakupan Kunjungan Bayi | % | 98.11 | 98.08 | 98.54 | 96.4 | 89.96 | 98 | belum tercapai |
| 2 2 2 30 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 91.72 | 89.25 | 91.13 | 89.32 | 87.96 | 92 | belum tercapai |
| 2 2 2 31 | Cakupan Pelayanan Nifas | % | 91.72 | 91.32 | 91.48 | 90.09 | 90.35 | 93 | belum tercapai |
| 2 2 2 32 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | % | 88.74 | 60.66 | 60.28 | 58.32 | 62.87 | 61 | melampaui |
| 2 2 2 33 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | % | 76.51 | 69.09 | 71.74 | 71.64 | 69.71 | 72 | belum tercapai |
| 2 2 2 34 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 0 | 100 | 100 | 91 | 83.43 | 100 | belum tercapai |
| 2 2 2 35 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 2 2 36 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 2 2 37 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 2 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 2 2 3 1 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | % | 42.11 | 42.22 | 34.41 | 35.85 | 39.84 | 48.87 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk | Km/jiwa | 0.00332 | 0.00333 | 0.00329 | 0.00345 | 0.00345 | 0.00344 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air(Minimal1.5Meter) | % | 84 | 75 | 77 | 77 | 77 | 80 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 3 | 4 | Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar | % | 9.35 | 10.18 | 9.85 | 10.11 | 10.11 | 9.53 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 5 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 83 | 87.93 | 84.41 | 92.34 | 95.15 | 87.77 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 6 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelaanjutan | % | 82.94 | 83.4 | 84.41 | 84.41 | 85.3 | 84.7 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 7 | Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar | % | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 8 | Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik | % | 9.61 | 16.67 | 32.55 | 69,167 | 72.5 | 40 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 9 | Rasio Jaringan Irigasi | M/Ha | 11,46 | 13,04 | 14,77 | 15,83 | 16,46 | 12 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 10 | Persentase Penduduk Berakses air minum | % | 87.36 | 87.35 | 87.38 | 87.37 | 96.16 | 100 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 3 | 11 | Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum | % | 87.45 | 87.41 | 87.45 | 87.5 | 87.81 | 87.8 | melampaui |
| 2 | 2 | 3 | 12 | Proporsi Penduduk Dengan Akses B erkelanjutan Terhadap Air Minum | % | 66.54 | 71.97 | 74.76 | 87.42 | 87.73 | 75.25 | melampaui |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| NO. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | Layak Perkotaan dan Perdesaan | | | | | | | | |
| 2 2 3 13 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan | % | 72.07 | 73.4 | 83.34 | 87.5 | 88.34 | 87.65 | melampaui |
| 2 2 3 14 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | melampaui |
| 2 2 3 15 | Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk | Unit/Jiwa | 2.09 | 1.98 | 2.09 | 2.58 | 2.53 | 2.1 | melampaui |
| 2 2 3 16 | Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | % | 5.16 | 7.44 | 8.52 | 7.7 | 3.94 | 10.4 | belum tercapai |
| 2 2 3 17 | Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan | % | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | sesuai |
| 2 2 3 18 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | % | 35 | 38 | 48 | 0 | 60 | 48 | melampaui |
| 2 2 3 19 | Rasio luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | % | 35 | 38 | 46 | 40.01 | 34.27 | 46 | belum tercapai |
| 2 2 4 | Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman | | | | | | | | |
| 2 2 4 1 | Rasio Rumah Layak Huni | % | 0.192 | 0.193 | 0.194 | 0.195 | 0.2 | 0.196 | melampaui |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|--|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | % | 0.056 | 0.055 | 0.047 | 0.049 | 0.048 | 0.043 | belum tercapai |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 5 | | Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | per 10.000 penduduk | 32.84 | 34.04 | 34.54 | 34.94 | 42.13 | 31.09 | melampaui |
| 2 | 2 | 5 | 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) | % | 91 | 92 | 93 | 94 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Persentase Penegakan PERDA | % | 35 | 55 | 75 | 80 | 89 | 20 | melampaui |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6 | | Sosial | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6 | 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 17.88 | 24.04 | 26.9 | 70.48 | 57.11 | 35 | melampaui |
| 2 | 2 | 6 | 2 | Persentase PMKS yang tertangani | % | 27.8 | 47.42 | 35 | 70.48 | 57.02 | 35 | melampaui |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 2 | 6 | 4 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|--|--------|---------|-------|-------|------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 2 | 6 | 6 | Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 55.4 | 65.27 | 45.27 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 2 | 6 | 7 | Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun | % | 70.25 | 75.09 | 82.15 | 1.33 | 20.01 | 75 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 6 | 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 6.42 | 6.26 | 6.42 | 0.39 | 5.91 | 10 | belum tercapai |
| 2 | 2 | 6 | 9 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | % | 75.09 | 80.16 | 82.32 | 100 | 100 | 75 | melampaui |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social | % | 6.42 | 6.26 | 6.42 | 1.33 | 2 | 10 | belum tercapai |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | | PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 62.2 | 62,92 | 60.98 | 63.02 | 62,90 | 62.23 | melampaui |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Rasio Penduduk yang bekerja | % | 94.05 | 95.19 | 94.39 | 94.65 | 95.03 | 94.54 | melampaui |
| 2 | 3 | 1 | 3 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 1.89 | 1.96 | 2.23 | 2.94 | 1.72 | 2.2 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 1 | 4 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 87.66 | 100 | 100 | 61.7 | 33.33 | 98 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 1 | 5 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 61.67 | 45.59 | 51.2 | 3.19 | 4.36 | 3.48 | melampaui |
| 2 | 3 | 1 | 6 | Keselamatan dan perlindungan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | melampaui |
| 2 | 3 | 1 | 7 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 3 | 1 | 8 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 25.19 | 28.83 | 25.48 | 35.34 | 52.89 | 26 | melampaui |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 1 | 9 | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | % | 4.35 | 4.5 | 5 | 6.92 | 5.38 | 6 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 1 | 10 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 100 | 100 | 80.49 | 100 | 70 | 70 | sesuai |
| 2 | 3 | 1 | 11 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 100 | 100 | 66.67 | 100 | 98.75 | 71 | melampaui |
| 2 | 3 | 1 | 12 | Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | % | 94.05 | 95.2 | 94.39 | 94.65 | 95.03 | 94.54 | melampaui |
| 2 | 3 | 1 | 13 | Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja | % | 36.86 | 35.65 | 37.26 | 36.53 | 36.86 | 38.1 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 1 | 14 | Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja | % | 36.86 | 35.65 | 37.26 | 36.52 | 36.85 | 38.1 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 2 | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 48.41 | 48.91 | 49.66 | 51.25 | 53.1 | 51.25 | melampaui |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 17.86 | 25.88 | 22 | melampaui |
| 2 | 3 | 2 | 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | % | 67 | 69 | 71 | 71 | 69 | 73 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 2 | 4 | Rasio KDRT | % | - | - | - | - | 0.019 | 0.05 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 2 | 5 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | % | 0.15 | 0.18 | 0.4 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | melampaui |
| 2 | 3 | 2 | 6 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 44.31 | 47.47 | 43.76 | 50.23 | 50.32 | 45.26 | melampaui |
| 2 | 3 | 2 | 7 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | % | 58 | 57 | 54 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 3 | 2 | 8 | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | % | 27 | 32 | 22 | 27 | 21 | 30 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 2 | 9 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat | % | 101.55 | 100.83 | 100.09 | 100.25 | 101.32 | 101 | melampaui |
| 2 | 3 | 2 | 10 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat | % | 106.58 | 105.19 | 104.15 | 102.64 | 100.79 | 105.4 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|-------------------|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 2 | 11 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat | % | 102.96 | 102.04 | 110.66 | 108.97 | 106.11 | 100 | melampaui |
| 2 | 3 | 2 | 12 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | % | 110.02 | 110 | 103.1 | 103.3 | 105.2 | 105.2 | sesuai |
| 2 | 3 | 2 | 13 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | % | 100.57 | 100.49 | 100.15 | 100.28 | 100.6 | 100.6 | sesuai |
| 2 | 3 | 3 | Pangan | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | % | 352 | 373.6 | 384 | 388.24 | 363.76 | 399.66 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 3 | 2 | Ketersediaan Pangan Utama (Jagung) | % | 24.33 | 34.02 | 38.89 | 44.33 | 47.88 | 50.54 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 3 | 3 | Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai) | % | 23.56 | 23.71 | 20.88 | 22.55 | 24.96 | 28.19 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 3 | 4 | Ketersediaan Energi Perkapita | % | 5,544 | 5,862 | 3,906 | 3,572 | 3,879 | 5,885 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 3 | 5 | Ketersediaan Protein Perkapita | % | 154.52 | 168.34 | 125.41 | 103.75 | 112.67 | 167.68 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 3 | 6 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 77.27 | 85.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 3 | 4 | Pertanahan | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | Persentase luas lahan bersertifikat | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 46.62 | 0 | melampaui |
| 2 | 3 | 4 | 2 | Penyelesaian kasus tanah Negara | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.77 | 100 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | Penyelesaian izin lokasi | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 82.9 | 100 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 5 | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 5 | 2 | Tersusunnya RPPLH Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 5 | 3 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 5 | 4 | Tersedianya dokumen KLHS Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 5 | 5 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 5 | 6 | Peningkatan Indeks Kualitas Air | % | 56.29 | 75.44 | 77.62 | 82.62 | 58.4 | 56.1 | melampaui |
| 2 | 3 | 5 | 7 | Peningkatan Indeks Kualitas Udara | % | 76.8 | 85.8 | 88.66 | 93.56 | 89.56 | 86.3 | melampaui |
| 2 | 3 | 5 | 8 | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan | % | 50.85 | 55.43 | 58.4 | 54.94 | 58.06 | 56.1 | melampaui |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 67.01 | 70.54 | 73.24 | 74.83 | 67.61 | 66.17 | melampaui |
| 2 | 3 | 5 | 9 | Laporan Inventarisasi GRK | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|--|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 5 | 11 | Jumlah limbah B3 yang dikelola | Ton | 611.898 | 677.869 | 667.900 | 4.365.759 | 5.373.629 | 1.500.000 | melampaui |
| 2 | 3 | 5 | 12 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan.izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | % | 43.37 | 20.19 | 23.37 | 66 | 62.86 | 75 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 5 | 13 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | ada | melampaui |
| 2 | 3 | 5 | 14 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi.lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Kasus | - | - | - | - | 17 | 11 | melampaui |
| 2 | 3 | 5 | 15 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|--|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 5 | 16 | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi | % | 71.67 | 74.5 | 75.41 | 66.91 | 73.33 | 75 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 6 | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 6 | 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Angka | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 6 | 2 | Rasio bayi berakte kelahiran | Angka | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | melampaui |
| 2 | 3 | 6 | 3 | Rasio pasangan berakte nikah | Angka | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | melampaui |
| 2 | 3 | 6 | 4 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 6 | 5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | sesuai |
| 2 | 3 | 6 | 6 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.39 | 95 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 6 | 7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.85 | 88 | melampaui |
| 2 | 3 | 7 | | Pemberdayaan Masyarakat dan desa | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 7 | 1 | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik | % | N/A | N/A | 31.47 | 4.08 | 17.38 | 34.62 | belum tercapai |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|---|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 7 | 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 17 | 19 | 20 | 1 | 1 | 21 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 7 | 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 19 | 37 | 39 | 43 | 43 | 40 | melampaui |
| 2 | 3 | 7 | 4 | Persentase LPM Berprestasi | % | 1.22 | 24.24 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.82 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 7 | 5 | Persentase PKK aktif | % | 97.68 | 97.69 | 97.71 | 100 | 100 | 97.95 | melampaui |
| 2 | 3 | 7 | 6 | Persentase Posyandu aktif | % | 99.28 | 99.49 | 99.53 | 99.89 | 99.89 | 99.64 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | | Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 8 | 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 1.16 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.15 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 8 | 2 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2.28 | 2.35 | 2.21 | 2.44 | 2.4 | 2.35 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | anak/keluarga | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 4 | Rasio Akseptor KB | % | 66.87 | 67.42 | 66.3 | 62.91 | 63.05 | 66.54 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 8 | 5 | Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | % | 66.87 | 67.42 | 66.34 | 66.5 | 71.74 | 66.54 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 6 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | Angka | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | 22 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 7 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 46.99 | 48.17 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|--|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 8 | 8 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 15.13 | 13.98 | 14.14 | 13.9 | 13.7 | 13.97 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 8 | 9 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 19.4 | 14.23 | 14.6 | 15.3 | 24.26 | 24.29 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 8 | 10 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 8.16 | 13.83 | 14.9 | 14.2 | 17.32 | 12.65 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 11 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 89.97 | 88.27 | 85.78 | 85.93 | 84.91 | 62 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 12 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 75.41 | 74.96 | 74.74 | 72.3 | 72.31 | 53.2 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 13 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 39 | 43 | 44 | 50.3 | 72.33 | 46.5 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 14 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 55 | 54 | 55 | 23 | 23 | 56 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 8 | 15 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | % | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | sesuai |
| 2 | 3 | 8 | 16 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 101.86 | 102.26 | 100.46 | 100.1 | 100.3 | 100 | melampaui |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|---|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 8 | 17 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 22.6 | 49.79 | 64.6 | 72.86 | 74.39 | 66.71 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 18 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | % | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | <0.02 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 8 | 19 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 3 | 8 | 20 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | % | 70 | 70 | 71 | 75 | 75 | 73.13 | melampaui |
| 2 | 3 | 8 | 21 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | sesuai |
| 2 | 3 | 9 | | Perhubungan | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 9 | 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Juta Orang | 11,833 | 12,684 | 13,323 | 14,117 | 13,273 | 15,539 | melampaui |
| 2 | 3 | 9 | 2 | Rasio ijin trayek | | 0.42 | 0.4 | 0.21 | 0.44 | 1.06 | 0.3 | melampaui |
| 2 | 3 | 9 | 3 | Persentase layanan angkutan darat | % | - | - | - | - | 0.29 | 97.5 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 9 | 4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS | Unit | 151 | 153 | 181 | 75 | 75 | 319 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|----|---|--|----------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 9 | 6 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Km/kendaraan | - | - | - | - | 129 | 108 | melampaui |
| 2 | 3 | 9 | 7 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum | Ton | N/A | 43.730.296 | 55.597.115 | 95.224.604 | 48.269.820 | 15.663.496 | melampaui |
| 2 | 3 | 10 | | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 10 | 1 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 56.21 | 58.5 | 60.3 | 63.85 | 65.07 | 68 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 10 | 2 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | % | 37.72 | 39.21 | 42.04 | 43.91 | 43.98 | 42.25 | melampaui |
| 2 | 3 | 10 | 3 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | % | 20.58 | 21.73 | 26.89 | 29.38 | 32.53 | 27.02 | melampaui |
| 2 | 3 | 11 | | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 11 | 1 | Persentase koperasi aktif | % | 62.48 | 58.64 | 59.08 | 65.83 | 65.31 | 70 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 11 | 2 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.52 | 96 | melampaui |
| 2 | 3 | 12 | | Penanaman Modal dan Investasi | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 12 | 1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Triliun rupiah | 12.1 | 8.3 | 11.48 | 11.55 | 10.21 | 13.02 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 12 | 2 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Proyek | 192 | 281 | 326 | 911 | 1.548 | 774 | melampaui |
| 2 | 3 | 12 | 3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | Orang/ proyek | 55 | 29 | 16 | 18 | 8 | 12 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 12 | 4 | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi | Milyar Rupiah | 4.260 | -5.880 | -1.360 | 1.300 | 2.400 | 490,5 | melampaui |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| NO. | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|----|--|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | PMDN | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 13 | 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 7.1 | 8.49 | 8.31 | 9.61 | 9.46 | 9.06 | melampaui |
| 2 | 3 | 13 | 2 Persentase wirausaha muda | % | 19.8 | 21.78 | 25.74 | 19.8 | 18.3 | 14.6 | melampaui |
| 2 | 3 | 13 | 3 Cakupan pembinaan olahraga | % | 32 | 32 | 32 | 30 | 96 | 32 | melampaui |
| 2 | 3 | 13 | 4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi | % | 22.6 | 29.53 | 35.08 | 36.52 | 22.38 | 14.75 | melampaui |
| 2 | 3 | 13 | 5 Cakupan pembinaan atlet muda | % | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 2.65 | 8.42 | 8.22 | melampaui |
| 2 | 3 | 13 | 6 Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 46 | 76 | 81 | 81 | 246 | 93 | melampaui |
| 2 | 3 | 13 | 7 Jumlah prestasi olahraga | Medali | 17 | 14 | 16 | 81 | 317 | 16 | melampaui |
| 2 | 3 | 14 | Statistik | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 14 | 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 14 | 2 Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka" | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 14 | 3 Buku PDRB | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 3 | 15 | Persandian | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 15 | 1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 3 | 16 | Kebudayaan | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 16 | 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 15 | 19 | 22 | 9 | 7 | 81 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 3 | 16 | 2 | Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Buah | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 16 | 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Buah | 3 | 6 | 6 | 21 | 5 | 22 | belum tercapai |
| 2 | 3 | 17 | | Perpustakaan | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 17 | 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 440.579 | 513.408 | 621.306 | 732.403 | 1.098.180 | 100.000 | melampaui |
| 2 | 3 | 17 | 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Exp. | 350.802 | 360.902 | 571.002 | 581.201 | 582.490 | 300.000 | melampaui |
| 2 | 3 | 17 | 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Unit/Jiwa | 0.326 | 0.336 | 0.346 | 0.428 | 0.428 | 0.00000034 | melampaui |
| 2 | 3 | 17 | 4 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 280.570 | 300.575 | 380.579 | 390.672 | 394.251 | 250.000 | melampaui |
| 2 | 3 | 17 | 5 | Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 1.800 | 2.300 | 2.900 | 3.500 | 4.750 | 1.000 | melampaui |
| 2 | 3 | 18 | | Kearsipan | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 18 | 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 54 | 58 | 62 | 65 | 56 | 20 | melampaui |
| 2 | 3 | 18 | 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 3250 | 3620 | 3700 | 4200 | 368 | 100 | melampaui |
| 2 | 4 | | | PELAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | Pariwisata | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | kunjungan | 7.128.826 | 8.426.528 | 8.367.748 | 8.393.024 | 8.681.275 | 7.500.000 | melampaui |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | Kunjungan | 191.773 | 236.491 | 255.747 | 263.293 | 174.817 | 106.584 | melampaui |
| 2 | 4 | 1 | 3 | Lama kunjungan Wisata | Hari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | sesuai |
| 2 | 4 | 1 | 4 | PAD Sektor Pariwisata | Rupiah | 491.991.725 | 383.640.000 | 451.750.000 | 375.900.000 | 401.800.000 | 653.602.725 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 2 | | Pertanian | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | % | 23.14 | 23.43 | 23.13 | 22.52 | 21.28 | 23.81 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 2 | 2 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | % | 3.3 | 3.94 | 4.07 | 3.9 | 3.4 | 6.37 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 2 | 3 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | % | 4.55 | 4.45 | 4.26 | 4.26 | 3.88 | 4.55 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 2 | 4 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan) | % | 89.78 | 90.48 | 90.18 | 90.9 | 87.71 | 90 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 2 | 5 | Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan) | % | - | - | - | - | 85.97 | 85.97 | sesuai |
| 2 | 4 | 2 | 6 | Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB | % | 1.18 | 1.11 | 1.1 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | sesuai |
| 2 | 4 | 2 | 7 | Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Ton | 121.141 | 119.811 | 126.958 | 136.712 | 150.454 | 149,800 | melampaui |
| 2 | 4 | 2 | 8 | Produktivitas Hasil Peternakan (Telur) | Ton | 133.6 | 143.847 | 151.1 | 170.766 | 171.985 | 135,100 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 2 | 9 | Produktivitas Hasil Peternakan (Susu) | Ton | 2.727 | 2.752 | 3.173 | 1.888 | 1.918 | 3,240 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|----|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 4 | 2 | 10 | Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB | % | 4.55 | 4.45 | 4.26 | 4.26 | 3.88 | 4.55 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 2 | 11 | Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB | % | 89.78 | 90.48 | 90.18 | 90.9 | 87.71 | 90 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 3 | | Kehutanan | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | 37.3 | 44.87 | 48.48 | 23.13 | 27.61 | 48.81 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 3 | 2 | Kerusakan Kawasan Hutan | % | 0.01203 | 0.0018 | 0.0092 | 14.49 | 17.43 | 0.01948 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 3 | 3 | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | % | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 75.67 | 76.45 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 4 | | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | Persentase rumah tangga pengguna listrik | % | 88.3 | 90.78 | 93.19 | 95.53 | 97.8 | 98 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 4 | 2 | Rasio ketersediaan daya listrik | % | 95 | 82 | 104 | 97 | 98 | 88.75 | melampaui |
| 2 | 4 | 4 | 3 | Persentase pertambangan tanpa ijin | % | 35.69 | 40.01 | 14.22 | 11.33 | 15.57 | 20 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 5 | | Perdagangan | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 5 | 1 | Eksport Bersih Perdagangan | US\$1000 | 1.359.698 | 1.071.936 | 1.101.321 | 1.353.590 | 1.463.153. | 63.745.8 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 5 | 2 | Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal | % | 0.92 | 0.94 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.89 | sesuai |
| 2 | 4 | 6 | | Perindustrian | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Kelompok | 978 | 1.065 | 1.121 | 1.156 | 1.189 | | belum tercapai |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 4 | 7 | | Transmigrasi | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 7 | 1 | Persentase transmigran swakarsa | % | 90.77 | 93.7 | 95.72 | 98.67 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 4 | 8 | | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 8 | 1 | Produksi perikanan | % | 113.1 | 112.1 | 102.8 | 80.2 | 82.5 | 20.32 | melampaui |
| 2 | 4 | 8 | 2 | Cakupan bina kelompok nelayan | % | 30.17 | 63.7 | 25.32 | 16.08 | 17.52 | 30.18 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 28.71 | 55.18 | 20.02 | 47.66 | 40 | 20.32 | melampaui |
| 2 | 4 | 8 | 4 | Nilai Tukar Nelayan | % | 76.51 | 109.05 | 145.82 | 107.8 | 107.17 | 107.79 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 8 | 5 | Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 41.7 | 42 | 48.4 | 48.92 | 58.69 | 49.1 | belum tercapai |
| 2 | 4 | 8 | 6 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial | Angka | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1.01 | 1.01 | 0.26 | melampaui |
| 2 | 4 | 8 | 7 | Volume produksi perikanan tangkap | Ton | 3.476.546.8 | 3.629.268.0 | 3.902.783.4 | 3.568.952.6 | 3.662.761.4 | 366.356 | melampaui |
| 2 | 4 | 8 | 8 | Konsumsi Ikan | % | 110 | 115.1 | 119.7 | 120.2 | 120.71 | 53.6 | melampaui |
| 2 | 5 | | | Penunjang Urusan | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) | |
|-----|---|---|---|--|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|--------|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 5 | 1 | 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 5 | 1 | 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai |
| 2 | 5 | 1 | 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 100 | 100 | 93.74 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 5 | 1 | 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 5 | 1 | 7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 5 | 2 | | Keuangan | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Hasil Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | sesuai |
| 2 | 5 | 2 | 2 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | % | 53,56 | 48,16 | 40,62 | 42,67 | 42,00 | 43,22 | belum tercapai | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 2.89 | 1.78 | 1.78 | 1.99 | 0.58 | 2 | melampaui | |
| 2 | 5 | 2 | 4 | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 24.34 | 28.82 | 42.53 | 35.6 | 42.19 | 20 | melampaui | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 5 | 2 | 5 | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 11.97 | 10.3 | 10.03 | 8.54 | 9.01 | 10 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 2 | 6 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (tidak sesuai perhitungan 100%) | Rasio | 39.46 : 60.54 | 36.36 : 63.64 | 34.24 : 65.64 | 25.75 : 74.25 | 28.96 : 71.04 | 30.0 : 70.0 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 2 | 7 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 19.17 | 19.52 | 16.86 | 13.93 | 17.49 | 15 | melampaui |
| 2 | 5 | 2 | 8 | Penetapan APBD | Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | sesuai |
| 2 | 5 | 3 | | Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | JP/ Tahun | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 3 | 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 3 | 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 5.8 | belum tercapai |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----|---|---|---|--|---------|---------|-------|--------|-------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2 | 5 | 3 | 4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Jabatan | 64 | 64 | 60 | 60 | 59 | 60 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 3 | 5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Jabatan | 7.793 | 7.587 | 8.877 | 8.546 | 8.536 | 8.887 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 3 | 6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 2.424 | 2.4 | 17.485 | 16.67 | 16.243 | 16.535 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 4 | | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai |
| 2 | 5 | 4 | 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 53 | 56 | 24 | 42 | 46 | 100 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 4 | 3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 29 | 20 | 49 | 50 | 50 | 20 | belum tercapai |
| 2 | 5 | 4 | 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % | 12 | 13 | 22 | 25 | 50 | 50 | sesuai |
| 2 | 5 | 5 | | Pengawasan | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | % | 78.18 | 74.09 | 67.91 | 71.72 | 74.43 | 73 | melampaui |
| 2 | 5 | 5 | 2 | Persentase pelanggaran pegawai | % | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | melampaui |
| 2 | 5 | 5 | 3 | Jumlah temuan BPK | Kasus | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16 | melampaui |
| 2 | 5 | 6 | | Sekretariat Dewan | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Capaian | | | | | Standar (Target RPJMD 2019) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) | |
|-----|---|---|---|--|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 2 | 5 | 6 | 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai | |
| 2 | 5 | 6 | 2 | Tersusun dan terintegrasi Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan.Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai | |
| 2 | 5 | 6 | 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai | |
| 3 | | | | ASPEK DAYA SAING | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | Indeks Layanan Infrastruktur | Angka | N/A | N/A | N/A | 58.77 | 60.62 | 60.62 | sesuai | |
| 3 | 2 | | | Produktivitas Total Daerah | Angka | N/A | 69.415.383.97 | 75.757.358.34 | 77.532.636.41 | 82.027.871.33 | - | melampaui | |
| 3 | 3 | | | Rasio Ketergantungan | Angka | 0.529 | 0.525 | 0.521 | 0.518 | 0.515 | - | melampaui | |

2.6 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Kinerja pemenuhan SPM Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.262.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Capaian SPM | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Pendidikan | | | | | | | |
| Pendidikan Menengah | | | | | | | |
| Percentase jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 100% | 70.12 | 70.46 | 70.54 | 74.23 | 75.25 | |
| Pendidikan Khusus | | | | | | | |
| Percentase jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus | 100% | NA | NA | NA | 80 | 81 | |
| Kesehatan | | | | | | | |
| Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi | | | | | | | |
| Percentase warga Negara terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | 75% | 80% | 85% | 87,71% | 89,84% | |
| Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | | | | | | |
| Percentase warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Pekerjaan Umum | | | | | | | |
| Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat | | | | | | | |
| Percentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Capaian SPM | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | |
| Persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat | | | | | | |
| Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya | 70% | 51,18% | 56,06% | 57,22% | | |
| Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | |
| Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi | | | | | | |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | 100% | 35 | 55 | 75 | 80 | 89 |
| Sosial | | | | | | |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti | | | | | | |
| Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100% | 6.42% | 6.26% | 6.42% | 2.1 % | 20.83% |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti | | | | | | |
| Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100% | 9.15% | 8.52% | 8.91% | 1.6% | 28.83% |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti | | | | | | |
| Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100% | 4.97% | 4.97% | 4.97% | 1.08 % | 6.97 |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti | | | | | | |
| Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100% | 6.37% | 0 | 8.13% | 4.5% | 11.35 |
| Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi | | | | | | |
| Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100% | 75.09% | 80.16% | 82.32% | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Capaian SPM | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Sosial | | | | | | |
| Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar | 80% | 27.80% | 47.42% | 35% | 70.48 | 57.11 |
| Persentase Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial | 60% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial | | | | | | |
| Persentase Panti Sosial skala provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 80% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti | 60% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penanggulangan Korban Bencana | | | | | | |
| Persentase Kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi | 80% | 70.25 | 75.09 | 82.15 | 66.67 | 66.67 |
| Persentase Kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi | 80% | 75.09 | 80.16 | 82.32 | 46% | 66.65 |
| Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial | | | | | | |
| Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial | 40% | Lanjut Usia : 4,97% |
| | 40% | Disabilitas : 6,42% | Disabilitas : 6,26% | Disabilitas : 6,42% | Disabilitas : 6,42% | Disabilitas : 6,42% |

2.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat provinsi. Target-target SDGs di tingkat provinsi telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mencapai target nasional sejumlah 17 Tujuan (Goals) sejumlah 75 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi sejumlah 235 indikator, namun untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melaksanakan sekitar 120 indikator dari berbagai OPD yang terkait. Capaian target indikator 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Tabel II.263.
Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|-----------------------|----------------------|------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur * | 7-8% | 8,87% | 9,24 | 9,48 | 8,87 | 8,56 | Dinas Sosial |
| 1.2 | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan ** | 90% | 75% | 70% | 75% | 85,76% | 87,02 | Dinas Kesehatan |
| 1.3 | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas ** | 17,12% | 11,73% | 11,73 | 6,00 | 0,03 | 5,54 | Dinas Sosial |
| 1.4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan ** | 2,8 Juta Rumah Tangga | 178.594 Rumah Tangga | 100.473 | 182.057 | 314.420 | 232.935 | Dinas Sosial |
| 1.5 | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah)* | 70% | 81% | 67,63% | 76,90% | 76,85% | 83,84% | Dinas Kesehatan |
| 1.6 | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) * | 63% | 63% | 62,29% | 47,68% | 56,56% | 95,5% | Dinas Kesehatan |
| 1.7 | Prevalensi penggunaan metode | 65% | 68% | 55,30% | 54,44% | 53,87% | 73% | Dinas Kesehatan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|--|-----------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) * | | | | | | | |
| 1.8 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) * | 100% | 100% | 65,54% | 66,68% | 70,82% | 85,84% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.9 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) * | 100% | 100% | 63,50% | 62,84% | 69,40 | 80,54% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.10 | Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) * | | | 63,50% | 62,84% | 69,41% | 80,54% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.11 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C * | 91,63% | 63,50% | 59,62 | 59,86 | 60,03 | 60,14 | Dinas Pendidikan |
| 1.12 | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah) * | 77,4% | 77,4% | 78,48% | 80,37% | 82,24% | 86,18% | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1.13 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah) * | 100% | 95% | 95,26% | 97,04% | 97,04% | 98,36% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1.14 | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang ** | Menurun | 5.598 Jiwa | 14.472 | Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7 | Meninggal=0,005 Terdampak=5.403 | Meninggal=0,03 Terdampak=153,81 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.15 | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah ** | 39 Daerah | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.16 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah ** | Ada | 1 Dokumen | N/A | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.17 | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan ** | Meningkat | 435 | 476 | N/A | N/A | N/A | Dinas Sosial |
| 2 | Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | | | | | | | |
| 2.1 | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (Kekurangan gizi) * | 17% | 22,1% | 25,11% | 22,80% | 23,00% | 15,30% | Dinas Kesehatan |
| 2.2 | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan ** | Menurun | 48,9% | N/A | 40% | N/A | N/A | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 2.3 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari ** | 8,5% | 15,87% | 14,34 | 8,11 | 9,44 | 9,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 2.4 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita ** | Menurun | 33,86% | 36% | 35% | 35,7% | 30,59 | Dinas Kesehatan |
| 2.5 | Prevalensi stunting (pendek dan | | | 36% | 35% | 35,6% | 14% E-PPGBM | Dinas Kesehatan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------|--------|--------------|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta ** | 28% | 33,87% | | | | | |
| 2.6 | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe ** | Menurun | 7,25% | 9,4% | 8,7% | 12,3% | 5,8% e-PPGBM | Dinas Kesehatan |
| 2.7 | Prevalensi anemia pada ibu hamil** | 28% | 28,5% | 15% | 13,4% | 15,5% | 17,64 | Dinas Kesehatan |
| 2.8 | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif * | 50% | 44% | 57,11% | 61,09% | 52,19% | 70,82 | Dinas Kesehatan |
| 2.9 | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan ** | Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/thn | 57,67 | 79,90 | 92,60 | 82,60 | 83,40 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 3 | Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | | | | | | | |
| 3.1 | Angka Kematian Ibu (AKI) ** | 306 | 104 | 156 | 115 | 139 | 144 | Dinas Kesehatan |
| 3.2 | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih * | 95% | 96% | 93,53% | 95,31% | 95,81% | 97,21 | Dinas Kesehatan |
| 3.3 | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan * | 85 % | 81% | 93,53% | 95,31% | 95,81% | 97,21 | Dinas Kesehatan |
| 3.4 | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup ** | Menurun | | 8,2 | 7,67 | 6,26 | 6,2 | Dinas Kesehatan |
| 3.5 | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup ** | Menurun | | 5,64 | 5,44 | 6,21 | 5,86 | Dinas Kesehatan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|--|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------|-------|----------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 3.6 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup ** | 24 | | 7,94 | 7,05 | 5,76 | 5,69 | Dinas Kesehatan |
| 3.7 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi * | 95% | 85% | 100% | 100% | 79,17 | 96,15 | Dinas Kesehatan |
| 3.8 | Prevalensi HIV pada populasi dewasa ** | <0,5% | <0,5% | 0,28 | 0,33 | 0,013 | 0,019 | Dinas Kesehatan |
| 3.9 | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk ** | 245 | 158 | 155 | 155 | 196 | 216 | Dinas Kesehatan |
| 3.10 | Kejadian Malaria per 1000 orang * | Menurun | <1 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | Dinas Kesehatan |
| 3.11 | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria ** | 300 | 5 | 14 | 4 | 18 | 2 | Dinas Kesehatan |
| 3.12 | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B ** | | 30% | 17 | 50 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3.13 | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) ** | Menurun | 338.635 | 283.942 | 333.251 | 91 | 81 | Dinas Kesehatan |
| 3.14 | Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta ** | 34 Provinsi | 14 Kab/Kota | 12 | 11 | 13 | 11 | Dinas Kesehatan |
| 3.15 | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) ** | 35 Kab/Kota | 1 Kab/Kota | - | - | 3 | - | Dinas Kesehatan |
| 3.16 | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun ** | 5,4% | 6% | - | 1,30 | 2,37 | 3,10 | Dinas Kesehatan |
| 3.17 | Prevalensi tekanan darah tinggi ** | 24,3% | 19,82% | 20,08% | 5,02% | 4,4% | 4,7 | Dinas Kesehatan |
| 3.18 | Prevalensi obesitas pada penduduk | 15,4% | 13,60% | 10,11 | 3,17 | 4,22 | 4,35 | Dinas Kesehatan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------|-------|----------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | umur ≥ 18 tahun ** | | | | | | | |
| 3.19 | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri ** | Menurun | 3,7 | NA | 0,1 | NA | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.20 | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa ** | 280 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 24 | 24 | 18 | 18 | Dinas Kesehatan |
| 3.21 | Prevalensi penyalahgunaan narkoba ** | 0,02% | 1,95% | - | 1,95% | 1,90% | 2,10 | Dinas Kesehatan |
| 3.22 | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern ** | 66% | 1.495.547 | - | 1.387.345 | 97,15 | 97,49 | Dinas Kesehatan |
| 3.23 | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin ** | 65% | 68% | 72,39% | 72,67% | 73,28% | 73 | Dinas Kesehatan |
| 3.24 | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern 8** | 23,5% | 11% | 12,47 | 14 | 14,98 | 17,13 | Dinas Kesehatan |
| 3.25 | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk ** | Meningkat | 700 Jiwa | 600 | 750 | 8.138 | 8.200 | Dinas Kesehatan |
| 3.26 | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ** | 95% | 75% | 70 | 75 | 85,76 | 87,02 | Dinas Kesehatan |
| 3.27 | Persentase ketersediaan obat dan | Meningkat | 83% | 83 | 85 | 87,08 | 90 | Dinas Kesehatan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | vaksin di Puskesmas ** | | | | | | | |
| 3.28 | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan ** | Meningkat | 357 | 296 | 296 | 386 | 332,4 | Dinas Kesehatan |
| 4 | Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | | | | | | | |
| 4.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat * | 91,63% | 78,03% | 83,66% | 83,14% | 81,74% | 86,09% | Dinas Pendidikan |
| 4.2 | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun * | 8,8 Tahun | 8,11 Tahun | 8,13 Tahun | 8,42 Tahun | 8,45 Tahun | 8,73 Tahun | Dinas Pendidikan |
| 4.3 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat * | Meningkat | 101 | 100,83 | 100,09 | 100,25 | 101,32 | Dinas Pendidikan |
| 4.4 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat * | Meningkat | 105,4 | 105,19 | 104,15 | 102,64 | 100,79 | Dinas Pendidikan |
| 4.5 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat * | Meningkat | 100 | 102,04 | 110,66 | 108,97 | 106,11 | Dinas Pendidikan |
| 4.6 | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun * | 96,1% | 93,78% | 91,52% | 91,65% | 91,81% | 92,45% | Dinas Pendidikan |
| 4.7 | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun ** | Meningkat | 93,78% | 99,34% | 99,34% | 99,48% | 99,68% | Dinas Pendidikan |
| 4.8 | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun * | Meningkat | 93,78% | 95,51% | 95,25% | 95,37% | 95,78% | Dinas Pendidikan |
| 5 | Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | | | | | | | |
| 5.1 | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan ** | 16 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 5.2 | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif ** | 70% | 70% | 90 | 100% (56 kasus) | 100% (74 kasus) | 100% (132 kasus) | Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 5.3 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah ** | 16,6% | 60 orang | 60 | 17 | 17 | 19 | Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 6 | Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak * | 100% | 100% | 76,05% | 76,52% | 79,52% | 89,77% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6.2 | Kualitas Air Danau** | Meningkat | Meningkat | 40,25 | 55,05 | Hanya mendata 1 titik | Tidak melakukan perhitungan | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 6.3 | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku** | Meningkat | Meningkat | 10 | 12 | 34,64 | 33,3 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 6.4 | Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi** | 5,5 Juta Ha (Skala Nasional) | 6.000 Ha | 27.069 | 11.461 | 385 Ha | 20.508 Ha | Dinas Kehutanan |
| 7 | Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelaanjutan dan Modern untuk Semua | | | | | | | |
| 7.1 | Rasio elektrifikasi ** | 96,6% | 96,6% | 94,53 | 97,33% | 97,80 | 98,00 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 8 | Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | | | | | | | |
| 8.1 | Laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan * | Meningkat | 9,29% | 6,34% | 6,17% | 6,06% | 5,96% | Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 8.2 | PDRB per kapita atas dasar harga berlaku * | 50 Juta | 57,64 Juta | 43,82juta | 47,82 juta | 52,64 juta | 57,03 juta | Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 8.3 | Percentase tenaga kerja formal* | 51% | 44,97% | 35,11% | 37,63% | 36,68% | 39,45% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.4 | Percentase tenaga kerja informal sektor pertanian * | Meningkat | 39,42% | 92,49% | 93,43% | 93,07% | 92,48% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.5 | Percentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan ** | 25% | 20% | 20,30 | 20 | 20 | 28,3 | Dinas Koperasi & UMK |
| 8.6 | Tingkat pengangguran terbuka * | Menurun | 4,56% | 4,80% | 5,61% | 4,94% | 4,62% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.7 | Tingkat setengah pengangguran* | Menurun | Menurun | 7,82% | 9,52% | 7,37% | 7,34% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.8 | Percentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) ** | Meningkat | Meningkat | 22,21% | 42,43% | 40,35% | 40,22% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.9 | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB ** | 8% | 8% | 1,32 | 1,37 | 1,41 | 2,85 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan |
| 8.10 | Jumlah wisatawan mancanegara ** | 20 Juta (skala nasional) | 151.763 Wisman | 236.491 | 255.747 | 263.293 | 115.000* | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan |
| 8.11 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ** | Meningkat | 6.000.000 | 8.426.528 | 8.367.748 | 9.616.232 | 6.256.376* | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan |
| 8.12 | Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ** | Meningkat | Meningkat | 12,28% | - | 3,55 | 3,73 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.13 | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit ** | Meningkat | 20% | 20,30 | 20 | 20 | 20 | Dinas Koperasi & UMKM |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 9 | Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | | | | | | | |
| 9.1 | Panjang jalur kereta api ** | 3.258 Km | 145 Km | 16,1 | 16,1 | 42,85 | 47,85 | Dinas Perhubungan |
| 9.2. | Proporsi Individu yang menguasai/memiliki Telepon Gengam * | | 68% | 58,50% | 60,30% | 63,85% | 65,07% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian |
| 9.2 | Jumlah dermaga penyeberangan ** | 275 Unit | 80 Unit | 80 | 80 | 87 unit | 87 unit | Dinas Perhubungan |
| 9.3 | Jumlah pelabuhan strategis ** | 24 Pelabuhan (skala nasional) | 19 Pelabuhan (skala nasional) | 19 Pelabuhan | 19 Pelabuhan | 20 pelabuhan | 20 pelabuhan | Dinas Perhubungan |
| 9.4 | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita ** | Meningkat | 14,25% | 13,92% | 13,95% | 12,87 | 13,56 | Dinas Perindustrian |
| 9.5 | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur ** | Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB | 9,25% | 13,92% | 13,95% | 5,56% | 5,36% | Dinas Perindustrian |
| 9.6 | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur ** | Meningkat | 287.269 | 296.882 | 262.936 (7,31%) | 9,05% | 8,93% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 9.7 | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry ** | Meningkat | 53% | 52% | 54,5% | 14,4% | 20% | Dinas Perindustrian |
| 9.8 | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca ** | 26% | 22,5% | 7,5 | - | 11,41% | 6,4% | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 10 | Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara | | | | | | | |
| 10.1 | Koefisien Gini* | 0,36 | 0,385 | 0,400 | 0,429 | 0,390 | 0,390 | Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 10.2 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Sulawesi Selatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur * | 7-8% | 7% | 9,40 | 9,38 | 9,06 | 8,69 | Dinas Sosial |
| 10.3 | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal ** | Meningkat | Meningkat | 8,32 | 8,25 | 6,29 | 5,97 | BPS |
| 10.4 | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal ** | 14% | 14% | 15,49% | 15,4% | 15,48% | 14,88% | BPS |
| 11 | Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan ** | 32% | 22,8% | 21,20% | 22,80% | NA | NA | Dinas Perhubungan |
| 11.2 | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ** | 5 Metropolitan (skala nasional) | 1 Metropolitan | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 11.3 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang ** | Menurun | 5.598 Orang | | Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7 | Meninggal=0,005 Terdampak=5.403 | Meninggal=0,03 Terdampak=153,81 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.4 | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ** | 30% | 24% | 164,65 | 162,59 | 160,05 | Belum rilis dari pusat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5 | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan ** | Ada | 75 | - | - | NA | NA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.6 | Persentase sampah perkotaan yang tertangani ** | 80% | 80% | 16,54 | 17,53 | 44,20% | 51,93% | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 11.7 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah** | Ada | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 12 | Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | | | | | | | |
| 12.1 | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah | 150 Juta Ton (skala | | 677,87 Ton/ Periode | 743,29 Ton/ Periode | 4,365,759,985 ton/periode | 5,373,629,74ton/pe riode | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | sesuai peraturan perundangan (sektor industri) ** | nasional) | | | | | | |
| 12.2 | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang ** | 20 Ton/Hari (skala nasional) | 20 Ton/Hari | 15,15 Ton/ | 15,29 Ton/ | 15,42/ton | 45,44 ton/hari | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 13 | Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | | | | | | | |
| 13.1 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah ** | Ada | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 13.2 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang ** | Menurun | 5.598 Orang | 17.472 Orang | Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7 | Meninggal=0,005 Terdampak=5.403 | Meninggal=0,03 Terdampak=153,81 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 13.3 | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) ** | Ada | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 14 | Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan | | | | | | | |
| 14.1 | Jumlah nelayan yang terlindungi ** | Meningkat | 37.648 Nelayan | 35.000 Nelayan | 37.450 Nelayan | 48.857 Nelayan | 60.824 Nelayan | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 15 | Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | |
| 15.1 | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan ** | Meningkat | 55,65 | 59,56 | 59,56 | 59,56% | 57,03% | Dinas Kehutanan |
| 15.2 | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan ** | Meningkat | 22 KPH | 9 KPH | 16 KPH | 16 KPH | 16 KPH | Dinas Kehutanan |
| 15.3 | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati ** | Meningkat | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 dok | 1 dok | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 16 | Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | | | | | | |
| 16.1 | Proporsi pengeluaran utama | | Rp. | Rp. | Rp. | | | Badan Pengelola |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|--|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | pemerintah terhadap anggaran yang disetujui ** | Meningkat | 190.759.499.612 | 3.583.608.000 | 3.670.839.640,8 | | | Keuangan Daerah |
| 16.2 | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ** | 75% | BB | CC | B | B | B | Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda |
| 16.3 | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan ** | 80% | 100% (602 Paket/ Kegiatan) | 100% (525) | 100% (507) | 100% | 100% | Biro Pembangunan Setda |
| 16.4 | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ** | Meningkat | 60 Orang | 60 Orang | 17,64 | 17,64 | 28,91 | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak |
| 17 | Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | | | | | | | |
| 17.1 | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ** | Meningkat | Rp. 9.292.958.272.501 | Rp. 7.162.588.691.182,52 | Rp. 9.055.278.907.514,25 | Rp 9.252.221.942.175,45 | Rp 9.574.846.121.830,84 | Badan Pendapatan Daerah |
| 17.2 | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan ** | Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% | 71% | 63% | NA | NA | NA | Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Capaian TPB/SDGs | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------|------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | populasi | | | | | | | |
| 17.3 | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistic * | Meningkat | PM | - | 92,71 | 96,2 | 100 | BPS |
| 17.4 | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama * | Meningkat | PM | 90,00 | 85,13% | 92,26 | 93 | BPS |
| 17.5 | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) ** | Meningkat | 1 | 9 | 1 | NA | NA | BPS |
| 17.6 | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) ** | Ada | ada | - | Ada | ada | ada | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 17.7 | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website ** | Meningkat | PM | 45,247 User | 27,712 User | NA | NA | BPS |
| 17.8 | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) * | Meningkat | PM | 95,94 | 90,46 | 88,69 | 97 | BPS |

Sumber : * Indikator Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan, BPS, 2020

** OPD terkait, 2020

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama periode Gubernur Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018-2019, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dalam rangka me lakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran antar kelompok belanja, anggaran unit organisasi dan antar program dan kegiatan, serta antar jenis belanja.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, selama tahun 2017-2019 dan perbandingannya terhadap kinerja pelaksanaan APBD akhir tahun periode pemerintahan sebelumnya (tahun 2017) dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja

prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

Perkembangan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017 s/d 2019 menunjukkan kinerja yang semakin membaik yang dengan ditandai peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 9,05 Triliun lebih, sedangkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 9,25 Triliun lebih atau mengalami kenaikan 2,17 persen. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 9,57 Triliun atau mengalami kenaikan 3,49 persen, dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahunan selama tahun 2017-2019 mencapai 2,83 persen.

Pendapatan daerah mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015–2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel III. 1
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019

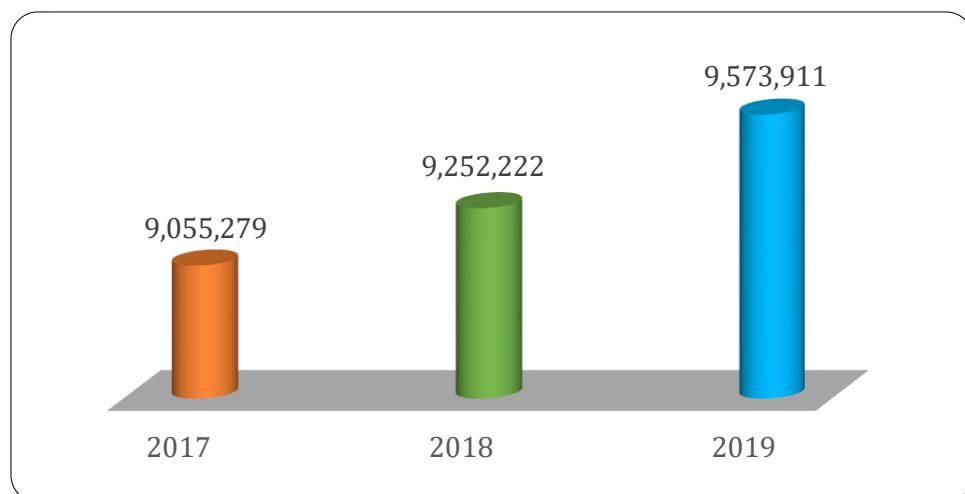
| No | Uraian | TAHUN (Rp.) | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan (%) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | PENDAPATAN | 3,203,572,392,133 | 7,156,582,691,183 | 9,055,278,907,514 | 9,252,221,942,175 | 9,573,910,861,960 | 12.35 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 368,585,808,042 | 3,443,555,308,105 | 3,679,083,943,914 | 3,948,349,252,423 | 4,138,631,215,914 | 6.06 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 2,902,246 | 3,079,662,364,379 | 3,241,746,521,290 | 3,462,184,656,928 | 3,710,611,599,841 | 6.34 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah | 94,314,412,509 | 86,532,573,010 | 82,251,711,775 | 70,370,128,268 | 40,884,402,523 | -17.39 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan | 88,982,067,487 | 100,759,668,458 | 127,005,994,839 | 108,949,315,359 | 111,357,119,117 | 6.82 |
| 1.1.4. | Lain - Lain PAD Yang Sah | 185,286,425,800 | 176,600,702,258 | 228,079,716,010 | 306,845,151,868 | 275,778,094,433 | 12.29 |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 2,809,629,553,175 | 3,704,816,673,661 | 5,362,007,388,022 | 5,295,519,277,687 | 5,417,262,552,592 | 19.28 |
| 1.2.1. | Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak | 188,057,830,411 | 314,343,523,186 | 279,526,930,374 | 237,746,371,914 | 169,796,915,880 | 3.14 |
| 1.2.2. | Dana alokasi umum | 1,180,010,167,000 | 1,394,148,361,000 | 2,509,480,255,000 | 2,509,480,255,000 | 2,586,312,342,000 | 25.30 |
| 1.2.3. | Dana alokasi khusus | 1,436,561,555,764 | 1,991,324,789,475 | 2,565,500,202,648 | 2,540,292,650,773 | 2,632,211,446,712 | 17.52 |
| | Dana Insentif Daerah | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 7,500,000,000 | 8,000,000,000 | 28,941,848,000 | -10.83 |
| 1.3. | Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah | 25,357,030,916 | 8,210,709,417 | 14,187,575,578 | 8,353,412,065 | 18,017,093,454 | 106.55 |
| 1.3.1. | Hibah | 10,458,158,916 | 8,210,709,417 | 14,187,575,578 | 8,353,412,065 | 18,017,093,454 | 31.47 |
| 1.3.2. | Dana darurat | 14,898,872,000 | - | - | - | - | -25.00 |
| 1.3.3. | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya **) | 14,898,872,000 | - | - | - | - | -25.00 |
| 1.3.4. | Dana penyesuaian dan otonomi khusus ***) | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.3.5. | Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | - | - | - | - | - | 0.00 |

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

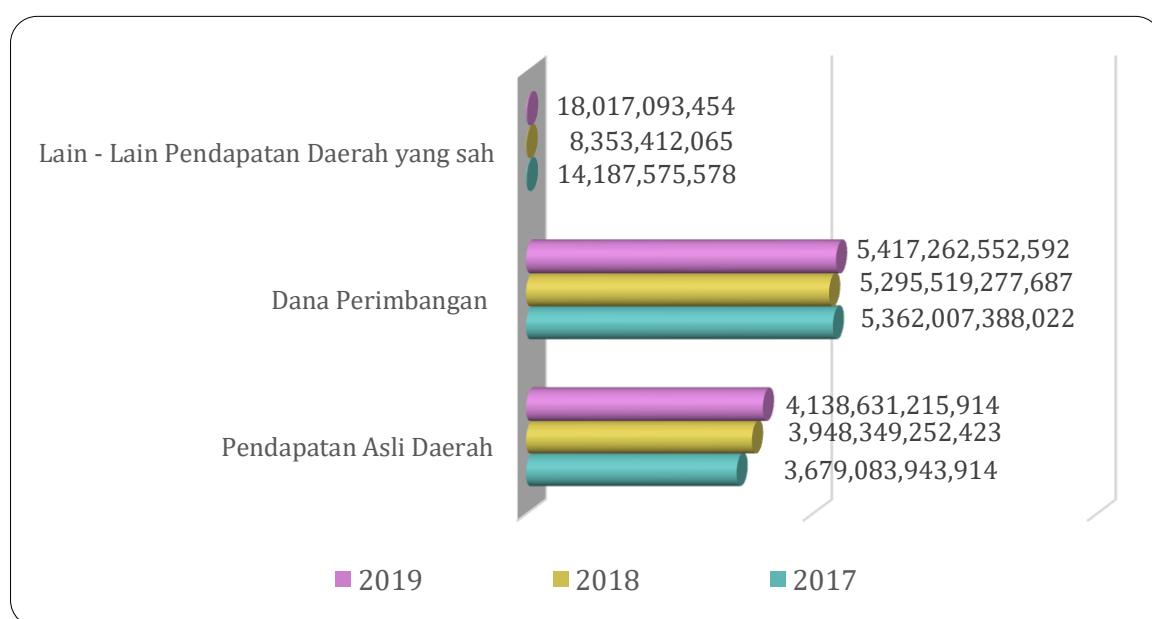
Meskipun kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer masih lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah hingga tahun 2019, namun rata-rata pertumbuhan pendapatan dari sumber PAD lebih tinggi (6,03 persen) dibanding rata-rata pertumbuhan dari sumber pendapatan dari dana transfer pusat (0,53 persen), sehingga pada tahun selanjutnya PAD dapat mendorong kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan yang akan semakin memperkokoh dalam struktur anggaran pendapatan daerah. Adapun kinerja pertumbuhan dan postur Pendapatan daerah secara berturut-turut terlihat pada grafik berikut.

Grafik III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, tahun 2020

Grafik III.2
Postur Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, tahun 2020

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

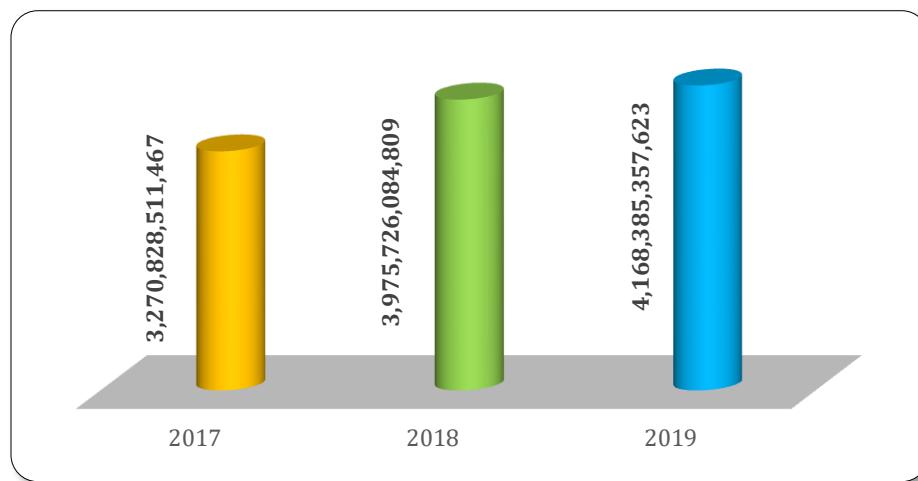
- 1) pendapatan asli daerah;
- 2) dana perimbangan; dan
- 3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembagiannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 nilai PAD Provinsi Sulawesi Selatan masih sekitar Rp 3,27 Trilyun lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp 4,16 Trilyun lebih. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Gambaran Perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.3
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2017-2019**

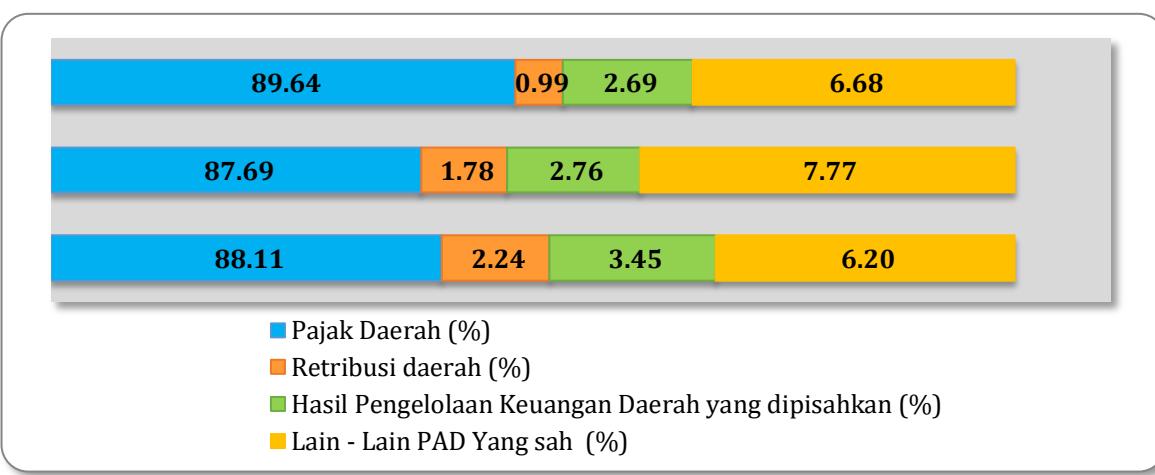


Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, tahun 2020

Dari segi Postur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun Anggaran 2017-2019 masih didominasi oleh kontribusi dari Pajak Daerah rata-rata (88,48 persen), diikuti dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah rata-rata (6,88 persen), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata (2,97 persen), dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah rata-rata (1,67 persen). Kontribusi Retribusi Daerah yang masih minim diikuti dengan penurunan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah yang signifikan hingga mencapai 28,18 persen.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Grafik III.4
Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

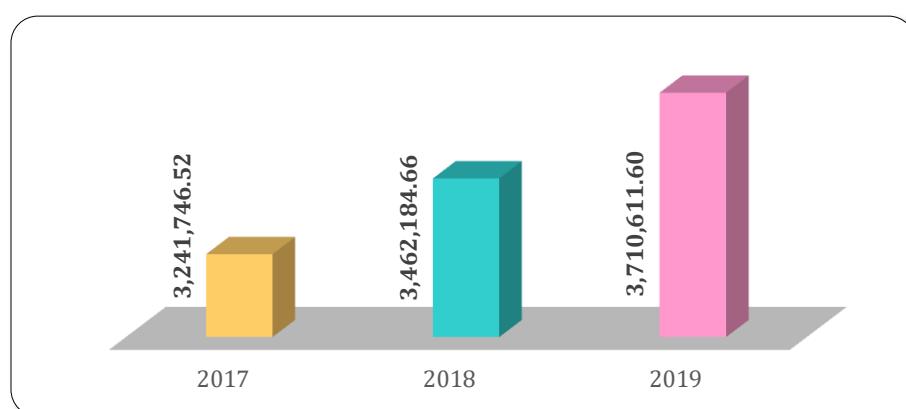
Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : **(a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.**

Pendapatan **Pajak daerah** meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**, **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**, **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**, **Pajak Air Permukaan** dan **Pajak Rokok**. Terhadap pungutan tersebut sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membagihasilkan sebagian perolehan pungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Saat ini Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 6,99 persen dalam kurun waktu 2017-2019.

Grafik III.5
Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019

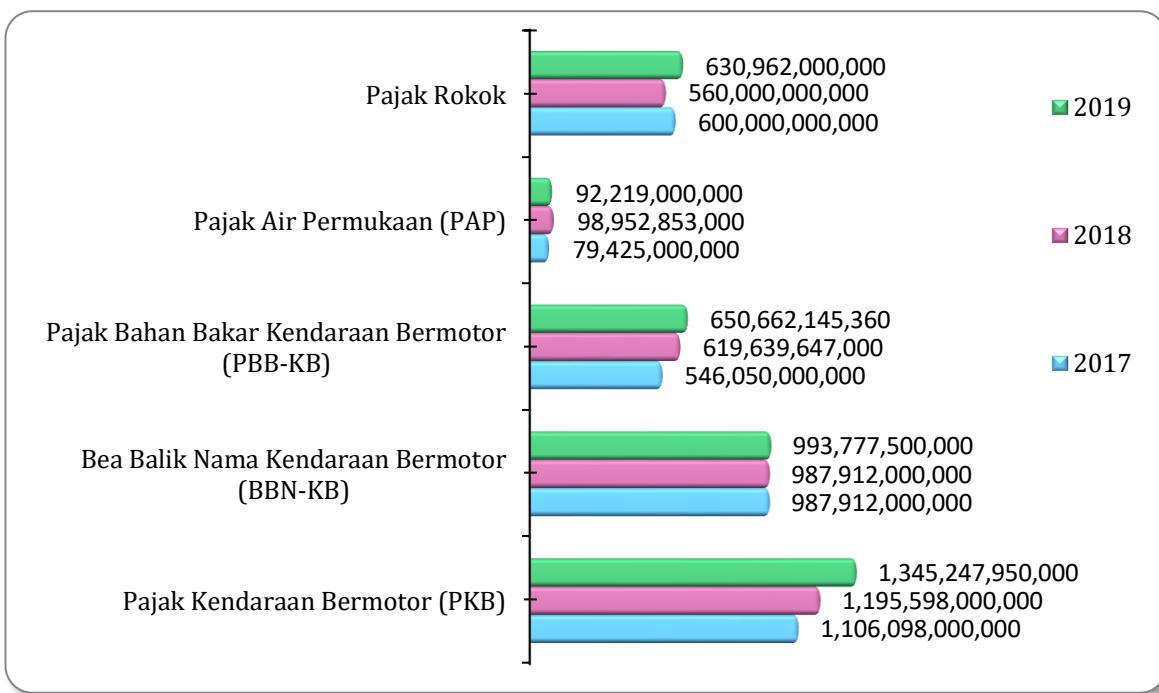


Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Dari segi Postur Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih mendominasi dalam pendapatan Pajak Daerah, seperti grafik dibawah ini.

Grafik III.6
Postur Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019

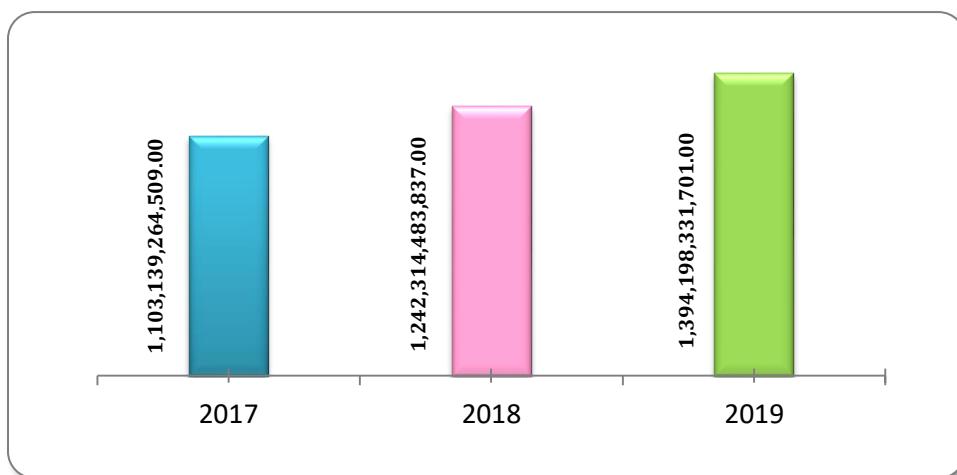


Sumber : Bapenda Prov. Sulse, 2020

Terkait Pajak kendaraan bermotor, adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Realisasi Pajak Kendaraan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disebabkan upaya intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor secara door to door, dan mengumumkan wajib pajak yang tidak patuh melalui media (naming and shaming). Serta beragamnya Inovasi layanan Samsat dan semakin optimalnya upaya pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik III.7
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019



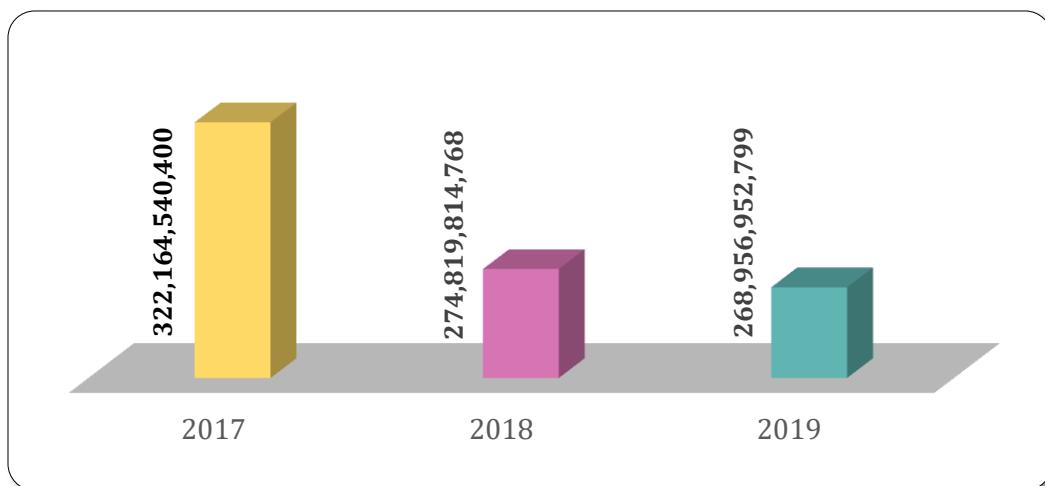
Sumber : Bapenda Prov. Sulse, 2020

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain sosialisasi kepada Masyarakat tentang kemudahan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

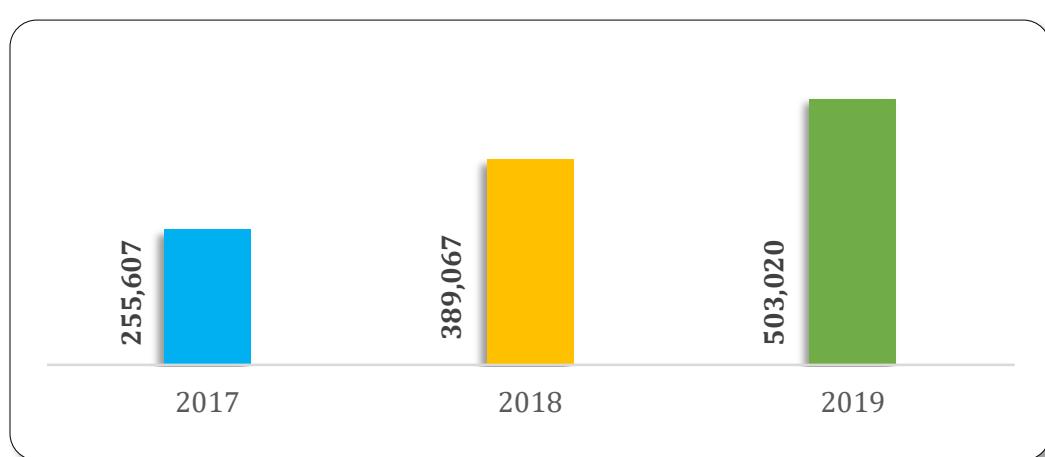
membayar pajak kendaraan bermotor, telah menunjukkan hasil dengan menurunnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat terlihat dari grafik berikut.

Grafik III.8
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan
Tahun 2017-2019



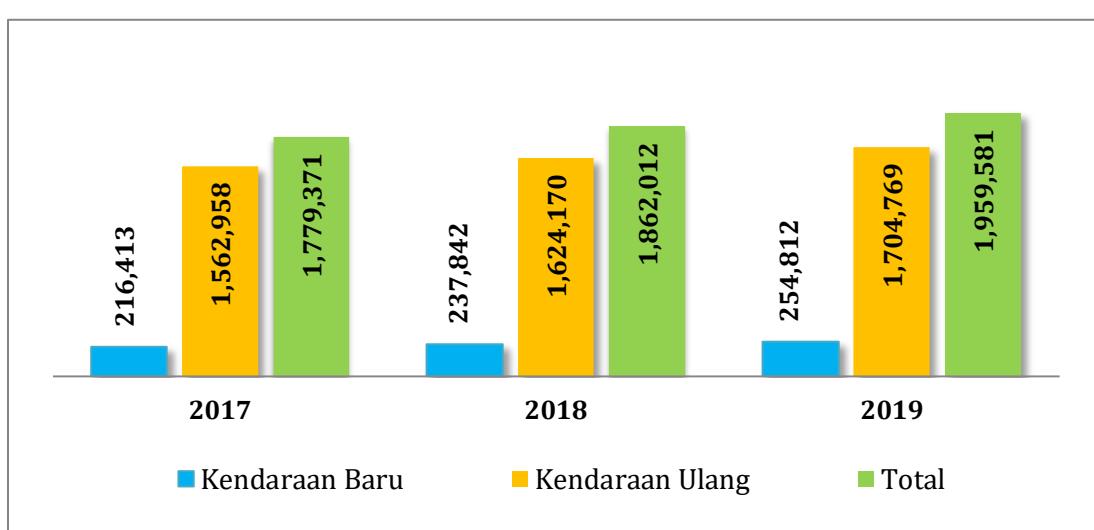
Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Grafik III.9
Perkembangan Unit Kendaraan Bermotor Yang Terbayar
Pada Layanan Unggulan Samsat se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Grafik III.10
Perkembangan Unit Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019



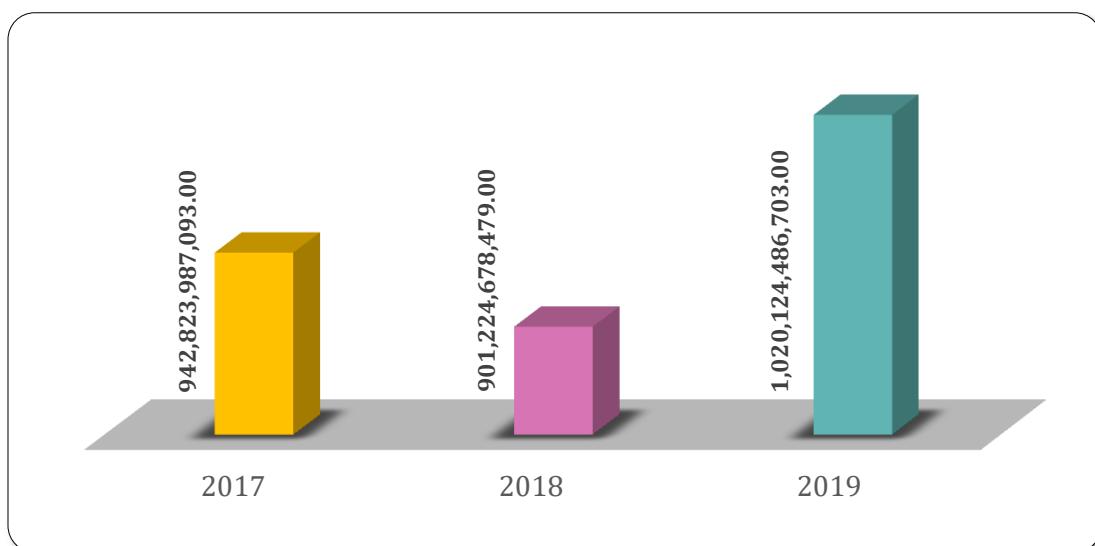
Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Khusus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), intensifikasi dilakukan dengan memperbarui regulasi tarif BBN kendaraan baru kepemilikan pertama dan meningkatkan koordinasi dengan para ATPM, dealer dan distributor kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat dan kendaraan berat. Mekanisme pembayaran BBNKB juga dimudahkan dengan dimungkinkannya pembayaran non tunai yang meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko bagi wajib pajak.

Selain upaya intensifikasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga aktif memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa insentif pajak daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Grafik III.11
Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor se Sulawesi Selatan
Tahun 2017-2019



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Berbeda dengan Pajak Kendaraan Bermotor, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama tahun 2017-2019 cenderung fluktuatif. Perbedaan tarif BBN antar wilayah Provinsi yang dimungkinkan dalam Undang-Undang memicu persaingan dan menguntungkan wilayah yang tarif BBNnya lebih rendah. Masyarakat yang mempunyai pilihan yang lebih murah dengan merek dan type kendaraan yang sama akan lebih memilih membeli kendaraan di luar Sulawesi Selatan dan menyebabkan plat dari luar daerah khususnya DKI Jakarta memenuhi jalan raya Sulawesi Selatan. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2018 kemudian dilakukannya penurunan tarif BBN pertama, yang dimaksudkan untuk mengurangi selisih harga jual kendaraan bermotor baru di Sulawesi Selatan. Kebijakan ini menuai hasil positif dan di tahun 2019 penerimaan BBNKB meningkat signifikan.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih menjadi tumpuan utama Pajak Daerah. Kedua jenis pajak ini dipungut dalam Kantor Bersama Samsat dan sejak tahun 2010 sampai sekarang telah dilakukan upaya modernisasi sistem dan layanan Samsat yang tujuannya adalah untuk meningkatnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara optimal selain untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Upaya modernisasi sistem diawali dengan perubahan aplikasi yang lebih up to date dan mendukung pengembangan lebih lanjut sekaligus meningkatkan kualitas dan keamanan database samsat. Selanjutnya dimulai mengkoneksikan pembayaran pajak antar masing-masing samsat secara online dalam seluruh wilayah Sulawesi Selatan sehingga wajib pajak dapat membayar pajak dimana saja tanpa terikat domisiliya.

Untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Samsat Sulawesi Selatan melakukan berbagai inovasi layanan modern antara lain membuka layanan pembayaran pajak di luar Kantor Samsat konvensional seperti layanan Samsat Keliling, Drive Thru, Gerai, dan Kedai Samsat. Selain itu juga dikembangkan layanan Samsat Care yang langsung mendatangi wajib pajak ditempat masing-masing dengan cukup menghubungi call center yang tersedia. Inovasi layanan Samsat lainnya adalah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi ASN melalui alternative pinjaman dan simpanan pajak dengan nama Sipijar. Inovasi layanan Samsat ini bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Pada tahap selanjutnya juga telah diterapkan pembayaran pajak secara non tunai di bank melalui ATM maupun mobile banking serta pembayaran pajak di gerai minimarket alfamart, alfamidi dan indomaret, berlakunya Samsat Online Nasional, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Selatan telah terintegrasi dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor provinsi lain dan dimungkinkan secara non tunai dari berbagai bank nasional dan swasta.

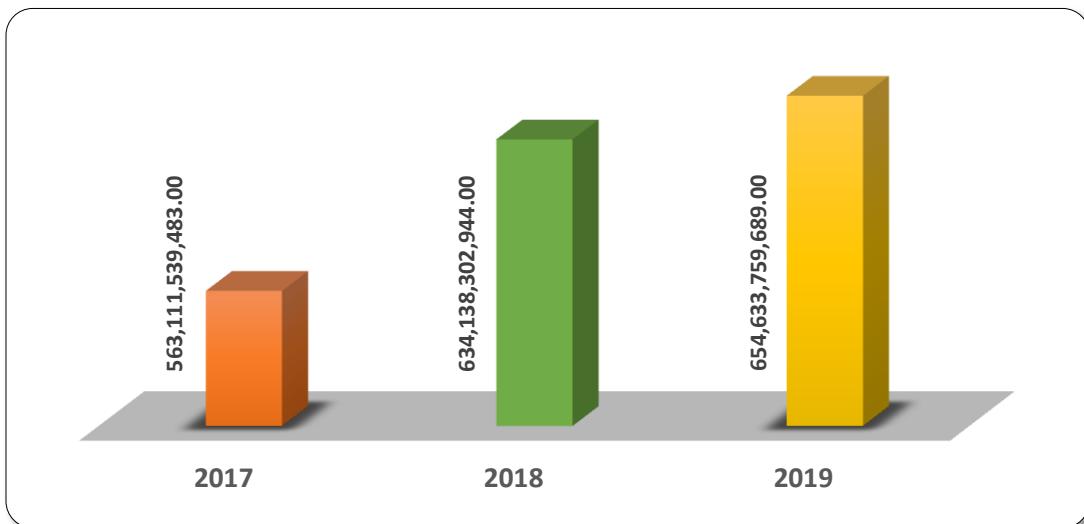
Berbagai jenis layanan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan wajib pajak yang menggunakan layanan unggulan Samsat mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2017 ke tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan terkait kendaraan dinas masing-masing yang belum menyelesaikan kewajibannya. Telah diterapkan pula Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang dikerjasamakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan setiap pemohon perizinan harus bebas dari tuggakan Pajak Daerah dan tidak dapat memperoleh izin yang diajukan sebelum menyelesaikan kewajibannya.

Di sisi penegakan hukum, upaya optimalisasi pajak dilaksanakan melalui kegiatan penertiban tuggakan Pajak Kendaraan Bermotor di jalan raya yang bekerjasama dengan Kepolisian Daerah dan menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dipersiapkan khusus untuk melakukan penagihan Pajak Daerah. Selain itu juga dilakukan pendataan dan penagihan di pusat keramaian atau mall dengan langsung menempelkan pemberitahuan tuggakan pajak di kendaraan bermotor yang bersangkutan yang biasa disebut Samsat Sipakainge.

Pada sektor **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** (PBBKB), strategi yang dilakukan adalah melalui penguatan regulasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Penguatan regulasi dilakukan melalui revisi peraturan teknis pemungutan PBBKB dan kerjasama dirintis dengan stakeholder terkait mengenai data PBBKB. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat PBBKB adalah pajak yang bersifat self assesment sehingga diperlukan informasi dan data yang akurat penyaluran BBM di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu telah digagas MOU antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan BPH Migas tentang pertukaran data penyaluran BBM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah pemberlakuan MOU dimaksud, telah diperoleh hasil yakni terdapat kenaikan 100 persen pengajuan wajib pungut PBBKB dari data sebelumnya. Realisasi PBBKB juga mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata realisasi pertumbuhan dari tahun 2017-2019 sebesar 7,9 persen sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

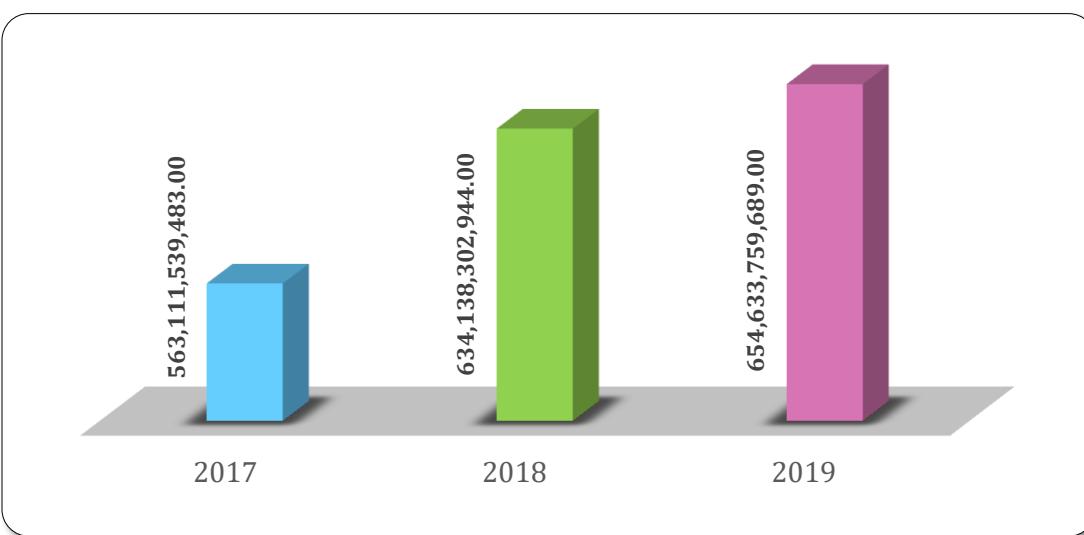
Grafik III.12
Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Pada jenis **Pajak Air Permukaan** juga telah dilakukan berbagai upaya optimalisasi. Diantaranya dengan pembentukan tim terpadu lintas SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan pendataan teknis dan perhitungan kembali kewajaran pembayaran Pajak Air Permukaan kepada wajib pajak air permukaan dan melakukan pendataan potensi Pajak Air Permukaan yang belum dipungut. Adanya tim terpadu telah berhasil meningkatkan jumlah wajib Pajak Air, tergambar dengan realisasi pajak air permukaan yang menunjukkan rata rata pertumbuhan realisasi pajak air permukaan sebesar 5,31 persen dari tahun 2017 ke tahun 2019 seperti digambarkan dalam Grafik berikut.

Grafik III.13
Realisasi Pajak Air Permukaan se Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

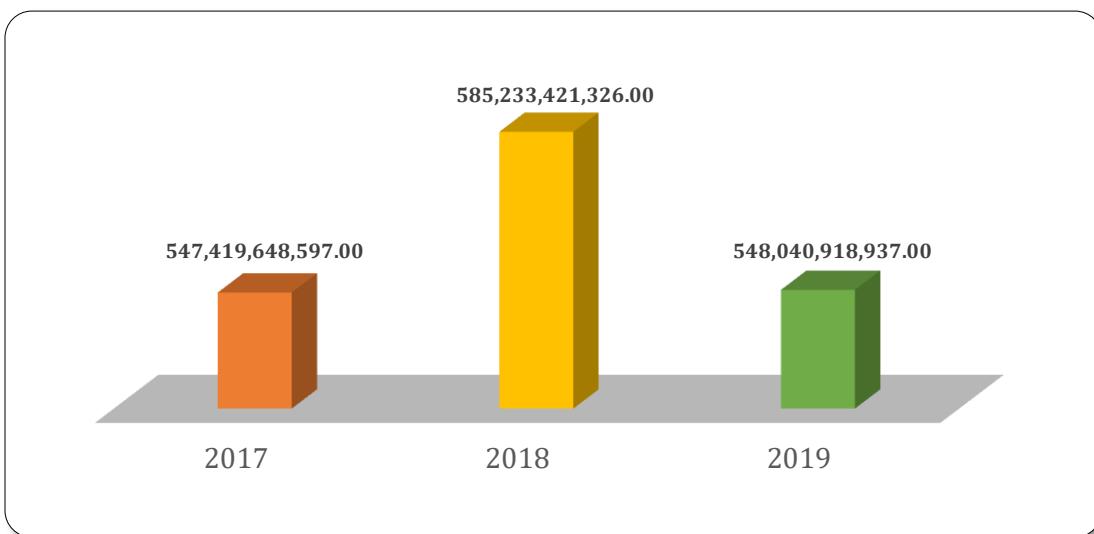


Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Adapun penerimaan **Pajak Rokok** juga mengalami kenaikan setiap tahun. Walaupun penyetoran pajak rokok dihitung berdasarkan jumlah penduduk, upaya optimalisasi tetap dilakukan dengan melaksanakan pendataan cukai rokok ilegal di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. Hasil pendataan dan temuan cukai illegal dilaporkan secara berkala dengan Kanwil Bea Cukai Kementerian Keuangan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Rokok mengalami pertumbuhan yang fluktuatif yaitu terjadi peningkatan pertumbuhan dari tahun 2017 ke tahun 2018

sebesar 6,91 persen namun tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6,36 persen, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik III.14
Realisasi Pajak Rokok Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019



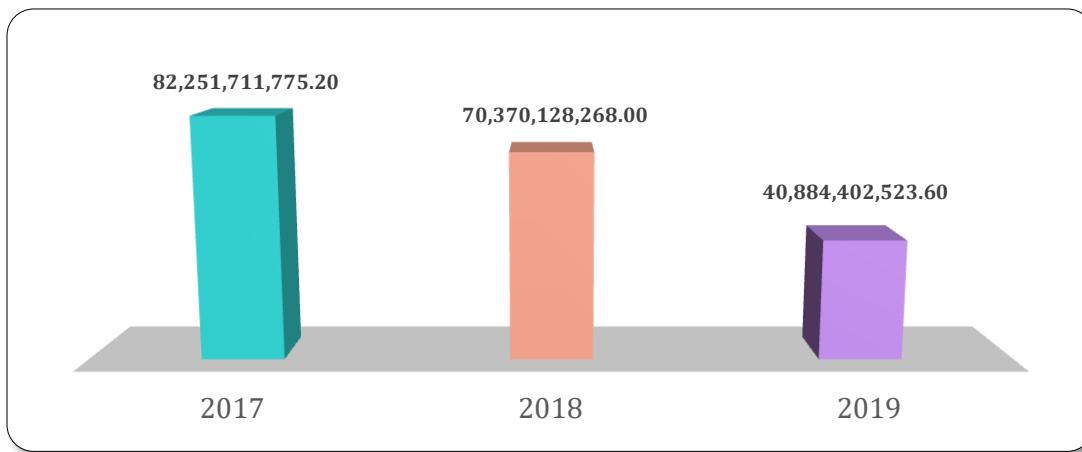
Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019, berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Daerah tetapi tetap dilakukan upaya meningkatkan penerimanya dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha telah diperbarui sesuai dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi obyek dan tarif retribusi yang menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi. Langkah ekstensifikasi juga dilakukan dengan penambahan jenis retribusi baru yang dipungut berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Retribusi juga diarahkan pengelolaannya untuk lebih tertib dan telah dimungkinkan pula pembayaran retribusi daerah secara non tunai.

Realisasi penerimaan retribusi daerah secara kumulatif menunjukkan penurunan disebabkan peralihan kewenangan pengelolaan obyek retribusi serta peralihan status unit pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pencatatan penerimaannya bukan lagi pada jenis Retribusi Daerah melainkan pada jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, Pada tahun 2017 retribusi daerah memberi kontribusi sebesar Rp. 82,25 Milyar, namun trendnya terus menurun hingga 2019 yang hanya memberi kontribusi sebesar Rp. 40,87 Milyar. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri meskipun komponen retribusi daerah ini proporsinya kecil jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Jika penurunan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah tersebut tidak mendapatkan perhatian, maka komponen tersebut dapat mempengaruhi kinerja pendapatan asli daerah dimasa periode selanjutnya, seperti tergambar pada grafik berikut.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Grafik III.15
Realisasi Retribusi Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

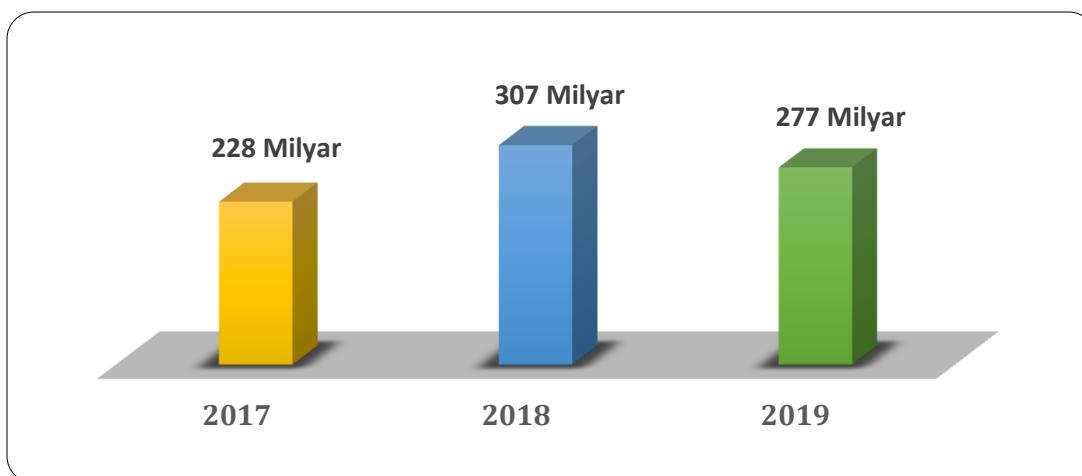


Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan jenis ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar di samping deviden dari penyertaan modal dari Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya.

Selama tahun 2017-2019, realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masih fluktuatif, hal ini tergambar pada grafik berikut.

Grafik III.16
**Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019**

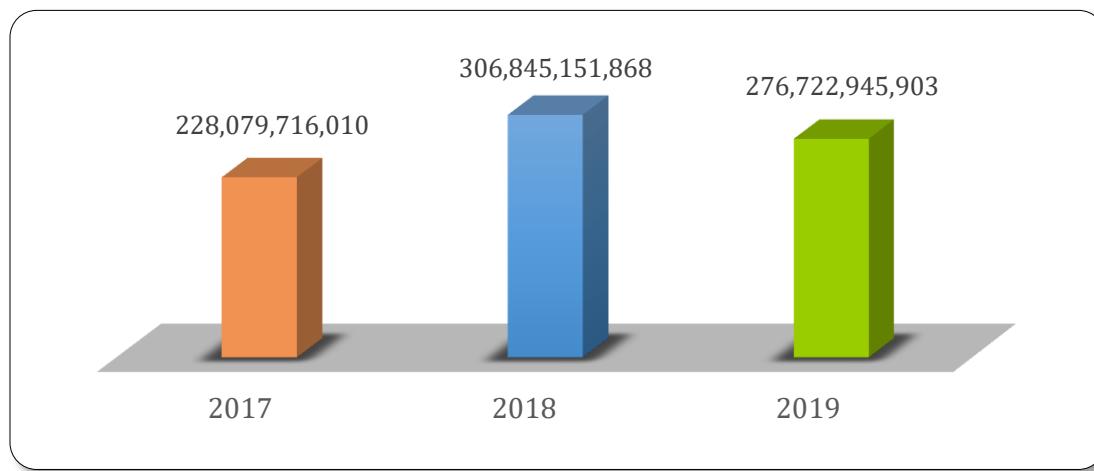


Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

Khusus Komponen **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** terdiri dari: hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan

dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada komponen penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, kontributor terbesar pada sektor ini adalah penerimaan denda Pajak Daerah. Selain dampak optimalisasi tunggakan Pajak Kendaran Bermotor yang turut berdampak pada peningkatan denda pajak daerah, upaya optimalisasi lain itu juga telah dirintis yakni pola pemanfaatan asset daerah dengan skema sewa. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengatur sewa barang milik daerah telah diterbitkan dan selanjutnya akan mulai diterapkan dimulai dengan pendataan obyek-obyek Barang Milik Daerah yang berpotensi PAD dan selanjutnya akan dilakukan penilaian potensi nilai sewa oleh penilai/appraisal. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah periode tahun 2017-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,21 persen.

Grafik III.17
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

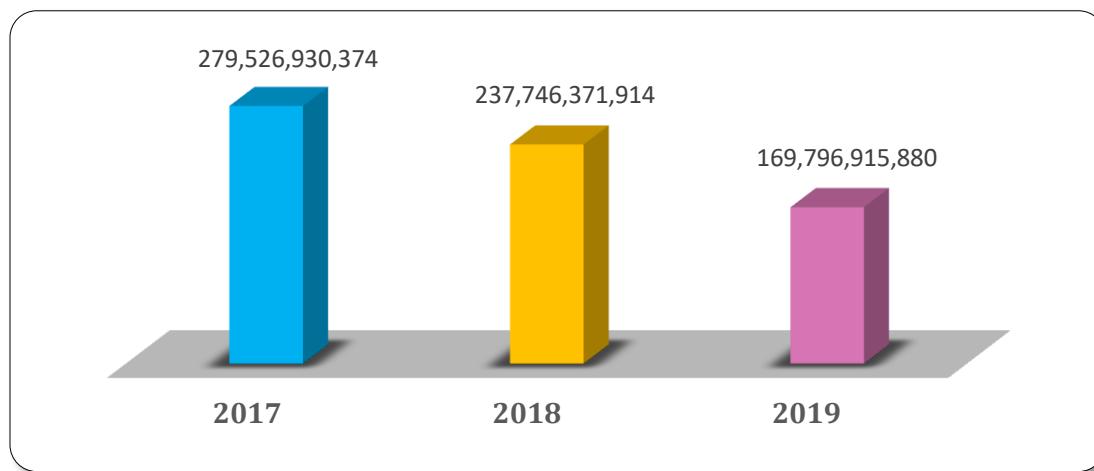


Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Grafik III.18
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil / bagi hasil bukan pajak
Tahun 2017-2019



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

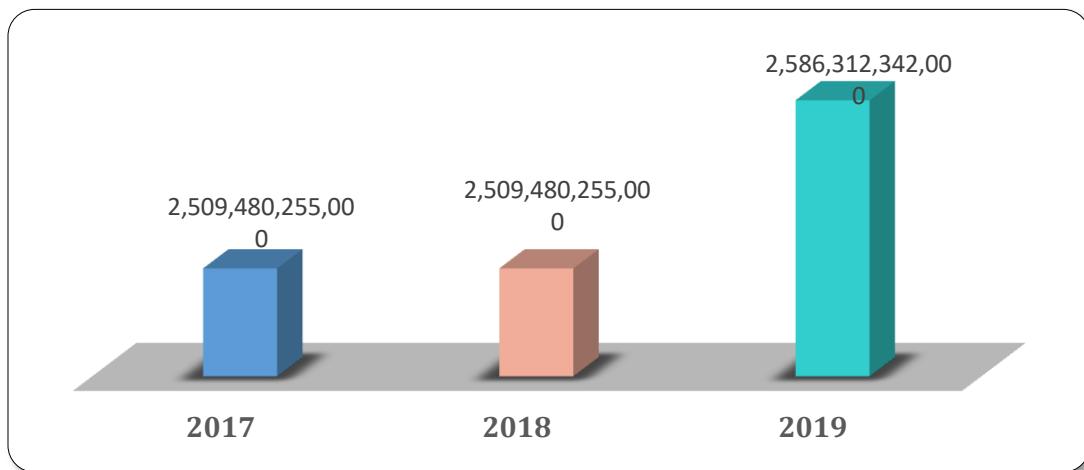
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP 55 tahun 2005 Pasal 1 angka 23 dan PP 12 tahun 2019 pasal 37).

Dana Alokasi Umum setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 16,99 persen dalam kurun waktu 2015-2019. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi lonjakan penyaluran DAU tahun 2017 yang disebabkan peralihan kewenangan Pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi sehingga gaji guru SMA/SMK juga disalurkan melalui DAU Pemerintah Provinsi. Pada tahun berikutnya, penyaluran DAU cenderung stagnan, bahkan DAU tahun 2017 jumlahnya sama dengan tahun 2018, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

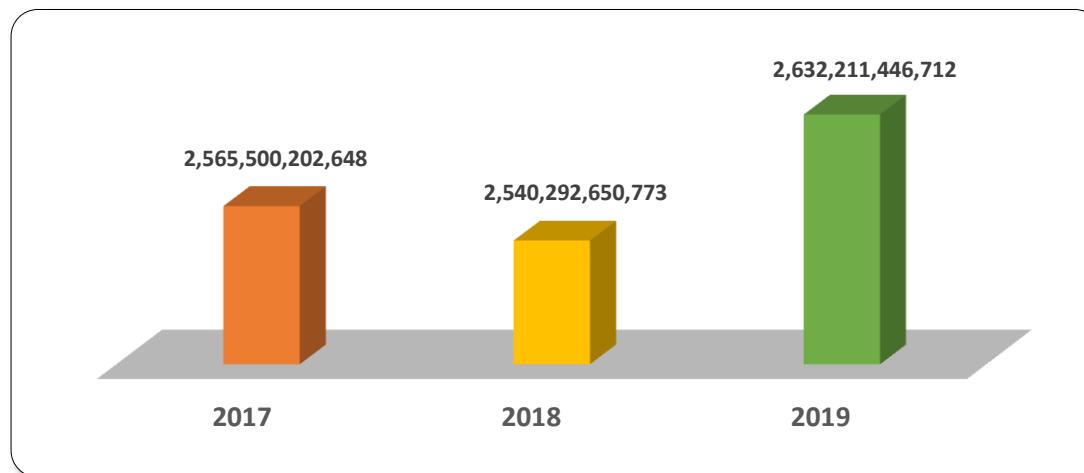
Grafik III.19
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2017-2019



Sumber : BKAD Prov. Sulsel, 2020

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, realisasi Penerimaan DAK seperti Gambar dibawah ini.

Grafik III.20
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017-2019

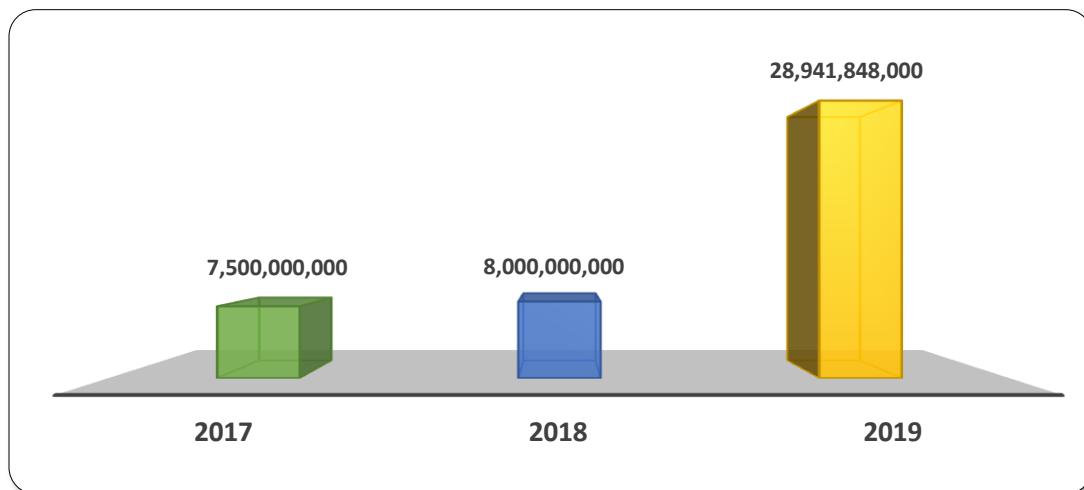


Sumber : BKAD Prov. Sulsel, 2020

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu (PP 12 tahun 2019 pasal 39). Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undangundangan (PP 12 tahun 2019 pasal 40). Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan (PP 12 tahun 2019 pasal 41). Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa (PP 12 tahun 2019 pasal 42). Realisasi Dana Insentif Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan rata-rata pertumbuhan 134,22 persen dalam kurun waktu 2017-2019, hal tersebut tergambar pada grafik berikut.

Grafik III.21
Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2017-2019



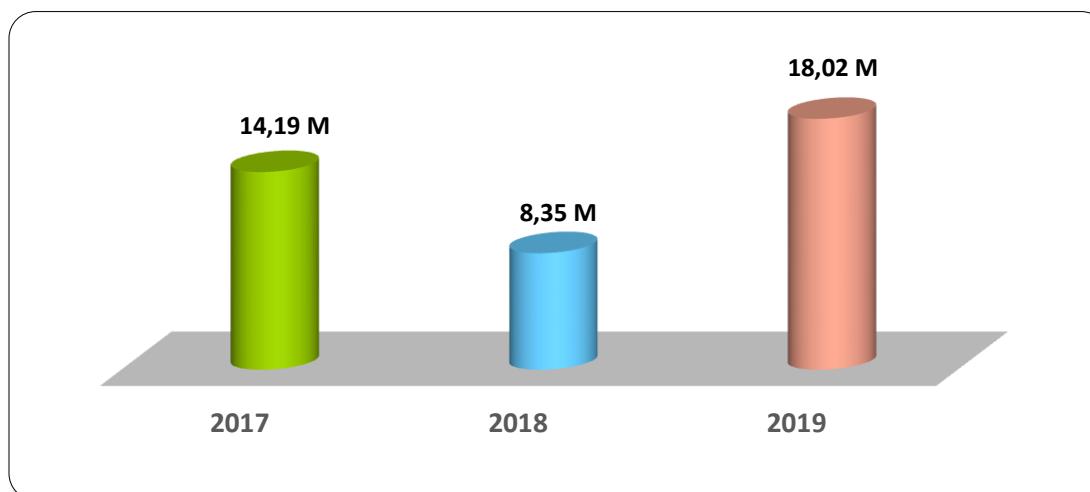
Sumber : BKAD Prov. Sulsel, 2020

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah selama tahun 2017-2018 bersumber dari hibah. Perkembangan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah selama tahun 2017-bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 14,19 Miliar lebih dan Pada tahun 2018 menjadi Rp. 8,35 Miliar lebih atau menurun sebesar 41,12persen, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 18,02 Miliar lebih atau meningkat sebesar 115,69 persen terhadap tahun 2018. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah selama tahun 2017-2019 ditunjukan pada Grafik berikut.

Grafik III.22
**Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019**



Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2020

3.1.1.2. Belanja Daerah

Secara umum Komponen belanja daerah terdiri dari (1) Belanja Tidak Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomiansektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan pada periode Tahun Anggaran 2017-2019. Pada Tahun Anggaran 2017 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 8,9 Triliun lebih dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 9,5 Triliun lebih pada Tahun Anggaran 2019 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,26 persen. Pada kelompok belanja tidak langsung, menunjukkan bahwa komponen belanja pegawai masih mendominasi dengan rata-rata persentase sebesar 46,9 persen dari total belanja tidak langsung. Adapun komponen belanja tidak langsung yang mengalami penurunan cukup significant adalah pada belanja bunga dengan tingkat penurunan pertumbuhan sebesar 94,15 persen, Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding). Belanja bunga pada tahun 2018 telah berakhir sehingga tidak ada lagi komponen belanja bunga pada tahun 2019, Komponen belanja Hibah pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,40 Triliun menurun sebesar Rp. 1,39 Triliun pada tahun 2019, tetapi mengalami pertumbuhan sebesar 7,67 persen, Belanja bantuan Sosial tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9.18 persen, Belanja Bagi Hasil juga mengalami peningkatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,05 persen. Untuk belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 18,60 persen, dan Belanja tak terduga hanya ada pada tahun 2017, disajikan pada tabel di bawah ini.

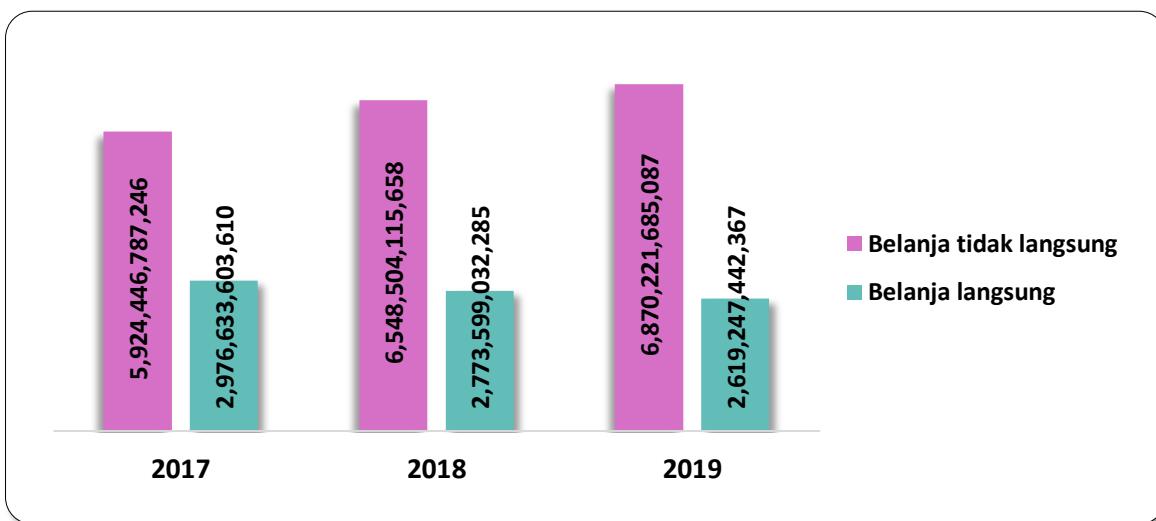
Tabel III. 2
Rata - Rata Pertumbuhan Realiasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019

| No. | Uraian | Tahun (Rp.) | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan (%) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 2 | BELANJA | 6,149,604,542,112.00 | 6,930,978,668,389.00 | 8,901,080,390,856.00 | 9,322,103,147,943.00 | 9,489,469,127,454.00 | 11.91 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 3,798,198,139,665.00 | 4,483,455,182,666.00 | 5,924,446,787,246.00 | 6,548,504,115,658.00 | 6,870,221,685,087.00 | 16.41 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 913,334,508,532.00 | 940,833,054,886.00 | 2,780,875,839,862.00 | 3,064,236,808,013.00 | 3,232,076,825,506.00 | 53.56 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 28,158,982,447.00 | 21,172,836,369.00 | 10,370,062,643.00 | 1,212,859,794.00 | | (66.03) |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 1,221,910,000,000.00 | 1,747,841,750,000.00 | 1,407,811,730,100.00 | 1,864,993,851,524.00 | 1,391,918,320,000.00 | 7.67 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | - | - | 597,750,000.00 | 600,000,000.00 | 818,000,000.00 | 9.18 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | 1,175,949,065,823.00 | 1,408,139,587,844.00 | 1,536,772,252,432.00 | 1,383,334,398,528.00 | 1,733,213,706,105.00 | 11.05 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 458,845,582,863.00 | 365,467,953,567.00 | 187,987,387,209.00 | 234,126,197,799.00 | 512,194,833,476.00 | 18.60 |
| 2.1.8 | Belanja tidak Terduga | | - | 31,765,000.00 | - | - | (25.00) |
| 2.2 | Belanja langsung | 2,351,406,402,447.00 | 2,447,523,485,723.00 | 2,976,633,603,610.00 | 2,773,599,032,285.00 | 2,619,247,442,367.00 | 3.33 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 188,238,513,439.00 | 198,792,269,193.00 | 201,237,823,908.00 | 3,807,162,825.00 | 3,894,773,960.00 | (22.24) |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan jasa | 1,313,862,831,452.00 | 1,391,668,973,561.00 | 1,724,208,449,031.00 | 1,687,986,093,900.00 | 1,645,861,899,471.00 | 6.31 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 849,305,057,556.00 | 857,062,242,969.00 | 1,051,187,330,671.00 | 1,081,805,775,560.00 | 969,490,768,936.00 | 4.02 |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Perkembangan Belanja daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sebagaimana grafik berikut.

Grafik III.23
Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2019



Sumber : BKAD Prov. Sulsel, 2020

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas **penerimaan Pembiayaan** daerah didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan **pengeluaran Pembiayaan Daerah** didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

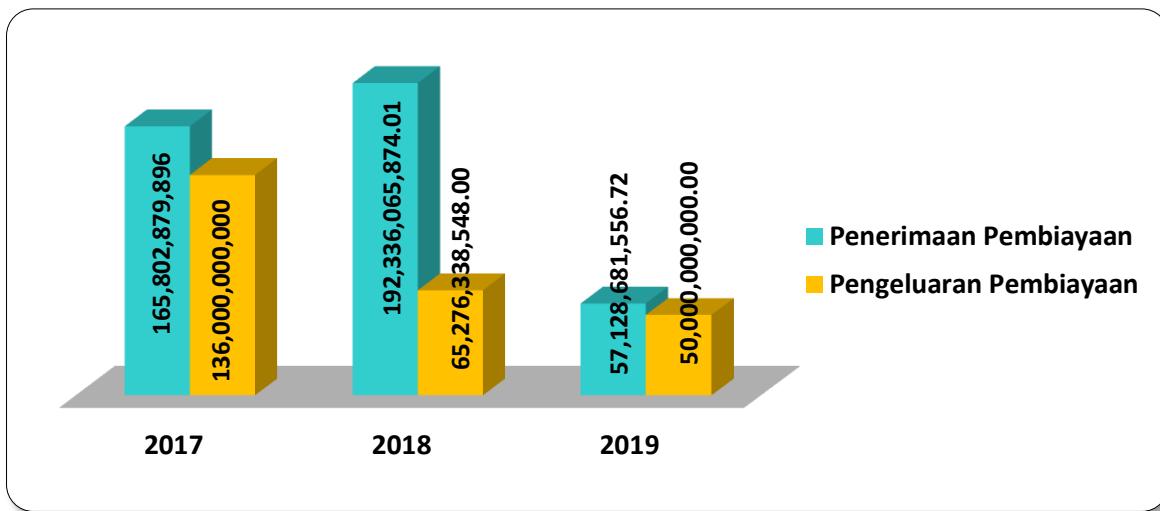
Tabel III. 3
Rata - Rata Pertumbuhan Realiasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019

| No. | Uraian | Tahun (Rp.) | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan (%) |
|-------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 2.3 | Pembiayaan | 173,744,920,344.00 | -65,044,526,212.00 | 29,802,879,896.00 | 127,059,727,326.00 | 7,128,681,556.70 | -12.83 |
| 2.3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 309,744,920,344.00 | 129,955,473,788.00 | 165,802,879,896.00 | 192,336,065,874.01 | 57,128,681,556.72 | -21.19 |
| 2.3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 136,000,000,000.00 | 195,000,000,000.00 | 136,000,000,000.00 | 65,276,338,548.00 | 50,000,000,000.00 | -15.57 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Realisasi Pembiayaan Daerah selama Tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 165.80 Miliar dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 192,33 Miliar lebih, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 57,128 miliar lebih.

**Grafik III.24
Realisasi Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2017-2019**



Sumber : BKAD Prov. Sulsel, 2020

3.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan nercara daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode pencatatan 2017-2019, ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel III. 4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019**

| No. | Uraian | 2017 Rp. (Juta) | 2018 Rp. (Juta) | 2019 Rp. (Juta) | Rata-rata Pertumbuh- (persen) |
|-------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | ASET | | | | |
| 1.1 | Aset Lancar | | | | |
| 1.1.1 | Kas | 192,426.62 | 57,397.00 | 80,184.18 | (15.24) |
| 1.1.2 | Piutang | 42,512.42 | 66,922.03 | - | (21.29) |
| 1.1.3 | Persediaan | 121,035.78 | 97,743.74 | 83,415.26 | (16.95) |
| | Jumlah Aset Lancar | 355,974.83 | 222,062.77 | 163,599.44 | (31.97) |
| 1.2 | Aset Tetap | | | | |
| 1.2.1 | Tanah | 4,704,678.34 | 7,384,459.20 | 7,547,507.93 | 29.58 |
| 1.2.2 | Peralatan dan Mesin | 1,565,239.14 | 2,044,161.58 | 2,354,696.20 | 22.89 |
| 1.2.3 | Gedung dan Bangunan | 2,519,732.61 | 3,421,517.29 | 5,597,004.53 | 49.69 |
| 1.2.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6,703,069.67 | 6,977,291.53 | 7,339,519.43 | 4.64 |
| 1.2.5 | Aset Tetap Lainnya | 141,849.84 | 230,028.92 | 306,632.03 | 47.73 |
| 1.2.6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 363,162.57 | 577,062.67 | 711,656.97 | 41.11 |
| 1.2.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (6,401,062.61) | (7,217,158.95) | (7,853,249.14) | 10.78 |
| | Jumlah Aset Tetap | 9,596,669.57 | 13,417,362.24 | 16,003,767.95 | 29.54 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Uraian | 2017 Rp. (Juta) | 2018 Rp. (Juta) | 2019 Rp. (Juta) | Rata-rata Pertumbuhan (persen) |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1.3 | Aset Lainnya | | | | |
| 1.3.1 | Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | (38.91) |
| 1.3.2 | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 56,600.00 | 56,600.00 | 56,600.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | Aset Tak Berwujud | 32,734.20 | 42,774.07 | 48,935.45 | 22.54 |
| 1.3.5 | Aset Lain-lain | 153,991.99 | 251,924.72 | 270,218.42 | 35.43 |
| 1.3.6 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (7,900.62) | (15,126.76) | (15,579.16) | 47.23 |
| | Jumlah Aset Lainnya | 235,425.57 | 336,172.03 | 360,174.71 | 24.97 |
| | JUMLAH ASET | 10,188,069.97 | 13,975,597.03 | 16,527,542.10 | 27.72 |
| 2 | KEWAJIBAN | | | | |
| 2.1 | Kewajiban Jangka Pendek | | | | |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) | 90.56 | 268.32 | 3,119.90 | 629.53 |
| 2.1.2 | Utang Bunga | 83.48 | - | - | (50.00) |
| 2.1.3 | Utang PPh Pasal 21 | - | - | - | 0.00 |
| 2.1.4 | Utang PPh Pasal 22 | - | - | - | 0.00 |
| 2.1.5 | Utang PPh Pasal 23 | - | - | - | 0.00 |
| 2.1.6 | Utang PPN | - | - | - | 0.00 |
| 2.1.7 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 64,626.34 | - | - | (50.00) |
| 2.1.8 | Pendapatan Diterima Dimuka | 4,359.26 | 3,906.00 | 4,166.85 | (1.86) |
| 2.1.9 | Utang Beban | 321,262.26 | 521,223.87 | 462,796.71 | 25.52 |
| 2.1.10 | Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota | - | - | - | 0.00 |
| 2.1.11 | Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - | 57.78 | 0.00 |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 390,421.89 | 525,398.18 | 470,141.24 | 12.03 |
| 2.2 | Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | |
| | Utang Pemerintah Pusat | - | - | - | 0.00 |
| | Utang Jangka Panjang Lainnya | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 408,921.89 | 543,898.18 | 488,641.24 | 11.42 |
| 3 | EKUITAS DANA | 10,812,363.31 | 14,553,678.09 | 17,381,912.82 | 27.15 |
| 3.1 | Ekuitas Dana Lancar | - | - | - | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 192,336.07 | 57,128.68 | 72,064.28 | (9.38) |
| 3.1.2 | Pendapatan Yang Ditangguhkan | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Cadangan Piutang | - | - | - | - |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Uraian | 2017 Rp. (Juta) | 2018 Rp. (Juta) | 2019 Rp. (Juta) | Rata-rata Pertumbuhan (persen) |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 3.1.4 | Cadangan Persediaan | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | - | - | - | - |
| | Jumlah Ekuitas Dana Lancar | - | - | - | - |
| 3.2 | Ekuitas Dana Investasi | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Diinvestasikan Dalam Aset Tetap | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | - | - | - | - |
| | Jumlah Ekuitas Dana Investasi | | | | (20.40) |
| | JUMLAH EKUITAS DANA | | | | 2.02 |
| | JUMLAH KEWEAJIBAN DAN EKUITAS DANA | | | | 1.66 |

3.1.2.1 Aset

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2017-2019, Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 26,83 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset tetap yang mencapai 28,42 persen. sementara aset lainnya hanya mengalami rata-rata pertumbuhan 17,87 persen. Pada periode yang sama, aset lancar mengalami penurunan capaian dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 16,94 persen. Rendahnya pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset lancar daerah lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek daerah.

3.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian kewajiban rata - rata sebesar 11,42 persen setiap tahunnya. Peningkatan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh

komponen utang perhitungan pihak ketiga (PPK) yang bertumbuh rata-rata yang sangat tinggi sebesar 322,17 persen, kemudian rata-rata pertumbuhan utang bunga yang mencapai negative 53,62 persen, serta pertumbuhan utang beban sebesar 6,03 persen. Ketiga komponen inilah yang mendorong rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek hingga -2,17 persen setiap tahunnya selama periode 2017-2019. Komponen-komponen kewajiban lainnya menunjukkan penurunan yang cukup berarti, terutama yang terkait dengan komponen kewajiban pajak dan bagian lancar utang jangka panjang yang menunjukkan penurunan tajam hingga -38,12 persen selama periode ini.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Sulawesi Selatan selama periode 2017-2019, mengalami trend positif, meskipun rata-rata pertumbuhan yang relative kecil yakni hanya 2,02 persen setiap tahunnya. Kecilnya rata-rata pertumbuhan ekuitas dana dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Sementara Kontribusi terbesar dalam menciptakan pertumbuhan rata-rata ekuitas dana yang positif ditunjukkan oleh komponen ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya yang mencapai 58,36 persen. Dengan pertumbuhan ekuitas dana yang diinvestasikan pada aset lainnya ini, menggambarkan modal sendiri yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan selama periode 2017-2019 tetap memperlihatkan sebuah pertumbuhan dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang secara rata-rata tumbuh sebesar 1,66 persen.

3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Kondisi Rasio Likuiditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, hal ini menunjukkan besarnya aktiva lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 5
Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019**

(Dalam Jutaan)

| No. | Tahun | Aset Lancar (Rp) | Kewajiban Jangka Pendek (Rp) | Rasio |
|-----|-------|------------------|------------------------------|-------|
| 1 | 2017 | 355.974,83 | 390.421,89 | 0,91 |
| 2 | 2018 | 222.062,77 | 525.398,18 | 0,42 |
| 3 | 2019 | 163.599,44 | 470.141,24 | 0,35 |

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai yang semakin menurun dari tahun 2017 ke tahun 2019, kondisi ini perlu perhatian khusus yang mempertimbangkan penambahan hutang jangka pendek di tahun-tahun selanjutnya pada tabel berikut.

Tabel III. 6
Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

(Dalam Jutaan)

| No. | Tahun | Aset Lancar (Rp) | Persediaan (Rp) | Kewajiban Jangka Pendek (Rp) | Rasio |
|-----|-------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| 1 | 2017 | 355.974,83 | 121.035,78 | 390.421,89 | 0,60 |
| 2 | 2018 | 222.062,77 | 97.743,74 | 525.398,18 | 0,24 |
| 3 | 2019 | 163.599,44 | 83.415,26 | 470.141,24 | 0,17 |

Sumber : Neraca Sulsel berbagai seri

Rasio Likuiditas yang diukur dengan rasio cash menunjukkan fluktuatif selama tahun 2017-2019. Namun demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek menunjukkan kondisi yang sangat baik. Rincian rasio Cash daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 7
Rasio Kas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

(Dalam Jutaan)

| No. | Tahun | Kas (Rp) | Kewajiban Jangka Pendek (Rp) | Rasio |
|-----|-------|------------|------------------------------|-------|
| 1 | 2017 | 192.426,62 | 390.421,89 | 0,49 |
| 2 | 2018 | 57.397,00 | 525.398,18 | 0,11 |
| 3 | 2019 | 80.184,18 | 470.141,24 | 0,17 |

Sumber: Neraca Sulsel berbagai seri

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rasio total hutang terhadap total ekuitas pada tahun 2017 hingga 2019 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kisaran nilai 0,03 hingga 0,04. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2017 dan 2018 lebih tinggi dari tahun 2019, dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel III.6 dan tabel berikut.

Tabel III. 8
Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

| No. | Tahun | Total Kewajiban | Ekuitas Dana | Rasio Hutang Terhadap Ekuitas |
|-----|-------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2017 | 408.921.892.911 | 10.812.363.313.878 | 0.04 |
| 2 | 2018 | 543.898.184.213 | 1.455.367.8091.363 | 0.04 |
| 3 | 2019 | 488.641.243.032 | 17.381.912.823.212 | 0.03 |

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Tabel III. 9
Rasio Total Kewajiban dengan Aset
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

(Dalam Jutaan)

| No. | Tahun | Total Kewajiban (Rp) | Total Aset (Rp) | Rasio |
|-----|-------|----------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2017 | 408.921,89 | 10.188.069,97 | 0.04 |
| 2 | 2018 | 543.898,18 | 13.975.597,03 | 0.04 |
| 3 | 2019 | 488.641,24 | 16.527.542,10 | 0.03 |

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas tidak relevan untuk dihitung dalam analisis keuangan karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki piutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2017-2019, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan diantaranya Penyelamatan Aset Daerah, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Peningkatan Kesejahteraan ASN.

Khusus penyelamatan aset daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan supervisi dan penyelamatan aset terkait pendanaan, personil, prasarana dan dokumen (P3D). Selain itu KPK juga mendorong dilakukan rekonsiliasi aset dengan untuk

melancarkan proses sertifikasi dan perlindungan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan karena sebagian aset pemda dikuasai oleh pihak ketiga. Selama tahun 2019 jumlah aset yang diselamatkan sebesar Rp 6,9 trilyun lebih dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Aset yang diselamatkan pada sektor pendidikan sebesar Rp.2.804.309.692.545,22; sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp.324.925.372.429,03; sektor Perhubungan sebesar Rp.49.848.146.941,82, dan Sektor kehutanan sebesar Rp.36.548.570.074,98. Sehingga total nilai yang diperoleh dari sektor-sektor ini sebesar **Rp. 3.215.631.781.991,05**.
2. Jumlah aset yang diselamatkan pada daerah pemekaran dan telah di serahterimakan dari Kabupaten Luwu dan Kota Palopo sebanyak 79 aset dengan senilai sebesar Rp. 42,9 miliar.
3. Jumlah aset kendaraan dinas yang ditertibkan pada tahun 2019, mencapai sebesar Rp. 24,5 miliar.
4. Aset-aset bermasalah yang berhasil diselesaikan di antaranya adalah Stadion Mattoanging, Stadion Barombong, Pulau Lae-Lae, Pulau Samalona, Pasar Terong, Terminal Daya, Instalasi Kebun dan Benih (IKB) Sereang dan IKB Jampue, dengan nilai aset sengketa yang diselesaikan sebesar Rp. 1,5 triliun.
5. Selain itu, terkait penertiban Fasum dan Fasos di Kota Makassar saat ini sedang dalam proses penyerahan dari pengembang kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan total keseluruhan nilai mencapai Rp. 968 miliar.

Pada tahun yang sama Sulawesi Selatan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai total Rp. 447 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 8 persen dari PAD tahun 2018.

Terkait kebijakan pemberian bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2019 pemerintah Sulawesi selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar lebih untuk bantuan keuangan kepada kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Bantuan Keuangan tersebut diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, Pemberian bantuan keuangan di antaranya berdasarkan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal selain itu untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak tersedia alokasi dananya, dan mendukung kebijakan program nasional, dan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

Sektor lain yang juga bisa mendapat bantuan keuangan dari pemprov adalah perbaikan layanan kesehatan. Jika ada daerah yang hendak membangun rumah sakit, mereka juga bisa mengusulkan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sifatnya anggaran sharing antara APBD pemerintah Kabupaten/Kota, APBD Pemerintah Provinsi, hingga APBN.

Selain bantuan keuangan tersebut diatas, juga diberikan untuk pengembangan sektor pariwisata serta sektor UKM kreatif, terutama untuk kerajinan daerah yang dinilai dapat meningkatkan APBD. Sepanjang program tersebut merupakan program yang produktif dan punya dampak ke masyarakat, maka pemerintah akan membantu.

Kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP telah melewati proses fasilitasi Ditjen Otoda Kemendagri dan Korsupgah KPK yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur No. 130 tahun 2017 tentang pedoman pemberian TPP.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tambahan TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, agar memacu kinerja ASN dan semakin disiplin, inovatif, dan produktif.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2017 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp. 3,67 Triliun lebih atau memiliki kontribusi sebesar 40.65 persen dari toral pengeluaran daerah. Tahun 2018 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp. 3,06 Triliun lebih atau memiliki kontribusi sebesar 32.64 persen dari total pengeluaran daerah. Kemudian Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi Rp. 3,23 Triliun lebih atau memiliki kontribusi sebesar 33.88 persen dari toral pengeluaran daerah. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 ditunjukan pada tabel III.10.

**Tabel III. 10
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019**

(Dalam Jutaan)

| No. | Tahun | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase (persen) |
|-----|-------|---|---|---------------------|
| | | (a) | (b) | (a)/(b) x 100 % |
| 1 | 2017 | 3,673,151.70 | 9,037,080.39 | 40.65 |
| 2 | 2018 | 3,064,236.81 | 9,387,379.49 | 32.64 |
| 3 | 2019 | 3,232,076.83 | 9,539,469.13 | 33.88 |

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Defisit Rill Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2017-2019 terjadi pada tahun 2018 dengan nilai defisit sebesar Rp. 135,15 Miliar lebih. Sementara tahun 2017 dan 2019 mengalami surplus dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 18,19 Miliar lebih dan Rp. 35,27 Miliar lebih secara berturut turut. Defisit rill anggaran provinsi Sulawesi Seatan tahun 2018 secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Sementara suplus riil anggaran tahun 2017 dan tahun 2019 menjadi penambah SILPA tahun berkenan. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulsel Tahun 2017-2019 secara berturut-turut ditunjukan pada tabel berikut.

**Tabel III. 11
Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 – 2019**

| No. | Uraian | Tahun (Jutaan Rp.) | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 9,055,279 | 9,252,222 | 9,574,846 |
| Dikurangi realisasi: | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 8,901,080 | 9,322,103 | 9,489,469 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 136,000 | 65,276 | 50,000 |
| (Defisit Riil) | | 18,199 | (135,158) | (57,128) |

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel III. 12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019

| No. | Uraian | Proporsi Dari Total Defisit Riil (persen) | | |
|-----|---|---|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 |

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2020

Tabel III. 13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019

| No. | Uraian | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----|---|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Rp. Juta | persen dari SiLPA | Rp. Juta | persen dari SiLPA | Rp. Juta | persen dari SiLPA |
| 1 | Jumlah SiLPA | 192,336,00 | 100 | 57,128.68 | 100 | 72,064.28 | 100 |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | | | | | | |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | | | | | | |
| 4 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | | | | | | |
| 5 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | | | | | | |
| 6 | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | | | | | | |
| 7 | Kegiatan Lanjutan | - | - | - | - | - | - |

Sumber : APBD Sulsel tahunan

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah perubahan Provinsi Sulawesi Selatan yang tersisa selama tiga tahun ke depan. Dalam konteks pandemic global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPJMD Perubahan 2021-2023 semakin menyempit, hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan pemerintah merefocusing dana APBD pada setiap OPD yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang dilanjutkan dengan proses pemulihan perekonomian pada tahun-tahun selanjutnya. Pada sisi lainnya, dalam kaitannya dengan ruang fiskal

daerah, refocusing dana APBD pada setiap OPD berpengaruh pada sulitnya pemerintah daerah dalam mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya pada tahun 2020.

3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021-2023. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Sulawesi Selatan lima tahun ke depan, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Sulawesi Selatan di beberapa sektor antara lain : 1) sektor transfortasi terutama transfortasi udara; 2) Sektor industri pengolahan; 3) sektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan pertama 2020 diperkirakan akan jatuh 1-2 persen di bawah level triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dan jika wabah ini terus meluas, maka perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan akan mengalami perlambatan lebih dalam hingga 3-4 persen pada triwulan kedua 2020 (y-on-y). Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti bendungan, kereta api, jalan tol, dan smelter, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas ekspor utama Sulawesi Selatan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Adanya pandemi Covid-19 berhasil memaksa asumsi-asumsi ekonomi, sosial dan fiskal yang telah direncanakan sebelumnya harus direvisi mendalam. Termasuk juga asumsi pendapatan daerah yang turut mendapat imbas dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan pandemi tersebut. Pada Triwulan II Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh negatif 3,87 persen (yoy) setelah di triwulan sebelumnya hanya tumbuh 3,07 persen (yoy). Adapun sektor yang mendapat tekanan paling besar adalah sektor transportasi dan menjadi penyumbang terbesar tumbuh negatifnya ekonomi Sulawesi Selatan di Triwulan II Tahun 2020.

Tabel III. 14
**Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023**

| No. | Indikator | Satuan | Tahun 2020 | | Target Kinerja | | |
|-----|------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | -0,73 | -0.70 | 4,10–5,55 | 4,62–5,98 | 5,04–6,52 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 12,19 | 8,99 (Sept.) | 8,70 | 8,10 | 7,45 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 8,79 | 6,31 (Agust.) | 6,08 | 5,90 | 5,69 |
| 4 | Gini Ratio | Angka | 0,410 | 0,382 | 0,414 | 0,398 | 0,381 |
| 5 | PDRB Per Kapita | Juta Rp. | 56,69 | 56,51 | 59,23 | 62,37 | 65,98 |
| 6 | Inflasi | % | 3,0-1,0 | 2.04 | 3,0-1,0 | 3,0-1,0 | 3,0-1,0 |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 72,18 | 71,93 | 72,20 | 72,57 | 73,05 |

Sumber : Data diolah, 2020

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021-2023 diperkirakan akan tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19.

Tabel III. 15
**Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023**

(Dalam Jutaan)

| No. | Indikator | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Pagu (Rp) | r | Pagu (Rp) | r | Pagu (Rp) | r |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 4,914.323 | 45.31 | 5,196.694 | 46.40 | 5,546.325 | 47.05 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 5,763.795 | 53.15 | 5,907.891 | 52.75 | 6,154.949 | 52.21 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 167,037 | 1.54 | 94,770 | 0.85 | 87,284 | 0.74 |

Sumber : BKAD Prov. Sulsel 2020

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

- a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum cukup tinggi karena proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2020-2023 diproyeksikan masih rata-rata sebesar 46,25 persen atau lebih rendah dari dana transfer yang mencapai rata-rata 52,70 persen. Pada kelompok PAD selama tahun 2020-2023 kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Daerah sebesar 87,34 persen. Asumsi target Pajak Daerah dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, namun untuk tahun 2020-2023 dapat dijelaskan bahwa perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal (masa pajak selama satu tahun) dihitung berdasarkan potensi objek pajak pada akhir tahun 2019 sebanyak 1,96 Juta Objek Pajak dan rata-rata pertumbuhan kendaraan baru selama 4 tahun terakhir sebesar 12,69 persen. Prediksi perubahan jumlah objek hingga tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
 - Besaran tarif PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang (tunggakan) setiap tahunnya;
 - Prediksi pertumbuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari trend realisasi beberapa tahun terakhir;
 - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru;
 - Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru dan potensi peralihan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung berdasarkan potensi perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Sulawesi Selatan dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing, dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beberapa tahun terakhir;
 - 4) Pajak Air Permukaan, diproyeksikan meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023, perhitungan ini berdasarkan potensi penerimaan Waterlevy serta jumlah potensi konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Air Permukaan beberapa tahun terakhir;

- 5) Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi serta proporsi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terhadap total penduduk nasional. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 37,5 persen dari penerimaan Pajak Rokok, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.
- c. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel III. 16
Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 – 2023

| Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Uraian (sesuai PP 12/2019) | Rencana Pencapaian 2021 (Rp) | Target RPJMD | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Target RPJMD | Realisasi | Target RPJMD | Realisasi | | | 2022 | 2023 |
| Pendapatan Daerah | 9,952,606,237,000 | 9,573,861,939,107 | 10,314,124,016,000 | 9,365,471,515,324.87 | Pendapatan Daerah | 10,845,064,924,332 | 11,199,356,670,000 | 11,788,560,025,000 |
| Pendapatan Asli Daerah | 4,170,721,006,000 | 4,138,582,293,061 | 4,375,872,214,000 | 3,890,209,264,432.87 | Pendapatan Asli Daerah | 4,914,232,240,000 | 5,196,694,487,000 | 5,546,325,533,000 |
| Pajak Daerah | 3,711,927,500,000 | 3,710,611,599,841 | 3,843,460,587,000 | 3,362,622,269,609.30 | Pajak Daerah | 4,258,454,850,000 | 4,423,068,981,000 | 4,717,384,801,000 |
| Retribusi Daerah | 87,626,316,000 | 40,874,810,923 | 102,385,225,000 | 36,925,738,354.50 | Retribusi Daerah | 59,747,600,000 | 57,681,878,000 | 63,912,469,000 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 109,494,062,000 | 111,357,119,117 | 137,467,473,000 | 115,022,553,678 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 116,555,328,000 | 134,038,628,000 | 150,123,263,000 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 261,673,128,000 | 275,738,763,180 | 292,558,929,000 | 375,638,702,791.07 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 479,474,462,000 | 581,905,000,000 | 614,905,000,000 |
| Dana Perimbangan | 5,726,538,455,000 | 5,388,320,704,592 | 5,913,666,135,000 | 5,399,732,629,887 | Pendapatan Transfer | 5,763,795,465,000 | 5,907,891,778,000 | 6,154,949,883,000 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 279,763,771,000 | 169,796,915,880 | 252,413,160,000 | 272,130,329,571 | Dana Perimbangan | 5,739,289,632,000 | 5,867,891,778,000 | 6,102,949,883,000 |
| Dana Alokasi Umum | 2,596,312,342,000 | 2,586,312,342,000 | 2,686,143,998,000 | 2,349,993,034,000 | Dana Transfer Umum | 2,735,317,529,500 | 2,810,871,594,000 | 2,887,960,949,000 |
| Dana Alokasi Khusus | 2,821,520,494,000 | 2,632,211,446,712 | 2,954,041,272,000 | 2,773,109,266,316 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 318,786,567,500 | 302,512,455,000 | 304,351,036,000 |
| Dana Insentif Daerah | 28,941,848,000 | 0 | 21,067,705,000 | 4,500,000,000 | Dana Alokasi Umum | 2,416,530,962,000 | 2,508,359,139,000 | 2,583,609,913,000 |
| Lain - lain Pendapatan yang Sah | 55,346,776,000 | 46,958,941,454 | 24,585,667,000 | 75,529,621,005 | Dana Transfer Khusus | 3,003,972,102,500 | 3,057,020,184,000 | 3,214,988,934,000 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Uraian (sesuai PP 58/2005) | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Uraian (sesuai PP 12/2019) | Rencana Pencapaian 2021 (Rp) | Target RPJMD | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Target RPJMD | Realisasi | Target RPJMD | Realisasi | | | 2022 | 2023 |
| Hibah | 55,346,776,000 | 18,017,093,454 | 24,585,667,000 | 75,529,621,005 | Dana Alokasi Khusus | 568,134,750,500 | 520,826,333,000 | 587,492,104,000 |
| Dana Penyesuaian | - | 28,941,848,000 | 0 | - | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2,435,837,352,000 | 2,536,193,851,000 | 2,627,496,830,000 |
| | | | | | Dana Insentif Daerah | 24,505,833,000 | 40,000,000,000 | 52,000,000,000 |
| | | | | | Lain - lain Pendapatan yang Sah | 167,037,219,332 | 94,770,405,000 | 87,284,609,000 |
| | | | | | Hibah | 167,037,219,332 | 94,770,405,000 | 87,284,609,000 |
| | | | | | Dana Penyesuaian | - | - | - |

Sumber : Bapenda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020

Tabel III. 17
Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 - 2023

| Uraian (sesuai PP 58/2005) | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Uraian (sesuai PP 12/2019) | Rencana Pencapaian 2021(Rp.) | Target RPJMD | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Target RPJMD | Realisasi | Target RPJMD | Realisasi | | | 2022 | 2023 |
| Belanja Daerah | 9,952,606,236,999.77 | 9,489,469,127,455.93 | 10,414,124,015,999.20 | 9,978,069,735,607.69 | Belanja Daerah | 12,110,640,284,934 | 11,749,697,437,965.50 | 11,528,900,792,965.50 |
| Belanja Tidak Langsung | 6,868,951,050,451.77 | 6,869,545,370,496.22 | 7,125,871,922,076.18 | 7,194,321,932,477.90 | Belanja Operasi | 7,369,658,326,461 | 7,058,172,278,190.58 | 7,250,333,600,733.52 |
| Belanja Pegawai | 3,357,803,860,030 | 3,231,400,510,914.65 | 3,346,788,646,893.41 | 3,084,732,779,274 | Belanja Pegawai | 3,387,039,397,478 | 3,240,981,923,996 | 3,477,969,421,989 |
| Belanja Bunga | - | - | - | 2,476,741,949.66 | Belanja Barang dan Jasa | 3,775,430,150,802 | 2,046,043,016,140 | 2,001,058,460,269.20 |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | Belanja Bunga | 4,466,445,356 | 2,049,717,475.58 | 1,708,097,896.32 |
| Belanja Hibah | 1,607,996,853,826 | 1,391,918,320,000 | 1,594,966,853,723 | 1,498,758,095,250 | Belanja Subsidi | 0 | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,100,000,000 | 818,000,000 | 1,150,000,000 | 805,000,000 | Belanja Hibah | 196,153,807,825 | 1,767,097,620,579 | 1,767,097,620,579 |
| Belanja Bagi Hasil | 1,401,200,995,695.77 | 1,733,213,706,105.57 | 1,716,117,080,659.77 | 1,534,452,968,568.24 | Belanja Bantuan Sosial | 6,568,525,000 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 480,849,340,900 | 512,194,833,476 | 446,849,340,800 | 805,333,232,979 | Belanja Modal | 2,358,430,033,935 | 2,069,682,659,344 | 1,401,332,659,344 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Uraian (sesuai PP 58/2005) | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Uraian (sesuai PP 12/2019) | Rencana Pencapaian 2021(Rp.) | Target RPJMD | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Target RPJMD | Realisasi | Target RPJMD | Realisasi | | | 2022 | 2023 |
| Belanja Tidak Terduga | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 267,763,114,457 | Belanja Modal | 2,358,430,033,935 | 2,069,682,659,344 | 1,401,332,659,344 |
| Belanja Langsung | 3,083,655,186,548 | 2,619,923,756,959.71 | 3,288,252,093,923 | 2,783,747,803,129.79 | Belanja Tidak Terduga | 150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| Belanja Pegawai | 15,926,175,569 | 4,571,088,552 | 16,722,484,347 | 5,905,800,901 | Belanja Tidak Terduga | 150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1,671,008,737,886 | 1,645,861,899,471.64 | 1,739,642,785,506 | 1,594,326,717,801.69 | Belanja Transfer | 2,232,551,924,538 | 2,521,842,500,430.94 | 2,777,234,532,888 |
| Belanja Modal | 1,396,720,273,093 | 969,490,768,936.07 | 1,531,886,824,070 | 1,183,515,284,427.10 | Belanja Bagi Hasil | 1,425,347,250,538 | 1,601,842,500,430.94 | 1,820,548,002,488 |
| | | | | | Belanja Bantuan Keuangan | 807,204,674,000 | 920,000,000,000 | 956,686,530,400 |

Sumber : BKAD & BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020

Tabel III. 18
Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 - 2023

| No. | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Target 2021 (Rp.) | Target (Rp.) | |
|------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Target RPJMD | Realisasi | Target RPJMD | Realisasi | | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| | Surplus/Defisit | 0 | 84.441.734.504,77 | (100000,00) | (612.633.148.573,82) | (1.265.575.360.602)0 | (550.340.767.965,52) | 259.659.232.034,48 |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | 200.000.000.000,00 | 57.128.681.556,72 | 200.000.000.000,00 | 1.009.209.884.368,49 | 1.311.740.168.611 | 800.000.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1. | Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 200.000.000.000,00 | 57.128.681.556,72 | 200.000.000.000,00 | 72.064.281.794,49 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pencairan dana cadangan | - | - | | - | - | - | - |
| 1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang | - | - | | - | - | - | - |
| 1.4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | | 937.145.602.574,00 | 1.161.740.168.611,00 | - | - |
| 1.5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | - | | - | - | - | - |
| 1.7. | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | | - | - | 800.000,00 | - |
| 1.8. | Penerimaan Pengembalian Investasi Perusda | - | - | | - | - | - | - |
| 2. | Pengeluaran Pembiayaan | 200.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 0,00 | 46.164.808.009 | 249.659.232.034,48 | 259.659.232.034,48 |
| 2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | | - | - | - | - |
| 2.2. | Penyertaan Modal (investasi) Daerah | 200.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 75.000,00 |
| 2.3. | Pembayaran Pokok Utang | - | - | | - | 46.164.8089,00 | 184.659.232.034,48 | 184.659.232.034,48 |
| 2.4. | Pembayaran Pinjaman Daerah | - | - | | - | - | - | - |
| | Jumlah Pembiayaan Netto | 0 | 7.128.681.556,72 | 100.000.000.000,00 | 1.009.209.884.368,49 | 1.265.575.360.602 | 550.340.767.965,52 | (259.659.232.034,48) |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 0 | 91.570.416.061,49 | 0 | 396.576.735.794,67 | 0 | 0 | - |

Sumber : BKAD dan Proyeksi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dituang pada **table III.19 dan table III.20** selama 3 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d. Belanja Moda Transportasi, besarannya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 persen untuk BBH Kab./Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam program nyata Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri atas (1). Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui hilirisasi komoditas Sulsel; (2). Pembangunan Infrastruktur yang menjangkau masyarakat Desa Terpencil; (3). Rumah Sakit Regional di 6 Wilayah dan Ambulans Siaga (Bidang Kesehatan); (4). Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Bidang: Pemerintahan, Pendidikan dan Kepemudaan); (5). Destinasi Wisata Andalan Berkualitas Internasional (Bidang Pariwisata dan Ekowisata).

Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Nilai kapasitas riil pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2023, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel III. 19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Sesuai PP 58 Tahun 2005 | | | | Sesuai PP 12 Tahun 2019 | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Target (Rp.) | | |
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pendapatan | 9,952,606,237,000 | 9,922,960,496,105 | 10,314,124,016,000 | 9,780,027,257,667 | 10,845,064,924,332 | 11,199,356,670,000 | 11,788,560,025,000 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 200,000,000,000 | 57,128,681,556 | 200,000,000,000 | 72,264,281,793 | 150,000,000,000 | - | - |
| 4 | Pinjaman Daerah | - | - | - | 1,338,779,432,250 | 1,161,740,168,611 | 800,000,000,000 | - |
| Total Penerimaan | | 10,152,606,237,000 | 9,980,089,177,661 | 10,514,124,016,000 | 11,191,070,971,710 | 12,156,805,092,943 | 11,999,356,670,000 | 11,788,560,025,000 |
| 5 | Dikurangi | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer | 6,868,951,050,452 | 7,037,473,650,667 | 7,125,871,922,076 | 7,824,686,397,409 | - | - | - |
| 7 | Pengeluaran Pembiayaan | 200,000,000,000 | 50,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 46,164,808,009 | 249,659,232,034 | 259,659,232,034 |
| Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan | | 3,083,655,186,548 | 2,892,615,526,994 | 3,288,252,093,924 | 3,366,384,574,301 | 12,110,640,284,934 | 11,749,697,437,966 | 11,528,900,792,966 |

Sumber : BKAD & BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020

Tabel III. 20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2023

| No. | Uraian | TARGET (Rp.) | | | Rata-Rata Porsi Per Tahun (%) |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| I | Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan | 12.110.640.284.934,00 | 11.749.697.437.966,00 | 11.528.900.792.966,00 | 100,00 |
| 1 | Prioritas I | 1.126.580.602.047,00 | 1.104.887.317.541,00 | 1.138.644.780.747,00 | 9,53 |
| 2 | Prioritas II | 3.870.953.795.861,19 | 3.419.028.488.260,28 | 2.723.611.091.862,99 | 28,23 |
| 3 | Prioritas III | 7.113.105.887.025,81 | 7.225.781.632.163,72 | 7.666.644.920.355,01 | 62,24 |

Sumber : BKAD & BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020

3.4. Dampak Pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020

Pandemi Covid-19 memberi dampak sangat besar diberbagai bidang yang membuat ekonomi menjadi terpuruk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang sangat drastis. Dampak covid-19 dari sisi ekonomi berimplikasi kepada tidak bergeraknya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber retribusi. Covid-19 turut mengganggu kegiatan-kegiatan yang selama ini sumber pendapatan dari sektor pajak yang dikelola Bapenda. Kurangnya pendapatan yang diterima dari sektor usaha itu, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioritas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan Covid-19. Kelesuan penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer kepada pemerintah daerah (pemda), baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sebagian besar APBD di tiap pemda bertumpu pada alokasi dana transfer dari pusat. Dalam struktur APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tumpuan anggaran dari dana transfer sekitar 54 persen. Sementara kabupaten/kota dengan posisi kapasitas fiskal rendah masih bertumpu pada dana transfer sekitar 70 persen, namun disisi lain Kementerian Keuangan perlu mengadakan penyesuaian dana transfer ke daerah. Secara umum Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi 33 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi 10 persen, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 30 persen.

Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Pokok tahun anggaran 2020, mengalami defisit akibat dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi semua sektor pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab defisit itu karena penerimaan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama turun sekitar 30 sampai 40 persen. Kemudian dana bagi hasil berkurang 50 persen, itu merupakan dana transfer dari pusat. Tidak hanya itu, setiap tahun pemerintah provinsi mendapatkan Rp. 500 miliar dana segar dari biaya cukai rokok. Sejak pandemi, mengalami pengurangan. Bahkan, pajak bahan bakar minyak (BBM) pun ikut berpengaruh dari Pertamina dana itu, pajak bahan bakar juga menurun jauh karena penjualan ikut turun dan lain sebagainya. Itulah menyebabkan defisit.

Adanya perubahan target pendapatan pajak ini merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial. penyesuaian (target pajak) menindaklanjuti

SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Dalam SKB itu diatur kepala daerah bisa melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.

Dalam APBD Pokok 2020 yang ditetapkan sebelumnya, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp. 3,849 triliun dalam setahun. Namun dalam perubahan parsial, target ini disesuaikan dan turun menjadi Rp. 2,842 Triliun. Berdasarkan realisasi penerimaan di sektor pajak sejak Januari sampai Juni (semester 1) tahun 2020 baru mencapai 53,87 persen atau senilai Rp. 1,531 triliun. Sementara pada tahun 2019 lalu pada periode Januari sampai Juni berhasil mencapai Rp. 1,63 triliun.

Realisasi pajak daerah Januari sampai Juni 2020 lebih rendah 6 persen dari Januari-Juni 2019. kalau dibandingkan dengan realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Rincian realisasi pajak pada semester I tahun 2020, yakni untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp.557,48 Miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp360,8 Miliar, lalu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp. 289,7 Miliar. Sementara realisasi pajak air permukaan Rp. 57,3 Miliar dan pajak rokok Rp. 265,7 Miliar. Masih rendahnya penerimaan di sektor pajak karena terbatasnya kegiatan optimalisasi pajak. Salah satu contohnya, Bapenda Sulawesi Selatan juga masih meniadakan penertiban jalan. Padahal, kegiatan itu berdampak besar pada penerimaan pajak di sektor PKB. Namun karena masih dalam masa wabah pandemi, maka dihentikan sementara waktu, kendalanya adalah karena masih terbatas upaya optimalisasi yang bisa dilakukan di situasi pandemi.

Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, pada semester I tahun 2020 sebesar 6,07 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pajak pada periode yang sama tahun sebelumnya. rendahnya capaian ini karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu maka perlu optimalisasi pembayaran pajak dimaksimalkan melalui aplikasi. Disamping pelayanan di tiap kantor unit samsat masih menerima pelayanan pembayaran pajak, namun tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Bapenda Sulawesi Selatan kembali memperpanjang insentif pembebasan denda pajak. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1574/VI/Tahun 2020. Pemberian insentif sedianya berakhir pada 29 Juni 2020 karena adanya penyesuaian (target pajak) sebagai tindak lanjut dari SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Dalam SKB itu, diatur kepala daerah bisa melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.

APBD Pokok 2020 yang telah ditetapkan, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp3,849 Triliun dalam setahun. Namun dalam perubahan parsial, target ini mengalami penurunan menjadi Rp. 2,842 Triliun. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2021 meningkat sebesar 13,11 persen atau senilai Rp 4,61 Triliun lebih. Jumlah ini bersumber dari perjalanan daerah, retribusi daerah, dan hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan akan kembali meningkat setelah pandemi Covid-19.

3.5. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui penggerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi. Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Dalam 5 tahun ke depan, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh pihak menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan solicited project maupun oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai unsolicited project. Saat ini, di Provinsi Sulawesi Selatan penyelenggaraan skema KPBU akan diterapkan pada pembangunan Rel Kereta Api antara Makassar-Parepare, Pembangunan Jalan Layang Tol Dalam Kota, PLTU Jeneponto Tahap II.

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasianya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Salah satu penerimaan negara yang dapat dijadikan alternatif adalah menerbitkan surat-surat berharga (SSB) Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan telah mempersiapkan sejumlah aturan dalam penerbitan SSB di daerah. PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, dimana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Dengan aturan tersebut, pemerintah daerah harus (1) menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek yang menghasilkan pendapatan dan kepentingan publik; (2) penerimaan hasil penerbitan SSB masuk ke dalam kas negara; (3) Jika proyek belum menghasilkan, maka pemda wajib menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi. Selain itu, sejumlah syarat seperti (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

sebelumnya; (3) Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan (4) mendapat persetujuan dari DPRD, pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan ijin dari Kementerian Keuangan.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

- a. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (revenue bond). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (general bond) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- c. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- d. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
- e. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Tata cara penerbitan obligasi daerah terdapat tiga tahapan yang harus dilewati oleh pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Tahapan tersebut meliputi:

Gambar III.1
Tata Cara Penerbitan Obligasi



3. Sistem Resi Gudang

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi

untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan jaminan lainnya sehingga dapat meningkatkan kredit/pembiayaan kepada petani, poktan, gapoktan, koperasi dan pelaku UMKM. Di samping itu SRG diterapkan untuk menyimpan hasil pertanian pada saat harga jual jatuh (tunda jual) sehingga dapat menjaga kestabilan harga/inflasi. Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Sistem Resi Gudang adalah kelaikan gudang (warehouse ability), diharapkan dengan Sistem Resi Gudang ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Implementasi SRG di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya UU No.9 Tahun 2006 kemudian diubah oleh UU No.9 Tahun 2011 tentang resi gudang, dengan komoditas SRG meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Perubahann Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, komoditi tersebut adalah Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh dan Kopra.

Sistem Resi Gudang (SRG) telah memiliki dasar hukum sejak ditetapkannya UU No.9 Tahun 2006 tentang SRG yang kemudian diamandemen dengan UU No.9 Tahun 2011. Resi gudang atau disebut juga warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang ini nantinya dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (Document of Title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan lain.

Oleh karena resi gudang merupakan instrumen surat berharga maka resi gudang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman. Resi Gudang dapat juga digunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka resi gudang. Derivatif Resi Gudang ini hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non bank dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Resi Gudang juga bermanfaat bagi dunia perbankan, pelaku usaha dan pemerintah, dimana beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ikut menjaga kestabilan serta dapat mengendalikan harga komoditi.
- 2) Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
- 3) Adanya jaminan ketersediaan barang dan bahan baku industri khususnya pada agroindustri.
- 4) Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional.
- 5) Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi.
- 6) Memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah.

- 7) Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan Sistem Resi Gudang lainnya.

Barang yang dapat diterbitkan resi gudangnya memiliki persyaratan: setiap barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum, diutamakan barang yang memiliki nilai strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor dan/atau tujuan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/11/2011 mempersyaratkan bahwa barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang paling sedikit memenuhi persyaratan : a) memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan; b) memenuhi standar mutu tertentu; c) jumlah minimum barang yang disimpan. Barang/ produk yang disimpan di gudang akan dinilai terkait dengan persyaratan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi. Berdasarkan Permendag No.08/M-DAG/PER/2/2013 terdapat 10 komoditas yang dapat disimpan di gudang dalam rangka SRG, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam, yang mana komoditas yang disimpan dalam gudang harus memenuhi persyaratan standar minimalnya.

Namun demikian pelaksanaan SRG masih menemui beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan Bappebti (2015), beberapa kendala dalam implementasi SRG diantaranya yaitu:

- 1) Masih kurangnya pemahaman dan komitmen masyarakat, pelaku usaha (petani, pedagang, pabrikan), dan dunia perbankan terhadap mekanisme Sistem Resi Gudang;
- 2) Keterbatasan infrastruktur gudang di daerah yang memenuhi persyaratan;
- 3) Kualitas hasil panen belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan;
- 4) Keterbatasan referensi harga komoditas;
- 5) Belum optimalnya sinergi kebijakan antar instansi terkait, pemda dan sektor swasta serta pelaku SRG;
- 6) Terbatasnya Pengelola Gudang di daerah yang memiliki permodalan cukup serta mampu melakukan pengelolaan dan pemasaran komoditas (integrasi bisnis);
- 7) Kurangnya SDM tenaga Badan Pengawas SRG.

4. Kelembagaan Resi Gudang:

Di dalam UU No 9 tahun 2006 telah diatur tentang lembaga yang terkait dengan resi gudang yang terdiri atas : Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah. Namun pada perkembangannya terdapat beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan resi gudang, diantaranya dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi para pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau mengalami kelalaian dalam mengelola sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya. Dengan kondisi tersebut akhirnya DPR melakukan amandemen UU No 9 Tahun 2006 menjadi UU No 9 tahun 2011 dengan menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang sehingga diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang resi gudang, bank dan pengelola gudang) semakin meningkat dan terlindungi. Adapun lembaga yang terkait dengan Sistem Resi Gudang adalah:

- a. **Badan Pengawas Resi Gudang.** Adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang melakukan pembinaan, pengaturan dan

pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan sistem resi gudang dan bertanggungjawab terhadap Menteri.

- b. Pengelola Gudang.** Adalah pihak yang melakukan usaha perdagangan baik milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang dan berhak menerbitkan resi gudang
- c. Lembaga Penilaian Kesesuaian.** Adalah lembaga yang mendapatkan persetujuan dari badan pengawas untuk melakukan sertifikasi, inspeksi dan pengujian berkaitan dengan barang, gudang dan pengelola gudang.
- d. Pusat Registrasi.** Adalah institusi yang melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatifnya yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
- e. Koordinasi Kelembagaan Pusat dan Daerah.** Adalah koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem resi gudang. Pemerintah Pusat mencakup penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penerapannya, melakukan koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan dan sektor terkait lainnya. Sedangkan pemerintah daerah mencakup pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang.
- f. Lembaga Jaminan Resi Gudang.** Adalah lembaga yang memiliki fungsi melindungi hak pemegang resi gudang dan atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan Sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.

5. Pembiayaan melalui pinjaman daerah

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan, dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa initial cash outflow yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun operational cash inflow yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko

ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total life-cycle cost yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI"), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
- 2) Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
- 3) Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
- 4) Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

- 1) Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
- 2) Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
- 3) Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
- 4) Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
- 5) Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

- 1) Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- 3) Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;

- b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

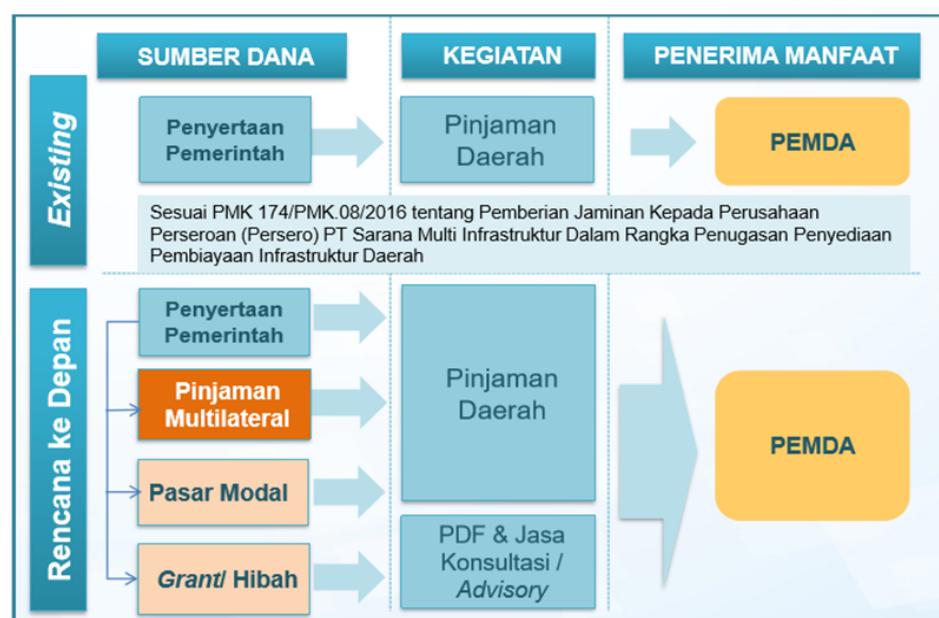
Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan: Regional Infrastructure Development Fund (RIDF):

Tujuan:

- 1) Meningkatkan akses pembiayaan infrastruktur di daerah, dengan menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga besar;
- 2) Mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat;
- 3) Meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola pinjaman yaitu dengan pembentukan debt management unit dan pelatihan personil terkait;
- 4) Mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan proyek yang baik, melalui penyediaan fasilitas Project Development Fund ("PDF"); dan
- 5) Meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable development) melalui kepatuhan/compliance terhadap environment and social safeguard.

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan secara lengkap dapat dilihat pada gambar skema berikut :

Gambar III.2
Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan



3.6 Proyeksi Kebutuhan Investasi di Sulawesi Selatan dan P. Sulawesi

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sulawesi, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang sekitar Rp.469.73 Triliun. Dimana di tahun 2021 khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan memperkirakan kebutuhan Investasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan sebesar Rp. 224,84 Triliun.

Tabel III. 21
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2020-2023

| Provinsi | Satuan | Baseline 2019 | Kebutuhan Investasi | | | |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sulawesi Utara | Rp. Triliun | 44,10 | 50,03 | 55,15 | 61,74 | 69,99 |
| Sulawesi Tengah | Rp. Triliun | 60,54 | 60,77 | 67,46 | 75,71 | 86,04 |
| Sulawesi Selatan | Rp. Triliun | 179,36 | 202,76 | 224,84 | 249,72 | 280,50 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Provinsi | Satuan | Baseline 2019 | Kebutuhan Investasi | | | |
|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sulawesi Tenggara | Rp. Triliun | 44,11 | 50,48 | 55,72 | 62,00 | 69,94 |
| Gorontalo | Rp. Triliun | 12,16 | 13,51 | 15,09 | 16,88 | 18,99 |
| Sulawesi Barat | Rp. Triliun | 10,66 | 14,77 | 16,04 | 17,55 | 19,28 |

Sumber : RPJMN 2020-2024 dan Data Diolah

Catatan : Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berbagai isu-isu strategis daerah yang berpengaruh terhadap proses pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2021-2023. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang, utamanya pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2023.

Uraian secara rinci pada bab ini meliputi; permasalahan pembangunan daerah yang dibagi menjadi dua aspek tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dan aspek Daya Saing. Pada aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 15 indikator sasaran dan pada aspek Daya Saing terdiri dari dua indikator sasaran pembangunan. Sementara permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) dan isu-isu strategis baik Global, nasional maupun isu strategis pembangunan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan perbedaan hasil pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode tertentu (misalnya; Lima tahun) dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dibuat. Permasalahan Pembangunan Daerah ini diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro (untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro (untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu *masalah pokok*, *masalah*, dan *akar masalah*. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara Masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan.

Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah, telah teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang ingin diselesaikan dalam Lima tahun ke depan, Pada Bab ini menjelaskan beberapa permasalahan pembangunan

daerah, sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan urusan wajib. Masalah pembangunan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berikut ini diuraikan 15 indikator permasalahan pembangunan daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat dan 2 indikator Daya Saing:

4.1.1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Sulawesi Selatan selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan. Data tahun 2019 IPM Sulawesi Selatan sebesar 71,66, lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 71,92. Capaian IPM Sulawesi Selatan ini secara relatif berada di urutan 14 dari 34 Provinsi di Indonesia, lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi dengan tingkat kemajuan pembangunan yang setara dengan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP). Penyebab dari rendanya IPM Sulawesi Selatan adalah rata-rata lama sekolah hanya 8,26 tahun, dengan kata lain bahwa lamanya bersekolah hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan yaitu masih rendahnya pemeratan akses layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni masyarakat provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka harapan hidup (AHH) Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 70,43 tahun, juga lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Nasional 71,34 tahun. Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan yang masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, masih rendahnya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk, dan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan belum optimal.

Adapun tingkat daya beli masyarakat Sulawesi Selatan yang masih tergolong rendah menjadi salah satu faktor rendahnya pembangunan manusia. Daya beli masyarakat yang disetarakan dengan pengeluaran perkapita sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Data terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2019 yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita pertahun masih lebih rendah dari capaian nasional pada tahun yang sama, yang disebabkan karena pendapatan masyarakat masih rendah. Dari pembangunan perspektif gender diukur berdasarkan beberapa indikator, diantaranya adalah Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD). Dimana IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. IPG di Provinsi Sulawesi Selatan dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,06, Hal ini disebabkan karena IPG di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan pada kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

4.1.2. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian yang belum optimal bila dilihat secara relatif dengan beberapa provinsi yang setara lainnya di Indonesia. Secara relatif tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai 8,56 % atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan 16 provinsi lainnya. Dua diantaranya Sulawesi Utara; 7,51 % untuk Regional Sulawesi dan Jawa Barat; 6,82 % untuk provinsi dengan skala ekonomi yang besar di Indonesia. Faktor utama

yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan di dorong oleh faktor kualitas manusia yang masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas. Adapun nilai PDRB perkapita Sulawesi Selatan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2019 Rp. 57,03 juta, masih lebih rendah dari target RPJMD dan masih lebih rendah dibandingkan dengan PDB perkapita Indonesia tahun 2019 sebesar Rp. 59,10 juta.

Jika melihat jumlah penduduk miskin menurut daerah, jumlah penduduk miskin masih didominasi penduduk di perdesaan, dimana tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan yang juga mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan di daerah perkotaan lebih rendah dibanding di perdesaan.

4.1.3. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai 4,62 %, masih tergolong tinggi dibandingkan dengan empat Provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Tengah; 3,15%, Sulawesi Tenggara; 3,59%, Sulawesi Barat; 3,18 % dan Gorontalo; 4,06%. Masih tingginya tingkat pengangguran Sulawesi Selatan tersebut terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan link and macth antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri. Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan mempunyai pola distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Penganggur dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,96 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 3,19 persen. Hal ini menggambarkan kondisi pasar kerja Sulawesi Selatan saat ini sebagian besar diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah. Selain itu, ketersediaan kesempatan kerja dari pengelolaan kegiatan dan sektor ekonomi yang masih berorientasi padat modal dari pada padat karya dan adanya kondisi ekonomi nasional dan daerah yang tidak stabil.

Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Sulawesi Selatan adalah adanya pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan. Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Penduduk usia kerja yang mencapai 6.744,9 ribu orang, terdapat 801,3 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 11,9 persen. Secara kewilayahan, penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 16,15 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 8,45 persen.

4.1.4. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan tren melambat dalam tiga tahun terakhir. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,42 persen pada tahun 2016, angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 6,92 persen yang merupakan angka terendah sedikitnya dalam 10 tahun terakhir.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir terutama dikontribusi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini terus

menunjukkan pertumbuhan yang melambat sejak tahun 2017, dan pada tahun 2019, sektor ini hanya bertumbuh 2,58 persen yang merupakan pertumbuhan terendah dalam satu dekade terakhir. Walaupun demikian, sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, yaitu rata-rata 22,70 persen per tahun.

Perlambatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2019 terjadi karena subsektor tanaman pangan dan suksesor tanaman perkebunan masing-masing mengalami kontraksi -2,78 persen dan -0,01 persen. Kedua subsektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Menurunnya nilai tambah di subsektor tanaman pangan karena adanya bencana banjir yang terjadi pada 13 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sehingga luas panen maupun produksi padi menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan menurunnya nilai tambah subsektor tanaman perkebunan, karena menurunnya volume produksi dan tingkat produktivitas beberapa komoditas unggulan seperti kakao dan kopi robusta. Subsektor lainnya yang mengalami pelambatan pada tahun 2019 yaitu subsektor kehutanan dan penebangan kayu yang tumbuh negatif -1,29 persen.

Pada triwulan III tahun 2020, perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,94 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,83 persen; Konstruksi sebesar 14,45 persen dan Industri Pengolahan sebesar 12,74 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 64,96, namun mengalami kontraksi sebagai akibat dari pandemi covid-19. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 tercatat -1,08 persen disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan komponen Ekspor Barang dan Jasa. Komponen PMTB tumbuh positif sebesar 2,35 persen dan Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 1,50 persen. Sementara itu komponen pengeluaran yang lain mengalami kontraksi yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mengalami kontraksi sebesar -1,55 persen; diikuti oleh komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -4,39 persen; dan selanjutnya komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang terkontraksi sebesar -7,61 persen.

4.1.5. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat diukur dengan Rasio Gini Sulawesi Selatan masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini Sulawesi Selatan hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan yang terus membaik, tetapi secara relatif masih menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dari ketimpangan nasional pada tahun yang sama. Selain itu bila dibandingkan dengan Rasio Gini di Pulau Sulawesi maka tingkat ketimpangan Sulawesi Selatan tidak lebih baik dengan tiga provinsi lainnya, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Rasio Gini Sulawesi Selatan tahun 2019 mencapai 0,391, yang mana capaian ini meningkat dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu 0,385. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan yang terpusat pada kegiatan ekonomi yang padat modal dan tidak melibatkan sebagian besar pelaku ekonomi di daerah. Hal lain yang menyebabkan tingginya ketimpangan pendapat masyarakat adalah adanya pengelolaan potensi unggulan daerah belum optimal diantaranya potensi pertanian, perikanan, dan peternakan. Selainnya itu juga masih tingginya angka ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat desa dan kota.

4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan standarisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Berdasarkan data indeks reformasi birokrasi pada tahun 2019 pencapaiannya "B". Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan provinsi besar terutama di Pulau Jawa yang memiliki kinerja instansi pemerintah yang lebih baik. Adapun permasalahan pembangunan pada tata Kelola pemerintahan yaitu:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana pada tahun 2019 nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan hanya bernilai B, hal ini sebabkan karena hal-hal berikut: penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan belum sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD, cascading kinerja antara sasaran dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal, kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan OPD belum optimal, dan masih lemahnya evaluasi AKIP perangkat daerah.
2. Masih Rendahnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Pengukuran kepuasan terhadap pelayanan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.. Sebagai gambaran hasil capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 3,49 dengan kategori nilai "B-. Sedangkan hasil nilai pengukuran IPP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar 4,0, mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, sehingga indeks IPP masih pada kategori nilai "B". Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan 6 (enam) aspek penilaian pelayanan publik yang meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

4.1.7. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang diukur dengan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Angka indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). indeks Williamson sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang indeks Williamson sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Nilai indeks Williamson dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Indeks Williamson bernilai $> 0,5$ menandakan kesenjangan tinggi;
- b. Indeks Williamson bernilai $0,35 - 0,5$ menandakan kesenjangan sedang;
- c. Indeks Williamson bernilai $< 0,35$ menandakan kesenjangan rendah

Indeks Ketimpangan Williamson Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,63 dari tahun 2018 dengan nilai indeks 0,622 (kesenjangan tinggi). Hal ini menunjukkan pembangunan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum merata pencapaiannya, ditandai dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dalam menjamin kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia antar daerah, masih kurangnya peran pusat-

pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan, Terkonsentrasiannya kegiatan ekonomi wilayah tertentu, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah berdampak pada semakin tingginya tingkat ketimpangan dan perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi geografis antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi. Disamping itu, jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir belum optimal, interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum optimal, infrastruktur transportasi, pertanian, dan energi pada daerah-daerah kepulauan dan terpencil juga belum optimal. Sedang untuk capaian Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 hanya mencapai 76,06 yang diukur dari lima komponen komposit yang capaiannya yang masuh minim antara lain : Kemantapan Jalan (15,38), Ketersediaan Terminal (2,14), Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Regional (20,00), Rasio Elektrifikasi Desa (19,80) dan Rasio Jaringan Irigasi (3,30).

4.1.8. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam belum mampu secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lemahnya hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat.

Nilai tambah ekonomi dan tingkat produktivitas faktor produksi daerah yang masih rendah. Hal ini terutama pengelolaan sumberdaya ekonomi yang belum optimal pada daerah-daerah dengan potensi sumberdaya alam yang besar. Selain itu belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor yang bernilai tambah tinggi seperti industri pengolahan dan kegiatan sektor jasa juga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya PDRB perkapita di Sulawesi Selatan

Disamping itu belum optimalnya pengintegrasian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upaya -upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk keterpeliharaan kualitas lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) diukur berdasarkan 3 indikator komposit yang harus diperhatikan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2018 capaian IKLH hanya sebesar 74,83, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas tutupan lahan. Intensitas dan efektivitas reboisasi, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan belum optimal, koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah belum optimal.

Adapun potensi penurunan emisi GRK di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih di bawah target tahun 2019 sebesar 1,1. Rendahnya capaian potensi penurunan emisi GRK tahun 2019 sebesar 0,86 juta ton CO2Eq, hal ini disebabkan karena isu perubahan iklim di daerah kabupaten/kota belum jadi prioritas, sehingga untuk melakukan koordinasi guna pengumpulan data dan lainnya masih sulit diperoleh. Dan Aksi-aksi mitigasi yang telah dilakukan belum dapat dievaluasi berapa penurunan emisi sebenarnya (aktual) yang telah diturunkan.

Secara detail, rumusan masalah pokok, masalah, dan akar masalah secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel IV.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

| No. | Indikator | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|--|---|
| 1. | Nilai SAKIP Provinsi | Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal | Masih Belum efektivnya kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi pemerintahan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur. • Belum optimalnya Penataan dan penguatan kelembagaan. • Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. • Kurang optimalnya pengawasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. • Belum optimalnya Implementasi e-government. |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kepuasan Publik | Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal | Masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat, dan Pengembangan barang layanan publik. • Masih kurangnya Pengelolaan informasi publik. • Kurang optimalnya Penataan organisasi Pemerintah Daerah |
| 3 | Indeks Aksesibilitas Infrastruktur | Ketersediaan Infrastruktur wilayah yang belum memadai | Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar | <ul style="list-style-type: none"> • adanya kesenjangan antar wilayah di Sulsel yaitu pemenuhan perumahan dan pemukiman. Rumah atau tempat tinggal belum merata. • Kurangnya konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan; |
| | | | Infrastruktur perhubungan juga belum memadai | <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya jalur penghubung antar kawasan wisata • Masih rendahnya akses ke daerah Terluar, Tertinggal, Terdalam, dan Perbatasan (3TP) • Masih rendahnya kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta. |
| | | | Masih terdapat | <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Indikator | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | daerah yang terisolir | <p>infrastruktur jalan-jalur distribusi dari pusat produksi pertanian di pelosok daerah. Disamping hal tersebut masih ada beberapa masalah sebagai akibat rendahnya infrastruktur di wilayah terisolir antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investasi rendah ikalau biaya logistik dan distribusi masih mahal • Rendahnya Pendapatan Perkapita Penduduk • Lokasi jauh dari pusat perekonomian Tidak terhubung langsung dengan jalan provinsi (dibatasi jalan kabupaten). • Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan koneksi antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; |
| 4. | Pertumbuhan Ekonomi | Melambatnya pertumbuhan ekonomi | Belum optimalnya Kontribusi PDRB kawasan (PDRB per kapita); Wilayah Domestik dan Regional | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pemerataan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum merata ke setiap golongan miskin • Rendahnya untuk mengembangkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam • Pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan Produk hasil-hasil ekonomi ke seluruh penduduk, • Masih rendahnya pendapatan masyarakat • Adanya kontraksi dari sektor pertanian yang mempengaruhi nilai PDRB. • Memperkuat dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kurang optimalnya peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan; • Kurangnya Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Indikator | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|------------------------------|---|---|---|
| | | | | <p>dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi |
| 5. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Masih Tingginya Jumlah Penduduk miskin | tingginya jumlah penduduk miskin yang menganggur | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya daya belipenduduk • Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah. • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat • Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki • Rendahnya Pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor sektor usaha mikro, sektor usaha kecil, dan sektor usaha menengah, dapat menjadi penyelemat krisis ekonomi seperti Covid -19 |
| | | Meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja | Masih tingginya pengangguran terbuka | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki • Rendahnya Pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor sektor usaha mikro, sektor usaha kecil, dan sektor usaha menengah, dapat menjadi penyelemat krisis ekonomi seperti Covid -19 • Masih tingginya persebaran persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan |
| 6. | Indeks Williamson | Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat | Daerah relatif tertinggal (Low Growth and Low Income), merupakan daerah-daerah yang mempunyai | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata. • Kontribusi masing-masing daerah terhadap pemerataan pembangunan wilayah belum |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Indikator | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|-------------------|---|--|--|
| | | | tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya dibawah rata-rata | <p>merata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan karakteristik dan heterogenitas antar wilayah masih sangat besar • Masih kurangnya peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan |
| 7. | Gini Rasio | Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat | Masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesenjangan pembangunan antar daerah, desa dan kota masih tinggi • Adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar sektor serta antar daerah. |
| 8. | Indeks Pendidikan | Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Rendahnya angka rata-rata lama Sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil • Akses pendidikan sulit dijangkau • Tidak merataanya penyebaran guru antar wilayah • Kurangnya link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi; • Kesenjangan kualitas sumber daya manusia melalui vokasi merupakan salah satu variable yang bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja. • Kurangnya kualitasnya manusia (Guru- yang ditempatkan pada sekolah-sekolah Vokasional) pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. • Kurangnya kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Indikator | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | <p>mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industry;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya sarana prasarana SMK untuk mendukung link and match antara sekolah vokasi dengan dunia industri |
| | | | Rendahnya angka harapan lama Sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan tingkat sosial : belum merata antara masyarakat miskin dan golongan masyarakat menengah ke atas • Keadaan Geografis : Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik • Sebaran sekolah tidak merata : Sebagian besar pendirian lembaga pendidikan masih berada dan berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan minat untuk membangun lembaga pendidikan di daerah pedesaan masih sangat kurang |
| 9. | Indeks Kesehatan | Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Masih rendahnya Angka Harapan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesejahteraan penduduk • Rendahnya derajat kesehatan • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi • Masih tingginya kasus gizi buruk balita • Rendahnya asupan pangan dan gizi seimbang • Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) • Belum meratanya tenaga Kesehatan |
| 10. | IPG dan IDG | Pembangunan Gender belum optimal | Masih rendah IPG dan IDG | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang; • Belum optimalnya pemenuhan hak anak; • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. • Masih rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Indikator | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|--|---|
| | | | | bersaing dengan kaum lelaki dalam pembangunan, sehingga posisi penting dalam pemerintahan maupun dunia usaha didominasi oleh kaum lelaki. |
| 11 | Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) | Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam | Rendahnya produktivitas tenaga kerja sumber daya alam | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat produktivitas pendapatan masih rendah • Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani. • Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal. • Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. • Belum optimalnya terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. • Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbangan jarak dengan pasar. |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup | Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Eksplotasi & Dan Abarasibanyaknya IUP (izin usaha pertambangan) yang terus berjalan tentu menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan ekosistem karst • Rusaknya sistem ekologi mulai dari hutan hingga pencemaran air disebabkan faktor pertambangan • Kurang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dapat memperparah rusaknya ekosistem. • Kurangnya pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. |
| 13 | Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton) | Belum optimalnya pengelolaan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan emisi dapat meningkat jika skenario yang | <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan secara kumulatif perlu dijalankan secara tepat |

| No. | Indikator | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|---------------|--------------------|---|
| | CO2Eq) | hidup | berbeda digunakan. | <ul style="list-style-type: none"> • Kurang data data yang dapat dipertanggungjawabkan • Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energy dan transportasi. |

4.2. Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM),
- Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun,
- Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM),
- Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
- Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama,
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
- Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.

2. Kesehatan

- Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
- Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- Masih rendahnya cakupan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani.
- Rendahnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
- Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
- Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Bayi
- Masih rendanya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
- Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Nifas
- Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita
- Masih rendahnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin.
- Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
- Kurangnya sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
- Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
- Masih tingginya prevalensi angka stunting

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih kurangnya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik.
- Masih rendahnya Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter).

- c. Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota;
- d. Masih rendahnya progres revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota, sertamasih terbatasnya rencana rinci tata ruang yang telah disusun
- e. Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
- f. Belum optimalnya pengembangan basis data penataan ruang dalam skala Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

- a. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata
- b. Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi
- c. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan
- d. Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan Kawasan permukiman.
- e. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
- b. Penegakan PERDA belum optimal

6. Sosial

- a. Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun belum optimal.
- b. Masih minimnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
- c. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
- d. Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang belum optimal
- e. Belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan sosial pada korban bencana alam
- f. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia.
- g. Minimnya tempat-tempat sosial/penampungan bagi usia lanjut

4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Tingginya Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
- b. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB)
- c. Rendahnya besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
- d. Masih rendahnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja.
- e. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
- f. Tingginya pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi
- g. Menurunnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja di Sulawesi Selatan
- h. Rendahnya daya saing tenaga kerja
- i. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

- j. Belum kondusifnya hubungan industrial dan rendahnya kesadaran masyarakat dan pengusaha maupun syarikat pekerja/buruh dalam pelaku hubungan industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Pelembagaan PUG 7 prasyarat PUG pada Lembaga Pemerintah belum optimal
- b. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
- c. Layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat belum terstandarisasi
- d. Ketersediaan data dan informasi gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun
- e. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahun
- f. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi
- g. Jumlah petugas layanan terlatih dan mampu tata laksana pada unit layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota masih sangat sedikit
- h. Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistic integrative, baik inter maupun antar sektor dan wilayah
- i. Ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak masih kurang
- j. Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender, masih sangat kurang.

3. Pangan

- a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama (Beras, jagung dan kedelai).
- b. Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
- c. Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
- d. Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.
- e. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.

4. Pertanahan

- a. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara.
- b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan perencanaan, serta belum dilaksanakannya pemantauan terhadap penerbitan ijin penetapan lokasi;
- c. Belum optimalnya jangkauan dan pemahaman Reforma Agraria pada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
- d. Masih banyaknya ijin Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum teridentifikasi kesesuaian pemanfaatannya serta yang telah habis masa pakainya.
- e. Belum tersedianya Perda LP2B yang berbasis spasial dan terintegrasi dengan RTR agar dapat berfungsi sebagai perangkat pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

5. Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi
- b. Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah

- c. Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan
- d. Kemampuan penanganan sampah khususnya upaya mengurangan sampah dan limbah di Sulawesi Selatan masih terbatas.
- e. Belum ada rekomendasi dari pemerintah setempat untuk penunjukan lokasi TPA Regional
- f. Minimnya data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup
- g. Kurangnya sinergitas terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah terkait.
- h. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sector pembangunan.
- b. Belum optimalnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
- c. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih redahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
- b. Masih belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Angka kelahiran total masih relatif tinggi
- b. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- c. Tingginya *unmetneed* ber KB ;
- d. Tingginya peserta KB yang putus pakai (*drop out*)
- e. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- f. Rendahnya keikutsertaan KB pria
- g. Melemahnya kualitas keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga
- h. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program bangga kencana.
- i. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga

9. Perhubungan

- a. Belum optimalnya pengembangan koridor dan peningkatan jumlah armada bus angkutan umum massal berbasis jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT) untuk membantu mengatasi kemacetan jalan dan peningkatan mobilitas antar wilayah;
- b. Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang
- c. tipe B secara kualitas bangunan utama dan penunjang terminal maupun secara kuantitas peningkatan jumlah terminal tipe B di Sulawesi Selatan.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai jumlah dan standar, khususnya pada ruas jalan kewenangan provinsi
- e. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada pelabuhan pengumpulan regional di Sulawesi Selatan.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi public

- b. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai
- c. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.

11. Koperasi dan UKM

- a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
- b. Menurunnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi;
- c. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.

12. Penanaman Modal

- a. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain permasalahan pada perolehan lahan dan ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan
- b. Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan;
- c. Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

14. Statistik

- a. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
- b. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
- c. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral.

15. Persandian

- a. Rebdahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assesment

16. Kebudayaan

- a. Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

17. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
- b. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
- c. Belum optimalnya sarpras dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat.

18. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan karsipan di instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
- c. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi” untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan *e-arsip* terintegrasi.

4.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam.
- b. Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
- c. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan.
- d. Masih kurangnya ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penyusunan rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- f. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

2. Pariwisata

- a. Belum optimalnya pengembangan pasar wisatawan ke Sulawesi Selatan.
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta pemasaran destinasi pariwisata.
- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan.
- e. Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata.
- f. Pembiayaan untuk pengembangan Usaha Pariwisata di Sulawesi Selatan masih tinggi;

3. Pertanian

- a. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
- b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pada beberapa wilayah, khususnya pada Kabupaten pendukung ketahanan pangan Sulawesi Selatan akan mempengaruhi peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional;
- c. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisiensikan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientas pada on-farm;
- e. Belum tercapainya mutu hasil pertanian dan perkebunan yang diharapkan, dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan;
- f. Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
- g. Masih dibutuhkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan serta peningkatan upaya pendampingan kelompok peternak.
- h. Menurunnya ketersedian beras di Sulawesi Selatan
- i. Menurunnya ketersediaan energi dan protein perkapita di Sulawesi Selatan

- j. Terjadi rentan Terhadap Kerawanan Pangan di Sulawesi Selatan
- k. Menurunnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan
- l. Menurunnya Produksi sektor pertanian di Sulawesi Selatan
- m. Masih minimnya penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
- n. Menurunnya Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
- o. Menurunnya produksi sektor perkebunan di Sulawesi Selatan.
- p. Dampak perubahan iklim global yaitu perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir;
- q. Degradasi kualitas lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan;
- r. Meningkatnya alih fungsi lahan;
- s. Terbatasnya infrastruktur pengairan dan jalan usahatani;
- t. Belum optimalnya laboratorium pelayanan uji standar dan mutu bidang pertanian dan bidang perkebunan;
- u. Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu belum cukup;
- v. Belum optimalnya penggunaan pestisida/obat-obatan pertanian yang ramah lingkungan;
- w. Masih kurangnya alat dan mesin pertanian;
- x. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit yang bermutu;
- y. Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usahatani;
- z. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan petani baik formal maupun informal;
- aa. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi pertanian;
- bb. Rendahnya harga komoditas tertentu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- cc. Rendahnya daya saing komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- dd. Konsumsi beras masih cukup tinggi sehingga terjadi ketidakseimbangan konsumsi bahan pangan;
- ee. Belum optimalnya dan belum sepenuhnya dipahami tentang keadilan dan kesetaraan gender untuk diterapkan
- ff. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- gg. Masih terbatasnya Pemberian subsidi input produksi dan outputnya, meningkatkan produktivitasnya
- hh. Masih rendahnya jaminan harga dan Jaminan peningkatan pendapatan petani yang berlahan sempit.
- ii. Belum Optimalnya pengelolaan varietas unggulan di Sulawesi Selatan
- jj. Degradasi lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan.

4. Kehutanan

- a. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;

- d. Belum Optimlnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- e. Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
- f. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah
- g. Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetensi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluhan Kehutanan, Polisi Kehutanan
- h. Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis kawasan hutan.
- i. Perubahan/ alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan.
- j. Tingginya dinamika konflik penguasaan lahan di daerah akibat belum tersosialisasikannya secara baik rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan hingga pada tahap penetapan kawasan hutan dan kawasan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- k. Belum maksimalnya pelayanan publik bidang keplanologian, antara lain disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia dan minimnya fasilitas penunjang kegiatan seperti pengambilan dan penyusunan data spasial bidang kehutanan.
- l. Fasilitas berupa peralatan kegiatan inventarisasi hutan masih terbatas
- m. Tidak seimbangnya kapasitas izin industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku kayu.
- n. Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan.
- o. Pelayanan terhadap masyarakat masih terkesan berbelit, lamban dan mahal akibat personil belum ditunjang oleh profesionalisme dan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
- p. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan
- q. Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.
- r. Data detail kondisi dan karakteristik DAS sebagai dasar perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana pengelolaan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran secara tepat sesuai skala prioritas.
- s. Kewenangan kegiatan RHL dan Pengelolaan DAS Provinsi Sulawesi Selatan berada di luar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL.
- t. Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- u. Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan
- v. Tingkat sedimentasi sungai masih relatif tinggi, banyak dibutuhkan bangunan perangkap sedimen (gully plug, dam penahan dan Pengendali, rorak dan embung).
- w. Tingkat erosi permukaan masih tinggi ditandai dengan tingginya laju aliran permukaan (run off), rendahnya penyerapan (infiltrasi) dan mempengaruhi jumlah kandungan air tanah
- x. Konflik Tenurial yang masih berkepanjangan

- y. Pengrusakan hutan oleh masyarakat karna alasan ekonomi, batas kawasan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan.
- z. Rasio jumlah tenaga Pengamanan Hutan/ Polisi Kehutanan dibanding dengan luas Kawasan hutan yang begitu luas belum ideal.
 - aa. Dalam upaya penegakan hukum (Penyidikan) Polisi Kehutanan
 - bb. Belum optimalnya kapasitas SDM Polisi Kehutanan.
 - cc. Keterbatasan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - dd. Tingginya kerusakan hutan di Sulawesi Selatan
 - ee. Banyaknya produk hukum kehutanan yang belum tersosialisasi dan belum dipahami masyarakat dan para pihak kehutanan di daerah.
 - ff. Tingginya kepentingan pemodal dalam pemanfaatan sumberdaya hutan
 - gg. Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;
 - hh. Belum optimalnya pelaksanaan operasi/patrol rutin penertiban dan pengamanan hutan serta penanganan tindak pelanggaran dibidang kehutanan;
 - ii. Masih rendahnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan.
 - jj. Jejaring pemasaran produk hasil usaha kelompok tani masih bersifat local

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (good mining practice);
- b. Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik.
- c. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah
- d. Masih bergantung pada penyediaan energi fosil
- e. Masih ada daerah di pulau terpencil, terisolir dan terdepan yang belum teraliri listrik
- f. Jumlah Produksi Komoditas Tambang Menurun
- g. Masih banyak daerah dan pualu yang belum mendapatkan air bersih di Sulawesi Selatan
- h. Penurunan Kuantitas Air Tanah di Sulawesi Selatan
 - i. Masih Banyak Pemanfaatan Air Tanah Tanpa Izin
 - j. Masih banyaknya penambangan tanpa izin
 - k. Sumber Daya Manusia yang belum memadai
 - l. Sarana dan prasarana yang belum memada

6. Perdagangan

- a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modern karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Belum optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk dan Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor.
- c. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen dan penerapan SNI.

7. Industri

- a. Tingkat produktivitas pendapatan masih rendah
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani.

- c. Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal.
- d. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas.
- e. Belum optimalnya terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani.
- f. Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbangan jarak dengan pasar.
- g. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
- h. Belum meratanya persebaran industri di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan
- i. Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
- j. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;
- k. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;
- l. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi;
- m. Ketransmigrasi Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
- n. Kurangnya kesiapan provinsi penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.
- o. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

4.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
- b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
- c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
- d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
- e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

- a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru dari sektor PAP.;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

- a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;

- b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

5. Pengawasan

- a. Masih rendahnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun ekternal;
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD
- e. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indicator dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.
- f. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan OPD belum memadai sehingga belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan berdasarkan analisis resiko.
- g. Belum Optimalnya Keterlibatan Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat di butuhkan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik sehingga masih di perlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- h. Penyelesaian Rekomendasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal hasil audit masih belum cukup memadai. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan.
- i. Kualitas penyelenggaraan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih menunjukkan kabupaten/kota hasil agregasi yang cukup memuaskan. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap unit kerja.
- j. Pengelolaan asset pemerintah provinsi oleh OPD khususnya dalam pengelolaan administrasi kepemilikan serta inventarisasi aset masih belum tertib.
- k. Tingkat Kapabilitas Berdasarkan Penilaian Mandiri (self assessment) Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori "Infrastructure" atau di "Level 2" dari lima tingkatan (level).

4.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

4.3.1. Isu Strategis Global

4.3.1.1. Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkorfirmasi terkena virus Corona.

Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam.

Di Sulawesi Selatan, pada Bulan Juli 2020, angka pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 15.485 orang dari 1.174 perusahaan dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dimana pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019.

Kegiatan ekspor impor juga terkena dampak dengan adanya Covid-19. Selama ini, China merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya Virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Permintaan bahan mentah seperti komoditi batu bara dan minyak sawit mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi pula ekspor Indonesia bahkan berimbang terhadap penurunan harga komoditi ekspor. Komoditi ekspor ke China adalah rumput laut, udang, telur ikan terbang, ikan laut, kakao, kacang mete, merica, dan marmer. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk mengevaluasi pergerakan ekspor impor daerah, sekaligus mencari peluang pasar baru sehingga kondisi tidak stagnan.

4.3.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/-*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat

tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggt yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan *SDG's* ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian *SDG's*. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan *SDG's* tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana *SDG's* sudah menjadi *mainstreaming* untuk pembangunan indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi *SDG's* di Indonesia, yaitu; (1) *SDG's* adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi *SDG's*, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target *SDG's* dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/*SDG's* Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target
- 2) Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target
- 3) Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target
- 4) Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target
- 5) Tujuan 5: Kesetaraan Gender, meliputi 5 target
- 6) Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target
- 7) Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target
- 8) Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target
- 9) Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target
- 10) Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target
- 11) Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target
- 12) Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target
- 13) Tujuan 13: Penaganan Perubahan Iklim, meliputi 2 target
- 14) Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target
- 15) Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target
- 16) Tujuan 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target
- 17) Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

4.3.1.3. *Perubahan Iklim*

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya

musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP)* -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

4.3.1.4. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupti di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu

antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawarkan lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata

halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

4.3.2. Isu Strategis Nasional

4.3.2.1 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandardkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II .

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

- l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

4.3.2.3 *Bonus Demografi*

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus manangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

4.3.2.2. Isu Strategis Daerah

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuously*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam mantap pada tahun 2019 baru mencapai 61,52% dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan tida mantap yaitu masih ada 38,48% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan kondisi rusak berat sepanjang 453,70 Km (22,58%). Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat agar dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2019 telah meningkat mencapai 56,98 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2019 (Periode September) Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pada urutan ke-29 di Indonesia (0,391). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 8,99 % pada tahun 2019.

5. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan tahun 2019 berada di angka 71,66 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 8,26 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan.

Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut sulawesi selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

7. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah

industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

- 1) hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
- 2) mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
- 3) mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
- 4) percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking).
- 5) meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

8. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.

Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembangmenjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**“Sulawesi Selatan Yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023, dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V.1.
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**

| Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|--|------------------|--|
| Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter | Inovatif | Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani” |
| | Kompetitif | Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas” |
| | Produktif | Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”. |
| | Inklusif | Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”. |
| | Berkarakter | Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”. |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

5.2. Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Sulawesi Selatan disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Sulawesi Selatan yang **Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter meliputi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Sulawesi selatan 2018 - 2023 dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel V.2.
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Sulawesi Selatan
Tahun 2018 - 2023**

| No. | Pokok-Pokok Visi | Misi |
|-----|------------------|--|
| 1. | Inovatif | (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif |
| 2. | Kompetitif | (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter |
| 3. | Produktif | (3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif (5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan. |
| 4. | Inklusif | (2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan <i>Aksesibel</i> (5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan. |
| 5. | Berkarakter | (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter |

Penjelasan masing-masing misi sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

**Tabel V.3.
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 -2023**

| No. | Misi | Penjelasan Misi |
|-----|---|--|
| 1. | Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif | Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi |
| 2. | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel | Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-koneksivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir |
| 3. | Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif | Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah |
| 4. | Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah, meningkatkan moralitas dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan |
| 5. | Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan | Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam |

Misi pembangunan Sulawesi Selatan sejalan dengan arahan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel V.4.
**Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

| No. | Misi RPJMN 2020-2024 | Misi RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 |
|-----|--|---|
| 1. | Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia | Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter |
| 2. | Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing | Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan |
| 3. | Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel |
| 4. | Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan |
| 5. | Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa | Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter |
| 6. | Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya | Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif |
| 7. | Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga | |
| 8. | Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya | |
| 9. | Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan | |

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019 - 2023 dalam bentuk pernyataan – pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah. Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2021-2023). Sasaran ini juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018- 2023 berdasarkan Misi, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi 1 adalah : **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penjabaran tujuan pada Misi 2 adalah : **Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah

3. Penjabaran tujuan pada Misi 3 adalah: **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
 - b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat
4. Penjabaran tujuan pada Misi 4 adalah: **Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
 - d. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
5. Penjabaran tujuan pada Misi 5 terbagi atas 2 tujuan yaitu :
 - **Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
 - **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**, dengan rumusan sasaran :
 - a. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan diatas, selanjutnya disertai dengan indikator tujuan dan sasaran setiap tahun untuk menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur. Secara detail, indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya tahun 2020 - 2023 terlihat pada tabel berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Tabel V.5.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan**

| | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 | | Target Kinerja | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Misi 1 | Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif | | | | | | | | | |
| | Tujuan 1 Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik | 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | Huruf/ angka | B | B (70,00) | B (60,07) | BB (71 – 80) | BB (71 – 80) | A (81 – 90) |
| | Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | 2. | Nilai SAKIP Provinsi | Huruf/ angka | B | B (65,06) | B (63,020) | BB (>70-80) | A (>80-90) | A (>80-90) |
| Misi 2 | Sasaran 2 Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public | 3. | Indeks Pelayanan Publik | Huruf/ angka | B | - | - | B (3,51–4) | A- (4,01–4,50) | A (4,51 – 5,0) |
| | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel | | | | | | | | | |
| | Tujuan 2 Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah | 4. | Indeks Williamson | Angka | 0,639 | 0,62 | 0,620 | 0,610 | 0,608 | 0,607 |
| Misi 3 | Sasaran 3 Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah | 5. | Indeks Layanan Infrastruktur | Angka | 76,06 | 63,09 | 77,79 | 79,50 | 81,70 | 83,40 |
| | Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif | | | | | | | | | |
| | Tujuan 3 Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata | 6. | PDRB Perkapita ADHB | Rp. Juta | 56,98 | 56,69 | 56,51 | 59,23 | 62,37 | 65,98 |
| | | 7. | Tingkat Kemiskinan | % | 8,56 (Sept.) | 12,19 | 8,99 | 8,70 | 8,10 | 7,45 |
| | Sasaran 4 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah | 8. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4,62 (Agust.) | 8,79 | 6,31 | 6,08 | 5,9 | 5,69 |
| | Sasaran 5 Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat | 9. | Rasio Gini | Angka | 0,391 (Sept.) | 0,414 | 0,382 | 0,382 | 0,381 | 0,381 |
| | | | | | | | | | | 0,38 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 | | Target Kinerja | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
|--------|---|--|--------|---|-----------------------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | Target | Realisasi | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Misi 4 | Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | | | | | | | | | | |
| Misi 4 | Tujuan 4 | Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | 10. | IPM | Angka | 71,66 | 72,18 | 71,93 | 72,20 | 72,57 | 73,05 |
| | Sasaran 6 | Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan | 11. | Indeks Pendidikan | Angka | 64,64 | 65,62 | 65,29 | 66,29 | 66,57 | 67,05 |
| | Sasaran 7 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 12. | Indeks Kesehatan | Angka | 77,58 | 77,55 | 77,80 | 77,76 | 77,82 | 77,86 |
| | Sasaran 8 | Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan | 13. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 76,01 | 75,54 | 74,78 | 75,21 | 76,36 | 77,23 |
| | Sasaran 9 | Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat | 14. | Angka kriminalitas | Kasus | 25.121 (2018) | - | 24,845 | 24,709 | 24,573 | 24,438 |
| Misi 5 | Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan | | | | | | | | | | |
| Misi 5 | Tujuan 5 | Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah | 15. | Pertumbuhan ekonomi | % | 6,92 | -0,73 | -0,70 | 4,10–5,55 | 4,62–5,98 | 5,04–6,52 |
| | Sasaran 10 | Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah | 16. | Produktifitas Total Daerah | Rp/- Angkatan Kerja | 82.027.871 | 80.719.199 | 76.744.453 | 76.913.142 | 77.086.000 | 77.349.122 |
| | Tujuan 6 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan | 17. | IKLH | poin | 64,76 | 75,79 | 71,75 | 72,25 | 72,63 | 72,84 |
| | Sasaran 11 | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 18. | Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq) | Juta Ton CO ₂ Eq | 0,86 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,198 | 1,347 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Berdasarkan tabel V.5 diatas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Sulawesi Selatan terdiri atas 6 tujuan, 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 7 indikator tujuan dan 11 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Sulawesi Selatan sebanyak 18 indikator.

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD Perubahan 2018 – 2023 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005–2025. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 10 sasaran pokok RPJPD 2005–2025 yang didukung oleh 5 tujuan dan 6 sasaran yang terdapat dalam RPJMD perubahan 2018–2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V.6.
Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2018-2023
Provinsi Sulawesi Selatan**

| Sasaran Pokok RPJPD 2005 - 2025 | Indikator | Target RPJPD Periode 2020-2025 | Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 | Indikator | Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023) |
|--|---|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai dampak dari keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada berbagai level wilayah (kab./kota dan provinsi) dalam berbagai upaya pembangunan. (S1) | Indeks Pembangunan Manusia | 74,71 | Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif (T4) | Indeks Pembangunan Manusia | 73,05 |
| Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesional dan memiliki mentalitas/- karakter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. (S2) | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Tahun | 7,99 | Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan (S6) | Indeks Pendidikan | 67,05 |
| | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 16,47 | | | |
| Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses untuk semua lapisan dan golongan. (S3) | Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir | 71,27 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S7) | Indeks Kesehatan | 77,86 |
| Meningkatnya keterserapan angkatan kerja pada bidang pekerjaan yang berkembang dan berdaya saing secara lokal, nasional dan internasional. (S4) | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,50-2,70 | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan (T4) | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,69 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Sasaran Pokok RPJPD 2005 - 2025 | Indikator | Target RPJPD Periode 2020-2025 | Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 | Indikator | Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023) |
|--|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas kehidupan pada institusi keluarga, relasi gender dan perlindungan terhadap anak. (S6) | Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA) | IPG Meningkat | Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan (S8) | IPG/IDG | 77,23 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif (<i>clean and good governance</i>) (S 19) | Opini Laporan Keuangan | WTP | Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik (T1) | Indeks Reformasi Birokrasi | A (81 – 90) |
| Berkembangnya sistem pelayanan yang efektif dalam pencapaian standar pelayanan minimal (S 20) | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkat | Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (S2) | Indeks Pelayanan Publik | A (4,51 – 5,0) |
| Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat (S 21) | PDRB Per Kapita (Rp Juta) | 120,5 (tahun dasar 2010) | Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata (T7) | PDRB Perkapita (Rp Juta) | 65,981 |
| | Rasio Gini | 0,36 | Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat (S5) | Rasio Gini | 0,38 |
| Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial- ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-daerah (sub-wilayah)(S 27) | Persentase kemantapan jalan, kapasitas/kualitas baik, dan konektivitas | 91,31 | Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah (S3) | Indeks Layanan Infrastruktur | 83,40 |
| Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis secara terus-menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnya memadai (S 35) | Indeks Mutu Lingkungan yang semakin baik | 3 Das | | | |
| | Luas lahan kritis didalam dan diluar Kawasan hutan yang direhabilitasi | 392,523 ha | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan (T6) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 72,84 |

Sumber : Perda Perubahan RPJPD 2008 -2028 nomor 7 Tahun 2015, Analisis Tim Penyusun RPJMD Perubahan, 2020

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel V.5 diatas menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJPD tahun 2000-2025 dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, dari tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator yang memiliki target yang tidak bersesuaian namun indikator tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 2 pada RPJPD yaitu meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesional dan memiliki mentalitas/karakter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan diukur dengan indikator angka rata-rata lama sekolah (ARLS) dan angka harapan lama sekolah sedangkan pada RPJMD 2018-2023 sasaran meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan diukur dengan indikator Indeks Pendidikan. Indikator tersebut memiliki keterkaitan karena Indeks Pendidikan terbangun dari nilai angka rata-rata lama sekolah (ARLS) dan angka harapan lama sekolah.
- b. Sasaran 3 pada RPJPD yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses untuk semua lapisan dan golongan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir sedangkan pada RPJMD 2018-2023 sasaran meningkatnya derajat kesehatan diukur dengan indikator Indeks Kesehatan. Indikator tersebut memiliki keterkaitan karena Indeks Kesehatan terbangun dari nilai Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir.
- c. Sasaran 19 pada RPJPD yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif (*clean and good governance*) dengan indikator Opini Laporan Keuangan, sedangkan pada RPJMD 2018-2023, tujuan Meningkatkan tata kelola penyekenggaran pemerintahan yang baik diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator tersebut memiliki keterkaitan karena salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah Opini Laporan Keuangan BPK (WTP).
- d. Sasaran 27 pada RPJPD yaitu Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-daerah dengan indikator Persentase kemantapan jalan, kapasitas/kualitas baik, dan konektivikasi memiliki kesesuaian dengan tujuan 2 RPJMD 2018 – 2023 yaitu Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dengan indikator Indeks layanan Infrastruktur, mengingat bahwa salah satu komponen Indeks layanan infrastruktur adalah presentase kemantapan jalan.
- e. Sasaran 35 pada RPJPD yaitu terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis secara terus-menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnya memadai diukur dengan indikator Indeks Mutu Lingkungan yang semakin baik dan luas lahan kritis didalam dan diluar Kawasan hutan sedangkan pada RPJMD 2018-2023, tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator tersebut memiliki keterkaitan karena Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terbangun salah satunya dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

BAB VI

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI SELATAN

6.1. Arah Nasional Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

RTRWN menetapkan sistem perkotaan nasional yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi nasional dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala provinsi yaitu Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare. Selain itu RTRWN juga menetapkan kawasan andalan yaitu kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah yang meliputi Kawasan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba-Watampone dan Sekitarnya, Kawasan Parepare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan laut Kapoposang, Kawasan Andalan laut Teluk Bone, Kawasan Andalan Laut Sangkarrang-Takabonerate, dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar.

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi sebagai alat operasionalisasi RTRWN yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan mengarahkan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan Internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional, pusat pengembangan ekonomi kelautan, pusat perkebunan kakao berbasis bisnis, pusat pariwisata, serta pusat pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan panas bumi, dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.

Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah Pulau Sulawesi diarahkan pembangunannya sebagai lumbung pangan padi nasional dan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari dan ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang didukung oleh keterkaitan jaringan antar wilayah dan memperhatikan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap. Arah pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional digambarkan sebagai berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Tabel VI. 1
Arahan Struktur dan Pola Ruang Nasional di Sulawesi Selatan**

| No. | Kab/Kota | Sistem Perkotaan Nasional | | Kawasan Andalan |
|-----|-------------------|--|---|--|
| | | Pusat Kegiatan Nasional | Pusat Kegiatan Wilayah | |
| 1 | Kepulauan Selayar | | | Bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang, dengan sektor unggulan agroindustri, pariwisata, perikanan dan pertambangan minyak bumi |
| 2 | Bulukumba | | Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan | Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan |
| 3 | Bantaeng | | | Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan industri, peternakan berbasis agrobisnis, pariwisata, perikanan dan pertanian |
| 4 | Jeneponto | | Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata | Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, dan industri pengolahan komoditas pertanian |
| 5 | Takalar | Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Pertanian, perikanan dan industri | | Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan dan industri |
| 6 | Gowa | Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa, pertanian | | Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dengan sektor unggulan pertanian, dan pariwisata |
| 7 | Sinjai | | | Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan |
| 8 | Maros | Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan pertanian, pariwisata, dan industri | | Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan industri; Bagian dari Kaw. Andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan, |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kab/Kota | Sistem Perkotaan Nasional | | Kawasan Andalan |
|-----|----------------------|---|------------------------|---|
| | | Pusat Kegiatan Nasional | Pusat Kegiatan Wilayah | |
| | | | | pariwisata, minyak dan gas bumi |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | Kawasan Perkotaan Pangkejene. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pariwisata | | Bagian dari Kaw. Andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi. |
| 10 | Barru | Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan | | Bagian dari Kawasan Strategis Nasional Parepare, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan industri; Bagian dari Kaw. Andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi. |
| 11 | Bone | Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian | | Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, industri dan pertambangan minyak |
| 12 | Soppeng | | | Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dengan sektor unggulan pertanian |
| 13 | Wajo | | | Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi |
| 14 | Sidenreng Rappang | | | Bagian dari Kawasan Andalan Parepare, dengan sektor unggulan pertanian, dan agroindustri |
| 15 | Pinrang | | | Bagian dari Kawasan Andalan Parepare, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan agroindustry; Bagian dari Kaw. Andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi |
| 16 | Enrekang | | | Bagian dari Kawasan Andalan Parepare, dengan sektor unggulan pertanian, dan perkebunan |
| 17 | Luwu | | | Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan pertanian, |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kab/Kota | Sistem Perkotaan Nasional | | Kawasan Andalan |
|-----|--------------|---|--|--|
| | | Pusat Kegiatan Nasional | Pusat Kegiatan Wilayah | |
| | | | | perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan |
| 18 | Tana Toraja | | | Bagian dari Kawasan Andalan Palopo, dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, dan pertambangan |
| 19 | Luwu Utara | | | Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan |
| 20 | Luwu Timur | | | Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan |
| 21 | Toraja Utara | | | Bagian dari Kawasan Andalan Palopo, dengan sektor unggulan pariwisata, dan pertanian |
| 22 | Makassar | Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa | | Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, industri dan agroindustri; Bagian dari Kaw. Andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. |
| 23 | Pare Pare | | Parepare. Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa | Bagian dari Kaw. Andalan Parepare dengan sektor unggulan agroindustri; Bagian dari Kaw. Andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi. |
| 24 | Palopo | | Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian | Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan dan pertambangan minyak |

Sumber : RTRWN dan RTR Pulau Sulawesi, diolah tahun 2020

Selain struktur dan pola ruang, RTRWN juga menetapkan kawasan strategis nasional di Sulawesi Selatan yaitu kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata, Kawasan Parepare, Kawasan Toraja dan Sekitarnya, Kawasan Penginderaan Jauh Parepare, dan Kawasan Sorowako.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel VI. 2
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Sulawesi Selatan

| No. | Kawasan Strategis Nasional | Peran dan Fungsi KSN | Kabupaten/Kota |
|-----|------------------------------------|---|---|
| 1. | KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata | KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang berorientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia | Kota Makassar, Kabupaten Takalar, sebagian wilayah Kabupaten Maros, dan sebagian wilayah Kabupaten Gowa |
| 2. | Kawasan Parepare | KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yang berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang didukung industri pengolahan yang berorientasi ekspor antar provinsi | Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang |
| 3. | Kawasan Toraja dan Sekitarnya | KSN dengan sudut kepentingan sosial dan budaya dengan fungsi sebagai tempat perlindungan budaya nasional yang didukung industri dan jasa wisata | Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara |
| 4. | Kawasan Penginderaan Jauh Parepare | KSN dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dengan fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa | Kota Parepare |
| 5. | Kawasan Sorowako | KSN dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dengan fungsi sebagai sumber daya alam strategis nasional berupa nikel | Kabupaten Luwu Timur |

Sumber : RTRWN dan RTR Pulau Sulawesi, diolah tahun 2020

Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.

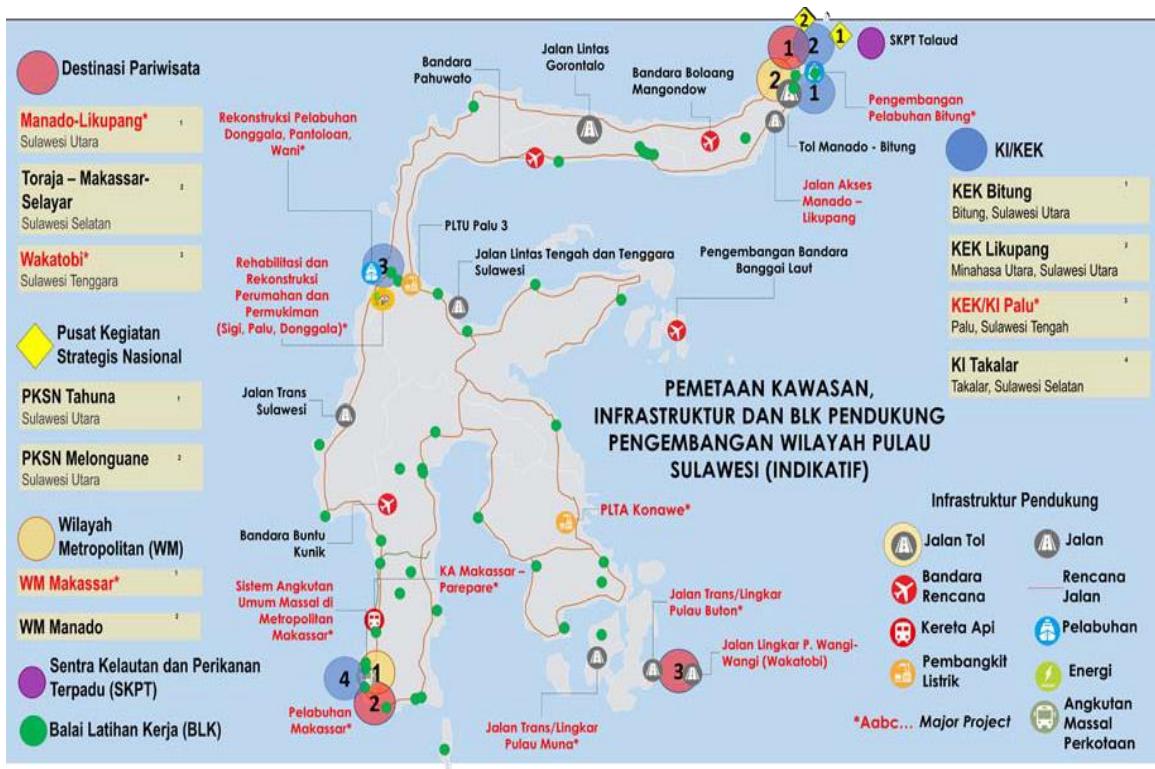
Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan Pulau Sulawesi dengan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, penguatan koneksi, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana melalui : 1) peningkatan pelayanan dasar, diantaranya peningkatkan kualitas SDM dengan melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja; 2) penguatan pusat-pusat pertumbuhan, diantaranya melalui pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kamaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur KI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Takalar; pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan pengembangan kawasan perkotaan termasuk wilayah perkotaan Mamminasata sebagai pemanfaat pertumbuhan ekonomi dan 3) penguatan konektivitas diantaranya melalui pembangunan jalan trans Sulawesi, pembangunan Bandara Buntu Kunik, pembangunan sistem angkutan massal di perkotaan Mamminasata, pembangunan Pelabuhan Makassar, dan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.

Gambaran integrasi pembangunan wilayah Sulawesi Selatan dalam kerangka pembangunan wilayah Pulau Sulawesi digambarkan dalam peta pengembangan wilayah sebagai berikut.

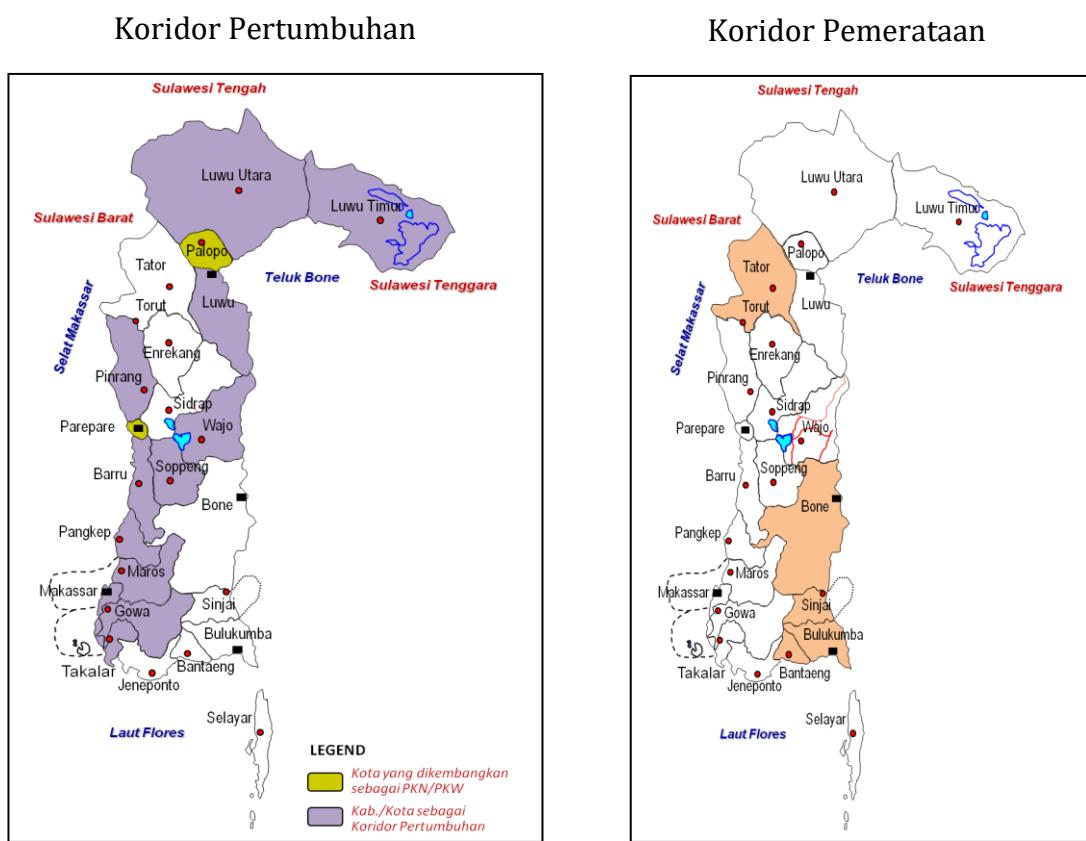
Gambar VI.1
Peta Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Pengembangan wilayah dalam pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, khususnya pusat produksi pertanian, dan perikanan di kabupaten Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo dan Soppeng; pusat pengolahan sumber daya alam di kabupaten Pangkajene Kepulauan; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan di kabupaten Barru dan Kota Parepare; pusat pengembangan jasa pariwisata di Kota Makassar dan kabupaten Maros; dan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kota Palopo dan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang meliputi Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Bone, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai.

Gambar VI.2
Lokasi Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Sulawesi Selatan



Sumber: RPJMN 2020-2024, diolah tahun 2020

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2020-2024, ditekankan pada keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada skenario pembangunan nasional sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan dalam kerangka pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, yang meliputi: 1) Peningkatan pemerataan antar wilayah melalui strategi pembangunan afirmatif pada kawasan transmigrasi, percepatan pembangunan desa, dan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); 2) Peningkatan keunggulan komparatif pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui strategi optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah diantaranya kawasan industri dan destinasi pariwisata prioritas (DPP), dan optimalisasi wilayah metropolitan (WM) Mamminasata. Rincian kebijakan dan strategi pembangunan nasional di Sulawesi Selatan dijabarkan ke dalam lima (5) kawasan pembangunan yaitu: Kawasan Pembangunan Makassar, Kawasan Pembangunan Bulukumba, Kawasan Pembangunan Watampone, Kawasan Pembangunan Parepare, dan Kawasan Pembangunan Palopo sebagai berikut.

6.1.1 Kawasan Pembangunan Makassar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengarahkan pengembangan kawasan pembangunan Makassar untuk dilakukan melalui pendekatan koridor pusat pertumbuhan dengan arah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sumber daya alam serta pengembangan industri, peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur wilayah. Sedangkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan pembangunan Makassar akan dilakukan melalui pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

pendidikan vokasional, peningkatan kerjasama antar daerah, percepatan penerapan SPM dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung produk unggulan wilayah.

Pengembangan sektor unggulan di kawasan pembangunan Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam melalui pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sentra pengolahan hasil produksi berbasis potensi sumber daya alam, serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh peningkatan aksesibilitas dan konektivitas serta pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.

Kawasan Makassar menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan strategis, mengingat peran kawasan Makassar dan sekitarnya sebagai wilayah metropolitan Mamminasata dan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Kegiatan prioritas nasional di Kawasan Makassar difokuskan pada pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda transportasi, pengembangan komoditas unggulan melalui industri pengolahan sumber daya alam komoditas pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman, pengembangan kawasan pariwisata sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang merupakan Kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata yang meliputi TN Bantimurung Bulusaraung, KPPN Makassar, dan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM kepariwisataan.

Pembangunan wilayah di Kawasan Pembangunan Makassar pada RPJMN Tahun 2020-2024, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel VI. 3
Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Makassar**

| No. | Kabupaten/-Kota | Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|---|--|
| 1. | Makassar | Pengembangan Pelabuhan Makassar | Kemenhub, BUMN (Pelindo IV) dan Swasta |
| | | Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare | Kemenhub (KPBU) |
| | | Pengembangan Bandara Hasanuddin | Kemenhub, BUMN |
| | | Pembangunan PLTG/MG/GU/MGU Makassar | PLN |
| | | Penyediaan air baku di kawasan DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya | Kementerian PUPR |
| | | Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga | KPBU |
| | | Pembangunan instalasi PSEL | Pemda (DAK) |
| | | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel | Kemenhub, Pemda, KPBU |
| | | Pembangunan PLTS Rooftop | Kemen. ESDM |
| | | Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata | Kemdagri |
| | | Pembangunan angkutan umum | Kemenhub, Pemda, |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/-Kota | Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|---|--|
| | | massal perkotaan berbasis jalan | KPBU |
| | | Pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian | Kemenaker |
| | | Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata | KPBU |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk ASN, buruh dan pekerja | Kemen. PUPR |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana | KPBU, BUMN |
| | | Pembangunan dan Peningkatan SPAM | Kemen. PUPR |
| | | Pembangunan SPALD-T Skala Kota/Regional | Kemen. PUPR, APBD, Masyarakat, Swasta (CSR) |
| | | Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman | DAK, Kemen. PUPR, APBD, Masyarakat, Swasta (CSR) |
| | | Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Kemen. PUPR |
| | | Pembangunan TPA | Kemen. PUPR, KPBU, APBD |
| | | Pembangunan TPST (skala kawasan) | Kemen. PUTR |
| | | Pembangunan TPS3R | DAK, Kemen. PUPR, APBD |
| | | Penyediaan air baku | Kemen. PUPR |
| | | Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) | BPS |
| | | | |
| 2. | Gowa | Pengembangan komoditas tebu | Kementerian Pertanian |
| | | Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu | KPBU |
| | | Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata | Kemdagri |
| | | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel | Kemenhub, Pemda, KPBU |
| | | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan | Kemenhub, Pemda, KPBU |
| | | Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata | KPBU |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk ASN, buruh dan pekerja | Kemen. PUPR |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR | KPBU |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana | BUMN |
| | | Pembangunan dan Peningkatan | Kemen. PUPR |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/-Kota | Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|---|--|
| 3. | Maros | SPAM | |
| | | Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman | DAK, Kemen. PUPR, APBD, Masyarakat, Swasta (CSR) |
| | | Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Kemen. PUPR |
| | | Penyediaan air baku | Kemen. PUPR |
| | | Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) | BPS |
| 4. | Takalar | Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata | Kemdagri |
| | | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel | Kemenhub, Pemda, KPBU |
| | | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan | Kemenhub, Pemda, KPBU |
| | | Pengembangan bandara Hasanuddin | Kemenhub |
| | | Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata | KPBU |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk ASN,buruh dan pekerja | Kemen. PUPR |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR | KPBU |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana | BUMN |
| | | Pembangunan dan Peningkatan SPAM | Kemen. PUPR |
| | | Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Kemen. PUPR |
| | | Penyediaan air baku | Kemen. PUPR |
| | | Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) | BPS |
| | | Pengembangan komoditas tebu, kelapa, | Kementerian Pertanian |
| | | Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata | Kemdagri |
| | | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel | Kemenhub, Pemda, KPBU |
| | | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan | Kemenhub, Pemda, KPBU |
| | | Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata | KPBU |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk | Kemen. PUPR |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/-Kota | Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|----------------------|---|--------------------|
| 5. | Pangkajene Kepulauan | ASN,buruh dan pekerja | |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR | KPBU |
| | | Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana | BUMN |
| | | Pembangunan dan Peningkatan SPAM | Kemen. PUPR |
| | | Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Kemen. PUPR |
| | | Penyediaan air baku | Kemen. PUPR |
| | | Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) | BPS |
| | | Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata | Kemdagri |
| | | | |
| 5. | Pangkajene Kepulauan | Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare | Kemenhub, KPBU |
| | | Pengembangan Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan desa wisata | Kemendesa PDTT |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, diolah 2020

Sasaran pembangunan nasional di Sulawesi Selatan di kawasan pembangunan Makassar diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan produktivitas berbasis sumberdaya alam, investasi yang berkelanjutan melalui pengembangan industri, peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasional. Selain itu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan melalui peningkatan konsumsi masyarakat yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional disusun proyek prioritas strategis (Major Project) yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Rincian proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 di kawasan pembangunan Makassar ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel VI. 4
Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024
di Kawasan Pembangunan Makassar**

| No. | Kabupaten/-Kota | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|---|--|
| 1. | Makassar | Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; | Kemenhub, Pemda, Badan Usaha |
| | | Pembangunan KA Makassar-Pare-Pare; | Kemenhub, Badan Usaha |
| | | Pembangunan Rumah Susun Perkotaan; | Kementerian PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/-Kota | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|----------------------|---|--|
| | | Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; | Kemenhub, BUMN, Swasta |
| 2. | Gowa | Pengembangan Wilayah Metropolitan | Kementerian PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat |
| | | Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 | Kemen LHK, Kemenkes, Badan Usaha |
| | | Pemb. KA Makassar-Pare-Pare; | Kemenhub, Badan Usaha |
| 3. | Maros | Pengembangan Wilayah Metropolitan | Pemerintah, KPB, APBD, DAK |
| | | Pembangunan KA Makassar-Pare-Pare; | Kemenhub, Badan Usaha |
| 4. | Takalar | Pengembangan Wilayah Metropolitan | Kementerian PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat |
| | | Pembangunan Kawasan Industri Takalar | Kwasta, Kemenperin |
| | | Revitalisasi Tambak | Kementerian K & P |
| | | Pembangunan Waduk Multiguna DI Pamukkulu | Kemen PUPR, Swasta |
| 5. | Pangkajene Kepulauan | Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 | Kemen LHK, Kemenkes, Badan Usaha |
| | | Pembangunan KA Makassar-Pare-Pare. | Kemenhub, Badan Usaha |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

6.1.2 Kawasan Pembangunan Bulukumba

Pengembangan kawasan pembangunan (KP) Bulukumba diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian Sulawesi Selatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi PDRB kawasan Bulukumba terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilakukan dengan peningkatan peran KP Bulukumba dan Sekitarnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah seiring dengan ditetapkannya KPPN Selayar dan KSPN Takabonerate sebagai daerah Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Baru yang didorong melalui kebijakan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam khususnya komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang didukung kerjasama antar daerah melalui pengembangan kawasan agropolitan, peningkatan kompetensi keahlian SDM, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, dan optimalisasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan khususnya Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah dengan kelas multi risiko bencana tinggi.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Tabel VI. 5
Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Bulukumba**

| No. | Kabupaten/-Kota | Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|---|------------------------------------|
| 1. | Jeneponto | Pengembangan komoditas tebu, kelapa, | Kementerian Pertanian |
| | | Peningkatan produksi garam | Kementerian KKP |
| | | Pengemb. Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masy. | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan desa digital | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| 2. | Bantaeng | | |
| | | Pengembangan komoditas lada, pala, dan cengkeh, | Kementerian Pertanian |
| | | Pengemb. Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masy. | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan desa digital | Kemendesa PDTT |
| 3. | Bulukumba | Pengembangan komoditas lada, pala, dan cengkeh, | Kementerian Pertanian |
| | | Peningkatan produksi perikanan tangkap | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengemb. Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masy. | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan desa digital | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| 4. | Sinjai | | |
| | | Pengembangan komoditas lada, pala, dan cengkeh, | Kementerian Pertanian |
| | | Peningkatan produksi perikanan tangkap | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengemb. Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masy. | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan desa digital | Kemendesa PDTT |
| 5. | Kep. Selayar | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan PLTMG Selayar II | PLN |
| | | Pengembangan Pelabuhan Jampea | Kemenhub |
| | | Pembangunan desa wisata | Kemendesa PDTT |
| | | Pengemb. Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masy. | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan desa digital | Kemendesa PDTT |

Sumber: BPS Tahun 2020, dan Bappelitbangda Prov. Sulsel , Hasil perhitungan 2020

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional di Sulawesi Selatan, maka pembangunan di Kawasan Pembangunan Bulukumba dilakukan dengan penguatan pusat pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan konektivitas utamanya mendukung peran Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar dan peningkatan pelayanan dasar melalui pengembangan ekonomi local berbasis komoditas unggulan. Selain itu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan melalui peningkatan konsumsi masyarakat yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

6.1.3 Kawasan Pembangunan Watampone

Kawasan pembangunan Watampone berdasarkan arahan rencana tata ruang berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pengembangan industri yang ditunjang oleh integrasi dengan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar wilayah yaitu bandar udara dan pelabuhan pengumpul guna mendukung peran Kawasan Watampone sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan. Pengembangan Kawasan Watampone sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan diarahkan sebagai pusat pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan penunjang pangan nasional didukung dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya air melalui upaya konservasi sumber air baku dalam rangka perwujudan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan tanaman padi. Pembangunan di Kawasan Watampone dilakukan dengan menerapkan prinsip kerjasama antar daerah guna mengefektifkan dan mengoptimalkan pembangunan antar wilayah, peningkatan kompetensi keahlian SDM, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, dan optimalisasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan kerentanan wilayah terhadap bencana, mengingat Kabupaten Bone, dan Wajo merupakan wilayah dengan kelas resiko multi bencana tinggi.

Tabel VI. 6
Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Watampone

| No | Kabupaten/-Kota | Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|----|-----------------|--|------------------------------------|
| 1. | Bone | Pengembangan komoditas tebu, kakao, lada, pala, dan cengkeh, | Kementerian Pertanian |
| | | Peningkatan produksi perikanan tangkap | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengembangan Pelabuhan Bajoe | Kemenhub |
| | | Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes | Kemendesa PDTT |
| | | Konvergensi Pencegahan Sunting di Desa | Kemendesa PDTT |
| | | Alat penangkap ikan & alat bantu penangkap ikan yang terbangun | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Bantuan sarana prasana dan percontohan produksi dan | Kementerian Kelautan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Kabupaten/-Kota | Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|----|-----------------|---|------------------------------------|
| | | perikanan budidaya | dan Perikanan |
| | | Pembangunan pasar ikan sentra kuliner | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| | | | |
| 2. | Soppeng | Pengembangan komoditas kakao, lada, pala, dan cengkeh, | Kementerian Pertanian |
| | | Pengembangan Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |
| | | | |
| 3. | Wajo | Pengembangan komoditas tebu, kakao, lada, pala, dan cengkeh, kelapa; | Kementerian Pertanian |
| | | Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Satuan permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas | Kemendesa PDTT |
| | | Luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL | Kemendesa PDTT |
| | | Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana di kembangkan dan fungsional | Kemendesa PDTT |
| | | Kawasan transmigrasi prioritas yang di kembangkan ekonominya | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional di Sulawesi Selatan, maka pembangunan di Kawasan Pembangunan Watampone dilakukan dengan penguatan pusat pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam, dan pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan; dan peningkatan pelayanan dasar melalui pengembangan ekonomi local berbasis komoditas unggulan. Selain itu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan melalui peningkatan konsumsi masyarakat yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional disusun proyek prioritas strategis (Major Project) yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Rincian proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 di kawasan pembangunan Watampone ditetapkan sebagai berikut.

Tabel VI. 7
Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024
di Kawasan Pembangunan Watampone

| No. | Kawasan Pembangunan Sulawesi Selatan / Kabupaten/Kota | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 1. | Wajo | Revitalisasi Tambak | Kementerian Kelautan dan Perikanan |

Sumber: RPJMN 2020-2024

6.1.4 Kawasan Pembangunan Parepare

Kawasan pembangunan (KP) Parepare diarahkan sebagai pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata. Pengembangan KP Parepare diarahkan untuk mengoptimalkan perannya sebagai sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan melalui pengembangan Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi melalui pengembangan jalan lintas Pulau Sulawesi, pembangunan jalur KA Makassar Parepare dan peningkatan ketersediaan infrastruktur jaringan listrik serta penyediaan air baku untuk mendukung ketahanan pangan. Sedangkan peningkatan kualitas SDM akan dilakukan melalui peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan public, serta pengembangan usaha ekonomi skala desa yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.

Tabel VI. 8
Arah Pembangunan Wilayah Kawasan Parepare

| No | Kabupaten/-Kota | Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|----|-------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Sidenreng Rappang | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| 2. | Pinrang | Pembangunan PLTA Bakaru II | PLN |
| | | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat | Kemendesa PDTT |
| | | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT |
| | | Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang terbangun | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Bantuan sarana prasana dan percontohan produksi dan perikanan | Kementerian Kelautan dan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No | Kabupaten/-Kota | Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|----|-----------------|--|------------------------------------|
| 3. | Barru | budidaya | Perikanan |
| | | Pembangunan pasar ikan sentra kuliner | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| | | Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industry | Kementerian ESDM |
| | | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |
| 4. | Enrekang | | |
| | | Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare | Kemenhub (KPBU) |
| | | Pengembangan Pelabuhan Grongkong | Kemenhub |
| | | Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industry | Kementerian ESDM |
| | | Penerapan Sustainable Tourism Practices di destinasi utama dan prioritas | Kementerian Pariwisata |
| | | Fasilitasi sarana pasca panen tanaman pangan | Kementerian Pertanian |
| | | Fasilitas sarana pengelolaan hasil tanaman pangan | Kementerian Pertanian |
| 5. | Parepare | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |
| | | | |
| | | Pengembangan komoditas kopi, lada, pala, dan cengkeh, | Kementerian Pertanian |
| | | Pembangunan PLTA Poko | PLN |
| | | Konvergensi Pencegahan Sunting di Desa | Kemendesa PDTT |
| | | Pembangunan Desa Digital | Kemendesa PDTT |
| | | | |
| | | | |
| | | Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare | Kemenhub, KPBU |
| | | Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Kementerian PUPR |
| | | Pembangunan TPA | Kementerian PUPR, KPBU, APBD |
| | | Pembangunan TPST (skala kawasan) | Kementerian PUPR |

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pembangunan di Kawasan Pembangunan Parepare dilakukan dengan kebijakan penguatan pusat pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam, dan pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan; penguatan konektivitas melalui pembangunan jalur kereta api lintas Pulau Sulawesi, peningkatan ketersediaan air baku melalui pembangunan waduk multi guna, dan peningkatan pelayanan dasar melalui pengembangan ekonomi local berbasis komoditas unggulan. Selain itu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan melalui peningkatan konsumsi masyarakat yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional disusun proyek prioritas strategis (Major Project) yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Rincian proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 di kawasan pembangunan Parepare ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel VI. 9
Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 di
Kawasan Pembangunan Parepare**

| No. | Kabupaten/-Kota | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|--|-----------------------|
| 1. | Pinrang | Pembangunan Waduk Multiguna DI Saddang | Kemen PUPR, Swasta |
| 2. | Barru | Pembangunan KA Makassar-Pare-Pare; | Kemenhub, Badan Usaha |
| 3. | Parepare | Pembangunan KA Makassar-Pare-Pare; | Kemenhub, Badan Usaha |

Sumber: RPJMN 2020-2024

6.1.5 Kawasan Pembangunan Palopo

Kawasan pembangunan (KP) Palopo, diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang didukung oleh industry pengolahan dan industry jasa hasil perkebunan, peternakan dan perikanan serta pertambangan, dengan memperhatikan peran Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui pengembangan sektor unggulan berbasis sumberdaya alam. Pengembangan KP Palopo dan Sekitarnya akan dilakukan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur wilayah berupa pembangunan Bandar udara Buntu Kunik dan pembangunan infrastruktur pembangkitan listrik. Sedangkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan melalui pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional, peningkatan kerjasama antar daerah, percepatan penerapan SPM dan pengembangan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah untuk mendukung produk unggulan wilayah.

**Tabel VI. 10
Arahan Pembangunan Wilayah Kawasan Palopo**

| No. | Kabupaten/-Kota | Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|--|---|
| 1. | Luwu | Pengembangan komoditas lada, pala, dan cengkeh Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) | Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 2. | Luwu Utara | Pengembangan komoditas kakao, lada, pala, dan cengkeh. | Kementerian Pertanian |
| 3. | Luwu Timur | Pengembangan komoditas kakao, lada, pala, dan cengkeh | Kementerian Pertanian |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kabupaten/-Kota | Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|--|------------------------------|
| 4. | Palopo | Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Kementerian PUPR |
| | | Pembangunan TPA | Kementerian PUPR, KPBU, APBD |
| 5. | Tana Toraja | Pengembangan komoditas kakao, kopi, lada, pala, dan cengkeh, | Kementerian Pertanian |
| 6. | Toraja Utara | Pengembangan komoditas kopi | Kementerian Pertanian |

Sumber: RPJMN 2020-2024

Sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan nasional di Sulawesi Selatan, pembangunan di Kawasan Pembangunan Palopo dilakukan dengan penguatan pusat pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam, dan pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan; pengembangan kawasan berbasis pariwisata sebagai bagian dari DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang didukung oleh pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik dan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan peningkatan pelayanan dasar melalui pengembangan ekonomi local berbasis komoditas unggulan. Selain itu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan melalui peningkatan konsumsi masyarakat yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional disusun proyek prioritas strategis (Major Project) yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Rincian proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 di kawasan pembangunan Palopo ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel VI. 11
Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024
di Kawasan Pembangunan Palopo**

| No. | Kabupaten/-Kota | Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 | Instansi Pelaksana |
|-----|-----------------|--|------------------------------------|
| 1. | Luwu | Revitalisasi Tambak | Kementerian Kelautan dan Perikanan |

Sumber: RPJMN 2020-2024

6.2. Kerangka Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, mengarahkan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata, lumbung pangan nasional dengan mengarahkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis pada komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terjangkau dan berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan melalui sinergitas antar wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional.

Tabel VI. 12
Arahan Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan

| No. | Kab./Kota | Sistem Perkotaan Provinsi (Pusat Kegiatan Lokal) | Kawasan Budidaya Provinsi |
|-----|----------------------|---|--|
| 1 | Kepulauan Selayar | Kawasan perkotaan Benteng dan Pamatata dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa | Kawasan perikanan; Kawasan pertambangan dan energi; Kawasan pariwisata |
| 2 | Bulukumba | | Kawasan pariwisata alam dan budaya; Kawasan pertambangan dan energi; Kawasan perkebunan; kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perikanan budidaya; kawasan peternakan sapi potong; dan kawasan agroindustri |
| 3 | Bantaeng | Kawasan perkotaan Bantaeng dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa | Kawasan pertambangan dan energi; kawasan perikanan budidaya; kawasan perkebunan kopi; kawasan peternakan; kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura |
| 4 | Jeneponto | | kawasan perikanan budidaya; kawasan perkebunan kopi; Kawasan peternakan; kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura |
| 5 | Takalar | | kawasan pertanian pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan; Kawasan peternakan; kawasan perikanan budidaya; kawasan industri dan agroindustri; |
| 6 | Gowa | | kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan industri dan agroindustri; kawasan perkebunan tebu; kawasan peternakan sapi potong |
| 7 | Sinjai | Kawasan perkotaan Sinjai dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa | Kawasan pertambangan dan energi; kawasan perikanan budidaya; kawasan perkebunan; kawasan peternakan sapi potong; kawasan pertanian pangan dan hortikultura; |
| 8 | Maros | | Kebun raya Pucak; Kawasan pertambangan dan energi; kawasan perkebunan; kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; Kawasan pariwisata alam; kawasan industri dan agroindustri; kawasan peternakan sapi potong |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | | kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan; Kawasan pertambangan dan energi; kawasan industri dan agroindustri; kawasan peternakan; Kawasan perikanan |
| 10 | Barru | | Kawasan agropolitan dan agroindustri; Kawasan Ekonomi Khusus EMAS; kawasan peternakan sapi potong; Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura |
| 11 | Bone | | Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan kakao, cengkeh dan tebu; Kawasan wisata alam; kawasan perikanan budidaya dan kawasan agroindustri; kawasan peternakan sapi potong |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Kab./Kota | Sistem Perkotaan Provinsi (Pusat Kegiatan Lokal) | Kawasan Budidaya Provinsi |
|------------|-------------------|---|---|
| 12 | Soppeng | Kawasan perkotaan Watansoppeng | kawasan pariwisata alam; Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan kakao; dan Kawasan peternakan |
| 13 | Wajo | Kawasan perkotaan Sengkang | Kawasan pertanian tanaman pangan & hortikultura; kawasan perkebunan; Kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peternakan sapi potong |
| 14 | Sidenreng Rappang | Kawasan perkotaan Pangkajene | Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan; kawasan peternakan sapi potong |
| 15 | Pinrang | Kawasan perkotaan Watansawitto | Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan; kawasan peternakan; dan kawasan perikanan |
| 16 | Enrekang | Kawasan perkotaan Enrekang | kawasan agropolitan; Kebun Raya Enrekang; kawasan perkebunan kopi; Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan peternakan sapi perah |
| 17 | Luwu | Kawasan perkotaan Belopa | Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan cengkeh dan kakao; Kawasan peternakan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan perikanan budidaya |
| 18 | Tana Toraja | Kawasan perkotaan Makale | Kawasan wisata alam dan budaya; kawasan perkebunan kopi; kawasan peternakan kerbau; Kawasan pertanian hortikultura |
| 19 | Luwu Utara | Kawasan perkotaan Masamba | Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan kakao; kawasan peternakan; kawasan perikanan budidaya |
| 20 | Luwu Timur | Kawasan perkotaan Malili | Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan lada dan kakao; Kawasan peternakan; Kawasan pariwisata alam; kawasan perikanan budidaya; kawasan industri |
| 21 | Toraja Utara | Kawasan perkotaan Rantepao | Kawasan wisata alam dan budaya; kawasan perkebunan kopi; Kawasan pertanian hortikultura; kawasan peternakan kerbau |
| 22 | Makassar | Kawasan perkotaan Mamminasata | kawasan Pusat Bisnis Terpadu; kawasan pariwisata; Kawasan perdagangan dan jasa; Kawasan industri |
| 23 | Pare Pare | | Kawasan industri; Kawasan perdagangan dan jasa; |
| 24 | Palopo | | Kawasan pertambangan dan energi; kawasan perikanan budidaya; Kawasan peternakan; kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura |

Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, diolah Tahun 2020

Sebagai upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan dan fokus peningkatan pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam, serta meningkatkan keterkaitan fungsional antarwilayah, maka pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada 5 (lima) kawasan pembangunan (KP) yang mengacu pada rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana arahan penetapan Kawasan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Andalan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang meliputi:

- 1) Kawasan Pembangunan Makassar;
- 2) Kawasan Pembangunan Bulukumba;
- 3) Kawasan Pembangunan Watampone;
- 4) Kawasan Pembangunan Parepare; dan
- 5) Kawasan Pembangunan Palopo.

Sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam, meningkatnya aksesibilitas infrastruktur termasuk aksesibilitas pelayanan dasar, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan tersebut, maka target pembangunan wilayah Tahun 2023 tergambaran sebagai berikut.

**Tabel VI. 13
Sasaran Pembangunan menurut Kawasan di Sulawesi Selatan, Tahun 2023**

| Kawasan Pembangunan | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Indeks Gini (Angka) | IPM (Angka) |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| Makassar dan Sekitarnya | 4,78 – 6,37 | 6,05 | 8,93 | 0,342 | 72,88 |
| Bulukumba dan Sekitarnya | 4,56 – 6,09 | 8,75 | 2,86 | 0,338 | 68,74 |
| Watampone dan Sekitarnya | 4,88 – 6,51 | 7,45 | 3,54 | 0,365 | 69,10 |
| Parepare dan Sekitarnya | 4,67 – 6,23 | 6,78 | 4,76 | 0,343 | 73,81 |
| Palopo dan Sekitarnya | 4,21 – 5,62 | 9,42 | 4,26 | 0,350 | 72,57 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, diolah Tahun 2020

Tujuan pembangunan wilayah Sulawesi Selatan akan dicapai melalui integrasi pembangunan dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dan antar wilayah serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang meliputi: 1) peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah; 2) penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 3) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan 4) penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat.

Tabel VI. 14
Rencana Kebutuhan Investasi Tahun 2023

| Kawasan Pembangunan | Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar) |
|--------------------------|----------------------------------|
| Makassar dan Sekitarnya | 86.533,02 |
| Bulukumba dan Sekitarnya | 14.962,24 |
| Watampone dan Sekitarnya | 16.751,49 |
| Parepare dan Sekitarnya | 17.393,27 |
| Palopo dan Sekitarnya | 19.583,19 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, diolah Tahun 2020

Pembangunan wilayah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 dirumuskan dengan pendekatan holistik, tematik, dan integratif yang didasarkan pada potensi pengembangan yang diamanatkan dalam kebijakan nasional dan daya dukung lingkungan yang mengacu pada tujuan penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diprioritaskan pada peningkatan produktifitas daya saing produk unggulan berbasis sumber daya alam, pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang holistik, terintegrasi dan terjangkau, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

6.2.1 Kawasan Pembangunan Makassar

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Makassar diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, laut dan udara, pengembangan transportasi massal, pembangunan infrastruktur kelistrikan di pulau-pulau kecil, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kemantapan jalan provinsi. Selain itu pengembangan kawasan Makassar juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar berupa pembangunan prasarana pariwisata berupa dermaga dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Gambar VI.3
Arahan Pengembangan Kawasan Pembangunan Makassar**



Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2020

Pembangunan Kawasan Makassar diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter dengan target sebagai berikut.

**Tabel VI. 15
Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Makassar dan sekitarnya,
Tahun 2020-2023**

| Kab./- Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Makassar | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 8,79 | (1,27) | 3,98-5,31 | 4,65-6,20 | 4,81-6,41 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 4.28 | 4.54 | 4.50 | 4.14 | 3.75 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 9.83 | 15.92 | 14.96 | 14.22 | 13.22 |
| | Gini Ratio | 0.39 | 0.4 | 0.392 | 0.384 | 0.376 |
| | IPM | 82,25 | 82.25 | 82.25 | 82.45 | 82.74 |
| Gowa | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,46 | 1,76 | 4,02-5,36 | 4,78-6,38 | 4,90-6,54 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,53 (Sept.) | 7.38 | 7.32 | 6.84 | 6.34 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,35 (Agust.) | 6.44 | 6.41 | 6.28 | 6.15 |
| | Gini Ratio | 0.354 | 0.345 | 0.338 | 0.331 | 0.325 |
| | IPM | 69,66 | 70.14 | 70.62 | 71.02 | 71.53 |
| Maros | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 1,24 | (10,87) | 2,96-3,94 | 4,45-5,93 | 4,56-6,08 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,89 (Sept.) | 9.74 | 9.66 | 8.85 | 7.99 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kab./- Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Takalar | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,42 (Agust.) | 6.28 | 6.25 | 6.12 | 6.00 |
| | Gini Ratio | 0,382 | 0.368 | 0.361 | 0.353 | 0.346 |
| | IPM | 69,50 | 69.86 | 70.22 | 70.59 | 71.05 |
| Pangkajene Kepulauan | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,87 | (0,61) | 3,70-4,94 | 4,81-6,41 | 4,93-6,57 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,70 (Sept.) | 8.44 | 8.37 | 7.82 | 7.23 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,78 (Agust.) | 4.16 | 4.14 | 4.06 | 3.98 |
| | Gini Ratio | 0,482 | 0.36 | 0.353 | 0.346 | 0.339 |
| | IPM | 66,94 | 67.31 | 67.68 | 68.14 | 68.71 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,41 | (1,69) | 3,45-4,60 | 4,48-5,98 | 4,60-6,13 |
| Takalar | Tingkat Kemiskinan (%) | 14,06 (Sept.) | 13.96 | 13.54 | 12.68 | 11.78 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,99 (Agust.) | 5.18 | 5.15 | 5.05 | 4.95 |
| | Gini Ratio | 0,328 | 0.345 | 0.338 | 0.331 | 0.325 |
| | IPM | 68,29 | 68.72 | 69.15 | 69.53 | 70.00 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Makassar, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha melalui KPBU, dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

Tabel VI. 16
Kebutuhan Investasi Kawasan Makassar Tahun 2020-2023

| Kabupaten/- Kota | Realisasi Investasi 2019 (Rp. Miliar) | Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar) | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Makassar | 60.150,56 | 63.216,40 | 66.416,80 | 69.617,20 | 72.817,60 |
| Gowa | 4.300,36 | 4.535,22 | 4.794,54 | 5.053,86 | 5.313,18 |
| Maros | 3.084,23 | 3.205,76 | 3.337,87 | 3.469,98 | 3.602,09 |
| Takalar | 1.437,66 | 1.505,37 | 1.584,93 | 1.654,50 | 1.744,06 |
| Pangkajene Kepulauan | 2.553,13 | 2.696,36 | 2.816,27 | 2.936,18 | 3.056,09 |
| Total Investasi | 71.525,94 | 75.159,11 | 78.950,41 | 82.741,72 | 86.533,02 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

6.2.2 Kawasan Pembangunan Bulukumba

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Bulukumba diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, dan laut, pembangunan simpul transportasi berupa terminal dan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan infrastruktur kelistrikan di pulau-pulau kecil, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kemampuan jalan provinsi. Selain itu pengembangan kawasan Bulukumba juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan destinasi pariwisata, khususnya yang mendukung Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar berupa pembangunan prasarana pariwisata berupa dermaga dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui pengembangan rest area yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

Gambar VI.4
Arahan Pengembangan Kawasan Bulukumba



Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2020

Pembangunan Kawasan Bulukumba diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter dengan target sebagai berikut.

Tabel VI. 17
**Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Bulukumba dsk,
Tahun 2020-2023**

| Kab./Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bulukumba | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,49 | 0,43 | 3,26-4,34 | 3,09-4,12 | 3,94-5,25 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,26 (Sept.) | 7.1 | 7.04 | 6.62 | 6.18 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,06 (Agust.) | 3.42 | 3.40 | 3.33 | 3.27 |
| | Gini Ratio | 0,377 | 0.371 | 0.364 | 0.356 | 0.349 |
| | IPM | 68,28 | 68.99 | 69.71 | 70.11 | 70.61 |
| Jeneponto | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,47 | 0,16 | 3,70-4,93 | 4,48-5,97 | 4,68-6,23 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kab./Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 14,88 (Sept.) | 14.58 | 14.14 | 13.17 | 12.16 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 1,99 (Agust.) | 2.31 | 2.29 | 2.24 | 2.21 |
| | Gini Ratio | 0,331 | 0.349 | 0.342 | 0.335 | 0.328 |
| | IPM | 64,00 | 64.26 | 64.52 | 64.90 | 65.38 |
| Sinjai | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,12 | 1,55 | 3,30-4,40 | 4,28-5,71 | 4,39-5,86 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,14 (Sept.) | 9,00 | 8,93 | 8,43 | 7,90 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,17 (Agust.) | 2.65 | 2.64 | 2.58 | 2.53 |
| | Gini Ratio | 0,354 | 0.372 | 0.365 | 0.357 | 0.350 |
| | IPM | 67,05 | 67.6 | 68.15 | 68.55 | 69.06 |
| Bantaeng | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 10,75 | 0,52 | 4,29-5,72 | 4,74-6,32 | 5,12-6,82 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,03 (Sept.) | 8.95 | 8.88 | 8.16 | 7.40 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,65 (Agust.) | 4.27 | 4.25 | 4.16 | 4.08 |
| | Gini Ratio | 0,338 | 0.344 | 0.337 | 0.330 | 0.324 |
| | IPM | 68,30 | 68.73 | 69.17 | 69.56 | 70.07 |
| Kepulauan Selayar | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,68 | (1,78) | 4,12-5,50 | 4,61-6,14 | 5,27-7,03 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,83 (Sept.) | 12.48 | 12.11 | 11.34 | 10.54 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 1,10 (Agust.) | 2.44 | 2.43 | 2.38 | 2.33 |
| | Gini Ratio | 0,301 | 0.357 | 0.350 | 0.343 | 0.336 |
| | IPM | 66,91 | 67.38 | 67.86 | 68.19 | 68.60 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Bulukumba, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha melalui KPBU, dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

**Tabel VI. 18
Kebutuhan Investasi Kawasan Bulukumba dsk, Tahun 2020-2023**

| Kabupaten/Kota | Realisasi Investasi 2019 (Rp. Miliar) | Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar) | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bulukumba | 2.383,79 | 2.383,79 | 2.477,66 | 2.571,52 | 2.665,39 |
| Jeneponto | 2.457,98 | 2.655,12 | 2.850,89 | 3.046,66 | 3.242,43 |
| Sinjai | 2.747,09 | 2.939,20 | 3.107,95 | 3.276,70 | 3.445,45 |
| Bantaeng | 2.793,40 | 2.974,70 | 3.173,40 | 3.372,10 | 3.570,80 |
| Kepulauan Selayar | 1.634,89 | 1.737,78 | 1.837,91 | 1.938,04 | 2.038,17 |
| Total Investasi | 11.854,53 | 12.690,59 | 13.447,81 | 14.205,02 | 14.962,24 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

6.2.3 Kawasan Pembangunan Watampone

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Watampone diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, udara dan laut, peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpulan regional, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dan peningkatan kemantapan jalan provinsi serta peningkatan kapasitas. Selain itu pengembangan kawasan Watampone juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, dan peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan pendidikan serta pembangunan pusat kegiatan keagamaan (Islamic Center).

Gambar VI.5
Arahan Pengembangan Kawasan Watampone



Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2020

Pembangunan Kawasan Watampone diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter dengan target sebagai berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Tabel VI. 19
Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Watampone dsk,
Tahun 2020-2023**

| Kab./- Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bone | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,01 | (0,25) | 3,77-5,03 | 4,47-5,95 | 5,00-6,67 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 10,06 (Sept.) | 10.68 | 10.59 | 9.64 | 8.66 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,01 (Agust.) | 3.2 | 3.18 | 3.12 | 3.06 |
| | Gini Ratio | 0,366 | 0.404 | 0.396 | 0.388 | 0.380 |
| | IPM | 65,67 | 66.06 | 66.45 | 66.86 | 67.37 |
| Wajo | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,06 | (1,17) | 3,26-4,35 | 4,24-5,65 | 4,35-5,79 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,91 (Sept.) | 6.95 | 6.89 | 6.84 | 5.85 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,00 (Agust.) | 4.33 | 4.31 | 4.22 | 4.14 |
| | IPM | 69,05 | 69.15 | 69.25 | 69.64 | 70.12 |
| Soppeng | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,69 | 2,19 | 4,14-5,52 | 5,19-6,92 | 5,44-7,25 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,25 (Sept.) | 7.59 | 7.53 | 6.70 | 5.82 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,24 (Agust.) | 4.42 | 4.40 | 4.31 | 4.22 |
| | IPM | 68,26 | 68.67 | 69.08 | 69.41 | 69.81 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Watampone dan Sekitarnya, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha melalui KPBU, dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

**Tabel VI. 20
Kebutuhan Investasi Kawasan Watampone dsk, Tahun 2020-2023**

| Kabupaten/ Kota | Realisasi Investasi 2019 (Rp. Miliar) | Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar) | | | |
|------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bone | 7.416,36 | 7.873,96 | 8.293,27 | 8.712,58 | 9.131,89 |
| Wajo | 3.829,60 | 4.002,51 | 4.081,26 | 4.160,02 | 4.238,77 |
| Soppeng | 2.693,02 | 2.861,62 | 3.034,69 | 3.207,76 | 3.380,83 |
| Total Investasi | 13.938,99 | 14.738,09 | 15.409,22 | 16.080,36 | 16.751,49 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah 2020

6.2.4 Kawasan Pembangunan Parepare

Pengembangan kawasan pembangunan Parepare diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, dan laut, pengembangan simpul transportasi berupa pengembangan terminal penumpang tipe B dan pelabuhan pengumpan regional, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dan peningkatan kemantapan jalan provinsi serta peningkatan kapasitas jaringan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

pengembangan kawasan Parepare juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui pembangunan rest area dan penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional.

Gambar VI.6
Arahan Pengembangan Kawasan Parepare



Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2020

Pembangunan kawasan Parepare diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter dengan target sebagai berikut.

Tabel VI. 21
Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Parepare dsk, Tahun 2020-2023

| Kab./ Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | | Target Pembangunan | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------------|-----------|-----------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Parepare | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,65 | (0,08) | 3,58-4,77 | 4,65-6,20 | 4,77-6,36 | |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,26 (Sept.) | 5.44 | 5.40 | 4.74 | 4.08 | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,17 (Agust.) | 7.14 | 7.10 | 6.96 | 6.82 | |
| | Gini Ratio | 0,350 | 0.373 | 0.366 | 0.358 | 0.351 | |
| | IPM | 77,62 | 77.86 | 78.10 | 78.37 | 78.70 | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kab./ Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sidenreng Rappang | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,65 | (0,59) | 3,38-4,51 | 4,39-5,86 | 4,51-6,01 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,35 (Sept.) | 5.05 | 5.01 | 4.83 | 4,78 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,75 (Agust.) | 5.91 | 5.88 | 5.76 | 5.65 |
| | Gini Ratio | 0,284 | 0.349 | 0.342 | 0.335 | 0.328 |
| | IPM | 71,05 | 71.21 | 71.37 | 71.73 | 72.18 |
| Barru | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,41 | 0,87 | 3,99-5,32 | 4,43-5,91 | 4,85-6,64 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,57 (Sept.) | 8.26 | 8.19 | 7.45 | 6.67 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,39 (Agust.) | 6.39 | 6.36 | 6.23 | 6.11 |
| | Gini Ratio | 0,360 | 0.357 | 0.350 | 0.343 | 0.336 |
| Pinrang | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,53 | 0,44 | 3,52-4,69 | 4,57-6,06 | 4,68-6,19 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,46 (Sept.) | 8.86 | 8.79 | 7.99 | 7.16 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,91 (Agust.) | 4.19 | 4.17 | 4.09 | 4.00 |
| | Gini Ratio | 0,336 | 0.375 | 0.368 | 0.360 | 0.353 |
| Enrekang | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,43 | 1,25 | 3,67-4,90 | 4,55-6,06 | 4,64-6,19 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,33 (Sept.) | 12.17 | 11.80 | 11.38 | 10.93 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,15 (Agust.) | 2.44 | 2.43 | 2.38 | 2.33 |
| | Gini Ratio | 0,359 | 0.366 | 0.359 | 0.352 | 0.344 |
| | IPM | 72,66 | 72.76 | 72.86 | 73.27 | 73.79 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Parepare, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha melalui KPBU, dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

**Tabel VI. 22
Kebutuhan Investasi Kawasan Parepare dsk, Tahun 2020-2023**

| Kabupaten/Kota | Realisasi Investasi 2019 (Rp. Triliun) | Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Triliun) | | | |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Parepare | 1.953,34 | 2.009,14 | 2.088,43 | 2.167,72 | 2.247,01 |
| Sidenreng Rappang | 3.235,98 | 3.449,96 | 3.615,32 | 3.780,68 | 3.946,04 |
| Barru | 2.273,62 | 2.452,78 | 2.611,61 | 2.770,44 | 2.929,27 |
| Pinrang | 4.789,97 | 5.107,16 | 5.418,27 | 5.729,38 | 6.040,49 |
| Enrekang | 1.792,19 | 1.841,64 | 1.902,90 | 1.964,16 | 2.025,41 |
| Total Investasi | 14.045,11 | 14.860,68 | 15.636,53 | 16.412,38 | 17.188,22 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, diolah Tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

6.2.5 Kawasan Pembangunan Palopo

Pengembangan kawasan pembangunan Palopo diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, udara dan laut, peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan regional, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dan peningkatan kemantapan jalan provinsi serta peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu pengembangan kawasan Palopo juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui pembangunan rest area yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional.

Gambar VI.7
Arah Pengembangan Kawasan Pembangunan Palopo



Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2020

Pembangunan Kawasan Palopo diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter dengan target sebagai berikut.

Tabel VI.23
Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Palopo dsk, Tahun 2020-2023

| Kab./Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|-----------|------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Palopo | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,75 | 0,45 | 3,63-4,85 | 4,72-6,30 | 4,84-6,45 |
| | Tingkat Kemiskinan | 7,82 | 7,85 | 7,79 | 7,28 | 6,75 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kab./Kota | Indikator Pembangunan | Realisasi 2019 | Target Pembangunan | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Luwu | (%) | (Sept.) | | | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 9,67 (Agust.) | 10.37 | 10.32 | 10.11 | 9.91 |
| | Gini Ratio | 0,338 | 0.354 | 0.347 | 0.340 | 0.333 |
| | IPM | 77,98 | 78.06 | 78.14 | 78.45 | 78.84 |
| | | | | | | |
| Luwu Utara | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,26 | 1,30 | 3,37-4,50 | 4,38-5,84 | 4,49-5,99 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,78 (Sept.) | 12.65 | 12.27 | 11.40 | 10.49 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,38 (Agust.) | 4.94 | 4.92 | 4.82 | 4.72 |
| | Gini Ratio | 0,352 | 0.396 | 0.388 | 0.380 | 0.373 |
| | IPM | 70,39 | 70.51 | 70.63 | 71.05 | 71.57 |
| Luwu Timur | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,11 | (0,59) | 3,83-5,11 | 4,98-6,44 | 5,10-6,80 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 13,6 (Sept.) | 13.41 | 13.01 | 12.79 | 12.56 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,76 (Agust.) | 3.01 | 2.99 | 2.94 | 2.87 |
| | Gini Ratio | 0,364 | 0.344 | 0.337 | 0.330 | 0.324 |
| Tana Toraja | IPM | 69,46 | 69.57 | 69.68 | 69.98 | 70.35 |
| | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 1,17 | 1,46 | 1,61-2,15 | 2,49-3,33 | 2,72-3,63 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,98 (Sept.) | 6.85 | 6.80 | 5.93 | 5.02 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,81 (Agust.) | 4.46 | 4.44 | 4.35 | 4.26 |
| Toraja Utara | Gini Ratio | 0,387 | 0.405 | 0.397 | 0.389 | 0.381 |
| | IPM | 72,80 | 73.22 | 73.64 | 73.94 | 74.31 |
| | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,22 | (0,28) | 3,89-5,18 | 5,05-6,73 | 5,18-6,90 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,35 (Sept.) | 12.1 | 11.74 | 12.44 | 11.34 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,55 (Agust.) | 2.6 | 2.59 | 2.54 | 2.48 |
| | Gini Ratio | 0,362 | 0.348 | 0.341 | 0.334 | 0.328 |
| | IPM | 68,25 | 68.75 | 69.25 | 69.63 | 70.10 |
| | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,56 | 0,17 | 4,07-5,43 | 4,54-6,06 | 5,19-6,92 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,41 (Sept.) | 12.01 | 11.65 | 10.72 | 9.27 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,86 (Agust.) | 3.17 | 3.15 | 3.09 | 3.03 |
| | Gini Ratio | 0,384 | 0.384 | 0.376 | 0.369 | 0.361 |
| | IPM | 69,23 | 69.33 | 69.43 | 69.79 | 70.26 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Palopo dan Sekitarnya, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha melalui KPBU, dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

**Tabel VI. 24
Kebutuhan Investasi Kawasan Palopo dsk, Tahun 2020-2023**

| Kabupaten / Kota | Realisasi Investasi 2019 (Rp. Miliar) | Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar) | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Palopo | 2.048,75 | 2.145,94 | 2.247,98 | 2.350,02 | 2.452,06 |
| Luwu | 3.529,74 | 3.698,32 | 3.876,54 | 4.054,76 | 4.232,98 |
| Luwu Utara | 2.560,16 | 2.771,84 | 2.970,58 | 3.169,32 | 3.368,06 |
| Luwu Timur | 4.065,51 | 4.309,44 | 4.558,13 | 4.806,82 | 5.055,51 |
| Tana Toraja | 1.576,71 | 1.658,87 | 1.752,43 | 1.845,99 | 1.939,55 |
| Toraja Utara | 2.071,58 | 2.145,94 | 2.304,69 | 2.419,86 | 2.535,03 |
| Total Investasi | 15.852,44 | 16.773,93 | 17.710,35 | 18.646,77 | 19.583,19 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, diolah Tahun 2020

BAB VII

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

7.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab V, diperlukan strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;

Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST, salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Nilai SAKIP A pada periode akhir RPJMD, serta meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayan publik melalui inovasi dalam pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Pelayanan Publik yang diharapkan mencapai nilai A pada tahun 2023.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.
- b. Penataan dan penguatan kelembagaan.
- c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.
- d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- e. Implementasi e-government.

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain:

- a. Pengembangan inovasi daerah.
- b. Pengembangan baruga layanan publik.
- c. Pengelolaan informasi publik.
- d. Penataan organisasi.

2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat inter-koneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

- a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
- b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.
- c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut;
- d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;
- e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan.
- f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya.

3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. RTRWN dan RTRWP

menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya.

Merujuk pada persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tiap wilayah pengembangan, maka persebaran persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata provinsi (8.72 persen posisi Maret) terdapat di 11 kabupaten/kota, meliputi: Takalar, Barru, Palopo, Soppeng, Gowa, Bulukumba, Wajo, Luwu timur, Parepare, Sidrap, Makassar;
- b. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata provinsi (8.72 persen posisi Maret) terdapat di 13 kabupaten, meliputi: Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Luwu Utara, Luwu, Selayar, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, Maros, Sinjai, Bantaeng, dan Pinrang;
- c. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Jeneponto yaitu 14,58 persen dan persentase penduduk miskin terkecil terdapat di Kota Makassar yaitu 4,54 persen;
- d. Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka di bawah rata-rata provinsi (6.31 persen posisi Agustus) terdapat di 19 kabupaten, meliputi: Kabupaten Jeneponto, Selayar, Enrekang, Tana Toraja, Sinjai, Luwu Utara, Toraja Utara, Bone, Bulukumba, Takalar, Pinrang, Bantaeng, Wajo, Soppeng, Luwu Timur, Luwu, Pangkep, Sidrap, dan Maros.;
- e. Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata provinsi (6.31 persen posisi Agustus) terdapat di 5 kabupaten/kota, meliputi: Kabupaten Barru, Gowa, Kota Parepare, Palopo, dan Makassar;

- f. Tingkat pengangguran terbuka terbesar berada di Kota Makassar yaitu 15,92 persen dan tingkat pengangguran terbuka terkecil berada di Kabupaten Jeneponto yaitu 2,31 persen.

Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
- b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kamaritiman.

4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah. Hal ini dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:

- a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara
- b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan.
- c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang.
- d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun

- transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.
 - f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer.
 - g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini fokus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi
 - h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah; Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah; Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:
- a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya

- tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.
 - c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi melalui
 - d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
 - e. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ; meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas ; dan memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
 - f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industri;
 - g. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung *link and match* antara sekolah vokasi dengan dunia industri.

Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar mengajar.

- 7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;
Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana parasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga

merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.

Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:

- a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
- b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
- d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.

8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;

Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi yang akan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
- b. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya pencegahan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai luhur Budaya dan Keagamaan.

Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketetraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan melalui:

- a. Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal, pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran, juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun hubungan yang

- harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.
- b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
 - c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;

1) Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam,

Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industru sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah tinggi menciptakan kesempatan kerja.

Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra

peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume eksportnya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan guna meningkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok sekitar 67% produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat peneilitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya, terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya, degradasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar gugus kepulauan merupakan akibat dari pemanfaatan sumberdaya atau jasa lingkungan yang tidak terarah dan tidak berkelanjutan.

Pemanfaataan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi komoditas unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan pesisir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir;
- c. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

2) Pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan kedepan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tidak lagi pada

pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat.

Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih ekspansif ke depan, akan difokuskan pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik; serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam memenuhi permintaan pasar ekspor.

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang terkena dampak akibat penyebaran wabah covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, maka di tahun 2020 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar (-0,89) – 1,59 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4-2,3 persen. Namun target ini dapat dicapai dan melampaui target yaitu -0,70 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional yaitu -2,07 persen.

Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah melalui memberlakukan physical distancing serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah. Berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat hukum. Tes COVID-19 bersifat cepat (rapid) dan masif (massive) serta penelusuran (tracing) juga menjadi tonggak kebijakan utama untuk dapat memutus rantai penyebaran virus. Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Namun

demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand) maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitasi, serta keberlangsungan usaha.

Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, refocusing dan realokasi APBD. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah extraordinary ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBD yang memastikan ketersedian anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan daerah. Secara rinci Langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat penanganan Covid-19 antara lain;

- 1) Penanganan Kesehatan dan keselamatan, melalui kegiatan:
 - a) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 antara lain : Rumah Sakit Sayang Rakyat, Rumas Sakit Umum Daerah Dadi, Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Unhas;
 - b) Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit Rujukan Covid-19;
 - c) Pengadaan Obat Rumah Sakit Rujukan Covid-19;
 - d) Operasional Gugus Tugas;
 - e) Fasilitas Hotel Paramedis dan Pasien Covid-19;
- 2) Penanganan Jejaring Pengamanan Sosial, melalui kegiatan:
 - a) Pemenuhan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten/Kota;
 - b) Pengamanan Sosial;
 - c) Fasilitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Penanganan Dampak Ekonomi, melalui kegiatan:
 - a) Peningkatan produksi sektor pertanian dengan memberikan stimulus bagi petani berupa bantuan bibit padi, bibit kakao, bibit kopi, bibit jagung, bibit talas satoimo serta bantuan subsidi pupuk;
 - b) Peningkatan produksi sektor perikanan dengan memberikan stimulus bagi nelayan berupa bantuan benur udang windu, benih ikan bandeng, benih ikan air tawar, bibit rumput laut, BBM untuk nelayan serta sarana pendukung lainnya;
 - c) Peningkatan produksi sektor peternakan dengan memberikan stimulus berupa bantuan bibit ayam potong dan itik petelur serta sarana pendukung lainnya;

- d) Peningkatan produksi sektor kehutanan dengan memberikan stimulus berupa bantuan bibit tanaman porang, lebah madu, jahe merah serta saran pendukung lain;
 - e) Penanganan inflasi dengan melaksanakan pasar murah dan pengawasan barang beredar;
 - f) Peningkatan kunjungan wisatawan dengan melakukan promosi pawiata, travel fair, hospitality care;
 - g) Pemberdayaan UMKM.
 - h) Meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat menjadi faktor determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Program PEN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi dalam negeri (*demand*), peningkatan aktivitas dunia usaha (*supply*), serta menjaga stabilitas ekonomi.
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; *People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.
- Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan.
- KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan meliputi:
- a. Permukiman dengan akses layanan air minum dan sanitasi yang kurang memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya;
 - b. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau prioritas

Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penyeleman Danau Prioritas Nasional dan Penganangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;

- d. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
- e. Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;
- f. Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan sumber daya hayati laut.

Memperhatikan penjabaran keterkaitan antara gambaran pembangunan Sulawesi Selatan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang diamanahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD, sebagai berikut:

**Tabel VII. 1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan**

| VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER | | |
|---|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif | | |
| 1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik |
| | 2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | |
| Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel | | |
| 2. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah | 3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur | 2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah |
| Misi 3 : Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif | | |
| 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata | 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah | 3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru |
| | | 4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif |

| VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER | | |
|--|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| | 5. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat | 5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah |
| Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | | |
| 4. Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif | 6. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan | 6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah |
| | 7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga |
| | 8. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan | 8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan |
| | 9. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat | 9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat |
| Misi 5 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan | | |
| 5. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah | 10. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah | 10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dan pengembangan ekonomi maritim |
| 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan | 11. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim |

7.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah digambarkan sebagai berikut:

Gambar VII. 1

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel VII. 2.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2020

SEBELUM Perubahan RPJMD

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | | |
| Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter | | | | | | | | |
| 1. Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif | | | | | | | | |
| | Tujuan 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan | Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar | Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif | 1. Penataan dan penguatan kelembagaan 2. Pengembangan dan implementasi e-government 3. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 4. Pengembangan baruga layanan publik | Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur | | | |
| 2. Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel | | | | | | | | |
| | Tujuan 2: Meningkatkan infrastruktur wilayah | Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur | Strategi 2: Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan | Kordinasi dengan pemerintah Kabupaten dalam perbaikan infrastruktur wilayah terisolir | Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan provinsi | | | |
| 3. Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif | | | | | | | | |
| | Tujuan 3: Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah | Sasaran 4: Meningkatnya produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan | Strategi 3: Memperkuat dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan kordinasi penanggulangan kemiskinan | Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis data akurat sumbersumber pertumbuhan pada wilayah tersebut serta peletakan dasar infrastruktur pendukung pertumbuhan | Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru | | | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
|-----|--|---|--|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| | | antar lapisan masyarakat dan antar wilayah | | | |
| 4. | Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | | | | |
| | Tujuan 4: Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif | Sasaran 6: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Strategi 4: Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajarmengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi dan meningkatkan pembinaan pemuda | Peningkatan kualitas pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi | Penguatan pendidikan vocasional dalam kerangka link and mach dengan dunia usaha dan industr |
| | | Sasaran 7: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan | Strategi 5: Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak | Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak | Peningkatan upaya eliminasi dan penghapusan segala bentuk kekerasan dan praktek-praktek yang membahayakan terhadap perempuan dan anak |
| | | Sasaran 8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Strategi 6: Meningkatkan keterpenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan serta meningkatkan sarana parasarana olah raga serta peningkatan pembinaan dan pendidikan peserta keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi olah raga | Pembangunan sarana prasarana kesehatan dalam memperlancar pelayanan kesehatan khususnya ketersediaan rumah sakit regional dan sarana kesehatan mobile pada lokasi kepulauan | Perbaikan pelayanan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
|-----|--|--|--|--|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 5. | Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan | | | | |
| | Tujuan 5: Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Sasaran 9: Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam | Strategi 7: Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat | Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis | Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis |
| | | Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Strategi 8: Mengintegrasikan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk keterpeliharaan kualitas lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon | Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sector dalam implementasi pembangunan rendah karbon | Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim |

Tabel VII. 3.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

SETELAH Perubahan RPJMD

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
| Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter | | | | | | | | |
| 1. | Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif | | | | | | | |
| | Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik | Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Strategi 1: Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik | Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur | | Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel | | | | | | | |
| | Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah | Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur | Strategi 2: Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah | 1. Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta wilayah terisolir 2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara | 1. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan 2. Peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastuktur wilayah terisolir 3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman | Penyediaan infrastruktur sumberdaya air | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|-----|---|--|--|--|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 3. | Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif | | | | | |
| | Tujuan 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata | Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah | Strategi 3: Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru | Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung produksi ekonomi unggulan daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru 2. Pembangunan dan pengelolaan Rest Area melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam | Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah |
| | | | Strategi 4: Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; 2. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata; 3. Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; 2. Perluasan Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata; 2. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; |
| | Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat | Strategi 5: Pengembangan kapasitas usaha ekonomi | Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 2. Peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan social | Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|-----|--|---|---|--|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 4. | Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | | | | | |
| | Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif | Sasaran 6: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan | Strategi 6: Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah | Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja | Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan menengah dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar mengajar | Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi |
| | | Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Strategi 7: Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga | Perbaikan pelayanan kesehatan khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan stunting | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi pembangunan rumah sakit regional 2. Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga | Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar |
| | | Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan | Strategi 8: Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan | Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal | Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat | Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak |
| | | Sasaran 9 : Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat | Strategi 9: Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi penyelenggaran pembinaan nilai-nilai keagamaan dan budaya lintas kabupaten kota 2. Mendorong partisipasi masyarakat dan Lembaga keagamaan untuk meningkatkan aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan 2. Peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman; 3. Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan 2. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggarana keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-sehari |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 5. | | | | penyelenggarana keagamaan | | |
| 5. | Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang BerkelaJutan | | | | | |
| | Tujuan 5: Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah | Sasaran 10: Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah | Strategi 10: Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dan pengembangan ekonomi maritim | Akselerasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya alam | Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan | Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman |
| | Tujuan 6: Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah | Sasaran 11: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim | Strategi 11: Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim | 1. Peningkatan ketahanan bencana dan penanggulangan bencana 2. Penanganan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup | 1. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon 2. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS) | 1. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan 2. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon |

7.3. Program Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi serta janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan A. Sudirman Sulaiman, ST. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur terdapat 5 Program Nyata yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu :

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi Komoditas Sulawesi Selatan.
- 2) Pembangunan Infrastruktur yang Menjangkau Masyarakat Desa Terpencil.
- 3) Rumah Sakit Regional di 6 Wilayah dan Ambulance Siaga.
- 4) Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani.
- 5) Destinasi Wisata Andalan Berkualitas Internasional.

Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 Tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain:

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- 2) Pencapaian SDGs.
- 3) Pengentasan kemiskinan.
- 4) Pencapaian NSPK dan SPM.
- 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- 6) Pengembangan daerah terisolir.

Selain kedua pertimbangan diatas, program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 2) Penguatan infrastruktur wilayah
- 3) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
- 4) Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
- 5) Pembangunan manusia
- 6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
- 7) Pelestarian lingkungan hidup

Proyek prioritas strategis daerah merupakan upaya menjawab isu-isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek prioritas strategis daerah Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, KPBU, dan Swasta.

Proyek prioritas strategis daerah Sulawesi Selatan merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas nasional (*Major Project*) dengan prioritas pembangunan daerah yang disajikan berdasarkan sasaran misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Pelaksanaan proyek prioritas strategis daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dan RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar prioritas pembangunan daerah beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel berikut:

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel VII. 4.
Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023

| No. | Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah | Sumber Anggaran | | | | Tahun Pelaksanaan |
|-----|--|-----------------|------|------|--------------|-------------------|
| | | APBN | APBD | KPBU | SWASTA/ BUMN | |
| I | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | |
| 1. | Pengembangan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | √ | | | 2021-2023 |
| II | Berkembangnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | |
| 1. | Pengembangan Baruga Layanan Publik | | √ | | | 2021-2023 |
| 2. | Pembangunan Mall Pelayanan Publik | | √ | | | 2019-2023 |
| 3. | Pembangunan Twin Tower Pusat Perkantoran dan Jasa Pelayanan Publik | | √ | | √ | 2021-2023 |
| III | Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah | | | | | |
| 1. | Pembangunan jalan tol pesisir Selatan | √ | √ | | √ | 2022-2023 |
| 2. | Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata | √ | √ | √ | | 2022-2023 |
| 3. | Pembangunan jalan dan jembatan pada daerah terisolir | √ | √ | | | |
| 4. | Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe B di Jeneponto, Bantaeng, Wajo, Parepare dan Palopo | | √ | | | 2018-2023 |
| 5. | Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan Bira; Bajoe; dan P. Jampea | √ | √ | | | 2021-2023 |
| 6. | Pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik di Kawasan Strategis dan Pulau Pulau Kecil | √ | √ | | √ | 2022-2023 |
| 7. | Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga | √ | | √ | | 2023 |
| 8. | Pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik | √ | √ | | √ | 2021-2023 |
| 9. | Pembangunan jalur KA Lintas Makassar-Parepare | √ | | √ | | 2021-2023 |
| 10. | Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dan berbasis jalan | √ | √ | √ | | 2021-2023 |
| 11. | Pembangunan bandara Buntu Kunik | √ | √ | | | 2021-2023 |
| 12. | Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin | √ | | √ | | 2021-2023 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah | Sumber Anggaran | | | | Tahun Pelaksanaan |
|------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | | APBN | APBD | KPBU | SWASTA/ BUMN | |
| 13. | Pengembangan Bandara Seko dan Rampi | √ | | | | 2021 - 2023 |
| 14. | Pengembangan pelabuhan Makassar | √ | | √ | √ | 2021-2023 |
| 15. | Pembangunan SPAM Regional Mamminasata | √ | √ | | | 2021-2023 |
| 16. | Pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (ARSINUM) Berbasis Masyarakat | √ | √ | | | 2020-2023 |
| 17. | Pembangunan Waduk Multi Guna dan Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Saddang dan DI Pammukkulu | √ | | | √ | 2022-2023 |
| IV | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah | | | | | |
| 1. | Pengembangan pusat pembibitan dan budidaya komoditas ikan dan udang | √ | √ | | | 2021-2023 |
| 2. | Peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan garam | √ | √ | | | 2021-2023 |
| 3. | Pengembangan kawasan peternakan | √ | √ | | √ | 2021-2023 |
| 4. | Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan destinasi pariwisata DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja berupa dermaga dan bandara | √ | √ | | | 2022-2023 |
| V | Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Antar Lapisan Masyarakat | | | | | |
| 1. | Penanganan kawasan kumuh dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa/Milik | √ | √ | | | 2021-2023 |
| 2. | Pembangunan dan Pengelolaan Rest Area melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UMKM) dan BUMDES | √ | √ | | √ | 2020-2023 |
| 3. | Pengembangan PTSP Prima berbasis elektronik | √ | √ | | | 2020-2023 |
| VI | Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan | | | | | |
| 1. | Pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian | √ | | | | 2021-2023 |
| 2. | Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah | | √ | | | 2021-2023 |
| 3. | Pembangunan Stadion Mattoangin | √ | √ | √ | | 2022-2023 |
| 4. | Pembangunan Islamic Centre | | √ | | | 2020-2023 |
| VII | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | | |
| 1. | Pembangunan RS Regional | | √ | | | 2020-2023 |
| 2. | Penanganan stunting | √ | √ | | | 2019-2023 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah | Sumber Anggaran | | | | Tahun Pelaksanaan |
|-------------|---|-----------------|------|------|-----------------|-------------------|
| | | APBN | APBD | KPBU | SWASTA/ BUMN | |
| VIII | Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan | | | | | |
| 1. | Pengembangan kewirausahaan perempuan perdesaan | √ | √ | | | 2019-2023 |
| IX | Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah | | | | | |
| 1. | Pembangunan RPH Modern | | √ | | | 2022-2023 |
| 2. | Pembangunan TPI | | √ | | | 2021-2023 |
| 3. | Pembangunan PPI | √ | √ | | | 2021-2023 |
| 4. | Pembangunan industri pupuk | | √ | | | 2023 |
| 5. | Pembangunan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian dan perkebunan | √ | √ | | | 2022-2023 |
| 6. | Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner di Pinrang dan Bone | √ | | | | 2022-2023 |
| 7. | Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri di Barru, Pinrang, Luwu Timur dan Bone | √ | | | | 2022-2023 |
| 8. | Revitalisasi Tambak | √ | √ | √ | | 2022-2023 |
| 9. | Pembangunan KI Takalar | √ | | √ | √ | 2022-2023 |
| X | Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim | | | | | |
| 1. | Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 | √ | | √ | | 2021-2023 |
| 2. | Pembangunan sistem pengolahan limbah setempat dan terpusat skala kota dan skala permukiman (SPALD-T; SPALD-S; IPLT) | √ | √ | √ | √ | 2021-2023 |
| 3. | Pembangunan Sistem Pengolahan Persampahan Skala Kota (TPA); skala kawasan (TPST) dan Berbasis Masyarakat (TPS3R) | √ | √ | √ | | 2021-2023 |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, diolah 2020

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implementasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan dipetakan dalam dua kategori yaitu Matriks Program Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2016 (sebelum Perubahan RPJMD) dan Matriks Program Pembangunan Daerah (setelah RPJMD Perubahan) berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur Program sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel VII.5
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2023

RPIMD Perubahan

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|--|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik | | Indeks Reformasi Birokrasi | Huruf/Angka | B | BB (71 - 80) | | BB (71 - 80) | | A (81 - 90) | | A (81 - 90) | | | | | |
| Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | | Nilai SAKIP Provinsi | Huruf/Angka | B | BB (>70-80) | | A (>80 - 90) | | A (>80 - 90) | | A(>80 - 90) | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural | Persentasi | 100 % | 100 % | 5,435,028,632.0 | 100 % | 5,553,028,632.00 | 100 % | 6,330,130,000.00 | 100 % | 17,318,187,264.00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | |
| 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Percentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN; | Persentasi | 57 % | 60 % | 5,980,746,888 | 63% | 6,025,602,490.0 | 65 % | 6,415,458,971.0 | 65 % | 18,421,808,349.0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| | | Percentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta; | Persentasi | 80% | 85 % | | 90 % | | 100 % | | 100 % | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| | | Percentase ASN berkinerja baik dan sangat baik | Persentasi | 88 % | 91 % | | 93 % | | 95 % | | 95% | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| 3 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Percentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi | Persentasi | 100 % | 100 % | 4,794,694,160 | 100 % | 6,355,369,118.0 | 100 % | 9,280,135,220.0 | 100 % | 20,430,198,498.00 | BIRO ORGANISASI | | | |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Percentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP | Persentasi | 65,96 % | 70.20% | 12,256,108,048.0 | 75.40% | 12,592,465,578.96 | 79.50% | 16,040,112,029.04 | 79.50% | 40,888,685,656.0 | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| | | Percentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota | Persentasi | 68,83% | 69.59% | | 71.04% | | 72.50% | | 72.50% | | | | | |
| | | Percentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat | Persentasi | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|--|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---|-------------------|---|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 5 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas) | % Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD | Persentasi | 100 % | 100 % | 14,241,588,156.0 | 100 % | 14,591,598,156.0 | 100 % | 15,713,198,815.0 | 100 % | 44,546,385,127.0 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| | | Persentase peningkatan capaian kinerja program | indeks | N/A | 0,5% | | 0,5% | | 0,5% | | 0,5% | | | | | |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | Nilai | 2,66 | 2,80 | 3,799,568,236 | 2,90 | 4,000,000,000.0 | 3,00 | 4,500,000,000.0 | 3,00 | 12,299,568,236.0 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | |
| 7 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentasi | 2,4 | 3 | 20,289,253,332 | 4 | 20,289,253,332 | 5 | 21,289,253,332 | 5 | 61,867,759,996.0 | BIRO HUKUM | | | |
| | | Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi | Persentasi | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BIRO HUKUM | | | |
| 8 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi | Persentasi | 11.81% | 11.81 % | 3,877,478,400.0 | 11.81 % | 5,252,942,756.05 | 11.81 % | 6,262,236,309.39 | 11.81 % | 15,392,657,465.44 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| | | Persentase Desa yang diFasilitasi | Persentasi | 5.01 % | 15.03 % | | 20,04 % | | 25,05 % | | 25,05 % | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| | Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik | indeks | B | B (3,51 – 4) | | A- (4,01 – 4,50) | | A (4,51 – 5,0) | | A (4,51 – 5,0) | | | | | |
| 9 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas) | Persentasi | N/A | 3 % | 11,269,424,704 | 3 % | 6,405,000,000.0 | 3 % | 6,992,500,000.0 | 9 % | 24,666,924,704.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik | Persentasi | 60% | 80 % | 16,245,134,500 | 90 % | 16,700,000,000 | 100 % | 19,256,670,618 | 100 % | 52,201,805,118.0 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | |
| | | Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik | Persentasi | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |
| 11 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP | Persentasi | 80% | 80% | 1,324,672,696 | 85% | 1,491,000,000 | 90% | 1,500,000,000 | 90% | 4,315,672,696.0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | | | |
| | Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah | Indeks Williamson | Indeks | 0.639 | 0.601 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.6 | | | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|--------------------|--|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur | Indeks Layanan Infrastruktur | Indeks | 76.06 | 79.5 | | 81.7 | | 83.4 | | 83.4 | | | | | |
| 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Percentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | Km | 61.52% | 72.30% | 239,144,922,402.0 | 74.24% | 229,315,396,350.54 | 75.09% | 239,211,231,213.06 | 75.09% | 707,671,549,965.60 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| | | Percentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat) | Percentase | 20.48% | 42.72% | | 71.79% | | 74.25% | | 74.25% | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| 13 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) | Orang | 980.537 Orang | 1.028.000 Orang | 45,945,652,580.0 | 1.074.000 Orang | 37,915,000,000.0 | 1.105.000 Orang | 27,100,000,000.0 | 1.105.000 Orang) | 110,960,652,580.0 | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | | Jumlah pelabuhan strategis provinsi | Percentase | 10 | 11 Lokasi | | 11 Lokasi | | 11 Lokasi | | 11 Lokasi | | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | | Percentase pelabuhan yang beroperasi | Percentase | 35 % | 35 % | | 35 % | | 35 % | | 35 % | | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| 14 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Percentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | Percentase | 96,82 % | 98,25 % | 15,240,188,500.0 | 98,50% | 15,466,113,573.00 | 99 % | 16,277,888,192 | 99 % | 46,984,190,265.0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | |
| | | Percentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan) | Percentase | 98.09 | 99% | | 99,25 % | | 99,50 % | | 99,50 % | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | |
| 15 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (SPM/Prioritas) | Percentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi | Percentase | 72,71 % | 77,00 % | 101,989,809,567 | 78,5 % | 94,348,629,180.0 | 80 % | 97,815,160,625.25 | 80% | 294,153,599,372.25 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| | | Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai | Percentase | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100 % | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Percentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan | Percentase | 100 % | 100 % | 3,521,804,832.00 | 100 % | 2,924,590,828.0 | 100 % | 9,765,813,300.0 | 100 % | 16,212,208,960.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | | Percentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman | Percentase | 89,77 % | 91 % | | 92 % | | 93 % | | 93 % | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | | Percentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman | Percentase | 17.10 % | 60 % | | 80 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|---|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 17 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | Persentase | 0 | 100% | 160,619,100 | 100% | 25,014,213,852.66 | 100 % | 25,933,279,234.48 | 100 % | 51,108,112,187.14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| | | Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota | Persentase | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat | PDRB Perkapita | Juta Rp. | 56,98 | 59,23 | | 62,37 | | 65,98 | | 65,98 | | | | | | |
| | | Angka Kemiskinan | % | 8.69 | 8.7 | 8.1 | 7.45 | 7.45 | | | | | | | | |
| Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4.62 | 7.20 | | 6.95 | | 6.27 | | 6.27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan | Persentase | 0,5 % | 0,5 % | 6,583,932,500 | 0,7 % | 10,231,219,125.00 | 1,0 % | 11,371,340,438.00 | 1,0 % | 28,186,492,063.0 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | | | |
| | | Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal | Persentase | 12,5 % | 12,5 % | | 12,5% | | 20,8 % | | 20,8 % | | | | | |
| 19 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | Peningkatan Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | 116 % | 100% | 23,989,794,000 | 100% | 18,467,816,177 | 100% | 23,627,767,371 | 100% | 66,085,377,548.00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | | | |
| | | Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | Peningkatan Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | 58,27 % | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| 20 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya | Kawasan | 5 Kawasan | 11 Kawasan | 75,269,455,924 | 13 Kawasan | 109,353,237,501.0 | 15 Kawasan | 109,404,185,675.0 | 15 Kawasan | 294,026,879,100.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| 21 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan | Persentase | 3.48 % | 3.91 % | 692,176,310.0 | 4.13 % | 945,000,000.0 | 4.35 % | 995,000,000.0 | 4.35 % | 2,632,176,310.0 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas) | Persentase | 58.17 % | 58.78 % | | 59.09 % | | 59.41 % | | 59.41 % | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA | Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan | Persentase | 71.4 % | 72,92 % | 2,623,431,000.00 | 75.00% | 2,715,599,600.00 | 77,08 % | 3,145,599,600.00 | 77,08 % | 8,484,630,200.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|--|--|---|-----------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---|-------------------|--|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 22 | DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri | Persentase | 70 % | 75,00% | | 80,00% | | 85,00% | - | 85 % | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |
| 23 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun) | Rp | 4,54 | 3,50 | 1,447,034,000 | 4 | 1,640,000,000.0 | 4,5 | 1,800,000,000.0 | 16,54 | 4,887,034,000.0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | | | |
| | | Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun) | Rp | 5,67 | 4,50 | | 5 | | 5,67 | | 20,84 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | | | |
| 24 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persentase | 0.16% | 0.19% | 3,613,311,700 | 0.22% | 5,250,000,000 | 0.25% | 5,262,000,000.00 | 0,25 % | 14,125,311,700 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | Persentase | 1.09% | 1.16% | | 1,19 % | | 2.03% | | 2,03 | | | | | |
| 25 | Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat | Rasio Gini | Nilai | 0.39 | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | | | | |
| | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Prioritas) | Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi | Persentase | 39.88% | 13.69% | 8,413,514,632.0 | 23,42 % | 10,763,514,632.0 | 36,37 % | 10,763,514,632.0 | 100 % | 29,940,543,896.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | |
| 26 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Cakupan UMKM yang diberdayakan | Persentase | 5% | 7% | 5,191,925,000 | 9% | 4,947,882,840.51 | 11% | 7,129,676,594.20 | 11% | 17,269,484,434.71 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | |
| 27 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha | Persentase | 5% | 15% | 2,540,860,490 | 20% | 5,497,330,677.35 | 25% | 7,699,312,092.70 | 25% | 15,737,503,260.05 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | |
| | | Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas) | Persentase | 0,15% | 1% | | 2% | | 3% | | 3% | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | |
| 28 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan | Persentase | 12, 19 % | 15,65 % | 20,620,155,000 | 16,25 % | 8,400,101,500.0 | 16,76 % | 13,431,917,000.0 | 16,76 % | 42,452,173,500.0 | DINAS KEHUTANAN | | | |
| 29 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase penempatan transmigrasi | Persentase | 100 % | 100% | 47,735,000 | 100% | 47,315,000.00 | 100% | 150,000,000.00 | 100% | 245,050,000.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |
| 30 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial | Persentase | 0.5 % | 3,5% | 10,019,193,024 | 3,6% | 10,021,112,326.40 | 3,7% | 11,023,223,559.04 | 3,7% | 31,063,528,909.44 | DINAS SOSIAL | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|---|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal | Ton | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS SOSIAL | | | |
| 31 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton), | Ha | 5.432,55 Ton | 7000 Ton | | 7000 Ton | | 7000 Ton | | 26432,55 ton | | | | | |
| | | Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha) | Kw/Ha | N/A | 100 Ha | | 110 Ha (210 Ha) | | 121 Ha (331 Ha) | | 331 ha | | | | | |
| | | Produktifitas Padi | Kw/Ha | 51 Kw/Ha | 48,95 Kw/Ha | | 49,68 Kw/Ha | | 50,43 Kw/Ha | | 50,43 Kw/Ha | | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | | | |
| | | Produktifitas Jagung | Kw/Ha | 57 Kw/Ha | 54,10 Kw/Ha | | 54,91 Kw/Ha | | 55,73 Kw/Ha | | 55,73 Kw/Ha | | | | | |
| | | Produktifitas Kopi | Kw/Ha | 588 Kg/Ha | 588 Kg/Ha | | 588 Kg/Ha | | 588,1 Kg/Ha | | 588,1 Kg/Ha | | | | | |
| | | Produktifitas Kakao | Unit | 634 Kg/Ha | 9,000.00 | | 10.500 Kg/Ha | | 12.000 Kg/Ha | | 39.000 Kg/Ha | | | | | |
| | | Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian | Ton | 377 Unit | 250 Unit | | 275 Unit | | 300 Unit | | 1.655 Unit | | | | | |
| | | Peningkatan Ketersediaan Pupuk | Ton | 266,50 Ton | 298,65 ton | | 310,60 ton | | 323,02 ton | | 1.495,55 ton | | | | | |
| | | Produksi Daging (ton) | Ton | 150.462 ton | 167,936 | | 177,425 | | 187,450 | | 187,450 | | | | | |
| | | Produksi Telur (Ton) | Ton | 250.289 ton | 191,968 | | 202,814 | | 214,274 | | 214,274 | | DINAS PETERNAKAN | | | |
| | | Produksi Susu (Ton) | Persentase | 1.888 Ton | 2,035 | | 2,096 | | 2,159 | | 2,159 | | | | | |
| 32 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Percentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) | Persentase | 1,44 % | 1,51 % | | 1,54 % | | 1,57 % | | 1,57 % | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| | | Percentase Posyandu aktif; | Persentase | 99,89 % | 99,89 % | | 99,91 % | | 99,98 % | | 99,98 % | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| | | Percentase PKK aktif | Persentase | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 33 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Percentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan | | 20% | 30% | 2,399,575,000 | 40% | 2,399,575,000 | 50% | 4,399,575,000 | 50% | 9,198,725,000.0 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | |
| | Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 71.66 | 72.20 | | 72.57 | | 73.05 | | 73.05 | | | | | |
| | Sasaran 6: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan | Indeks Pendidikan | Nilai | 64.64 | 66.29 | | 66.57 | | 67.05 | | 67.05 | | | | | |
| 34 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN spm prioritas | Percentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran | Persentasi | 50.05 % | 60.25 % | 1,040,979,665,047.0 | 61.15 % | 996,300,000,000.0 | 62,00 % | 1,003,200,000,000.0 | 62,00 % | 3,040,479,665,047.0 | DINAS PENDIDIKAN | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok) | Persentasi | 90 % | 91,45 % | | 92,90% | | 93,90% | | 93,90% | | DINAS PENDIDIKAN | | | |
| | | Persentase jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) | Persentasi | 74,23 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS PENDIDIKAN | | | |
| | | Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM) | Persentasi | 80% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS PENDIDIKAN | | | |
| 35 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM prioritas | Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama | Persentasi | 50,05% | 54,25% | 894,323,500.0 | 55,60% | 3,485,169,147.82 | 57,25% | 3,855,419,147.82 | 57,25% | 8,234,911,795.64 | DINAS PENDIDIKAN | | | |
| | | Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK | Persentasi | N/A | 80% | | 81% | | 82% | | 82% | | DINAS PENDIDIKAN | | | |
| 36 | Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Nilai | 77.58 | 77.76 | | 77.82 | | 77.86 | | 77.86 | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Peningkatan Prestasi olah raga | Medali | 291,36 % | 100% | 1,200,833,531,311 | 0 | 813,520,000,000 | 200% | 15,816,632,150.00 | 200% | 2,030,170,163,461 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| | | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | Persentasi | 80% | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | | | | | |
| 37 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas) | Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk | Rasio | 17/100.000 Pddk | 23/100.000 Penduduk | 1,269,549,600.0 | 23/100.000 Penduduk | 3,657,000,000.0 | 23/100.000 Penduduk | 4,154,000,000.0 | 23/100.000 Penduduk | 9,080,549,600.0 | DINAS KESEHATAN | | | |
| | | Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan | Persentasi | 80% | 95% | 120,000,000.00 | 97% | 130,000,000 | 100% | 140,000,000.0 | 100% | 390,000,000.0 | UPT TRANSFUSI DARAH | | | |
| | | Persentase tenaga medis yang tersertifikasi | Persentasi | 30 % | 40% | 535,373,456.0 | 45 % | 221,144,238.15 | 50% | 229,269,459.07 | 50% | 985,787,153.22 | UPT PELATIHAN KESEHATAN | | | |
| | | Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi | Persentasi | 100 % | | | 100 % | 188,053,034.0 | 100 % | 206,858,338.0 | 100 % | 394,911,372.0 | UPT PELATIHAN KESEHATAN | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|---|--|---|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan | Persentasi | 100 % | | | 100 % | 500,000,000.00 | 100 % | 500,000,000.00 | 100% | 1,000,000,000.00 | UPT RSK GIGI DAN MULUT | | | |
| | | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | Persentasi | 40 % | 60% | 2,062,103,200.0 | 65 % | 375,000,000.0 | 70 % | 585,000,000.00 | 70% | 3,022,103,200.0 | RSUD LABUANG BAJI | | | |
| | | Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Persentasi | 80 % | 0 | | 90 % | 4,200,000,000.0 | 100 % | 5,250,000,000.0 | 100 % | 9,450,000,000.0 | RSUD HAJI MAKASSAR | | | |
| | | Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan | Persentasi | 42,9 % | 55,9 % | 156,594,000.0 | 77,4 % | 400,000,000.0 | 100 % | 400,000,000.0 | 100 % | 956,594,000.0 | RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH | | | |
| | | Meningkatnya Kompetensi teknis SDM | Persentasi | 65 % | 70 % | 89,700,000 | 85% | 300,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 689,700,000.0 | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI | | | |
| | | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | Persentasi | 33 % | 33 % | 144,000,000.0 | 12 % | 150,000,000.0 | 24 % | 360,000,000.0 | 24% | 654,000,000.0 | RSUD SAYANG RAKYAT | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas/SPM) | Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk | Persentasi | 17/100.000 Pddk | 23/100.000 Penduduk | 1,269,549,600.0 | 23/100.000 Penduduk | 3,657,000,000.0 | 23/100.000 Penduduk | 4,154,000,000.0 | 23/100.000 Penduduk | 9,080,549,600.0 | DINAS KESEHATAN | | |
| | | Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan | Persentasi | 80% | 95% | 120,000,000.00 | 97% | 130,000,000 | 100% | 140,000,000.0 | 100% | 390,000,000.0 | UPT TRANSFUSI DARAH | | | |
| | | Persentase tenaga medis yang tersertifikasi | Persentasi | 30 % | 40% | 535,373,456.0 | 45 % | 221,144,238.15 | 50% | 229,269,459.07 | 50% | 985,787,153.22 | UPT PELATIHAN KESEHATAN | | | |
| | | Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi | Persentasi | 100 % | | | 100 % | 188,053,034.0 | 100 % | 206,858,338.0 | 100 % | 394,911,372.0 | UPT PELATIHAN KESEHATAN | | | |
| | | Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan | Persentasi | 100 % | | | 100 % | 500,000,000.00 | 100 % | 500,000,000.00 | 100% | 1,000,000,000.00 | UPT RSK GIGI DAN MULUT | | | |
| | | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | Persentasi | 40 % | 60% | 2,062,103,200.0 | 65 % | 375,000,000.0 | 70 % | 585,000,000.00 | 70% | 3,022,103,200.0 | RSUD LABUANG BAJI | | | |
| | | Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Persentasi | 80 % | 0 | | 90 % | 4,200,000,000.0 | 100 % | 5,250,000,000.0 | 100% | 9,450,000,000.0 | RSUD HAJI MAKASSAR | | | |
| | | Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan | Persentasi | 42,9 % | 55,9 % | 156,594,000.0 | 77,4 % | 400,000,000.0 | 100 % | 400,000,000.0 | 100 % | 956,594,000.0 | RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---|---------------------|--|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Meningkatnya Kompetensi teknis SDM | Persentasi | 65 % | 70 % | 89,700,000 | 85% | 300,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 689,700,000.0 | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI | | | |
| | | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | Persentasi | 33 % | 33 % | 144,000,000.0 | 12 % | 150,000,000.0 | 24 % | 360,000,000.0 | 24% | 654,000,000.0 | RSUD SAYANG RAKYAT | | | |
| | Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai | 76.01 | 75.21 | | 76.36 | | 77.23 | | 77.23 | | | | | |
| 40 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi | Persentase | 0% | 10% | 1,111,761,124.0 | 25% | 910,501,000.00 | 35% | 1,065,501,000.00 | 35% | 3,087,763,124.0 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA | | | |
| | | Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG | Persentase | 50% | 65% | | 71% | | 75% | | 75% | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA | | | |
| 41 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi | Persentase | 0% | 25% | 154,010,300 | 37.5% | 480,000,000.00 | 60% | 680,000,000.00 | 60% | 1,314,010,300.00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA | | | |
| | Sasaran 9: Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat | Angka kriminalitas | Kasus | 25.121 (2018) | 24.709 | | 24.573 | | 24.438 | | 24.438 | | | | | |
| 42 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM) | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | Persentasi | 100 % | 100% | 1,907,789,500 | 100% | 2,120,000,000.00 | 100% | 2,370,000,000.00 | 100% | 6,397,789,500.0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | |
| 43 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan. | Persentasi | 100 % | 100 % | 1,225,538,715,412 | 100 % | 1,226,220,302,319.0 | 100 | 1,228,220,266,319.0 | 100 | 3,679,979,284,050.0 | BIRO KESEJAHTERAAN | | | |
| | | Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas) | Persentasi | 36,67 | 35,25 | | 35,50 | | 35,55 | | 35,55 | | BIRO KESEJAHTERAAN | | | |
| | | Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas) | Persentasi | 10 % | 10 % | | 10 % | | 10 % | | 10 % | | BIRO KESEJAHTERAAN | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 44 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara | Persentasi | N/A | 20 % | 274,996,630 | 20 % | 181,445,057.20 | 20 % | 200,115,753.59 | 60 % | 656,557,440.79 | BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK | | | |
| 45 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) | Persentasi | 937 Penyalahguna | 0 | 1,224,235,400 | 20 % | 1,322,011,260.35 | 40 % | 1,458,046,219.03 | 40 % | 4,004,292,879.38 | BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK | | | |
| | | Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani | Persentasi | 100 % | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang BerkelaJutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 5: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah | Pertumbuhan Ekonomi | % | 6.92 | 4,10 - 5,55 | | 4,62 - 5,98 | | 5,04 - 6,52 | | 5,04 - 6,52 | | | | | |
| | Sasaran 10: Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah | Produktifitas Total Daerah | Rp / Angkatan Kerja | 82.027.871 | 76913142.88 | | 77086000.1 | | 77349122.29 | | 77349122.29 | | | | | |
| 46 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Penurunan Serangan OPT (%) | Persentasi | 5.00% | 4,7 % | 10,227,232,050.00 | 4,6 % | 7,002,338,017.50 | 4,5 % | 7,352,454,918.88 | 4,5 % | 24,582,024,986.38 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | | | |
| | | Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%) | Persentasi | 70.00% | 76,49 % | | 78,79 % | | 81,15 % | | 81,15 % | | | | | |
| 47 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Nilai Produksi Perikanan Tangkap | Rp | Rp. 8.631,30 M | Rp. 8.852,48 M | 26,519,004,784 | Rp. 9.029,52 M | 27,900,534,075.00 | Rp. 9.210,12 M | 32,342,830,856.00 | Rp. 9.210,12 M | 86,762,369,715.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| | | Produksi perikanan tangkap | Ton | 398.565,2 Ton | 396.992,3 Ton | | 404.932,2 Ton | | 413.030,8 Ton | | 413.030,8 Ton | | | | | |
| | | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | Persentasi | 30,18 % | 23,89 % | | 27,07 % | | 30,25 % | | 30,25 % | | | | | |
| | | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | Persentasi | 31,58 % | 57,89% | | 68,42% | | 78,95% | | 78,95% | | | | | |
| | | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan | Persentasi | 24,26% | 25,61% | | 26,79% | | 27,17% | | 27,17 % | | | | | |
| 48 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Nilai produksi perikanan budidaya | Rp | Rp. 14.856,34 M | Rp. 14.474,73 M | 15,468,584,804 | 15.198,47 M | 15,726,481,077.00 | Rp. 15.958,39 M | 17,195,452,115.00 | Rp. 15.958,39 M | 48,390,517,996.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| | | Produksi perikanan budidaya | Ton | 3.662.761,4 ton | 3.898.767,4 Ton | | 4.093.705,8 Ton | | 4.298.391,1 Ton | | 4.298.391,1 Ton | | | | | |
| | | Persentase ketersediaan benur berkualitas | Persentasi | 90% | 100% | | 100% | | 100% | | 100 % | | | | | |
| 49 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu | Ton | 4.042 Ton | 283 Ton | 4,771,522,850.0 | 283 Ton | 9,101,569,500.0 | 283 Ton | 9,024,330,000.0 | 2.10596 Ton | 22,897,422,350.0 | DINAS KEHUTANAN | | | |
| | | Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan | M3 | 132.100 M3 | 92.336,62 M3 | | 92.336,62 M3 | | 92.336,62 M3 | | 477175.12 M3 | | | | | |
| | | Persentase Kerusakan Hutan pertahun | Persentasi | 17,43 % | 17,59 % | | 16,20 % | | 14,82 % | | 14,82 % | | | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|--|--|---|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas) | Percentasi | 55,73 % | 57,91 % | | 61,60 % | | 65,47 % | | 65,47 % | | | | | |
| 50 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.) | Rp | 51.006.977.860 Rp | 460.835.232.750 Rp | 193,308,259,883.19 | 463.034.340.435 Rp | 211,404,665,383.70 | 465.893.180.426 Rp | 213,943,902,220.83 | 465.893.180.426 Rp | 618,656,827,487.72 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | | | |
| | | Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.) | Rp | 3.980.600.000 Rp | 6.000.000.000 Rp | | 7.000.000.000 Rp | | 8.000.000.000 Rp | | 8.000.000.000 Rp | | | | | |
| | | Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan | Rp | 9.412.084.000 (Rp) | 29.493.840.000 (Rp) | 33,954,745,936 | 37.059.609.113 (Rp) | 34,676,405,559.0 | 38.617.836.192 Rp | 34,691,405,559.0 | 38.617.836.192 Rp | 103,322,557,054.0 | DINAS PETERNAKAN | | | |
| 51 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Nilai Hilirisasi Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi | Rp | Rp. 293,120 Milyar | Rp. 304.96 Milyar | 2,649,282,314 | Rp. 311,06 Milyar | 2,566,615,529.93 | Rp. 317.28 Milyar | 2,664,698,328.64 | Rp. 317.28 Milyar | 7,880,596,172.57 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| | | Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi | Ton | 5.332,1 Ton | 5.329,0 Ton | | 5.436,2 Ton | | 5.544,1 Ton | | 5.544,1 Ton | | | | | |
| | | Percentase Pembinaan mutu produk perikanan | Percentasi | 20% | 60% | | 80% | | 100% | | 100% | | | | | |
| 52 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Percentase pertumbuhan jumlah industri | Percentasi | 6% | 5% | 12,191,374,570 | 6% | 11,891,365,249.92 | 7% | 13,595,969,372.85 | 7% | 37,678,709,192.77 | DINAS PERINDUSTRIAN | | | |
| 53 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai Ekspor Perdagangan | \$ | 57.950.717 \$ US | 146.674.567 \$ | 279,005,000 | 158.408.532 \$ US | 678,875,000 | 171.081.215 \$ US | 1,023,875,000.00 | 476.164.314 \$ US | 1,981,755,000.0 | DINAS PERDAGANGAN | | | |
| | <u>Tujuan 6:</u> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Nilai | 64.76 | 72.25 | | 72.63 | | 72.84 | | 72.84 | | | | | |
| | Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Potensi Penurunan emisi GRK | Juta Ton CO2Eq | 0.86 | 1.07 | | 1.198 | | 1.347 | | 1.347 | | | | | |
| 54 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Percentase Korban Bencana yang tertangani | Percentase | 100 % | 100% | 174,810,600 | 100% | 260,000,000.00 | 100% | 340,000,000.00 | 100% | 774,810,600.0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | |
| | | Percentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia | Percentase | 20 % | 30% | 46,531,119,000.0 | 50% | 46,751,820,455 | 100% | 52,841,102,517 | 100% | 146,124,041,972.49 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| | | Percentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih | Percentase | 42 % | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | Percentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani | Percentase | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |
| 55 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Rasio ketatan pemanfaatan ruang | Percentase | 0.7 | 0.8 | 1,955,622,800 | 0.8 | 5,001,420,000.0 | 1 | 5,001,400,000.0 | 1 | 11,958,442,800.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | |
| 56 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI | Jumlah DAS yang direhabilitasi | Jumlah Das | 2 DAS | 2 DAS | 2,425,940,000 | 2 DAS | 2,725,940,000 | 2 DAS | 2,725,940,000 | 2 DAS | 7,877,820,000.0 | DINAS KEHUTANAN | | | |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| No. | Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Impact / Outcome | Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome | Kondisi Kinerja Awal (2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-----|--|--|---|-----------------------------|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 57 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah | Persentase | 3,40% | 3,95% | 2,195,449,654 | 4,59% | 2,410,295,500 | 5,40% | 2,610,295,500 | 5,40% | 7,216,040,654,0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 58 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Cakupan limbah yang dikelola | Persentase | 97,03 % | 97,05% | 10,722,500,145 | 97,50 % | 6,700,000,000 | 98,00% | 5,707,815,512 | 98,00% | 23,130,315,657 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 59 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga | Persentase | 88,47 | 92 % | 622,886,000.00 | 93.4 % | 632,119,742 | 95 % | 665,306,352 | 95 % | 1,920,312,094,0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | |
| 60 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Produksi garam rakyat | Ton | 140.338,9 ton | 46.500 Ton | 13,157,763,852 | 47.500 ton | 10,850,398,104.00 | 48.450 ton | 11,790,721,227 | 48.450 ton | 35,798,883,183.0 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan | Persentase | 4,35% | 50,17 % | | 74,08 % | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%) | Persentase | 67.28% | 67.29% | | 67.30% | | 67.31% | | 67.31% | | | | | |
| 61 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | Persentase | 82,4% | 87,48% | 11,139,152,608 | 88,73% | 11,584,848,371.39 | 89,85% | 11,641,422,613.0 | 89,85% | 34,365,423,592.39 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 62 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan | Persentase | 26 % | 29,20 % | 3,490,597,210 | 30,80 % | 7,105,000,000.00 | 32,40 % | 15,650,000,000 | 32,40 % | 26,245,597,210.0 | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | | Persentase Layanan Angkutan Darat; | Persentase | 51 % | 54 % | | 56 % | | 58 % | | 58 % | | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | | Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun | Persentase | 123.750 orang | 365.000 orang | | 485.000 Orang | | 605.000 Orang | | 605.000 Orang | | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | | Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik | Persentase | 15 % | 22 % | | 22 % | | 30 % | | 30 % | | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | | Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi | | 12 Ruas | 20 Ruas | | 20 Ruas | | 20 Ruas | | 20 Ruas | | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | | Jumlah Terminal Bis terkelola | | 3 | 10 | | 13 | | 16 | | 16 | | | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| 63 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani | Persentase | 48,51 % | 72% | 673,265,512 | 73% | 2,100,450,000 | 74% | 800,450,000 | 74% | 3,574,165,512,0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |

BAB VIII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tiga tahun ke depan periode RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun ke depan tahun 2021-2023 tergambar pada Table VIII.1

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan tabel VIII.1 untuk tahun 2019 sampai 2020 mengalami pertumbuhan positif hal ini diakibatkan optimalisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah pada tahun tersebut dan belum di pengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 sehingga mengalami kenaikan. Sementara Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi diasumsikan akan mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang diproyeksikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 12,110 Trilliun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp.11,749 Trilliun, demikian juga pada tahun 2023 turun menjadi Rp. 11,528 Trilliun.

Dari sisi belanja, pada tahun 2021 sebesar Rp. 12,110 Trilliun dan tahun 2022 sebesar Rp. 11.749 Trilliun atau mengalami penurunan sebesar 2,98 %. Sedangkan belanja pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 11,528 Trilliun atau mengalami penurunan sebesar -2,98 % jika dibanding dengan tahun 2022. Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Sulawesi Selatan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menyajikan hasil penghitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

VIII.1
Realisasi Tahun 2019-2020 dan Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

| No. Kode | Kapasitas Riil/Belanja | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | No. Kode | Kapasitas Riil/Belanja | Target (Rp) | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | Target 3 | Realisasi 4 | Target 5 | Realisasi 6 | Target 9 | Realisasi 10 | | | Tahun 2022 10 | Tahun 2023 11 | |
| | KAPASITAS RIIL KEUANGAN | 3,083,655,186,548.23 | | 3,288,252,093,924.00 | | | | KAPASITAS RIIL KEUANGAN | 12,110,640,284,934.00 | 11,749,697,437,965.50 | 11,528,900,792,965.50 | |
| 2. | Belanja Daerah | 9,952,606,236,999.77 | 9,489,469,127,455.93 | 10,414,124,015,999.20 | 9,983,975,536,508.69 | 5 | BELANJA DAERAH | 12,110,640,284,934.00 | 11,749,697,437,965.50 | 11,528,900,792,965.50 | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 6,868,951,050,451.77 | 6,869,545,370,496.22 | 7,125,871,922,076.18 | 9,978,069,735,607.69 | 5.1. | Belanja Operasi | 7,369,658,326,461.00 | 7,058,172,278,190.58 | 7,250,333,600,733.52 | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 3,357,803,860,030.00 | 3,231,400,510,914.65 | 3,346,788,646,893.41 | 3,084,732,779,274.00 | 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3,387,039,397,478.00 | 3,240,981,923,996.00 | 3,477,969,421,989.00 | | |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | - | | 2,476,741,949.66 | 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,775,430,150,802.00 | 2,046,043,016,140.00 | 2,001,058,460,269.20 | | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | - | | 0 | 5.1.3 | Belanja Bunga | 4,466,445,356.00 | 2,049,717,475.58 | 1,708,097,896.32 | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 1,607,996,853,826.00 | 1,391,918,320,000.00 | 1,594,966,853,723.00 | 1,498,758,095,250.00 | 5.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | - | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 1,100,000,000.00 | 818,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 805,000,000.00 | 5.1.5 | Belanja Hibah | 196,153,807,825.00 | 1,767,097,620,579.00 | 1,767,097,620,579.00 | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | 1,401,200,995,695.77 | 1,733,213,706,105.57 | 1,716,117,080,659.77 | 1,534,452,968,568.24 | 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 6,568,525,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 480,849,340,900.00 | 512,194,833,476.00 | 446,849,340,800.00 | 805,333,232,979.00 | 5.2. | Belanja Modal | 2,358,430,033,935.00 | 2,069,682,659,344.00 | 1,401,332,659,344.00 | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 20,000,000,000.00 | - | 20,000,000,000.00 | 267,763,114,457.00 | | | 2,358,430,033,935.00 | 2,069,682,659,344.00 | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | 3,083,655,186,548.00 | 2,619,923,756,959.71 | 3,288,252,093,923.00 | 2,783,747,803,129.79 | 5.3. | Belanja Tidak Terduga | 150,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 15,926,175,569.00 | 4,571,088,552.00 | 16,722,484,347.00 | 5,905,800,901.00 | | | 150,000,000,000.00 | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,671,008,737,886.00 | 1,645,861,899,471.64 | 1,739,642,785,506.00 | 1,594,326,717,801.69 | 5.4. | Belanja Transfer | 2,232,551,924,538.00 | 2,521,842,500,430.94 | 2,777,234,532,888.00 | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 1,396,720,273,093.00 | 969,490,768,936.07 | 1,531,886,824,070.00 | 1,183,515,284,427.10 | 5.4.1. | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 1,425,347,250,538.00 | 1,601,842,500,430.94 | 1,820,548,002,488.00 | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. Kode | Kapasitas Riil/Belanja | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | No. Kode | Kapasitas Riil/Belanja | Target (Rp) | | |
|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Target 1 | Realisasi 2 | Target 3 | Realisasi 4 | | | Tahun 2021 9 | Tahun 2022 10 | Tahun 2023 11 |
| | | | | | | 5.4.2. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 807,204,674,000.00 | 920,000,000,000.00 | 956,686,530,400.00 |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, 2020

8.2. Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020 terdapat 341 program dan Tahun 2021-2023 terdapat 164 program perangkat daerah. Adapun program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel VIII.2 dan Tabel VIII.3.

Tabel VIII. 2
KERANGKA PENDANAAN DAN PAGU INDIKATIF PROGRAM RPJMD TAHUN 2019-2020

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | OPD | | |
|------|----|----|--|---|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | Grand Total | | | 3,083,655,186,548.23 | 2,892,808,617,627.70 | | 2,673,183,906,815.43 | | 3,288,252,093,924.00 | 4,272,720,743,388.22 | | 2,719,413,740,836.59 | | |
| 1.01 | | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | 1,995,067,453,496.7 | 1,764,030,996,243.0 | | 1,625,397,471,529.6 | | 2,089,023,518,759.2 | 3,063,400,495,213.42 | | 1,815,094,003,601.8 | | |
| 1.01 | 01 | | Pendidikan | | | 581,666,397,174.0 | 660,548,589,492.0 | | 699,075,293,525.60 | | 581,782,080,923.39 | 854,021,531,599.60 | | 779,629,733,261.0 | | |
| 1.01 | 01 | | Dinas Pendidikan | | | 581,666,397,174.0 | 660,548,589,492.0 | | 699,075,293,525.60 | | 581,782,080,923.39 | 854,021,531,599.60 | | 779,629,733,261.0 | | |
| 1.01 | 01 | 01 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS (Prioritas) | Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas) | 83.6 | 88.12 | 527,908,752,174.0 | 598,274,561,420.0 | 98.12 | 639,661,065,264.60 | 88.7 | 527,203,518,279.0 | 798,976,666,599.6 | 88.7 | 728,723,230,947.0 | Dinas Pendidikan |
| | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas) | 62.5 | 63 | | | 63.0 | 0.0 | 63.5 | | | 27 | 0.0 | |
| | | | | % Jumlah warga negara usia 16 â€“ 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) | 74.23% | 74.23 % | | | 74.23 | 0.0 | 75.25 % | | | 75.25 | 0.0 | |
| 1.01 | 01 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASIONAL (Prioritas) | Jumlah peserta didik yang menerima pembinaan gratis pendidikan life skill/kejuruan | 0 Orang | 100 Orang | 521,400,000.0 | 486,950,000.0 | 100.0 | 379,965,538.0 | 150 Orang | 522,581,804.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Pendidikan |
| | | | | % Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas) | n.a | 44 % | | | 44.0 | 0.0 | 45.6 % | | | 0 | 0.0 | |
| 1.01 | 01 | 03 | PROGRAM PENDIDIKAN SISWA KEBUTUHAN KHUSUS (Prioritas) | % Jumlah warga negara usia 4 â€“ 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM) | n.a | 80 % | 178,050,000.0 | 160,650,000.00 | 80.0 | 160,470,000.0 | 81 % | 178,453,568.0 | 690,000,000.0 | 81 | 489,150,000.0 | Dinas Pendidikan |
| 1.01 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN SEKOLAH SEHAT (Prioritas) | % Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme | 0% | 50 % | 2,609,102,245.0 | 2,276,857,245.0 | 50.0 | 2,110,876,216.0 | 51 % | 3,115,016,030.0 | 455,880,000.0 | 51 | 395,996,191.0 | Dinas Pendidikan |
| | | | | % SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas) | 0% | 90 % | - | | 90.0 | 0.0 | 91 % | 0.0 | | 91 | 0.0 | |
| | | | | % Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama | 0% | 50.05 % | - | | 50.05 | 0.0 | 52.5 % | 0.0 | | 52.5 | 0.0 | |
| 1.01 | 01 | 05 | PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB BAGI SISWA MISKIN (Prioritas) | Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas) | 0% | 50.05 % | 29,158,714,160.0 | 39,072,714,160.0 | 50.0 | 38,967,193,250.0 | 54.93 % | 110,000,000.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Pendidikan |
| 1.01 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH (Prioritas) | % Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas) | 0% | 45.46 % | 377,401,750.0 | 313,775,750.0 | 45.46 | 251,433,750.0 | 46.85 % | 878,257,168.0 | 5,600,000,000.0 | 46.85 | 4,793,600,000.0 | Dinas Pendidikan |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|---|---|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01 | 01 | 07 | PROGRAM PROMOSI MINAT KEILMUAN | Jumlah perolehan medali siswa pada lomba/kejuruan tingkat nasional/International | 13 Medali | 30 Medali | 1,497,847,300.0 | 1,284,314,600.0 | 30.0 | 1,171,011,380.0 | 32 Medali | 1,501,242,317.0 | | | 0 | 0.0 | Dinas Pendidikan |
| 1.01 | 01 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN | % Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK | 50% | 60 % | 1,265,850,000.0 | 1,347,250,000.0 | 60.0 | 1,332,177,000.0 | 70 % | 1,358,923,166.0 | 1,384,500,000.0 | 70 | 847,983,300.0 | Dinas Pendidikan | |
| 1.01 | 01 | 09 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | % Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 99.40% | 99.4 % | - | - | - | - | - | - | - | 99.45 | 38,438,461,709.0 | Dinas Pendidikan | |
| | | | | % Guru SMK yang bersertifikat | 42.50% | 42.5 % | - | - | - | - | - | - | - | 42.75 | 0.0 | | |
| | | | | % Jumlah Sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan Standar Tenaga Kependidikan | 1.14 | 1.14 % | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 0.0 | | |
| | | | | % Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 97.95% | 97.95 % | - | - | - | - | - | - | - | 98.18 | 0.0 | | |
| | | | | % Guru SMA yang bersertifikat | 53.81% | 53.81 % | - | - | - | - | - | - | - | 53.85 | 0.0 | | |
| 1.01 | 01 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 13,190,709,145.0 | 13,981,589,068.0 | 100.0 | 12,016,953,402.0 | 100 % | 13,471,173,824.0 | 4,472,390,000.0 | 100 | 4,325,547,877.0 | Dinas Pendidikan | |
| 1.01 | 01 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 4,164,548,400.0 | 2,745,877,250.0 | 100.0 | 2,636,890,625.0 | 100 % | 3,422,287,806.4 | 2,098,200,000.0 | 57 | 935,375,537.0 | Dinas Pendidikan | |
| 1.01 | 01 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 408,622,000.0 | 545,649,999.0 | 100.0 | 384,257,100.0 | 100 % | 409,548,182.0 | 708,395,000.0 | 100 | 680,387,700.0 | Dinas Pendidikan | |
| 1.01 | 01 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 385,400,000.0 | 58,400,000.0 | 25.0 | 3,000,000.0 | 100 % | 386,273,547.0 | 3,000,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Pendidikan | |
| 1.01 | 02 | | Kesehatan | | | | 467,299,274,425.45 | 328,547,027,763.58 | | 271,224,954,685.20 | | 453,556,640,568.09 | 450,347,479,755.22 | | 374,145,808,080.03 | | |
| 1.01 | 02 | | Dinas Kesehatan | | | | 187,338,871,512.0 | 45,584,407,770.0 | | 29,255,777,911.0 | | 171,961,680,073.0 | 70,960,073,224.0 | | 60,020,013,819.0 | | |
| 1.01 | 02 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB) (Prioritas) | % Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) | 100% | 100 % | 11,550,000,000.0 | 11,750,000,000.0 | 100.0 | 0.0 | 100 % | 11,162,130,021.0 | 250,000,000.0 | 100 | 0.0 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | % Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) | 85% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 100 | 0.0 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|--|----------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01 | 02 | 02 | PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL (Prioritas) | Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas) | 0 Unit | 2 Unit | 145,845,418,992.0 | 3,433,827,769.0 | 0.0 | 2,055,000,000.0 | 4 Unit | 123,778,800,054.0 | 4,218,331,350.0 | 0 | 756,804,273.0 | Dinas Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | % Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional | 25 % | 30 % | 2,062,718,800.0 | 2,560,402,800.0 | 35.60 | 2,152,422,883.0 | 35 % | 2,168,000,000.0 | 907,800,000.0 | 36 | 470,046,611.0 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | % RS yang Terakreditasi Nasional | 59 % | 70 % | - | | 85.45 | 0.0 | 75 % | 0.0 | | 88 | 0.0 | | |
| | | | | % Puskesmas Terakreditasi | 47.6 % | 60 % | - | | 99.54 | 0.0 | 70 % | 0.0 | | 98.27 | 0.0 | | |
| | | | | % Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang | 40 % | 50 % | - | | 60.90 | 0.0 | 60 % | 0.0 | | 62 | 0.0 | | |
| | | | | % RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU | 70 % | 75 % | - | | 75.60 | 0.0 | 80 % | 0.0 | | 75.6 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas) | 0 Klinik | 2 Klinik | - | | 1.0 | 0.0 | 2 Klinik | 0.0 | | 1 | 0.0 | | |
| | | | | % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas) | 9.9 % | 11 % | 250,000,000.0 | | 12.40 | 94,859,480.0 | 11.5 % | 5,492,101,020.0 | | 12.1 | 6,259,489,402.0 | | |
| 1.01 | 02 | 04 | PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) (Prioritas) | % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas) | 4.4 % | 5.5 % | - | 250,000,000.0 | 7.03 | 0.0 | 6 % | 0.0 | 7,845,310,900.0 | 8.97 | 0.0 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas) | 0 Unit | 6 Unit | 646,936,000.0 | | 690,186,000.0 | 6.0 | 652,940,203.0 | 6 Unit | 631,138,208.0 | 249,970,400.0 | 0 | 31,220,400.0 | |
| 1.01 | 02 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas) | % Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar | 65 % | 70 % | 4,572,479,496.5 | 5,004,353,496.45 | 80.0 | 4,667,711,094.0 | 75 % | 8,130,779,117.0 | 3,464,934,200.0 | 85 | 3,080,062,295.0 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | % Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina | 45 % | 50 % | - | | 50.0 | 0.0 | 55 % | 0.0 | | 55 | 0.0 | | |
| | | | | Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan | 60 % | 70 % | - | | 70.0 | 0.0 | 80 % | 0.0 | | 70 | 0.0 | | |
| | | | | % Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang baik | 54 % | 55 % | - | | 63.62 | 0.0 | 57 % | 0.0 | | 50 | 0.0 | | |
| | | | | % Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat | 91.4 % | 91.1 % | - | | 93.40 | 0.0 | 92 % | 0.0 | | 70 | 0.0 | | |
| | | | | Prevalensi Balita Kurus (Wasting) | 8.7 % | 8.25 % | 2,630,898,000.0 | | 5.70 | 1,788,105,594.0 | 8 % | 2,560,616,000.0 | | 6.5 | 16,952,438,175.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|--|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.01 | 02 | 08 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN, BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Prioritas) | Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight) Prevalensi Balita Stunting (Prioritas) Jumlah Kematian Ibu % Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS Jumlah Kematian Bayi % Lansia Usia ≥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia % Posvandu Aktif | 23 % | 22 % | - | 11.0 | 0.0 | 21 % | 0.0 | 20,696,391,727.0 | 11 | 0.0 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | 34.8 % | 33 % | - | 30.09 | 0.0 | 31 % | 0.0 | | 30.59 | 0.0 | | |
| | | | | | 115 Kasus | 114 Kasus | - | 144.0 | 0.0 | 113 Kasus | 0.0 | | 119 | 0.0 | | |
| | | | | | 41.66 % | 45 % | - | 65.0 | 0.0 | 48 % | 0.0 | | 75 | 0.0 | | |
| | | | | | 1059 Kasus | 1057 Kasus | - | 916.0 | 0.0 | 1055 Kasus | 0.0 | | 703 | 0.0 | | |
| | | | | | 30 % | 50 % | - | 60.15 | 0.0 | 60 % | 0.0 | | 29.78 | 0.0 | | |
| | | | | | 55.69 % | 61 % | - | 63.95 | 0.0 | 62 % | 0.0 | | 66.9 | 0.0 | | |
| | | | | | Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) | 96.45 % | 96.5 % | 3,292,706,000.0 | 96.15 | 2,309,113,160.0 | 96.5 % | 3,738,961,263.0 | 73.82 | 24,547,530,396.0 | | |
| 1.01 | 02 | 09 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam % Kab/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA % Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Ternadu | % Orang dengan HIV (ODHA) Mendapatkan Pengobatan | 47 % | 55 % | - | 53.19 | 0.0 | 60 % | 0.0 | 22,612,869,000.0 | 88.6 | 0.0 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Angka Penemuan/Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API) | 0.4/1000 Penduduk | 1 /1000 Penduduk (<) | - | 0.10 | 0.0 | 1 /1000 Penduduk (<) | 0.0 | | 0.17 | 0.0 | |
| | | | | | Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate) | 197/100.000 Penduduk | 202 /100000 Penduduk | - | 160.0 | 0.0 | 207 /100000 Penduduk | 0.0 | | 113 | 0.0 | |
| | | | | | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100 % | 100 % | - | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 100 | 0.0 | |
| | | | | | % Kab/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 75 % | 80 % | - | 80.0 | 0.0 | 85 % | 0.0 | | 96 | 0.0 | |
| | | | | | % Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Ternadu | 30 % | 40 % | - | 40.0 | 0.0 | 50 % | 0.0 | | 45 | 0.0 | |
| | | | | | % Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Keria | 87.6 % | 88 % | 810,998,000.0 | 98.69 | 599,107,700.0 | 90 % | 595,073,168.0 | 2,648,460,000.0 | 98.69 | 2,009,330,700.0 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | % Kualitas Air Minum Memenuhi Syarat | 87.13 % | 89 % | - | 80.0 | 0.0 | 90 % | 0.0 | | 89.96 | 0.0 | |
| 1.01 | 02 | 10 | PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA | Cakupan Akses Sanitasi Dasar | % Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Olahraga | 60.5 % | 70 % | - | 97.60 | 0.0 | 75 % | 0.0 | | 97.6 | 0.0 | |
| | | | | | 85.12 % | 93 % | - | 96.66 | 0.0 | 95 % | 0.0 | 98.99 | 0.0 | | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|-------------|-----------|----|--|--|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01 | 02 | 11 | PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | 100 % | 100 % | 456,050,000.0 | | 286,050,000.0 | 100.0 | 264,917,495.0 | 100 % | 432,780,485.0 | | 100 | 0.0 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage | 75.30 % | 100 % | - | | | 87.02 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 86.48 | 0.0 | |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 9,226,076,116.0 | 9,173,524,932.0 | 100.0 | 8,381,763,451.0 | 100 % | 8,511,349,547.0 | 4,935,873,469.5 | 100 | 4,273,546,009.0 | Dinas Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 5,331,789,807.6 | 6,188,089,872.55 | 100.0 | 5,916,584,001.0 | 100 % | 3,964,300,785.0 | 3,022,812,177.5 | 100 | 1,545,906,358.0 | Dinas Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100 % | 100 % | 368,734,300.0 | 368,734,300.0 | 100.0 | 344,699,600.0 | 100 % | 360,650,405.0 | 87,320,000.0 | 100 | 75,289,200.0 | Dinas Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 98 % | 100 % | 294,066,000.0 | 35,166,000.0 | 0.0 | 28,553,250.0 | 100 % | 435,000,000.0 | 20,000,000.0 | 100 | 18,350,000.0 | Dinas Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | | UPT Transfusi Darah | | | | 12,591,393,788.0 | 14,084,663,498.0 | | 13,192,219,028.0 | | 13,619,933,411.09 | 14,694,140,898.0 | | 12,650,490,363.0 | | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | Cakupan pasien yang memperoleh transfusi darah | 100% | 100 % | 8,608,284,220.0 | 10,045,719,698.0 | 198.0 | 9,402,523,452.0 | 100 % | 9,142,995,736.1 | 10,539,675,500.0 | 98 | 9,379,253,135.0 | UPT Transfusi Darah | |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 3,378,629,568.0 | 3,532,079,390.0 | 187.0 | 3,379,805,698.0 | 100 % | 3,791,087,562.0 | 3,332,932,398.0 | 100 | 2,800,746,371.0 | UPT Transfusi Darah | |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 578,245,000.0 | 506,864,410.0 | 150.0 | 409,889,878.0 | 100 % | 659,555,649.0 | 821,533,000.0 | 110 | 470,490,857.0 | UPT Transfusi Darah | |
| 1.01 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 26,235,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 % | 26,294,464.0 | | 0 | 0.0 | UPT Transfusi Darah | |
| 1.01 | 02 | | UPT Pelatihan Kesehatan | | | | 3,914,398,626.0 | 4,121,674,926.0 | | 3,880,180,374.04 | | 3,923,270,992.58 | 6,339,549,458.41 | | 5,726,180,978.0 | | |
| 1.01 | 02 | 17 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN | Cakupan Tenaga Kesehatan yang telah bersertifikasi | 100% | 100 % | 75,000,000.0 | 70,000,000.0 | 266.0 | 69,837,046.0 | 100 % | 1,160,000,000.0 | 1,095,226,508.4 | 45 | 1,093,277,222.0 | UPT Pelatihan Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 18 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN MUTU PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN | Cakupan Pelatihan yang terakreditasi | 100% | 100 % | 356,000,000.0 | 428,600,000.0 | 222.0 | 310,945,300.0 | 100 % | 300,000,000.0 | 1,971,839,050.0 | 46 | 1,942,643,828.0 | UPT Pelatihan Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 1,568,596,000.0 | 1,606,512,992.0 | 25.0 | 1,593,671,337.0 | 100 % | 1,206,131,473.0 | 1,819,183,400.0 | 100 | 1,802,730,256.0 | UPT Pelatihan Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 1,817,602,626.0 | 2,016,561,934.0 | 35.0 | 1,905,726,691.04 | 100 % | 1,116,639,519.6 | 1,254,475,500.0 | 58 | 688,924,672.0 | UPT Pelatihan Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 97,200,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 % | 140,500,000.0 | 198,825,000.0 | 55 | 198,605,000.0 | UPT Pelatihan Kesehatan | |
| 1.01 | 02 | | UPT RSK Gigi dan Mulut | | | | 12,087,475,045.45 | 13,087,475,045.45 | | 8,061,528,929.33 | | 12,114,872,487.52 | 15,035,208,856.0 | | 7,804,392,020.0 | | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar layanan | 100% | 100 % | 582,800,000.0 | 1,762,800,000.0 | 100.0 | 1,762,379,725.0 | 100 % | 1,064,872,487.5 | 2,713,667,200.0 | 100 | 2,513,901,557.0 | UPT RSK Gigi dan Mulut | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|---|--|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.01 | 02 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas) | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | 1 RS | 0 RS | - | - | - | - | 1 RS | 0.0 | - | - | - | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 12 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Gigi dan Mulut | 100% | 100 % | 1,454,675,045.5 | 1,274,675,045.5 | 100.0 | 1,176,174,880.33 | 100 % | 1,000,000,000.0 | 2,026,998,174.0 | 0 | 1,994,952,300.0 | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 13 | PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan sarana dan prasarana RSKD Gigi dan Mulut dalam kondisi baik | 100% | 100 % | - | - | - | - | 100 % | 0.0 | - | - | - | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD | % Peningkatan pendapatan RSKD Gigi dan Mulut | 7% | 7 % | 10,050,000,000.0 | 10,050,000,000.0 | 7.0 | 5,122,974,324.0 | 0 % | 10,050,000,000.0 | 10,294,543,482.0 | 50 | 3,295,538,163.0 | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 16 | PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan Obat-Obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 0.0 | - | - | - | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 0.0 | - | - | - | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 0.0 | - | - | - | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tepat waktu | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 0.0 | - | - | - | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 0.0 | - | - | - | UPT RSK Gigi dan Mulut |
| 1.01 | 02 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji | | | | | 97,263,370,454.0 | 94,607,459,005.0 | | 82,932,224,548.0 | | 97,483,827,377.16 | 97,930,153,420.67 | | 125,054,324,864.0 | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan | 80% | 80 % | 221,720,454.0 | 796,720,454.0 | 80.0 | 790,749,658.0 | 85 % | 480,000,000.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas) | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | 1 RS | 1 RS | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 1.0 | 199,528,564.0 | 1 RS | 150,000,000.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 12 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji | 80% | 80 % | 48,412,050,000.0 | 44,152,232,311.0 | 80.0 | 44,148,106,225.0 | 85 % | 37,387,527,378.2 | 20,632,722,692.0 | 85 | 20,347,376,180.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 13 | PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji dalam kondisi baik | 80% | 80 % | 600,000,000.0 | 577,206,240.0 | 80.0 | 577,170,000.0 | 85 % | 1,550,000,000.0 | 1,375,633,470.0 | 85 | 1,174,261,629.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD | % Peningkatan pendapatan RSUD Labuang Baji | 100% | 100 % | 46,389,000,000.0 | 46,389,000,000.0 | 100.0 | 34,728,884,213.0 | 100 % | 47,000,000,000.0 | 69,230,754,763.0 | 100 | 97,209,667,560.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 16 | PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan | 80% | 80 % | 1,150,000,000.0 | 1,850,000,000.0 | 80.0 | 1,849,601,393.0 | 85 % | 3,200,000,000.0 | 800,000,007.0 | 85 | 475,087,105.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|-------------|-----------|----|--|--|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 90% | 90 % | 140,000,000.0 | 291,700,000.0 | 90.0 | 290,969,775.0 | 95 % | 7,056,000,000.0 | 5,399,727,488.7 | 95 | 5,373,742,790.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 60% | 60 % | 150,600,000.0 | 350,600,000.0 | 60.0 | 347,214,720.0 | 70 % | 265,000,000.0 | 381,315,000.0 | 70 | 381,315,000.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 90% | 0 % | - | - | - | - | 90 % | 200,000,000.0 | 110,000,000.0 | 90 | 92,874,600.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 98% | 0 % | - | - | - | - | 98 % | 195,299,999.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji |
| 1.01 | 02 | | Rumah Sakit Khusus Daerah | | | | 40,550,000,000.0 | 45,085,021,236.60 | | 36,819,508,904.78 | | 40,641,910,534.0 | 122,603,821,212.30 | | 63,595,361,263.93 | |
| 1.01 | 02 | 12 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD | 100 % | 100 % | 2,748,084,747.0 | 7,283,105,983.6 | 100.0 | 6,860,469,976.33 | 100 % | 2,754,313,549.0 | 19,280,728,994.8 | 91.83 | 13,316,275,497.0 | Rumah Sakit Khusus Daerah |
| 1.01 | 02 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD | % Peningkatan pendapatan Rumah Sakit Khusus Daerah | 100 % | 100 % | 30,393,326,653.0 | 30,393,326,653.0 | 85.80 | 22,917,141,062.45 | 100 % | 30,462,216,095.0 | 99,421,683,217.6 | 84.15 | 46,394,085,766.93 | Rumah Sakit Khusus Daerah |
| 1.01 | 02 | 16 | PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGistik RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan obat-obatan, makan minum dan logistik RS/UPTD Kesehatan | 100 % | 100 % | 1,267,000,008.4 | 1,267,000,008.4 | 100.0 | 1,252,406,450.0 | 100 % | 1,269,871,788.0 | 215,009,000.0 | 100 | 214,800,000.0 | Rumah Sakit Khusus Daerah |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 6,141,588,591.6 | 6,141,588,591.6 | 100.0 | 5,789,491,416.0 | 100 % | 6,155,509,102.0 | 3,686,400,000.0 | 100 | 3,670,200,000.0 | Rumah Sakit Khusus Daerah |
| 1.01 | 02 | | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar | | | | 56,800,000,000.0 | 56,324,829,909.08 | | 52,000,222,538.66 | | 56,928,742,744.33 | 65,859,677,955.0 | | 52,970,201,675.0 | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan | 85% | 0 % | - | - | - | - | 87.5 % | 1,192,500,000.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar |
| 1.01 | 02 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas) | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | 1RS | 0 RS | - | - | - | - | 1 RS | 1,150,000,000.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar |
| 1.01 | 02 | 12 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar | 85% | 85 % | 18,000,000,000.0 | 17,524,829,909.1 | 80.0 | 13,862,298,612.86 | 85.5 % | 14,473,298,757.3 | 21,407,856,687.0 | 85.5 | 18,340,715,984.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar |
| 1.01 | 02 | 13 | PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar dalam kondisi baik | 90% | 0 % | - | - | - | - | 92.5 % | 350,000,000.0 | 170,902,018.8 | 92.5 | 5,000,000.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar |
| 1.01 | 02 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD | % Peningkatan pendapatan RSUD Haji Makassar | 1% | 1 % | 38,800,000,000.0 | 38,800,000,000.0 | 1.0 | 38,137,923,925.80 | 1.5 % | 38,887,943,987.0 | 43,780,919,248.0 | 1.05 | 34,605,350,691.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 80% | 0 % | - | - | - | - | 85 % | 125,000,000.0 | 20,000,001.25 | 85 | 19,135,000.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 80% | 0 % | - | - | - | - | 85 % | 650,000,000.0 | 480,000,000.0 | 85 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|--|--|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|--|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1.01 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 90% | 0 % | - | - | - | - | 90 % | 100,000,000.0 | - | 0 | - | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar | |
| 1.01 | 02 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | | | 22,500,000,000.0 | 19,039,619,247.0 | | 14,296,805,304.39 | | 22,550,998,446.26 | 16,370,780,442.34 | | 13,653,577,024.10 | | | | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 100,000,000.0 | - | 0 | - | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas) | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | 0 RS | 0 RS | - | - | - | - | 1 RS | 350,000,000.0 | 13,100,000.0 | 9 | 13,100,000.0 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | 12 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 100% | 100 % | 7,000,000,000.0 | 7,788,000,000.0 | 100.0 | 7,089,874,283.81 | 100 % | 5,450,000,000.0 | 4,102,878,850.0 | 95 | 2,307,587,139.0 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | 13 | PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah dalam kondisi baik | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 330,000,000.0 | 189,600,000.0 | 100 | 162,260,500.0 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD | % Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | 7.5% | 7.5 % | 15,500,000,000.0 | 10,039,619,247.0 | 7.48 | 6,018,931,020.58 | 7.5 % | 15,535,132,263.3 | 10,056,901,592.3 | 7.5 | 9,171,829,385.10 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 0 % | - | 1,212,000,000.0 | 100.0 | 1,188,000,000.0 | 100 % | 595,866,183.0 | 2,008,300,000.0 | 100 | 1,998,800,000.0 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 60,000,000.0 | - | 0 | - | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 130,000,000.0 | - | 0 | - | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah | |
| 1.01 | 02 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertwi | | | 21,357,540,000.0 | 21,250,801,123.45 | | 17,115,268,239.0 | | 21,405,948,949.15 | 20,722,565,026.0 | | 16,163,834,645.0 | | | | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan | 100% | 100 % | 300,000,000.0 | 300,000,000.0 | 100.0 | 276,553,000.0 | 100 % | 400,679,979.0 | 1,520,705,957.0 | 26.39 | 1,011,483,973.0 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertwi | |
| 1.01 | 02 | 12 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Pertwi | 100% | 100 % | 1,057,540,000.0 | 3,950,801,123.5 | 100.0 | 3,828,774,094.0 | 100 % | 1,959,937,018.2 | 7,661,289,041.0 | 40.48 | 5,383,172,205.0 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertwi | |
| 1.01 | 02 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD | % Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Pertwi | 74.78% | 5.22 % | 20,000,000,000.0 | 17,000,000,000.0 | 4.20 | 13,009,941,145.0 | 5 % | 19,045,331,952.0 | 11,540,570,028.0 | 0.39 | 9,769,178,467.0 | Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertwi | |
| 1.01 | 02 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat | | | 12,896,225,000.0 | 15,361,076,003.0 | | 13,671,218,908.0 | | 12,925,455,553.0 | 19,831,509,262.50 | | 16,507,431,428.0 | | | | |
| 1.01 | 02 | 03 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas) | Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 100,000,000.0 | 200,000,000.0 | 100 | 88,687,500.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|--|---|---|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.01 | 02 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas) | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | 0 RS | 1 RS | 200,000,000.0 | 400,000,000.0 | 1.0 | 388,284,720.0 | 1 RS | 200,453,320.0 | 100,000,000.0 | 1 | 99,113,099.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 12 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat | 100% | 100 % | 1,246,224,000.0 | 1,246,224,000.0 | 100.0 | 1,241,639,322.0 | 100 % | 949,048,688.0 | 1,691,546,561.0 | 100 | 1,538,923,700.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 13 | PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 100 | 197,680,000.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD | % Peningkatan pendapatan RSUD Sayang Rakyat | 2% | 2 % | 9,750,000,000.0 | 11,133,566,003.0 | 21.0 | 9,503,469,632.0 | 2 % | 9,772,099,327.0 | 15,516,826,607.5 | 2 | 12,669,492,321.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 16 | PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGistik RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN | Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan | 100% | 100 % | 900,000,000.0 | 1,781,285,000.0 | 100.0 | 1,780,392,856.0 | 100 % | 902,039,938.0 | 1,399,999,081.0 | 100 | 1,249,554,653.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 800,001,000.0 | 800,001,000.0 | 100.0 | 757,432,378.0 | 100 % | 531,814,280.0 | 723,137,013.0 | 100 | 663,980,155.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana apparatur | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 100,000,000.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tepat waktu | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 20,000,000.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 150,000,000.0 | - | 0 | 0.0 | Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat |
| 1.01 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | 811,516,482,674.28 | 713,727,736,476.38 | | 596,505,627,135.80 | | 907,595,580,625.78 | 1,715,496,153,185.10 | | 619,903,646,738.80 | |
| 1.01 | 03 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | 811,516,482,674.28 | 713,727,736,476.38 | | 596,505,627,135.80 | | 907,595,580,625.78 | 1,715,496,153,185.10 | | 619,903,646,738.80 | Dinas PU dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (Prioritas) | % Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM) | 73.36% | 100 % | 30,000,000.0 | 30,000,000.0 | 50.0 | 13,421,626.0 | 100 % | 800,000,000.0 | 1,100,000,000.0 | 13.22 | 73,136,020.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL (Prioritas) | % Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM) | 83.58% | 0 % | - | - | - | - | 100 % | 800,000,000.0 | 75,000,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA (Prioritas) | % Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM) | 67.77% | 69.47 % | 117,785,237,000.0 | 85,666,720,319.0 | 68.75 | 76,798,978,337.0 | 71.46 % | 265,608,022,473.0 | 248,110,840,155.3 | 1.24 | 85,940,976,203.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | | | Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas) | 58.858 Ha | 10786.8 Ha | - | - | 10,675.62 | - | 0.0 | 15014.3 Ha | - | 261 | 0.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|------------------|---------------------|--|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | | | | | | |
| 1.01 | 03 | 06 | PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas) | Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Prioritas) | 24 Kawasan | 1 Kawasan | 67,500,000.0 | 67,500,000.0 | 0.0 | 64,660,730.0 | 8 Kawasan | 350,000,000.0 | 72,000,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 07 | PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (Prioritas) | Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas) Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas) | 50 Meter | 15000 Meter | 11,727,968,032.0 | 9,057,007,474.0 | 14,273.54 | 8,157,042,747.0 | 17500 Meter | 21,211,246,095.0 | 22,326,857,458.77 | 49 | 9,955,492,003.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG | % Ketaatan terhadap RTRW | 68% | 70 % | 1,475,733,100.0 | 2,617,083,100.0 | 70.0 | 2,453,098,522.0 | 70 % | 1,660,060,834.5 | 10,085,865,000.0 | 2 | 1,400,678,219.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 13 | PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN GEDUNG | % Bangunan /Gedung /Lingkungan Negara yang Terkelola | 12% | 95 % | 67,093,681,708.0 | 63,339,534,035.0 | 90.06 | 57,507,801,444.0 | 95 % | 18,950,000,000.0 | 80,069,343,876.5 | 0 | 0.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 10,755,232,550.0 | 10,027,430,136.0 | 100.0 | 9,677,922,224.0 | 100 % | 10,916,561,039.3 | 20,427,229,884.0 | 44.04 | 18,709,754,894.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 599,560,000.0 | 606,100,000.0 | 100.0 | 571,732,808.0 | 100 % | 649,560,000.0 | 4,116,153,000.0 | 18.56 | 2,334,671,493.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 560,500,000.0 | 740,709,900.0 | 100.0 | 716,607,906.0 | 100 % | 865,180,000.0 | 764,473,275.7 | 22.54 | 421,226,326.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 55,000,000.0 | 75,000,000.0 | 100.0 | 76,460,300.0 | 100 % | 555,825,000.0 | 80,000,000.0 | 0 | 77,603,827.0 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1.01 | 03 | 04 | PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas) | % Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar (Prioritas) | 60% | 75 % | 5,650,700,000.0 | 3,037,800,000.0 | 71.25 | 825,426,731.0 | 85 % | 4,014,588,000.0 | 340,000,000.0 | 5.15 | 322,943,400.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 1.01 | 03 | 05 | PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas) | % Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM) | 58.94% | 60.2 % | 357,254,311,554.3 | 352,109,676,840.4 | 59.46 | 318,596,787,411.80 | 62.61 % | 283,652,045,943.3 | 371,607,213,676.14 | 10.27 | 216,392,636,639.80 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 1.01 | 03 | 06 | PROGRAM PENGENDALIAN JALAN AKSES WILAYAH TERISOLIR (Prioritas) | Jumlah pembangunan akses wilayah terisolir yang dikendalikan (Prioritas) | 0 Wilayah | 3 Wilayah | - | - | - | - | 3 Wilayah | 700,000,000.0 | - | 0 | 0.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 1.01 | 03 | 09 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | % Panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi | 85.07 | 87.02 % | 175,220,982,530.0 | 130,992,591,293.8 | 60.43 | 88,186,670,996.0 | 93.28 % | 233,062,686,432.7 | 902,305,600,191.53 | 27.36 | 267,790,672,734.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 1.01 | 03 | 12 | PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI | % Kesesuaian perencanaan dengan penyelenggaran jalan dan jembatan | 100% | 100 % | 41,680,800,000.0 | 33,221,684,778.2 | 100.0 | 16,382,719,912.0 | 100 % | 42,375,273,602.0 | 54,015,576,667.08 | 63.11 | 16,483,854,980.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 1.01 | 03 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 13,539,581,400.0 | 13,357,692,800.0 | 221.33 | 10,952,341,099.0 | 100 % | 13,641,461,012.0 | - | 0 | 0.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | | |
|------|----|----|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.01 | 03 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 5,062,324,800.0 | 6,766,105,800.0 | 72.22 | 4,639,792,414.0 | 100 % | 4,975,547,026.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | |
| 1.01 | 03 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,775,000,000.0 | 1,730,500,000.0 | 130.0 | 733,533,828.0 | 100 % | 1,622,473,211.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | |
| 1.01 | 03 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 1,182,370,000.0 | 284,600,000.0 | 83.33 | 150,628,100.0 | 100 % | 1,185,049,957.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | |
| 1.01 | 04 | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | 99,034,470,000.0 | 22,447,196,588.0 | | 20,332,490,852.0 | | 99,258,941,293.19 | 8,121,979,635.0 | | 7,507,672,668.0 | | | |
| 1.01 | 04 | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan | | | | 99,034,470,000.0 | 22,447,196,588.0 | | 20,332,490,852.0 | | 99,258,941,293.19 | 8,121,979,635.0 | | 7,507,672,668.0 | | | |
| 1.01 | 04 | 01 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (Prioritas) | % Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM) | 100% | 100 % | 199,150,000.0 | 199,150,000.0 | 100.0 | 167,064,200.0 | 100 % | 1,100,000,000.0 | 38,737,342.0 | 100 | 38,737,342.0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan | | |
| | | | | % Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM) | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 100 | | 0.0 | | |
| 1.01 | 04 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas) | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM) | 1.25% | 0 % | - | | | | 1.75 % | 3,100,000,000.0 | 49,840,000.0 | 1.75 | 49,837,906.0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan | | |
| | | | | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM) | 0 % | 0 % | - | | | | 5 % | 0.0 | | 5 | | 0.0 | | |
| 1.01 | 04 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas) | Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas) | 0 Lokasi | 2 Lokasi | 82,107,240,000.0 | 6,547,325,800.0 | 0.0 | 5,868,865,400.0 | 2 Lokasi | 66,076,249,998.2 | 70,000,000.0 | 0 | 69,870,000.0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata | 0 Lokasi | 2 lokasi | - | | 0.0 | 0.0 | 0 lokasi | 0.0 | | 2 | | 0.0 | | |
| 1.01 | 04 | 04 | PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas) | % Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas) | 35.49% | 0 % | - | | | | 49 % | 3,800,000,000.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan | |
| | | | | Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota | 24 | 0 | Kab/Kota | | | | 24 | Kab/Kota | 0.0 | | 0 | | 0.0 | |
| | | | | Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi | 880 Ha | 0 Ha | - | | | | 860 Ha | 0.0 | | 0 | | 0.0 | | |
| 1.01 | 04 | 05 | PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas) | Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas) | 0 RT | 0 RT | 2,126,000,000.0 | 2,126,000,000.0 | 0.0 | 1,903,768,000.0 | 1750 RT | 11,523,750,000.0 | 2,668,029,200.0 | 3750 | 2,160,714,600.0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan | | |
| | | | | Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota | 24 | 24 | Kab/Kota | - | | 24.0 | 0.0 | 24 | Kab/Kota | 0.0 | 21 | | 0.0 | |
| 1.01 | 04 | 06 | PROGRAM PENYEHATAN | Cakupan Pembinaan Penanganan Sanitasi Kabupaten/Kota | 24 | 24 | Kab/Kota | 4,632,000,000.0 | 5,203,917,200.0 | 24.0 | 5,128,150,963.0 | 24 | Kab/Kota | 2,575,000,000.0 | 1,791,225,000.0 | 18 | 1,777,090,200.0 | Dinas Perumahan, Kawasan |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-----|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1.01 | 04 | 05 | LINGKUNGAN PERMUKIMAN | % Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Lavak | 50% | 10 % | - | | 10.0 | 0.0 | 10 % | 0.0 | | 0 | | 0.0 | Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan |
| 1.01 | 04 | 08 | PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Jumlah Usaha Jasa/Pelaksana Perencana Rumah dan PSU Kemampuan Menengah Tersertifikasi | 0 Peserta yang bersertifikat | 50 Unit | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 37.0 | 174,824,000.0 | 50 Unit | 400,000,000.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan |
| 1.01 | 04 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 7,626,790,000.0 | 7,146,703,588.0 | 100.0 | 6,206,278,143.0 | 100 % | 8,393,580,000.0 | 3,114,907,330.30 | 100 | 3,026,934,843.0 | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan |
| 1.01 | 04 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 697,000,000.0 | 704,100,000.0 | 100.0 | 665,389,646.0 | 100 % | 1,042,200,000.0 | 236,140,762.70 | 100 | 231,387,777.0 | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan |
| 1.01 | 04 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 710,500,000.0 | 320,000,000.0 | 100.0 | 218,150,500.0 | 100 % | 500,000,000.0 | 153,100,000.0 | 100 | 153,100,000.0 | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan |
| 1.01 | 04 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 735,790,000.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 100 % | 748,161,295.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan |
| 1.01 | 05 | | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan | | | | 19,763,756,168.0 | 23,149,756,168.0 | | 22,846,435,340.0 | | 21,007,419,351.72 | 26,907,287,601.0 | | 26,051,219,236.0 | | |
| 1.01 | 05 | | Satuan Polisi Pamong Praja | | | | 12,237,523,636.0 | 15,623,523,636.0 | | 15,345,461,551.0 | | 13,464,127,879.04 | 19,189,619,100.0 | | 18,527,750,332.0 | | |
| 1.01 | 05 | 01 | PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (Prioritas) | % Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM) | 100% | 100 % | 232,931,000.0 | 432,931,000.0 | 100.0 | 377,266,670.0 | 100 % | 550,000,000.0 | 328,232,350.0 | 100 | 268,898,951.0 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.01 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA | Cakupan petugas satpol yang terlaihat | 100% | 100 % | 94,797,500.0 | 200,047,500.0 | 100.0 | 190,755,000.0 | 100 % | 900,000,000.0 | 80,300,000.0 | 100 | 77,569,600.0 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.01 | 05 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Tingkat penyelesaian pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan | 100% | 100 % | 160,140,000.0 | 339,540,000.0 | 100.0 | 263,600,000.0 | 100 % | 610,000,000.0 | 87,600,000.0 | 100 | 87,514,200.0 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.01 | 05 | 05 | PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | Cakupan petugas perlindungan masyarakat | 100% | 100 % | 36,125,500.0 | 36,125,500.0 | 100.0 | 27,525,500.0 | 100 % | 538,000,000.0 | | 100 | | 0.0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.01 | 05 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 100% | 100 % | 10,675,000.0 | 10,675,000.0 | 100.0 | 2,575,000.0 | 100 % | 310,000,000.0 | | 100 | | 0.0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.01 | 05 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 10,993,734,636.0 | 12,900,954,636.0 | 100.0 | 12,818,903,787.0 | 100 % | 9,180,000,000.0 | 14,907,815,750.0 | 100 | 14,752,363,909.0 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|----------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01 | 05 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 705,360,000.0 | 1,629,650,000.0 | 100.0 | 1,619,835,594.0 | 100 % | 545,000,000.0 | 3,445,671,000.0 | 100 | 3,002,618,172.0 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 1.01 | 05 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 3,760,000.0 | 45,000,000.0 | 100.0 | 45,000,000.0 | 100 % | 221,127,879.0 | 10,000,000.0 | 100 | 9,473,000.0 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 1.01 | 05 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | 28,600,000.0 | | | 100 % | 610,000,000.0 | 330,000,000.0 | 100 | 329,312,500.0 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 1.01 | 05 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | 7,526,232,532.0 | 7,526,232,532.0 | | 7,500,973,789.0 | | 7,543,291,472.68 | 7,717,668,501.0 | | 7,523,468,904.0 | | |
| 1.01 | 05 | 07 | PROGRAM PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah aparat/personil siaga bencana | 300 Orang | 75 Orang | 684,200,000.0 | 689,200,000.0 | 75.0 | 688,021,000.0 | 75 Orang | 881,741,740.0 | 1,127,200,000.0 | 75 | 1,123,185,499.0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | Jumlah kawasan evakuasi bencana | 6 Lokasi | 24 Lokasi | - | | 24.0 | 0.0 | 24 Lokasi | 0.0 | | 24 | | 0.0 | |
| 1.01 | 05 | 08 | PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah posko penanganan darurat bencana | 24 Unit | 24 Unit | 1,927,200,000.0 | 2,211,800,000.0 | 24.0 | 2,210,770,910.0 | 24 Unit | 2,386,148,502.0 | 2,013,600,000.0 | 24 | 2,012,817,200.0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | Cakupan ketersediaan bahan logistik pada Gudang stock | 10 Jenis | 5 Jenis | | | 5.0 | 0.0 | 5 Jenis | 0.0 | | 5 | | 0.0 | |
| | | | | % Jumlah korban bencana yang dievakuasi | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 100 | | 0.0 | |
| 1.01 | 05 | 09 | PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah perbaikan sarana dan prasarana umum serta sosial ekonomi pasca bencana | 0 Unit | 10 Unit | 685,600,000.0 | 653,600,000.0 | 10.0 | 648,256,047.0 | 10 Unit | 799,407,837.7 | 1,291,848,000.0 | 10 | 1,272,814,539.0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | Jumlah SDM yang terlalih dalam penanggulangan bencana | 300 Orang | 75 Orang | - | | 75.0 | 0.0 | 75 Orang | 0.0 | | 75 | | 0.0 | |
| 1.01 | 05 | 10 | PROGRAM KUALITAS DAN AKSES INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA | Cakupan ketersediaan sistem peringatan dini resiko bencana | 1 Jenis | 1 Jenis | 645,100,000.0 | 911,100,000.0 | 1.0 | 905,501,626.0 | 0 Jenis | 0.0 | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | % Ketersediaan data bencana kab/kota | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | | | | |
| 1.01 | 05 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,009,412,532.0 | 1,691,331,668.0 | 100.0 | 1,705,089,905.0 | 100 % | 2,013,967,062.0 | 2,176,680,000.0 | 100 | 2,010,911,041.0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1.01 | 05 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 334,720,000.0 | 284,700,864.0 | 100.0 | 266,852,275.0 | 100 % | 199,170,418.0 | 277,540,501.0 | 100 | 277,477,063.0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1.01 | 05 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 684,000,000.0 | 458,000,000.0 | 100.0 | 453,177,656.0 | 100 % | 705,595,685.0 | 477,600,000.0 | 100 | 473,063,562.0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1.01 | 05 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 556,000,000.0 | 626,500,000.0 | 100.0 | 623,304,370.0 | 100 % | 557,260,228.0 | 353,200,000.0 | 100 | 353,200,000.0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1.01 | 06 | | Sosial | | | | 15,787,073,055.0 | 15,610,689,755.0 | | 15,412,669,991.0 | | 25,822,855,997.0 | 8,506,063,437.50 | | 7,855,923,618.0 | | |

| KODE | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|--|---|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01 | 06 | Dinas Sosial | | | | 15,787,073,055.0 | 15,610,689,755.0 | | 15,412,669,991.0 | | 25,822,855,997.0 | | 8,506,063,437.50 | | 7,855,923,618.0 | |
| 1.01 | 06 | 01 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (Prioritas) | % Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas) | 100% | 100 % | 1,037,800,000.0 | 1,261,300,000.0 | 100.0 | 1,236,436,540.0 | 100 % | 1,040,152,275.0 | 762,995,000.0 | 50 | 734,001,000.0 | Dinas Sosial |
| | | | | % Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| | | | | % Geladangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas) | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| 1.01 | 06 | 02 | PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Prioritas) | Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina | 425 Jiwa | 425 Jiwa | 4,524,400,055.0 | 4,158,043,055.0 | 425.0 | 4,062,090,457.0 | 425 Jiwa | 4,534,655,049.0 | 1,543,857,177.5 | 200 | 1,523,251,973.0 | Dinas Sosial |
| | | | | % Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 50 | 0.0 | |
| 1.01 | 06 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) | Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi | 800 Jiwa | 800 Jiwa | 1,611,100,000.0 | 1,435,100,000.0 | 0.0 | 1,423,870,193.0 | 800 Jiwa | 11,614,751,715.0 | 208,010,000.0 | 0 | 207,140,000.0 | Dinas Sosial |
| | | | | % PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 0% | 0.5 % | - | | 0.0 | 0.0 | 0.6 % | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| | | | | % PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 0% | 0 % | - | | 0.0 | 0.0 | 1 % | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| 1.01 | 06 | 04 | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina | 246 LKS | 246 LKS | 745,100,000.0 | 709,810,700.0 | 246.0 | 701,717,000.0 | 246 LKS | 746,788,842.0 | 477,925,000.0 | 0 | 400,568,011.0 | Dinas Sosial |
| 1.01 | 06 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) | Cakupan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapatkan pembinaan | 100 Jiwa | 100 Jiwa | 925,450,000.0 | 655,369,000.0 | 100.0 | 648,670,050.0 | 100 Jiwa | 927,547,623.0 | 249,606,000.0 | 50 | 222,612,362.0 | Dinas Sosial |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PANTI | Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo | 75 Jiwa | 75 Jiwa | 1,131,875,000.0 | 1,076,437,000.0 | 75.0 | 1,066,933,947.0 | 75 Jiwa | 1,134,440,505.0 | 698,938,060.0 | 0 | 691,262,933.0 | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01 | 06 | 06 | ASUHAN/PANTI JOMPO (Prioritas) | % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) | 4.50% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Sosial |
| 1.01 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 4,537,450,000.0 | 4,523,732,000.0 | 100.0 | 4,517,408,484.0 | 100 % | 4,547,734,573.0 | 3,799,070,700.0 | 50 | 3,405,573,919.0 | | Dinas Sosial |
| 1.01 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 934,700,000.0 | 1,366,950,000.0 | 100.0 | 1,345,108,100.0 | 100 % | 936,818,589.0 | 442,595,000.0 | 50 | 354,565,420.0 | | Dinas Sosial |
| 1.01 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 321,198,000.0 | 405,948,000.0 | 100.0 | 395,435,220.0 | 100 % | 321,926,027.0 | 323,066,500.0 | 50 | 316,948,000.0 | | Dinas Sosial |
| 1.01 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 18,000,000.0 | 18,000,000.0 | 75.0 | 15,000,000.0 | 100 % | 18,040,799.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Sosial |
| 1.02 | | | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | 170,377,078,440.0 | 185,222,465,134.0 | | 177,469,130,654.83 | | 211,064,616,456.58 | 189,276,900,940.47 | | 140,721,138,379.0 | | |
| 1.02 | 01 | | Tenaga Kerja | | | | 9,465,369,027.0 | 9,773,314,322.0 | | 9,408,268,253.0 | | 15,835,813,024.26 | 5,965,317,664.0 | | 5,068,210,808.0 | | |
| 1.02 | 01 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | 9,465,369,027.0 | 9,773,314,322.0 | | 9,408,268,253.0 | | 15,835,813,024.26 | 5,965,317,664.0 | | 5,068,210,808.0 | | |
| 1.02 | 01 | 01 | PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA (Prioritas) | % Pencari kerja yang ditempatkan | 0.72% | 3.48 % | 1,117,700,000.0 | 1,225,900,000.0 | 4.36 | 1,206,134,650.0 | 3.7 % | 1,720,500,000.0 | 1,503,294,000.0 | 2.77 | 1,043,541,969.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas) | 57.81% | 58.17 % | - | | 59.78 | 0.0 | 58.47 % | 0.0 | | 43.85 | | 0.0 | |
| 1.02 | 01 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 62.50% | 71.4 % | 1,623,150,000.0 | 1,630,250,000.0 | 98.75 | 1,583,960,562.0 | 71.4 % | 2,199,650,000.0 | 393,382,700.0 | 35.7 | 385,124,992.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 66.67% | 70 % | - | | 70.0 | 0.0 | 75 % | 0.0 | | 37.5 | | 0.0 | |
| 1.02 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | % Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja | 54.00% | 62.13 % | 961,000,000.0 | 1,001,000,000.0 | 100.0 | 999,823,700.0 | 70.13 % | 1,651,000,000.0 | 290,296,000.0 | 50 | 267,057,500.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | Besaran pemeriksaan perusahaan | 13.00% | 13.21 % | - | | 52.89 | 0.0 | 26.43 % | 0.0 | | 21 | | 0.0 | |
| | | | | Besaran pengujian peralatan di perusahaan | 3,00% | 6.4 % | - | | 5.38 | 0.0 | 9.6 % | 0.0 | | 7 | | 0.0 | |
| 1.02 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | 100% | 96 % | 992,850,000.0 | 1,040,850,000.0 | 33.33 | 1,012,358,200.0 | 96 % | 1,192,850,000.0 | 557,101,000.0 | 48 | 556,141,000.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 2,23% | 2.2 % | - | | 1.72 | 0.0 | 2.1 % | 0.0 | | 1.05 | | 0.0 | |
| | | | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | 35,00% | 40.48 % | - | | 63.55 | 0.0 | 45.24 % | 0.0 | | 23 | | 0.0 | |
| | | | | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 50 | | 0.0 | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|--|--|---|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.02 | 01 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 3,649,569,027.0 | 3,711,964,322.0 | 100.0 | 3,452,652,350.0 | 100 % | 3,813,713,024.3 | 2,350,693,160.0 | 100 | 2,073,237,193.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1.02 | 01 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 486,650,000.0 | 422,900,000.0 | 100.0 | 415,639,000.0 | 100 % | 4,406,650,000.0 | 441,484,304.0 | 100 | 317,660,554.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1.02 | 01 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 536,450,000.0 | 630,450,000.0 | 100.0 | 627,699,791.0 | 100 % | 601,450,000.0 | 362,491,500.0 | 100 | 358,912,600.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1.02 | 01 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 98,000,000.0 | 110,000,000.0 | 100.0 | 110,000,000.0 | 100 % | 250,000,000.0 | 66,575,000.0 | 100 | 66,535,000.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1.02 | 02 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | 8,322,737,523.0 | 7,569,259,481.0 | | 7,445,281,983.0 | | 9,341,601,819.99 | 6,484,595,900.0 | | 3,500,295,307.0 | |
| 1.02 | 02 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | 8,322,737,523.0 | 7,569,259,481.0 | | 7,445,281,983.0 | | 9,341,601,819.99 | 6,484,595,900.0 | | 3,500,295,307.0 | |
| 1.02 | 02 | 01 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Prioritas) | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas) | 31.2% | 31.1 % | 230,251,000.0 | 210,976,000.0 | 31.10 | 209,982,726.0 | 31 % | 928,360,000.0 | 671,790,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.02 | 02 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA | % Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang terstandarisasi | 10% | 15 % | 837,769,000.0 | 677,149,100.0 | 15.0 | 676,739,600.0 | 25 % | 652,684,000.0 | 888,441,800.0 | 0 | 641,652,650.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.02 | 02 | 03 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | % Kabupaten/Kota Layak Anak | 21% | 50 % | 524,824,580.0 | 463,315,731.0 | 50.0 | 461,880,260.0 | 54 % | 847,184,580.0 | 628,925,040.0 | 0 | 0.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | Rasio kekerasan terhadap anak (per 10,000) | 2.98 | 2.96 | - | | 2.96 | 0.0 | 2.94 | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| 1.02 | 02 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN | % Lembaga layanan Perlindungan Perempuan sesuai standar | 12.5% | 25 % | 417,215,000.0 | 322,815,000.0 | 25.0 | 297,024,573.0 | 37.5 % | 543,360,659.0 | 368,550,200.0 | 0 | 115,755,066.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.02 | 02 | 05 | PROGRAM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | % Korban KtP/A yang memperoleh layanan komprehensif pada UPT PPA | 50% | 65 % | 659,965,000.0 | 604,465,000.0 | 65.0 | 587,936,180.0 | 70 % | 228,060,875.0 | 170,450,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.02 | 02 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | % Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di daerah | 70% | 80 % | 521,057,500.0 | 382,139,500.0 | 80.0 | 374,424,680.0 | 82 % | 859,238,528.0 | 212,240,440.0 | 0 | 201,307,950.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.02 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 4,490,273,000.0 | 4,523,503,650.0 | 100.0 | 4,466,381,271.0 | 100 % | 4,348,001,266.0 | 2,578,550,520.0 | 0 | 2,086,339,715.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.02 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 512,032,443.0 | 359,895,500.0 | 100.0 | 349,532,943.0 | 100 % | 622,068,727.0 | 713,665,900.0 | 0 | 282,391,726.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|---|--|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 66,650,000.0 | 18,000,000.0 | 100.0 | 15,600,000.0 | 100 % | 114,801,069.0 | 251,982,000.0 | 0 | 172,848,200.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 1.02 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 62,700,000.0 | 7,000,000.0 | 100.0 | 5,779,750.0 | 100 % | 197,842,116.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 1.02 | 03 | | Pangan | | | 7,989,642,481.0 | 13,290,867,481.0 | | 12,949,388,296.0 | | 14,835,463,767.0 | 13,666,957,000.0 | | 5,194,009,385.0 | | | |
| 1.02 | 03 | | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | 7,989,642,481.0 | 13,290,867,481.0 | | 12,949,388,296.0 | | 14,835,463,767.0 | 13,666,957,000.0 | | 5,194,009,385.0 | | | |
| 1.02 | 03 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % Pengawasan keamanan pangan | 92,6% 100% | 92.9 % 100 % | 1,185,700,000.0 | 3,536,700,000.0 | 86.70 | 3,459,973,117.0 | 93.05 % | 3,395,000,000.0 | 7,277,670,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 1.02 | 03 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KERAWANAN PANGAN | % Ketersediaan pangan utama Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Provinsi setara beras (ton) | 100% 140 Ton | 399.66 % 140 Juta Ton | 108,000,000.0 | 196,000,000.0 | 100.0 | 195,091,344.0 | 100 % | 1,783,244,800.0 | 622,500,000.0 | 0 | 621,599,500.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 1.02 | 03 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN | Cakupan ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan | 100% | 100 % | 220,800,000.0 | 234,800,000.0 | 100.0 | 233,047,900.0 | 100 % | 875,000,000.0 | 437,500,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 1.02 | 03 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 90% | 100 % | 5,439,893,000.0 | 6,327,693,000.0 | 100.0 | 6,246,679,599.0 | 100 % | 6,231,662,334.0 | 2,136,460,500.0 | 50 | 2,033,540,372.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 1.02 | 03 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 75% | 100 % | 436,000,000.0 | 1,686,000,000.0 | 100.0 | 1,667,828,847.0 | 100 % | 1,075,000,000.0 | 2,857,500,000.0 | 100 | 2,220,391,513.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 1.02 | 03 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 90% | 100 % | 340,249,481.0 | 670,674,481.0 | 100.0 | 661,748,494.0 | 100 % | 900,000,000.0 | 284,807,500.0 | 50 | 282,793,000.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 1.02 | 03 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 90% | 100 % | 259,000,000.0 | 639,000,000.0 | 100.0 | 485,018,995.0 | 100 % | 575,556,633.0 | 50,519,000.0 | 50 | 35,685,000.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 1.02 | 04 | | Pertanian | | | 2,500,000,000.0 | 2,500,000,000.0 | | 2,451,338,100.0 | | 2,505,666,494.0 | 70,000,000.0 | | 69,995,280.0 | | | |
| 1.02 | 04 | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan | | | 2,500,000,000.0 | 2,500,000,000.0 | | 2,451,338,100.0 | | 2,505,666,494.0 | 70,000,000.0 | | 69,995,280.0 | | | |
| | | | PROGRAM PENATAAN | Penyelesaian Kasus tanah Provinsi | 100% | 100 % | 2,500,000,000.0 | 2,500,000,000.0 | 100.0 | 2,451,338,100.0 | 100 % | 2,505,666,494.0 | 70,000,000.0 | 100 | 69,995,280.0 | Dinas Perumahan | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------|-----------------|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | |
| 1 | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 04 | 01 | KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH, PROVINSI | Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum | 4 Lokasi | 3 Lokasi | - | | 1.0 | 0.0 | 3 Lokasi | 0.0 | | 5 | 0.0 | Pemerintahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanian |
| 1.02 | 05 | | Lingkungan Hidup | | | | 10,566,019,964.0 | 8,997,467,898.37 | | 8,085,637,734.80 | | 10,589,968,879.0 | 5,732,428,610.0 | | 5,287,433,367.0 | |
| 1.02 | 05 | | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | 10,566,019,964.0 | 8,997,467,898.37 | | 8,085,637,734.80 | | 10,589,968,879.0 | 5,732,428,610.0 | | 5,287,433,367.0 | |
| 1.02 | 05 | 01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas) | % Penurunan Jumlah Beban Pencemaran | 35% | 38 % | 848,400,000.0 | 696,700,000.0 | 21.70 | 685,337,754.0 | 41 % | 913,628,103.8 | 221,400,000.0 | 90.6 | 220,828,800.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 1.02 | 05 | 01 | | Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan | 0% | 20 % | - | | 20.0 | 0.0 | 20 % | 0.0 | | 1 | 0.0 | |
| 1.02 | 05 | 01 | | Indeks kualitas udara (Prioritas) | 88.66 | 88.68 | - | | 88.69 | 0.0 | 88.71 | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| 1.02 | 05 | 01 | | Indeks kualitas air (Prioritas) | 77.62 | 77.63 | - | | 81.47 | 0.0 | 77.67 | 0.0 | | 54 | 0.0 | |
| 1.02 | 05 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3 | % Penanganan Sampah Kabupaten/Kota | 44.20% | 46 % | 4,771,512,000.0 | 3,069,896,026.0 | 46.0 | 2,722,983,288.80 | 48 % | 5,173,010,617.0 | 2,568,878,795.0 | 48 | 2,200,841,964.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 1.02 | 05 | 02 | | Cakupan Limbah B3 yang Dikelola | 30% | 75 % | - | | 75.0 | 0.0 | 80 % | 0.0 | | 80 | 0.0 | |
| 1.02 | 05 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup | 83% | 100 % | 458,415,900.0 | 509,756,900.0 | 120.0 | 473,030,732.0 | 100 % | 459,454,944.0 | 364,988,615.0 | 100 | 361,527,115.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 1.02 | 05 | 04 | PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | % Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | 100% | 100 % | 501,800,000.0 | 696,800,000.0 | 100.0 | 688,357,885.0 | 100 % | 652,964,702.2 | 195,000,000.0 | 100 | 194,900,120.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 1.02 | 05 | 04 | | Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup | 0 kab/kota | 24 kab/kota | - | | 24.0 | 0.0 | 24 kab/kota | 0.0 | 0.0 | 57 | 0.0 | |
| 1.02 | 05 | 05 | PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN | Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota | 100% | 100 % | 683,600,000.0 | 619,900,000.0 | 40.0 | 600,690,641.0 | 100 % | 765,471,091.0 | 516,720,500.0 | 100 | 482,933,149.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 1.02 | 05 | 05 | | Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca | 4 Kab/Kota | 5 Kab/Kota | - | | 5.0 | 0.0 | 10 Kab/Kota | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | |
| 1.02 | 05 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,437,325,064.0 | 2,304,247,972.4 | 100.0 | 2,011,740,281.0 | 100 % | 1,706,945,273.0 | 1,476,291,500.0 | 100 | 1,468,008,559.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 1.02 | 05 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 348,317,000.0 | 635,417,000.0 | 100.0 | 481,544,453.0 | 100 % | 349,106,494.0 | 159,643,000.0 | 100 | 137,122,806.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 1.02 | 05 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 391,650,000.0 | 464,750,000.0 | 100.0 | 421,952,700.0 | 100 % | 444,104,329.0 | 229,506,200.0 | 100 | 221,270,854.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|--|----------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|------------------|---|-----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 05 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 95% | 100 % | 125,000,000.0 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 100 % | 125,283,325.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | |
| 1.02 | 06 | | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | 5,012,267,373.0 | 5,699,980,273.0 | | 5,580,798,447.0 | | 6,023,628,166.82 | 2,137,053,254.32 | | 2,127,774,454.0 | | |
| 1.02 | 06 | | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | 5,012,267,373.0 | 5,699,980,273.0 | | 5,580,798,447.0 | | 6,023,628,166.82 | 2,137,053,254.32 | | 2,127,774,454.0 | | |
| 1.02 | 06 | 01 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan penerbitan akta kelahiran | 86.25% | 88 % | 1,241,203,000.0 | 1,396,553,000.0 | 86.14 | 1,372,904,533.0 | 89 % | 1,244,016,308.8 | 507,735,000.0 | 94.28 | 505,286,360.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| | | | | Cakupan Perekaman KTP-el | 91% | 96 % | - | | 98.88 | 0.0 | 97 % | 0.0 | | 99.8 | 0.0 | | |
| | | | | Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan | 10.04% | 15 % | - | | 0.0 | 0.0 | 20 % | 0.0 | | 32.64 | 0.0 | | |
| | | | | Cakupan Kepemilikan KTP-el | 84.18% | 87 % | - | | 94.11 | 0.0 | 89 % | 0.0 | | 94.43 | 0.0 | | |
| 1.02 | 06 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi | 100% | 100 % | 798,858,000.0 | 831,258,000.0 | 60.0 | 821,955,790.0 | 100 % | 1,800,668,690.0 | 227,100,000.0 | 100 | 226,104,542.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| 1.02 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,059,143,373.0 | 2,185,987,373.0 | 100.0 | 2,168,983,793.0 | 100 % | 2,008,810,622.0 | 1,062,069,474.0 | 100 | 1,056,954,183.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| 1.02 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 611,556,000.0 | 967,801,000.0 | 100.0 | 903,625,400.0 | 100 % | 612,942,151.0 | 176,095,200.0 | 100 | 175,523,900.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| 1.02 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 301,507,000.0 | 318,380,900.0 | 100.0 | 313,328,931.0 | 100 % | 302,190,395.0 | 164,053,580.32 | 100 | 163,905,469.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| 1.02 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | | | | 100 % | 55,000,000.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| 1.02 | 07 | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | 13,088,449,716.0 | 13,605,449,716.0 | | 12,486,958,478.0 | | 15,418,115,964.86 | 14,050,935,500.0 | | 11,604,650,371.0 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 07 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | 13,088,449,716.0 | 13,605,449,716.0 | | 12,486,958,478.0 | | 15,418,115,964.86 | 14,050,935,500.0 | | 11,604,650,371.0 | |
| 1.02 | 07 | 01 | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN | Peningatan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | 5% | 5 % | 829,600,000.0 | 926,900,127.0 | 5.0 | 852,062,100.0 | 5 % | 962,730,369.0 | 400,000,000.0 | 5 | 396,252,000.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya | 3020 RTM | 60 RTM | - | | 60.0 | 0.0 | 60 RTM | 0.0 | 0.0 | 60 | 0.0 | | |
| 1.02 | 07 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Jumlah BUMDES yang difasilitasi | 1482 BUMDES | 180 BUMDES | 1,173,216,000.0 | 881,372,000.0 | 180.0 | 838,000,000.0 | 180 BUMDES | 1,175,875,209.0 | 700,000,000.0 | 180 | 498,530,360.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 1.02 | 07 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif) | 0.15% | 0.2 % | 734,300,000.0 | 779,690,000.0 | 0.20 | 758,932,450.0 | 0.25 % | 898,714,362.9 | 350,000,000.0 | 0.25 | 243,700,000.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LPM Bernrestasi) | 6.25% | 6.25 % | - | | 6.25 | 0.0 | 6.25 % | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | | |
| | | | | % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) | 1% | 1 % | - | | 1.0 | 0.0 | 1 % | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| 1.02 | 07 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA | Jumlah aparat desa yang ditingkatkan Kapasitasnya | 5179 Aparat Desa | 350 Aparat Desa | 2,431,375,000.0 | 2,339,967,301.0 | 350.0 | 2,274,081,594.0 | 350 Aparat Desa | 2,774,601,106.0 | 5,930,050,000.0 | 350 | 5,924,557,060.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | Jumlah desa berstatus swasembada | 89 Desa Swasembada | 2 Desa Swasembada | - | | 2.0 | 0.0 | 2 Desa Swasembada | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | | |
| 1.02 | 07 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN (Prioritas) | Jumlah kelompok binaan PKK (Prioritas) | 43 Kelompok Binaan PKK | 1 Kelompok Binaan PKK | 2,174,450,000.0 | 2,532,950,000.0 | 1.0 | 2,365,345,556.0 | 1 Kelompok Binaan PKK | 2,179,378,603.0 | 615,350,000.0 | 1 | 482,170,100.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | % Posvandu aktif | 99.89% | 99.91 % | - | | 99.91 | 0.0 | 99.93 % | 0.0 | 0.0 | 99.93 | 0.0 | | |
| | | | | % PKK aktif | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | | |
| 1.02 | 07 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 95% | 100 % | 3,342,347,716.0 | 3,844,399,288.0 | 100.0 | 3,837,594,333.0 | 100 % | 4,354,456,658.0 | 3,371,748,273.0 | 100 | 2,877,306,451.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 1.02 | 07 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 95% | 100 % | 1,439,010,000.0 | 1,402,410,000.0 | 100.0 | 698,019,485.0 | 100 % | 1,541,619,657.0 | 1,426,416,500.0 | 100 | 421,877,500.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 1.02 | 07 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 70% | 80 % | 855,451,000.0 | 872,761,000.0 | 80.0 | 837,922,960.0 | 80 % | 1,106,420,000.0 | 899,125,727.0 | 80 | 647,516,900.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|---|----------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----|------------------|---|----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 07 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 90% | 100 % | 108,700,000.0 | 25,000,000.0 | 100.0 | 25,000,000.0 | 100 % | 424,320,000.0 | 358,245,000.0 | 100 | 112,740,000.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 1.02 | 08 | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | 842,965,050.0 | 1,084,565,050.0 | | 1,062,013,739.0 | | 844,875,712.0 | 316,874,033.0 | | 284,950,277.0 | | |
| 1.02 | 08 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | 842,965,050.0 | 1,084,565,050.0 | | 1,062,013,739.0 | | 844,875,712.0 | 316,874,033.0 | | 284,950,277.0 | | |
| 1.02 | 08 | 01 | PROGRAM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1.16% (BPS) | 1.1 % (BPS) | 376,113,050.0 | 419,013,050.0 | 0.85 | 411,415,582.0 | 1.08 % (BPS) | 376,965,547.0 | 102,191,033.0 | 0 | 92,591,033.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| 1.02 | 08 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KELUARGA BERENCANA | % Penggunaan kontrasepsi jangka panjang | 22.19% | 23.25 % | 213,866,000.0 | 348,566,000.0 | 23.54 | 339,496,444.0 | 24.31 % | 214,350,748.0 | 113,913,000.0 | 0 | 100,081,380.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| | | | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur | 66.30% | 66.54 % | - | | 45.51 | 0.0 | 66.74 % | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | % Peserta KB Aktif | 71.46% | 71.86 % | - | | 70.28 | 0.0 | 72.26 % | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | Rasio Total Fertility Rate | 2.36% | 2.34 | - | | 2.38 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |
| 1.02 | 08 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA | Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina | 1000 Klp | 1500 Klp | 252,986,000.0 | 316,986,000.0 | 1,500.0 | 311,101,713.0 | 1600 Klp | 253,559,417.0 | 100,770,000.0 | 0 | 92,277,864.0 | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| | | | | Cakupan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Sejahtera secara terpadu berkesinambungan dan terencana | 24 Kab/ Kota | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |
| 1.02 | 09 | | Perhubungan | | | | 28,482,710,720.0 | 24,433,498,120.0 | | 22,538,971,877.0 | | 28,547,269,564.09 | 15,501,475,533.00 | | 11,822,269,811.0 | | |
| 1.02 | 09 | | Dinas Perhubungan | | | | 28,482,710,720.0 | 24,433,498,120.0 | | 22,538,971,877.0 | | 28,547,269,564.09 | 15,501,475,533.00 | | 11,822,269,811.0 | | |
| 1.02 | 09 | 01 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELAHUAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas) | Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) | 1823531 Orang | 980537 Orang | 11,073,000,000.0 | 6,031,200,000.0 | 998,134.0 | 5,572,500,057.0 | 1009 Orang | 9,598,098,035.1 | 1,114,378,810.0 | 658 | 890,284,923.0 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Jumlah pelabuhan strategis provinsi | 10 Lokasi | 10 Lokasi | - | | 10.0 | 0.0 | 11 Lokasi | 0.0 | 11 | 0.0 | | | |
| | | | | Jumlah pelabuhan yang beroperasi | 32 Lokasi | 35 Lokasi | - | | 24.0 | 0.0 | 38 Lokasi | 0.0 | 23 | 0.0 | | | |
| 1.02 | 09 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Prioritas) | Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas) | 20% | 22 % | 3,329,665,000.0 | 2,679,218,400.0 | 15.0 | 2,613,825,454.0 | 24 % | 3,337,212,011.0 | 2,865,720,253.0 | 9 | 1,927,850,470.0 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Cakupan penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi | 78 Ruas | 78 Ruas | - | | 46.0 | 0.0 | 78 Ruas | 0.0 | 66 | 0.0 | | | |
| 1.02 | 09 | 03 | PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN | % Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan | 20% | 30 % | 3,640,000,000.0 | 3,979,000,000.0 | 30.0 | 3,550,886,851.0 | 40 % | 3,648,250,415.0 | 915,480,590.0 | 34 | 738,494,320.0 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | % Layanan Angkutan Darat | 50% | 51 % | - | | 51.0 | 0.0 | 52 % | 0.0 | 8 | 0.0 | | | |
| | | | | Jumlah Terminal Bis Terkelola | 3 Lokasi | 3 Lokasi | - | | 3.0 | 0.0 | 7 Lokasi | 0.0 | 20 | 0.0 | | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|---|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | | Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun | 121785 Orang | 125000 Orang | - | | 123,750.0 | 0.0 | 245000 Orang | 0.0 | | 580872 | 0.0 | | | |
| 1.02 | 09 | 04 | PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Transportasi | 12 Dokumen | 5 Dokumen | 611,320,720.0 | 681,320,720.0 | 5.0 | 672,640,567.0 | 7 Dokumen | 2,112,706,338.0 | 2,817,340,000.0 | 17 | 624,891,000.0 | Dinas Perhubungan | |
| 1.02 | 09 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 7,619,900,000.0 | 8,029,109,000.0 | 100.0 | 7,379,927,527.0 | 100 % | 7,637,171,247.0 | 6,675,836,000.0 | 100 | 6,561,023,303.0 | Dinas Perhubungan | |
| 1.02 | 09 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 873,000,000.0 | 2,028,900,000.0 | 100.0 | 1,787,210,200.0 | 100 % | 874,978,740.0 | 783,573,016.0 | 100 | 761,628,461.0 | Dinas Perhubungan | |
| 1.02 | 09 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 930,200,000.0 | 1,004,750,000.0 | 100.0 | 961,981,221.0 | 100 % | 932,308,389.0 | 329,146,864.0 | 100 | 318,097,334.0 | Dinas Perhubungan | |
| 1.02 | 09 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 405,625,000.0 | 0,00 | 100.0 | 0.0 | 100 % | 406,544,389.0 | | 45 | 0.0 | Dinas Perhubungan | |
| 1.02 | 10 | | Komunikasi dan Informatika | | | 17,942,285,130.0 | 19,229,876,117.18 | | 18,920,542,022.0 | | 17,885,503,070.70 | 7,991,091,328.15 | | 4,099,816,912.0 | | | |
| 1.02 | 10 | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | | | 17,942,285,130.0 | 19,229,876,117.18 | | 18,920,542,022.0 | | 17,885,503,070.70 | 7,991,091,328.15 | | 4,099,816,912.0 | | | |
| 1.02 | 10 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Prioritas) | % Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas) | 40% | 60 % | 9,641,502,075.0 | 8,811,453,030.0 | 60.0 | 8,741,422,704.0 | 70 % | 9,623,858,367.7 | 3,072,951,025.0 | 0 | 0.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | |
| 1.02 | 10 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK (Prioritas) | % Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas) | 100 % | 100 % | 1,016,200,000.0 | 1,269,180,405.0 | 100.0 | 1,240,488,397.0 | 100 % | 1,018,503,316.0 | 105,100,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | |
| 1.02 | 10 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK | % Layanan Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi berkualitas baik | 10% | 70 % | 1,763,100,000.0 | 2,052,030,000.1 | 70.0 | 1,975,478,146.0 | 80 % | 1,586,574,921.0 | 1,086,345,400.0 | 80 | 1,048,307,200.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | |
| 1.02 | 10 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK | % Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi | 30% | 40 % | 568,200,000.0 | 1,610,789,568.0 | 40.0 | 1,581,570,556.0 | 50 % | 569,487,881.0 | 477,156,676.0 | 0 | 0.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | |
| | | | | % Desiminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilakukan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM) | 30% | 40 % | - | | 40.0 | 0.0 | 50 % | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|--|----------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----|-----------------|---|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | |
| 1 | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.02 | 10 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 50 % | 3,515,463,055.0 | 3,746,267,344.1 | 50.0 | 3,684,570,113.0 | 75 % | 3,502,376,215.0 | 2,266,871,405.2 | 75 | 2,266,441,024.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 1.02 | 10 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 1,066,820,000.0 | 1,425,492,335.0 | 100.0 | 1,393,378,890.0 | 100 % | 1,169,464,711.0 | 786,642,250.0 | 100 | 590,357,150.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 1.02 | 10 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 178,350,000.0 | 314,663,435.0 | 100.0 | 303,633,216.0 | 100 % | 222,150,999.0 | 196,024,572.0 | 100 | 194,711,538.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 1.02 | 10 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 90 % | 192,650,000.0 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 90 % | 193,086,660.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 1.02 | 11 | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 17,517,112,569.0 | 14,517,112,569.0 | | 13,470,811,730.0 | | 20,556,816,814.51 | 8,502,350,000.0 | | 6,638,427,283.0 | |
| 1.02 | 11 | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 17,517,112,569.0 | 14,517,112,569.0 | | 13,470,811,730.0 | | 20,556,816,814.51 | 8,502,350,000.0 | | 6,638,427,283.0 | |
| 1.02 | 11 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK UKM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Prioritas) | % Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin (Prioritas) | 0% | 20 % | 6,932,900,000.0 | 3,932,900,000.0 | 20.0 | 3,149,253,942.0 | 20 % | 9,917,900,000.0 | 1,565,610,500.0 | 10 | 1,219,080,819.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 1.02 | 11 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PROMOSI PRODUK UMKM (Prioritas) | Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas) | 0 Produk | 10 Produk | 900,000,000.0 | 899,500,000.0 | 10.0 | 894,678,406.0 | 10 Produk | 900,000,000.0 | 553,698,000.0 | 0 | 379,951,712.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 1.02 | 11 | 03 | PROGRAM PENCPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN PENGEMBANGAN PRODUK PEMASARAN BAGI KOPERASI DAN UMKM | Jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana | 2058 Unit | 10 Unit | 297,500,000.0 | 297,500,000.0 | 10.0 | 297,298,988.0 | 10 Unit | 300,000,000.0 | 165,140,000.0 | 0 | 159,922,898.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | Jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan | 114 Produk | 5 Produk | - | | 5.0 | 0.0 | 5 Produk | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| 1.02 | 11 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA PRODUKTIF BAGI KUMKM | % Jumlah KUMKM yang terfasilitasi kelembaga Keuangan | 20% | 20 % | 775,000,000.0 | 775,000,000.0 | 20.0 | 769,456,844.0 | 20 % | 775,000,000.0 | 77,935,000.0 | 5 | 76,843,945.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | % Pengelola yang terfasilitasi diklat | 20% | 20 % | - | | 20.0 | 0.0 | 20 % | 0.0 | | 5 | 0.0 | |
| 1.02 | 11 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN UMKM | Jumlah Koperasi aktif | 5226 Unit | 100 Unit | 1,524,000,000.0 | 1,539,750,000.0 | 100.0 | 1,527,946,775.0 | 100 Unit | 1,400,000,000.0 | 773,639,000.0 | 0 | 594,246,993.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | Jumlah Usaha Kecil menjadi usaha Menengah | 141119 Unit | 50 Unit | - | | 50.0 | 0.0 | 50 Unit | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| | | | | Jumlah Koperasi skala besar | 20 Unit | 2 Unit | - | | 1.0 | 0.0 | 2 Unit | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| 1.02 | 11 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 4,457,462,564.0 | 4,465,512,564.0 | 100.0 | 4,315,553,902.0 | 100 % | 4,750,000,000.0 | 3,744,841,500.0 | 40 | 3,651,374,406.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 1.02 | 11 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 2,121,250,005.0 | 2,366,950,005.0 | 100.0 | 2,277,222,873.0 | 100 % | 1,884,916,814.5 | 1,621,486,000.0 | 40 | 557,006,510.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 11 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 0 % | - | | | | 100 % | 100,000,000.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 1.02 | 11 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 509,000,000.0 | 240,000,000.0 | 100.0 | 239,400,000.0 | 100 % | 529,000,000.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 1.02 | 12 | | Penanaman Modal | | | | 3,998,899,731.0 | 5,498,899,731.0 | | 5,384,597,232.03 | | 9,247,960,000.0 | 7,035,793,700.0 | | 4,931,164,956.0 | | |
| 1.02 | 12 | | Dinas Penanaman Modal dan PTS | | | | 3,998,899,731.0 | 5,498,899,731.0 | | 5,384,597,232.03 | | 9,247,960,000.0 | 7,035,793,700.0 | | 4,931,164,956.0 | | |
| 1.02 | 12 | 01 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 11.47 Triliun | 13.02 Triliun | 223,676,300.0 | 391,039,300.0 | 10.21 | 386,884,213.0 | 13.87 Triliun | 762,429,656.0 | 134,945,000.0 | 12.54 | 133,489,692.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 12 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 689 Proyek | 774 Proyek | 580,702,500.0 | 1,076,702,500.0 | 1,548.0 | 1,051,558,888.0 | 821 Proyek | 1,222,152,945.0 | 730,585,780.0 | 2506 | 724,887,715.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 12 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 11 Orang/Proyek | 12 Orang/proyek | 191,836,100.0 | 191,836,100.0 | 8.0 | 188,863,919.0 | 13 Orang/proyek | 692,270,915.0 | 572,507,800.0 | 3 | 190,688,600.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN | -41% | 15 % | 441,807,100.0 | 741,807,100.0 | 73.16 | 735,870,748.0 | 15 % | 1,081,788,499.0 | 585,652,600.0 | 61 | 380,579,300.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 12 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 75 % | 1,826,171,200.0 | 1,931,093,933.0 | 75.0 | 1,886,704,635.0 | 75 % | 1,990,176,170.0 | 2,555,102,820.0 | 75 | 2,311,085,499.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 12 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 75 % | 312,897,000.0 | 730,897,000.0 | 75.0 | 708,785,595.03 | 75 % | 2,791,376,212.0 | 2,246,451,400.0 | 75 | 981,845,550.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 12 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 70 % | 245,017,531.0 | 306,131,798.0 | 70.0 | 303,679,234.0 | 80 % | 245,572,887.0 | 192,050,300.0 | 80 | 190,090,600.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 12 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 80 % | 176,792,000.0 | 129,392,000.0 | 98.75 | 122,250,000.0 | 85 % | 462,192,716.0 | 18,498,000.0 | 85 | 18,498,000.0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 1.02 | 13 | | Kepemudaan dan Olahraga | | | | 22,198,337,523.0 | 30,322,198,872.0 | | 29,478,333,013.0 | | 36,744,119,026.59 | 40,569,880,335.0 | | 31,215,639,540.0 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1.02 | 13 | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 13 | 01 | PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA | % Organisasi pemuda yang aktif | 8,31% | 9.06 % | 134,774,500.0 | 30,322,198,872.0 | 285,608,250.0 | 9.0 | 266,600,900.0 | 9.81 % | 1,090,002,301.6 | 120,384,100.0 | 9.81 | 97,139,100.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.02 | 13 | | | Jumlah lembaga pramuka yang aktif | 1 Kwarda, 24 Kwarcab | 25 Kwarda/Kwarcab | - | | | 25.0 | 0.0 | 25 Kwarda/Kwarcab | 0.0 | - | 25 | 0.0 | |
| 1.02 | 13 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas) | % Wirausaha muda | 10.89% | 14.6 % | 529,752,000.0 | 966,867,000.0 | 1,906,229,650.0 | 14.40 | 958,938,972.0 | 18.31 % | 2,159,000,301.0 | 578,334,100.0 | 18.31 | 506,036,358.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.02 | 13 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas) | Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas) | 900 Pemuda | 900 Pemuda | - | | | 900.0 | 0.0 | 950 Pemuda | 0.0 | - | 950 | 0.0 | |
| 1.02 | 13 | 03 | PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN | Cakupan atlet pelajar berprestasi | 10% | 10 % | 1,216,918,150.0 | 1,906,229,650.0 | 21,353,003,100.0 | 10.0 | 1,897,119,017.0 | 10 % | 2,310,500,100.0 | 1,274,680,000.0 | 10 | 1,269,180,000.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.02 | 13 | | | Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan | 1 Jenis | 7 Jenis | - | | | 7.0 | 0.0 | 7 Jenis | 0.0 | - | 7 | 0.0 | |
| 1.02 | 13 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA | Cakupan pembinaan olahraga | 31% | 32 % | 11,052,625,500.0 | 21,353,003,100.0 | 773,600,000.0 | 32.0 | 20,944,276,118.0 | 34 % | 23,885,970,680.0 | 7,414,494,200.0 | 34 | 7,319,566,441.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.02 | 13 | | | Jumlah atlet berprestasi | 81 Atlet | 245 Atlet | - | | | 245.0 | 0.0 | 359 Atlet | 0.0 | - | 359 | 0.0 | |
| 1.02 | 13 | | | Jumlah prestasi olahraga | 16 Cabor | 9 Cabor | - | | | 9.0 | 0.0 | 27 Cabor | 0.0 | - | 27 | 0.0 | |
| 1.02 | 13 | | | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | 10.89% | 14.75 % | - | | | 14.75 | 0.0 | 17.36 % | 0.0 | - | 17.36 | 0.0 | |
| 1.02 | 13 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | 85% | 85 % | 6,165,000,000.0 | 773,600,000.0 | 494,000,200.0 | 85.0 | 740,596,449.0 | 85 % | 2,255,500,200.0 | 24,563,264,248.0 | 85 | 15,778,075,851.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.02 | 13 | | | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda | 85% | 85 % | - | | | 85.0 | 0.0 | 85 % | 0.0 | - | 83 | 0.0 | |
| 1.02 | 13 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | 7.54% | 8.22 % | 256,000,000.0 | 494,000,200.0 | 8.20 | 480,408,274.0 | 8.9 % | 666,000,000.0 | 1,391,074,000.0 | 8.9 | 1,256,103,010.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| 1.02 | 13 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 2,517,689,873.0 | 3,892,949,077.0 | 100.0 | 3,558,439,568.0 | 100 % | 2,971,945,444.0 | 3,600,825,700.0 | 100 | 3,429,215,379.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| 1.02 | 13 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 124,800,000.0 | 328,988,495.0 | 100.0 | 324,754,975.0 | 100 % | 250,000,000.0 | 847,437,000.0 | 100 | 821,555,501.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| 1.02 | 13 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100 % | 100 % | 192,977,500.0 | 283,153,100.0 | 100.0 | 269,497,190.0 | 100 % | 810,200,000.0 | 527,561,987.0 | 100 | 488,462,900.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| 1.02 | 13 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100 % | 100 % | 7,800,000.0 | 37,800,000.0 | 100.0 | 37,701,550.0 | 100 % | 345,000,000.0 | 251,825,000.0 | 100 | 250,305,000.0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| 1.02 | 14 | 14 | Statistik | | | | 461,750,000.0 | 448,050,000.0 | | 437,536,212.0 | | 553,296,601.0 | 234,116,400.0 | | 231,056,400.0 | | |
| 1.02 | 14 | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | | | | 461,750,000.0 | 448,050,000.0 | | 437,536,212.0 | | 553,296,601.0 | 234,116,400.0 | | 231,056,400.0 | | |
| 1.02 | 14 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 33% | 43 % | 461,750,000.0 | 448,050,000.0 | 40.0 | 0.0 | 50 % | 553,296,601.0 | 234,116,400.0 | 0 | 0.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | |
| 1.02 | 14 | | | % Sistem data dan statistik yang terintegrasi | 20% | 40 % | | | 0.0 | 437,536,212.0 | 53 % | 0.0 | | 53 | 231,056,400.0 | | |
| 1.02 | 15 | Persandian | | | | | 294,900,000.0 | 314,417,600.0 | | 288,560,693.0 | | 302,518,420.0 | 120,253,600.0 | | 118,113,500.0 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|---|-----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 | 15 | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | | | | | 294,900,000.0 | 314,417,600.0 | | 288,560,693.0 | | 302,518,420.0 | 120,253,600.0 | | 118,113,500.0 | |
| 1.02 | 15 | 01 | PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI | % Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian | 25% | 30 % | 294,900,000.0 | 314,417,600.0 | 30.0 | 288,560,693.0 | 50 % | 302,518,420.0 | 120,253,600.0 | 50 | 118,113,500.0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | |
| 1.02 | 16 | | Kebudayaan | | | | 12,845,811,615.0 | 13,925,783,015.0 | | 13,505,901,197.0 | | 12,964,124,666.04 | 18,796,987,001.0 | | 16,232,299,767.0 | | |
| 1.02 | 16 | | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | | | | 12,845,811,615.0 | 13,925,783,015.0 | | 13,505,901,197.0 | | 12,964,124,666.04 | 18,796,987,001.0 | | 16,232,299,767.0 | | |
| 1.02 | 16 | 01 | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | 8 Event | 7 Event | 3,536,198,000.0 | 3,375,974,000.0 | 7.0 | 3,349,659,141.0 | 8 Event | 2,752,543,896.0 | 4,724,130,000.0 | 0 | 4,554,717,934.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | |
| | | | | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 3 Jenis | 2 Jenis | - | | 2.0 | 0.0 | 2 Jenis | 0.0 | | 0 | 0.0 | | |
| | | | | % Kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama | 0% | 0 % | - | | 0.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 0 | 0.0 | | |
| 1.02 | 16 | 02 | PROGRAM PENGAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI NILAI BUDAYA | Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 5% | 5 % | 1,964,664,550.0 | 1,964,664,550.0 | 5.0 | 1,959,713,940.0 | 6 % | 1,555,462,196.0 | 2,842,514,420.0 | 0 | 2,137,092,047.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | |
| | | | | Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi | 1.250 Benda Budaya | 250 Benda Budaya | - | | 250.0 | 0.0 | 250 Benda Budaya | 0.0 | | 0 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | 120 Karya Budaya | 10 Karya Budaya | - | | 5.0 | 0.0 | 12 Karya Budaya | 0.0 | | 0 | 0.0 | | |
| 1.02 | 16 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 5,582,303,065.0 | 6,038,248,465.0 | 100.0 | 5,699,179,710.0 | 100 % | 5,698,772,116.0 | 4,519,367,715.0 | 0 | 3,718,070,005.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | |
| 1.02 | 16 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 1,324,380,000.0 | 1,922,630,000.0 | 100.0 | 1,903,270,153.0 | 100 % | 1,899,061,816.0 | 6,342,179,766.0 | 0 | 5,454,913,181.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | |
| 1.02 | 16 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 301,866,000.0 | 347,616,000.0 | 100.0 | 319,147,253.0 | 100 % | 408,866,000.0 | 104,295,100.0 | 0 | 104,094,600.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | |
| 1.02 | 16 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 136,400,000.0 | 276,650,000.0 | 100.0 | 274,931,000.0 | 100 % | 649,418,642.0 | 264,500,000.0 | 0 | 263,412,000.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | |
| 1.02 | 17 | | Perpustakaan | | | | 7,624,909,018.0 | 11,990,667,438.45 | | 11,963,504,384.0 | | 7,267,874,465.72 | 38,293,331,082.0 | | 28,837,940,965.0 | | |
| 1.02 | 17 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | 7,624,909,018.0 | 11,990,667,438.45 | | 11,963,504,384.0 | | 7,267,874,465.72 | 38,293,331,082.0 | | 28,837,940,965.0 | | |
| 1.02 | 17 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik | 732.403 Orang | 100000 Orang | 793,519,000.0 | 2,218,844,000.0 | 365,781.0 | 2,216,094,288.0 | 110000 Orang | 1,100,000,000.0 | 12,357,695,000.0 | 110000 | 10,029,455,500.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | | | Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina | 1237 Unit | 70 Unit | - | | 87.0 | 0.0 | 75 Unit | 0.0 | | 75 | 0.0 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1.02 | 17 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN | Rasio perpustakaan per satuan penduduk | 0.0364 | 0.03 | 160,989,000.0 | 180,490,000.0 | 0.03 | 179,940,000.0 | 0.03 | 325,000,000.0 | | 0 | | 0.0 | |
| 1.02 | 17 | 03 | | Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat | 3.500 Orang | 1000 Orang | - | | 1,250.0 | 0.0 | 1100 Orang | 0.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 1.02 | 17 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 581.201 Jenis | 250000 Jenis | 594,220,000.0 | 594,091,550.0 | 390,672.0 | 592,382,711.0 | 251000 Jenis | 375,000,000.0 | 1,349,365,000.0 | 251000 | 1,345,933,750.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 1.02 | 17 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 390.672 Buku | 300000 Buku | - | | 581,201.0 | 0.0 | 310000 Buku | 0.0 | | 310000 | | 0.0 | |
| 1.02 | 17 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 3,302,690,018.0 | 3,820,810,560.5 | 100.0 | 3,816,688,005.0 | 100 % | 3,776,874,465.7 | 5,089,994,782.0 | 100 | 4,548,035,575.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 1.02 | 17 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | 2,162,664,000.0 | 3,946,147,518.0 | 100.0 | 3,928,208,100.0 | 100 % | 1,050,000,000.0 | 17,817,276,300.0 | 100 | 11,243,306,244.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 1.02 | 18 | | Kearsipan | | | | 1,222,911,000.0 | 2,021,057,450.0 | | 2,010,687,264.0 | | 1,600,000,000.0 | 3,807,460,000.0 | | 3,457,089,996.0 | | |
| 1.02 | 18 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | 1,222,911,000.0 | 2,021,057,450.0 | | 2,010,687,264.0 | | 1,600,000,000.0 | 3,807,460,000.0 | | 3,457,089,996.0 | | |
| 1.02 | 18 | 01 | PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN | % Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 100% | 20 % | 260,590,000.0 | 635,765,000.0 | 17.0 | 629,840,999.0 | 40 % | 600,000,000.0 | 2,037,970,000.0 | 40 | 2,035,727,098.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 1.02 | 18 | 02 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH | Jumlah dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan | 100% | 20 % | 286,925,000.0 | 453,878,950.0 | 20.0 | 451,396,853.0 | 40 % | 300,000,000.0 | 1,769,490,000.0 | 40 | 1,421,362,898.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 1.02 | 18 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN | Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar | 5 Unit | 5 Unit | 263,633,500.0 | 263,633,500.0 | 5.0 | 262,333,500.0 | 5 Unit | 250,000,000.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 1.02 | 18 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ARSIP | Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat | 65 Lembaga/Instansi | 20 Lembaga/Instansi | 411,762,500.0 | 667,780,000.0 | 11.0 | 667,115,912.0 | 20 Lembaga/Instansi | 450,000,000.0 | | 0 | | 0.0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.00 | | | Urusan Pilihan | | | | 404,752,041,838.0 | 361,572,122,523.99 | | 334,793,154,589.89 | | 449,902,371,612.96 | 420,496,097,892.57 | | 262,809,429,324.91 | | |
| 2.00 | 01 | | Pariwisata | | | | 7,057,438,000.0 | 5,944,137,229.0 | | 5,758,941,261.0 | | 10,984,237,607.0 | 6,065,005,434.0 | | 4,826,075,588.0 | | |
| 2.00 | 01 | | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | | | | 7,057,438,000.0 | 5,944,137,229.0 | | 5,758,941,261.0 | | 10,984,237,607.0 | 6,065,005,434.0 | | 4,826,075,588.0 | | |
| 2.00 | 01 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA (Prioritas) | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | 263.293 Kunjungan | 300000 WNA | 2,889,343,000.0 | 2,743,829,400.0 | 115,000.0 | 2,692,355,464.0 | 300000 WNA | 4,368,526,750.0 | 4,191,876,600.0 | 0 | 3,145,690,153.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan | |
| | | | | Jumlah kunjungan wisatawan lokal | 8,393.024 Kunjungan | 7500000 WNI | - | | 6,256,376.0 | 0.0 | 7500000 WNI | 0.0 | | 0 | | 0.0 | |
| | | | | Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas) | 0 Jenis | 2 Jenis | - | | 2.0 | 0.0 | 2 Jenis | 0.0 | | 0 | | 0.0 | |

| KODE | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|--|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|
| | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | Lama Kunjungan Wisata | 5 Hari | 5 Hari | - | | 5.0 | 0.0 | 5 Hari | 0.0 | - | 0 | 0.0 | | |
| | | | Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas) | 0 Orang | 0 Orang | - | | 0.0 | 0.0 | 1000 Orang | 0.0 | - | 0 | 0.0 | | |
| 2.00 | 01 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL (Prioritas) | Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas) | 0 Kab/Kota | 1 Kab/Kota | 65,916,000.0 | 65,916,000.0 | 1.0 | 64,675,506.0 | 2 Kab/Kota | 260,916,000.0 | 185,886,000.0 | 0 | 170,414,440.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan |
| 2.00 | 01 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan | 4 Destinasi Wisata | 2 Destinasi Wisata | 3,034,339,000.0 | 2,298,985,629.0 | 2.0 | 2,174,179,628.0 | 2 Destinasi Wisata | 4,443,893,646.0 | 1,128,242,834.0 | 0 | 1,005,422,160.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan |
| 2.00 | 01 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA | Cakupan penyelenggaraan event pariwisata bekerjasama dengan lembaga kemitraan | 0 Event | 12 Event | 1,067,840,000.0 | 835,406,200.0 | 2.0 | 827,730,663.0 | 12 Event | 1,910,901,211.0 | 559,000,000.0 | 0 | 504,548,835.0 | Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan |
| 2.00 | 02 | | Pertanian | | | | 234,442,347,834.0 | 224,623,919,060.91 | | 209,032,419,898.39 | | 256,847,098,841.04 | 340,607,530,225.0 | | 198,578,205,559.11 | |
| 2.00 | 02 | | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 176,779,485,500.0 | 160,620,155,097.0 | | 149,072,206,188.0 | | 169,053,538,000.0 | 224,007,503,200.0 | | 117,651,540,748.71 | |
| 2.00 | 02 | 01 | PROGRAM HILIRISASI PERTANIAN (Prioritas) | Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas) | Rp 0 | 36948525 0000 Rp | 75,817,194,500.0 | 53,864,541,831.0 | 51,006,977,860.0 | 51,006,977,860.0 | 4542379 09693 Rp | 92,950,000,000.0 | 79,481,296,900.0 | 0 | 40,031,599,691.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN | Jumlah produksi kedelai dan palawija | 15000 Ton | 16423 Ton | 3,954,704,500.0 | 5,033,704,500.0 | 16,423.0 | 4,949,684,248.0 | 16751 Ton | 7,275,000,000.0 | 21,556,270,800.0 | 395696 | 5,569,806,120.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| | | | Jumlah produksi padi | 5000000 Ton | 6027914 Ton | - | | 5,054,128.0 | 0.0 | 6329309 Ton | 0.0 | - | 5E+06 | 0.0 | | |
| | | | Produktivitas padi | 45 Kw/Ha | 51 Kw/Ha | - | | 50.12 | 0.0 | 51 Kw/Ha | 0.0 | - | 5 | 0.0 | | |
| | | | Produktivitas jagung | 50 Kw/Ha | 57 Kw/Ha | - | | 55.80 | 0.0 | 57 Kw/Ha | 0.0 | - | 56.48 | 0.0 | | |
| | | | Produktivitas kedelai dan palawija | 10 Kw/Ha | 13 Kw/Ha | - | | 12.32 | 0.0 | 13 Kw/Ha | 0.0 | - | 0 | 0.0 | | |
| | | | Jumlah produksi jagung | 5000000 Ton | 6027914 Ton | - | | 6,027,914.0 | 0.0 | 2560267 Ton | 0.0 | - | 2E+06 | 0.0 | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PRODUK HORTIKULTURA | Jumlah produksi tanaman hortikultura | 15000 Ton | 22806 Ton | 2,006,630,000.0 | 5,108,170,000.0 | 22,806.0 | 4,728,880,563.0 | 22806 Ton | 5,400,000,000.0 | 3,913,200,000.0 | 195600 | 3,025,819,379.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| | | | Produktivitas tanaman hortikultura | 55 Kw/Ha | 57 Kw/Ha | - | | 57.0 | 0.0 | 57 Kw/Ha | 0.0 | - | 98.02 | 0.0 | | |
| | | | Jumlah bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB | 5000 Pohon | 10000 Pohon | - | | 10,000.0 | 0.0 | 10000 Pohon | 0.0 | - | 0 | 0.0 | | |
| | | | Tingkat kehilangan hasil panen | 5% | 8 % | 820,000,000.0 | | 7.0 | 2,309,520,020.0 | 8 % | 1,600,000,000.0 | 1,260,000,000.0 | 0 | 1,196,800,530.0 | | |
| 2.00 | 02 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN HASIL, PASCA PANEN, PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, DAN PENYEBARAN INFORMASI | Jumlah Kelompok Tani yang menjalankan usaha agribisnis | 20 Poktan | 25 Poktan | - | 2,329,500,000.0 | 25.0 | 0.0 | 25 Poktan | 0.0 | - | 0 | 0.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN | Cakupan ketersediaan jaringan irigasi | 10000 Ha | 20000 Ha | 79,571,805,500.0 | 7,900.0 | 68,641,250,060.0 | 20000 Ha | 46,987,000,000.0 | 110,120,900,500.0 | 0 | 62,542,238,995.71 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | | |
| | | | Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian | 300 Unit | 388 Unit | - | 653.0 | 0.0 | 400 Unit | 0.0 | - | 0 | 0.0 | | | |
| | | | % Penurunan serangan OPT | 5% | 4.9 % | 1,952,900,000.0 | | 4.50 | 6,274,884,745.0 | 4.8 % | 3,695,000,000.0 | 2,996,544,000.0 | 0 | 1,953,269,600.0 | Dinas Ketahanan | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|---|----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2.00 | 02 | 08 | PROGRAM PENYEDIAAN BENIH BERMUTU PENGENDALIAN OPT DAN STATISTIK PERTANIAN | % Penggunaan benih padi bersertifikat | 75% | 4.9 % | - | 6,284,700,000.0 | 63.0 | 0.0 | 63 % | 0.0 | - | 0 | 0.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| | | | | Cakupan ketersediaan data statistik pertanian | 100% | 4.9 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | - | 100 | 0.0 | | |
| 2.00 | 02 | 09 | PROGRAM PENYULUHAN DAN PELATIHAN SDM PERTANIAN | Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama pertanian | 0.4% | 0.5 % | 368,500,000.0 | 1,041,500,000.0 | 0.50 | 1,039,401,602.0 | 0.5 % | 4,200,000,000.0 | 526,800,000.0 | 0 | 514,689,800.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 2.00 | 02 | 10 | PROGRAM FASILITASI PRASARANA DAN SARANA BERBANTUAN | Jumlah proyek bantuan WISMP dan LOAN untuk sektor pertanian | 2 Jenis | 2 Proyek | 12,287,751,000.0 | 11,460,441,000.0 | 2.0 | 10,121,607,090.0 | 2 Proyek | 6,946,538,000.0 | 4,152,491,000.0 | 0 | 2,817,316,633.0 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 2.00 | 02 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | 35,609,773,138.0 | 35,652,974,767.91 | | 33,021,802,755.89 | | 65,690,486,164.74 | 31,297,348,900.0 | | 24,424,833,411.40 | | |
| 2.00 | 02 | 03 | PROGRAM HILIRISASI PETERNAKAN (Prioritas) | Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas) | Rp 0 | 94120840 00 Rp | 2,699,254,000.0 | 3,660,565,200.0 | 10,233,714,519.0 | 3,322,384,930.54 | 2196475 0000 Rp | 35,405,887,584.0 | 10,124,468,268.0 | 8E+09 | 7,262,104,203.0 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| 2.00 | 02 | 11 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK | Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) Prioritas (Rabies, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza, Brucellosis) | 6,190 Kasus | 6108 Kasus | 3,215,384,100.0 | 3,250,844,600.0 | 6,348.0 | 3,045,819,633.0 | 5497 Kasus | 3,446,000,000.0 | 1,091,574,000.0 | 31329 | 1,049,152,390.0 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| 2.00 | 02 | 13 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK (Prioritas) | Jumlah Populasi ternak kecil | 1.577.427 | 1656799 Ekor | 22,705,787,500.0 | 22,323,529,286.0 | 1,656,800.0 | 20,849,828,389.35 | 1740324 Ekor | 19,478,200,000.0 | 14,448,180,949.0 | 2E+06 | 11,390,079,232.40 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas) | 1.354 | 1384 Ekor | - | | 1,833.0 | 0.0 | 1416 Ekor | 0.0 | - | 1040 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah Populasi ternak unggas | 107.964.2 | 11794827 12 Ekor | - | | 119,616,687.0 | 0.0 | 1290277 02 Ekor | 0.0 | - | 1E+08 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas) | 175.274 | 180532 Ekor | - | | 180,533.0 | 0.0 | 185948 Ekor | 0.0 | - | 171150 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas) | 93.752 | 105219 Ekor | - | | 96,565.0 | 0.0 | 115598 Ekor | 0.0 | - | 117127 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah produksi telur (Prioritas) | 154.851.8 | 16259447 77 Kg | - | | 186,601,357.0 | 0.0 | 1707241 95 Kg | 0.0 | - | 3E+08 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah Populasi sapi potong (Prioritas) | 1,190.390 | 1263719 Ekor | - | | 1,362,604.0 | 0.0 | 1329788 Ekor | 0.0 | - | 1E+06 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah produksi daging (Prioritas) | 136.923.7 | 13816403 64 Kg | - | | 148,101,013.0 | 0.0 | 1394787 30 Kg | 0.0 | - | 3E+07 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah produksi susu (Prioritas) | 3.115.800 | 3240432 Kg | - | | 3,299,400.0 | 0.0 | 3370049 Kg | 0.0 | - | 458550 | 0.0 | | |
| 2.00 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 5,283,038,288.0 | 4,694,130,288.0 | 100.0 | 4,238,656,244.0 | 100 % | 5,402,468,580.0 | 3,895,129,290.0 | 51 | 3,567,972,772.0 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| 2.00 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 294,659,250.0 | 294,659,250.0 | 100.0 | 292,299,275.0 | 100 % | 729,880,000.7 | 1,377,183,100.0 | 100 | 812,684,025.0 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|-------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 2.00 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,322,150,000.0 | 979,946,143.9 | 100.0 | 830,150,084.0 | 100 % | 990,500,000.0 | 250,813,293.0 | 100 | 250,180,015.0 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| 2.00 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 89,500,000.0 | 449,300,000.0 | 91.0 | 442,664,200.0 | 100 % | 237,550,000.0 | 110,000,000.0 | 78.9 | 92,660,774.0 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| 2.00 | 02 | Dinas Perkebunan | | | | 22,053,089,196.0 | 28,350,789,196.0 | | 26,938,410,954.50 | | 22,103,074,676.30 | | 85,302,678,125.0 | | 56,501,831,399.0 | | |
| 2.00 | 02 | 02 | PROGRAM HILIRISASI PERKEBUNAN (Prioritas) | Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas) | Rp. 35783500 00 Rp | 35783500 00 Rp | 3,578,350,000.0 | 3,980,600,000.0 | 3,980,600,000.0 | 3,904,509,229.50 | 5000000 000 Rp | 910,000,000.3 | 280,000,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Perkebunan | |
| 2.00 | 02 | 16 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN | Produktivitas Komoditi Kelapa Sawit | 4.344 Kg/Ha | 4348 Kg/Ha | 9,547,670,500.0 | 11,936,131,472.0 | 4,078.0 | 11,112,044,176.0 | 4356 Kg/Ha | 3,575,707,673.0 | 58,150,140,000.0 | 4081 | 42,155,956,708.0 | Dinas Perkebunan | |
| | | | | Produktivitas Komoditi Tembakau (Nikotin rendah) | 680 Kg/Ha | 1010 Kg/Ha | - | | 858.0 | 0.0 | 1030 Kg/Ha | 0.0 | 765 | 0.0 | | | |
| | | | | Produktivitas Komoditi Tebu (Gula) | 3.022 Kg/Ha | 1146 Kg/Ha | - | | 2,138.0 | 0.0 | 1169 Kg/Ha | 0.0 | 3587 | 0.0 | | | |
| | | | | Produktivitas Komoditi Kelapa (Kopra) | 1.025 Kg/Ha | 671 Kg/Ha | - | | 971.0 | 0.0 | 681 Kg/Ha | 0.0 | 1694 | 0.0 | | | |
| | | | | Produktivitas Komoditi Cengkeh (Biji Kering) | 517 Kg/Ha | 526 Kg/Ha | - | | 565.0 | 0.0 | 534 Kg/Ha | 0.0 | 559 | 0.0 | | | |
| | | | | Produktivitas Komoditi Kopi | 624 Kg/Ha | 588 Kg/Ha | - | | 669.0 | 0.0 | 589 Kg/Ha | 0.0 | 1212 | 0.0 | | | |
| | | | | Produktivitas Komoditi Kakao | 779 Kg/Ha | 634 Kg/Ha | - | | 807.0 | 0.0 | 704 Kg/Ha | 0.0 | 792 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Kelapa Sawit | 1.351.060.490 Triliun | 95741000 0 Triliun | - | | 1,351,015,700.0 | 0.0 | 1361430 Triliun | 0.0 | 1E+06 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Kopi | 1.362.768.000 Triliun | 11480000 00 Triliun | - | | 2,410,656,000.0 | 0.0 | 1962360 000 Triliun | 0.0 | 2E+06 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Tebu (Gula) | 35.456.850 Triliun | 47475000 Triliun | - | | 350,749,000.0 | 0.0 | 6458000 0 Triliun | 0.0 | 9E+07 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Kelapa (Kopra) | 463.044.000 Triliun | 60800000 0 Triliun | - | | 350,749,000.0 | 0.0 | 5136700 00 Triliun | 0.0 | 5E+08 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering) | 517 Triliun | 27471712 50 Triliun | - | | 1,686,176,000.0 | 0.0 | 2724405 000 Triliun | 0.0 | 2E+09 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Jambu Mete | 2693.080.000 Triliun | 20250000 0 Triliun | - | | 262,080,000.0 | 0.0 | 3375000 00 Triliun | 0.0 | 4E+09 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Pala | 51.720.000 Triliun | 15750000 Triliun | - | | 21,720,000.0 | 0.0 | 1767000 0 Triliun | 0.0 | 6E+07 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Lada | 679.000.000 Triliun | 12025000 00 Triliun | - | | 656,500,000.0 | 0.0 | 1258510 000 Triliun | 0.0 | 7E+07 | 0.0 | | | |
| | | | | Nilai Produksi Komoditi Kakao | 3.352.250.000 Triliun | 36250000 00 Triliun | - | | 4,456,865,000.0 | 0.0 | 6030760 000 Triliun | 0.0 | 4E+09 | 0.0 | | | |
| | | | | Volume Produksi Komoditi Kelapa Sawit | 90.493 Ton | 90580 Ton | - | | 82,318.0 | 0.0 | 90762 Ton | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | OPD | | | | | |
|------|----|--|---|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Kopi | 32.476 Ton | 32064 Ton | - | 33,597.0 | 0.0 | 32706 Ton | 0.0 | 34358 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Tebu (Gula) | 7.150 Ton | 3165 Ton | - | 5,070.0 | 0.0 | 3229 Ton | 0.0 | 8488 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Produktivitas Komoditi Pala | 279 Kg/Ha | 124 Kg/Ha | - | 280.0 | 0.0 | 127 Kg/Ha | 0.0 | 217 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Produktivitas Komoditi Lada | 721 Kg/Ha | 737 Kg/Ha | - | 700.0 | 0.0 | 748 Kg/Ha | 0.0 | 700 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Kelapa (Kopra) | 77.174 Ton | 50608 Ton | - | 71,887.0 | 0.0 | 51367 Ton | 0.0 | 70900 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Lada | 6.790 Ton | 6631 Ton | - | 6,631.0 | 0.0 | 6730 Ton | 0.0 | 6839 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Kakao | 134.090 Ton | 135828 Ton | - | 124,952.0 | 0.0 | 150769 Ton | 0.0 | 113366 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Pala | 431 Ton | 183 Ton | - | 451.0 | 0.0 | 186 Ton | 0.0 | 523 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Jambu Mete | 13.454 Ton | 13235 Ton | - | 13,141.0 | 0.0 | 13500 Ton | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Volume Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering) | 18.033 Ton | 18511 Ton | - | 19,869.0 | 0.0 | 18789 Ton | 0.0 | 20416 | 0.0 | | | | |
| | | | | | Produktivitas Komoditi Jambu Mete | 408 Kg/Ha | 403 Kg/Ha | - | 415.0 | 0.0 | 411 Kg/Ha | 0.0 | 417 | 0.0 | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PERKEBUNAN | | % Peningkatan jumlah hasil panen tanaman perkebunan | 100% | 100 % | 1,721,825,000.0 | 3,412,425,000.0 | 100.0 | 3,362,497,109.0 | 100 % | 11,942,352,003.0 | 7,266,900,000.0 | 0 | 0.0 | Dinas Perkebunan | |
| | | | | | Cakupan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam produksi tanaman perkebunan | 2 Jenis | 3 Jenis | - | | 2.0 | 0.0 | 5 Jenis | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |
| 2.00 | 02 | 18 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 4,898,086,233.0 | 6,636,696,261.0 | 100.0 | 6,261,388,524.0 | 100 % | 4,200,000,000.0 | 12,356,814,200.0 | 100 | 10,565,698,300.0 | Dinas Perkebunan | |
| 2.00 | 02 | 50 | | | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 1,679,486,400.0 | | 100.0 | 1,974,663,753.0 | 100 % | 392,215,000.0 | 2,858,546,800.0 | 100 | 1,594,698,641.0 | | |
| 2.00 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 429,871,063.0 | 330,146,063.0 | 100.0 | 323,308,163.0 | 100 % | 600,000,000.0 | 3,152,938,125.0 | 100 | 1,499,999,450.0 | Dinas Perkebunan | |
| 2.00 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 197,800,000.0 | | 0,00 | 100.0 | 0.0 | 100 % | 482,800,000.0 | 1,237,339,000.0 | 100 | 685,478,300.0 | Dinas Perkebunan |
| 2.00 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | Kelembagaan | | | 45,628,892,179.0 | 37,758,912,785.0 | | 35,500,866,689.50 | | 45,732,314,517.03 | 25,809,128,300.0 | | 18,826,841,841.20 | | |
| 2.00 | 03 | Kehutanan | | | Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu | 1450 Ton | 283 Ton | - | 45,628,892,179.0 | 37,758,912,785.0 | | 35,500,866,689.50 | | 45,732,314,517.03 | 25,809,128,300.0 | | 18,826,841,841.20 | |
| 2.00 | 03 | Dinas Kehutanan | | | Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan | 320613.2 M3 | 64122.65 M3 | - | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 03 | | PROGRAM PENATAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN (Prioritas) | | Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan | 12480579 7 Bibit | 1000000 Bibit | 14,517,881,500.0 | 330,000,000.0 | 67.05 | 329,924,600.0 | 64.67 % | 4,205,000,000.0 | 2,411,330,000.0 | 67.05 | 674,884,482.20 | Dinas Kehutanan | |
| | | | | | Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu | 1450 Ton | 283 Ton | - | | 4,852.26 | 0.0 | 339.6 Ton | 0.0 | 48491 | 0.0 | | | |
| | | | | | Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan | 320613.2 M3 | 64122.65 M3 | - | | 61,578.01 | 0.0 | 76947.18 M3 | 0.0 | 1E+06 | 0.0 | | | |
| | | | | | | | | | | 864,612.0 | 13,779,919,976.0 | 1000000 Bibit | 14,967,300,000.0 | 1,104,832,500.0 | 145786 | 1,034,660,480.0 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|--------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|------------------|--------------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.00 | 03 | 21 | PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Prioritas) | Cakupan Luas Lahan Krisis yang Direhabilitasi (Prioritas) | 101359.4 1 Ha | 1000 Ha | - | 14,135,579,776.0 | 20,508.0 | 0.0 | 1000 Ha | 0.0 | - | 510 | 0.0 | Dinas Kehutanan |
| | | | | Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas) | 58.40 | 58.6 | - | | 54.94 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | - | 54.94 | 0.0 | |
| 2.00 | 03 | 22 | PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL | Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial | 43953 Ha | 44953 Ha | 1,173,104,500.0 | 1,157,082,550.0 | 79,393.0 | 1,156,732,550.0 | 45953 Ha | 2,860,000,000.0 | 5,914,775,300.0 | 2818 | 1,049,513,888.0 | Dinas Kehutanan |
| | | | | Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina | 173 (HD = 21 dan HKM = 152) | 32 Kelompok | - | | 36.0 | 0.0 | 32 Kelompok | 0.0 | - | 107 | 0.0 | |
| 2.00 | 03 | 23 | PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM | % Tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani | 100% | 100 % | 3,742,210,000.0 | 3,406,689,448.0 | 100.0 | 3,402,949,948.0 | 100 % | 4,065,000,000.0 | 1,419,860,800.0 | 100 | 1,215,855,138.0 | Dinas Kehutanan |
| 2.00 | 03 | 24 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan | 100% | 100 % | 1,475,010,000.0 | 1,475,010,000.0 | 100.0 | 1,382,411,000.0 | 100 % | 3,220,000,000.0 | 340,702,000.0 | 100 | 339,000,000.0 | Dinas Kehutanan |
| 2.00 | 03 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 11,554,445,179.0 | 11,108,304,511.0 | 100.0 | 10,007,042,223.0 | 100 % | 11,820,314,517.0 | 13,322,334,700.0 | 118.03 | 13,234,697,782.0 | Dinas Kehutanan |
| 2.00 | 03 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 7,273,566,000.0 | 4,511,646,500.0 | 100.0 | 3,842,864,737.50 | 100 % | 2,991,700,000.0 | 708,903,000.0 | 100 | 697,247,738.0 | Dinas Kehutanan |
| 2.00 | 03 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,456,000,000.0 | 1,334,600,000.0 | 100.0 | 1,305,422,655.0 | 100 % | 1,253,000,000.0 | 447,940,000.0 | 94.74 | 442,762,363.0 | Dinas Kehutanan |
| 2.00 | 03 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 80 % | 3,367,075,000.0 | 300,000,000.0 | 85.53 | 293,599,000.0 | 80 % | 350,000,000.0 | 138,450,000.0 | 94.2 | 138,219,970.0 | Dinas Kehutanan |
| 2.00 | 04 | Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | 19,274,121,584.0 | 17,762,648,901.09 | | 14,106,804,625.0 | | 22,617,808,261.95 | 4,074,622,624.57 | | 3,467,939,377.0 | |
| 2.00 | 04 | | | | | | 19,274,121,584.0 | 17,762,648,901.09 | | 14,106,804,625.0 | | 22,617,808,261.95 | 4,074,622,624.57 | | 3,467,939,377.0 | |
| 2.00 | 04 | 01 | PROGRAM PENYEDIAAN LISTRIK DAN KETAHANAN ENERGI (Prioritas) | % Desa Berlistrik (Prioritas) | 95.8% | 97 % | 4,655,000,000.0 | 4,930,689,284.0 | 98.51 | 4,873,168,428.0 | 98.5 % | 7,965,551,012.0 | 605,700,100.0 | 98.18 | 327,185,708.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | % Rumah Tangga Pengguna Listrik | 96% | 97 % | - | | 98.0 | 0.0 | 97.5 % | 0.0 | - | 97.53 | 0.0 | |
| | | | | Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun | 1.028 M3 | 120 M3 | - | | 120.0 | 0.0 | 1244 M3 | 0.0 | - | 12 | 0.0 | |
| 2.00 | 04 | 02 | PROGRAM HILIRISASI PERTAMBANGAN (Prioritas) | Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas) | Rp 12.186.10 9.875.000 | 13821750 000000 Rp | 1,225,000,000.0 | 625,000,000.0 | ##### ###### | 619,073,447.0 | 1520392 5000000 Rp | 1,227,776,582.0 | 32,550,000.0 | 2E+13 | 32,040,400.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2.00 | 04 | 03 | PROGRAM EKSPLORASI SUMBER DAYA GELOGI, KONSERVASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH (Prioritas) | Luas Wilayah Pemetaan (Prioritas) | 4.558 Ha | 9200 Ha | 4,869,000,000.0 | 4,442,320,417.1 | 9,200.0 | 1,543,336,086.0 | 8500 Ha | 4,880,036,064.0 | 585,570,000.0 | 0 | 386,229,890.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | Jumlah Cadangan Sumber Daya (Prioritas) | 364.460.0 00 Ton | 2400000 Ton | - | | 2,300,000.0 | 0.0 | 4000000 Ton | 0.0 | - | 0 | 0.0 | |
| | | | | Jumlah Pembangunan Sumur Bor | 16 Unit | 23 Unit | - | | 6.0 | 0.0 | 15 Unit | 0.0 | - | 3 | 0.0 | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|-------------------|--|---|----------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.00 | 04 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN AIR TANAH | % Pertambangan Tanpa Izin | 11,3% | 23.95 % | 459,350,000.0 | 489,350,000.0 | 15.50 | 488,379,099.0 | 31.49 % | 460,391,162.0 | 26,575,000.0 | 6.56 | 26,500,426.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 2.00 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN EKSPLORASI | % Pelayanan Usaha Minerba dan Air Tanah | 45% | 50 % | 514,541,500.0 | 524,312,100.0 | 50.0 | 522,638,525.0 | 60 % | 515,707,759.0 | 208,564,100.0 | 60 | 205,313,192.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 2.00 | 04 | 20 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN | Jumlah Izin/Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan | 32 Izin/Reko mtek | 50 Izin/Reko mtek | 1,516,800,000.0 | 1,261,030,000.0 | 77.0 | 1,186,323,269.0 Izin/Reko mtek | 52 Izin/Reko mtek | 1,520,237,975.0 | 353,782,500.0 | 26 | 327,363,206.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | | | Jumlah izin Rekomendasi teknis pemanfaatan minerba yang diterbitkan | 594 Izin/Reko mtek | 260 Izin/Reko mtek | - | | 338.0 | 0.0 Izin/Reko mtek | 289 Izin/Reko mtek | 0.0 | - | 120 | 0.0 | | |
| | | | | Jumlah Izin/Rekomendasi teknik pemanfaatan EBT dan ketenagalistrikan yang diterbitkan | 72 Izin/Reko mtek | 115 Izin/Reko mtek | - | | 176.0 | 0.0 Izin/Reko mtek | 121 Izin/Reko mtek | 0.0 | - | 93 | 0.0 | | |
| 2.00 | 04 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,848,253,100.0 | 2,785,606,800.0 | 100.0 | 2,643,394,384.0 | 100 % | 2,878,161,981.0 | 1,709,584,524.57 | 100 | 1,671,583,141.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 2.00 | 04 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 1,417,809,800.0 | 1,244,220,400.0 | 100.0 | 1,209,603,300.0 | 100 % | 1,421,023,404.0 | 451,265,200.0 | 100 | 408,812,214.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 2.00 | 04 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,096,797,184.0 | 1,040,919,900.0 | 100.0 | 1,020,888,087.0 | 100 % | 1,099,283,182.0 | 101,031,200.0 | 100 | 82,911,200.0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 2.00 | 04 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % Kehadiran pegawai | 100% | 100 % | 671,570,000.0 | 419,200,000.0 | - | - | - | 649,639,141.0 | - | - | - | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | | | Cakupan aparaturs yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya | 100% | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 05 | Perdagangan | | | | | 11,871,143,523.0 | 11,506,037,523.0 | | 11,066,089,672.0 | | 14,398,050,628.56 | 6,770,565,809.0 | | 6,357,136,887.0 | | |
| 2.00 | 05 | Dinas Perdagangan | | | | | 11,871,143,523.0 | 11,506,037,523.0 | | 11,066,089,672.0 | | 14,398,050,628.56 | 6,770,565,809.0 | | 6,357,136,887.0 | | |
| 2.00 | 05 | 01 | PRGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Prioritas) | Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri | 4 Pameran | 4 Pameran | 1,605,000,000.0 | 1,487,000,000.0 | 4.0 | 1,455,256,558.0 | 4 Pameran | 2,608,637,889.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Perdagangan | |
| | | | | Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha (Prioritas) | 1 MoU | 2 MoU | - | | 2.0 | 0.0 | 2 MoU | 0.0 | - | 0 | 0.0 | | |
| 2.00 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas) | Nilai Total Ekspor | 11643500 | 1257498000 Rp (Milyar) | 4,647,714,000.0 | 4,736,508,000.0 | 1,257,498,000.0 | 4,708,073,336.0 | 1358097 840 Rp (Milyar) | 6,158,248,497.0 | 1,424,356,000.0 | 1E+09 | 1,385,745,340.0 | Dinas Perdagangan | |
| | | | | Nilai eksport bersih perdagangan (Prioritas) | 57950717 | 125749800 Juta \$ US | - | | 125,749,800.0 | 0.0 | 1358097 84 Juta \$ US | 0.0 | - | 1E+08 | 0.0 | | |
| 2.00 | 05 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina | 0.74% | 0.89 % | 471,250,000.0 | 471,250,000.0 | 0.89 | 450,962,606.0 | 0.98 % | 472,318,134.0 | 284,200,000.0 | 0.98 | 279,648,500.0 | Dinas Perdagangan | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|----------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 2.00 | 05 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Jumlah izin usaha perdagangan | 4 Izin | 5 Izin | 1,100,000,000.0 | 1,060,000,000.0 | 5.0 | 864,182,481.0 | 5 Izin | 1,102,493,257.0 | 1,520,855,000.0 | 5 | 1,394,965,454.0 | Dinas Perdagangan | |
| | | | | Nilai perdagangan dalam negeri | 17.000.000 | 20000000 Rp | - | | 20,000,000.0 | 0.0 | 3000000 0 Rp | 0.0 | | 3E+07 | 0.0 | | |
| 2.00 | 05 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PRODUK | Peningkatan jumlah pemasaran komoditi ekspor | 5 Jenis | 10 Jenis | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 10.0 | 199,750,000.0 | 15 Jenis | 200,453,320.0 | | 5 | 0.0 | Dinas Perdagangan | |
| | | | | Peningkatan jumlah informasi pemasaran komoditi ekspor | 5 Informasi | 10 Informasi | - | | 10.0 | 0.0 | 15 Informasi | 0.0 | | 5 | 0.0 | | |
| | | | | Peningkatan jumlah lembaga kerjasama promosi produk perdagangan | 5 Lembaga | 10 Lembaga | - | | 10.0 | 0.0 | 10 Lembaga | 0.0 | | 0 | 0.0 | | |
| 2.00 | 05 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,284,242,000.0 | 2,493,242,000.0 | 100.0 | 2,369,439,622.0 | 100 % | 2,289,419,457.0 | 3,324,265,750.0 | 100 | 3,098,676,607.0 | Dinas Perdagangan | |
| 2.00 | 05 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 800,800,000.0 | 522,800,000.0 | 100.0 | 513,693,218.0 | 100 % | 802,615,092.6 | 95,000,000.0 | 100 | 78,821,886.0 | Dinas Perdagangan | |
| 2.00 | 05 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 466,937,523.0 | 535,237,523.0 | 100.0 | 504,731,851.0 | 100 % | 467,995,882.0 | 121,889,059.0 | 100 | 119,279,100.0 | Dinas Perdagangan | |
| 2.00 | 05 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 295,200,000.0 | | 0,00 | 0.0 | 100 % | 295,869,100.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Perdagangan | |
| 2.00 | 06 | | Perindustrian | | | | 9,905,521,350.0 | 10,637,028,350.0 | | 10,382,522,647.0 | | 22,925,714,982.84 | 11,937,575,800.0 | | 9,598,786,417.60 | | |
| 2.00 | 06 | | Dinas Perindustrian | | | | 9,905,521,350.0 | 10,637,028,350.0 | | 10,382,522,647.0 | | 22,925,714,982.84 | 11,937,575,800.0 | | 9,598,786,417.60 | | |
| 2.00 | 06 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI (Prioritas) | Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya | 6 Sentra | 2 Sentra | 508,800,000.0 | 1,033,133,500.0 | 2.0 | 971,165,085.0 | 2 Sentra | 7,350,000,000.0 | 1,414,383,000.0 | 2 | 1,009,467,606.0 | Dinas Perindustrian | |
| | | | | Jumlah kawasan pergudangan yang tertata | 1 Kawasan | 2 Kawasan | - | | 2.0 | 0.0 | 2 Kawasan | 0.0 | | 2 | 0.0 | | |
| | | | | % Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas) | 6% | 10 % | - | | 10.0 | 0.0 | 10 % | 0.0 | | 10 | 0.0 | | |
| 2.00 | 06 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI | Jumlah produk industri yang memenuhi standar | 6408 produk | 4 Produk | 1,581,485,000.0 | 1,518,195,000.0 | 4.0 | 1,455,797,443.0 | 4 Produk | 3,400,000,000.0 | 1,089,454,112.0 | 4 | 1,084,323,822.0 | Dinas Perindustrian | |
| 2.00 | 06 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | Cakupan kelompok bina kelompok pengrajin | 10% | 5 % | 1,890,930,950.0 | 2,176,930,950.0 | 5.0 | 2,136,120,843.0 | 5 % | 3,600,000,000.0 | 616,223,700.0 | 5 | 572,443,128.0 | Dinas Perindustrian | |
| | | | | % Industri kecil dan menengah yang berkembang | 13.92% | 10 % | - | | 10.0 | 0.0 | 10 % | 0.0 | | 10 | 0.0 | | |
| 2.00 | 06 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI | Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan | 265 Industri | 1 Industri | 1,103,962,250.0 | 1,174,684,500.0 | 1.0 | 1,133,958,401.0 | 1 Industri | 2,600,000,000.0 | 313,172,500.0 | 1 | 180,001,501.0 | Dinas Perindustrian | |
| | | | | Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar | 0 unit | 1 Unit | - | | 1.0 | 0.0 | 1 Unit | 0.0 | | 1 | 0.0 | | |
| 2.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 3,840,253,150.0 | 3,636,791,360.0 | 100.0 | 3,598,619,367.0 | 100 % | 4,533,714,982.8 | 2,784,039,173.0 | 100 | 2,756,267,594.0 | Dinas Perindustrian | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 643,440,000.0 | 775,315,000.0 | 100.0 | 765,972,369.0 | 100 % | 721,000,000.0 | 4,674,706,300.0 | 100 | 2,979,915,951.60 | Dinas Perindustrian |
| 2.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 290,650,000.0 | 321,978,040.0 | 100.0 | 320,889,139.0 | 100 % | 585,000,000.0 | 1,045,597,015.0 | 100 | 1,016,366,815.0 | Dinas Perindustrian |
| 2.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 46,000,000.0 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 100 % | 136,000,000.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Perindustrian |
| 2.00 | 07 | | Transmigrasi | | | | 1,142,600,000.0 | 495,600,000.0 | | 489,690,734.0 | | 796,200,000.0 | 223,312,500.0 | | 220,713,400.0 | |
| 2.00 | 07 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | 1,142,600,000.0 | 495,600,000.0 | | 489,690,734.0 | | 796,200,000.0 | 223,312,500.0 | | 220,713,400.0 | |
| 2.00 | 07 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI | % Penempatan Transmigrasi | 100% | 100 % | 1,142,600,000.0 | 495,600,000.0 | 98.76 | 489,690,734.0 | 100 % | 796,200,000.0 | 223,312,500.0 | 90 | 220,713,400.0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.00 | 08 | | Kelautan dan Perikanan | | | | 75,429,977,368.0 | 52,843,838,674.99 | | 48,455,819,063.0 | | 75,600,946,774.54 | 25,008,357,200.0 | | 20,933,730,255.0 | |
| 2.00 | 08 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | 75,429,977,368.0 | 52,843,838,674.99 | | 48,455,819,063.0 | | 75,600,946,774.54 | 25,008,357,200.0 | | 20,933,730,255.0 | |
| 2.00 | 08 | 01 | PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas) | Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas) | Rp.17.953 .535.596.2 00 | 18851212 376010 Rp | 47,368,673,650.0 | 26,528,285,107.0 | 24,400,000,000.000.0 | 24,212,459,551.0 | 1979377 2994810 Rp | 43,608,000,000.0 | 13,361,642,651.0 | 2E+13 | 10,090,937,666.0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2.00 | 08 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah produksi perikanan tangkap | 363.853 Ton | 369365 Ton | 1,652,742,400.0 | 1,547,235,000.0 | 398,565.3 | 1,333,764,395.0 | 374981 Ton | 2,398,000,000.0 | | 369043 | 0.0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 3.531.233. 6 Ton | 4656858 Ton | - | | 3,662,761.4 | 0.0 | 5088024 Ton | 0.0 | | 4E+06 | 0.0 | |
| | | | | Jumlah produksi garam rakyat | 86.834.94 Ton | 91176.69 Ton | - | | 140,338.9 | 0.0 | 95735.52 Ton | 0.0 | | 40083 | 0.0 | |
| | | | | Volume ekspor produk KP | 130.623.1 Ton | 143685.41 Ton | 302,860,000.0 | | 166,373.2 | 244,990,317.0 | 158053.9 5 Ton | 3,270,000,000.0 | | 158010 | 0.0 | |
| 2.00 | 08 | 03 | PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING | Nilai ekspor produk KP | 340.390.4 US\$ Juta | 374429.44 US\$ Juta | - | 249,060,000.0 | 355,301.7 | 0.0 | 411872.3 8 US\$ Juta | 0.0 | | 330792 | 0.0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi | 25.648.77 Ton | 26931.21 Ton | - | | 25,077.0 | 0.0 | 28277.77 Ton | 0.0 | | 12103 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | 101.437 Ha | 941210.88 Ha | 11,099,415,500.0 | | 1,008,321.5 | 8,907,004,877.0 | 1008321. 53 Ha | 11,560,000,000.0 | 4,435,277,600.0 | 1E+06 | 4,292,761,900.0 | |
| 2.00 | 08 | 04 | PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT | % Penurunan tindakan IUU Fishing | 11.6% | 9.83 % | - | 9,214,195,800.0 | 9.8 | 0.0 | 8.03 % | 0.0 | | 0 | 0.0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil | 2% | 20 % | - | | 8.7 | 0.0 | 40 % | 0.0 | | 10.87 | 0.0 | |
| | | | | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 9,296,678,218.0 | | 8,224,741,188.0 | 100.0 | 7,231,206,175.0 | 100 % | 9,295,189,774.5 | 5,479,057,649.0 | 100 | 5,109,552,361.0 |
| 2.00 | 08 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 3,752,357,000.0 | 5,471,945,980.0 | 94.5 | 4,995,080,423.0 | 100 % | 3,576,757,000.0 | 1,188,361,300.0 | 100 | 1,028,532,450.0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2.00 | 08 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,677,550,600.0 | 1,601,675,600.0 | 95.4 | 1,528,313,325.0 | 100 % | 1,590,000,000.0 | 543,018,000.0 | 100 | 410,945,878.0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|---|---|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.00 | 08 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 279,700,000.0 | 6,700,000.0 | 100.0 | 3,000,000.0 | 100 % | 303,000,000.0 | 1,000,000.0 | 100 | 1,000,000.0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3.00 | | | Fungsi Penujung Pemerintahan | | | | 513,458,612,773.50 | 581,983,033,726.75 | | 535,524,150,041.11 | | 538,261,587,095.29 | 599,547,249,341.76 | | 500,789,169,530.85 | |
| 3.00 | 01 | | Perencanaan Pembangunan | | | | 26,963,476,000.0 | 27,266,076,000.0 | | 24,200,838,078.0 | | 28,327,537,926.0 | 31,873,285,648.0 | | 21,075,633,562.0 | |
| 3.00 | 01 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 26,963,476,000.0 | 27,266,076,000.0 | | 24,200,838,078.0 | | 28,327,537,926.0 | 31,873,285,648.0 | | 21,075,633,562.0 | |
| 3.00 | 01 | 01 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas) | % Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas) | 100% | 100 % | 10,771,598,000.0 | 10,747,395,000.0 | 100.0 | 9,429,867,096.0 | 100 % | 12,098,959,455.0 | 8,779,439,223.0 | 100 | 8,639,264,451.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas) | 98.63% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 100 | 0.0 | |
| | | | | % Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas) | 96.69% | 97 % | - | | 97.0 | 0.0 | 97.5 % | 0.0 | | 97.5 | 0.0 | |
| 3.00 | 01 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (Prioritas) | Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas) | 0 Kawasan | 3 Kawasan | 689,310,000.0 | 689,310,000.0 | 3.0 | 594,852,993.0 | 3 Kawasan | 690,872,388.0 | 1,505,175,271.0 | 0 | 0.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3.00 | 01 | 03 | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 10 Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 1,315,000,000.0 | 1,315,000,000.0 | 10.0 | 896,360,706.0 | 10 Rekomendasi | 1,317,980,576.0 | 970,469,705.0 | 10 | 925,007,597.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3.00 | 01 | 04 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian | 7 Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 924,790,000.0 | 849,790,000.0 | 8.0 | 780,707,958.0 | 8 Rekomendasi | 946,931,459.0 | 2,119,386,112.0 | 0 | 0.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3.00 | 01 | 05 | PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM | Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan | 4 Rekomendasi | 4 Rekomendasi | 282,960,600.0 | 282,960,600.0 | 4.0 | 249,245,100.0 | 4 Rekomendasi | 283,601,958.0 | 349,649,729.0 | 0 | 0.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam | 4 Rekomendasi | 4 Rekomendasi | - | | 4.0 | 0.0 | 4 Rekomendasi | 0.0 | | 0 | 0.0 | |
| 3.00 | 01 | 06 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya ke dalam dokumen Perencanaan | 6 Rekomendasi | 4 Rekomendasi | 4,746,240,000.0 | 4,746,240,000.0 | 4.0 | 4,513,314,200.0 | 4 Rekomendasi | 4,739,959,284.0 | 5,562,650,000.0 | 0 | 0.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya | 6 Rekomendasi | 4 Rekomendasi | - | | 4.0 | 0.0 | 4 Rekomendasi | 0.0 | | 0 | 0.0 | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|---|--|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.00 | 01 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 3,488,769,500.0 | 4,040,386,500.0 | 97.0 | 3,518,616,602.0 | 100 % | 3,551,801,799.0 | 7,918,673,908.0 | 100 | 7,591,636,123.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 3.00 | 01 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 3,282,466,400.0 | 3,348,308,420.0 | 100.0 | 3,170,734,480.0 | 100 % | 3,231,774,968.0 | 3,379,913,700.0 | 100 | 2,850,925,152.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 3.00 | 01 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,085,341,500.0 | 1,146,985,480.0 | 100.0 | 969,314,943.0 | 100 % | 1,087,801,532.0 | 931,702,000.0 | 101 | 885,307,339.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 3.00 | 01 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 377,000,000.0 | 99,700,000.0 | 100.0 | 77,824,000.0 | 100 % | 377,854,507.0 | 356,226,000.0 | 100 | 183,492,900.0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 3.00 | 02 | Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) | | | | | 67,803,095,037.0 | 70,254,620,037.0 | | 65,435,987,235.0 | | 80,263,117,042.75 | 71,740,342,962.11 | | 65,409,335,963.0 | | |
| 3.00 | 02 | Badan Pendapatan Daerah | | | | | 45,130,007,184.0 | 47,116,532,184.0 | | 44,287,377,149.0 | | 55,232,298,750.49 | 51,619,341,321.0 | | 46,080,826,780.0 | | |
| 3.00 | 02 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH | Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling | 100% | 100 % | 237,250,000.0 | 277,250,000.0 | 100.0 | 273,344,103.0 | 100 % | 269,800,000.0 | 376,599,735.0 | 100 | 221,101,172.0 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 3.00 | 02 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | % Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola banenda | 6,68% | 5 % | 14,170,932,400.0 | 15,850,469,500.0 | 5.0 | 15,334,076,861.0 | 5 % | 17,416,084,915.0 | 18,244,978,800.0 | 5 | 16,212,294,514.0 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 3.00 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 18,147,117,760.0 | 18,323,515,460.0 | 100.0 | 16,892,350,969.0 | 100 % | 21,145,902,475.5 | 19,986,062,926.0 | 100 | 18,716,404,746.0 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 3.00 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 10,339,597,224.0 | 11,666,110,224.0 | 100.0 | 10,836,027,954.0 | 100 % | 13,805,155,600.0 | 11,662,144,890.0 | 100 | 9,705,715,048.0 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 3.00 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 659,429,800.0 | 976,337,000.0 | 100.0 | 928,727,262.0 | 100 % | 810,055,760.0 | 912,488,875.0 | 100 | 826,874,800.0 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 3.00 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 1,575,680,000.0 | 22,850,000.0 | 100.0 | 22,850,000.0 | 100 % | 1,785,300,000.0 | 437,066,095.0 | 100 | 398,436,500.0 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 3.00 | 02 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 22,673,087,853.0 | 23,138,087,853.0 | | 21,148,610,086.0 | | 25,030,818,292.26 | 20,121,001,641.11 | | 19,328,509,183.0 | | |
| | | | | Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah | 1.03 | 1 | 3,152,000,000.0 | | | 1.0 | 3,128,574,445.0 | 1 | 3,667,260,000.0 | 3,562,350,600.0 | 1.04 | 3,312,337,935.0 | |
| | | | | Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung | 0.42 | 0.43 | - | | | 0.4 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | | 0.25 | 0.0 | |
| | | | | % Belanja Modal terhadap total APBD | 11.33% | 12 % | - | | | 11.2 | 0.0 | 12 % | 0.0 | | 10.32 | 0.0 | |
| | | | | % Belanja Pendidikan terhadap total APBD | 35.78% | 20 % | - | | | 42.2 | 0.0 | 20 % | 0.0 | | 46.74 | 0.0 | |
| | | | | % Belanja Kesehatan terhadap total APBD | 10% | 10 % | - | | | 9.0 | 0.0 | 10 % | 0.0 | | 11.12 | 0.0 | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|---------------------------------------|--|--|----------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|--------|-------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | |
| 1 | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.00 | 02 | 01 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH | % Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD | 70.35% | 70 % | - | 3,314,000,000.0 | 70.7 | 0.0 | 70 % | 0.0 | - | 79.96 | 0.0 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | % Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD | 14.08% | 15 % | - | | 17.5 | 0.0 | 16 % | 0.0 | - | 17.2 | 0.0 | |
| | | | | % Belanja Langsung terhadap Total APBD | 29.65% | 30 % | - | | 29.3 | 0.0 | 30 % | 0.0 | - | 20.04 | 0.0 | |
| | | | | % Program/Kegiatan yang tidak terlaksana | 0% | 0 % | - | | 0.7 | 0.0 | 0 % | 0.0 | - | 0 | 0.0 | |
| | | | | % SILPA | 1.78% | 2 % | - | | 0.6 | 0.0 | 2 % | 0.0 | - | 3.48 | 0.0 | |
| | | | | Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | - | 0 | 0.0 | |
| | | | | % Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah | 98.20% | 98 % | 2,283,500,000.0 | | 100.0 | 2,403,122,956.0 | 98 % | 2,794,417,500.0 | 2,309,525,590.0 | 69.77 | 2,073,802,362.0 | |
| 3.00 | 02 | 02 | PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH | Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah | 2 Hari | 2 Hari | - | 2,483,500,000.0 | 2.0 | 0.0 | 2 Hari | 0.0 | - | 2 | 0.0 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3.00 | 02 | 03 | | % Tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan | 100% | 100 % | 2,654,310,284.0 | | 100.0 | 2,475,862,351.0 | 100 % | 3,167,081,835.4 | 1,515,143,800.0 | 0 | 1,510,224,751.0 | |
| | | | | % Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | - | 100 | 0.0 | |
| 3.00 | 02 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | % Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu | 100% | 100 % | 1,848,500,000.0 | 1,959,725,000.0 | 100.0 | 1,758,840,203.0 | 100 % | 2,357,242,500.0 | 1,394,986,272.0 | 0 | 1,287,847,252.0 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3.00 | 02 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 8,704,212,044.7 | 8,507,589,044.7 | 100.0 | 7,341,097,363.0 | 100 % | 8,215,253,104.9 | 7,226,378,200.0 | 61.36 | 7,089,163,478.0 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3.00 | 02 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 2,095,553,420.0 | 1,966,397,420.0 | 100.0 | 1,861,283,592.0 | 100 % | 2,281,733,550.0 | 2,259,397,592.0 | 21.12 | 2,228,122,368.0 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3.00 | 02 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,502,157,104.3 | 1,647,211,104.3 | 100.0 | 1,564,823,176.0 | 100 % | 1,663,667,889.8 | 1,565,728,887.1 | 22.26 | 1,541,869,037.0 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3.00 | 02 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 432,855,000.0 | 655,355,000.0 | 100.0 | 615,006,000.0 | 100 % | 884,161,912.1 | 287,490,700.0 | 30 | 285,142,000.0 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3.00 | 03 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 30,064,910,772.0 | 34,359,773,758.0 | | 29,056,107,651.0 | | 30,133,055,826.95 | 18,983,200,922.0 | | 16,235,154,370.58 | |
| 3.00 | 03 | Badan Kepegawaian Daerah | | | | | 13,201,946,303.0 | 14,689,760,289.0 | | 10,679,139,296.0 | | 13,231,869,802.96 | 12,031,043,575.0 | | 10,396,833,871.0 | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------|------------------|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.00 | 03 | 02 | PROGRAM PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI APARATUR (Prioritas) | Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas) | 65% | 75 % | 2,963,200,000.0 | 4,107,948,535.0 | 75.0 | 1,981,003,311.0 | 75 % | 2,655,000,000.0 | 2,186,019,930.0 | 75 | 1,701,907,330.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | 03 | PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN | % Terisinya formasi | 100% | 100 % | 90,950,000.0 | 83,893,464.0 | 100.0 | 83,893,464.0 | 100 % | 150,000,000.0 | 42,000,000.0 | 100 | 41,240,000.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KINERJA APARATUR | % Pegawai yang menerima penghargaan | 100 % | 100 % | 1,384,436,000.0 | 1,004,712,917.0 | 100.0 | 974,113,538.0 | 100 % | 1,446,000,000.0 | 773,238,200.0 | 100 | 760,902,450.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| | | | | Jumlah pegawai yang menerima tunjangan tambahan penghasilan | 2600 Orang | 26000 Orang | - | | 26,000.0 | 0.0 | 26000 Orang | 0.0 | - | 26000 | 0.0 | |
| 3.00 | 03 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN APARATUR | % Pegawai yang menerima sanksi disiplin | 100 % | 100 % | 553,700,000.0 | 513,833,275.0 | 100.0 | 490,553,961.0 | 100 % | 590,000,000.0 | 469,309,527.0 | 100 | 464,081,347.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | 06 | PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER APARATUR | % Kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar yang telah ditentukan | 80% | 100 % | 1,077,285,000.0 | 1,311,379,563.0 | 100.0 | 707,003,806.0 | 100 % | 1,025,000,000.0 | 1,338,308,108.0 | 100 | 972,592,062.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | 07 | PROGRAM PERENCANAAN DAN INFORMASI ASN | Cakupan pegawai yg direkrut sesuai dengan usulan formasi CPNS | 100% | 100 % | 635,250,000.0 | 619,528,000.0 | 100.0 | 587,123,639.0 | 100 % | 580,000,000.0 | 902,137,560.0 | 100 | 879,680,744.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| | | | | Cakupan ketersediaan data dan informasi kepegawaian | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | - | 100 | 0.0 | |
| 3.00 | 03 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 4,523,475,303.0 | 5,293,722,183.0 | 100.0 | 4,120,473,149.0 | 100 % | 4,845,869,803.0 | 3,832,485,550.0 | 100 | 3,685,821,391.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 1,384,000,000.0 | 1,427,607,500.0 | 100.0 | 1,422,270,376.0 | 100 % | 1,270,000,000.0 | 2,116,654,400.0 | 100 | 1,605,832,147.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 270,950,000.0 | 271,334,852.0 | 100.0 | 261,904,052.0 | 100 % | 310,000,000.0 | 138,190,300.0 | 100 | 135,091,200.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 90 % | 318,700,000.0 | 55,800,000.0 | 90.0 | 50,800,000.0 | 90 % | 360,000,000.0 | 232,700,000.0 | 90 | 149,685,200.0 | Badan Kepergawainan Daerah |
| 3.00 | 03 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | 16,862,964,469.0 | 19,670,013,469.0 | | 18,376,968,355.0 | | 16,901,186,023.99 | 6,952,157,347.0 | | 5,838,320,499.58 | |
| 3.00 | 03 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR (Prioritas) | Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas) | 10% | 100 % | 2,994,519,000.0 | 3,835,409,510.0 | 100.0 | 3,435,789,127.0 | 100 % | 3,001,304,371.0 | 216,710,700.0 | 100 | 214,276,700.0 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3.00 | 03 | 11 | PROGRAM PERENCANAAN KEDIKLATAN | Cakupan ketersediaan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan | 6% | 100 % | 661,727,500.0 | 602,377,500.0 | 99.4 | 545,098,130.0 | 100 % | 663,227,370.0 | 35,000,000.0 | 0 | 34,895,480.0 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3.00 | 03 | 12 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN INOVASI PELATIHAN | Cakupan pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar ISO | 6% | 100 % | 632,386,000.0 | 582,526,000.0 | 100.0 | 508,756,420.0 | 100 % | 633,819,365.0 | 15,844,193.0 | 0 | 15,842,193.0 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|--|--|--|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| 1 | | 2 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.00 | 03 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 10% | 100 % | 7,064,945,026.0 | 8,167,136,018.0 | 100.0 | 7,549,327,173.0 | 100 % | 7,080,958,414.0 | 3,322,019,625.0 | 100 | 3,157,201,097.0 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3.00 | 03 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 10% | 100 % | 3,241,240,787.0 | 4,113,362,035.0 | 100.0 | 4,064,043,662.0 | 100 % | 3,248,587,376.0 | 2,691,258,749.0 | 100 | 1,852,528,020.58 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3.00 | 03 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 6% | 100 % | 1,534,233,656.0 | 1,795,233,656.0 | 100.0 | 1,730,632,000.0 | 100 % | 1,537,713,144.0 | 581,324,080.0 | 100 | 506,271,009.0 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3.00 | 03 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 10% | 100 % | 733,912,500.0 | 573,968,750.0 | 100.0 | 543,321,843.0 | 100 % | 735,575,984.0 | 90,000,000.0 | 100 | 57,306,000.0 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3.00 | 04 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | 11,586,729,523.0 | 12,063,682,023.0 | | 11,356,896,501.0 | | 11,612,991,976.46 | 3,766,548,442.0 | | 2,650,154,176.0 | |
| 3.00 | 04 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | 11,586,729,523.0 | 12,063,682,023.0 | | 11,356,896,501.0 | | 11,612,991,976.46 | 3,766,548,442.0 | | 2,650,154,176.0 | |
| 3.00 | 04 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas) | % Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas) | 20% | 20 % | 5,024,479,800.0 | 5,754,764,800.0 | 20.0 | 5,378,284,085.0 | 20 % | 4,941,641,751.5 | 871,730,142.0 | 20 | 633,621,211.0 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.00 | 04 | 02 | PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH | Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbang dan pemanfaatan iptek daerah | 8 Rekomendasi | 9 Rekomendasi | 2,547,200,000.0 | 2,491,090,000.0 | 9.0 | 2,294,254,590.0 | 9 Rekomendasi | 2,647,200,000.0 | 2,894,818,300.0 | 8 | 2,016,532,965.0 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.00 | 04 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 1,836,829,723.0 | 1,819,652,223.0 | 100.0 | 1,714,462,723.0 | 100 % | 1,840,993,077.0 | | 0 | 0.0 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.00 | 04 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 906,030,000.0 | 865,280,000.0 | 100.0 | 853,588,450.0 | 100 % | 908,083,605.0 | | 0 | 0.0 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.00 | 04 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 928,370,000.0 | 1,082,895,000.0 | 100.0 | 1,072,715,548.0 | 100 % | 930,474,241.0 | | 0 | 0.0 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.00 | 04 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 343,820,000.0 | 50,000,000.0 | 100.0 | 43,591,105.0 | 100 % | 344,599,302.0 | | 0 | 0.0 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.00 | 05 | Sekretariat Dewan | | | | | 228,683,602,471.0 | 232,976,747,661.0 | | 209,901,337,816.0 | | 235,133,938,249.0 | 238,577,774,199.0 | | 196,502,887,237.0 | |
| 3.00 | 05 | Sekretariat DPRD | | | | | 228,683,602,471.0 | 232,976,747,661.0 | | 209,901,337,816.0 | | 235,133,938,249.0 | 238,577,774,199.0 | | 196,502,887,237.0 | |
| 3.00 | 05 | 01 | PROGRAM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT | % Usulan reses yang diakomodir | 100% | 100 % | 33,780,944,500.0 | 34,966,044,500.0 | 100.0 | 34,002,387,130.0 | 100 % | 35,233,914,760.0 | 37,519,271,600.0 | 100 | 32,741,505,427.0 | Sekretariat DPRD |
| 3.00 | 05 | 02 | PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | % Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD | 100% | 100 % | 25,898,668,400.0 | 25,050,898,400.0 | 100.0 | 24,052,168,359.0 | 100 % | 26,953,768,636.0 | 33,780,330,400.0 | 90.38 | 30,530,117,201.0 | Sekretariat DPRD |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|---------------------------|--|---|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.00 | 05 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Cakupan anggota DPRD yang kompeten dibidangnya | 100% | 100 % | 16,318,696,000.0 | 15,232,068,000.0 | 100.0 | 11,947,317,719.0 | 100 % | 18,355,683,917.0 | 3,502,721,615.0 | 78.78 | 2,759,380,332.0 | Sekretariat DPRD | |
| 3.00 | 05 | 04 | PROGRAM PRODUK HUKUM DAERAH | Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya | 56 | 16 Ranperda | 115,316,139,400.0 | 113,137,472,400.0 | 16.0 | 96,881,003,228.0 | 16 Ranperda | 116,636,715,929.0 | 102,103,750,000.0 | 13.36 | 85,234,309,039.0 | Sekretariat DPRD | |
| 3.00 | 05 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 20,411,851,671.0 | 23,176,531,861.0 | 100.0 | 22,908,731,694.0 | 100 % | 20,458,117,125.0 | 25,478,561,495.0 | 90.7 | 23,108,259,038.0 | Sekretariat DPRD | |
| 3.00 | 05 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 10,615,200,000.0 | 15,125,900,000.0 | 100.0 | 14,204,007,686.0 | 100 % | 11,139,260,387.0 | 28,782,731,340.0 | 62.14 | 17,884,627,200.0 | Sekretariat DPRD | |
| 3.00 | 05 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 1,631,900,000.0 | 2,549,600,000.0 | 100.0 | 2,539,885,500.0 | 100 % | 1,635,598,861.0 | 3,192,750,000.0 | 83.38 | 2,662,028,900.0 | Sekretariat DPRD | |
| 3.00 | 05 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 4,710,202,500.0 | 3,738,232,500.0 | 85.0 | 3,365,836,500.0 | 100 % | 4,720,878,634.0 | 4,217,657,749.0 | 37.52 | 1,582,660,100.0 | Sekretariat DPRD | |
| 3.00 | 06 | Sekretariat Daerah | | | | | 110,761,039,006.50 | 156,960,374,283.75 | | 149,204,789,990.95 | | 109,113,371,547.43 | 183,378,109,166.01 | | 158,702,007,672.27 | | |
| 3.00 | 06 | Biro Hukum dan HAM | | | | | 3,054,003,889.0 | 3,780,523,842.0 | | 3,685,914,330.0 | | 3,560,926,086.92 | 1,914,049,191.00 | | 1,908,174,536.0 | | |
| 3.00 | 06 | 07 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH | Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi | 12 Perda | 12 Perda | 324,600,000.0 | 484,639,000.0 | 142.0 | 476,626,473.0 | 12 Perda | 435,335,736.9 | 153,530,204.0 | 12 | 152,896,704.0 | Biro Hukum | |
| | | | | Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi | 50 Perda | 50 Perda | - | | 208.0 | | 0.0 | 50 Perda | 0.0 | | 50 | 0.0 | |
| 3.00 | 06 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENEGERAKAN HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PEMANTAPAN ADVOKASI DAN PENGAMANAN YURIDIS KEROV BIJAKAN PEMERINTAHAN | % LHP aparat fungisional prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti | 98,64 % | 100 % | 440,000,000.0 | 650,000,000.0 | 100.0 | 645,813,428.0 | 100 % | 560,015,926.0 | 713,950,477.0 | 100 | 713,371,094.0 | Biro Hukum | |
| 3.00 | 06 | 09 | PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN PRODUK HUKUM MELALUI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN | Jumlah produk hukum yang disosialisasikan | 2 Jenis | 2 Jenis | 110,050,000.0 | 190,250,000.0 | 2.0 | 187,427,409.0 | 2 Jenis | 220,299,439.0 | | 0 | | 0.0 | Biro Hukum |
| 3.00 | 06 | 10 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM LEGISLASI DAERAH | Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi | 96,11% | 100 % | 587,383,282.0 | 737,983,282.0 | 100.0 | 713,562,400.0 | 100 % | 588,714,644.0 | 141,932,646.0 | 100 | 139,354,346.0 | Biro Hukum | |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 1,352,970,607.0 | 1,478,651,560.0 | 100.0 | 1,449,628,276.0 | 100 % | 1,422,018,624.0 | 780,047,864.0 | 100 | 778,932,392.0 | Biro Hukum | |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 239,000,000.0 | 239,000,000.0 | 100.0 | 212,856,344.0 | 100 % | 259,541,717.0 | 124,588,000.0 | 100 | 123,620,000.0 | Biro Hukum | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|-------------|-----------|--------------------------------|--|--|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 0 % | | - | | | 100 % | 30,000,000.0 | | 0 | 0.0 | Biro Hukum | |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | | - | | | 100 % | 45,000,000.0 | | 0 | 0.0 | Biro Hukum | |
| 3.00 | 06 | Biro Pemerintahan | | | | | 2,680,898,315.0 | 3,965,898,315.0 | | 3,901,494,119.0 | | 2,686,974,833.0 | 3,172,073,769.0 | | 2,735,986,137.0 | | |
| 3.00 | 06 | 11 | PROGRAM PEMERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN | Cakupan ketersediaan dokumen LKPj dan LPPD tepat waktu | 100% | 100 % | 567,119,750.0 | 786,216,150.0 | 100.0 | 767,331,291.0 | 100 % | 578,678,415.0 | 762,019,800.0 | 100 | 678,953,299.0 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | |
| | | | | Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah | 100% | 80 % | | - | 80.0 | | 0.0 | 100 % | | 0.0 | 100 | 0.0 | |
| | | | | Rata-Rata Capaian SPM Kabupaten/Kota | 100% | 80 % | | - | 80.0 | | 0.0 | 100 % | | 0.0 | 100 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Administrasi Pengangkatan Kepala Daerah, Pengangkatan dan Pergantian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota | 100% | 100 % | | - | 100.0 | | 0.0 | 100 % | | 0.0 | 100 | 0.0 | |
| 3.00 | 06 | 13 | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah | 100% | 100 % | 138,510,000.0 | 412,515,800.0 | 100.0 | 404,812,820.0 | 100 % | 138,823,946.0 | | 94,200,000.0 | 100 | 77,791,050.0 | Biro Pemerintahan |
| 3.00 | 06 | 14 | PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH | Peningkatan jumlah kerjasama daerah | 15 MoU | 18 MoU | 38,849,315.0 | 38,849,315.0 | 18.0 | 38,708,450.0 | 20 MoU | 38,937,371.0 | | 90,760,000.0 | 20 | 83,103,880.0 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 3.00 | 06 | 22 | PROGRAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KAB/KOTA | % Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi | 100% | 100 % | 73,000,100.0 | 86,000,100.0 | 100.0 | 75,700,508.0 | 100 % | 73,165,562.0 | | 208,063,300.0 | 100 | 187,373,500.0 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 80 % | 1,594,316,250.0 | 2,413,819,850.0 | 80.0 | 2,402,795,096.0 | 100 % | 1,589,656,213.0 | | 1,806,086,769.0 | 100 | 1,511,227,786.0 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 80 % | 253,573,000.0 | 217,923,000.0 | 80.0 | 201,871,854.0 | 100 % | 254,147,748.0 | | 205,331,200.0 | 100 | 193,738,922.0 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 80 % | 15,529,900.0 | 10,574,100.0 | 80.0 | 10,274,100.0 | 100 % | 13,565,578.0 | | 5,612,700.0 | 100 | 3,797,700.0 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 3.00 | 06 | Biro Humas dan Protokol | | | | | 6,124,306,018.0 | 10,922,378,018.0 | | 10,872,904,448.0 | | 4,300,531,548.59 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 3.00 | 06 | 18 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa | 51 Media Massa | 20 Media Massa | 1,333,500,000.0 | 3,868,500,000.0 | 20.0 | 3,844,075,191.0 | 25 Media Massa | | | | | | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol |
| 3.00 | 06 | 19 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Cakupan ketersediaan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 1,054,750,000.0 | 2,069,750,000.0 | 3.0 | 2,065,888,032.0 | 3 Jenis | 556,007,395.0 | | | | | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|-------------|-----------|----|--|--|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--|--|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 06 | 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEHUMASAN MEDIA SOSIAL | Cakupan Teknologi Informasi yang digunakan | 100% | 100 % | 400,500,000.0 | 749,500,000.0 | 100.0 | 747,127,831.0 | 100 % | 401,407,772.0 | | | | | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 3,030,806,918.0 | 3,460,973,818.0 | 100.0 | 3,446,366,594.0 | 100 % | 3,037,676,538.0 | | 0 | | 0.0 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 250,749,100.0 | 773,654,200.0 | 100.0 | 769,446,800.0 | 100 % | 251,317,446.7 | | 0 | | 0.0 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 54,000,000.0 | 0,0 | - | 0.0 | 100 % | 54,122,396.9 | | 0 | | 0.0 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol |
| 3.00 | 06 | | Biro Perekonomian | | | | 4,256,141,000.0 | 4,171,141,000.0 | | 4,098,464,891.0 | | 4,265,787,959.02 | 4,957,764,364.60 | | 4,225,962,809.0 | | |
| 3.00 | 06 | 16 | PROGRAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKONOMI | Peningkatan Jumlah Lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing | 2 Lembaga | 5 Lembaga | 3,538,291,250.0 | 3,424,337,250.0 | 5.0 | 3,357,170,891.0 | 7 Lembaga | 3,146,311,132.0 | 2,502,797,482.0 | 18.85 | 2,297,882,266.0 | Biro Perekonomian | |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 519,949,750.0 | 582,303,750.0 | 100.0 | 581,938,405.0 | 100 % | 571,128,268.0 | 1,370,966,215.60 | 57.42 | 989,579,249.0 | Biro Perekonomian | |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 164,500,000.0 | 164,500,000.0 | 100.0 | 159,355,595.0 | 100 % | 414,872,855.0 | 885,125,667.0 | 37.63 | 773,847,902.0 | Biro Perekonomian | |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | - | | | | 100 % | 100,000,000.0 | 170,000,000.0 | 0 | 164,653,392.0 | Biro Perekonomian | |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | 33,400,000.0 | 0,0 | - | 0.0 | 100 % | 33,475,704.0 | 28,875,000.0 | 0 | | 0.0 | Biro Perekonomian |
| 3.00 | 06 | | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa | | | | 6,393,267,541.0 | 6,393,267,541.0 | | 6,080,653,208.0 | | 6,407,758,505.94 | 5,939,335,863.76 | | 4,947,288,492.0 | | |
| 3.00 | 06 | 03 | PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN | % Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBD | 100% | 100 % | 786,936,000.0 | 870,812,000.0 | 100.0 | 848,348,456.0 | 100 % | 788,719,667.0 | 697,999,500.0 | 25.6 | 673,458,304.0 | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa | |
| | | | | % Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBN | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 0 | | | |
| 3.00 | 06 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | % Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana | 100% | 100 % | 1,346,200,000.0 | 1,503,837,213.0 | 100.0 | 1,452,370,966.0 | 100 % | 1,349,251,293.0 | 1,720,984,300.0 | 100 | 1,649,602,976.0 | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa | |
| | | | | % Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 100 | | | |
| 3.00 | 06 | 28 | PROGRAM ADMINISTRASI USAHA JASA PEMBANGUNAN | % Capaian Kinerja Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan | 100% | 100 % | 400,495,000.0 | 380,020,000.0 | 100.0 | 357,701,481.0 | 100 % | 401,402,762.9 | | 0 | | 0.0 | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,357,566,541.0 | 2,081,735,328.0 | 100.0 | 1,963,619,651.0 | 100 % | 2,362,910,196.0 | 1,749,690,138.0 | 100 | 1,701,410,884.0 | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | |
|------|----|----|--|--|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--|----|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | |
| 1 | | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 1,183,870,000.0 | 1,184,434,500.0 | 100.0 | 1,087,261,800.0 | 100 % | 1,186,553,357.0 | 1,770,661,925.76 | 100 | 922,816,328.0 | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa | |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 318,200,000.0 | 372,428,500.0 | 100.0 | 371,350,854.0 | 100 % | 318,921,230.0 | | 0 | 0.0 | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa | |
| 3.00 | 06 | | Biro Kesejahteraan | | | | 4,199,100,000.0 | 4,100,313,974.0 | | 4,075,409,527.0 | | 5,208,617,670.03 | 5,187,097,940.0 | | 3,888,394,225.0 | | |
| 3.00 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL (Prioritas) | % Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) | 1.95% | 1.75 % | 241,200,000.0 | 325,004,470.0 | - | 322,763,350.0 | 1.55 % | 1,000,078,478.0 | 51,850,000.0 | 0 | 50,850,000.0 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 3.00 | 06 | 02 | | % Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas) | 36.36% | 10 % | - | - | - | 0.0 | 10 % | 0.0 | | 35.14 | 0.0 | | |
| 3.00 | 06 | 02 | | % Penurunan Kejahatan terhadap Kesusastraan (Prioritas) | 322% | 10 % | - | - | - | 0.0 | 10 % | 0.0 | | 0 | 0.0 | | |
| 3.00 | 06 | 05 | PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEAGAMAAN | % Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan | 100% | 20 % | 1,738,500,000.0 | 1,526,643,504.0 | 20.0 | 1,518,123,173.0 | 20 % | 1,766,096,324.0 | 3,845,416,000.0 | 20 | 2,676,333,450.0 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 3.00 | 06 | 06 | PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | % Pelaksanaan Koordinasi dibidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan dan seni budaya | 100% | 20 % | 427,400,000.0 | 447,465,000.0 | 20.0 | 447,150,000.0 | 20 % | 513,368,744.0 | 77,250,000.0 | 20 | 71,963,000.0 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 3.00 | 06 | 06 | | % Pelaksanaan koordinasi dibidang perlindungan dan kerawanan sosial | 100% | 20 % | - | - | 20.0 | 0.0 | 20 % | 0.0 | | 20 | 0.0 | | |
| 3.00 | 06 | 06 | | % Pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | 100% | 20 % | - | - | - | 0.0 | 20 % | 0.0 | | 20 | 0.0 | | |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 1,733,200,000.0 | 1,768,201,000.0 | 100.0 | 1,754,416,604.0 | 100 % | 1,867,140,848.0 | 1,173,181,940.0 | 100 | 1,050,167,775.0 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 30,000,000.0 | 20,000,000.0 | 100.0 | 19,981,000.0 | 100 % | 30,067,998.0 | 30,800,000.0 | 100 | 30,541,000.0 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 28,800,000.0 | 13,000,000.0 | 100.0 | 12,975,400.0 | 100 % | 28,865,278.0 | 8,600,000.0 | 100 | 8,539,000.0 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | - | | | 100 % | 3,000,000.0 | | 0 | 0.0 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 3.00 | 06 | | Biro Organisasi dan Tata Laksana | | | | 7,100,000,000.0 | 8,624,191,336.0 | | 8,017,151,319.0 | | 6,514,732,884.0 | 5,580,019,476.40 | | 5,140,827,789.22 | | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|----|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|----|--------------------|----------------------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | |
| 1 | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 3.00 | 06 | 01 | PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (Prioritas) | Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota (Prioritas) | 53 OPD Prov (100) | 100 % | 1,654,894,400.0 | 1,736,353,400.0 | 100.0 | 1,582,928,158.0 | 100 % | 1,664,258,073.0 | 726,100,200.0 | 5 | 707,907,196.0 | Biro Organisasi |
| 3.00 | 06 | 17 | PROGRAM PENGUATAN KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatralaksana Lingkup Prov. Sulsel | 53 OPD Prov | 53 OPD Prov | 2,545,000,000.0 | 3,871,691,336.0 | 53.0 | 3,542,322,571.0 | 53 OPD Prov | 1,495,485,999.0 | 1,649,864,224.0 | 4 | 1,597,501,249.0 | Biro Organisasi |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel | 53 OPD Prov | 53 OPD Prov | - | | 53.0 | 0.0 | 53 OPD Prov | 0.0 | - | 6 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Penataan Tatralaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel | 53 OPD Prov | 53 OPD Prov | - | | 53.0 | 0.0 | 53 OPD Prov | 0.0 | - | 5 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Penataan Tatralaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | - | | 24.0 | 0.0 | 24 Kab/Kota | 0.0 | - | 3 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatralaksana Lingkup Prov. Sulsel | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | - | | 24.0 | 0.0 | 24 Kab/Kota | 0.0 | - | 4 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatralaksana Lingkup Prov. Sulsel | 142 UPT | 142 UPT | - | | 24.0 | 0.0 | 24 Kab/Kota | 0.0 | - | 4 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatralaksana Lingkup Prov. Sulsel | 34 Cabang Dinas | 34 Cabang Dinas | - | | 24.0 | 0.0 | 24 Kab/Kota | 0.0 | - | 4 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | - | | 53.0 | 0.0 | 53 OPD Prov | 0.0 | - | 6 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi | 53 OPD Prov | 53 OPD Prov | 243,410,000.0 | | 53.0 | 247,049,868.0 | 53 OPD Prov | 216,460,000.0 | 553,605,700.0 | 6 | 404,239,007.0 | Biro Organisasi |
| 3.00 | 06 | 29 | PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA | Cakupan Pembinaan SAKIP Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 24 Kab/Kota | - | | 24.0 | 0.0 | 24 Kab/Kota | 0.0 | - | 5 | 0.0 | |
| | | | | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 1,944,611,900.0 | 2,037,552,900.0 | 100.0 | 1,939,787,985.0 | 100 % | 2,173,125,336.0 | 1,811,861,168.40 | 15 | 1,616,395,779.0 | Biro Organisasi dan Tata Laksana |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 521,500,000.0 | | 100.0 | 496,674,286.0 | 100 % | 751,887,799.0 | 620,248,184.0 | 5 | 602,537,758.22 | Biro Organisasi |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 25,000,000.0 | 39,100,000.0 | 100.0 | 38,960,000.0 | 100 % | 22,500,000.0 | 218,340,000.0 | 5 | 212,246,800.0 | Biro Organisasi |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 165,583,700.0 | 170,583,700.0 | 100.0 | 169,428,451.0 | 100 % | 191,015,677.0 | - | 5 | 0.0 | Biro Organisasi |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Biro Umum dan Perlengkapan | | | 70,953,322,243.50 | 103,213,539,659.75 | | 99,558,661,181.63 | | 68,817,919,966.93 | 136,594,329,854.52 | | 124,896,103,205.55 | |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD |
|------|----|--|---|--|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | |
| | | | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 3.00 | 06 | 23 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI NASKAH/SURAT KEDINASAN | Cakupan jumlah administrasi ketatausahaan dan naskah dinas yang dikelola | 20 Jenis | 20 Jenis | 779,000,000.0 | 128,000,000.0 | 20.0 | 87,695,000.0 | 20 Jenis | 2,308,794,265.0 | 184,004,250.0 | 17 | 118,849,750.0 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | 24 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH | Cakupan jumlah pelayanan kerumah tanggaan dan perlengkapan | 2130 Pelayanan | 2140 Pelayanan | 20,580,956,448.5 | 30,294,683,002.8 | 2,140.0 | 29,701,735,666.07 | 2150 Pelayanan | 21,172,294,000.0 | 39,139,439,964.87 | 1911 | 35,619,925,888.33 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | 25 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN INVENTARISASI ASET SEKRETARIAT DAERAH | Cakupan jumlah barang dan jasa yang terkelola | 1028 Unit | 1048 Unit | 18,000,000.0 | 18,000,000.0 | 1,048.0 | 17,800,000.0 | 1058 Unit | 202,000,000.0 | 45,625,000.0 | 860 | 44,690,000.0 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | 26 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERKRETARIAT DAERAH | Cakupan jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah | 15120 Dokumen | 15125 Dokumen | 1,106,000,000.0 | 597,500,000.0 | 15,125.0 | 597,499,200.0 | 15205 Dokumen | 1,960,000,000.0 | 479,887,500.0 | 11595 | 474,844,800.0 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | 27 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Cakupan jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 11400 Pelayanan | 11414 Pelayanan | 7,721,350,000.0 | 12,550,000,000.0 | 11,414.0 | 11,496,493,829.0 | 11534 Pelayanan | 9,515,000,000.0 | 13,298,575,000.0 | 8662 | 11,133,892,448.0 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 17,257,560,424.0 | 25,132,790,454.0 | 100.0 | 24,298,196,217.0 | 100 % | 18,364,267,632.0 | 26,774,302,209.0 | 75 | 25,655,376,760.0 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 23,490,455,371.0 | 34,492,566,203.0 | 100.0 | 33,359,241,269.56 | 100 % | 14,275,564,069.9 | 56,629,130,930.65 | 85 | 51,805,158,559.22 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 0 % | - | - | | | 100 % | 1,020,000,000.0 | 43,365,000.0 | 0 | 43,365,000.0 | Biro Umum |
| 3.00 | 06 | Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah | | | | | 6,000,000,000.0 | 11,789,120,598.0 | | 8,914,136,967.32 | | 6,013,599,585.0 | 5,008,866,788.0 | | 4,611,608,671.50 | |
| 3.00 | 06 | 20 | PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Cakupan ketersediaan data aset yang akurat | 6 Jenis | 6 Jenis | 2,596,900,000.0 | 6,407,010,000.0 | 6.0 | 4,958,600,279.13 | 6 Jenis | 1,931,500,000.0 | 5,008,866,788.0 | 3 | 4,611,608,671.50 | Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah |
| | | | | Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sertifikat | 37% | 47 % | - | | 49.8 | 0.0 | 52 % | 0.0 | | 50.51 | 0.0 | |
| | | | | Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan | 18% | 20 % | - | | 21.4 | 0.0 | 24 % | 0.0 | | 23.04 | 0.0 | |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,676,643,000.0 | 4,394,162,598.0 | 100.0 | 3,149,512,326.0 | 100 % | 2,763,080,000.0 | | | | Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 618,249,000.0 | 935,740,000.0 | 100.0 | 801,834,362.19 | 100 % | 1,212,769,585.0 | | | | Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 7,500,000.0 | 1,500,000.0 | 100.0 | 0.0 | 100 % | 5,250,000.0 | | | | Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah |

| KODE | | | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | | | | | | OPD | | |
|------|----|----|---|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|--------------------|
| | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | Capaian 2020 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 100,708,000.0 | 50,708,000.0 | 100.0 | 4,190,000.0 | 100 % | 101,000,000.0 | | | | Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah | | |
| 3.00 | 06 | 06 | Biro Administrasi Pimpinan | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 1,336,522,508.0 | 15,024,571,918.73 | | 6,347,661,807.0 | | | |
| 3.00 | 06 | 18 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASSA MEDIA | Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa | 51 Media Massa | 20 Media Massa | | | | | 25 Media Massa | 1,336,522,508.0 | 9,021,210,473.0 | 25 | 815,743,041.0 | | | |
| 3.00 | 06 | 19 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Cakupan ketersediaan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | | | | | | | 1,978,690,917.74 | 3 | 1,692,878,190.0 | | | |
| 3.00 | 06 | 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEHUMASAN MEDIA SOSIAL | | | | | | | | | | 301,295,401.0 | 100 | 297,245,188.0 | | | |
| 3.00 | 06 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | | | | | | | | | 2,870,939,715.0 | 55% | 2,788,899,009.0 | | | |
| 3.00 | 06 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | | | | | | | | | 669,885,212.0 | 50% | 624,891,227.0 | | | |
| 3.00 | 06 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | | | | | | | | | 122,375,900.00 | 58% | 109,385,852.0 | | | |
| 3.00 | 06 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | | | | | | | 60,174,300.0 | 50% | 18,619,300.0 | | | |
| 3.00 | 07 | | Pengawasan | | | | 13,580,348,036.0 | 16,580,348,036.0 | | 16,156,027,005.0 | | 14,109,995,921.0 | 21,423,719,600.0 | | 17,102,893,036.0 | | | |
| 3.00 | 07 | 07 | Inspektorat Daerah | | | | 13,580,348,036.0 | 16,580,348,036.0 | | 16,156,027,005.0 | | 14,109,995,921.0 | 21,423,719,600.0 | | 17,102,893,036.0 | | | |
| 3.00 | 07 | 01 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DAERAH (Prioritas) | Opini LKPD dari BPK RI (Prioritas) | 100 % (Opini WTP) | 100 % (Opini WTP) | 4,295,640,000.0 | 4,741,390,000.0 | 100.0 | 4,719,472,830.0 | 100 % (Opini WTP) | 4,305,376,487.0 | 6,958,900,500.0 | 100 | 6,573,400,878.0 | Inspektorat Daerah | | |
| 3.00 | 07 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Hasil EKPPD Prov. Sulsel | 100% (Tinggi) | 100 % | 2,643,485,368.0 | 3,863,598,368.0 | 100.0 | 3,772,056,709.0 | 100 % | 2,686,309,182.0 | 6,365,660,000.0 | 100 | 4,855,458,162.0 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | | % TLHP BPK | 68% | 70 % | - | | 100.0 | 0.0 | 72 % | 0.0 | | 70.88 | 0.0 | | | |
| | | | | Jumlah Kab/Kota yang hasil evaluasi SAKIP > CC | 3 | 4 | Kab/Kota | Kab/Kota | | 4.0 | 0.0 | 4 Kab/Kota | 0.0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | % TLHP APIP | 65% | 70 % | - | | 100.0 | 0.0 | 73 % | 0.0 | | 64.56 | 0.0 | | | |
| | | | | Jumlah Kab/Kota yang hasil EKPPD > Tinggi | 24 | 24 | Kab/Kota | Kab/Kota | | 24.0 | 0.0 | 24 Kab/Kota | 0.0 | 24 | 0.0 | | | |
| 3.00 | 07 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI | Jumlah OPD/Unit Kerja yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas | 6 | 7 | OPD/Unit Kerja | OPD/Unit Kerja | 2,265,781,316.0 | 2,497,082,116.0 | 7.0 | 2,410,902,880.0 | 7 OPD/Unit Kerja | 2,709,097,590.0 | 1,833,100,000.0 | 7 | 1,385,091,085.0 | Inspektorat Daerah |
| 3.00 | 07 | 05 | PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT | % Pengaduan Masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti | 100% | 100 % | 435,218,000.0 | 627,636,050.0 | 100.0 | 618,119,142.0 | 100 % | 436,204,464.0 | 743,600,000.0 | 100 | 677,058,587.0 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | | % Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Walikota yang ditindaklanjuti | 100% | 100 % | - | | 100.0 | 0.0 | 100 % | 0.0 | | 100 | 0.0 | | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | OPD | | | | |
|------|--|--|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | | | | | |
| | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 3.00 | 07 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 2,924,536,352.0 | 3,137,636,352.0 | 100.0 | 2,946,228,040.0 | 100 % | 2,955,019,044.0 | 2,847,722,700.0 | 100 | 2,167,236,732.0 | Inspektorat Daerah |
| 3.00 | 07 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 692,253,000.0 | 1,158,313,000.0 | 100.0 | 1,152,224,046.0 | 100 % | 693,822,059.0 | 1,809,824,400.0 | 88 | 890,665,361.0 | Inspektorat Daerah |
| 3.00 | 07 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 168,280,000.0 | 301,398,950.0 | 100.0 | 285,113,130.0 | 100 % | 168,661,423.0 | 490,912,000.0 | 100 | 345,771,331.0 | Inspektorat Daerah |
| 3.00 | 07 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 92 % | 155,154,000.0 | 253,293,200.0 | 100.0 | 251,910,228.0 | 93 % | 155,505,672.0 | 374,000,000.0 | 94 | 208,210,900.0 | Inspektorat Daerah |
| 3.00 | 08 | Pemerintahan Umum | | | | | 24,015,411,928.0 | 31,521,411,928.0 | | 30,212,165,764.16 | | 29,567,578,605.70 | 29,804,268,402.64 | | 23,111,103,514.0 | |
| 3.00 | 08 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 7,935,655,027.0 | 11,941,655,027.0 | | 11,639,345,985.0 | | 8,453,641,963.73 | 4,712,291,754.0 | | 3,875,623,923.0 | |
| 3.00 | 08 | 01 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGGULANGAN KONFLIK | Cakupan wilayah konflik yang terpetaikan | 0% | 20 % | 2,832,750,000.0 | 2,766,750,000.0 | 20.0 | 2,747,972,300.0 | 20 % | 3,039,170,704.0 | 1,483,900,000.0 | 20 | 1,423,978,200.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 02 | PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL | % Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat | 20% | 5 % | 73,000,000.0 | 73,000,000.0 | 5.0 | 71,378,300.0 | 10 % | 73,165,462.0 | 10,000,000.0 | 10 | 7,420,000.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | Cakupan Jumlah konflik antar umat beragama dan etnis | 5 Kasus | 6 Kasus | 66,250,000.0 | 901,863,000.0 | 1.0 | 896,961,700.0 | 5 Kasus | 66,400,162.0 | 128,500,000.0 | 5 | 124,808,500.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 04 | PROGRAM KETAHANAN EKONOMI DAERAH | Cakupan Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi | 20% | 20 % | 90,250,000.0 | 87,500,000.0 | 20.0 | 86,058,200.0 | 20 % | 140,454,560.0 | 310,000,000.0 | 20 | 128,216,300.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PEMILU | % Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu | 79% | 79 % | 79,250,000.0 | 79,250,000.0 | 78.2 | 76,738,300.0 | 78 % | 79,429,628.0 | 180,174,400.0 | 78.21 | 174,601,000.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | Cakupan Partai Politik peserta Pemilu | 12 Parpol | 16 Parpol | - | | 16.0 | 0.0 | 16 Parpol | 0.0 | | 16 | 0.0 | |
| 3.00 | 08 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA | % Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara | 20% | 20 % | 120,750,000.0 | 120,750,000.0 | 20.0 | 120,569,600.0 | 20 % | 221,023,692.0 | 2,000,000.0 | 20 | 2,000,000.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 3,351,615,027.0 | 6,896,142,027.0 | 100.0 | 6,667,250,785.0 | 100 % | 3,359,211,789.7 | 1,932,205,854.0 | 100 | 1,501,820,023.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 989,950,000.0 | 936,340,000.0 | 100.0 | 907,666,800.0 | 100 % | 1,052,193,818.0 | 518,466,500.0 | 100 | 447,729,300.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 73,500,000.0 | 64,750,000.0 | 100.0 | 64,750,000.0 | 100 % | 153,666,595.0 | 95,620,000.0 | 100 | 65,050,600.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 258,340,000.0 | 15,310,000.0 | 100.0 | 0.0 | 100 % | 268,925,553.0 | 51,425,000.0 | 100 | 0.0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3.00 | 08 | Badan Penghubung Daerah | | | | | 16,079,756,901.0 | 19,579,756,901.0 | | 18,572,819,779.16 | | 21,113,936,641.97 | 25,091,976,648.64 | | 19,235,479,591.0 | |
| 3.00 | 08 | 07 | PROGRAM FASILITAS PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | % Pelayanan tamu daerah | 100% | 100 % | 1,613,000,000.0 | 1,822,264,060.0 | 16.0 | 1,797,433,826.0 | 100 % | 1,707,771,172.0 | 2,394,359,404.0 | 0 | 2,136,438,300.0 | Badan Penghubung Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN (Permendagri 13/2006) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL | Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13/2006) | | | | | | | | OPD | | | |
|------|---|--|--|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Target 2019 | | | Capaian 2019 | | Target 2020 | | | | | | |
| | | | | K | RPJMD POKOK (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | RP | K | RPJMD (Rp) | PERUBAHAN APBD (Rp) | K | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.00 | 08 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH | % Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah | 100% | 100 % | 221,500,000.0 | 221,500,000.0 | 0.0 | 206,500,000.0 | 100 % | 1,022,002,000.0 | 30,000,000.0 | Badan Penghubung Daerah | |
| 3.00 | 08 | 50 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | % Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 100 % | 7,799,880,652.0 | 8,655,254,495.0 | 11.0 | 8,116,984,242.16 | 100 % | 9,208,118,826.0 | 9,166,528,264.64 | 0 | Badan Penghubung Daerah |
| 3.00 | 08 | 51 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | 100% | 100 % | 6,404,576,249.0 | 8,870,738,346.0 | 0.1 | 8,447,401,711.0 | 100 % | 8,979,021,944.0 | 13,491,988,980.0 | 0 | Badan Penghubung Daerah |
| 3.00 | 08 | 52 | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 100% | 100 % | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | - | 4,500,000.0 | 100 % | 130,022,700.0 | 9,100,000.0 | 0 | Badan Penghubung Daerah |
| 3.00 | 08 | 53 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | % ASN berkinerja sangat baik | 100% | 100 % | 30,800,000.0 | 0,00 | - | 0.0 | 100 % | 67,000,000.0 | | 0 | Badan Penghubung Daerah |

Tabel VIII.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2021 - 2023
PROVINSI SULAWESI SELATAN

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | | |
|------|---|---|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | Grandtotal | | | 12,110,640,284,934.5 | | 11,749,497,437,965.0 | | 11,528,900,792,965.4 | | 35,384,520,328,415.9 | | | |
| 1 | | Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | 1,968,866,850,377.0 | | 1,873,857,527,574.71 | | 2,007,868,398,414.81 | | 5,850,592,776,366.52 | | | |
| 1 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | | | 1,089,103,580,747.0 | | 1,009,174,169,147.82 | | 1,017,330,419,147.82 | | 3,115,608,169,042.64 | | | |
| 1 | 01 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN spm prioritas | Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran | 50,05 % | 60,25 % | 1,040,979,665,047.0 | 61,15 % | 996,300,000,000.0 | 62,00 % | 1,003,200,000,000.0 | 62,00 % | 3,040,479,665,047.0 | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | | Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok) | 90 % | 91,45 % | | 92,90% | | 93,90% | | 93,90% | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | | Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) | 74,23 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | | Persentase jumlah warga negara usia 4 -18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (SPM) | 80% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | | Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama | 50,05% | 54,25% | 894,323,500.0 | 55,60% | 3,485,169,147.82 | 57,25% | 3,855,419,147.82 | 57,25% | 8,234,911,795.64 | DINAS PENDIDIKAN | |
| 1 | 01 | 3 | Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK | N/A | 80% | | 81% | | 82% | | 82% | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | | Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah | N/A | 1:13 | 43,553,572,200.0 | 1:13 | 4,500,000,000.0 | 1:13 | 5,000,000,000.0 | 1:13 | 53,053,572,200.0 | DINAS PENDIDIKAN | |
| 1 | 01 | 04 | Persentase Guru SMA yang bersertifikat | N/A | 52,00% | | 52,65% | | 53,20% | | 53,20% | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | | Persentase Guru SMK yang bersertifikat | N/A | 45,10% | | 45,85% | | 46,35% | | 46,35% | | DINAS PENDIDIKAN | |
| 1 | 01 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan | N/A | 100% | 76,020,000.0 | 100% | 1,764,000,000.0 | 100% | 2,005,000,000.0 | 100 % | 3,845,020,000.0 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 01 | 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SASTRA | Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra | 0,98 % | 48,25% | 3,600,000,000.0 | 49,65 % | 3,125,000,000.0 | 51,05 % | 3,270,000,000.0 | 51,05 % | 9,995,000,000.0 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | | | | 202,021,409,483.0 | | 201,847,758,992.34 | | 253,827,209,361.62 | | 657,696,377,836.96 | | |
| 1 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas/SPM) | Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan | 17 % | 33% | 70,458,898,168.0 | 50 % | 68,752,950,483.0 | 100 % | 93,865,115,937.0 | 100% | 233,076,964,588.0 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi | 85 % | 87 % | | 90 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) | 5.5 % | 6.5 % | | 7 % | | 7.5 % | | 7.5 % | | DINAS KESEHATAN | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|---|--|--|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) | 11 % | 12 % | | 12.5 % | | 13 % | | 13 % | | DINAS KESEHATAN | |
| | | Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah | 77.58 % | 80% | 12,647,853,865.0 | 85 % | 12,870,032,504.65 | 100 % | 15,111,748,861.76 | 100 % | 40,629,635,231.41 | UPT TRANSFUSI DARAH | |
| | | Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar | 100 % | 100 % | 470,786,720.0 | 100 % | 517,865,392.0 | 100 % | 569,651,931.0 | 100 % | 1,558,304,043.0 | UPT PELATIHAN KESEHATAN | |
| | | Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar | 100 % | 100 % | 2,078,153,991 | 100 % | 10,522,785,028.18 | 100 % | 12,802,045,395.94 | 100 % | 25,402,984,415.12 | UPT RSK GIGI DAN MULUT | |
| | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | 40 % | 85 % | 36,049,088,225.0 | 90 % | 27,850,000,000.0 | 100 % | 25,200,000,000.0 | 100 % | 89,099,088,225.0 | RSUD LABUANG BAJI | |
| | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | 100 % | 100 % | 26,178,244,000.0 | 100 % | 51,494,397,731.54 | 100 % | 64,633,318,650.49 | 100 % | 142,305,960,382.03 | RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH | |
| | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | 60 % | 80 % | 20,887,255,017.00 | 90 % | 5,470,000,000.0 | 100 % | 11,538,459,131.0 | 100 % | 37,895,714,148.0 | RSUD HAJI MAKASSAR | |
| | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | 60 % | 80 % | 12,392,941,963.0 | 95 % | 3,515,157,672.43 | 100 % | 5,129,755,349.90 | 100 % | 21,037,854,985.33 | RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH | |
| | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat | 90% | 96% | 6,629,958,278.00 | 98% | 4,388,372,908.39 | 100% | 4,227,498,717 | 100% | 15,245,829,903.67 | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI | |
| | | Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik | 100 % | 65,76% | 7,780,909,000.0 | 75% | 4,160,000,000.0 | 85% | 5,839,487,590.18 | 85% | 17,780,396,590.18 | RSUD SAYANG RAKYAT | |
| 1 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN(Prioritas) | Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk | 17/100.000 Pddk | 23/100.000 Penduduk | 1,269,549,600.0 | 23/100.000 Penduduk | 3,657,000,000.0 | 23/100.000 Penduduk | 4,154,000,000.0 | 23/100.000 Penduduk | 9,080,549,600.0 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan | 80% | 95% | 120,000,000.00 | 97% | 130,000,000 | 100% | 140,000,000.0 | 100% | 390,000,000.0 | UPT TRANSFUSI DARAH |
| | | | Persentase tenaga medis yang tersertifikasi | 30 % | 40% | 535,373,456.0 | 45 % | 221,144,238.15 | 50% | 229,269,459.07 | 50% | 985,787,153.22 | UPT PELATIHAN KESEHATAN |
| | | | Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi | 100 % | | | 100 % | 188,053,034.0 | 100 % | 206,858,338.0 | 100 % | 394,911,372.0 | UPT PELATIHAN KESEHATAN |
| | | | Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan | 100 % | | | 100 % | 500,000,000.00 | 100 % | 500,000,000.00 | 100% | 1,000,000,000.0 | UPT RSK GIGI DAN MULUT |
| | | | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | 40 % | 60% | 2,062,103,200.0 | 65 % | 375,000,000.0 | 70 % | 585,000,000.00 | 70% | 3,022,103,200.0 | RSUD LABUANG BAJI |
| | | | Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 80 % | 0 | | 90 % | 4,200,000,000.0 | 100 % | 5,250,000,000.0 | 100 % | 9,450,000,000.0 | RSUD HAJI MAKASSAR |
| | | | Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan | 42,9 % | 55,9 % | 156,594,000.0 | 77,4 % | 400,000,000.0 | 100 % | 400,000,000.0 | 100 % | 956,594,000.0 | RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH |
| | | | Meningkatnya Kompetensi teknis SDM | 65 % | 70 % | 89,700,000 | 85% | 300,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 689,700,000.0 | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI |
| | | | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | 33 % | 33 % | 144,000,000.0 | 12 % | 150,000,000.0 | 24 % | 360,000,000.0 | 24% | 654,000,000.0 | RSUD SAYANG RAKYAT |
| 1 | 02 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, MAKANAN DAN MINUMAN | Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi | 70 % | 85 % | 940,000,000.00 | 95 % | 995,000,000.00 | 100% | 1,115,000,000.00 | 100% | 3,050,000,000.00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan | 70 % | 85 % | | 95 % | | 100% | | 100% | | DINAS KESEHATAN |
| | | | % Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman | 70 % | 85 % | | 95 % | | 100% | | 100% | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|----|--|--|---|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS | 62,15 % | 66 % (16 Kab/Kota) | 1,130,000,000.00 | 75 % (18 Kab/Kota) | 1,190,000,000.00 | 85 % (20 Kab/Kota) | 1,470,000,000.00 | 100 % | 3,790,000,000.0 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | Cakupan Pasien Yang Tertangani Sesuai Standar Pelayanan | | 92 % | - | 0% | - | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000.0 | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI | |
| 1 | 03 | | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | 584,218,410,985.0 | | 569,215,361,756.20 | | 627,870,597,207.79 | | 1,781,304,369,948.99 | | |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Prioritas) | Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi | 72,71 % | 77,00 % | 101,989,809,567 | 78,5 % | 94,348,629,180.0 | 80 % | 97,815,160,625.25 | 80% | 294,153,599,372.25 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| | | | | Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai | | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100 % | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM) | Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | 0 | 100% | 160,619,100 | 100% | 25,014,213,852.66 | 100 % | 25,933,279,234.48 | 100 % | 51,108,112,187.14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| | | | | Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota | | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota) | 0 | 100% | 160,995,500 | 100% | 1,000,000,000.0 | 100% | 45,415,267,958.0 | 100% | 46,576,263,458.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM) | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | 100% | 100% | 160,961,000 | 100% | 450,000,000.0 | 100% | 450,000,000.0 | 100 % | 1,060,961,000.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| | | | | Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota | | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi | 0 | | | 16% | 1,700,000,000.0 | 16% | 520,000,000.0 | 16% | 2,220,000,000.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Pemerintah Yang di Fasilitasi | 100% | 100% | 164,376,164,792 | 100% | 101,501,919,632.0 | 100% | 102,450,000,000.0 | 100% | 368,328,084,424.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya | 5 Kawasan | 11 Kawasan | 75,269,455,924 | 13 Kawasan | 109,353,237,501.0 | 15 Kawasan | 109,404,185,675.0 | 15 Kawasan | 294,026,879,100.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | 61.52% | 72.30% | 239,144,922,402.0 | 74.24% | 229,315,396,350.54 | 75.09% | 239,211,231,213.06 | 75.09% | 707,671,549,965.60 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| | | | | Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat | 20.48% | 42.72% | | 71.79% | | 74.25% | | 74.25% | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | 0.3 | 0.5 | 999,859,900 | 0.6 | 1,530,545,240.0 | 0.7 | 1,670,072,502.0 | 0.7 | 4,200,477,642.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Rasio ketatan pemanfaatan ruang | 0.7 | 0.8 | 1,955,622,800 | 0.8 | 5,001,420,000.0 | 1 | 5,001,400,000.0 | 1 | 11,958,442,800.0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |
| 1 | 04 | | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | 18,541,889,444.0 | | 18,944,675,440.0 | | 25,785,897,912.0 | | 63,272,462,796.0 | | |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi (SPM) | 100% | 100% | 6,037,829,496.0 | 100% | 4,687,829,496.0 | 100% | 4,687,829,496.0 | 100% | 15,413,488,488.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|--------|----|---|---|---|---|---------|------------------|---------|-------------------|---------|---|--------|--|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenagan provinsi (SPM) | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 1 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Prioritas) | Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi | 39.88% | 13.69% | 8,413,514,632.0 | 23,42 % | 10,763,514,632.0 | 36,37 % | 10,763,514,632.0 | 100 % | 29,940,543,896.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan | 100 % | 100 % | 3,521,804,832.00 | 100 % | 2,924,590,828.0 | 100 % | 9,765,813,300.0 | 100 % | 16,212,208,960.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | | | Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman | 89,77 % | 91 % | | 92 % | | 93 % | | 93 % | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | | | Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman | 17.10 % | 60 % | | 80 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 04 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | N/A | 14,29 % | 568,740,484 | 57,14 % | 568,740,484.0 | 100 % | 568,740,484.0 | 100 % | 1,706,221,452.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 05 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | 48,811,417,350.0 | | 49,546,820,455.49 | | 56,001,102,517.0 | | 154,359,340,322.49 | |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM) | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | 100 % | 100% | 1,907,789,500 | 100% | 2,120,000,000.00 | 100% | 2,370,000,000.00 | 100% | 6,397,789,500.0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Korban Bencana yang tertangani | 100 % | 100% | 174,810,600 | 100% | 260,000,000.00 | 100% | 340,000,000.00 | 100% | 774,810,600.0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia | 20 % | 30% | 46,531,119,000.0 | 50% | 46,751,820,455 | 100% | 52,841,102,517 | 100% | 146,124,041,972.49 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlalih | 42 % | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 36 % | 37 % | 197,698,250 | 40% | 415,000,000.00 | 41% | 450,000,000.00 | 41% | 1,062,698,250.0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 06 | | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | | | | 26,170,142,368.0 | | 25,128,741,782.86 | | 27,053,172,268.58 | | 78,352,056,419.44 | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|----|---|---|---|---|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---|----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | 100 % | 100 % | 1,467,815,512.0 | 100 % | 1,614,597,063.0 | 100 % | 1,776,056,768.64 | 100 % | 4,858,469,343.64 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial | 50 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 06 | 03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | | 100 % | 405,150,512 | 100 % | 445,665,563.0 | 100 % | 490,232,120.0 | 100 % | 1,341,048,195.0 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (SPM) | Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti(SPM) | 20,83 % | 100% | 6,874,839,736.0 | 100% | 7,562,323,709.60 | 100% | 8,318,556,080.56 | 100% | 22,755,719,526.16 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM) | 28,83% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti(SPM) | 6,97% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti | 11,35 % | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial | 0.5 % | 3,5% | 10,019,193,024 | 3,6% | 10,021,112,326.40 | 3,7% | 11,023,223,559.04 | 3,7% | 31,063,528,909.44 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | 100% | 100% | 7,174,061,024 | 100% | 5,233,052,304.86 | 100% | 5,167,913,842.34 | 100% | 17,575,027,171.20 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang dikelola | 100 % | 100 % | 229,082,560 | 100 % | 251,990,816.0 | 100 % | 277,189,898.0 | 100 % | 758,263,274.0 | DINAS SOSIAL | |
| 2 | | | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | 1,368,743,808,523.0 | | 973,878,107,886.76 | | 193,173,117,748.33 | | 2,532,865,034,158.09 | | |
| 2 | 07 | | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | | | | 4,900,377,778.0 | | 5,510,599,600.0 | | 6,275,599,600.0 | | 16,686,576,978.0 | | |
| 2 | 07 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro | 95,83% | 100.00% | 48,029,700 | 100.00% | 50,000,000.00 | 100.00% | 50,000,000.00 | 100.00% | 148,029,700.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja | 0.00% | 5.00% | | 7.00% | | 10.00% | | 10.00% | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan | 71.4 % | 72,92 % | 2,623,431,000.00 | 75.00% | 2,715,599,600.00 | 77,08 % | 3,145,599,600.00 | 77,08 % | 8,484,630,200.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|----|---|--|---|---|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri | 70 % | 75.00% | | 80.00% | | 85.00% | - | 85 % | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan di tempatkan | 3.48 % | 3.91 % | 692,176,310.0 | 4.13 % | 945,000,000.0 | 4.35 % | 995,000,000.0 | 4.35 % | 2,632,176,310.0 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas) | 58.17 % | 58.78 % | | 59.09 % | | 59.41 % | | 59.41 % | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan | 33,33% | 57,10 % | 944,999,300 | 50,00% | 1,100,000,000.00 | 60.00% | 1,160,000,000.00 | 60.00% | 3,204,999,300.0 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek | 40.48% | 46,60% | | 46,81% | | 47,22% | | 47,22% | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 2 | 07 | 06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja | 62.13% | 85.00% | 591,741,468 | 85.00% | 700,000,000.00 | 85.00% | 925,000,000.00 | 85.00 % | 2,216,741,468.0 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan | 64 % | 80.00% | | 82.00% | | 84.00% | | 84 % | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 2 | 08 | | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | 4,206,336,060.0 | | 3,963,496,982.03 | | 4,503,827,981.73 | | 12,673,661,023.76 | | |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi | 0% | 10% | 1,111,761,124.0 | 25% | 910,501,000.00 | 35% | 1,065,501,000.00 | 35% | 3,087,763,124.0 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG | 50% | 65% | | 71% | | 75% | | 75% | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA | |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi | 0% | 25% | 1,278,805,212 | 37.5% | 1,028,607,980.93 | 50.00% | 1,128,607,980.93 | 50.00% | 3,436,021,173.86 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA | |
| 2 | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi | 0% | 25% | 154,010,300 | 37.5% | 480,000,000.00 | 60% | 680,000,000.00 | 60% | 1,314,010,300.00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--------|----|---|---|---|---|---|---------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2 | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate | 77% | | | 85% | 415,050,000.50 | 87 % | 415,050,000.50 | 87% | 830,100,001.0 | DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase kabupaten/Kota Layak Anak | 58.33% | 58.33% | 1,013,123,912 | 75% | 564,669,000.30 | 83 % | 650,000,000.00 | 83 % | 2,227,792,912.30 | DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi | 8,3 % | 25% | 648,635,512 | 37,5% | 564,669,000.30 | 50% | 564,669,000.30 | 50% | 1,777,973,512.60 | DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | | | | 20,057,026,260.0 | | 14,091,974,521.43 | | 13,906,767,910.0 | | 45,125,768,691.43 | | |
| 2 | 09 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun | N/A | 0 | 0.0 | 30 % | 1,465,000,000.00 | 30 % | 1,465,000,000.0 | 60 % | 2,930,000,000.0 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%): | | | | | | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | | * Beras | 363,78 % | 374,75 % | | 380,38 % | | 386,08 % | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | | * Jagung | 47,88 % | 52,79 % | | 55,43 % | | 58,20 % | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | | * Kedelai | 24,96 % | 26,22 % | | 26,88 % | | 27,55 % | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | | Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari) | 3879 Kkal/Kapita/hari | 3904.1 Kkal/Kapita/hari | | 3916.65 Kkal/Kapita/hari | | 3,929.20 Kkal/Kapita/ha ri | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | | Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari) | 112.67 gr/Kapita/hari | 143.59 gr/Kapita/hari | | 159.04 gr/Kapita/hari | | 174.5 gr/Kapita/hari | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2 | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Jumlah Daerah Rawan Pangan | 22 | 21 | 7,689,082,512 | 20 | 1,498,032,621.43 | 19 | 1,200,000,000.0 | 19 | 10,387,115,133.43 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 100 % | 100% | 4,000,066,748 | 100% | 2,481,290,000.0 | 100% | 2,481,290,000.0 | 100% | 8,962,646,748.0 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2 | 10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | | | 1,546,357,632.0 | | 1,546,357,632.00 | | 1,546,357,632.0 | | 4,639,072,896.0 | | |
| 2 | 10 | 03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | 87,50 % | 100 % | 173,342,048 | 100 % | 173,342,048 | 100 % | 173,342,048 | 100 % | 520,026,144.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|--|---|---|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---|------------------|--|--|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2 | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi | 70 % | 100 % | 247,466,048 | 100 % | 247,466,048 | 100 % | 247,466,048 | 100 % | 742,398,144.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 2 | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota | N/A | 100 % | 1,125,549,536 | 100 % | 1,125,549,536 | 100 % | 1,125,549,536 | 100 % | 3,376,648,608.0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 2 | 11 | Urusan Pemerintaha Bidang Lingkungan Hidup | | | | | 15,316,405,492.0 | | 14,252,148,500.0 | | 15,824,964,012.0 | | 45,393,518,004.0 | | |
| 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup | N/A | 40 % | 229,546,312 | 60 % | 350,000,000.0 | 100% | 1,350,000,000.0 | 100% | 1,929,546,312.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah | 3,40% | 3,95% | 2,195,449,654 | 4,59% | 2,410,295,500 | 5,40% | 2,610,295,500 | 5,40% | 7,216,040,654.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi) | 75 % | 85,71 % | 870,216,857 | 92,85 % | 1,000,000,000.00 | 100 % | 3,415,000,000.00 | 100 % | 5,285,216,857.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Cakupan limbah yang dikelola | 97,03 % | 97,05% | 10,722,500,145 | 97,50 % | 6,700,000,000 | 98,00% | 5,707,815,512 | 98,00% | 23,130,315,657 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase ketataan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH | N/A | 23% | 230,983,000 | 25% | 391,403,000.0 | 26% | 391,403,000.0 | 26% | 1,013,789,000.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LIKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | N/A | 48,61% | 113,386,000 | 73,61% | 150,000,000.00 | 100% | 150,000,000.00 | 100% | 413,386,000.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH | N/A | 64,29 % | 67,047,500 | 87% | 500,000,000.00 | 100% | 600,000,000.00 | 100% | 1,167,047,500.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT | Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan | NA | | | 5 Penghargaan | 250,000,000.00 | 5 Penghargaan | 300,000,000.00 | 5 Penghargaan | 550,000,000.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 214,010,512 | 100% | 400,000,000.00 | 100% | 500,000,000.00 | 100% | 1,114,010,512.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani | 48,51 % | 72% | 673,265,512 | 73% | 2,100,450,000 | 74% | 800,450,000 | 74% | 3,574,165,512.0 | DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--------|----|--------|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2 | 12 | | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | 3,050,000,024.0 | | 3,100,000,000.0 | | 5,400,000,000.0 | | 11,550,000,024.0 | | |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk | 96% | 96% | 530,000,000.00 | 97% | 600,000,000.00 | 98% | 1,200,000,000.00 | 98% | 2,330,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase penerbitan KTP | 96% | 96% | | 97% | | 98% | | 98% | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | 25.00% | 25.00% | | 30.00% | | 40.00% | | 40.00% | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persenyase Bayi ber akte kelahiran | 94 | 95 | 945,000,000.00 | 97 | 900,000,000.00 | 98 | 1,400,000,000.00 | 98 | 3,245,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Pasangan ber akte nikah | 31 | 31 | | 34 | | 37 | | 37 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase penerbitan akta kelahiran | 93.70% | 93.70% | | 94.00% | | 95.00% | | 95.00% | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran | 86.20% | 86.20% | | 87.37% | | 90.00% | | 90.00% | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | 45 | 45 | | 46 | | 47 | | 47 | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| | | | | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi | 100 % | 100 % | 1,029,999,600 | 100 % | 1,200,000,000 | 100 % | 2,200,000,000 | 100 % | 4,429,999,600.0 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Penyajian Profil Kependudukan | 100 % | 100% | 545,000,424 | 100% | 400,000,000.00 | 100% | 600,000,000.00 | 100 % | 1,545,000,424.0 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2 | 13 | | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | 8,978,007,600.0 | | 8,715,863,065.53 | | 11,234,228,897.13 | | 28,928,099,562.67 | |
| 2 | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik) | 98.35 % | 98.89 % | 540,000,000.0 | 99 % | 240,089,786.29 | 100 % | 840,974,886.61 | 100 % | 1,621,064,672.90 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | | Persentase peningkatan status desa mandiri | 0,26% | 0,88 % | | 1,10% | | 1,33% | | 1,33% | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | | Persentase pengentasan desa tertinggal | 25,23 % | 19,95 % | | 17 % | | 15 % | | 15 % | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase Desa yang menjalin kerjasama | 0,22% | 0,44% | 1,865,953,200 | 0,66% | 42,157,126.01 | 0,88% | 943,706,051.57 | 0,88% | 2,851,816,377.58 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|--------|----|--------|---|--|---|---|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi | 11.81% | 11.81 % | 3,877,478,400.0 | 11.81 % | 5,252,942,756.05 | 11.81 % | 6,262,236,309.39 | 11.81 % | 15,392,657,465.44 | DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | | Persentase Desa yang diFasilitasi | 5.01 % | 15.03 % | | 20,04 % | | 25,05 % | | 25,05 % | | DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) | 1,44 % | 1,51 % | 2,694,576,000.0 | 1,54 % | 3,180,673,397.18 | 1,57 % | 3,187,311,649.57 | 1,57 % | 9,062,561,046.75 | DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | | Persentase Posyandu aktif; | 99,89 % | 99,89 % | | 99,91 % | | 99,98 % | | 99,98 % | | DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | | Persentase PKK aktif | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 14 | | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | 689,718,212.0 | | 756,519,000.0 | | 906,519,000.0 | | 2,352,756,212.0 | |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB | 0% | 12,5 % | 154,340,912 | 29,16% | 202,173,000.0 | 45,82 % | 302,173,000.0 | 45,82 % | 658,686,912.0 | DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase PUS peserta KB Aktif | 63 % | 63,5% | 233,204,300 | 64,5% | 252,173,000.0 | 65,5% | 302,173,000.0 | 65,5% | 787,550,300.0 | DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) | Persentase kab/kota yg meningkat capaihan Indeks Pembangunan Keluarga | 0 % | 16% | 302,173,000 | 24% | 302,173,000.0 | 25% | 302,173,000.0 | 25% | 906,519,000.0 | DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 15 | | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | | | | 49,516,172,990.0 | | 45,720,000,000.00 | | 43,500,000,000.00 | | 138,736,172,990.0 | |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan | 26 % | 29,20 % | 3,490,597,210 | 30,80 % | 7,105,000,000.00 | 32,40 % | 15,650,000,000 | 32,40 % | 26,245,597,210.0 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat; | 51 % | 54 % | | 56 % | | 58 % | | 58 % | | DINAS PERHUBUNGAN |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|---------|---|---|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|------------------|--|--|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2 15 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun | 123.750 orang | 365.000 orang | 485.000 Orang | 605.000 Orang | 605.000 Orang | 605.000 Orang | 605.000 Orang | 605.000 Orang | 605.000 Orang | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik | 15 % | 22 % | 22 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi | 12 Ruas | 20 Ruas | 20 Ruas | 20 Ruas | 20 Ruas | 20 Ruas | 20 Ruas | 20 Ruas | 20 Ruas | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Jumlah Terminal Bis terkelola | 3 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) | 980.537 Orang | 1.028.000 Orang | 1.074.000 Orang | 1.105.000 Orang | 1.105.000 Orang | 1.105.000 Orang | 1.105.000 Orang | 1.105.000 Orang | 1.105.000 Orang | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2 15 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Jumlah pelabuhan strategis provinsi | 10 | 11 Lokasi | 11 Lokasi | 11 Lokasi | 11 Lokasi | 11 Lokasi | 11 Lokasi | 11 Lokasi | 11 Lokasi | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Persentase pelabuhan yang beroperasi | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi | 0 Dokumen | 100 % | 79,923,200 | 100% | 700,000,000.00 | 100 % | 750,000,000 | 100% | 1,529,923,200.0 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2 16 04 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | | | 20,044,702,736.0 | | 20,700,000,000.0 | | 23,756,670,618.0 | | 64,501,373,354.0 | | | |
| 2 16 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik | 60% | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 52,201,805,118.0 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | | Persentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| 2 16 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | 2,66 | 2,80 | 3,799,568,236 | 2,90 | 4,000,000,000.0 | 3,00 | 4,500,000,000.0 | 3,00 | 12,299,568,236.0 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| 2 17 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 11,927,365,368.0 | | 14,091,729,686.91 | | 20,890,598,121.96 | | 46,909,693,176.86 | | | |
| 2 17 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam | 20% | 20% | 30% | 50% | 50% | 50 % | 50 % | 50 % | 1,069,706,684.92 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40 % | 40 % | 40 % | 1,069,706,684.92 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 2 17 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50 % | 50 % | 50 % | 1,125,831,111.19 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhanya terhadap peraturan perundang undangan | 15% | 20% | 25% | 30% | 30% | 30 % | 30 % | 30 % | 1,125,831,111.19 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 2 17 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40 % | 40 % | 40 % | 665,032,500.0 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi | 15% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40 % | 40 % | 40 % | 665,032,500.0 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 2 17 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 40 % | 40 % | 40 % | 1,843,410,186.0 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 2 17 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50 % | 50 % | 50 % | 9,198,725,000.0 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|---|--|--|---|-------|---------------------|--------|-------------------|-------|---|--------|----------------------|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UJMKM) | Cakupan UMKM yang diberdayakan | 5% | 7% | 5,191,925,000 | 9% | 4,947,882,840.51 | 11% | 7,129,676,594.20 | 11% | 17,269,484,434.71 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha | 5% | 15% | 2,540,860,490 | 20% | 5,497,330,677.35 | 25% | 7,699,312,092.70 | 25% | 15,737,503,260.05 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | | Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas) | 0,15% | 1% | | 2% | | 3% | | 3% | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | | | | | 4,333,013,920.0 | | 4,577,523,610.49 | | 4,850,000,000.0 | | 13,760,537,530.49 | |
| 2 | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor | 50% | 75% | 236,098,000 | 85% | 625,523,610.49 | 100% | 650,000,000 | 100% | 1,511,621,610.49 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun) | 4,54 | 3,50 | 1,447,034,000 | 4 | 1,640,000,000.0 | 4,5 | 1,800,000,000.0 | 16,54 | 4,887,034,000.0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| | | | | Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun) | 5,67 | 4,50 | | 5 | | 5,67 | | 20,84 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentasi Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP | 80% | 80% | 1,324,672,696 | 85% | 1,491,000,000 | 90% | 1,500,000,000 | 90% | 4,315,672,696.0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal | N/A | 50% | 540,958,712 | 75 % | 571,000,000.0 | 100% | 600,000,000.0 | 100% | 1,711,958,712.0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 2 | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal | 75% | 80% | 784,250,512 | 90% | 250,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 1,334,250,512.0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 2 | 19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | | | | 1,205,637,643,011.0 | | 820,120,000,000.0 | | 22,278,632,150.0 | | 2,048,036,275,161.0 | |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 0.16% | 0.19% | 3,613,311,700 | 0.22% | 5,250,000,000 | 0.25% | 5,262,000,000.00 | 0,25 % | 14,125,311,700 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | 1.09% | 1.16% | | 1,19 % | | 2.03% | | 2,03 | | |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Peningkatan Prestasi olah raga | 291,36 % | 100% | 1,200,833,531,311 | 0 | 813,520,000,000 | 200% | 15,816,632,150.00 | 200% | 2,030,170,163,461 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | 80% | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | | |
| 2 | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase organisasi pramuka aktif | 100% | 100% | 1,190,800,000 | 100% | 1,350,000,000 | 100% | 1,200,000,000.00 | 100% | 3,740,800,000 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | | | | | 249,639,860.0 | | 300,000,000.0 | | 350,000,000.0 | | 899,639,860.0 | |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral | 40% | 50% | 249,639,860 | 80% | 300,000,000.0 | 100% | 350,000,000.0 | 100 % | 899,639,860 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | | | | | 247,075,760.0 | | 300,000,000.0 | | 350,000,000.0 | | 897,075,760.0 | |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian | 30% | 35% | 247,075,760 | 50 % | 300,000,000.0 | 60 % | 350,000,000.0 | 60 % | 897,075,760 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | 8,126,965,820.0 | | 9,171,833,138.0 | | 10,457,047,102.0 | | 27,755,846,060.0 | |
| 2 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | 0,80 % | 1,6 % | 892,497,820 | 2,8 % | 1,254,598,538.00 | 4,5 % | 1,380,058,392.00 | 4,5 % | 3,527,154,750 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------|--|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2 | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan | N/A | | | 7,5 % | 250,000,000.00 | 9,4 % | 325,000,000.00 | 9,4 % | 575,000,000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | |
| 2 | 22 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi. | N/A | 2,8 % | 339,001,000 | 3,9 % | 220,000,000.00 | 5,6 % | 242,000,000.00 | 5,6 % | 801,001,000 | KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | |
| 2 | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | N/A | 0.48% | 1,921,987,000 | 0.78% | 1,845,741,100.00 | 1% | 2,162,815,210.0 | 1% | 5,930,543,310 | KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | |
| 2 | 22 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase Kunjungan ke museum | 100 % | 100 % | 4,973,480,000 | 100 % | 5,601,493,500.00 | 100 % | 6,347,173,500.00 | 100% | 16,922,147,000 | KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN | |
| 2 | 23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | | | | | 7,220,750,000.0 | | 4,150,925,922.0 | | 4,229,555,982.63 | | 15,601,231,904.63 | | |
| 2 | 23 | 02 | PROGAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik | 100.000 Orang | 150.000 orang | 6,620,750,000 | 200.000 orang | 3,550,925,922.0 | 250.000 orang | 3,629,555,982.63 | 250.000 orang | 13,801,231,905 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 2 | 23 | 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase naskah kuno yang di lestarikan | 100 % | 100 % | 600,000,000 | 100 % | 600,000,000.0 | 100 % | 600,000,000.0 | 100 % | 1,800,000,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 2 | 24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | | | | | 2,696,250,000.0 | | 2,809,136,228.37 | | 2,912,348,740.88 | | 8,417,734,969.25 | | |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 9,43% | 18,87 % | 2,696,250,000 | 37,74% | 2,809,136,228.37 | 75,47% | 2,912,348,740.88 | 75,47 % | 8,417,734,969 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 3 | Urusan Pilihan | | | | | | 685,119,456,341.19 | | 590,299,827,891.71 | | 620,768,434,325.85 | | 1,894,599,531,109.75 | | |
| 3 | 25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | 68,933,788,362.0 | | 68,628,877,157.32 | | 75,635,125,139.64 | | 213,197,790,658.96 | | |
| 3 | 25 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Produksi garam rakyat | 140.338,9 ton | 46.500 Ton | 13,157,763,852 | 47.500 ton | 10,850,398,104.00 | 48.450 ton | 11,790,721,227 | 48.450 ton | 35,798,883,183.0 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan | 4,35% | 50,17 % | | 74,08 % | | 100% | | 100% | | | |
| | | | | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%) | 67,28% | 67,29% | | 67,30% | | 67,31% | | 67,31% | | | |
| | | | | Nilai Produksi Perikanan Tangkap | Rp. 8.631,30 M | Rp. 8.852,48 M | | 26,519,004,784 | Rp. 9.029,52 M | 27,900,534,075.00 | Rp. 9.210,12 M | 32,342,830,856.00 | Rp. 9.210,12 M | 86,762,369,715.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan tangkap | 398,565,2 Ton | 396,992,3 Ton | | | 404,932,2 Ton | | 413,030,8 Ton | | 413,030,8 Ton | | |
| | | | | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | 30,18 % | 23,89 % | | | 27,07 % | | 30,25 % | | 30,25 % | | |
| | | | | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | 31,58 % | 57,89% | | | 68,42% | | 78,95% | | 78,95% | | |
| | | | | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan | 24,26% | 25,61% | | | 26,79% | | 27,17% | | 27,17 % | | |
| | | | | Nilai produksi perikanan budidaya | Rp. 14.856,34 M | Rp. 14.474,73 M | | 15,468,584,804 | 15.198,47 M | 15,726,481,077.00 | Rp. 15.958,39 M | 17,195,452,115.00 | Rp. 15.958,39 M | 48,390,517,996.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi perikanan budidaya | 3.662,761,4 ton | 3.898,767,4 Ton | | | 4.093,705,8 | | 4.298,391,1 | | 4.298,391,1 Ton | | |
| | | | | Persentase ketersediaan benur berkualitas | 90% | 100% | | | 100% | | 100% | | 100 % | | |
| | | | | Persentase Keputuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | 82,4% | 87,48% | | | 11,139,152,608 | | 11,584,848,371.39 | | 11,641,422,613.0 | | |
| | | | | Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi | Rp. 293,120 Miliar | Rp. 304,96 Miliar | | | 2,649,282,314 | | 2,566,615,529.93 | | 2,664,698,328.64 | | |
| 3 | 25 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi | 5.332,1 Ton | 5.329,0 Ton | | | 5.436,2 Ton | | 5.544,1 Ton | | 5.544,1 Ton | | |
| | | | | Nilai Pengolahan dan PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | | | | |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | | |
|------|----|---|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | Persentase Pembinaan mutu produk perikanan | 20% | 60% | | 80% | | 100% | | 100% | | | | |
| 3 | 26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | | | | 35,144,666,300.0 | | 34,426,257,082.0 | | 41,446,551,767.0 | | 111,017,475,149.0 | | | |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan | 0,5 % | 0,5 % | 6,583,932,500 | 0,7 % | 10,231,219,125.00 | 1,0 % | 11,371,340,438.00 | 1,0 % | 28,186,492,063.0 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPAWISETAAN | |
| | | | Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal | 12,5 % | 12,5 % | 12,5% | 20,8 % | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | 116 % | 100% | 23,989,794,000 | 100% | 18,467,816,177 | 100% | 23,627,767,371 | 100% | 66,085,377,548.00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPAWISETAAN | |
| | | | Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | 58,27 % | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan | 13 % | 13 % | 68,920,000 | 13 % | 400,000,000.00 | 13 % | 400,000,000.00 | 13 % | 868,920,000.00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPAWISETAAN | |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan | N/A | 3,18 % | 4,502,019,800 | 4,09 % | 5,327,221,780 | 5,45 % | 6,047,443,958 | 5,45 % | 15,876,685,538.00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPAWISETAAN | |
| | | | Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan | N/A | 7,4 % | 10 % | 12 % | | | | | | | | |
| 3 | 27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | | | | 519,546,588,576.19 | | 432,669,115,310.20 | | 441,249,679,592.71 | | 1,393,465,383,479.10 | | | |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton), | 5.432,55 Ton | 7000 Ton | 235,287,219,099 | 7000 Ton | 140,039,207,157 | 7000 Ton | 145,066,907,315 | 26432,55 ton | 520,393,333,571.0 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | | Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha) | N/A | 100 Ha | 110 Ha (210 Ha) | 121 Ha (331 Ha) | | | | | | | | |
| | | | Produktifitas Padi | 51 Kw/Ha | 48,95 Kw/Ha | 49,68 Kw/Ha | 50,43 Kw/Ha | | | | | | | | |
| | | | Produktifitas Jagung | 57 Kw/Ha | 54,10 Kw/Ha | 54,91 Kw/Ha | 55,73 Kw/Ha | | | | | | | | |
| | | | Produtifitas Kopi | 588 Kg/Ha | 588 Kg/Ha | 588 Kg/Ha | 588,1 Kg/Ha | | | | | | | | |
| | | | Produtifitas Kakao | 634 Kg/Ha | 9,000.00 | 10,500 Kg/Ha | 12,000 Kg/Ha | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian | 377 Unit | 250 Unit | 275 Unit | 300 Unit | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Ketersediaan Pupuk | 266,50 Ton | 298,65 ton | 310,60 ton | 323,02 ton | | | | | | | | |
| | | | Produksi Daging (ton) | 150,462 ton | 167,936 | 177,425 | 24,502,687,679.00 | | | 187,450 | 24,597,911,781 | 187,450 | 74,355,856,677.0 | DINAS PETERNAKAN | |
| | | | Produksi Telur (Ton) | 250,289 ton | 191,968 | 202,814 | | | | 214,274 | | 214,274 | | | |
| | | | Produksi Susu (Ton) | 1,888 Ton | 2,035 | 2,096 | | | | 2,159 | | 2,159 | | | |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.) | 51.006.977.860 Rp | 460,835,232 2,750 Rp | 193,308,259,883.19 | 463,034,340.4 35 Rp | 211,404,665,383.70 | 465,893,180.4 26 Rp | 213,943,902,220.83 | 465,893,180.4 .426 Rp | 618,656,827,487.72 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | | Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.) | 3.980.600.000 Rp | 6.000.000.00 Rp | 7.000.000.000 Rp | 8.000.000.000 Rp | | | | | | | | |
| | | | Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan | 9.412.084.000 (Rp) | 29,493,840.000 (Rp) | 33,954,745,936 | 37,059,609.11 3 (Rp) | 34,676,405,559.0 | | 38,617,836.19 2 Rp | 34,691,405,559.0 | 38,617,836.192 Rp | | | |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus) | 18.988 Kasus | 25.063 Kasus | 10,227,232,050.00 | 2,978,323,304 | 12,532 Kasus | 3,088,952,176.00 | 11,279 Kasus | 3,108,755,975.00 | 11,279 Kasus | 9,176,031,455.00 | DINAS PETERNAKAN |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Penurunan Serangan OPT (%) | 5.00% | 4,7 % | | | 4,6 % | | 4,5 % | 7,352,454,918.88 | 4,5 % | 24,582,024,986.38 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | | | Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%) | 70.00% | 76,49 % | | 78,79 % | 81,15 % | | | | | | | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|----|--|---|---|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 3 | 27 | 06 | PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan | 11 % | 15 % | 50,259,000 | 20 % | 50,761,590.0 | 25% | 51,269,205.0 | 25 % | 152,289,795.00 | DINAS PETERNAKAN | |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP (%) | 0 | 0,5 | 17,151,902,300.0 | 0,5 | 10,659,497,415.0 | 0,5 | 11,192,472,285.0 | 0,5 | 39,003,872,000.0 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | | | Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak | 1 : 15 | 1 : 15 | 1,333,389,787 | 1 : 14 | 1,244,600,333.0 | 1 : 13 | 1,244,600,333.0 | 1 : 13 | 3,822,590,453.00 | DINAS PETERNAKAN | |
| 3 | 28 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | | | | 28,211,375,850.0 | | | 20,621,369,000.0 | | | 25,575,945,000.0 | | 74,408,689,850.0 |
| 3 | 28 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu | 4.042 Ton | 283 Ton | 4,771,522,850.0 | 283 Ton | 9,101,569,500.0 | 283 Ton | 9,024,330,000.0 | 2.10596 Ton | 22,897,422,350.0 | DINAS KEHUTANAN | |
| | | | | Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan | 132.100 M3 | 92.336,62 M3 | | 92.336,62 M3 | | 92.336,62 M3 | | 477175.12 M3 | | | |
| | | | | Persentase Kerusakan Hutan pertahun | 17,43 % | 17,59 % | | 16,20 % | | 14,82 % | | 14,82 % | | | |
| | | | | Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas) | 55,73 % | 57,91 % | | 61,60 % | | 65,47 % | | 65,47 % | | | |
| | | | | Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata | N/A | 2 Jenis | 393,758,000.0 | 2 Jenis | 393,758,000.0 | 2 Jenis | 393,758,000.0 | 2 Jenis | 1,181,274,000.0 | DINAS KEHUTANAN | |
| 3 | 28 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan | 12,19 % | 15,65 % | 20,620,155,000 | 16,25 % | 8,400,101,500.0 | 16,76 % | 13,431,917,000.0 | 16,76 % | 42,452,173,500.0 | DINAS KEHUTANAN | |
| 3 | 28 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI | Jumlah DAS yang direhabilitasi | 2 DAS | 2 DAS | 2,425,940,000 | 2 DAS | 2,725,940,000 | 2 DAS | 2,725,940,000 | 2 DAS | 7,877,820,000.0 | DINAS KEHUTANAN | |
| 3 | 29 | 01 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | 16,329,510,600.0 | | 16,571,581,355.00 | | 17,441,597,853.0 | | 48,904,502,359.0 | | |
| 3 | 29 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi | 60 % | 70 % | 267,080,600 | 80 % | 271,039,041 | 90 % | 285,268,713 | 90 % | 823,388,354.0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| 3 | 29 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) | 6.146,55 Ha | 100.000 ha | 199,355,500 | 130.000 Ha | 202,308,999 | 150.000 Ha | 386,146,55 Ha | 401,664,499.0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | |
| | | | | Penetuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) | N/A | 50.000 Ha | | 100.000 Ha | | 150.000 Ha | 213,134,596 | 300.000 Ha | 213,134,596.0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| 3 | 29 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga | 88,47 | 92 % | 622,886,000.00 | 93.4 % | 632,119,742 | 95 % | 665,306,352 | 95 % | 1,920,312,094.0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| 3 | 29 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | 96,82 % | 98,25 % | 15,240,188,500.00 | 98.50% | 15,466,113,573.00 | 99 % | 16,277,888,192 | 99 % | 46,984,190,265.0 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| | | | | Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan) | 98,09 | 99% | | 99,25 % | | 99,50 % | | 99,50 % | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| 3 | 30 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | 3,137,773,703.0 | | 3,807,643,703.0 | | 4,678,543,936.0 | | 11,623,961,342.0 | | |
| 3 | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan | 100 % | 100 % | 189,932,500 | 100 % | 199,932,500.0 | 100 % | 199,932,500.0 | 100 % | 589,797,500.0 | DINAS PERDAGANGAN | |
| | | | | Persentase Penerbitan SKA | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | DINAS PERDAGANGAN | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|---|---|--|---|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 3 | 30 | 03 | PPROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 100% | 100% | 348,980,536 | 100% | 348,980,536.00 | 100% | 348,980,536.00 | 100% | 1,046,941,608.0 | DINAS PERDAGANGAN | |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya | 100% | 100 % | 665,222,000 | 100 % | 895,222,000 | 100 % | 1,225,222,000 | 100 % | 2,785,666,000.0 | DINAS PERDAGANGAN | |
| 3 | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai Ekspor Perdagangan | 57.950.717 \$ US | 146.674.567 \$ | 279,005,000 | 158.408.532 \$ US | 678,875,000 | 171.081.215 \$ US | 1,023,875,000.00 | 476.164.314 \$ US | 1,981,755,000.0 | DINAS PERDAGANGAN | |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen | 100 % | 100 % | 1,554,699,767.00 | 100 % | 1,544,699,767.00 | 100 % | 1,740,600,000.00 | 100 % | 4,839,999,534.0 | DINAS PERDAGANGAN | |
| 3 | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail | 100 % | 100 % | 99,933,900.00 | 100 % | 139,933,900.00 | 100 % | 139,933,900.00 | 100 % | 379,801,700.00 | DINAS PERDAGANGAN | |
| 3 | 31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | | | | | 13,672,910,950.0 | | | 13,380,504,284.19 | | | 14,390,991,037.50 | | 41,444,406,271.69 |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pertumbuhan jumlah industri | 6% | 5% | 12,191,374,570 | 6% | 11,891,365,249.92 | 7% | 13,595,969,372.85 | 7% | 37,678,709,192.77 | DINAS PERINDUSTRIAN | |
| 3 | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri | 1 % | 2% | 1,090,432,650 | 2,5 % | 1,144,954,282.00 | 3 % | 438,190,970.65 | 3% | 2,673,577,902.65 | DINAS PERINDUSTRIAN | |
| 3 | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS | 1% | 2 % | 391,103,730 | 3 % | 344,184,752.27 | 4% | 356,830,694.0 | 4% | 1,092,119,176.28 | DINAS PERINDUSTRIAN | |
| 3 | 32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | | | | | 142,842,000.0 | | | 194,480,000.0 | | | 350,000,000.0 | | 537,322,000.0 |
| 3 | 32 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan | 100 % | | 0.0 | 100% | 50,000,000.0 | 100% | 100,000,000.0 | 100% | 150,000,000.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 3 | 32 | 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase penempatan transmigrasi | 100 % | 100% | 95,107,000 | 100% | 97,165,000.00 | 100% | 100,000,000.00 | 100% | 292,272,000.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 3 | 32 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase penempatan transmigrasi | 100 % | 100% | 47,735,000 | 100% | 47,315,000.00 | 100% | 150,000,000.00 | 100% | 245,050,000.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 4 | | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | | 1,503,559,977,638.0 | | | 1,508,846,113,320.65 | | | 1,526,742,140,366.85 | | 4,539,148,231,325.50 |
| 4 | 01 | Sekretariat Daerah | | | | | 1,258,699,256,528.0 | | | 1,261,885,392,210.65 | | | 1,278,281,419,256.85 | | 3,798,866,067,995.50 |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah | 100 % | 100 % | 4,794,694,160 | 100 % | 6,355,369,118.0 | 100 % | 9,280,135,220.0 | 100 % | 20,430,198,498.00 | BIRO ORGANISASI | |
| 4 | 01 | 03 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi | 100% | 100% | 1,407,658,044 | 100% | 1,540,000,000.0 | 100% | 4,414,749,061.59 | 100 % | 7,362,407,105.59 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan. | 100 % | 100 % | 1,225,538,715,412 | 100 % | 1,226,220,302,319.0 | 100 | 1,228,220,266,319.0 | 100 | 3,679,979,284,050.0 | BIRO KESEJAHTERAAN | |
| | | | | Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang mlekk aksara Al-Qur'an (Prioritas) | 36,67 | 35,25 | | 35,50 | | 35,55 | | 35,55 | | BIRO KESEJAHTERAAN | |
| | | | | Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusastraan (Prioritas) | 10 % | 10 % | | 10 % | | 10 % | | 10 % | | BIRO KESEJAHTERAAN | |
| 4 | 01 | 05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan | 2,4 | 3 | 20,289,253,332 | 4 | 20,289,253,332 | 5 | 21,289,253,332 | 5 | 61,867,759,996.0 | BIRO HUKUM | |
| | | | | Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BIRO HUKUM | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|--|---|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | 01 | 06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan | 97% | 100% | 4,331,982,412 | 100% | 4,331,982,412 | 100% | 7,491,157,453 | 100% | 16,155,122,277.07 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | |
| 4 | 01 | 08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSITRASI PEMBANGUNAN | Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah | 95% | 100% | 174,008,100 | 100% | 285,035,187.65 | 100% | 788,159,527.18 | 100% | 1,247,202,814.84 | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | |
| 4 | 01 | 07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN IASA | Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana | 100 % | 100 % | 2,162,945,068.0 | 100 % | 2,863,449,842.0 | 100 % | 6,797,698,344.0 | 100 % | 11,824,093,254.0 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
| | | | | Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| 4 | 02 | Sekretariat Dewan | | | | | 244,860,721,110.0 | | 246,960,721,110.0 | | 248,460,721,110.0 | | 740,282,163,330.0 | | |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase PROLEGDA yang terealisir | 81,25 % | 100 % | 244,860,721,110 | 100 % | 246,960,721,110.0 | 100 % | 248,460,721,110.0 | 100 % | 740,282,163,330.0 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | | | Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPIMD dan RKPD | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| | | | | Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya | 81,25 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| 5 | | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | 2,491,686,868,049.0 | | 2,485,159,725,512.93 | | 2,691,257,409,923.42 | | 7,668,104,003,485.35 | | |
| 5 | 01 | Perencanaan | | | | | 25,051,098,608.0 | | 23,461,116,089.52 | | 25,449,696,574.75 | | 73,961,911,272.27 | | |
| 5 | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas) | % Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD | 100 % | 100 % | 14,241,588,156.0 | 100 % | 14,591,598,156.0 | 100 % | 15,713,198,815.0 | 100 % | 44,546,385,127.0 | BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | | Persentase peningkatan capaian kinerja program | N/A | 0,5% | | 0,5% | | 0,5% | | 0,5% | | | |
| 5 | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM | 50 % | 60 % | 10,809,510,452 | 80% | 8,869,517,933.52 | 100 % | 9,736,497,759.75 | 100 % | 29,415,526,145.27 | BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA | 70 % | 80 % | | 90 % | | 95 % | | 95 % | | | |
| | | | | Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 80% | 90 % | | 90 % | | 95 % | | 95 % | | | |
| 5 | 02 | Keuangan | | | | | 2,439,063,367,976.0 | | 2,438,943,720,199.85 | | 2,633,313,610,722.84 | | 7,511,320,698,898.69 | | |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | BANDAR KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | | Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|---|--|---|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu | 100 % | 100 % | 2,400,766,034,486 | 100 % | 2,402,898,671,787.85 | 100 % | 2,602,081,807,451.84 | 100 % | 7,405,746,513,725.69 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Persentase Serapan Belanja Daerah | 96% | 94% | | 95% | | 96% | | 96% | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD | 100 % | 100 % | | 1,877,156,782.0 | | 1,877,156,782.0 | | 2,271,359,706.0 | 100 % | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah | 90 % | 90 % | 6,839,204,428 | 91 % | 3,730,000,000.0 | 92 % | 3,825,000,000.0 | 92 % | 14,394,204,428.0 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat | 55 % | 56% | | 57% | | 58% | | 58% | | | |
| 5 | 02 | 04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentasi Peningkatan PAD | 5 % | 5 % | 29,580,972,280 | 5 % | 30,437,891,630.0 | 5 % | 25,135,443,565.0 | 5 % | 85,154,307,475.0 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 03 | KEPEGAWAIAN | | | | | 5,980,746,888.0 | | 6,025,602,490.0 | | 6,415,458,971.0 | | 18,421,808,349.0 | |
| 5 | 03 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN; | 57 % | 60 % | 5,980,746,888 | 63% | 6,025,602,490.0 | 65 % | 6,415,458,971.0 | 65 % | 18,421,808,349.0 | KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta; | 80% | 85 % | | 90 % | | 100 % | | 100 % | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik | 88 % | 91 % | | 93 % | | 95 % | | 95 % | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| 5 | 04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 5,435,028,632.0 | | 5,553,028,632.0 | | 6,330,130,000.0 | | 17,318,187,264.0 | |
| 5 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural | 100 % | 100 % | 5,435,028,632 | 100 % | 5,553,028,632.00 | 100 % | 6,330,130,000.00 | 100 % | 17,318,187,264.00 | BADAN PENGENBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 | 05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 11,269,424,704.0 | | 6,405,000,000.0 | | 6,992,500,000.0 | | 24,666,924,704.0 | |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas) | N/A | 3 % | 11,269,424,704 | 3 % | 6,405,000,000.0 | 3 % | 6,992,500,000.0 | 9 % | 24,666,924,704.00 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DESEÑ ITIAN DAN |
| 5 | 07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | | 4,887,201,241.0 | | 4,771,258,101.56 | | 12,756,013,654.83 | | 22,414,472,997.39 | |
| 5 | 07 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | Persentase Pelayanan tamu daerah | 100 % | 100 % | 4,887,201,241.0 | 100 % | 4,771,258,101.56 | 100 % | 12,756,013,654.83 | 100 % | 22,414,472,997.39 | BADAN PENGHUBUNG | |
| | | | Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | BADAN PENGHUBUNG | |
| 6 | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 17,569,888,584.0 | | 17,997,721,178.66 | | 22,349,682,553.12 | | 57,917,292,315.78 | |
| 6 | 01 | Inspektorat Daerah | | | | | 17,569,888,584.0 | | 17,997,721,178.66 | | 22,349,682,553.12 | | 57,917,292,315.78 | |
| 6 | 01 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP | 65,96 % | 70.20% | 12,256,108,048.0 | 75.40% | 12,592,465,578.96 | 79.50% | 16,040,112,029.04 | 79.50% | 40,888,685,656.0 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota | 68,83% | 69.59% | | 71.04% | | 72.50% | | 72.50% | | | |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERUBAHAN RPJMD (TAHUN 2019) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----|---|--|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | |
| 6 | 01 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah | 100 % | 100 % | 5,313,780,536.0 | 100 % | 5,405,255,599.70 | 100 % | 6,309,570,524.08 | 100 % | 17,028,606,659.78 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| | | | Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| 8 | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | 13,194,759,480.0 | | 13,578,749,903.61 | | 14,976,003,267.74 | | 41,749,512,651.35 | | | |
| 8 | 01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 13,194,759,480.0 | | 13,578,749,903.61 | | 14,976,003,267.74 | | 41,749,512,651.35 | | | |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara | N/A | 20 % | 274,996,630 | 20 % | 181,445,057.20 | 20 % | 200,115,753.59 | 60 % | 656,557,440.79 | BADAN KESATUAN BANGSAM DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu | 81,48% | 81,70% | 7,636,189,068 | 81,89% | 7,814,993,845.82 | 82,01% | 8,619,156,712.57 | 82,01% | 24,070,339,626.39 | BADAN KESATUAN BANGSAM DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan | 20 % (372/1.864) | 20 % | 2,165,441,258 | 20 % | 2,297,536,462.92 | 20 % | 2,533,952,964.00 | 60 % | 6,996,930,684.92 | BADAN KESATUAN BANGSAM DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) | 937 Penyalahguna | 0 | 1,224,235,400 | 20 % | 1,322,011,260.35 | 40 % | 1,458,046,219.03 | 40 % | 4,004,292,879.38 | BADAN KESATUAN BANGSAM DAN POLITIK |
| | | | | Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani | 100 % | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat | 0 % (80 kasus) | 20 % (64 kasus) | 1,893,897,124 | 20 % (48 kasus) | 1,962,763,277.32 | 10 % (40 kasus) | 2,164,731,618.55 | 50 % (40 kasus) | 6,021,392,019.87 | BADAN KESATUAN BANGSAM DAN POLITIK |
| | | Urusan Penunjang | | | | 4,061,898,675,942.30 | | 4,285,879,664,695.96 | | 4,451,765,606,365.31 | | 12,799,543,947,003.60 | | |
| x xx | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah | 100% | 100 % | 4,061,898,675,942.30 | 100 % | 4,285,879,664,695.96 | 100 % | 4,451,765,606,365.31 | 100 % | 12,799,543,947,003.60 | Semua OPD | |
| | | | Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik | 100% | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| | | | Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP | 100% | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |

BAB IX

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan.

9.1.1. Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel IX.1
Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2020-2023
Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | Indikator Kinerja Makro | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2019) | Tahun 2020 | | Target Kinerja Tahun: | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD |
|-----|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,92 | -0,73 | -0,70 | 4,10–5,55 | 4,62–5,98 | 5,04–6,52 | 5,04–6,52 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 8,56 (Sept.) | 12,19 | 8,99 | 8,70 | 8,10 | 7,45 | 7,45 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4,62 (Agust.) | 8,79 | 6,31 | 6,08 | 5,90 | 5,69 | 5,69 |
| 4 | Rasio Gini | Angka | 0,391 (Sept.) | 0,414 | 0,382 | 0,382 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka/Nilai | 71,66 | 72,18 | 71,93 | 72,20 | 72,57 | 73,05 | 73,05 |
| 6 | PDRB Perkapita ADHB | Juta Rp. | 56,98 | 56,69 | 56,51 | 59,23 | 62,37 | 65,98 | 65,98 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021 dan RPJMD Pokok Prov. Sulse, diolah

9.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel IX.2
Target Indikator Kinerja Utama 2019-2020 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023
Provinsi Sulawesi Selatan

| Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD Pokok | | | | | | Indikator Kinerja Utama Berdasarkan P-RPJMD | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD | |
|--|---|--------------|---------------|-------------|--------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| IKU (Urutan berdasarkan Indikator Tujuan/Sasaran pada RPJMD Pokok) | Satuan | Target 2019 | Capaian 2019 | Target 2020 | Capaian 2020 | IKU (Nomor Urut sesuai Nomor Urut Indikator Tujuan/Sasaran pada P-RPJMD) | Asumsi Capaian 2021 | Target Tahun 2022 | Target Tahun 2023 | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Huruf/ angka | CC (>50-60) | B (>60-70) | B | B (60,07) | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | BB (71 – 80) | BB (71 – 80) | A (81 – 90) | A (81 – 90) |
| 2 | Nilai SAKIP | Huruf/ angka | B | B | B | B (63,02) | 2 | Nilai SAKIP Provinsi | BB (>70-80) | A (>80 – 90) | A (>80-90) | A(>80-90) |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik | Huruf/ angka | D | B | B | B (75) | 3 | Indeks Pelayanan Publik | B(3,51 – 4) | A-(4,01 – 4,50) | A (4,51 – 5,0) | A (4,51 – 5,0) |
| 4 | Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air | - | 7.6 | 7.2 | 1.7 | -3.53 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Indeks Aksesibilitas Infrastruktur | Angka | 56 | 63.07 | 63.09 | 77.79 | 4 | Indeks Layanan Infrastruktur | 79,50 | 81,70 | 83,4 | 83,4 |
| 6 | PDRB Perkapita | Juta Rp. | 57.64 | 57.04 | 56.69 | 56.51 | 5 | PDRB Perkapita (ADHB) | 59,23 | 62,37 | 65,98 | 65,98 |
| 7 | Angka Kemiskinan | % | 8.78 | 8.56 | 12.19 | 8,99 (Sept.) | 6 | Tingkat Kemiskinan | 8.70 | 8,10 | 7,45 | 7,45 |
| 8 | PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) | Juta Rp. | 33,110,348.45 | 33,110,350 | 34,424,045 | 33,846,680 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5.17 | 4.97 | 8.79 | 6.31 | 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 6.08 | 5,90 | 5,69 | 5,69 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD Pokok | | | | | | Indikator Kinerja Utama Berdasarkan P-RPJMD | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD |
|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------------|
| Iku (Urutan berdasarkan Indikator Tujuan/Sasaran pada RPJMD Pokok) | Satuan | Target 2019 | Capaian 2019 | Target 2020 | Capaian 2020 | Iku (Nomor Urut sesuai Nomor Urut Indikator Tujuan/Sasaran pada P-RPJMD) | Asumsi Capaian 2021 | Target Tahun 2022 | Target Tahun 2023 | | |
| 10 | Indeks Gini | Angka | 0.385 | 0.391 | 0.414 | 0.382 | 8 | Rasio Gini | 0.382 | 0.381 | 0,381 |
| 11 | Indeks Williamson | Angka | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.602 | 9 | Indeks Williamson | 0.610 | 0.608 | 0,607 |
| 12 | IPM | Angka | 71,58 | 71,66 | 72,18 | 73,05 | 10 | IPM | 72,20 | 72,57 | 73,05 |
| 13 | Indeks Pendidikan | Angka | 65,19 | 64,64 | 65,62 | 67,05 | 11 | Indeks Pendidikan | 66,29 | 66,57 | 67,05 |
| 14 | IPG | - | 93,18 | 93,09 | 93,4 | 93,09 (2019) | - | - | - | - | - |
| 15 | IDG | Angka | 74,01 | 74,01 | 75,54 | 76,32 | 12 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 75,21 | 76,36 | 77,23 |
| 16 | Indeks Kesehatan | Angka | 77,03 | 77,58 | 77,55 | 77,86 | 13 | Indeks Kesehatan | 77,76 | 77,82 | 77,86 |
| - | - | - | - | - | - | - | 14 | Angka kriminalitas | 24,709 | 24,573 | 24,438 |
| 17 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 7,2 - 7,6 | 6,92 | -0,73 | -0,70 | 15 | Pertumbuhan ekonomi | 4,10 – 5,55 | 4,62-5,98 | 5,04–6,52 |
| 18 | Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) | Rp/Angkatan Kerja | 78,777,309,00 | 82,027,871,00 | 80,719,198,89 | 76,913,142,88 | 16 | Produktifitas Total Daerah | 6,913,143 | 77,086,000,10 | 77.349.122 |
| 19 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | poin | 73,33 | 75,5 | 75,79 | 71,75 | 17 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 72,25 | 72,63 | 72,84 |
| 20 | Potensi Penurunan emisi GRK | Juta Ton CO ₂ Eq | 1,10 | 0,86 | 0,89 | 0,96 | 18 | Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq) | 1,07 | 1,198 | 1,347 |
| | | | | | | | | | | | 1,347 |

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2021, diolah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

9.1.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah provinsi.

Adapun target dan capaian indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 serta penetapan target indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2023 disajikan pada tabel dibawah berikut :

**Tabel IX.3
Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
(Sesuai RPJMD Pokok Prov. SulSel Tahun 2018-2023)**

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | | | Satuan | Target Tahun 2020 | | | |
|---|--|-----------|---|----------------|-------------------|--|--|--|
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | | | | | | | | |
| 1 | | | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Pertumbuhan PDRB | % | 7,4-7,8 | | | |
| 1 | 2 | 2 | Laju Inflasi | % | 3,0-1,0 | | | |
| 1 | 3 | 3 | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB | % | 8 | | | |
| 1 | 4 | 4 | PDRB Perkapita | Juta Rp | 62.97 | | | |
| 1 | 5 | 5 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | % | 23.77 | | | |
| 1 | 6 | 6 | Indeks Gini | | 0.376 | | | |
| 1 | 7 | 7 | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar | % | 51.49 | | | |
| 1 | 8 | 8 | Indeks Ketimpangan Williamson | | 0.57 | | | |
| 1 | 9 | 9 | Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan | % | 91 | | | |
| 1 | 10 | 10 | Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB | % | 23.77 | | | |
| 1 | 11 | 11 | Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB | % | 7.75 | | | |
| 1 | 12 | 12 | PDRB Pertanian | Trilyun Rp | 135.36 | | | |
| 1 | 13 | 13 | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB | % | 4.42 | | | |
| 1 | 14 | 14 | PDRB Perkebunan | Trilyun Rp | 23.4 | | | |
| 1 | 15 | 15 | PDRB Peternakan | Trilyun Rupiah | 6 | | | |
| 1 | 16 | 16 | Kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB | % | 1.21 | | | |
| 1 | 17 | 17 | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB | % | 0.08 | | | |
| 1 | 18 | 18 | Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB | % | 6.26 | | | |
| 1 | 19 | 19 | Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB | % | 9.48 | | | |
| 1 | 20 | 20 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | 14.5 | | | |
| 1 | 21 | 21 | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | % | 13.89 | | | |
| 1 | 22 | 22 | Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri | % | 15 | | | |
| 1 | 23 | 23 | Pertumbuhan PDRB Industri | % | 7.65 | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|-----|----|----|---|--------|-------------------|
| 1 | 24 | 24 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | % | 40.72 |
| 1 | 25 | 25 | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | % | 94.4 |
| 1 | 26 | 26 | Penguatan Cadangan Pangan | % | 80 |
| 1 | 27 | 27 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | % | 62.99 |
| 2 | | | FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |
| 2 | 1 | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | 72.18 |
| 2 | 2 | 2 | Angka Melek Huruf (AMH) | | 91.26 |
| 2 | 3 | 3 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | | 8.29 |
| 2 | 4 | 4 | Angka Harapan lama Sekolah | | 13.86 |
| 2 | 5 | 5 | Angka Usia Harapan Hidup | | 70.16 |
| 2 | 6 | 6 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | | 62.42 |
| 2 | 7 | 7 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 62.42 |
| 2 | 8 | 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5.05 |
| 2 | 9 | 9 | Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | % | 94.62 |
| 2 | 10 | 10 | Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja | % | 38.63 |
| 2 | 11 | 11 | Prevalensi Balita Gizi Buruk (Balita Kurus/Wasting) | % | 8 |
| | | | ASPEK PELAYANAN UMUM | | |
| | | | URUSAN WAJIB | | |
| 1 | | | TERKAIT PELAYANAN DASAR | | |
| 1 | 1 | | PENDIDIKAN | | |
| 1 | 1 | 1 | Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK | % | 91.42 |
| 1 | 1 | 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA | % | 84.5 |
| 1 | 1 | 3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | % | 85.98 |
| 1 | 1 | 4 | Angka Putus SekolahSMA/SMK/MA | % | 1.07 |
| 1 | 1 | 5 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | % | 100 |
| 1 | 1 | 6 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 97.55 |
| 1 | 1 | 7 | Rasio Guru/Murid per Kelas Pendidikan Menengah | | 1:17 |
| 1 | 1 | 8 | Kondisi Bangunan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi baik | % | 56.08 |
| 1 | 1 | 9 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | | 0.1888889 |
| 1 | 1 | 10 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | % | 98.29 |
| 1 | 1 | 11 | Penduduk yang Berusia>15 Tahun Melek Huruf (TidakButaAksara) | % | 94.3 |
| 1 | 1 | 12 | Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | % | 97.96 |
| 1 | 2 | | KESEHATAN | | |
| 1 | 2 | 1 | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup | Kasus | 1,055 |
| 1 | 2 | 2 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup | Kasus | 1,147 |
| 1 | 2 | 3 | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup | Kasus | 814 |
| 1 | 2 | 4 | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | Kasus | 113 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|-----|---|----|---|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 5 | Rasio Posyandu per Satuan Balita | Per 1000 Balita | 13.95 |
| 1 | 2 | 6 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk | Per 100.000 Balita | |
| 1 | 2 | 7 | Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk | Per 100.000 Penduduk | 1.23 |
| 1 | 2 | 8 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | Per 100.000 Penduduk | 19 |
| 1 | 2 | 9 | Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk | Per 100.000 Penduduk | 37.72 |
| 1 | 2 | 10 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | % | 83 |
| 1 | 2 | 11 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 96.5 |
| 1 | 2 | 12 | Cakupan Desa/Kelurahan UCI | % | 96.5 |
| 1 | 2 | 13 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan | % | 100 |
| 1 | 2 | 14 | Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak | % | 95 |
| 1 | 2 | 15 | Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk | Per 100.000 penduduk | 2 |
| 1 | 2 | 16 | Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani | % | 30 |
| 1 | 2 | 17 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | % | 100 |
| 1 | 2 | 18 | Tingkat Prevalensi Tuberkolosis | Per 100.000 penduduk | 207 |
| 1 | 2 | 19 | Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis | Per 100.000 penduduk | 3 |
| 1 | 2 | 20 | Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS | % | 75 |
| 1 | 2 | 21 | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS | % | 90 |
| 1 | 2 | 22 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | % | 100 |
| 1 | 2 | 23 | Penderita Diare yang ditangani | Orang | 206.55 |
| 1 | 2 | 24 | Angka Kejadian Malaria | Per 1000 penduduk | < 1 |
| 1 | 2 | 25 | Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi | % | < 0,5 |
| 1 | 2 | 26 | Proporsi Jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan Komprehensif | % | 0 |
| 1 | 2 | 27 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | % | 100 |
| 1 | 2 | 28 | Cakupan Kunjungan Bayi | % | 98 |
| 1 | 2 | 29 | Cakupan Puskesmas | % | |
| 1 | 2 | 30 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 92.5 |
| 1 | 2 | 31 | Cakupan Pelayanan Nifas | % | 93.5 |
| 1 | 2 | 32 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | % | 62 |
| 1 | 2 | 33 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | % | 72.5 |
| 1 | 2 | 34 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin | % | 100 |
| 1 | 2 | 35 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|-----|---|----|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 36 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 |
| 1 | 2 | 37 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | % | 100 |
| 1 | 3 | | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| 1 | 3 | 1 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | Km | 56.84 |
| 1 | 3 | 2 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk | Km/Km | 0.00022 |
| 1 | 3 | 3 | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter) | % | 93.5 |
| 1 | 3 | 4 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik | % | 45.36 |
| 1 | 3 | 5 | Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar | % | 9.21 |
| 1 | 3 | 6 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 88.65 |
| 1 | 3 | 7 | Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar | % | 37 |
| 1 | 3 | 8 | Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | % | 45 |
| 1 | 3 | 9 | Rasio Jaringan Irigasi | M/Ha | 14 |
| 1 | 3 | 10 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | % | |
| 1 | 3 | 11 | Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum | % | 87.95 |
| 1 | 3 | 12 | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelaanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan | % | 85.02 |
| 1 | 3 | 13 | Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelaanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan | % | 75.65 |
| 1 | 3 | 14 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelaanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan | % | 87.8 |
| 1 | 3 | 15 | Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh | % | 0.055 |
| 1 | 3 | 16 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelaanjutan | % | 84.95 |
| 1 | 3 | 17 | Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani | % | 76.93 |
| 1 | 3 | 18 | Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk | Unit/ Jiwa | 2.11 |
| 1 | 3 | 19 | Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | % | 11.2 |
| 1 | 3 | 20 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 67 |
| 1 | 3 | 21 | Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan | % | 30 |
| 1 | 3 | 22 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | % | 50 |
| 1 | 3 | 23 | Rasio luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | % | 47 |
| 1 | 4 | | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| 1 | 4 | 1 | Rasio Rumah Layak Huni | | 0.197 |
| 1 | 4 | 2 | Persentase Lingkungan Permukiman | % | 0.039 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|--------------------------------------|---|----|--|--------|-------------------|
| Kumuh | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan | % | 0.039 |
| 1 | 4 | 4 | Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani | % | 47.2 |
| 1 | 5 | | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |
| 1 | 5 | 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 27,977 |
| 1 | 5 | 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 20 |
| 1 | 5 | 3 | Persentase Penegakan PERDA | % | 20 |
| 1 | 6 | | SOSIAL | | |
| 1 | 6 | 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 35 |
| 1 | 6 | 2 | Persentase PMKS yang tertangani | % | 35 |
| 1 | 6 | 3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 100 |
| 1 | 6 | 4 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 100 |
| 1 | 6 | 5 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 100 |
| 1 | 6 | 6 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 49.91 |
| 1 | 6 | 7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 75 |
| 1 | 6 | 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 10 |
| 1 | 6 | 9 | | | |
| 1 | 6 | 10 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Sosial) | % | 75 |
| 1 | 6 | 11 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (BPBD) | % | 70 |
| TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 | 7 | | TENAGA KERJA | | |
| 1 | 7 | 1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 20.98 |
| 1 | 7 | 2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 98 |
| 1 | 7 | 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 3.7 |
| 1 | 7 | 4 | Keselamatan dan perlindungan | % | 70 |
| 1 | 7 | 5 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | % | 100 |
| 1 | 7 | 6 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 39 |
| 1 | 7 | 7 | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | % | 9 |
| 1 | 7 | 8 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 70 |
| 1 | 7 | 9 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 71 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|------------|----|----|---|-----------------|---|
| 1 8 | | | | | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1 | 8 | 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 51.85 |
| 1 | 8 | 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 22 |
| 1 | 8 | 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | % | 74 |
| 1 | 8 | 4 | Rasio KDRT | % | 0.06 |
| 1 | 8 | 5 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | % | 0.06 |
| 1 | 8 | 6 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 45.96 |
| 1 | 8 | 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 |
| 1 | 8 | 8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 100 |
| 1 | 8 | 9 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | % | 52 |
| 1 | 8 | 10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | % | 100 |
| 1 | 8 | 11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 100 |
| 1 | 8 | 12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 50 |
| 1 | 8 | 13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 35 |
| 1 | 8 | 14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | % | 102 |
| 1 | 8 | 15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | % | 105.86 |
| 1 | 8 | 16 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | % | |
| 1 | 8 | 17 | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | % | 106.3 |
| 1 | 8 | 18 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | % | 100.7 |
| 1 | 9 | | PANGAN | | |
| 1 | 9 | 1 | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | % | 411.41 |
| 1 | 9 | 2 | Ketersediaan Pangan Utama (Jagung) | % | 57.62 |
| 1 | 9 | 3 | Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai) | % | 35.24 |
| 1 | 9 | 4 | Ketersediaan Energi Perkapita | % | 5,944 |
| 1 | 9 | 5 | Ketersediaan Protein Perkapita | % | 169.36 |
| 1 | 9 | 6 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 100 |
| 1 | 10 | | PERTANAHAN | | |
| 1 | 10 | 1 | Persentase luas lahan bersertifikat | % | |
| 1 | 10 | 2 | Penyelesaian kasus tanah Negara | % | 100 |
| 1 | 10 | 3 | Penyelesaian izin lokasi | % | 100 |
| 1 | 11 | | LINGKUNGAN HIDUP | | |
| 1 | 11 | 1 | Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Satuan | Target Tahun 2020 |
|--|----|----|---|-----------------|----------------------|
| No. | 11 | 2 | Tersusunnya RPPLH Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 3 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 4 | Tersedianya dokumen KLHS Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 5 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 6 | Peningkatan Indeks Kualitas Air | | 56.3 |
| 1 | 11 | 7 | Peningkatan Indeks Kualitas Udara | | 86.3 |
| 1 | 11 | 8 | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan | | 56.7 |
| 1 | 11 | 9 | Laporan Inventarisasi GRK | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 10 | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 11 | Jumlah limbah B3 yang dikelola | Ton | 2,000,000 |
| 1 | 11 | 12 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | % | 77 |
| 1 | 11 | 13 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada / Tidak Ada | 8 |
| 1 | 11 | 14 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Kasus | 14 |
| 1 | 11 | 15 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 16 | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi | % | 74% |
| 1 | 11 | 17 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| 1 | 11 | 18 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | | 0.97 |
| 1 | 11 | 19 | Rasio bayi berakte kelahiran | | 0.89 |
| 1 | 11 | 20 | Rasio pasangan berakte nikah | | 0.2 |
| 1 | 11 | 21 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 1 | 11 | 22 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ Belum | Sudah |
| 1 | 11 | 23 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 97 |
| 1 | 11 | 24 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 89 |
| 1 | 12 | | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| 1 | 12 | 1 | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik | % | 38.08 |
| 1 | 12 | 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 22 |
| 1 | 12 | 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 41 |
| 1 | 12 | 4 | Persentase LPM Berprestasi | % | 25.31 |
| 1 | 12 | 5 | Persentase PKK aktif | % | 98.2 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Satuan | Target Tahun 2020 |
|--|----|----|---|--------|----------------------|
| No. | | | | | |
| 1 | 12 | 6 | Persentase Posyandu aktif | % | 99.75 |
| 1 | 12 | 7 | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | % | 60 |
| 1 | 12 | 8 | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat | % | 60 |
| 1 | 13 | | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |
| 1 | 13 | 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | | 1.14 |
| 1 | 13 | 2 | Total Fertility Rate (TFR) | | 2.3 |
| 1 | 13 | 3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | | 2.3 |
| 1 | 13 | 4 | Rasio Akseptor KB | | 66.74 |
| 1 | 13 | 5 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | | 66.74 |
| 1 | 13 | 6 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | | 20 |
| 1 | 13 | 7 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | % | 45.76 |
| 1 | 13 | 8 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 13.8 |
| 1 | 13 | 9 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 25.35 |
| 1 | 13 | 10 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 14.31 |
| 1 | 13 | 11 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 63.6 |
| 1 | 13 | 12 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 54.4 |
| 1 | 13 | 13 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 49 |
| 1 | 13 | 14 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 57 |
| 1 | 13 | 15 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | % | 19 |
| 1 | 13 | 16 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100 |
| 1 | 13 | 17 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 67.21 |
| 1 | 13 | 18 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | % | 0.01 |
| 1 | 13 | 19 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | % | 100 |
| 1 | 13 | 20 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | % | 75.32 |
| 1 | 13 | 21 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 2 |
| | | | PERHUBUNGAN | | |
| 1 | 14 | | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Jiwa | 16,782,962 |
| 1 | 14 | 1 | Rasio ijin trayek | | 0.5 |
| 1 | 14 | 2 | Persentase layanan angkutan darat | % | 97.5 |
| 1 | 14 | 3 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal | Unit | 325 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|------------|-----------|----------|--|------------------|-------------------|
| BIS | | | | | |
| 1 | 14 | 4 | Pemasangan Rambu-rambu | Unit | 909,039 |
| 1 | 14 | 5 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | | 108 |
| 1 | 14 | 6 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | 17,229,846 |
| 1 | 15 | | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 1 | 15 | 1 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | % | 42,461,451 |
| 1 | 15 | 2 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | % | 27,159,572 |
| 1 | 16 | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 1 | 16 | 1 | Persentase koperasi aktif | % | 75 |
| 1 | 16 | 2 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 97 |
| 1 | 17 | | PENANAMAN MODAL | | |
| 1 | 17 | 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Proyek | 821 |
| 1 | 17 | 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Triliun (Rp) | 13.87 |
| 1 | 17 | 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | Orang/ Proyek | 13 |
| 1 | 17 | 4 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) | % | 15 |
| 1 | 18 | | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | |
| 1 | 18 | 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 9.81 |
| 1 | 18 | 2 | Persentase wirausaha muda | % | 18.31 |
| 1 | 18 | 3 | Cakupan pembinaan olahraga | % | 34 |
| 1 | 18 | 4 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | % | 17.36 |
| 1 | 18 | 5 | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 8.9 |
| 1 | 18 | 6 | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 105 |
| 1 | 18 | 7 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 17 |
| 1 | 19 | | STATISTIK | | |
| 1 | 19 | 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/ Tidak Ada | Ada |
| 1 | 19 | 2 | Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka" | Ada/ Tidak Ada | Ada |
| 1 | 19 | 3 | Buku PDRB | Ada/ Tidak Ada | Ada |
| 1 | 20 | | PERSANDIAN | | |
| 1 | 20 | 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 100 |
| 1 | 21 | | KEBUDAYAAN | | |
| 1 | 21 | 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 85 |
| 1 | 21 | 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Buah | 5 |
| 1 | 21 | 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Buah | 23 |
| 1 | 21 | 4 | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | Buah | 3 |
| 1 | 22 | | PERPUSTAKAAN | | |
| 1 | 22 | 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 110 |
| 1 | 22 | 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Exp. | 310 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|-----|----|----|--|--|-------------|-------------------|
| 1 | 22 | 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Unit/Jiwa | 0.00000034 | |
| 1 | 22 | 4 | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 56 | |
| 1 | 22 | 5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 251 | |
| 1 | 22 | 6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 1.1 | |
| 1 | 23 | | KEARSIPAN | | | |
| 1 | 23 | 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 40 | |
| 1 | 23 | 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 200 | |
| 2 | | | PELAYANAN URUSAN PILIHAN | | | |
| 2 | 1 | | PARIWISATA | | | |
| 2 | 1 | 1 | Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | Wisnu | 7,750,000 | |
| 2 | 1 | 2 | Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | Wisman | 151,763 | |
| 2 | 1 | 3 | Lama kunjungan Wisata | Hari | 5 | |
| 2 | 1 | 4 | PAD Sektor Pariwisata | Rupiah | 650,000,000 | |
| 2 | 2 | | PERTANIAN | | | |
| 2 | 2 | 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | % | 24.76 | |
| 2 | 2 | 2 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | % | 6.75 | |
| 2 | 2 | 3 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB | % | 4.69 | |
| 2 | 2 | 4 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan) | % | 91.17 | |
| 2 | 2 | 5 | Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan) | % | 87.09 | |
| 2 | 2 | 6 | Produksi sub sektor Peternakan (Daging) | Kg | 139,478,730 | |
| 2 | 2 | 7 | Produksi sub sektor Peternakan (Telur) | Kg | 141,855,523 | |
| 2 | 2 | 8 | Produksi sub sektor Peternakan (Susu) | Kg | 3,370,049 | |
| 2 | 2 | 9 | Konsumsi Hasil Peternakan (Daging) | Kg/ Kapita/ Tahun | 5.36 | |
| 2 | 2 | 10 | Konsumsi Hasil Peternakan (Telur) | Kg/ Kapita/ Tahun | 6.23 | |
| 2 | 2 | 11 | Konsumsi Hasil Peternakan (Susu) | Kg/ Kapita/ Tahun | 2.66 | |
| 2 | 2 | 12 | Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Juta Rupiah | 5,224,541 | |
| 2 | 2 | 13 | Pertumbuhan PDRB | (%) | 6.97 | |
| 2 | 2 | 14 | Sumbangan PDRB Sektor Peternakan | (%) | 1.21 | |
| 2 | 2 | 15 | Cakupan Bina Kelompok Peternak | Kelom pok | 1,238 | |
| 2 | 2 | 16 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Asal Hewan | Sampel | 200 | |
| 2 | 2 | 17 | Nilat Tukar Peternak (NTP.Pt) | | 110.11 | |
| 2 | 3 | | KEHUTANAN | | | |
| 2 | 3 | 1 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | 49.19 | |
| 2 | 3 | 2 | Kerusakan Kawasan Hutan | % | 0.01851 | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 | | |
|-----|---|----|--|---|-------------------|--|--|
| 2 | 3 | 3 | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | Luas Kawasan Lindung/Tot al Kawasan Hutan | 76.45 | | |
| 2 | 4 | | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Persentase rumah tangga pengguna listrik | % | 99 | | |
| 2 | 4 | 2 | Rasio ketersediaan daya listrik | | 89.21 | | |
| 2 | 4 | 3 | Persentase pertambangan tanpa ijin | % | 25 | | |
| 2 | 4 | 4 | Cadangan Sumber Daya | Ton | 4,000,000 | | |
| 2 | 4 | 5 | Luas Wilayah Pemetaan | Ha | 8.5 | | |
| 2 | 5 | | PERDAGANGAN | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Eksport Bersih Perdagangan | Juta US\$ | 70,120,367 | | |
| 2 | 5 | 2 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | % | 0.98 | | |
| 2 | 6 | | PERINDUSTRIAN | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | % | 2.8 | | |
| 2 | 7 | | TRANSMIGRASI | | | | |
| 2 | 7 | 1 | Persentase transmigran swakarsa | % | 100 | | |
| 2 | 8 | | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| 2 | 8 | 1 | Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 21.82 | | |
| 2 | 8 | 2 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 50.6 | | |
| 2 | 8 | 3 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial | % | 0.28 | | |
| 2 | 8 | 4 | Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan | % | 8.8 | | |
| 2 | 8 | 5 | Nilai PDRB Perikanan | Trilyun Rp | 37.04 | | |
| 2 | 8 | 6 | Produksi Kelautan dan Perikanan | % | 5,614,824.50 | | |
| 2 | 8 | 7 | Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan | Trilyun Rp | 20.75 | | |
| 2 | 8 | 8 | Nilai hasil pengolahan produksi perikanan | Trilyun Rp | 8.3 | | |
| 2 | 8 | 9 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 370,649 | | |
| 2 | 8 | 10 | Nilai Produksi Perikanan Tangkap | Trilyun Rp | 8.52 | | |
| 2 | 8 | 11 | Cakupan bina kelompok nelayan | % | 33.2 | | |
| 2 | 8 | 12 | Nilai Tukar Nelayan | % | 107.89 | | |
| 2 | 8 | 13 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 5,301,486.20 | | |
| 2 | 8 | 14 | Nilai Produksi Perikanan Budidaya | Trilyun Rp | 12.23 | | |
| 2 | 8 | 15 | Nilai Tukar Pembudidaya | % | 104.93 | | |
| 2 | 8 | 16 | Cakupan bina UPR dan Panti Benih | % | 18.84 | | |
| 2 | 8 | 17 | Cakupan Pelabuhan perikanan yang beroperasional | % | 65.22 | | |
| 2 | 8 | 18 | Jumlah produksi hasil tangkapan yang dibongkardi Pelabuhan Perikanan | Ton | 18,076 | | |
| 2 | 8 | 19 | Nilai produksi hasil tangkapan yang dibongkardi Pelabuhan Perikanan | Milyar Rupiah | 243.8 | | |
| 2 | 8 | 20 | Jumlah kapal yang didaratkan dan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan | Unit | 16,029 | | |
| 2 | 8 | 21 | Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi | Ton | 322,301.70 | | |
| 2 | 8 | 22 | Konsumsi Ikan | Kg/Kap | 54.1 | | |
| 2 | 8 | 23 | Volume Ekspor produk Kelompok | Ton | 199,583.45 | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|-----|---|----|--|-----------------|--|
| | | | Perikanan | | |
| 2 | 8 | 24 | Nilai Ekspor Produk Kelompok Perikanan | US\$ | 427,646.67 |
| 2 | 8 | 25 | | Juta | |
| 2 | 8 | 26 | Nilai Tukar Pengolah | % | 105.09 |
| 2 | 8 | 27 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial | % | 20 |
| 2 | 8 | 28 | Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | Ha | 114.06 |
| 2 | 8 | 29 | Cakupan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali | % | 20 |
| 2 | 8 | 30 | Jumlah produksi garam rakyat | Ton | 52,254.90 |
| 2 | 8 | 31 | Cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | % | 60 |
| 2 | 8 | 32 | Berkurangnya tindakan IUU fishing | % | 8.03 |
| 2 | 8 | 33 | Cakupan kasus illegal fishing yang dapat diproses melalui jalur hukum | % | 17.69 |
| 2 | 8 | 34 | Cakupan bina kelompok masyarakat terhadap pengawasan | % | 75 |
| 2 | 8 | 35 | Cakupan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan | % | 20 |
| 3 | | | PENUNJANG URUSAN | | |
| 3 | 1 | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | |
| 3 | 1 | 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 3 | 1 | 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 3 | 1 | 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 3 | 1 | 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / Tidak Ada | Ada |
| 3 | 1 | 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 100 |
| 3 | 1 | 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | % | 100 |
| 3 | 1 | 7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | 100 |
| 3 | 2 | | KEUANGAN | | |
| 3 | 2 | 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Hasil Opini | WTP |
| 3 | 2 | 2 | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 2 |
| 3 | 2 | 3 | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 20 |
| 3 | 2 | 4 | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10 |
| 3 | 2 | 5 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | % | Belanja langsung : 30,0 Belanja Tidak Langsung : 70,0 |
| 3 | 2 | 6 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 16 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target Tahun 2020 |
|-----|---|---|--|-------------------------------|-------------------|
| 3 | 2 | 7 | Penetapan APBD | Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3 | 3 | KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
| 3 | 3 | 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | JP/ | 20 |
| 3 | 3 | 2 | | Tahun | |
| 3 | 3 | 3 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 2 |
| 3 | 3 | 4 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 5.8 |
| 3 | 3 | 5 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Jabatan | 60 |
| 3 | 3 | 6 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Jabatan | 8,795 |
| 3 | 3 | 7 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 15,893 |
| 3 | 4 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| 3 | 4 | 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangam | % | 100 |
| 3 | 4 | 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangam | % | 100 |
| 3 | 4 | 3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 20 |
| 3 | 4 | 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % | 60 |
| 3 | 5 | PENGAWASAN | | | |
| 3 | 5 | 1 | Persentase tindak lanjut temuan | % | 75 |
| 3 | 5 | 2 | Persentase pelanggaran pegawai | % | 0.1 |
| 3 | 5 | 3 | Jumlah temuan BPK | Kasus | 15 |
| 3 | 6 | SEKRETARIAT DEWAN | | | |
| 3 | 6 | 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/ Tidak Ada | Ada |
| 3 | 6 | 2 | Tersusun dan terintegrasi Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/ Tidak Ada | Ada |
| 3 | 6 | 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/ Tidak Ada | Ada |
| | | | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | |
| 4 | | | FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI | | |
| 4 | 1 | | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita | Juta Rp | 32.15 |
| 4 | 2 | | Pengeluaran Perkapita | Ribu Rp | 11.159 |
| 4 | 3 | | Nilai Tukar Petani | Poin | 104.7 |
| 4 | 4 | | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita | % | 17.73 |
| 4 | 5 | | Persentase Desa Berstatus Swasembada | % | 277.39 |
| 4 | 6 | | Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) | | 51.32 |

**Tabel IX.4
Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020 (Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| URUSAN WAJIB | | | | |
| PELAYANAN DASAR | | | | |
| Pendidikan | | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas) | % | 88.7 | 88.70 |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas) | % | 63.5 | 27.0 |
| | % Jumlah warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) | % | 75.25 % | 75.25 |
| 2 | Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan | Orang | 150 Orang | 0.0 |
| | % Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas) | % | 45.6 % | 0.0 |
| 3 | % Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM) | % | 81% | 81.0 |
| 4 | % Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme | % | 51% | 51.0 |
| | % SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas) | % | 91% | 91.0 |
| | % Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama | % | 52.5 % | 52.50 |
| 5 | Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas) | % | 54.93 % | 0.0 |
| 6 | % Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas) | % | 46.85 % | 46.85 |
| 7 | Jumlah perolehan medali siswa pada lomba/kejuruan tingkat nasional/International | Medali | 32 Medali | 0.0 |
| 8 | % Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK | % | 70% | 70.0 |
| 9 | % Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 99.45 % | 99.45 |
| | % Guru SMK yang bersertifikat | % | 42.75 % | 42.75 |
| | % Jumlah Sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan Standar Tenaga Kependidikan | % | 1.14 % | 1.14 |
| | % Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 98.18 % | 98.18 |
| | % Guru SMA yang bersertifikat | % | 53.85 % | 53.85 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|--------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 57.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Kesehatan | | | |
| | Dinas Kesehatan | | | |
| 1 | % Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) | % | 100% | 100.0 |
| | % Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) | % | 100% | 100.0 |
| 2 | Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas) | Unit | 4 Unit | 0.0 |
| 3 | % Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional | % | 35% | 36.0 |
| | % RS yang Terakreditasi Nasional | % | 75% | 88.0 |
| | % Puskesmas Terakreditasi | % | 70% | 98.27 |
| | % Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang | % | 60% | 62.0 |
| | % RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU | % | 80% | 75.60 |
| | Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas) | Klinik | 2 Klinik | 1.0 |
| 4 | % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas) | % | 11.5 % | 12.10 |
| | % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas) | % | 6% | 8.97 |
| 5 | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas) | Unit | 6 Unit | 0.0 |
| 7 | % Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar | % | 75% | 85.0 |
| | % Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina | % | 55% | 55.0 |
| | Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan | % | 80% | 70.0 |
| | % Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang baik | % | 57% | 50.0 |
| | % Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat | % | 92% | 70.0 |
| 8 | Prevalensi Balita Kurus (Wasting) | % | 8% | 6.50 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|--------------------|----------------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight) | % | 21% | 11.0 |
| | Prevalensi Balita Stunting (Prioritas) | % | 31% | 30.59 |
| | Jumlah Kematian Ibu | Kasus | 113 Kasus | 119.0 |
| | % Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS | % | 48% | 75.0 |
| | Jumlah Kematian Bayi | Kasus | 1055 Kasus | 703.0 |
| | % Lansia Usia ≥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia | % | 60% | 29.78 |
| | % Posyandu Aktif | % | 62% | 66.90 |
| 9 | Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) | % | 96.5 % | 73.82 |
| | % Orang dengan HIV (ODHA) Mendapatkan Pengobatan | % | 60% | 88.60 |
| | Angka Penemuan/Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API) | /1000 Penduduk (<) | 1 /1000 Penduduk (<) | 0.17 |
| | Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate) | /100000 Penduduk | 207 /100000 Penduduk | 113.0 |
| | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam | % | 100% | 100.0 |
| | % Kab/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA | % | 85% | 96.0 |
| | % Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu | % | 50% | 45.0 |
| 10 | % Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Kerja | % | 90% | 98.69 |
| | % Kualitas Air Minum Memenuhi Syarat | % | 90% | 89.96 |
| | % Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Olahraga | % | 75% | 97.60 |
| | Cakupan Akses Sanitasi Dasar | % | 95% | 98.99 |
| 11 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | % | 100% | 100.0 |
| | Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage | % | 100% | 86.48 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | UPT Transfusi Darah | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|--------|------------|---------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Cakupan pasien yang memperoleh transfusi darah | % | 100% | 98.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 110.0 |
| | UPT Pelatihan Kesehatan | | | |
| 17 | Cakupan Tenaga Kesehatan yang telah bersertifikasi | % | 100% | 45.0 |
| 18 | Cakupan Pelatihan yang terakreditasi | % | 100% | 46.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 58.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 55.0 |
| | UPT RSg Gigi dan Mulut | | | |
| 3 | Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan | % | 100% | 100.0 |
| 12 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Gigi dan Mulut | % | 100% | 0.0 |
| 15 | % Peningkatan pendapatan RSKD Gigi dan Mulut | % | 0% | 50.0 |
| | Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji | | | |
| 3 | Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan | % | 85% | 0.0 |
| 5 | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | RS | 1 RS | 199,528,564.0 |
| 12 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji | % | 85% | 85.0 |
| 13 | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji dalam kondisi baik | % | 85% | 85.0 |
| 15 | % Peningkatan pendapatan RSUD Labuang Baji | % | 100% | 100.0 |
| 16 | Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan | % | 85% | 85.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 95% | 95.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 70% | 70.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 90% | 90.0 |
| | Rumah Sakit Khusus Daerah | | | |
| 12 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD | % | 100% | 91.83 |
| 15 | % Peningkatan pendapatan Rumah Sakit Khusus Daerah | % | 100% | 84.15 |
| 16 | Cakupan ketersediaan obat-obatan, makan minum dan logistik RS/UPTD Kesehatan | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|--------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar | | | |
| 12 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar | % | 85.5 % | 85.50 |
| 13 | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar dalam kondisi baik | % | 92.5 % | 92.50 |
| 15 | % Peningkatan pendapatan RSUD Haji Makassar | % | 1.5 % | 1.05 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 85% | 85.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 85% | 85.0 |
| | Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah | | | |
| 5 | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | RS | 1 RS | 9.0 |
| 12 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah | % | 100% | 95.0 |
| 13 | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah dalam kondisi baik | % | 100% | 100.0 |
| 15 | % Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah | % | 7.5 % | 7.50 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| | Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi | | | |
| 3 | Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan | % | 100% | 26.39 |
| 12 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | % | 100% | 40.48 |
| 15 | % Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi | % | 5% | 0.39 |
| | Rumah Sakit Umum daerah Sayang Rakyat | | | |
| 3 | Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan | % | 100% | 100.0 |
| 5 | Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi | RS | 1 RS | 1.0 |
| 12 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat | % | 100% | 100.0 |
| 13 | Cakupan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik | % | 100% | 100.0 |
| 15 | % Peningkatan pendapatan RSUD Sayang Rakyat | % | 2% | 2.0 |
| 16 | Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|---------|-------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | |
| 1 | % Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM) | % | 100% | 13.22 |
| 2 | % Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM) | % | 100% | 0.0 |
| 3 | % Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM) | % | 71.46 % | 1.24 |
| | Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas) | Ha | 15014.3 Ha | 261.0 |
| 6 | Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Prioritas) | Kawasan | 8 Kawasan | 0.0 |
| 7 | Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas) | Meter | 17500 Meter | 49.0 |
| | Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas) | % | 85% | 0.0 |
| 10 | % Ketaatan terhadap RTRW | % | 70% | 2.0 |
| 13 | % Bangunan /Gedung /Lingkungan Negara yang Terkelola | % | 95% | 6.33 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 44.04 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 18.56 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 22.54 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| 4 | % Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar (Prioritas) | % | 85% | 0.0 |
| 5 | % Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM) | % | 62.61 % | 0.0 |
| 9 | % Panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi | % | 93.28 % | 0.0 |
| 12 | % Kesesuaian perencanaan dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan | % | 100% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|----------|-------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | |
| 1 | % Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM) | % | 100% | 100.0 |
| | % Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM) | % | 100% | 100.0 |
| 2 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM) | % | 1.75 % | 1.75 |
| | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM) | % | 5% | 5.0 |
| 3 | Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas) | Lokasi | 2 Lokasi | 0.0 |
| | Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata | lokasi | 0 lokasi | 2.0 |
| 5 | Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas) | RT | 1750 RT | 5,000.0 |
| | Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota | Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 45.0 |
| 6 | Cakupan Pembinaan Penanganan Sanitasi Kabupaten/Kota | Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 18.0 |
| | % Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Layak | % | 10% | 0.0 |
| 8 | Jumlah Usaha Jasa/Pelaksana Perencana Rumah dan PSU Kemampuan Menengah Tersertifikasi | Unit | 50 Unit | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan | | | |
| | Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| 1 | % Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM) | % | 100% | 100.0 |
| 2 | Cakupan petugas satpol yang terlatih | % | 100% | 100.0 |
| 3 | Tingkat penyelesaian pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan | % | 100% | 100.0 |
| 5 | Cakupan petugas perlindungan masyarakat | % | 100% | 100.0 |
| 6 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | % | 100% | 100.0 |
| | Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) | % | 100% | 100.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|--------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |
| 7 | Jumlah aparat/personil siaga bencana | Orang | 75 Orang | 75.0 |
| | Jumlah kawasan evakuasi bencana | Lokasi | 24 Lokasi | 24.0 |
| 8 | Jumlah posko penanganan darurat bencana | Unit | 24 Unit | 24.0 |
| | Cakupan ketersediaan bahan logistik pada Gudang stock | Jenis | 5 Jenis | 5.0 |
| | % Jumlah korban bencana yang dievakuasi | % | 100% | 100.0 |
| 9 | Jumlah perbaikan sarana dan prasarana umum serta sosial ekonomi pasca bencana | Unit | 10 Unit | 10.0 |
| | Jumlah SDM yang terlatih dalam penanggulangan bencana | Orang | 75 Orang | 75.0 |
| 10 | Cakupan ketersediaan sistem peringatan dini resiko bencana | Jenis | 0 Jenis | NA |
| | % Ketersediaan data bencana kab/kota | % | 100% | NA |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Sosial | | | |
| | Dinas Sosial | | | |
| 1 | % Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas) | % | 100% | 50.0 |
| | % Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) | % | 100% | 0.0 |
| | % Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas) | % | 100% | 0.0 |
| 2 | Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina | Jiwa | 425 Jiwa | 200.0 |
| | % Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) | % | 100% | 50.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|--------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi | Jiwa | 800 Jiwa | 0.0 |
| | % PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 0.6 % | 0.0 |
| | % PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 1% | 0.0 |
| 4 | Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina | LKS | 246 LKS | 0.0 |
| 5 | Cakupan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapatkan pembinaan | Jiwa | 100 Jiwa | 50.0 |
| 6 | Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo | Jiwa | 75 Jiwa | 0.0 |
| | % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) | % | 100% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 50.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 50.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 50.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR | | | |
| | Tenaga Kerja | | | |
| | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | |
| 1 | % Pencari kerja yang ditempatkan | % | 3.7 % | 2.77 |
| | Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas) | % | 58.47 % | 43.85 |
| 2 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 71.4 % | 35.70 |
| | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 75% | 37.50 |
| 3 | % Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja | % | 70.13 % | 50.0 |
| | Besaran pemeriksaan perusahaan | % | 26.43 % | 21.0 |
| | Besaran pengujian peralatan di perusahaan | % | 9.6 % | 7.0 |
| 4 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | % | 96% | 48.0 |
| | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 2.1 % | 1.05 |
| | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program | % | 45.24 % | 23.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|----------|--------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Jamsostek | | | |
| | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | % | 100% | 50.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| 1 | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas) | % | 31% | 0.0 |
| 2 | % Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang terstandarisasi | % | 25% | 0.0 |
| 3 | % Kabupaten/Kota Layak Anak | % | 54% | 0.0 |
| | Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000) | | 2.94 | 0.0 |
| 4 | % Lembaga layanan Perlindungan Perempuan sesuai standar | % | 37.5 % | 0.0 |
| 5 | % Korban KtP/A yang memperoleh layanan komprehensif pada UPT PPA | % | 70% | 0.0 |
| 6 | % Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di daerah | % | 82% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Pangan | | | |
| | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | % | 93.05 % | 0.0 |
| | % Pengawasan keamanan pangan | % | 100% | 0.0 |
| 2 | % Ketersediaan pangan utama | % | 100% | 0.0 |
| | Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Provinsi setara beras (ton) | Juta Ton | 145 Juta Ton | 140.0 |
| 3 | Cakupan ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan | % | 100% | 50.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 50.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana | % | 100% | 100.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|----------|-------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | perkantoran | | | |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 50.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 50.0 |
| | Pertanahan | | | |
| | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | | | |
| 1 | Penyelesaian Kasus tanah Provinsi | % | 100% | 100.0 |
| | Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum | Lokasi | 3 Lokasi | 6.0 |
| | Lingkungan Hidup | | | |
| | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| 1 | % Penurunan Jumlah Beban Pencemaran | % | 41% | 90.60 |
| | Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan | % | 20% | 1.0 |
| | Indeks kualitas udara (Prioritas) | | 88.71 | 0.0 |
| | Indeks kualitas air (Prioritas) | | 77.67 | 54.0 |
| 2 | % Penanganan Sampah Kabupaten/Kota | % | 48% | 48.0 |
| | Cakupan Limbah B3 yang Dikelola | % | 80% | 80.0 |
| 3 | Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup | % | 100% | 100.0 |
| 4 | % Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | % | 100% | 100.0 |
| | Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup | kab/kota | 24 kab/kota | 57.0 |
| 5 | Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota | % | 100% | 100.0 |
| | Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca | Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | |
| | Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | |
| 1 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 89% | 94.28 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|---------------------|-----------------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Cakupan Perekaman KTP-el | % | 97% | 99.80 |
| | Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan | % | 20% | 32.64 |
| | Cakupan Kepemilikan KTP-el | % | 89% | 94.43 |
| 2 | Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | |
| 1 | Peningatan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | % | 5% | 5.0 |
| | Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya | RTM | 60 RTM | 60.0 |
| 2 | Jumlah BUMDES yang difasilitasi | BUMDES | 180 BUMDES | 180.0 |
| 3 | % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif) | % | 0.25 % | 0.25 |
| | % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LPM Berprestasi) | % | 6.25 % | 6.25 |
| | % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) | % | 1% | 1.0 |
| 4 | Jumlah aparat desa yang ditingkatkan Kapasitasnya | Aparat Desa | 350 Aparat Desa | 350.0 |
| | Jumlah desa berstatus swasembada | Desa Swasembada | 2 Desa Swasembada | 2.0 |
| 5 | Jumlah kelompok binaan PKK (Prioritas) | Kelompok Binaan PKK | 1 Kelompok Binaan PKK | 1.0 |
| | % Posyandu aktif | % | 99.93 % | 99.93 |
| | % PKK aktif | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 80% | 80.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Pengendalian Penduduk dan | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|---------|--------------|-----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Keluarga Berencana | | | |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % (BPS) | 1.08 % (BPS) | 0.0 |
| 2 | % Penggunaan kontrasepsi jangka panjang | % | 24.31 % | 0.0 |
| | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur | % | 66.74 % | 0.0 |
| | % Peserta KB Aktif | % | 72.26 % | 0.0 |
| | Rasio Total Fertility Rate | | 2.3 | 0.0 |
| 3 | Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina | Klp | 1600 Klp | 0.0 |
| | Cakupan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Sejahtera secara terpadu berkesinambungan dan terencana | % | 100% | 0.0 |
| | Perhubungan | | | |
| | Dinas Perhubungan | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) | Orang | 1009 Orang | 998,792.0 |
| | Jumlah pelabuhan strategis provinsi | Lokasi | 11 Lokasi | 21.0 |
| | Jumlah pelabuhan yang beroperasi | Lokasi | 38 Lokasi | 47.0 |
| 2 | Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas) | % | 24% | 9.0 |
| | Cakupan penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi | Ruas | 78 Ruas | 112.0 |
| 3 | % Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan | % | 40% | 34.0 |
| | % Layanan Angkutan Darat | % | 52% | 8.0 |
| | Jumlah Terminal Bis Terkelola | Lokasi | 7 Lokasi | 23.0 |
| | Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun | Orang | 245000 Orang | 704,622.0 |
| 4 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Transportasi | Dokumen | 7 Dokumen | 22.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Komunikasi dan Informatika | | | |
| | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | | | |
| 1 | % Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah | % | 70% | 70.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|---------|---------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (Prioritas) | | | |
| 2 | % Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas) | % | 100% | 100.0 |
| 3 | % Layanan Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi berkualitas baik | % | 80% | 80.0 |
| 4 | % Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi | % | 50% | 50.0 |
| | % Desiminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilakukan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM) | % | 50% | 50.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 75% | 75.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| 1 | % Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin (Prioritas) | % | 20% | 10.0 |
| 2 | Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas) | Produk | 10 Produk | 10.0 |
| 3 | Jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana | Unit | 10 Unit | 10.0 |
| | Jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan | Produk | 5 Produk | 5.0 |
| 4 | % Jumlah KUMKM yang terfasilitasi kelembaga Keuangan | % | 20% | 5.0 |
| | % Pengelola yang terfasilitasi diklat | % | 20% | 5.0 |
| 5 | Jumlah Koperasi aktif | Unit | 100 Unit | 100.0 |
| | Jumlah Usaha Kecil menjadi usaha Menengah | Unit | 50 Unit | 50.0 |
| | Jumlah Koperasi skala besar | Unit | 2 Unit | 2.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 40.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 40.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Penanaman Modal | | | |
| | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | | | |
| 1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Triliun | 13.87 Triliun | 22.74 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|--|--|------------------|---------------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Proyek | 821 Proyek | 4,054.0 |
| 3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | Orang / proyek | 13 Orang/proyek | 11.0 |
| 4 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN | % | 15% | 61.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 75% | 75.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 75% | 75.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 80% | 80.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 85% | 85.0 |
| Kepemudaan dan Olahraga | | | | |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | | | |
| 1 | % Organisasi pemuda yang aktif | % | 9.81 % | 9.81 |
| | Jumlah lembaga pramuka yang aktif | Kwarda / Kwarcab | 25 Kwarda / Kwarcab | 25.0 |
| 2 | % Wirausaha muda | % | 18.31 % | 18.31 |
| | Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas) | Pemuda | 950 Pemuda | 950.0 |
| 3 | Cakupan atlet pelajar berprestasi | % | 10% | 10.0 |
| | Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan | Jenis | 7 Jenis | 7.0 |
| 4 | Cakupan pembinaan olahraga | % | 34% | 34.0 |
| | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 359 Atlet | 359.0 |
| | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 27 Cabor | 27.0 |
| | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | % | 17.36 % | 17.36 |
| 5 | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | % | 85% | 85.0 |
| | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda | % | 85% | 83.0 |
| 6 | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | % | 8.9 % | 8.90 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| Statistik | | | | |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | | | | |
| 1 | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | % | 53% | 53.0 |
| | % Sistem data dan statistik yang terintegrasi | % | 50% | 50.0 |
| | Persandian | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|--------------|------------------|-----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | | | |
| 1 | % Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian | % | 50% | 50.0 |
| | Kebudayaan | | | |
| | Dinas Kebudayaan dan Keperiwisataan | | | |
| 1 | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 8 Event | 0.0 |
| | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Jenis | 2 Jenis | 0.0 |
| | % Kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama | % | 100% | 0.0 |
| 2 | Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 6% | 0.0 |
| | Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi | Benda Budaya | 250 Benda Budaya | 0.0 |
| | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | Karya Budaya | 12 Karya Budaya | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Perpustakaan | | | |
| | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik | Orang | 110000 Orang | 110,000.0 |
| | Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina | Unit | 75 Unit | 75.0 |
| 2 | Rasio perpustakaan per satuan penduduk | Orang | 0.03 | 0.0 |
| | Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat | | 1100 Orang | 0.0 |
| 3 | Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan | Jenis | 251000 Jenis | 251,000.0 |
| | Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Buku | 310000 Buku | 310,000.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Kearsipan | | | |
| | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|---|--|-------------------|---------------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | % Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 40% | 40.0 |
| 2 | Jumlah dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan | % | 40% | 40.0 |
| 3 | Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar | Unit | 5 Unit | 0.0 |
| 4 | Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat | Lembaga /Instansi | 20 Lembaga/Instansi | 0.0 |
| PELAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | |
| Pariwisata | | | | |
| Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan | | | | |
| 1 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | WNA | 300000 WNA | 0.0 |
| | Jumlah kunjungan wisatawan lokal | WNI | 7500000 WNI | 0.0 |
| | Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas) | % | 2 Jenis | 0.0 |
| | Lama Kunjungan Wisata | Jenis | 5 Hari | 0.0 |
| | Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas) | Hari | 1000 Orang | 0.0 |
| 2 | Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas) | Kab/Kota | 2 Kab/Kota | 0.0 |
| 4 | Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan | Destinasi Wisata | 2 Destinasi Wisata | 0.0 |
| 5 | Cakupan penyelenggaraan event pariwisata bekerjasama dengan lembaga kemitraan | Event | 12 Event | 0.0 |
| Pertanian | | | | |
| Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan / Dinas Ketahanan Pangan | | | | |
| 1 | Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas) | Rp | 45423790969 3 Rp | 0.0 |
| 4 | Jumlah produksi kedelai dan palawija | Ton | 16751 Ton | 0.0 |
| | Jumlah produksi padi | Ton | 6329309 Ton | 0.0 |
| | Produktivitas padi | Kw/Ha | 51 Kw/Ha | 0.0 |
| | Produktivitas jagung | Kw/Ha | 57 Kw/Ha | 0.0 |
| | Produktivitas kedelai dan palawija | Kw/Ha | 13 Kw/Ha | 0.0 |
| | Jumlah produksi jagung | Ton | 2560267 Ton | 0.0 |
| 5 | Jumlah produksi tanaman hortikultura | Ton | 22806 Ton | 0.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|--------|----------------|-----------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Produktivitas tanaman hortikultura | Kw/Ha | 57 Kw/Ha | 0.0 |
| | Jumlah bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB | Pohon | 10000 Pohon | 0.0 |
| 6 | Tingkat kehilangan hasil panen | % | 8% | 0.0 |
| | Jumlah Kelompok Tani yang menjalankan usaha agribisnis | Poktan | 25 Poktan | 0.0 |
| 7 | Cakupan ketersediaa jaringan irigasi | Ha | 20000 Ha | 0.0 |
| | Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian | Unit | 400 Unit | 0.0 |
| 8 | % Penurunan serangan OPT | % | 4.8 % | 0.0 |
| | % Penggunaan benih padi bersertifikat | % | 63% | 0.0 |
| | Cakupan ketersediaan data statistik pertanian | % | 100% | 0.0 |
| 9 | Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama pertanian | % | 0.5 % | 0.0 |
| 10 | Jumlah proyek bantuan WISMP dan LOAN untuk sektor pertanian | Proyek | 2 Proyek | 0.0 |
| | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | |
| 3 | Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas) | Rp | 21964750000 Rp | 7,972,262,238.0 |
| 11 | Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) Prioritas (Rabies, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza, Brucellosis) | Kasus | 5497 Kasus | 31,329.0 |
| 13 | Jumlah Populasi ternak kecil | Ekor | 1740324 Ekor | 1,707,396.0 |
| | Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas) | Ekor | 1416 Ekor | 1,040.0 |
| | Jumlah Populasi ternak unggas | Ekor | 129027702 Ekor | 110,594,710.0 |
| | Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas) | Ekor | 185948 Ekor | 171,150.0 |
| | Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas) | Ekor | 115598 Ekor | 117,127.0 |
| | Jumlah produksi telur (Prioritas) | Kg | 170724195 Kg | 272,901,000.0 |
| | Jumlah Populasi sapi potong (Prioritas) | Ekor | 1329788 Ekor | 1,403,574.0 |
| | Jumlah produksi daging (Prioritas) | Kg | 139478730 Kg | 26,733,819.0 |
| | Jumlah produksi susu (Prioritas) | Kg | 3370049 Kg | 458,550.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 51.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 78.90 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|---------|--------------------|-----------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dinas Perkebunan / Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | |
| 2 | Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas) | Rp | 5000000000 Rp | 0.0 |
| 16 | Produktivitas Komoditi Kelapa Sawit | Kg/Ha | 4356 Kg/Ha | 4,081.0 |
| | Produktivitas Komoditi Tembakau (Nikotin rendah) | Kg/Ha | 1030 Kg/Ha | 765.0 |
| | Produktivitas Komoditi Tebu (Gula) | Kg/Ha | 1169 Kg/Ha | 3,587.0 |
| | Produktivitas Komoditi Kelapa (Kopra) | Kg/Ha | 681 Kg/Ha | 1,694.0 |
| | Produktivitas Komoditi Cengkeh (Biji Kering) | Kg/Ha | 534 Kg/Ha | 559.0 |
| | Produktivitas Komoditi Kopi | Kg/Ha | 589 Kg/Ha | 1,212.0 |
| | Produktivitas Komoditi Kakao | Kg/Ha | 704 Kg/Ha | 792.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Kelapa Sawit | Triliun | 1361430 Triliun | 1,231,247.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Kopi | Triliun | 1962360000 Triliun | 1,878,272.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Tebu (Gula) | Triliun | 64580000 Triliun | 93,368,000.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Kelapa (Kopra) | Triliun | 513670000 Triliun | 496,300,000.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering) | Triliun | 2724405000 Triliun | 1,878,272,000.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Jambu Mete | Triliun | 337500000 Triliun | 3,967,810,000.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Pala | Triliun | 17670000 Triliun | 62,760,000.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Lada | Triliun | 1258510000 Triliun | 68,390,000.0 |
| | Nilai Produksi Komoditi Kakao | Triliun | 6030760000 Triliun | 3,967,810,000.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Kelapa Sawit | Ton | 90762 Ton | 82,318.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Kopi | Ton | 32706 Ton | 34,358.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Tebu (Gula) | Ton | 3229 Ton | 8,488.0 |
| | Produktivitas Komoditi Pala | Kg/Ha | 127 Kg/Ha | 217.0 |
| | Produktivitas Komoditi Lada | Kg/Ha | 748 Kg/Ha | 700.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Kelapa (Kopra) | Ton | 51367 Ton | 70,900.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|------------------------|--|----------|---------------|--------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Volume Produksi Komoditi Lada | Ton | 6730 Ton | 6,839.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Kakao | Ton | 150769 Ton | 113,366.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Pala | Ton | 186 Ton | 523.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Jambu Mete | Ton | 13500 Ton | 13,141.0 |
| | Volume Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering) | Ton | 18789 Ton | 20,416.0 |
| | Produktivitas Komoditi Jambu Mete | Kg/Ha | 411 Kg/Ha | 417.0 |
| 18 | % Peningkatan jumlah hasil panen tanaman perkebunan | 0.0 | 100% | 0.0 |
| | Cakupan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam produksi tanaman perkebunan | 0.0 | 5 Jenis | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| Kehutanan | | | | |
| Dinas Kehutanan | | | | |
| 20 | % Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas) | % | 64.67 % | 67.05 |
| | Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu | Ton | 339.6 Ton | 48,491.08 |
| | Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan | M3 | 76947.18 M3 | 1,145,368.93 |
| 21 | Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan | Blbit | 1000000 Blbit | 145,786.0 |
| | Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas) | Ha | 1000 Ha | 510.0 |
| | Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas) | | 58.62 | 54.94 |
| 22 | Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial | Ha | 45953 Ha | 2,818.0 |
| | Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina | Kelompok | 32 Kelompok | 107.0 |
| 23 | % Tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani | % | 100% | 100.0 |
| 24 | Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 118.03 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 94.74 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|-----------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 80% | 94.20 |
| | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| 1 | % Desa Berlistrik (Prioritas) | % | 98.5 % | 98.18 |
| | % Rumah Tangga Pengguna Listrik | % | 97.5 % | 97.53 |
| | Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun | M3 | 1244 M3 | 12.0 |
| 2 | Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas) | Rp | 15203925000 000 Rp | 15,150,000,000, 000.0 |
| 3 | Luas Wilayah Pemetaan (Prioritas) | Ha | 8500 Ha | 0.0 |
| | Jumlah Cadangan Sumber Daya (Prioritas) | Ton | 4000000 Ton | 0.0 |
| | Jumlah Pembangunan Sumur Bor | Unit | 15 Unit | 3.0 |
| 4 | % Pertambangan Tanpa Izin | % | 31.49 % | 6.56 |
| 5 | % Pelayanan Usaha Minerba dan Air Tanah | % | 60% | 60.0 |
| 20 | Jumlah Izin/Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan | Izin / Rekomtek | 52 Izin/Rekomtek | 26.0 |
| | Jumlah izin Rekomendasi teknis pemanfaatan minerba yang diterbitkan | Izin / Rekomtek | 289 Izin/Rekomtek | 120.0 |
| | Jumlah Izin/Rekomendasi teknik pemanfaatan EBT dan ketenagalistrikan yang diterbitkan | Izin / Rekomtek | 121 Izin/Rekomtek | 93.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % Kehadiran pegawai | % | 100% | NA |
| | Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya | % | 100% | NA |
| | Perdagangan | | | |
| | Dinas Perdagangan | | | |
| 1 | Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri | Pameran | 4 Pameran | 4.0 |
| | Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha (Prioritas) | MoU | 2 MoU | 2.0 |
| 2 | Nilai Total Ekspor | Rp (Milyar) | Rp 1358097840 (Milyar) | 1,483,847,640.0 |
| | Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas) | Juta \$ US | 135809784 Juta \$ US | 1,393,307,784.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|-----------|--------------|--------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina | % | 0.98 % | 0.98 |
| 4 | Jumlah izin usaha perdagangan | Izin | 5 Izin | 10.0 |
| | Nilai perdagangan dalam negeri | Rp | 30000000 Rp | 50,000,000.0 |
| 8 | Peningkatan jumlah pemasaran komoditi ekspor | Jenis | 15 Jenis | 15.0 |
| | Peningkatan jumlah informasi pemasaran komoditi ekspor | Informasi | 15 Informasi | 15.0 |
| | Peningkatan jumlah lembaga kerjasama promosi produk perdagangan | Lembaga | 10 Lembaga | 10.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Perindustrian | | | |
| | Dinas Perindustrian | | | |
| 1 | Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya | Sentra | 2 Sentra | 2.0 |
| | Jumlah kawasan pergudangan yang tertata | Kawasan | 2 Kawasan | 2.0 |
| | % Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas) | % | 10% | 10.0 |
| 2 | Jumlah produk industri yang memenuhi standar | Produk | 4 Produk | 4.0 |
| 3 | Cakupan kelompok bina kelompok pengrajin | % | 5% | 5.0 |
| | % Industri kecil dan menengah yang berkembang | % | 10% | 10.0 |
| 4 | Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan | Industri | 1 Industri | 1.0 |
| | Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar | Unit | 1 Unit | 1.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Transmigrasi | | | |
| | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | |
| 1 | % Penempatan Transmigrasi | % | 100% | 90.0 |
| | Kelautan dan Perikanan | | | |
| | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas) | Rp | 19,793,772,99 4,810 Rp | 23,349,367,966, 522.80 |
| 2 | Jumlah produksi perikanan tangkap | Ton | 374.981 Ton | 799,806.22 |
| | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 5,088,024 Ton | 7,331,352.53 |
| | Jumlah produksi garam rakyat | Ton | 95,735.52 Ton | 167,005.70 |
| 3 | Volume ekspor produk KP | Ton | 158,053.95 Ton | 310,041.46 |
| | Nilai ekspor produk KP | US\$ Juta | 411872.38 US\$ Juta | 650,839.79 |
| | Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi | Ton | 28,277.77 Ton | 37,179.60 |
| 4 | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | Ha | 1,008,321.53 Ha | 2,003,913.42 |
| | % Penurunan tindakan IUU Fishing | % | 8.03 % | 0.0 |
| | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | % | 40% | 10.87 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Sekretariat Daerah | | | |
| | Biro Hukum dan HAM | | | |
| 7 | Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi | Perda | 12 Perda | 12.0 |
| | Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi | Perda | 50 Perda | 50.0 |
| 8 | % LHP aparat fungisional prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100.0 |
| 9 | Jumlah produk hukum yang disosialisasikan | Jenis | 2 Jenis | 0.0 |
| 10 | Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum (Perda, Pergub, Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| | Biro Pemerintahan | | | |
| 11 | Cakupan ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah | % | 100% | 100.0 |
| | Rata-Rata Capaian SPM | % | 100% | 100.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|-------------|----------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kabupaten/Kota | | | |
| | Cakupan Fasilitasi Administrasi Pengangkatan Kepala Daerah, Pengangkatan dan Pergantian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota | % | 100% | 100.0 |
| 13 | Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah | % | 100% | 100.0 |
| 14 | Peningkatan jumlah kerjasama daerah | MoU | 22 MoU | 20.0 |
| 22 | % Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| | Biro Humas dan Protokol / Biro Administrasi Pimpinan | | | |
| 18 | Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa | Media Massa | 25 Media Massa | 0.0 |
| 19 | Cakupan ketersediaan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah | Jenis | 3 Jenis | 0.0 |
| 21 | Cakupan Teknologi Informasi yang digunakan | % | 100% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Biro Perekonomian / Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | | | |
| 16 | Peningkatan Jumlah Lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing | Lembaga | 8 Lembaga | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa / Biro Pengadaan Barang/Jasa | | | |
| 3 | % Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBD | % | 100% | 0.0 |
| | % Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBN | % | 100% | 0.0 |
| 4 | % Kesesuaian pengadaan barang | % | 100% | 0.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|----------|-------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dan jasa dengan rencana | | | |
| | % Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa | % | 100% | 0.0 |
| 28 | % Capaian Kinerja Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan | % | 100% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| | Biro Kesejahteraan | | | |
| 2 | % Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) | % | 1.25 % | 0.0 |
| | % Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas) | % | 10% | 35.14 |
| | % Penurunan Kejahatan terhadap Kesusastraan (Prioritas) | % | 10% | 0.0 |
| 5 | % Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan | % | 20% | 20.0 |
| 6 | % Pelaksanaan Koordinasi dibidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan dan seni budaya | % | 20% | 20.0 |
| | % Pelaksanaan koordinasi dibidang perlindungan dan kerawanan sosial | % | 20% | 20.0 |
| | % Pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | % | 20% | 20.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Biro Organisasi dan Tata Laksana | | | |
| 1 | Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota (Prioritas) | % | 100% | 5.0 |
| 17 | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov. Sulsel | OPD Prov | 53 OPD Prov | 4.0 |
| | Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel | OPD Prov | 53 OPD Prov | 6.0 |
| | Cakupan Fasilitasi Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel | OPD Prov | 53 OPD Prov | 5.0 |
| | Cakupan Fasilitasi Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel | Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 3.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|--------------|-----------------|----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatralaksana Lingkup Prov.Sulsel | Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 4.0 |
| | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatralaksana Lingkup Prov.Sulsel | UPT | 142 UPT | 9.0 |
| | Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatralaksana Lingkup Prov.Sulsel | Cabang Dinas | 34 Cabang Dinas | 3.0 |
| | Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel | Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 4.0 |
| 29 | Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi | OPD Prov | 53 OPD Prov | 6.0 |
| | Cakupan Pembinaan SAKIP Kab/Kota | Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 5.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 15.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 5.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 5.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 5.0 |
| | Biro Umum dan Perlengkapan / Biro Umum | | | |
| 23 | Cakupan jumlah administrasi ketatausahaan dan naskah dinas yang dikelola | Jenis | 20 Jenis | 17.0 |
| 24 | Cakupan jumlah pelayanan keruماhtangan dan perlengkapan | Pelayanan | 2160 Pelayanan | 1,911.0 |
| 25 | Cakupan jumlah barang dan jasa yang terkelola | Unit | 1068 Unit | 860.0 |
| 26 | Cakupan jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah | Dokumen | 15295 Dokumen | 11,595.0 |
| 27 | Cakupan jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pelayanan | 11654 Pelayanan | 8,662.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 75.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 85.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah | | | |
| 20 | Cakupan ketersediaan data aset yang akurat | Jenis | 6 Jenis | 0.0 |
| | Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sertifikat | % | 52% | 0.0 |
| | Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan | % | 24% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi | % | 100% | 0.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|--------------|----------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | perkantoran | | | |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | Sekretariat Dewan | | | |
| | Sekretariat DPRD | | | |
| 1 | % Usulan reses yang diakomodir | % | 100% | 100.0 |
| 2 | % Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD | % | 100% | 90.38 |
| 3 | Cakupan anggota DPRD yang kompeten dibidangnya | % | 100% | 78.78 |
| 4 | Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya | Ranperda | 16 Ranperda | 13.36 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 90.70 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 62.14 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 83.38 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 37.52 |
| | PENUNJANG URUSAN | | | |
| | Perencanaan Pembangunan | | | |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | |
| 1 | % Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas) | % | 100% | 100.0 |
| | % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas) | % | 100% | 100.0 |
| | % Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas) | % | 97.5 % | 97.50 |
| 2 | Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas) | Kawasan | 3 Kawasan | 6.0 |
| 3 | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rekomen dasi | 10 Rekomendasi | 20.0 |
| 4 | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian | Rekomen dasi | 8 Rekomendasi | 16.0 |
| 5 | Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan | Rekomen dasi | 4 Rekomendasi | 8.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|--------------|---------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam | Rekomen dasi | 4 Rekomendasi | 8.0 |
| 6 | Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya ke dalam dokumen Perencanaan | Rekomen dasi | 4 Rekomendasi | 8.0 |
| | Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya | Rekomen dasi | 4 Rekomendasi | 8.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 101.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Keuangan | | | |
| | Badan Pendapatan Daerah | | | |
| 5 | Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling | % | 100% | 100.0 |
| 6 | % Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bapenda | % | 5% | 5.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah / Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | |
| 1 | Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah | | 1 | 1.04 |
| | Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung | | 0.43 | 0.25 |
| | % Belanja Modal terhadap total APBD | % | 12% | 10.32 |
| | % Belanja Pendidikan terhadap total APBD | % | 20% | 46.74 |
| | % Belanja Kesehatan terhadap total APBD | % | 10% | 11.12 |
| | % Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD | % | 70% | 79.96 |
| | % Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD | % | 16% | 17.20 |
| | % Belanja Langsung terhadap Total APBD | % | 30% | 20.04 |
| | % Program/Kegiatan yang tidak terlaksana | % | 0% | 0.0 |
| | % SILPA | % | 2% | 3.48 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|--------|-------------|----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| 2 | % Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah | % | 98% | 69.77 |
| | Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah | Hari | 2 Hari | 2.0 |
| 3 | % Tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan | % | 100% | 0.0 |
| | % Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu | % | 100% | 100.0 |
| 4 | % Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu | % | 100% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 61.36 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 21.12 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 22.26 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 30.0 |
| 20 | Cakupan ketersediaan data aset yang akurat | Jenis | 6 Jenis | 0.0 |
| | Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sertifikat | % | 52% | 0.0 |
| | Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan | % | 24% | 0.0 |
| | Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) | | | |
| | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| | Badan Kepegawaian Daerah | | | |
| 2 | Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas) | % | 75% | 75.0 |
| 3 | % Terisinya formasi | % | 100% | 100.0 |
| 4 | % Pegawai yang menerima penghargaan | % | 100% | 100.0 |
| | Jumlah pegawai yang menerima tunjangan tambahan penghasilan | Orang | 26000 Orang | 26,000.0 |
| 5 | % Pegawai yang menerima sanksi disiplin | % | 100% | 100.0 |
| 6 | % Kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar yang telah ditentukan | % | 100% | 100.0 |
| 7 | Cakupan pegawai yg direkrut sesuai dengan usulan formasi CPNS | % | 100% | 100.0 |
| | Cakupan ketersediaan data dan informasi kepegawaian | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|---|--------------|------------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 90% | 90.0 |
| | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | |
| 1 | Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas) | % | 100% | 100.0 |
| 11 | Cakupan ketersediaan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan | % | 100% | 0.0 |
| 12 | Cakupan pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar ISO | % | 100% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |
| | Penelitian dan Pengembangan | | | |
| | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah / Badan Perencanaan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | |
| 1 | % Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas) | % | 20% | 20.0 |
| 2 | Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbangda dan pemanfaatan iptek daerah | Rekomen dasi | 9 Rekomendasi | 17.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 0.0 |
| | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | |
| | Badan Penghubung Daerah | | | |
| 7 | % Pelayanan tamu daerah | % | 100% | 0.0 |
| 8 | % Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah | % | 100% | 0.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 0.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 0.0 |
| | PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| | Inspektorat Daerah | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Tahun 2020 | |
|-----|--|----------------|-------------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Opini LKPD dari BPK RI (Proritas) | % (Opini WTP) | 100 % (Opini WTP) | 100.0 |
| 2 | Hasil EKPPD Prov. Sulsel | % | 100% | 100.0 |
| | % TLHP BPK | % | 74% | 70.88 |
| | Jumlah Kab/Kota yang hasil evaluasi SAKIP > CC | Kab/Kota | 4 Kab/Kota | 3.0 |
| | % TLHP APIP | % | 76% | 64.56 |
| | Jumlah Kab/Kota yang hasil EKPPD > Tinggi | Kab/Kota | 24 Kab/Kota | 48.0 |
| 3 | Jumlah OPD/Unit Kerja yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas | OPD/Unit Kerja | 8 OPD/Unit Kerja | 13.0 |
| 5 | % Pengaduan Masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100.0 |
| | % Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Walikota yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 88.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 94% | 94.0 |
| | Pemerintahan Umum | | | |
| | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | |
| 1 | Cakupan wilayah konflik yang terpetakan | % | 20% | 20.0 |
| 2 | % Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat | % | 15% | 10.0 |
| 3 | Cakupan Jumlah konflik antar umat beragama dan etnis | Kasus | 5 Kasus | 5.0 |
| 4 | Cakupan Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi | % | 20% | 20.0 |
| 5 | % Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu | % | 78% | 78.21 |
| | Cakupan Partai Politik peserta Pemilu | Parpol | 16 Parpol | 16.0 |
| 6 | % Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara | % | 20% | 20.0 |
| 50 | % Pemenuhan administrasi perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 51 | % Pemenuhan sarana prasarana perkantoran | % | 100% | 100.0 |
| 52 | % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | % | 100% | 100.0 |
| 53 | % ASN berkinerja sangat baik | % | 100% | 100.0 |

Sumber : E_Monev Tahun 2021, diolah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Tabel IX.5
Target Indikator Kinerja Kunci
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2023
(Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020)

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|--------|--------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1 | KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | | | | | |
| 1 | 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian | | | | | |
| 1 | 1 | Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan | % | 90,20 | 90,81 | 90,84 |
| 1 | 1 | Angka Melek Huruf (AMH) | % | 95,91 | 95,93 | 95,95 |
| 1 | 1 | Persentase Balita Stunting | % | 24,59 | 21,59 | 18,59 |
| 1 | 1 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | % | 61,72 | 61,91 | 62,1 |
| 1 | 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 62,61 | 62,8 | 62,99 |
| 1 | 1 | Persentase penduduk yang bekerja | % | 94,69 | 94,77 | 94,84 |
| 1 | 1 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | % | 36,97 | 37,5 | 38,03 |
| 1 | 1 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | % | 42,07 | 42,3 | 42,48 |
| 1 | 1 | Opini BPK | OPINI | WTP | WTP | WTP |
| 1 | 1 | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | % | 85,3 | 86,2 | 87,1 |
| 1 | 1 | Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang) | % | 456,3 | 90 | 100 |
| 1 | 1 | Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang) | % | 6,97 | 86,66 | 100 |
| 1 | 1 | Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB | % | 23,94 | 24,12 | 24,29 |
| 1 | 1 | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB | % | 8,69 | 9,38 | 10,07 |
| 1 | 1 | Produksi sektor pertanian | Trilyun Rp | 125,64 | 154,59 | 183,34 |
| 1 | 1 | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB | % | 1,89 | 1,9 | 1,92 |
| 1 | 1 | Produksi sektor perkebunan | Trilyun Rp | 11 | 12,69 | 14,37 |
| | | | | | | 67,83 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----|--|--------|-----------------------------|-------|-------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 19 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB | % | 92,36 | 93,55 | 94,74 | 94,74 |
| 1 | 20 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB | % | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| 1 | 21 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB | % | 6,72 | 7,18 | 7,63 | 7,63 |
| 1 | 22 Kontibusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB | % | 9,81 | 10,14 | 10,46 | 10,46 |
| 1 | 23 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | 14,95 | 15,22 | 15,49 | 15,49 |
| 1 | 24 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | % | 8,3 | 8,3 | 8,31 | 8,31 |
| 1 | 25 Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri | % | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,8 |
| 1 | 26 Pertumbuhan PDRB Industri | % | 6,8 | 7,71 | 8,63 | 8,63 |
| 2 | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB | | | | | |
| 2 | PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 2 | PENDIDIKAN | | | | | |
| 2 | 1 1 Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran | % | 60,25 | 61,15 | 62,00 | 62,00 |
| 2 | 1 2 Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok) | % | 91,45 | 92,90 | 93,90 | 93,90 |
| 2 | 1 3 Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama | % | 54,25 | 55,60 | 57,25 | 69,56 |
| 2 | 1 4 Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK | % | 80 | 81 | 82 | 82 |
| 2 | 1 5 Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah | Rasio | 1:13 | 1:13 | 1:13 | 1:13 |
| 2 | 1 6 Persentase Guru SMA yang bersertifikat | % | 52,00 | 52,65 | 53,20 | 53,20 |
| 2 | 1 7 Persentase Guru SMK yang bersertifikat | % | 45,10 | 45,85 | 46,35 | 46,35 |
| 2 | 1 8 Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 1 9 Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra | % | 48,25 | 49,65 | 51,05 | 51,05 |
| 2 | KESEHATAN | | | | | |
| 2 | 2 1 Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan | % | 33 | 50 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|--------|--|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 2 2 | Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi | % | 87 | 90 | 100 | 100 |
| 2 2 3 | Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) | % | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| 2 2 4 | Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) | % | 12 | 12.5 | 13 | 13 |
| 2 2 5 | Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah | % | 80 | 85 | 100 | 100 |
| 2 2 6 | Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 2 7 | Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 2 8 | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | % | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2 2 9 | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 2 10 | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2 2 11 | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik | % | 80 | 95 | 100 | 100 |
| 2 2 12 | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat | % | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 2 2 13 | Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik | % | 65,76 | 75 | 85 | 85 |
| 2 2 14 | Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk | Rasio | 23/100.000 Penduduk | 23/100.000 Penduduk | 23/100.000 Penduduk | 23/100.000 Penduduk |
| 2 2 15 | Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan | % | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 2 2 16 | Persentase tenaga medis yang tersertifikasi | % | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 2 2 17 | Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 2 18 | Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 2 19 | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | % | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 2 2 20 | Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | % | 0 | 90 | 100 | 100 |
| 2 2 21 | Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan | % | 55,9 | 77,4 | 100 | 100 |
| 2 2 22 | Meningkatnya Kompetensi teknis SDM | % | 70 | 85 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|--------|--|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 2 23 | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi | % | 33 | 12 | 24 | 24 |
| 2 2 24 | Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi | % | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 2 2 25 | Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan | % | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 2 2 26 | Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman | % | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 2 2 27 | Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS | % | 66 (16 Kab/Kota) | 75 (18 Kab/Kota) | 85 (20 Kab/Kota) | 100 |
| 2 2 28 | Cakupan Pasien Yang Tertangani Sesuai Standar Pelayanan | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2 3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| 2 3 1 | Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi | % | 77,00 | 78,5 | 80 | 80 |
| 2 3 2 | Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 3 | Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 4 | Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 5 | Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 6 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 7 | Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 8 | Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi | % | | 16 | 16 | 16 |
| 2 3 9 | Persentase Bangunan Pemerintah Yang di Fasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 10 | Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya | Kawasan | 11 Kawasan | 13 Kawasan | 15 Kawasan | 15 Kawasan |
| 2 3 11 | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 72,30 | 74,24 | 75,09 | 75,09 |
| 2 3 12 | Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat | % | 42.72 | 71.79 | 74.25 | 74.25 |
| 2 3 13 | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | Rasio | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | |
|---|--|--------|---|-------|-------|--|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 2 | 3 | 14 | Rasio ketaatan pemanfaatan ruang | Rasio | 0.8 | 1 | 1 |
| PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi | % | 13,69 | 23,42 | 36,37 |
| 2 | 4 | 2 | Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4 | 3 | Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman | % | 91 | 92 | 93 |
| 2 | 4 | 4 | Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman | % | 60 | 80 | 100 |
| 2 | 4 | 5 | persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | % | 14,29 | 57,14 | 100 |
| KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 5 | 2 | Persentase Korban Bencana yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 5 | 3 | Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia | % | 30 | 50 | 100 |
| 2 | 5 | 4 | Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih | % | 50 | 75 | 100 |
| 2 | 5 | 5 | Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 5 | 6 | Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 37 | 40 | 41 |
| SOSIAL | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 6 | 2 | Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 6 | 3 | Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | % | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | 6 | 4 | Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti | % | 100 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | |
|-----|--|---|---|------|--------|--|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 2 | 6 | 5 | Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 6 | 6 | Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 6 | 7 | Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 6 | 8 | Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 6 | 9 | Persentase TMP yang dikelola | % | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| 3 | TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 3 | 1 | TENAGA KERJA | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 1 | 2 | Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja | % | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
| 3 | 1 | 3 | Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan | % | 72,92 | 75,00 | 77,08 |
| 3 | 1 | 4 | Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri | % | 75,00 | 80,00 | 85,00 |
| 3 | 1 | 5 | Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan | % | 3.91 | 4.13 | 4.35 |
| 3 | 1 | 6 | Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas) | % | 58,78 | 59,09 | 59,41 |
| 3 | 1 | 7 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan | % | 57,10 | 50,00 | 60,00 |
| 3 | 1 | 8 | Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek | % | 46,60 | 46,81 | 47,22 |
| 3 | 1 | 9 | Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 1 | 10 | Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan | % | 80,00 | 82,00 | 84,00 |
| 3 | 2 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi | % | 10 | 25 | 35 |
| 3 | 2 | 2 | Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG | % | 65 | 71 | 75 |
| 3 | 2 | 3 | Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi | % | 25 | 37,5 | 50,00 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | | | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3 | 2 | 4 | Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi | % | 25 | 37,5 | 60 | 60 |
| 3 | 2 | 5 | Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate | % | | 85 | 87 | 87 |
| 3 | 2 | 6 | Persentase kabupaten/Kota Layak Anak | % | 58,33 | 75 | 83 | 83 |
| 3 | 2 | 7 | Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi | % | 25 | 37,5 | 50 | 50 |
| 3 | 3 | | PANGAN | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun | % | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 3 | 3 | 2 | Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%): | | | | | |
| | | | * Beras | % | 374,75 | 380,38 | 386,08 | 386,08 |
| | | | * Jagung | % | 52,79 | 55,43 | 58,20 | 58,20 |
| | | | * Kedelai | % | 26,22 | 26,88 | 27,55 | 27,55 |
| | | | Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari) | Kkal/ Kapita/ hari | 3904,1 Kkal/Kapita/hari | 3916,65 Kkal/Kapita/hari | 3.929,20 Kkal/Kapita/hari | 3.929,20 Kkal/Kapita/hari |
| | | | Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari) | gr/Kapita/hari | 143,59 gr/Kapita/ hari | 159,04 gr/Kapita/hari | 174,5 gr/Kapita/hari | 174,5 gr/Kapita/hari |
| 3 | 3 | 3 | Jumlah Daerah Rawan Pangan | | 21 | 20 | 19 | 19 |
| 3 | 3 | 4 | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 4 | | PERTANAHAN | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 4 | 2 | Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 4 | 3 | Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 5 | | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | | |
|-----|--|---|---|-------------|--------|--|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 3 | 5 | 1 | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup | % | 40 | 60 | 100 | 100 |
| 3 | 5 | 2 | Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah | % | 3,95 | 4,59 | 5,40 | 5,40 |
| 3 | 5 | 3 | Persentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi) | % | 85,71 | 92,85 | 100 | 100 |
| 3 | 5 | 4 | Cakupan limbah yang dikelola | % | 97,05 | 97,50 | 98,00 | 100 |
| 3 | 5 | 5 | Persentase ketataan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH | % | 23 | 25 | 26 | 26 |
| 3 | 5 | 6 | Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | % | 48,61 | 73,61 | 100 | 100 |
| 3 | 5 | 7 | Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH | % | 64,29 | 87 | 100 | 100 |
| 3 | 5 | 8 | Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan | Penghargaan | | 5 Penghargaan | 5 Penghargaan | 5 Penghargaan |
| 3 | 5 | 9 | Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 5 | 10 | Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani | % | 72 | 73 | 74 | 74 |
| 3 | 6 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk | % | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 3 | 6 | 2 | Persentase penerbitan KTP | % | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 3 | 6 | 3 | Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 6 | 4 | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 6 | 5 | Persentase Bayi ber akte kelahiran | % | 95 | 97 | 98 | 98 |
| 3 | 6 | 6 | Persentase Pasangan ber akte nikah | % | 31 | 34 | 37 | 37 |
| 3 | 6 | 7 | Persentase penerbitan akta kelahiran | % | 93,70 | 94,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | 6 | 8 | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran | % | 86,20 | 87,37 | 90,00 | 90,00 |
| 3 | 6 | 9 | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | % | 45 | 46 | 47 | 47 |
| 3 | 6 | 10 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 6 | 11 | Persetase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | |
|-----|--|--------|--|-------|---------|--|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 3 | 6 | 12 | Persentase Penyajian Profil Kependudukan | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 7 | | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | |
| 3 | 7 | 1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik) | % | 98,89 | 99 | 100 |
| 3 | 7 | 2 | Persentase peningkatan status desa mandiri | % | 0,88 | 1,10 | 1,33 |
| 3 | 7 | 3 | Persentase pengentasan desa tertinggal | % | 19,95 | 17 | 15 |
| 3 | 7 | 4 | Persentase Desa yang menjalin kerjasama | % | 0,44 | 0,66 | 0,88 |
| 3 | 7 | 5 | Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi | % | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 3 | 7 | 6 | Persentase Desa yang diFasilitasi | % | 15,03 | 20,04 | 25,05 |
| 3 | 7 | 7 | Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) | % | 1,51 | 1,54 | 1,57 |
| 3 | 7 | 8 | Persentase Posyandu aktif; | % | 99,89 | 99,91 | 99,98 |
| 3 | 7 | 9 | Persentase PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 8 | | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| 3 | 8 | 1 | Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB | % | 12,5 | 29,16 | 45,82 |
| 3 | 8 | 2 | Persentase PUS peserta KB Aktif | % | 63,5 | 64,5 | 65,5 |
| 3 | 8 | 3 | Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga | % | 16 | 24 | 25 |
| 3 | 9 | | PERHUBUNGAN | | | | |
| 3 | 9 | 1 | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan | % | 29,20 | 30,80 | 32,40 |
| 3 | 9 | 2 | Persentase Layanan Angkutan Darat; | % | 54 | 56 | 58 |
| 3 | 9 | 3 | Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun | Orang | 365.000 | 485.000 | 605.000 |
| 3 | 9 | 4 | Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik | % | 22 | 22 | 30 |
| 3 | 9 | 5 | Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi | Ruas | 20 | 20 | 20 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-------------|---|----------|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3 9 6 | Jumlah Terminal Bis terkelola | Terminal | 10 | 13 | 16 | 16 |
| 3 9 7 | Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) | Orang | 1.028.000 | 1.074.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| 3 9 8 | Jumlah pelabuhan strategis provinsi | Lokasi | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 9 9 | Persentase pelabuhan yang beroperasi | % | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3 10 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | |
| 3 10 1 | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 3 10 2 | Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 10 3 | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,00 |
| 3 11 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | |
| 3 11 1 | Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam | % | 20 | 30 | 50 | 50 |
| 3 11 2 | Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas | % | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 3 11 3 | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa | % | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 3 11 4 | Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhanya terhadap peraturan perundang undangan | % | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 3 11 5 | Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT | % | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 3 11 6 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi | % | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 3 11 7 | Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | % | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 3 11 8 | Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan | % | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 3 11 9 | Cakupan UMKM yang diberdayakan | % | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 3 11 10 | Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha | % | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 3 11 11 | Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas) | % | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 12 | PENANAMAN MODAL | | | | | |
| 3 12 1 | Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan | % | 75 | 85 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---------------|-----------------------------|------|------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | oleh Investor | | | | | |
| 3 | 12.2 Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun) | (Rp. Triliun) | 3,50 | 4 | 4,5 | 16,54 |
| 3 | 12.3 Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun) | (Rp. Triliun) | 4,50 | 5 | 5,67 | 20,84 |
| 3 | 12.4 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP | % | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 3 | 12.5 Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal | % | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 3 | 12.6 Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 3 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | |
| 3 | 13.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | 13.2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | % | 1,16 | 1,19 | 2,03 | 2,03 |
| 3 | 13.3 Persentase Peningkatan Prestasi olah raga | % | 100 | 0 | 200 | 200 |
| 3 | 13.4 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | % | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 3 | 13.5 Persentase organisasi pramuka aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | STATISTIK | | | | | |
| 3 | 14.1 Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral | % | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 3 | PERSANDIAN | | | | | |
| 3 | 15.1 Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian | % | 35 | 50 | 60 | 60 |
| 3 | KEBUDAYAAN | | | | | |
| 3 | 16.1 Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | % | 1,6 | 2,8 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | 16.2 Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan | % | | 7,5 | 9,4 | 9,4 |
| 3 | 16.3 Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi. | % | 2,8 | 3,9 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | 16.4 Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 0,48 | 0,78 | 1 | 1 |
| 3 | 16.5 Persentase Kunjungan ke musium | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | PERPUSTAKAAN | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|-----------------|--|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 3 | 17.1 | Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik | Orang | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3 | 17.2 | Persentase naskah kuno yang di lestarikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 18 | KEARSIPAN | | | | | |
| 3 | 18.1 | Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 18,87 | 37,74 | 75,47 | 75,47 |
| 4 | | PELAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | | |
| 4 | 1 | PARIWISATA | | | | | |
| 4 | 1.1 | Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan | % | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 1.2 | Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal | % | 12,5 | 12,5 | 20,8 | 20,8 |
| 4 | 1.3 | Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 1.4 | Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 1.5 | Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | 1.6 | Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan | % | 3,18 | 4,09 | 5,45 | 5,45 |
| 4 | 1.7 | Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan | % | 7,4 | 10 | 12 | 12 |
| 4 | 2 | PERTANIAN | | | | | |
| 4 | 2.1 | Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton), | Ton | 7000 | 7000 | 7000 | 26432,55 |
| 4 | 2.2 | Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha) | Ha | 100 | 110 Ha (210 Ha) | 121 Ha (331 Ha) | 331 |
| 4 | 2.3 | Produktifitas Padi | kw/Ha | 48,95 | 49,68 | 50,43 | 50,43 |
| 4 | 2.4 | Produktifitas Jagung | kw/Ha | 54,10 | 54,91 | 55,73 | 55,73 |
| 4 | 2.5 | Produktifitas Kopi | kg/Ha | 588 | 588 | 588,1 | 588,1 |
| 4 | 2.6 | Produktifitas Kakao | kg/Ha | 9.000 | 10.500 | 12.000 | 39.000 |
| 4 | 2.7 | Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian | Unit | 250 | 275 | 300 | 1.655 |
| 4 | 2.8 | Peningkatan Ketersediaan Pupuk | Ton | 298,65 | 310,60 | 323,02 | 1.495,55 |
| 4 | 2.9 | Produksi Daging (ton) | ton | 167.936 | 177.425 | 187.450 | 187.450 |
| 4 | 2.10 | Produksi Telur (Ton) | ton | 191.968 | 202.814 | 214.274 | 214.274 |
| 4 | 2.11 | Produksi Susu (Ton) | Ton | 2.035 | 2.096 | 2.159 | 2.159 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 4 | 2 | 12 | Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.) | Rp | 460.835.232.750 | 463.034.340.435 | 465.893.180.426 | 465.893.180.426 |
| 4 | 2 | 13 | Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.) | Rp | 6.000.000.000 | 7.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 4 | 2 | 14 | Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan | Rp | 29.493.840.000 | 37.059.609.113 | 38.617.836.192 | 38.617.836.192 |
| 4 | 2 | 15 | Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus) | Kasus | 25.063 | 12.532 | 11.279 | 11.279 |
| 4 | 2 | 16 | Persentase Penurunan Serangan OPT (%) | % | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | 2 | 17 | Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%) | % | 76,49 | 78,79 | 81,15 | 81,15 |
| 4 | 2 | 18 | Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan | % | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 4 | 2 | 19 | Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP (%) | Rasio | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | 2 | 20 | Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak | Rasio | 1 : 15 | 1 : 14 | 1 : 13 | 1 : 13 |
| 4 | 3 | KEHUTANAN | | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu | Ton | 283 | 283 | 283 | 2.10596 |
| 4 | 3 | 2 | Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan | M3 | 92.336,62 | 92.336,62 | 92.336,62 | 477.175,12 |
| 4 | 3 | 3 | Persentase Kerusakan Hutan pertahun | % | 17,59 | 16,20 | 14,82 | 14,82 |
| 4 | 3 | 4 | Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas) | % | 57,91 | 61,60 | 65,47 | 65,47 |
| 4 | 3 | 5 | Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata | Jenis | 2 | 2 | 2 | 2 J |
| 4 | 3 | 6 | Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan | % | 15,65 | 16,25 | 16,76 | 16,76 |
| 4 | 3 | 7 | Jumlah DAS yang direhabilitasi | DAS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi | % | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 4 | 4 | 2 | Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) | Ha | 100.000 | 130.000 | 150.000 | 386.146,55 |
| 4 | 4 | 3 | Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) | Ha | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | | |
|-----|--|--------|---|------|-------------|--|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 4 | 4 | 4 | Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga | % | 92 | 93,4 | 95 | 95 |
| 4 | 4 | 5 | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | % | 98,25 | 98,50 | 99 | 99 |
| 4 | 4 | 6 | Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan) | % | 99 | 99,25 | 99,50 | 99,50 |
| 4 | 5 | | PERDAGANGAN | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 5 | 2 | Persentase Penerbitan SKA | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 5 | 3 | Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 5 | 4 | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 5 | 5 | Nilai Ekspor Perdagangan | \$ | 146.674.567 | 158.408.532 | 171.081.215 | 476.164.314 |
| 4 | 5 | 6 | Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 5 | 7 | Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 6 | | PERINDUSTRIAN | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | Persentase pertumbuhan jumlah industri | % | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | 6 | 2 | Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri | % | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 3 | Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS | % | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 7 | | TRANSMIGRASI | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 7 | 2 | Persentase penempatan transmigrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 7 | 3 | Persentase penempatan transmigrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 8 | | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | Produksi garam rakyat | Ton | 46.500 | 47.500 | 48.450 | 48.450 |
| 4 | 8 | 2 | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan | % | 50,17 | 74,08 | 100 | 100 |
| 4 | 8 | 3 | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara | % | 67,29 | 67,30 | 67,31 | 67,31 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-------|---|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | berkelanjutan (%) | | | | | |
| 4 | 8 4 Nilai Produksi Perikanan Tangkap | Rp | Rp. 8.852,48 M | Rp. 9.029,52 M | Rp. 9.210,12 M | Rp. 9.210,12 M |
| 4 | 8 5 Produksi perikanan tangkap | Ton | 396.992,3 | 404.932,2 | 413.030,8 | 413.030,8 |
| 4 | 8 6 Cakupan Bina Kelompok Nelayan | % | 23,89 | 27,07 | 30,25 | 30,25 |
| 4 | 8 7 Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | % | 57,89 | 68,42 | 78,95 | 78,95 |
| 4 | 8 8 Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 25,61 | 26,79 | 27,17 | 27,17 |
| 4 | 8 9 Nilai produksi perikanan budidaya | Rp | Rp. 14.474,73 M | 15.198,47 M | Rp. 15.958,39 M | Rp. 15.958,39 M |
| 4 | 8 10 Produksi perikanan budidaya | Ton | 3.898.767,4 | 4.093.705,8 | 4.298.391,1 | 4.298.391,1 |
| 4 | 8 11 Persentase ketersediaan benur berkualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 8 12 Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | % | 87,48 | 88,73 | 89,85 | 89,85 |
| 4 | 8 13 Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi | Rp | Rp. 304.96 Milyar | Rp. 311,06 Milyar | Rp. 317.28 Milyar | Rp. 317.28 Milyar |
| 4 | 8 14 Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi | Ton | 5.329,0 Ton | 5.436,2 Ton | 5.544,1 Ton | 5.544,1 Ton |
| 4 | 8 15 Persentase Pembinaan mutu produk perikanan | % | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 5 | PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 5 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | |
| 5 1 1 | Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 1 2 | Persentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 1 3 | Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 1 4 | Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas) | % | 35,25 | 35,50 | 35,55 | 35,55 |
| 5 1 5 | Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusastraan (Prioritas) | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | | |
|-----|--|--------|---|------|------|--|-----|-----|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 5 | 1 | 6 | Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan | | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 1 | 7 | Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 1 | 8 | Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 1 | 9 | Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 1 | 10 | Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 1 | 11 | Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2 | | SEKRETARIAT DEWAN | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | Persentase PROLEGDA yang terealisir | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2 | 2 | Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2 | 3 | Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | | | PENUNJANG URUSAN | | | | | |
| 6 | 1 | | PERENCANAAN | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 1 | 2 | Persentase peningkatan capaian kinerja program | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | 1 | 3 | Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM | % | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 6 | 1 | 4 | Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA | % | 80 | 90 | 95 | 95 |
| 6 | 1 | 5 | Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 6 | 2 | | PENGADAAN / KEUANGAN | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2 | 2 | Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD | | |
|-----|--|---|--|------|-------|--|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 6 | 2 | 3 | Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2 | 4 | Persentase Serapan Belanja Daerah | % | 94 | 95 | 96 | 96 |
| 6 | 2 | 5 | Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2 | 6 | Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2 | 7 | Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah | % | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 6 | 2 | 8 | Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat | % | 56 | 57 | 58 | 58 |
| 6 | 2 | 9 | Persentasi Peningkatan PAD | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 3 | KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN; | % | 60 | 63 | 65 | 65 |
| 6 | 3 | 2 | Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta; | % | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | 3 | 3 | Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik | % | 91 | 93 | 95 | 95 |
| 6 | 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | |
| 6 | 4 | 1 | Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| 6 | 5 | 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas) | % | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | 6 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | | | |
| 6 | 6 | 1 | Persentase Pelayanan tamu daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 6 | 2 | Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | | PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 7 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil | % | 70,20 | 75,40 | 79,50 | 79,50 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Target capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Pemeriksaan APIP | | | | | |
| 7 | 1 2 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota | % | 69,59 | 71,04 | 72,50 | 72,50 |
| 7 | 1 3 Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 1 4 Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 1 5 Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 1 6 Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| 8 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | |
| 8 | 1 1 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara | % | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 8 | 1 2 Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu | % | 81,70 | 81,89 | 82,01 | 82,01 |
| 8 | 1 3 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan | % | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 8 | 1 4 Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) | % | 0 | 20 | 40 | 40 |
| 8 | 1 5 Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 1 6 Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat | % | 20 % (64 kasus) | 20 % (48 kasus) | 10 % (40 kasus) | 50 % (40 kasus) |
| 9 | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | |
| 9 | FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI | | | | | |
| 9 | 1 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita | Juta Rp | 34,23 | 36,31 | 38,4 | 167,03 |
| 9 | 1 2 Nilai Tukar Petani | Ribu Rp | 11,386 | 11.613 | 11.841 | 57,117 |
| 9 | 1 3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita | Poin | 18,85 | 19,97 | 21,09 | 21,09 |
| 9 | 1 4 Produktivitas total daerah | Rp/Angk atan Kerja | 84.745.947 | 86.643.579 | 90.557.327 | 90.557.327 |
| 9 | 1 5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa | % | 282,94 | 288,6 | 300,14 | 300,14 |
| 9 | 1 6 Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) | % | 58,04 | 64,76 | 71,48 | 71,84 |

Sumber : OPD Prov. Sulsel Tahun 2021, diolah

9.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel IX.6
Penetapan Target Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023
(Permendagri No.100 Tahun 2018)

| No. | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/ Indikator | Target Nasional | Tahun 2020 | | Target | | | |
|-------|---|--------------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | Target | Capaian | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | PENDIDIKAN | | | | | | | |
| 1.1 | Pendidikan Menengah | | | | | | | |
| 1.1.1 | warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 100% | 100% | 76,62% | 100% | 100% | 100% | |
| 1.2 | Pendidikan Khusus | | | | | | | |
| 1.2.1 | warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus | 100% | 100% | 80 | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | KESEHATAN | | | | | | | |
| 2.1 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | | | | | | | |
| 2.1.1 | Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | Target | | |
|--------------|---|-----------------|------------|---------|------------|------------|------------|--|
| | | | Target | Capaian | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| | mendapatkan layanan kesehatan | | | | | | | |
| 2.2 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | | | | | | | |
| 2.2.1 | Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | PEKERJAAN UMUM | | | | | | | |
| 3.1 | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | | | | | | | |
| 3.1.1 | Percentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | |
| 3.2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | | | | | | | |
| 3.2.1 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | |
| 4.1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi | | | | | | | |
| 4.1.1 | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4.2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi | | | | | | | |
| 4.2.1 | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 5.1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi | | | | | | | |
| 5.1.1 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | SOSIAL | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| No. | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/ Indikator | Target Nasional | Tahun 2020 | | Target | | |
|--------------|---|-----------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | Target | Capaian | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 6.1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | | | | | | |
| 6.1.1 | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | 100% | 100% | 35.12% | 100% | 100% | 100% |
| 6.2 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | | | | | | |
| 6.2.1 | Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar | 100% | 100% | 3.88% | 100% | 100% | 100% |
| 6.3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti | | | | | | |
| 6.3.1 | Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | | | | | | |
| 6.4.1 | Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.5 | Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana provinsi | | | | | | |
| 6.5.1 | Jumlah Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | 100% | 100% | 15.63% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : OPD Prov. Sulsel Tahun 2021, diolah

9.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel IX.7
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2023

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------|------------|---------|-------------------|---------|---------|--|--|--|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN | | | | | | | | | | | |
| TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | RPJMD | % | 12,19 | 8,72 | 9,80 | 9,19 | 9,16 | | | |
| TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinas kesehatan | % | 96 | 86,48 | 97 | 99 | 100 | | | |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Tenaga kerja dan transmigrasi | % | 71,37 | 77,99 | 71,44 | 71,51 | 71,58 | | | |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Dinas sosial | % | 100 | 35.12% | 100 | 100 | 100 | | | |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Dinas sosial | Jiwa | 316.276 | 313,357 | 332,090 | 348,694 | 366,129 | | | |
| TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | | | | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|-----------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | BPS | % | 92 | 92,72 | 92,5 | 93 | 93 |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40 terbawah) | Dinas kesehatan | % | 94 | NA | 94,5 | 95 | 95 |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Dinas kesehatan | % | 73,27 | 73,69 | 73,57 | 73,87 | 74,17 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | BPS | % | 92,42 | 44,39 | 98,63 | 100 | 100 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | BPS | % | 82,14 | 88,96 | 83,97 | 85,80 | 87,64 |
| 1.4.1.(f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40 terbawah) | BPS | % | PM | 11,62 | PM | PM | PM |
| 1.4.1.(i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. | Dinas pendidikan | % | 63,5 | 60,32 | 63,95 | 64,45 | 65 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | BPS | % | 85,5 | 91,07% | 86,2 | 87,37 | 90,1 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|-------------------|------|------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40 terbawah) | BPS | | PM | NA | PM | PM | PM |
| TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | | | | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | | | | | | | |
| | Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | Meninggal : 78 Terdampak : 70.854 | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | - | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | - | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | - | PM | PM | PM |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Lokasi | 18 | 24 | 20 | 23 | 24 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban | Dinas sosial | % | 100% | 1414 | 100 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| | bencana sosial | | | | | | | |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | Dinas sosial | Jiwa | PM | 1414 | PM | PM | PM |
| 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks | 157,55 | 157,55 | 155,05 | 152,55 | 150,05 |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rupiah | PM | 620 Milyar | PM | PM | PM |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 2

TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN

TARGETN 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------|-------|------|------|------|
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | % | 7,25 | 10,14 | 6,89 | 6,55 | 6,22 |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | Dinas kesehatan | % | 21 | 23 | 20,3 | 18,5 | 17 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|--|---|--------|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | % | 4,21 | 4,33 | 4,00 | 3,80 | 3,61 |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | % | 8,55 | 8,12* | 8,12 | 7,71 | 7,32 |
| TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | | | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Dinas kesehatan | % | 27,59 | 30,59% | 24,59 | 21,59 | 18,59 |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Dinas kesehatan | % | 32,5 | NA | 32,0 | 31,5 | 31,0 |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Dinas kesehatan | % | 8,00 | NA | 7,75 | 7,50 | 7,25 |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Dinas kesehatan | % | 27,5 | 13,40% | 27,0 | 26,5 | 26,0 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Dinas kesehatan | % | 77 | 67,80% | 79 | 80 | 85 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | % | 84,4 | 84,9** | 86,4 | 88,3 | 90,3 |
| | Konsumsi ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan | % | 58,16 | 65,5 | 59,32 | 60,51 | 61,72 |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPIAIAN INDIKATOR TUJUAN 3 | | | | | | | | |
| TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH | | | | | | | | |
| TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | | | | | | | | |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | BPS | % | 96 | 97,65 | 97 | 97 | 98 |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Dinas kesehatan | kematian per 100.000 kelahiran hidup | 93/100.000 KH | 86 | 92/100.000 KH | 91/100.000 KH | 90/100.000 KH |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | BPS | % | 92 | 92,72 | 92,5 | 93 | 93 |
| TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas kesehatan | kematian per 1000 kelahiran hidup | 6/1.000KH | 5,44 | 5/1.000KH | 5/1.000KH | 4/1.000KH |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas kesehatan | kematian per 1000 kelahiran hidup | 4/1.000KH | 4,02 | 3/1.000KH | 3/1.000KH | 3/1.000KH |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas kesehatan | kematian per 1000 kelahiran hidup | 6/1.000KH | 5,11 | 5/1.000KH | 5/1.000KH | 4/1.000KH |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Dinas kesehatan | % | 95 | NA | 95,5 | 95,5 | 96 |
| TARGET 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | | | | | | | |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang | Dinas kesehatan | Per 1.000 Penduduk | < 1/1000 Penduduk | 0,103 | < 1/1000 Penduduk | < 1/1000 Penduduk | < 1/1000 Penduduk |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Dinas kesehatan | % | < 0,5% | 0,02 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Dinas kesehatan | Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS) | 207/100.000 Penduduk | 160/100.000 Penduduk | 212/100.00 Penduduk | 217/100.000 Penduduk | 222/100.000 Penduduk |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | Dinas kesehatan | Kabupaten | 3 | 21 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Dinas kesehatan | % | 100 | NA | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Dinas kesehatan | Filariasis : Orang | 81 | NA | 81 | 81 | 81 |
| | | | Kusta : Orang | 1,080 | 696 | 1.026 | 975 | 930 |
| 3.3.5.(a) | Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta | Dinas kesehatan | Kab/ Kota | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 |
| 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | Dinas kesehatan | % | 4 | NA | 4 | 4 | 4 |
| TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|-----------------|---|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Dinas kesehatan | % | 7,08 | 3,41 | 7,06 | 7,04 | 7,02 |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Dinas kesehatan | % | 19,08 | 3,50 | 18,58 | 18,08 | 17,58 |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | Dinas kesehatan | | 10,11 | 2,76 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | Dinas kesehatan | Kab/ Kota | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membayakan | | | | | | | | |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | BNN | % | 1,93% | NA | 1,92 | 1,91 | 1,90 |
| TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | | | | | | | | |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Dinas kesehatan | % | 73,27 | 73,69 | 73,57 | 73,87 | 74,17 |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Dinas kesehatan | % | 17 | 19,02 | 18,5 | 20 | 21,5 |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | DP3A | kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun | 20 | 29 | 18 | 16 | 14 |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR) | DP3A | | 2,25 | 2,44 | 2,20 | 2,15 | 2,10 |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | | | | | | | | |
| 3.8.1(a) | Unmet need pelayanan kesehatan | BPS | % | PM | 5,66 | PM | PM | PM |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk | Dinas kesehatan | Jiwa | 850 Jiwa | 795 Jiwa | 900 Jiwa | 950 Jiwa | 1.000 Jiwa |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Dinas kesehatan | % | 96% | 86,48% | 97 | 99 | 100 |
| TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat | | | | | | | | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun | BPS | % | PM | 24,89 | PM | PM | PM |
| TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua | | | | | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | Dinas kesehatan | % | 87% | 90% | 90 | 93 | 95 |
| TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. | | | | | | | | |
| 3.c.1* | Rasio Tenaga Kesehatan | Dinas kesehatan | Tenaga Kesehatan/100.000 penduduk | 23/100.000 penduduk | 23,4/100.000 penduduk | 23/100.000 penduduk | 23/100.000 penduduk | 23/100.000 penduduk |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|------------|---------|-------------------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| MATRIX BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 4 | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas | | | | | | | | | | | |
| Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.(c) | Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B | Dinas Pendidikan | % | 61,27 | 88,49 | 61,67 | 62,02 | 62,45 | | | |
| 4.1.1.(f) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat | BPS | % | 82,78 | 80,26 | 82,99 | 83,31 | 83,65 | | | |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | BPS | Tahun | 8,38 | 8,38 | 8,40 | 8,42 | 8,44 | | | |
| TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat | BPS | % | 82,78 | 86,44 | 82,99 | 83,31 | 83,65 | | | |
| TARGET 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | BPS | remaja (15-24) | PM | 88,78 | PM | PM | PM | | | |
| | | | dewasa (15-59) | PM | 60,50 | PM | PM | PM | | | |
| TARGET 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | | | | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|--------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | BPS | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat | 84,5 | 102,44 | 87,31 | 89,23 | 91,10 |
| TARGET 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | | | | | | | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun | BPS | % | 95,61 | 92,56 | 95,91 | 96,21 | 96,51 |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun | BPS | (umur 15-24 tahun) | PM | 99,73 | PM | PM | PM |
| | | | (umur 15-59 tahun) | PM | 95,89 | PM | PM | PM |
| TARGET 4.5 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | | | | | | | | |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik | Dinas Pendidikan | % | SD = 53,49 | | SD = 55,09 | SD = 57,16 | SD = 6,02 |
| | | | % | SMP = 79,20 | | SMP = 81,58 | SMP = 52,44 | SMP = 83,60 |
| | | | % | SMA = 80,48 | SMA = 51,02 | SMA = 82,89 | SMA = 83,77 | SMA = 86,29 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|----------------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | % | SMK = 78,85 | SMK = 44,25 | SMK = 81,22 | SMK = 82,08 | SMK = 85,30 |
| | | | % | SLB = 55,53 | | SLB = 57,19 | SLB = 59,54 | SLB = 63,71 |

MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 5

Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER

TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------|---|---|---|---|---|
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kebijakan | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
|--------|---|--|-----------|---|---|---|---|---|

TARGET 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksplorasi seksual, serta berbagai jenis eksplorasi lainnya

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--------|-------|--------|--------|--------|
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 0,65 | 0,042 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 0,0009 | 0,086 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0006 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|---|--|----------|------------|---------|-------------------|------|------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 88 | 100 | 90 | 92 | 95 |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 0,65 | 0,042 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| TARGET 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | | | | | | | | |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 18 tahun | 12,10 | 11,25 | 12,10 | 12,8 | 12,8 |
| | | | 15 tahun | 1,20 | 2,37 | 1,20 | 1,19 | 1,19 |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 23 | 20 | 23 | 24 | 24 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|--|---|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun | 20 | 29,07 | 18 | 16 | 14 |
| 5.3.1.(c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat | BPS | % | 82,78 | 86,44 | 82,99 | 83,31 | 83,65 |
| TARGET 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | | | | | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 16,72 | 25,88 | 16,72 | 16,72 | 16,72 |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 40,4 | 26,42 | 41,9 | 43,4 | 44,9 |
| TARGET 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | | | | | | | | |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 13,8 | 13,12 | 13,63 | 13,46 | 13,29 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|--|--|----------|------------|---------|-------------------|--------|--------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Dinas komunikasi & informatika | % | 68 | 59,18 | 73 | 78 | 83 |
| MATRIX BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 6 | | | | | | | | |
| Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK | | | | | | | | |
| TARGET 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | | | | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan | % | 78,74 | 44,39 | 82,47 | 86,28 | 89,62 |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | m3/detik | 9.040 | 9.000 | 9,648 | 11,509 | 13,370 |
| 6.1.1.(C) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | % | 18,45 | 18,80 | 21.03 | 23.57 | 28.11 |
| TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | | | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | BPS | % | PM | 88,71 | PM | PM | PM |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|---|--|------------------|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan | % | 85,03 | 88,96 | 87,80 | 91,02 | 93,55 |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Dinas kesehatan | Desa / Kelurahan | 3.047 | 3.047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Dinas kesehatan | Desa / Kelurahan | 1,750 | 2,676 | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
| 6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan | Kab/ Kota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| TARGET 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | | | | | | | | |
| 6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan | Kab/ Kota | 13 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| 6.3.2.(a) | kualitas air danau | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | % | 0,68 | 0 | 2.82 | 3.57 | 6.66 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 71,74 | 0 | 72.25 | 72.25 | 72.63 |
| TARGET 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | | | | | | | | |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | Dinas kehutanan | RPDAST | 4 RPDAST | 0 RPDAST | 4 RPDAST | 4 RPDAST | 4 RPDAST |
| 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | jaringan informasi | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 |
| 6.5.1.(e) | Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. | Dinas kehutanan | Ha | 90.425,79 | 90.425,79 | 100,425.79 | 110,425.79 | 120,425.79 |
| 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | wilayah sungai | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | lembaga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TARGET 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. | | | | | | | | |
| 6.6.1.(d) | Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi. | Dinas kehutanan | Ha | 25.508 | 12.510 | 35,508 | 45,508 | 55,508 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|------------|---------|-------------------|----------|----------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.6.1.(e) | Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | Dinas kehutanan | DAS | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 7 | | | | | | | | |
| TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU | | | | | | | | |
| TARGET 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | | | | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | 97,5 | 98,43 | 98 | 98,5 | 99 |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | KWh | 887,87 | 743,58 | 969,88 | 1.056,63 | 1.148,48 |
| 7.1.2.(b) | Rasio penggunaan gas rumah tangga. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | 90 | 89,98 | 92 | 93,4 | 95 |
| TARGET 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. | | | | | | | | |
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | % | 18,59 | 20,74 | 21,28 | 22,99 | 23,66 |
| TARGET 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat. | | | | | | | | |
| 7.3.1* | Intensitas energi primer | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | SBM (setara barrel minyak) | 14,40 | NA | 14,30 | 14,00 | 13,80 |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 8 | | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | | | | |
|---|---|---|-------------|------------|------------|-------------------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | | | | | | | | | | | |
| TARGET 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDRB per kapita | RPJMD | | PM | minus 1,55 | PM | PM | PM | | | |
| 8.1.1.(a) | PDRB per kapita | RPJMD | Juta Rupiah | 56,69 | 56,51 | 59,32 | 62,43 | 66,01 | | | |
| TARGET 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | BPS | % | 45,1 | 43,18 | 44,1 | 45,6 | 45,9 | | | |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | BPS | % | 40,39 | 35,78 | 40,86 | 41,26 | 41,61 | | | |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | BPS | % | 88,33 | 91,73 | 86,63 | 84,93 | 83,23 | | | |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | % | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | | | |
| TARGET 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam) | BPS | % | PM | 19,172 | PM | PM | PM | | | |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | RPJMD | % | 8,18 | 6,31 | 7,2 | 6,95 | 6,27 | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|--|---|--------|------------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.5.2(a) | Tingkat setengah pengangguran | BPS | % | PM | 9,96 | PM | PM | PM |
| TARGET 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. | | | | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | % | 41,53 | 25,48 | 41,22 | 40,91 | 40,59 |
| TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | | | | | | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan | % | 1,01 | 2,82 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan | Jiwa | 81.250 | 6.640 | 87,500 | 93,750 | 100,000 |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan | Jiwa | 1.937.500 | 402.687 | 2.000.000 | 2.062.000 | 2.125.000 |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | % | 18,23 | 3,73 | 18,25 | 18,29 | 18,33 |
| TARGET 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. | | | | | | | | |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | % | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 9 | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api | Dinas perhubungan | Km | 64,42 | 42,7 | 67,78 | 88,56 | 91,92 | | | |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan | Dinas perhubungan | Unit | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |
| TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita | Dinas perindustrian | % | 3,45 | 13,06 | 3,85 | 4,00 | 4,15 | | | |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | Dinas perindustrian | | 4,35 | minus 4,42 | 4,75 | 5 | 5,30 | | | |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | % | 8,16 | 8,16 | 8,51 | 8,92 | 9,33 | | | |
| TARGET 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri | Dinas perindustrian | % | 47 | 9,11 | 51 | 52 | 54 | | | |
| TARGET 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | | | | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|--|--------|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9.4.1(a) | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | % | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| TARGET 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | | | | | | | | |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | % | 60 | 73,39 | 65 | 70 | 75 |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | % | 68 | 85,30 | 73 | 78 | 83 |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | % | 49,59 | 49,59 | 54 | 58 | 62 |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 10 | | | | | | | | |
| TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN | | | | | | | | |
| TARGET 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | | | | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini | RPJMD | Indeks | 0,414 | 0,382 | 0,414 | 0,398 | 0,396 |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok | RPJMD | | 12,19 | 8,99 | 9,80 | 9,19 | 9,16 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| | umur | | | | | | | |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kabupaten | - | - | - | - | - |
| TARGET 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | | | | | | | | |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil | BPS | % | PM | NA | PM | PM | PM |
| TARGET 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | | | | | | | | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Tenaga kerja dan transmigrasi | % | 71,37 | 77,99 | 71,44 | 71,51 | 71,58 |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 11 | | | | | | | | |
| TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN | | | | | | | | |
| TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | | | | | | | | |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | % | PM | 64,24 | PM | PM | PM |
| 11.1.1.(b) | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | kawasan perkotaan | 100 | NA | 100 | 100 | 100 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.1.1.(c) | Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Kota sedang & Kota baru | PM | NA | PM | PM | PM |
| TARGET 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. | | | | | | | | |
| 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Dinas perhubungan | | 28 | 66,45 | 29.20 | 30.80 | 32.40 |
| TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. | | | | | | | | |
| 11.3.1.(a) | Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Kota sedang | PM | 7 | PM | PM | PM |
| 11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Kota | PM | 1 | PM | PM | PM |
| 11.3.2.(a) | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | Bappelitbangda | Institusi/Kota | PM | | PM | PM | PM |
| TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | | | | | | | | |
| 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Kota Pusaka | PM | NA | PM | PM | PM |

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | | | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | % | | | | | |
| | Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | Meninggal : 78 Terdampak : 70.854 | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | - | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | - | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | - | PM | PM | PM |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks | 157,55 | 157,55 | 155,05 | 152,55 | 150,05 |
| 11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kab/Kota | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Sistem | 3 | - | 4 | 5 | 6 |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rupiah | PM | 620 Milyar | PM | PM | PM |
| TARGET 11.6 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | | | | | | | | |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 75 | 30 | 74 | 73 | 72 |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 12 | | | | | | | | |
| TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB | | | | | | | | |
| TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | | | | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | Ton | 3.503.844,44 3 Ton | 3.500.000 ton | 4.091.998,2 20 Ton | 4.589.838,18 4 Ton | 5.089.634,94 7 Ton |
| TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|----------------|--|------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | Ton/ Hari | 45,45 Ton/Hari | 19,97 | 45,50 Ton/Hari | 45,55 Ton/Hari | 45,60 Ton/Hari |

MATRIX BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 13

TUJUAN 13 :PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | % | PM | Meninggal : 78 Terdampak : 70.854 | | | |
| | Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | NA | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | NA | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | NA | PM | PM | PM |
| | Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | PM | NA | PM | PM | PM |
| TARGET 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|--|--|------------------------------|---------------------|------------|---------|-------------------|--------|--------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | Bappelitbangda | Dokumen | 1 | - | - | - | - |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 14 | | | | | | | | |
| TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN | | | | | | | | |
| TARGET 14. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. | | | | | | | | |
| 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha | Dinas kelautan dan perikanan | % | 86,88 | 87,48 | 87,48 | 88,73 | 89,95 |
| TARGET 14. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | | | | | | | | |
| 14.b.1* | Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil | Dinas kelautan dan perikanan | Regulasi/ Kebijakan | 1 | 1 | - | - | - |
| 14.b.1.(a) | Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan | Dinas kelautan dan perikanan | Kab/ Kota | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Dinas kelautan dan perikanan | Nelayan | 11.800 | NA | 11,820 | 11,840 | 11,860 |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 15 | | | | | | | | |
| TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN | | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|--|------------------------------------|---------|---|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | | | | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Dinas kehutanan | % | 56,64 | 56,64 | 56.64 | 56.64 | 56.64 |
| TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. | | | | | | | | |
| 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya | Dinas kehutanan | Ha | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15.2.1.(b) | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem | Dinas kehutanan | Ha | 12.000 Ha | 12.000 Ha | 12.000 Ha | 12.000 Ha | 12.000 Ha |
| 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | Dinas kehutanan | KPH | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| TARGET 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | | | | | | | | |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | Dinas kehutanan | % | 0,56 | 0,27 | 0.78 | 0.99 | 1.21 |
| TARGET 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | | | | | | | | |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 1 DED (Taman keanekaragaman hayati Pucak) | 1 Dokumen | 1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak | 1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak | 1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 16 | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | | | | |
|---|--|--|--------|------------|---------|-------------------|---------|---------|--|--|--|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH | | | | | | | | | | | |
| TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | BPS | Kasus | PM | NA | PM | PM | PM | | | |
| | | POLDA | Kasus | 87 | NA | 68 | 52 | 41 | | | |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | BPS | % | PM | NA | PM | PM | PM | | | |
| | | POLDA | % | 89 | NA | 88 | 92 | 93 | | | |
| TARGET 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksplorasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | | | | | | | | | | |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | % | 1,94 | 0,082 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | | | |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | % | 0,00079 | 0,053 | 0,00079 | 0,00078 | 0,00078 | | | |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | % | 0,030 | 51,31 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | | | |
| TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | | | | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|--|---|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Badan Pengelola Keuangan Daerah | | 95 | NA | 96 | 96 | 97 |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Badan Pengelola Keuangan Daerah | % | 100 | NA | 100 | 100 | 100 |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | % | PM | 4,01 (A-) | PM | PM | PM |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | % | 70,00(BB) | 63,02 (B) | 76,00(BB) | 80,00(A) | 85,00(A) |
| | | | | 10 | NA | 15 | 20 | 24 |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Biro Pembangunan Sekretariat Daerah | % | 100 | 83,39 | 100 | 100 | 100 |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | % | 70,00 (B) | 60,07 (B) | 75,00 (BB) | 78,00 (BB) | 80,00 (A) |
| TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | | | | | | | | |
| 16.7.2.(a) | Indeks Lembaga Demokrasi | BPS | % | PM | NA | PM | PM | PM |
| 16.7.2.(b) | Indeks Kebebasan Sipil | BPS | % | PM | NA | PM | PM | PM |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|--|--|--------|------------|---------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16.7.2.(c) | Indeks Hak-hak Politik | BPS | % | PM | NA | PM | PM | PM |
| TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | | | | | | | | |
| 16.9.1.(a) | Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40 bawah yang memiliki akta kelahiran | BPS | % | PM | 87,87 | PM | PM | PM |
| MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 17 | | | | | | | | |
| TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN | | | | | | | | |
| TARGET 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Badan pendapatan daerah | % | 0,78 | 0,67 | 0.82 | 0.79 | 0.70 |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB | Badan pendapatan daerah | | 0,62 | 0,56 | 0.76 | 0.71 | 0.63 |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik | Badan pendapatan daerah | % | 32,19 | 43,98 | 35.68 | 40.43 | 40.92 |
| TARGET 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | | | | | | | | |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | % | 60 | 73,39 | 65 | 70 | 75 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|---|---|--|--------|------------|---------|-------------------|------|------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| TARGET 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | | | | | | | | |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | % | 52 | NA | 57 | 62 | 67 |
| 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | % | 100 | NA | 100 | 100 | 100 |
| TARGET 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. | | | | | | | | |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | BPS | % | PM | 98,63 | PM | PM | PM |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | BPS | % | PM | 93,51 | PM | PM | PM |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | BPS | % | PM | 11 | PM | PM | PM |
| TARGET 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | | | | | | | | |

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Tahun 2020 | | Target Pencapaian | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | % | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | BPS | % | PM | 100933 | PM | PM | PM |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | BPS | % | PM | 92,69 | PM | PM | PM |

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021 dan RPJMD Pokok Prov. Sulsel, diolah

BAB X PENUTUP

10.1. Pedoman Transisi

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan sasaran dan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2023 yang akan datang merupakan tahun transisi pemerintahan Gubernur M. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Terkait dengan hal tersebut diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2023 yang harus disusun ditahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah Perubahan RPJMD periode 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2023-2028). Program-program pada tahun 2023 masa transisi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

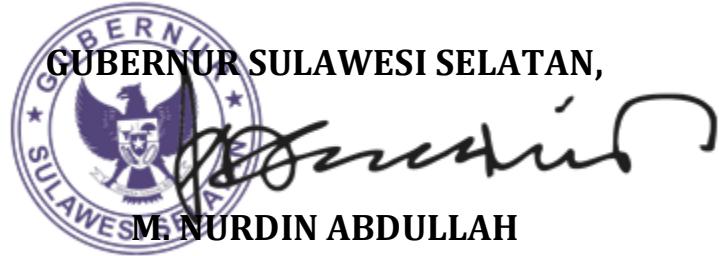
1. Pelaksanaan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Gubernur Sulawesi Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
5. Perubahan RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukukan penyusunan perubahan Renstra-PD sesuai dengan periode RPJMD perubahan ini. Renstra-PD ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah, serta indikator kinerja perangkat daerah. Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan selama periode berlakunya

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

RPJMD perubahan ini. RKPD disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;

7. Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dan melakukan sosialisasi baik aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat sipil guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dimaksud, dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar Telp. (0411) 453 486 Fax 0411) 453 869

email : dokren.sulsel@gmail.com